PERUBAHAN
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
(RPJMD)
KOTA BIMA TAHUN 2018-2023







PEMERINTAH KOTA BIMA

TAHUN 2020

WALIKOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BIMA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 Pasal 2 ayat (3) huruf b bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional berfungsi sebagai bahan penyusunan dan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6042);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5941);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
27. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor 130, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 71);
29. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BIMA

dan

WALIKOTA BIMA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2019 Nomor 215, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 97), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1) Sistematika Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 meliputi :

a. BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

c. BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Memuat gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup: kinerja pelaksanaan APBD yang menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah serta menjelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan serta kerangka pendanaan.

d. BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Memuat kaitan isu global dengan isu strategis pembangunan, permasalahan pembangunan dan isu strategis.

e. BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Menyajikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan dan sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.

f. BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Menguraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

g. BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

h. BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

i. BAB IX : PENUTUP

(2) Penjabaran dan uraian lebih lanjut terkait sistematika Perubahan RPJMD Kota Bima sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Ketentuan dalam lampiran diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 7 Juni 2021

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 7 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,

MUKHTAR

LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2021 NOMOR 234

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BIMA, PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT : (18/2021)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BIMA
NOMOR 01 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BIMA
TAHUN 2018-2023

I. UMUM

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 serta dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya di tingkat Provinsi dan Nasional maupun dokumen perencanaan strategis lainnya di Kota Bima.

Berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengatur bahwa RPJMD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Di samping itu, Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, mengatur bahwa perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila : (a) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri; (b) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri; dan (c) terjadi perubahan mendasar antara lain terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka materi penyusunan perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023, mencakup :

1. Penyesuaian terhadap substansi kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
2. Penyesuaian kembali struktur organisasi Pemerintahan Kota Bima dan struktur urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
3. Penyesuaian terhadap indikator dan target sebagaimana tertuang dalam RPJMD dengan memperhatikan capaian kinerja, kondisi, potensi dan amanat regulasi.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 perlu diubah dengan Peraturan Daerah dan selanjutnya dijadikan sebagai

pedoman dalam penyusunan perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah (renstra PD). Pelaksanaan perubahan RPJMD dijabarkan lebih lanjut ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kota Bima yang memuat Program Prioritas dan kegiatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BIMA NOMOR 106

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR ix

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ..... I- 1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-6
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya I-10
1.3.1 Hubungan RPJMD dengan RPJMN I-12
1.3.2 Hubungan RPJMD dengan RPJMD Propinsi NTB I-12
1.3.3 Hubungan RPJMD dengan RPJPD I-12
1.3.4 Hubungan RPJMD dengan RTRW I-12
1.3.5 Hubungan RPMJD dengan Renstra Perangkat Daerah .. I-13
1.3.6 Hubungan RPMJD dengan RKPD I-13
1.3.7 Hubungan RPJMD Kota Bima dengan RPJMD Kabupaten Tetangga I-13
1.3.8 Kebijakan Umum Pembangunan Berkelanjutan I-14
1.4 Maksud dan Tujuan I-22
1.5 Sistematika Penulisan I-23

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-1
2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah II-1
2.1.1.1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Administrasi II-1
2.1.1.2. Topografi II-2
2.1.1.3. Klimatologi II-3
2.1.1.4. Geologi II-5
2.1.1.5. Hidrologi II-7
2.1.1.6. Kondisi Demografi II-8
2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah II-14
2.1.1.8. Kawasan Rawan Bencana II-22
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-25
2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi. II-25
2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial II-32
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum II-39
2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar II-39
2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar II-56

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan II-69
2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah..... II-73
2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah II-73
2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur II-75
2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi..... II-80
2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia II-87
2.2. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan II-89
2.3. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah..... II-196

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
3.1 Kinerja Keuangan Masa lalu Periode 2015-2019..... III-1
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD III-2
3.1.2. Neraca Daerah III-12
3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2015-2019 ..... III-21
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran III-25
3.2.2. Analisa Pembiayaan III-27
3.3 Kerangka Pendanaan III-31
3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja III-33
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan..... III-40

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH
4.1 Permasalahan Pembangunan IV-1
4.1.1. Perumusan Permasalahan Untuk Penentuan Priotitas dan Sasaran Pembangunan Daerah IV-32
4.1.1.1. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan IV-32
4.1.1.2. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan..... IV-36
4.1.1.3.Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik..... IV-39
4.1.1.4.Belum optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan IV-41
4.1.2. Identifkasi Permasalahan Penyelenggaran Urusan Pemerintahan Daerah IV-43
4.2 Isu Strategis Daerah IV-64
4.2.1. Analisis Isu Strategis Global IV-65
4.2.2. Analisis Isu Strategis Nasional..... IV-158
4.2.3. Analisis Isu Strategis Provinsi NTB 2018-2023 ..... IV-224
4.2.4. Hasil Telaahandap RPJPD Kota Bima Tahun 2018-2028 ..... IV-227
4.2.5. Hasil Telaahan Terhadap KLHS..... IV-230
4.2.6. Hasil Telaahan Terhadap RTRW..... IV-255

4.2.7. Hasil Telahaan Terhadap RPJMD Daerah Sekitarnya IV-269
4.2.8. Analisis Isu Strategis Kota Bima 2018-2023 ..... IV-271

BAB V VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN
5.1. Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023 ..... V-1
5.2. Misi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023 ..... V-5
5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023 ..... V-9

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
6.1. Strategi VI-1
6.2. Arah Kebijakan VI-33
6.3. Program Pembangunan Daerah VI-64

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH VII-1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH VIII-1

BAB IX PENUTUP IX-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah Kota Bima ..... II - 1
Tabel 2.2. Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut... II - 3
Tabel 2.3. Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima ..... II - 3
Tabel 2.4. Keadaan Kecepataan Angin dan Tekanan Udara Dirinci Perbulan di Kota Bima Tahun 2019 ..... II - 4
Tabel 2.5. Keadaan Suhu Udara, Lembab Nisbi dan Tekanan Udara Dirinci perbulan di Kota Bima Tahun 2018 ..... II - 4
Tabel 2.6. Sungai di Kota Bima ..... II - 7
Tabel 2.7. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 8
Tabel 2.8. Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur Tahun 2019 ..... II - 8
Tabel 2.9. Penduduk Kota Bima Berdasarkan Pendidikan Terakhir Tahun 2019 ..... II - 10
Tabel 2.10. Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima Tahun 2014-2019 (Jiwa/km^2) ..... II - 11
Tabel 2.11. Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2014-2018 ..... II - 12
Tabel 2.12. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2014-2018 ..... II - 13
Tabel 2.13. Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2019 ..... II - 13
Tabel 2.14. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2015–2019 ..... II - 26
Tabel 2.15. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2015–2019 ..... II - 27
Tabel 2.16. Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2015-2019 ..... II - 30
Tabel 2.17. PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 31
Tabel 2.18. Nilai inflasi rata-rata Tahun 2015-2019 Kota Bima ..... II - 32
Tabel 2.19. Harapan Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 33
Tabel 2.20. Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 34
Tabel 2.21. Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 34
Tabel 2.22. Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 34
Tabel 2.23. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) Tahun 2015-2019 ..... II - 35
Tabel 2.24. Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 36
Tabel 2.25. Angka Harapan Hidup Kota Bima ..... II - 37
Tabel 2.26. Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2015-2019 .... II - 38
Tabel 2.27. Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 39
Tabel 2.28. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 40

Tabel 2.29. Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima Tahun 2015- 2019.....II - 40
Tabel 2.30.Rasio Guru/Murid Sekolah Negeri di Kota Bima 2015-2019 .II - 41
Tabel 2.31. Rasio Guru/Murid Madrasyah Negeri di Kota Bima 2015-2019 .....II - 42
Tabel 2.32. Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 42
Tabel 2.33. Perkembangan Pelayanan Kesehatan Kota Bima tahun 2015-2019 .....II - 44
Tabel 2.34. Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 46
Tabel 2.35. Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 47
Tabel 2.36. Kondisi Jalan Kota Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 48
Tabel 2.37. Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2015-2019.....II - 48
Tabel 2.38. Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan tahun 2015-2019.....II - 49
Tabel 2.39. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 49
Tabel 2.40. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Tahun 2015-2019.....II - 50
Tabel 2.41. Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 50
Tabel 2.42. Perkembangan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 50
Tabel 2.43. Perkembangan Permukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni di Kota Bima Tahun 2015-2019.....II - 52
Tabel 2.44. Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 52
Tabel 2.45. Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 53
Tabel 2.46. Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Di Kota Bima Tahun 2015-2019.....II - 53
Tabel 2.47. PMKS Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..II - 55
Tabel 2.48. Angka Pengangguran di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 56
Tabel 2.49. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Kota Bima Tahun 2015- 2019.....II - 57
Tabel 2.50. Perkembangan Pola Pangan Harapan Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 58
Tabel 2.51. Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2015-2019 .....II - 59
Tabel 2.52. Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 60
Tabel 2.53. Penanganan Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015-2019 .....II - 60
Tabel 2.54. Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019 .....II - 61
Tabel 2.55. Kendaraan Angkutan Umum di Kota Bima 2015-2019.....II - 63
Tabel 2.56. Jumlah Angkutan Umum Menurut Trayek di Kota Bima tahun 2015-2019 .....II - 63

Tabel 2.57.Ketersediaan Prasarana Perhubungan di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 64
Tabel 2.58. Pertumbuhan UMKM di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 65
Tabel 2.59. Nilai Investasi PMDN di Kota Bima 2015-2019 ..... II - 66
Tabel 2.60. Prestasi dan Prasarana Olah Raga Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 67
Tabel 2.61. Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut di Kota Bima Tahun 2015 – 2019 ..... II - 68
Tabel 2.62. Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut di Kota Bima Tahun 2015 – 2019 ..... II - 68
Tabel.2.63. Perkembangan Pelayanan Urusan Perikanan dan Kelautan Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 69
Tabel 2.64. Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2015-2019 ..... II - 71
Tabel 2.65. Perkembangan Produksi Pertanian di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 72
Tabel 2.66. Angka Konsumsi RT per Kapita di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 74
Tabel 2.67. Persentase Konsumsi RT non-Pangan di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 74
Tabel 2.68. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 75
Tabel 2.69. Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum Tahun 2017-2019 ..... II - 76
Tabel 2.70. Jenis dan Jumlah Bank di Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 77
Tabel 2.71. Jumlah Pelanggan PLN Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 79
Tabel 2.72. Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 79
Tabel 2.73. Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... II - 80
Tabel 2.74. Lama Proses Perijinan Kota Bima Tahun 2019 ..... II - 81
Tabel 2.75. Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2015-2019 ..... II - 88
Tabel 2.76. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bima Tahun 2014-2017 ..... II - 90
Tabel 2.77. Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima Periode Tahun 2014-2017 ..... II - 93
Tabel 2.78. Capaian Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima Periode Tahun 2018-2019 ..... . II - 110
Tabel 2.79. Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal per Urusan ..... II - 133
Tabel 2.80. Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB Kota Bima Tahun 2019 ..... II - 137
Tabel 2.81. Rumusan Permasalahan Pembangunan Kota Bima Berdasarkan Evaluasi Capaian RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019 ..... II-196
Tabel 3.1. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... III - 3
Tabel 3.2 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2015-2019 ..... III - 9
Tabel 3.3. Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Daerah Tahun 2015-2019 ..... III - 11
Tabel 3.4 Pertumbuhan Neraca Pemerintah Kota Bima Tahun 2015-2019 ..... III - 13
Tabel 3.5. Analisa Rasio Keuangan Tahun 2015-2019 ..... III - 21
Tabel 3.6. Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2015-2019 ..... III - 26

Tabel 3.7. Defisit Rill Anggaran 2015-2019 ..... III - 27
Tabel 3.8. Komposisi Penutup Defisit Rill Anggaran 2015-2019 ..... III - 28
Tabel 3.9. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 2015-2019..... III - 29
Tabel 3.10. Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2018-2020 ..... III - 38
Tabel 3.11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun 2021-2023 ..... III - 39
Tabel 3.12. Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2018-2023..... III - 41
Tabel 3.13. Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Meningkat 2018-2020 ..... III - 42
Tabel 3.14. Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Meningkat Tahun 2021-2023 ..... III - 42
Tabel 3.15. Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018-2020 ..... III - 43
Tabel 3.16. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2021-2023 ..... III - 44
Tabel 3.17. Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Tahun 2018-2020 ..... III - 46
Tabel 3.18. Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Daerah Tahun 2021-2023 ..... III - 46
Tabel 4.1. Permasalahan Pembangunan pada Masing-masing Urusan di Kota Bima..... IV - 2
Tabel 4.2. Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Nasional, Provinsi NTB dan Kota Bima ..... IV - 7
Tabel 4.3. Rumusan Permasalahan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat ..... IV - 33
Tabel 4.4. Rumusan Permasalahan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah..... IV - 37
Tabel 4.5. Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik ..... IV - 40
Tabel 4.6. Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan ..... IV - 42
Tabel 4.7. Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah..... IV - 44
Tabel 4.8. Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah ..... IV - 70
Tabel 4.9. Arahan Presiden Beserta Indikator Kinerja dan Target Nasional yang Memerlukan Dukungan Daerah .....IV - 161
Tabel 4.10. Agenda Pembangunan Nasional yang Berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Kota Bima .....IV - 167
Tabel 4.11. Rekomendasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan n Berdasarka Hasil KLHS ..... IV - 232
Tabel 4.12. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bima..... IV - 256
Tabel 4.13. Rencana Pusat Pelayanan dan Sistem Perkotaan Kota Bima..... IV - 263
Tabel 4.14. Fungsi dan Kegiatan Utama Pelayanan di Kota Bima..... IV - 263
Tabel 4.15. Arahan Pemanfaatan Struktur Ruang Kota Bima ..... IV - 265
Tabel 4.16. Arahan Pemanfaatan Pola Ruang Kota Bima ..... IV - 268
Tabel 4.17. Identifikasi Kebijakan RPJMD Daerah Tetangga yang Mempengaruhi Pencapaian Sasaran Strategis Daerah..... IV - 270

Tabel 4.18. Isu Strategis Pembangunan Kota Bima Pada Tiap Urusan .. IV - 271
Tabel 4.19. Matriks Sinkronisasi isu Strategis Pembangunan Global, Nasional, Provinsi NTB dan Kota Bima ..... IV - 280
Tabel 5.1. Perumusan Penjelasan Visi .....V - 3
Tabel 5.2. Perumusan Penjelasan Misi. .....V - 5
Tabel 5.3. Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Bima.....V - 7
Tabel 5.4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023 .....V - 10
Tabel 5.5. Definisi Operasional Variabel dan Formula Perhitungan setiap indikator kinerja sasaran RPJMD Kota Bima .....V - 15
Tabel 5.6. Keselarasan Tujuan Pembangunan Kota Bima dalam RPJMD Tahun 2018 – 2023 dengan Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020 - 2024 .....V - 28
Tabel 6.1. Analisa SWOT Bagi Perumusan Strategi Pembangunan..... VI - 2
Tabel 6.2. Strategi Pembangunan..... VI - 17
Tabel 6.3. Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2018-2023..... VI - 28
Tabel 6.4. Arah Kebijakan Pembangunan ..... VI - 34
Tabel 6.5. Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah ..... VI - 40
Tabel 6.6. Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif.. VI - 65
Tabel 6.7. Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah..... VI - 107
Tabel 6.8. Sinkronisasi Antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTB dengan Prioritas dan Program Pembangunan Kota Bima ..... VI - 124
Tabel 7.1. Program Pembangunan Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif Tahun 2019-2020.....VII - 2
Tabel 7.2. Program Pembangunan Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif Tahun 2021-2023.....VII - 96
Tabel 8.1. Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bima ..... VIII - 2
Tabel 8.2. Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *outcome* Pemerintah Daerah ..... VIII - 6
Tabel 8.3. Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Bima.... VIII - 20
Tabel 8.4. Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal per Urusan ..... VIII -79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Geomorfologi Kota Bima II-5

Gambar 2.2 Peta Rawan Bencana Kota Bima II-23

Gambar 2.3 Peta Revisi Tata Ruang Wilayah Kota Bima tahun 2011-2031 .....II-24

Gambar 3.1 Rata-rata Komposisi Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019 ..... III - 5

Gambar 3.2 Rata-rata Komposisi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 ..... III - 6

Gambar 3.3 Rata-rata Komposisi Pertumbuhan Dana Perimbangan Tahun 2015-2019 ..... III - 7

Gambar 3.4 Rata-rata Komposisi Pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Tahun 2015-2019 ..... III - 7

Gambar 3.5 Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ..... III - 32

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Kota Bima perlu menyiapkan dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang maupun jangka menengah daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2013-2018 telah berakhir. Seiring terpilihnya Kepala Daerah yang baru berdasarkan hasil Pemilukada Tahun 2018, selanjutnya disusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk periode tahun 2018-2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023.

RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 mengakomodir visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023, dalam upaya mencapai visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah Kota Bima yaitu ***"Terwujudnya Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada Tahun 2028***" dengan 6 (enam) misi RPJPD sebagai berikut:

1. **Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri** melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah, peningkatan SDM yang berkualitas, meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
2. **Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing** melalui pembangunan manusia yang berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian,

pengembangan secara berkelanjutan maupun pembangunan bidang infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.

3. **Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan** yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan penciptaan iklim belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat
4. **Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya** dengan membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan local.
5. **Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari** yang diwujudkan melalui upaya-upaya nyata dalam pembenahan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan.
6. **Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan** melalui meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bima tersebut dibagi ke dalam 4 (empat) tahapan pembangunan jangka menengah daerah yaitu tahap I (2008-2013), tahap II (2013-2018), tahap III (2018-2023), dan tahap IV (2023-2028). Dengan demikian, pembangunan daerah Kota Bima tahun 2018-2023 merupakan

tahapan atau periode ketiga dari rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) Kota Bima tahun 2008-2028. Namun dalam Implementasinya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2018-2023 menghadapi Dinamika baik Issue Nasional, Regional maupun Lokal serta kondisi Pandemi Covid19 sehingga perlu diadaptasikan dengan perkembangan dan kebutuhan terkini.

Sesuai dengan amanat RPJPD Kota Bima, arah kebijakan pembangunan tahap ketiga Kota Bima ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat. Arah kebijakan berikutnya adalah, Kesejahteraan rakyat terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan gender; meningkatnya tumbuh kembang optimal, serta kesejahteraan dan perlindungan anak; tercapainya kondisi penduduk tumbuh seimbang; dan mantapnya budaya dan karakter bangsa. Disamping itu, arah kebijakan pembangunan untuk tahapan ketiga dari RPJPD Kota Bima juga ditujukan pada pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang semakin mantap dicerminkan oleh terjaganya daya dukung lingkungan dan kemampuan pemulihan untuk mendukung kualitas kehidupan sosial dan ekonomi secara serasi, seimbang, dan lestari; terus membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam yang diimbangi dengan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dan didukung oleh meningkatnya kesadaran, sikap mental, dan perilaku masyarakat; serta semakin mantapnya kelembagaan dan kapasitas penataan ruang. Arah kebijakan selanjutnya adalah ketersediaan infrastruktur yang sesuai dengan rencana tata ruang ditandai oleh berkembangnya jaringan

infrastruktur transportasi; terpenuhinya pasokan tenaga listrik yang handal dan efisien.

Terwujudnya konservasi sumber daya air yang mampu menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya air dan pengembangan sumber daya air serta terpenuhinya penyediaan air minum untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pemenuhan kebutuhan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung bagi seluruh masyarakat terus meningkat karena didukung oleh sistem pembiayaan perumahan jangka panjang dan berkelanjutan, efisien, dan akuntabel. Kondisi itu semakin mendorong terwujudnya kota tanpa permukiman kumuh.

Pada tahun 2018, penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kota Bima diselenggarakan untuk menetapkan Walikota dan Wakil Walikota Bima periode 2018-2023. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Kota Bima perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 2018-2023.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan indikasi kerangka pendanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Selain itu, Pasal 264 menyebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dalam kurun waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam Strategi

Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Program Prioritas Kepala Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah. Selanjutnya Rancangan Awal RPJMD yang telah disusun oleh Bappeda tersebut akan disampaikan kepada semua perangkat daerah untuk digunakan sebagai rujukan penyusunan Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 260 dan 261 menyebutkan bahwa proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah disusun menggunakan pendekatan teknokratik, partisipatif dan politis, serta menggunakan pendekatan yang mempertemukan perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas. Kajian akademis merupakan salah satu bentuk pendekatan teknokratis dalam perencanaan pembangunan. Pendekatan teknokratis menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

Dalam proses implementasinya, Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 04 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 perlu dilakukan adaptasi dan penyesuaian-penyesuaian atas dinamika yang terjadi.

Beberapa dasar acuan perlunya dilakukan Revisi RPJMD Kota Bima 2018-2023, adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian terhadap Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024;
2. Penyelarasan terhadap arah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Adaptasi terhadap perubahan regulasi perencanaan penganggaran daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Terjadi perubahan Struktur Organisasi Kelembagaan Daerah, yang berimplikasi pada perubahan nomenklatur kelembagaan, tugas

pokok dan fungsi serta aspek tata laksana yang harus dilakukan penyesuaian;

5. Terjadinya wabah Pandemi Virus Covid 19 menyebabkan perlu dilakukannya langkah-langkah yang strategis disemua aspek penyelenggaraan Kepemerintahan sehingga telah dilakukan penyesuaian terhadap Prioritas Program dan kegiatan dalam rangka percepatan penanganan pandemi Virus Covid19;
6. Rekomendasi dari hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Bima.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Bima Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178));
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323));
22. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
23. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2019 Nomor 1 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor (1-108/2019), Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 145);
31. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023;

32. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
33. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);
34. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2016 Nomor 183, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 88) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2020 Nomor 230, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 103);
35. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023.

1.3. Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), rencana pembangunan Kabupaten/Kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana pembangunan provinsi, demikian pula rencana pembangunan provinsi adalah bagian integral dari rencana pembangunan nasional. Dengan demikian dokumen RPJP Nasional merupakan pedoman penyusunan RPJP Provinsi, dan dokumen RPJP Provinsi merupakan pedoman bagi penyusunan RPJP Kabupaten/Kota. Apabila RPJM Nasional merupakan turunan dari RPJP Nasional, maka RPJMD merupakan turunan dari RPJPD. Demikian halnya RPJM Nasional dijabarkan dalam RKP dan RPJMD dijabarkan dalam RKPD yang bersifat perencanaan tahunan. RPJM Nasional juga dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/Lembaga berdurasi 5 tahunan,

dan RPJM Daerah dijabarkan secara implementatif dalam Rencana Strategis OPD.

Dokumen RPJMD juga mengacu dan mempedomani dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bima 2008-2028 dengan visi Mewujudkan Masyarakat yang Beriman, Maju dan Mandiri. Selama ini telah pula disusun berbagai dokumen pendukung perencanaan seperti Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031, Rencana Aksi Daerah Penurunan Angka kemiskinan dan dokumen lainnya, juga sebagai bahan masukan dalam penyusunan RPJMD. Demikian pula bahwa RPJMD Kota Bima mempertimbangkan keterhubungannya dengan RPJMD Kabupaten tetangga yaitu Kabupaten Bima .

Sinergitas RPJMD dengan berbagai dokumen tersebut diatas sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, meliputi :

1. Visi, misi, arah, tujuan, kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan jangka menengah daerah provinsi, selaras dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan serta pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah;
2. Visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah selaras dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang ditetapkan dalam RTRW;
3. Arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah Kota Bima memperhatikan arah dan kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang daerah lain sekitarnya;
4. Jangka waktu pembangunan jangka menengah daerah Kota Bima terhitung sejak Kepala Daerah dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan, dan;
5. Dilakukan sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota.

1.3.1. Hubungan RPJMD dengan RPJMN

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, RPJMD Kota Bima harus mengacu dan selaras dengan RPJPD dan RPJMD Propinsi NTB karena keberhasilan pembangunan di daerah seperti yang direncanakan akan menjadi bagian dari keberhasilan pembangunan propinsi dan nasional. Rencana Pembangunan Nasional dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) yang tertuang dalam RPJM Nasional menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi tujuan pembangunan nasional lima tahunan yang tertuang dalam agenda NAWACITA menjadi payung besar dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2024.

1.3.2. Hubungan RPJMD dengan RPJMD Propinsi NTB

Rencana Pembangunan Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam kurun waktu 5 tahun (2018-2023) yang tertuang dalam RPJMD Propinsi NTB menjadi perhatian Pemerintah Kota Bima dalam merancang pembangunan di daerah sesuai kondisi daerah. Substansi permasalahan dan isu strategis pembangunan propinsi lima tahunan yang tertuang dalam agenda Membangun NTB Gemilang menjadi inti dari rencana pembangunan sebagaimana tertuang dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 yang selanjutnya dirinci dalam rencana tahunan dalam RKPD.

1.3.3. Hubungan RPJMD dengan RPJPD

Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan RPJMD Ketiga dari tahapan pelaksanaan RPJPD Tahun 2008-2028. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan program Kepala Daerah periode Tahun 2018-2023, juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD Tahun 2008-2028.

1.3.4. Hubungan RPJMD dengan RTRW

Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan struktur dan pola penataan ruang yang sesuai dengan RTRW Kota

Bima Tahun 2011-2031 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kota Bima.

1.3.5. Hubungan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra OPD yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra OPD merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap OPD di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) Kota Bima.

1.3.6. Hubungan RPJMD dengan RKPD

Pelaksanaan RPJMD Perubahan Tahun 2018-2023 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja OPD. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan sampai tingkat Kota. Selanjutnya OPD dengan berpedoman pada Renstra OPD dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) OPD.

1.3.7. Hubungan RPJMD Kota Bima dengan RPJMD Kabupaten Tetangga

Penyusunan dan Pelaksanaan Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 Ke RPJMD 2018-2023, sebagai upaya menjaga kesinambungan regional, diperlukan adanya koordinasi pembangunan dengan RPJMD dan RTRW Kabupaten tetangga yakni Kabupaten Bima, baik yang menyangkut teritorial maupun isu strategis regional lainnya terutama isu lingkungan, kemaritiman dan sosial ekonomi.

1.3.8. Kebijakan Umum Pembangunan Berkelanjutan

Pasal 15 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah diberi mandat/kewajiban untuk melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di dalam proses perencanaan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangungan Jangka Menengah dan Kebijakan, Rencana dan Progam (KRP) lainnya, yang memiliki potensi dampak/risiko lingkungan. KLHS dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan daerah melalui pengarusutamaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan mengurangi dampak negatif yang diperkirakan akan terjadi. Hasil KLHS selanjutnya diintegrasian ke dalam RPJMD untuk menjamin bahwa seluruh Kebijakan, Rencana dan/atau Program di dalam RPJMD tersebut telah memperhatikan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dan keberlanjutan pembangunan.

Untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan di Kementerian/Lembaga maupun di daerah, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. TPB bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan meliputi mencakup tujuan dan strategi pencapaian pembangunan berkelanjutan baik skala nasional maupun skala daerah. Kebijakan umum pembangunan berkelanjutan terdiri dari 17 (tujuh belas) tujuan dan 169 (seratus enampuluh sembilan) strategi.

Tujuan 1. Menghapus segala bentuk kemiskinan

Strategi :

1. Memperluas dan menyempurnakan pelaksanaan sistem jaminan sosial terutama jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan
2. Meningkatkan ketersediaan penyediaan pelayanan dasar yang disertai dengan peningkatan kualitas pelayanannya dan jangkauannya bagi masyarakat miskin dan rentan berupa pelayanan administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial dan infrastruktur dasar
3. Meningkatkan kemampuan penduduk miskin dalam mengembangkan penghidupan yang berkelanjutan melalui penguatan asset sosial penduduk miskin, peningkatan kemampuan berusaha dan bekerja penduduk miskin, dan peningkatan dan perluasan akses penduduk miskin terhadap modal.

Tujuan 2. Mengakhiri Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Peningkatan Gizi, dan Mencanangkan Pertanian Berkelanjutan

Strategi:

1. Peningkatan produksi padi dan sumber pangan protein dari dalam negeri;
2. Peningkatan kelancaran distribusi dan penguatan stok pangan dalam negeri;
3. Perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat; dan
4. Mitigasi gangguan iklim terhadap produksi pangan.

Tujuan 3. Menjamin Kehidupan Yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia

Strategi:

1. Akselerasi pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas
2. Mempercepat perbaikan gizi masyarakat
3. Meningkatkan pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan
4. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas
5. Meningkatkan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, dan kualitas farmasi dan alat kesehatan

6. Meningkatkan pengawasan obat dan makanan
7. Meningkatkan ketersediaan, penyebaran, dan mutu sumber daya manusia kesehatan
8. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
9. Menguatkan manajemen, penelitian pengembangan dan sistem informasi
10. Memantapkan pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional (SJSN) bidang kesehatan
11. Mengembangkan dan meningkatkan efektifitas pembiayaan kesehatan.

Tujuan 4. Menjamin Kualitas Pendidikan Yang Adil dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua

Strategi:

1. Melaksanakan wajib belajar 12 tahun;
2. Meningkatkan akses terhadap layanan pendidikan dan pelatihan keterampilan melalui peningkatan kualitas lembaga pendidikan formal
3. Memperkuat jaminan kualitas (quality assurance) pelayanan pendidikan
4. Memperkuat kurikulum dan pelaksanaannya
5. Memperkuat sistem penilaian pendidikan yang komprehensif dan kredibel
6. Meningkatkan pengelolaan dan penempatan guru
7. Meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi
8. Meningkatkan kualitas pendidikan tinggi
9. Meningkatkan relevansi dan daya saing pendidikan tinggi; (10) meningkatkan tata kelola kelembagaan perguruan tinggi.

Tujuan 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak

Strategi :

1. Peningkatan pemahaman dan komitmen tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai tahapan, proses, dan bidang pembangunan, di tingkat nasional maupun di daerah
2. Penerapan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (pprg) di dalam berbagai bidang pembangunan, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, politik, ekonomi, dan hukum.

Tujuan 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air dan Sanitasi Secara Berkelanjutan

Strategi:

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi.

Tujuan 7. Menjamin Akses Terhadap Energi yang Terjangkau, Dapat Diandalkan, Berkelanjutan, dan Modern

Strategi:

1. Meningkatkan produksi energi primer terutama minyak dan gas dari lapangan yang mengalami penurunan tingkat produksinya
2. Meningkatkan cadangan penyangga dan operasional energi
3. Meningkatkan peranan energi baru terbarukan dalam bauran energi; meningkatkan aksesibilitas energi
4. Meningkatkan efisiensi dalam penggunaan energi dan listrik

5. Meningkatkan pengelolaan subsidi BBM yang lebih transparan dan tepat sasaran
6. Memanfaatkan potensi sumber daya air untuk PLTA.

Tujuan 8. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Merata dan Berkelanjutan, Tenaga Kerja yang Optimal dan Produktif, serta Pekerjaan Yang Layak untuk Semua

Strategi :

1. Mengoptimalkan kerjasama global dengan memperhatikan dimensi sosial dan budaya
2. Memperluas lapangan kerja
3. Meningkatkan iklim investasi dan promosi ekspor
4. Meningkatkan sinergi arah kebijakan industri
5. Meningkatkan fleksibilitas pasar tenaga kerja serta pengembangan sistem kerja yang layak
6. Pendalaman kapital dan pendidikan tenaga kerja
7. Peningkatan partisipasi perempuan dalam tenaga kerja.

Tujuan 9. Membangun Infrastruktur Tangguh, Mempromosikan Industrialisasi Inklusif dan Berkelanjutan dan Mendorong Inovasi

Strategi :

1. Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda
2. Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional untuk mendukung sistem logistik nasional dan penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung kerjasama regional dan global
3. Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk mendukung investasi pada koridor ekonomi, kawasan industri khusus, kompleks industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di wilayah non-koridor ekonomi
4. Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban kecelakaan transportasi
5. Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan

6. Mentransformasi kewajiban pelayanan universal (universal service obligation/USO) menjadi broadband-ready dengan cara reformulasi kebijakan penggunaan dana USO yang lebih berorientasi kepada ekosistem broadband (tidak hanya untuk penyediaan infrastruktur dan daerah perdesaan) dan memperkuat kelembagaan pengelola dana USO
7. Mengoptimalisasi pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit sebagai sumber daya terbatas
8. Mendorong pembangunan fixed/wireline broadband termasuk di daerah perbatasan negara
9. mempercepat implementasi e-government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost effective
10. Mendorong tingkat literasi dan inovasi TIK.

Tujuan 10. Mengurangi Ketimpangan Dalam dan Antar Negara

Strategi :

1. Peningkatan penyerapan tenaga kerja miskin dan rentan produkif ke dalam sektor industri pengolahan unggulan
2. Pengembangan aktivitas ranta pengolahan yang bersifat penambahan nilai (value added) untuk mendukung pengembangan ekonomi lokal dan komoditas unggulan berbasiskan agro industri
3. Perbaikan rantai distribusi komoditas unggulan yang berpihak kepada petani kecil
4. Pengembangan ekonomi lokal di pulau-pulau terluar berbasis potensi alam daerah setempat.

Tujuan 11. Membuat Kota dan Pemukiman Penduduk yang Inklusif, Aman, Tangguh, dan Berkelanjutan

Strategi :

1. Perwujudan sistem perkotaan nasional (SPN)
2. percepatan pemenuhan standar pelayanan perkotaan (SPP) untuk mewujudkan kota aman, nyaman, dan layak huni
3. Pembangunan kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana
4. Pengembangan kota cerdas yang berdaya saing dan berbasis teknologi dan budaya lokal

5. Peningkatan kapasitas tata kelola pembangunan perkotaan,

Tujuan 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi Yang Berkelanjutan

Strategi :

1. Inventarisasi dan sinkronisasi kebijakan sektor-sektor prioritas terkait dengan pola konsumsi dan produksi berkelanjutan
2. Menggalakkan penggunaan teknologi bersih untuk meningkatkan efisiensi penggunaan sumberdaya dan mengurangi limbah
3. Penyebaran informasi ketersediaan produk ramah lingkungan bagi konsumen/ masyarakat mengenai manfaat produk tersebut
4. Pengembangan standar produk ramah lingkungan yang terukur
5. Pengembangan peraturan dan standar pelayanan publik dalam penerapan pola konsumsi berkelanjutan.

Tujuan 13. Mengambil Tindakan Segera untuk Memerangi Perubahan Iklim dan Dampaknya

Strategi :

1. Peningkatan pelibatan sektor baik di pusat maupun di daerah untuk melaksanakan kegiatan penurunan emisi dan pengalokasian pendanaannya;
2. Standarisasi kegiatan penurunan emisi di setiap sektor.,
3. Meningkatkan kontribusi swasta dan masyarakat dalam penurunan emisi GRK;
4. Pengembangan dan penerapan insentif fiskal;
5. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan RAN/RAD-GRK dan adaptasi;
6. Pelaksanaan kegiatan dan rencana aksi terkait dengan REDD+, baik yang berdampak langsung, maupun tidak langsung pada penurunan emisi GRK;
7. Pengembangan indeks dan indikator kerentanan, serta penguatan sistem informasi iklim dan cuaca;
8. Pelaksanaan kajian kerentanan dan peningkatan ketahanan (resiliensi) pada sektor yang sensitive serta pelaksanaan pilot adaptasi;

9. Sosialisasi RAN-API dan peningkatan kapasitas daerah dalam upaya adaptasi.

Tujuan 14. Melestarikan Samudera, Laut, dan Sumber Daya Kelautan Secara Berkelanjutan untuk Pembangunan Berkelanjutan
Strategi :

1. Peningkatan sarana dan prasarana dalam mendukung konektivitas laut;
2. Peningkatan sdm, iptek, wawasan dan budaya bahari;
3. Peningkatan tata kelola dan pengamanan wilayah juridiksi dan batas laut Indonesia;
4. Peningkatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan pengendalian kegiatan illegal;
5. Pengelolaan pulau-pulau kecil, terutama pulau-pulau terluar. pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar; (6) peningkatan pengamanan pesisir dan konservasi perairan

Tujuan 15. Melindungi, Memulihkan, dan Meningkatkan Pemanfaatan secara Berkelanjutan Terhadap Ekosistem Darat, Mengelola Hutan Secara Berkelanjutan, Memerangi Desertifikasi, dan Menghentikan dan Memulihkan Degradasi Lahan dan Menghentikan Hilangnya Keanekaragaman Hayati
Strategi :

1. Peningkatan instrumen penegakan hukum; (2) peningkatan efektivitas penegakan hukum; (3) peningkatan efektivitas dan kualitas pengelolaan hutan

Tujuan 16. Meningkatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Terhadap Keadilan Bagi Semua, dan Membangun Institusi yang Efektif, Akuntabel dan Inklusif di Semua
Strategi :

1. Mempromosikan proses pembangunan yang inklusif;
2. Menghormati hak-hak semua kelompok sosial-budaya, minoritas, masyarakat adat, agama;

3. Melestarikan seluruh budaya warisan dan sumber daya alam dan
4. Menghormati hak mereka untuk menentukan dan mewujudkan aspirasi pembangunannya.

Tujuan 17. Memperkuat Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan

Strategi :

1. Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global;
2. Meningkatkan kesiapan publik domestik dan meningkatnya peran (kontribusi) dan kepemimpinan Indonesia di ASEAN;
3. Menguatkan diplomasi ekonomi Indonesia dalam forum bilateral, multilateral, regional dan global;
4. Meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama selatan selatan dan triangular;
5. Meningkatkan promosi dan pemajuan demokrasi dan HAM;
6. Meningkatkan kerjasama ekonomi internasional di tingkat multilateral, regional, dan bilateral dengan prinsip mengedepankan kepentingan nasional, saling menguntungkan, serta memberikan keuntungan yang maksimal bagi pembangunan ekonomi nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.4. Maksud dan Tujuan

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 disusun dengan maksud mengarahkan penyelenggaraan pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional, pelaksanaan pembangunan di Kota Bima sesuai dengan visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota periode 2018-2023 dan selanjutnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan lainnya.

Tujuan penyusunan Dokumen Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan, kebijakan umum, program dan kegiatan pembangunan daerah jangka menengah serta indikator kinerja pembangunan daerah;

2. Menetapkan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Kerja (Renja) OPD dan perencanaan penganggaran;
3. Menjamin terwujudnya keterpaduan antara perencanaan pembangunan kota dengan provinsi serta perencanaan pembangunan nasional.

1.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dokumen Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 Ke RPJMD Tahun 2018-2023 mengacu kepada Permendagri No. 86 Tahun 2017, dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta sistimatika penulisan. Latar belakang mengemukakan pengertian ringkas tentang RPJMD, proses penyusunan RPJMD, kedudukan RPJMD tahun rencana dalam RPJPD, keterkaitan antara dokumen RPJMD dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah. Dasar Hukum Penyusunan memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Sub bab hubungan antar dokumen menjelaskan hubungan RPJMD dengan dokumen lain yang relevan beserta penjelasannya. Keterhubungan dengan dokumen lain, seperti: RPJMN, RPJPD, RPJMD Provinsi, RTRW. Pada sub bab maksud dan tujuan memberikan uraian ringkas tentang tujuan penyusunan dokumen RPJMD bagi Kota Bima dan sasaran penyusunan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bagian ini sangat penting untuk menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja

penyelenggaraan pemerintah daerah. Pada bagian ini diawali dengan pengantar analisis. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum geografis mengenai kondisi geografi daerah, potensi pengembangan wilayah, dan wilayah rawan bencana. Penjelasan dapat dilengkapi dengan tabel, grafik, dan gambar yang mendukung setiap potensi kawasan budidaya yang dimiliki daerah. Selanjutnya, dijelaskan tentang kondisi demografi seperti ukuran, struktur, dan distribusi penduduk serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian serta migrasi. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Bab ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya, dijelaskan gambaran kinerja keuangan daerah yang mencakup: kinerja pelaksanaan APBD yang menguraikan perkembangan pendapatan dan belanja tidak langsung, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah. Kemudian uraian mengenai Neraca Daerah yang sekurang-kurangnya menggambarkan perkembangan neraca daerah, analisis rasio likuiditas, analisis rasio solvabilitas dan analisis rasio aktivitas. Selanjutnya, pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu terkait proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan serta kerangka pendanaan.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen RPJMD karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Oleh karena itu, bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Permasalahan pembangunan yang disajikan

adalah permasalahan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang relevan yang berdasarkan analisis yang merujuk pada identifikasi permasalahan pembangunan daerah dalam perumusan rancangan awal RPJMD. Isu strategis dapat berasal dari permasalahan pembangunan yang dianggap paling prioritas untuk diselesaikan maupun isu dari dunia international, nasional maupun regional. Dalam penyajian isu strategis hal terpenting adalah isu tersebut dijabarkan apa manfaat/pengaruh dimasa datang terhadap daerah tersebut.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Dalam Bab ini menyajikan tentang visi dan misi Kepala Daerah terpilih, tujuan pembangunan dan sasaran yang ingin dicapai di akhir tahun RPJMD.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu diberikan penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Program pembangunan daerah dirumuskan dari masing-masing strategi untuk mendapatkan program prioritas. Program pembangunan daerah menggambarkan kepaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam renstra Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif target, Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

BAB IX PENUTUP

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

2.1.1.1. Kondisi Geografis dan Batas Wilayah Administrasi

Secara astronomis Kota Bima terletak antara $8^0$20'-$8^0$30' Lintang Selatan dan antara $118^0$41' - $118^0$48' Bujur Timur dengan orientasi wilayah berada pada sebelah timur Teluk Bima Pulau Sumbawa. Luas wilayah Kota Bima adalah 222,25 km^2 yang terbagi dalam 5 (lima) kecamatan yaitu Kecamatan Rasanae Barat, Rasanae Timur, Asakota, Mpunda dan Raba dengan batas wilayah:

- Sebelah Utara : Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima
- Sebelah Timur : Kecamatan Wawo Kabupaten Bima
- Sebelah Selatan : Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima
- Sebelah Barat : Teluk Bima

Asakota merupakan kecamatan terluas dengan luas area mencapai 69,03 km2 atau 31 persen dari luas Kota Bima. Pada urutan kedua ada Kecamatan Rasanae Timur dengan luas area mencapai 28,83 persen, selanjutnya Kecamatan Raba dengan luas sebesar 28,67 persen, Kecamatan Mpunda sebesar 6,88 persen. Sementara itu, Rasanae Barat adalah kecamatan dengan luas area paling kecil yaitu 10,14 km2 atau 4,56 persen dari luas Kota Bima.

Tabel 2.1.
Luas Wilayah Kota Bima

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (km^2)
I.	Kecamatan Rasanae Barat	1. Kel. Tanjung 2. Kel. Paruga 3. Kel. SaraE 4. Kel. NaE 5. Kel. Pane 6. Kel. Dara	0,79 0,91 0,48 0,31 0,31 7,34
Jumlah I			10.14
II.	Kecamatan Mpunda	1. Kel. Sambinae 2. Kel. Panggi 3. Kel. Monggonao 4. Kel. Manggemaci	5,43 3,51 0,63 0,52

No.	Kecamatan	Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (km^2)
		5. Kel. Penatoi	0,74
		6. Kel. Lewirato	0,49
		7. Kel. Sadia	0,68
		8. Kel. Mande	0,69
		9. Kel. Santi	0,72
		10. Kel. Matakando	1,87
Jumlah II			15.28
III.	Kecamatan Raba	1. Kel. Penaraga	0,74
		2. Kel. Penanae	5,34
		3. Kel. Rite	1,84
		4. Kel. Rabangodu Utara	0,98
		5. Kel. Rabangodu Selatan	1,43
		6. Kel. Rabadompu Timur	0,54
		7. Kel. Rabadompu Barat	1,66
		8. Kel. Rontu	4,74
		9. Kel. Ntobo	31,19
		10. Kel. Kendo	9,08
		11. Kel. Nitu	6,19
Jumlah III			63.73
IV.	Kecamatan Asakota	1. Kel. Melayu	0,76
		2. Kel. Jatiwangi	18,91
		3. Kel. Jatibaru	17,18
		4. Kel. Kolo	26,49
		5. Kel. Ule	3,27
		6. Kel. Jatibaru Timur	2,42
Jumlah IV			69,03
V.	Kecamatan Rasanae Timur	1. Kel. Kumbe	
		2. Kel. Lampe	7,23
		3. Kel. Oi Fo'o	9,20
		4. Kel. Kodo	5,55
		5. Kel Dodu	7,93
		6. Kel. Lelamase	21,05
		7. Kel. Nungga	11,59
		8. Kel. Oimbo	2,74
Jumlah V			64.07
Jumlah I + II + III + IV + V			222,25

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2018

2.1.1.2. Topografi

a. Ketinggian

Wilayah Kota Bima umumnya didominasi oleh dataran rendah dimana daerah yang berada pada ketinggian antara 0-25 m dpl seluas 9.259 ha atau mencapai 43 persen dari luas Kota Bima. Sementara itu luas tanah dengan

ketinggian 25-50 m seluas 5.161 ha (23,57%) dan di atas 50 m seluas 7.307 ha (33,63%).

Tabel 2.2.
Luas Tanah Menurut Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut

Tinggi Rata-rata dari Permukaan Laut	Luas Tanah (ha)	Persentase Terhadap Luas Kota Bima *(%)*
0 – 25	9.259	43
25 – 50	5.161	23,57
> 50	7.307	33,63
Jumlah	21.727	100,00

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2019

b. Kelerengan

Tingkat kemiringan lahan di Kota Bima bervariasi mulai dari kelompok lahan berjenis datar dengan tingkat kemiringan 0-2% hingga sangat curam dengan tingkat kemiringan >40%. Kota Bima didominasi oleh lahan dengan kemiringan curam dengan kelerengan 15-40^0, yaitu seluas 9.003,33 ha, kemudian lahan sangat curam seluas 6.242,06 ha.

Tabel 2.3.
Luas Lahan Menurut Kemiringan dan Kecamatan di Kota Bima

No	Kecamatan	Datar (0 - 2^0)	Bergelombang (2 - 15^0)	Curam (15 - 40^0)	Sangat Curam (> 40^0)
1	Rasanae Barat	248,78	176,41	164,37	81,97
2	Mpunda	202,63	727,72	616,25	86,32
3	Rasanae Timur	34,33	998,11	3553,95	1577,59
4	Raba	179,61	1287,27	2178,17	2459,83
5	Asakota	369,43	922,11	2490,58	2036,34
J u m l a h		1034,78	4 111,62	9 003,33	6 242,06

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2019

Wilayah yang memiliki tingkat kemiringan curam yang paling luas adalah wilayah Kecamatan Rasanae Timur, sedangkan wilayah yang relatif datar di Kecamatan Asakota dan bergelombang wilayah Kecamatan Raba.

2.1.1.3. Klimatologi

Wilayah Kota Bima beriklim tropis dengan curah hujan rata-rata pada tahun 2019 sebesar 815 mm3/th, di mana curah hujan tertinggi terjadi pada

Bulan Desember yaitu 201,00 mm3 dan terendah pada bulan Juni, Juli dan Agustus yaitu 0,00 mm3. Jumlah hari hujan selama tahun 2019 tercatat 115 hari dengan jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Januari yaitu 25 hari dan terendah pada bulan Juli dan Agustus sebanyak 0 hari hujan.

Tabel 2.4
Keadaan Curah Hujan, Hari Hujan dan Penyinaran Matahari di Kota Bima Tahun 2019

Bu l a n	Curah Hujan (mm3)	Hari Hujan (hh)	Penyinaran Matahari (%)
Januari	171	25	80
Pebruari	141	21	
Maret	126	23	
April	120	15	
M e i	1	2	
Juni	0	1	
Juli	0	0	
Agustus	0	0	
September	2	1	
Oktober	0	1	
Nopvmber	53	6	
Desember	201	20	
Rata-Rata	815	115	80

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

Tabel 2.5
Keadaan Kecepatan Angin dan Tekanan Udara Dirinci per bulan di Kota Bima Tahun 2019

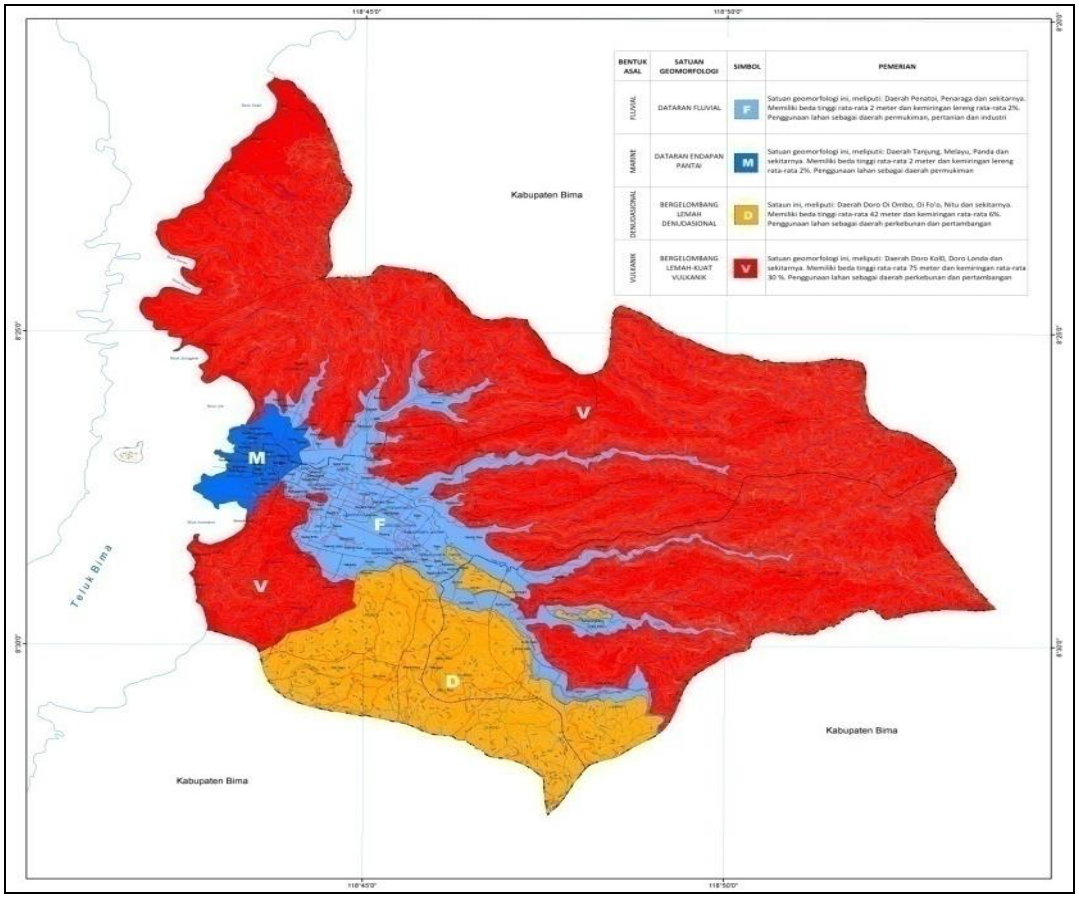
B u l a n	Kecepatan Angin	Tekanan Udara (mb)
1. Januari	2 km/jam	1.013
2. Pebruari		
3. Maret		
4. April		
5. M e i		
6. Juni		
7. Juli		
8. Agustus		
9. September		

B u l a n	Kecepatan Angin	Tekanan Udara (mb)
10. Oktober		
11. November		
12. Desember		
Rata-Rata	2	1013

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

2.1.1.4. Geologi

Wilayah Kota Bima dan sekitarnya secara geomorfologi dan berdasarkan morfometri dan morfogenesa dapat dikelompokan ke dalam 4 satuan geomorfologi, yaitu:



Gambar 2.1. Geomorfologi Kota Bima

1. Satuan geomorfologi dataran fluvial

   Di daerah Kota Bima ini terhampar diantara perbukitan disekitarnya dan Teluk Bima yang terletak di tengah-tengah daerah Kota Bima memanjang

dari Barat ke Timur melalui celah antara Dora Pokah dengan Doro Kolo. Satuan geomorfologi ini menempati ± 20% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian utara dan bagian selatan lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran fluvial, meliputi daerah Jatibaru, Sadia, Sambinae, Monggonao, Paruga, Nae, Santi, Penatoi, Penaraga, Raba Ngodu, Raba Dompu, Kumbe, Sadia, Kendo, Tato, Lampe, dan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran fluvial ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 3 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir dan lempung.

2. Satuan Geomorfologi Dataran Endapan Pantai
   Satuan geomorfologi ini menempati ± 10% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian barat Kota Bima. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai, meliputi: daerah Tanjung, Melayudan sekitarnya. Satuan geomorfologi dataran endapan pantai ini memiliki nilai beda tinggi rata – rata 2 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 2%. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah pasir.

3. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional.
   Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua, batuan sedimen dan setempat-setempat oleh batugamping koral.Satuan geomorfologi ini menempati ± 30% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah lokasi Kota Bima. Satuan geomorfologi bergelombang lemah denudasional, meliputi: daerah Doro Oi'ombo, Doro Oi'si,i, Doro Jati Oi'ifoo, Nitu dan sekitarnya. memiliki nilai beda tinggi rata – rata 42 meter dan kemiringan lereng rata – rata sebesar 6 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah batugamping dan batupasir.

4. Satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik.
   Disusun oleh batuan hasil gunungapi tua berupa breksi, lava, tuf dan batuan beku terobosan. Satuan geomorfologi ini menempati ± 40% dari daerah Kota Bima, yang terhampar luas pada bagian tengah dan bagian selatan lokasi Kota Bima satuan geomorfologi bergelombang lemah–kuat vulkanik, meliputi: daerah Doro Kolo, Doro Lewamori, Doro Lalepa, Doro Londa dan sekitarnya. Memiliki nilai beda tinggi rata – rata 75 meter dan

kemiringan lereng rata – rata sebesar 13 %. Litologi penyusun dari satuan geomorfologi ini adalah andesit dan tuf.

2.1.1.5. Hidrologi

Wilayah Kota Bima dilewati oleh 7 (tujuh) sungai. Sungai-sungai tersebut memiliki hulu di sebelah utara dan timur Kota Bima, dan bermuara menuju Teluk Bima. Sungai terpanjang adalah Sungai Lampe yang memiliki panjang 25 km. Air sungai dimanfaatkan antara lain sebagai sumber air minum dan pengairan/irigasi.

Tabel 2.6.
Sungai di Kota Bima

Nama Sungai		Panjang Sungai (km)	Lebar Sungai (m)	Kecamatan	
				Hulu	Hilir
1	Sungai Lampe	23	22-30	Rasanae Timur	Rasanae Barat
2	Sungai Dodu	12	20	Rasanae Timur	Rasanae Timur
3	Sungai Nungga	22	20	Rasanae Timur	Mpunda
4	Sungai Kendo	15	15	Raba	Rasanae Barat
5	Sungai Ntobo	12	20	Raba	Rasanae Barat
6	Sungai Jatiwangi	16	15	Asakota	Asakota
7	Sungai Romo	2	12	Asakota	Asakota

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2020

Mata air yang ada di Kota Bima teridentifikasi berada di beberapa lokasi, terutama di Kecamatan Rasanae Timur, Raba dan Asakota. Mata air ini sebagian sudah dimanfaatkan oleh warga sebagai air baku air minum dan untuk mata air dengan debit yang besar telah dimanfaatkan oleh PDAM sebagai sumber air baku.

2.1.1.6. Kondisi Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Bima Tahun 2019 mencapai 176.432 jiwa, tahun 2018 mencapai 173.031 jiwa, tahun 2017 mencapai 169.714 jiwa, tahun 2016 mencapai 166.407 jiwa dan tahun 2015 mencapaia 163.101 jiwa. Jumlah penduduk ini setiap tahun pencapaiannya semakin meningkat sesuai dengan proyeksi dari Badan pusat statistik Kota Bima.

Tabel 2.7.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	RASANAE BARAT	35.606	36.328	37.050	39.535	38.516
2	RASANAE TIMUR	18.537	18.913	19.289	18.058	20.053
3	ASAKOTA	31.922	32.529	33.216	32.072	34.531
4	RABA	39.860	40.668	41.476	42.735	43.118
5	MPUNDA	37.176	37.929	38.683	40.631	40.214
	Kota Bima	163.101	166.407	169.714	173.031	176.432

Sumber : Bps Kota Bima 2020

b. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Berdasarkan kelompok umur, kelompok usia muda (0-14 tahun) berjumlah 48.458 jiwa atau 27,46%. Sedangkan penduduk usia produktif (15-64 tahun) berjumlah 118.669 jiwa atau 67,26% dan kelompok usia non produktif (65 tahun keatas) berjumlah 9.305 jiwa (5,27%).

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk Kota Bima Menurut Kelompok Umur
Tahun 2019

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
00-04	8.214	7.835	16.049
05-09	8.180	8.056	16.236
10-14	8.205	7.968	16.173
15-19	8.730	8.902	17.632

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
20-24	9.775	9.353	19.128
25-29	7.501	6.871	14.372
30-34	6.472	6.904	13.376
35-39	5.638	6.258	11.896
40-44	5.440	6.491	11.931
45-49	4.882	5.407	10.289
50-54	3.997	4.369	8.366
55-59	3.189	3.705	6.894
60-64	2.162	2.623	4.785
65-69	1.716	1.888	3.604
70-74	1.136	1.340	2.476
≥ 75	1.376	1.849	3.225
JUMLAH	86.613	89.819	176.432

Sumber : Bps Kota Bima 2020

Dari data komposisi penduduk menurut kelompok umur ini diketahui rasio ketergantungan total adalah sebesar 48,68 persen, artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 49 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 48,68 persen ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda (perbandingan jumlah penduduk umur 0-14 tahun dengan jumlah penduduk umur 15 - 64 tahun) sebesar 27,46 persen, dan rasio ketergantungan penduduk tua (perbandingan jumlah penduduk umur 65 tahun ke atas dengan jumlah penduduk di usia 15-64 tahun) sebesar 5,27 persen. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2019, penduduk usia kerja di Kota Bima masih dibebani tanggung jawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua.

c. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Kota Bima tahun 2019 berdasarkan tingkat pendidikan terakhir yang ditamatkan secara umum didominasi oleh lulusan

SLTA/sederajat yang mencapai 43.868 jiwa atau sebesar 28,68 persen dari total penduduk. Angka penduduk berpendidikan rendah yang merupakan tamatan SD sampai SLTP sederajat mencapai 32.685 jiwa atau 21 persen.

Tabel 2.9.
Penduduk Kota Bima berdasarkan Pendidikan terakhir
Tahun 2019

KECAMATAN	Tdk/Blm Sekolah	Belum Tamat SD/Sederajat	Tamat SD/Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	D-I/II	Akademi/D-III/ Sarjana Muda	D-IV/S-I	S-II	S-III	Jumlah
RASANAE BARAT	7.171	3.749	2.698	3.544	9.783	211	436	2.446	104	2	30.144
RASANAE TIMUR	5.253	2.720	2.238	2.231	4.950	123	200	888	11	0	18.614
ASAKOTA	8.557	4.903	4.975	4.131	8.185	179	353	2.009	111	3	33.406
RABA	9.989	4.832	3.774	3.668	11.416	357	689	3.777	155	6	38.663
MPUNDA	7.798	3.617	2.502	2.924	9.534	340	674	4.468	254	3	32.114
JUMLAH	**38.768**	**19.821**	**16.187**	**16.498**	**43.868**	**1.210**	**2.352**	**13.588**	**635**	**14**	**152.941**

Sumber : Disdukcapil 2020

Jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi diploma sebesar 3.562 atau 2 persen dan jumlah penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi sarjana dan pasca sarjana sebesar 649 atau 0,42 persen, dimana 14 diantaranya adalah berpendidikan S3 (doctor) dan sebanyak 649 berpendidikan S2 (Master). Sedangkan jumlah penduduk yang tidak menamatkan SD masih sangat tinggi yaitu sejumlah 19.821 jiwa atau 12,96 persen dari jumlah penduduk. Adapun jumlah penduduk yang belum/tidak bersekolah sebanyak 38.768 jiwa atau 25,35 persen.

d. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Persebaran Penduduk

Indikator penting untuk melihat persebaran penduduk adalah rasio kepadatan penduduk (*density ratio*), yang sangat berkaitan erat dengan daya dukung (*carrying capacity*) suatu wilayah. Indikator kepadatan penduduk merupakan rasio yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk terhadap luas wilayah. Berdasarkan persebaran penduduk, kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Rasanae Barat dengan jumlah kepadatan 3.899 jiwa/km^2. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah dengan jumlah kepadatan 282 jiwa/km^2.

Tabel 2.10.
Kepadatan Penduduk per Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2015 – 2019 (Jiwa/km²)

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasanae Barat	3.599	3.675	3.750	3.824	3.899
2	Mpunda	2.459	2.511	2.557	2.608	2.659
3	Raba	619	632	645	658	674
4	Rasanae Timur	261	266	271	276	282
5	Asakota	427	437	447	456	465
Jumlah		**718**	**734**	**749**	**764**	**780**

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

Berdasarkan tabel tersebut diatas, terdapat persebaran penduduk yang tidak merata diantara wilayah khususnya antara wilayah bagian barat dan bagian timur wilayah Kota Bima. Hal ini juga dipengaruhi oleh peran dan fungsi kawasan tersebut, dimana pada bagian barat merupakan kawasan subpusat perdagangan dan jasa sedangkan dibagian timur merupakan kawasan pertanian dan kawasan konservasi. Oleh karena itu perlu dilakukan pendekatan pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Kota Bima sehingga persebaran penduduk akan terdistribusi secara merata.

e. Pencatatan Sipil

Untuk mendapatkan data penduduk yang sudah terdaftar dalam catatan sipil, dapat dihitung berdasarkan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kelahiran. Sampai dengan akhir tahun 2019, jumlah penduduk Kota Bima yang memiliki KTP-Elektronik dan telah melakukan penyerapan/perekaman KTP-Elektronik adalah 103.651 jiwa dari 104.547 Wajib KTP atau 99.14%.

f. Ketenagakerjaan

Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang termasuk dalam kategori tenaga kerja adalah penduduk yang telah berusia diatas 15 tahun ke atas. Sedangkan menurut ILO yang termasuk dalam katagori tenaga kerja adalah penduduk yang berusia mulai dari umur diatas 10 tahun. Tenaga kerja dapat diklasifikasikan pada komponen Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Yang dimaksud dengan Angkatan Kerja adalah Penduduk

usia kerja 15 tahun atau lebih yang bekerja atau punya pekerjaan tetapi sifatnya sementara, tidak bekerja dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk Bukan Angkatan Kerja adalah Penduduk Usia Kerja 15 tahun ke atas yang kegiatan utamanya seperti sekolah, mengurus rumah tangga dan lansia (penerima pensiun).

Pada tahun 2019 jumlah angkatan kerja di Kota Bima mencapai 89.930 Jiwa. Dari jumlah tersebut, 95,82 persen angkatan kerja sudah bekerja sedangkan 4,18 persen menganggur. Jumlah penduduk yang masuk dalam kategori bukan angkatan kerja adalah sebesar 35.638 Jiwa yang yang semuanya merupakan penduduk yang masih sekolah.

Tabel 2.11.
Jumlah Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Dirinci Menurut Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	JUMLAH PENDUDUK ≤ 15 THN (JIWA)	114.688	117.003	120.178	122.780	125.568
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	76.867	80.768	86.954	87.544	89.930
	Bekerja	69.063	76.164	83.905	85.455	86.168
	Pengangguran/TPT	7.804	4.604	3.049	2.089	3.762
3	BUKAN ANGKATAN KERJA (JIWA)	37.821	36.235	33.224	35.236	35.638
	Sekolah	11.609	11.215	10.357	10.790	35.638

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2020

Penentuan kategori lapangan pekerjaan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengalami perubahan pada tahun 2019. Sebelumnya, kategori lapangan pekerjaan dibagi berdasarkan sektor: (1) Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri Pengolahan; (4) Listrik, Gas dan Air; (5) Bangunan; (6) Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel; (7) Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi; (8) Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan; serta (9) Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan.

Sementara untuk data tahun 2019, kategori lapangan pekerjaan dibedakan sebagai berikut: (1) Berusaha sendiri; (2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; (3) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh

dibayar; (4) Buruh/Karyawan/Pegawai; (5) Pekerja Bebas; serta (6) Pekerja keluarga/tak dibayar.

Tabel 2.12.
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2014 – 2018

Lapangan Pekerjaan	2014	2015	2016	2017	2018
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan	7.330	9.232	11.303	11.303	10.987
Pertambangan dan Penggalian	768	768	5.145	5.145	3.312
Industri Pengolahan	9.476	7.818	8.015	8.015	8.104
Listrik, Gas dan Air	161	161	703	703	1.051
Bangunan	n/a	4.310	6.750	6.750	6.840
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan, dan Hotel	11.671	18.929	18.314	18.314	19.151
Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	3.943	3.943	4.835	4.835	6.245
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	2.045	2.045	3.186	3.186	4.233
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	21.774	21.857	25.654	25.654	25.532
J u m l a h	**57.168**	**69.063**	**83.905**	**83.905**	**85.455**

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2019

Komposisi penduduk menurut lapangan pekerjaan di Kota Bima pada tahun 2019 didominasi oleh buruh/karyawan/pegawai sebanyak 36.540 jiwa, diikuti oleh pekerja yang berusaha sendiri sebanyak 15.969 jiwa.

Tabel 2.13
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kegiatan Utama Tahun 2019

Lapangan Pekerjaan	2019
Berusaha sendiri	15.969
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	11.992
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	2.703
Buruh/Karyawan/Pegawai	36.540
Pekerja Bebas	8.021

Lapangan Pekerjaan	2019
Pekerja keluarga/tak dibayar	10.943
J u m l a h	**86.168**

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2020

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah Kota Bima dalam pembahasannya mengacu pada arahan rencana penataan ruang Wilayah Kota Bima yang meliputi potensi pengembangan kawasan lindung dan kawasan Budidaya.

A. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam serta sumber daya buatan guna pembangunan berkelanjutan. Jenis kawasan lindung yang direncanakan berdasarkan RTRW adalah sebagai berikut:

1. *Kawasan Hutan Lindung*
2. *Kawasan perlindungan setempat;*
    - Sempadan pantai;
    - Sempadan sungai;
    - Waduk
    - Kawasan sekitar mata air.
3. *Kawasan rawan bencana alam;*
    - Kawasan rawan gempa;
    - Kawasan rawan gerakan tanah dan longsor;
    - Kawasan rawan bencana banjir;
    - Kawasan rawan bencana tsunami;
    - Kawasan rawan bencana gelombang pasang;
4. *Kawasan Cagar Budaya*
5. *Kawasan RTH*

B. Kawasan Budidaya

1. Kawasan Hutan Produksi

Hutan produksi yaitu adalah hutan yang dapat dikelola untuk menghasilkan sesuatu yang bernilai ekonomi dan yang sengaja dikelola olah manusia.

Hutan produksi terbagi menjadi menjadi dua yaitu hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap

- Hutan Produksi Terbatas

  Adapun peruntukan untuk hutan produksi terbatas tersebar di Kecamatan Asakota dan Kecamatan Rasanae timur dengan luas keseluruhan 1.497,00 Ha, yang meliputi hutan Maria (RTK.25), di Kecamatan Rasanae Timur dengan luas 627,00 Ha dan hutan Nangenae Kapenta (RTK.68) seluas 870,00 Ha.

- Hutan Produksi Tetap

  Untuk peruntukan hutan produksi tetap terdapat di Klurahan Asakota dan Kecamatan Mpunda dengan luasan sebesar 1.258 Ha, yang terdiri dari 1.010 Ha hutan Donggomasa (RTK.67) dan 248,00 Ha hutan Nanganae Kapenta (RTK.68).

2. Kawasan Peruntukan Perumahan

Rencana pengembangan perumahan di Kota Bima seluas 1.255 Ha diklasifikasikan dengan perumahan kepadatan tinggi, kepadatan sedang dan kepadatan rendah. Perumahan dengan kepadatan tinggi diarahkan di kawasan pusat kota dan sekitarnya meliputi Kelurahan Merlayu, Tanjung, Paruga, Dara, Sarae, Nae, Monggonao, Manggemaci, Pane, Penatoi, Lewirato, Mande, Santi, Rabadompu Barat, Rabadompu Timur, Rabangodu Utara, Penaraga,dan Kelurahan Sadia. Perumahan dengan kepadatan sedang diarahkan di kawasan subpusat kota dan sekitarnya, meliputi kelurahan Sambinae, Panggi, Rontu, Kumbe, Jatiwangi, Jatibaru, Matakando, Rite, Penanae, dan Rabangodu Selatan. Perumahan dengan kepadatan rendah diarahkan di kawasan pinggiran kota meliputi kelurahan Kolo, Ntobo, Kendo, Nungga, Lelamase, Dodu, Lampe, Oi Fo'o, Nitu, dan Kodo.

3. Kawasan Peruntukan Perdagangan dan Jasa

Perkembangan kawasan perdagangan dan jasa di wilayah Kota Bima keberadaanya memusat di pusat kota, tetapi ada indikasi berkembang secara linier pada jalan-jalan utama kota. Kegiatan perdagangan di wilayah Kota Bima semakin berkembang dan meningkat. Dalam skala regional keberadaan Kota Bima adalah sebagai pusat kegiatan koleksi dan distribusi barang dan

jasa untuk wilayah sekitarnya, khususnya dalam kaitannya dengan pengembangan skala regional. Sehingga keberadaan Kota Bima mempunyai arti yang sangat penting dan perlu diarahkan secara tetap dan memenuhi sasaran. Sesuai dengan kondisi dan tingkat perkembangan Kota Bima maka rencana pengembangan kawasan komersial yang ada di Kota Bima adalah sebagai berikut:

- Untuk pusat perbelanjaan berupa Pasar Raya Bima sebagai pasar grosir. Kegiatan perdagangan ini perlu dilengkapi dengan tempat bongkar muat barang, tempat parkir kendaraan, tempat sampah dan perlengkapan kebersihan lainnya.

  Pusat perbelanjaan berupa plasa dan pasar swalayan di Kota Bima perlu dikembangkan mengingat kecenderungan perkembangan Kota Bima yang semakin pesat. Mengingat keberadaan pasar swalayan ini mempunyai daya tarik yang besar, maka untuk pengembangan yang akan datang diusahakan berada pada kawasan yang baru, seperti di sekitar pusat perkantoran. Dengan demikian diharapkan kegiatan aktivitas kota tidak hanya memusat di pusat kota saja, tetapi mampu berkembang secara merata di seluruh wilayah Kota Bima. Salah satu upaya lain yang perlu diperhatikan adalah mengusahakan keberadaan pasar swalayan dan plasa ini tidak menganggu keberadaan pasar tradisional yang ada.

  Untuk kegiatan perdagangan campuran, seperti garmen/konveksi, elektronik, *dealer* motor, biro perjalanan, jasa seperti bank berkembang secara linier yaitu mulai dari Sultan Hasanuddin, Jalan Sultan Kaharuddin, dan Jalan Gajah Mada serta Jalan Jenderal Soedirman, Pengembangan perdagangan dan jasa ini perlu dibatasi, mengingat keberadaan kawasan perdagangan ini sudah padat dan tidak adanya tempat parkir yang memadai. Sehingga yang perlu dilakukan pada kawasan perdagangan dan jasa ini adalah pengaturan parkir dengan sistem parkir paralel dan parkir menyudut untuk memenuhi kebutuhan parkir pengunjung di kawasan tersebut.

4. Kawasan Peruntukan Perkantoran

Rencana kawasan peruntukan perkantoran di Kota Bima yaitu untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan perkantoran pemerintah dan swasta dengan luas kawasan sebesar 46 Ha. Adapun sebaran kawasan peruntukan perkantoran yaitu berada pada Kelurahan Penatoi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Lewirato, Kelurahan Rabangodu Selatan, Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Menggemaci, Kelurahan Paruga, dan Kelurahan Dara.

5. Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

Lokasi Pengembangan Kawasan industri dan pergudangan di Kota Bima direncanakan:

- Pengembangan Kawasan industri marmer dengan skala nasional dan internasional berlokasi di Kelurahan Oi Fo'o dan sekitarnya dengan luasan 46,94 Ha.
- Pengembangan industri pengolahan hasil perikanan di Kelurahan Tanjung, industri garam rakyat di Kelurahan Dara dan Kelurahan Paruga, dan industri pengolahan hasil pertanian di Kelurahan Jatiwangi dengan luas sebesar 14 Ha.
- Pengembangan Kawasan industri kecil atau industri tenunan tradisional dengan skala regional dan lokal belokasi di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Nitu, Rabadompu Barat, Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Kumbe dan didukung oleh kegiatan industri tenun di seluruh kelurahan di kota.
- Adapun untuk pengembangan kawasan pergudangan dipusatkan di Lingkungan Kampung Sumbawa Kelurahan Tanjung, sampai Lingkungan Bina Baru Kelurahan Dara.

6. Kawasan Peruntukan Pariwisata

Kawasan wisata disini didefinisikan sebagai keberkaitan beberapa obyek atau potensi wisata dalam satu keberkaitan yang umumnya jaraknya berdekatan. Sehingga kawasan wisata tidak didefinisikan sebagai obyek wisata, tetapi lebih pada adanya obyek dan potensi wisata disertai infrastruktur, pusat pelayanan wisata dan akomodasi wisata sebagai satu kesatuan sistem. Pengkajian ini didasarkan pada potensi yang ada, potensi

yang akan datang atau potensi yang akan dikembangkan. Pengembangan wisata ini harus diikuti wisata andalan serta keberkaitan dengan wisata provinsi dan nasional. Rencana arahan lokasi Pengembangan Kawasan wisata di Kota Bima adalah:

a. Pengembangan kawasan wisata alam (pantai/bahari) diarahkan pada kawasan pesisir pantai Ni'u sampai Amahami Kelurahan Dara, kawasan pantai Kolo dan sekitarnya, dengan luas kawasan sebesar kurang lebih 72 Ha.
b. Pengembangan kawasan pariwisata belanja khususnya produk kerajinan dilakukan di Kelurahan Ntobo, Kelurahan Rabadompu Timur dan Kelurahan Nitu.
c. Pengembangan kawasan wisata budaya diarahkan di Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Nitu, Kelurahan Ntobo dan Kelurahan Melayu.
d. Pengembangan kawasan pariwisata religi diarahkan di Kelurahan Paruga dan Kelurahan Pane.
e. Pengembagan kawasan wisata kuliner diarahkan di Kelurahan Dara, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, dan Kelurahan Manggemaci.

7. Kawasan Peruntukan Sektor Informal

Peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal direncanakan dilakukan di areal kawasan perdagangan dan jasa, areal rekreasi sepanjang pantai Niu-Lawata-Amahami Kelurahan Dara, taman lapangan Pahlawan Raba, Kompleks Paruga Nae, Jalan Sulawesi, Jalan Flores, Jalan Sultan Kaharuddin, Jalan Sultan Salahuddin, Jalan Mujair, Jalan Wolter Monginsidi, Jalan Martadinata, Jalan Gajah Mada.

8. Kawasan Peruntukan Pendidikan

Berdasarkan kondisi saat ini kecenderungan perkembangan fasilitas pendidikan berada di pusat kota, sehingga perlu adanya pemerataan fasilitas pendidikan pada seluruh wilayah Kota Bima dan agar tidak terkonsentrasi di pusat kota saja. Kaitannya dengan arahan rencana pengembangan pendidikan menengah dan pendidikan dasar ini, lebih ditekankan pada pusat pelayanan lingkungan yang belum mempunyai fasilitas

pendidikan maupun fasilitas pendidikannya masih kurang. Selain mengarahkan lokasi pendidikan ini, juga perlu adanya usaha-usaha yang berkaitan dengan peningkatan kualitas pendidikan, seperti dengan peningkatan sumber daya manusia, peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang kegiatan belajar atau bahkan menciptakan pendidikan yang unggul. Pengembangan kawasan pendidikan dilakukan untuk melayani kebutuhan pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi skala regional, dan lokal. Adapun rencana pengembangan kawasan pendidikan, diarahkan di Kelurahan Mande, Kelurahan Sadia, kelurahan Sambinae, Kelurahan Santi, Kelurahan Sarae, dan Kelurahan Rabangodu Utara**,** dengan luas kawasan kurang lebih sebesar 81, 26 Ha.

9. Kawasan Peruntukan Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang bardaya guna, Dan untuk menunjang hal tersebut maka ketersedian fasilitas kesehatan sangat diperlukan, untuk melayani kesehatan seluruh penduduk di Kawasan Kota Bima atau Pulau Sumbawa Bagian Timur dengan skala regional maupun skala lokal.

Adapun untuk pengembangan kawasan kesehatan di Kota Bima, di arahkan di Kelurahan Rabangodu Utara, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Sambinae, Kelurahan Nae, Kelurahan Paruga, Kelurahan Sadia, Kelurahan Penanae, Kelurahan Jatiwangi dan Kelurahan Kodo, dengan luas kawasan keseluruhan kurang lebih sebesar 15 Ha. Pengembangan kawasan peruntukan kesehatan dilakukan melalui antara lain: Pengembangan status Rumah Sakit dari tipe B menjadi tipe A, Pengembangan Puskesmas di tiap Kecamatan, dan Pengembangan Posyandu di tiap Kelurahan.

10. Kawasan Peribadatan

Penduduk yang ada di wilayah Kota Bima mayoritas memeluk agama Islam. Jenis fasilitas peribadatan yang ada di Kota Bima seperti langgar/mushola, masjid, dan lain-lain keberadaannya menyebar di seluruh wilayah, dengan kecenderungan menyatu dengan permukiman penduduk. Dominannya pemeluk agama islam di Kota Bima tidak berarti mengesampingkan pemeluk agama lainnya, sehingga perlu penyediaan

berbagai fasilitas peribadatan bagi pemeluk agama lain, seperti gereja, pura dan vihara. Disamping itu adanya pemeluk agama non muslim ini tidak menjadikan toleransi antar pemeluk agama menjadi hilang akan tetapi semakin tinggi sifat toleransi antar pemeluk agama, hingga tercipta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Untuk memenuhi kebutuhan ruang bagi kegiatan peribadatan dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan kegiatan keagamaan skala nasional, regional, dan lokal, maka diupayakan pengembangan kawasan peribadatan.

Rencana Pengembangan Kawasan Peribadatan kurang lebih seluas 23 Ha, yang dilakukan pada Pengembangan Masjid Agung Al-Muwahiddin (Masjid Raya) dan Pusat Kajian Islam *(Islamic Centre)* yang berlokasi di Kelurahan Pane dan pengembangan masjid dan musholla di setiap kelurahan.

11. Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Kawasan Pertahanan dan Keamanan atau lebih lazim disebut sebagai kawasan militer yang ada di wilayah Kota Bima, sebagian besar dimanfaatkan untuk kegiatan perkantoran/administrasi, permukiman, dan latihan. Adapun kawasan milter yang ada di Kota Bima, seperti kawasan militer yang ada di Kelurahan Jatiwangi milik Angkatan Darat dan Kompi Brimob yang ada di Kelurahan Sambinae, serta kawasan militer lainnya yang berada di Kelurahan Sadia, Kelurahan Monggonao, dan Kelurahan Rabangodu Utara, adalah bertujuan untuk penegakan keamanan di Kota Bima.

Kawasan peruntukan militer hanya ditetapkan lokasinya, tidak untuk dikembangkan karena menyangkut kebijakan internal korps militer yang bersangkutan. Meskipun demikian, lahan bekas peruntukan kegiatan militer dapat digunakan dan dibangun peruntukan yang baru apabila kawasan militer tersebut sudah dipindahkan. Adapun lokasi rencana untuk kawasan militer di lakukan di Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Sambiae, Kelurahan Sadia, Kelurahan Monggonao, Kelurahan Rabangodu Utara.

12. Kawasan Peruntukan Pertanian

Pengembangan Kawasan pertanian di Kota Bima meliputi kawasan: pertanian tanaman pangan, holtikultura, perkebunan serta peternakan lokasinya menyebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Bima dengan

total luasan sebesar 2.253 Ha. Rencana luas kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan dengan pertimbangan utama untuk peningkatan dan pemenuhan kebutuhan pangan bagi wilayah Kota Bima. Pengembangan kawasan direncanakan dengan meningkatkan tingkat pelayanan dan ketersediaan infrastruktur pendukung. Lahan pertanian tanaman pangan merupakan lahan pertanian dengan didukung irigasi baik teknis maupun non teknis. Berdasarkan hal tersebut, maka penetapan kawasan pertanian lahan basah ditentukan pada kawasan yang saat ini sudah memiliki prasarana irigasi dan kemampuan lahan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan tanaman pangan (padi). Kawasan pertanian tanaman pangan di Kota Bima meliputi: Kecamatan Mpunda seluas 303 Ha, Kecamatan Rasanae Timur seluas 463 Ha, Kecamatan Raba seluas 489 Ha, Kecamatan Asakota seluas 121 Ha.

Kawasan peruntukkan perkebunan seluas kurang lebih 3.632 Ha, dengan komoditi unggulan jambu mete dan kelapa yang tersebar pada Kelurahan Ntobo, Kelurahan Jatibaru, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Nitu, Kelurahan Nungga, Kelurahan Lelamase, Kelurahan Lampe, Kelurahan Matakando, dan Kelurahan Kolo.

Kawasan peternakan diprioritaskan dikembangkan di Kecamatan Rasanae Timur, Kecamatan Raba, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Asakota dalam rangka mendukung program Bumi Sejuta Sapi (BSS); dan pengelolaannya dilakukan dengan cara peningkatan jumlah ternak, penggemukan ternak, pembibitan ternak, penyediaan pakan ternak, dan pengembangan industri pengolahan hasil ternak. Adapun kawasan peternakan ini menyebar disemua kecamatan yang ada di Kota Bima dengan komoditi unggulan sapi.

13. Kawasan Peruntukan Perikanan

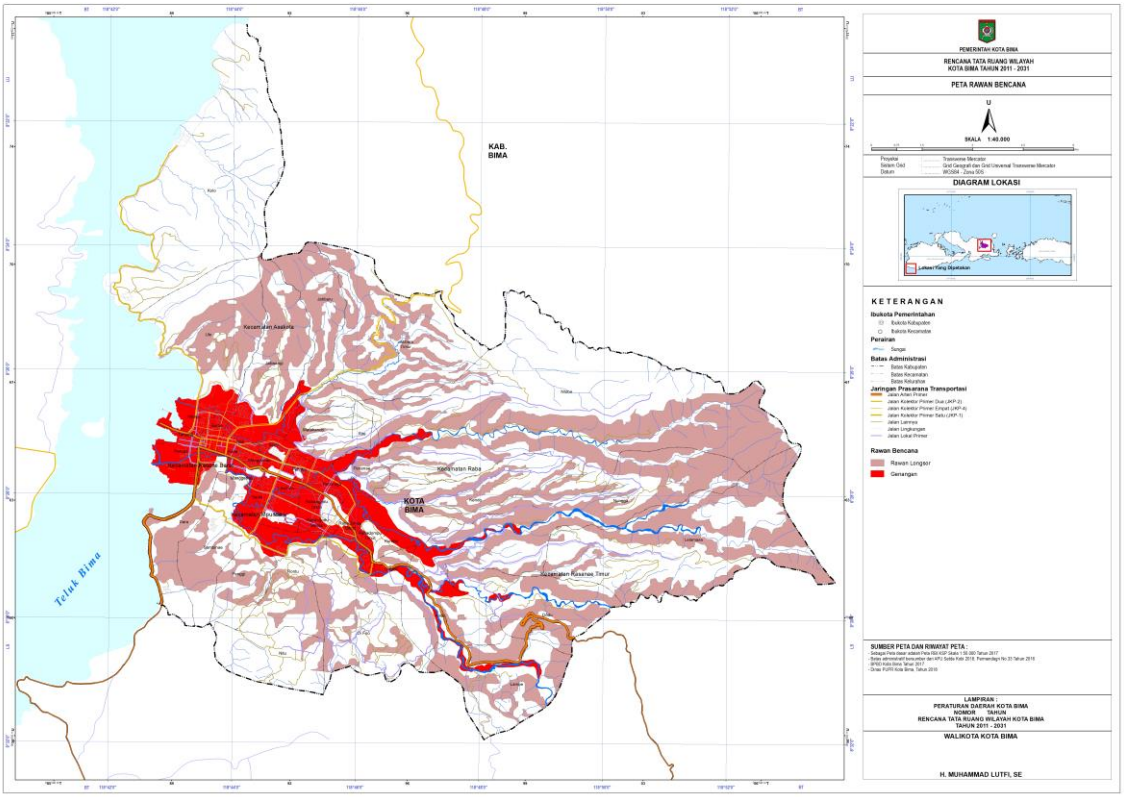
Pengembangan kawasan perikanan tangkap, dilakukan di Kelurahan Kolo, Kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Melayu, Kelurahan Tanjung, dan Kelurahan Dara. Sedangkan pengembangan perikanan budidaya, dilakukan di Kelurahan Dodu, Matakando, Nungga, Kelurahan Melayu, Kelurahan Jatiwangi, dan Kelurahan Panggi.

2.1.1.8. Kawasan Rawan Bencana

Kota Bima merupakan salah satu daerah yang dilewati oleh jalur cincin api sehingga potensi bencana gempa bumi sangat besar. Disamping rawan bencana gempa bumi, wilayah Kota Bima juga rawan bencana banjir yang meliputi seluruh wilayah kecamatan Rasanae Barat, Sebagian Kecamatan Mpunda, Sebagian Kecamatan Raba, sebagian Kecamatan Asakota dan sebagian Kecamatan Rasanae Timur. Pada tahun 2016 terdapat 35 kelurahan yang terpapar bencana banjir bandang dari total 38 Kelurahan pada saat itu. Potensi bencana yang lain meliputi tanah longsor, angin puting beliung, cuaca ekstrim serta bencana kebakaran yang berakibat timbulnya korban jiwa, harta, benda, kerusakan sarana dan prasarana serta fasilitas umum.

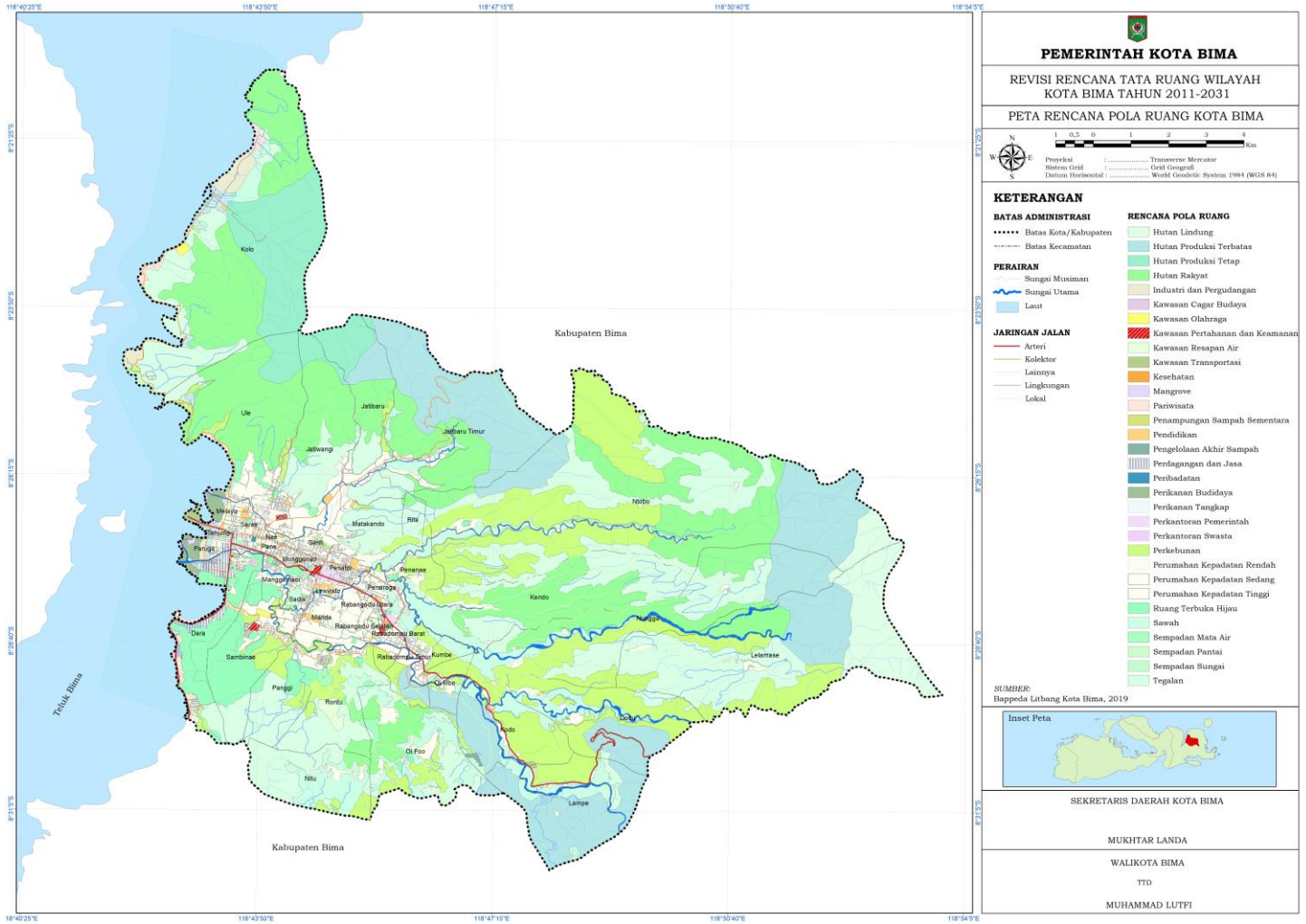
Untuk menghindari atau meminimalkan korban jiwa akibat bencana y ang terjadi maka disediakan r uang evakuasi, untuk memberikan ruang yang aman sebagai tempat berlindung dan tempat penampungan penduduk untuk sementara dari bencana banjir, bencana gelombang pasang/tsunami, bencana gempa bumi, serta bencana kebakaran. Oleh karena itu perlu dilakukan beberapa langkah sebagai berikut:

a. pengembangan ruang evakuasi bencana banjir pada kawasan pinggir sungai berupa bangunan fasilitas umum, ruang serbaguna, kantor kelurahan dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana.
b. pengembangan ruang evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami pada kawasan pesisir pantai Kota di Paruga Nae dan Lapangan Sambinae.
c. pengembangan ruang evakuasi bencana gempa bumi dilakukan pada: bagian timur (Kecamatan Rasanae Timur di Lapangan Lampe dan Lapangan Kodo, Kecamatan Raba di lapangan Pahlawan Raba serta bangunan lainnya yang memungkinkan untuk menampung korban bencana). Bagian tengah (Kecamatan Mpunda) di Lapangan SMK 2, Lapangan Kantor Walikota Bima, dan bangunan sosial, serta bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana. Bagian barat (Kecamatan Rasanae Barat di Gedung Paruga Nae dan Satdion Manggemaci dan Kecamatan Asakota di Lapangan SPMA, bangunan sosial, dan bangunan lain yang memungkinkan untuk menampung korban bencana.



Gambar 2.2

Peta Rawan Bencana Kota Bima



Gambar 2.3

Peta Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Kinerja pembangunan yang terkait dengan aspek kesejahteraan masyarakat memberikan gambaran dan hasil analisis terhadap kondisi kesejahteraan masyarakat, yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial.

2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB

Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga berlaku pada tahun 2019 mencapai 4,30 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 324 milyar rupiah dibandingkan dengan tahun 2018 yang mencapai 3,95 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 2,90 triliun rupiah pada tahun 2018 menjadi 3,04 triliun rupiah pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan selama tahun 2019 Kota Bima mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 3,04 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

Selama lima tahun terakhir (2015 – 2019) secara keseluruhan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku menunjukkan trendnya naik. Hal ini dapat digambarkan secara berturut – turut PDRB Kota Bima pada 2015 sebesar 2,99 triliun, 2016 sebesar 3,39 triliun, 2017 sebesar 3,64 triliun, 2018 sebesar 3,95 triliun dan 2019 sebesar 4,28 triliun.

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Bima didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bima.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bima pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan. Peranan dari lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor yaitu mencapai 25,11 persen (angka ini meningkat dari 23,10 persen di tahun 2015). Selanjutnya lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,40 persen (turun dari 14,0 persen di tahun 2015), disusul oleh lapangan usaha Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 11,02 persen (turun dari 13,2 persen di tahun 2015). Untuk lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,23 persen (naik sedikit dari 10,2 persen di tahun 2015) dan Konstruksi juga mengalami peningkatan sebesar 9,36 persen dari 8,8 persen di tahun 2015.

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, terdapat 3 (tiga) kategori mengalami kenaikan yaitu Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan dan Konstruksi . Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan peranannya berangsur-angsur menurun termasuk Administrasi pemerintahan mengalami penurunan. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing fluktuatif. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Disamping itu terjadi bencana banjir bandang pada tahun 2016 yang menimbulkan kerusakan pada lahan pertanian dan perikanan.

Tabel 2.14.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2015 - 2019

Kategori		2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	419.103,64	13,99	455.943,64	13,19	495.427,2	13,57	536.397,46	13,48	572.719,9	13,40
B	Pertambangan dan Penggalian	11.602,50	0,39	12.606,75	0,38	14.378,78	0,39	15.666,80	0,39	17.069,7	0,40
C	Industri Pengolahan	92.352,46	3,08	103.060,28	3,12	111.576,6	3,07	119.479,03	3,01	127.961,8	3,1
D	Pengadaan Listrik dan Gas	4.806,06	0,16	6.189,54	0,19	6.715,13	0,18	7.282,79	0,18	7.768,4	0,18
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1.133,97	0,08	1.240,16	0,04	1.335,41	0,07	1.348,56	0,03	1.396,4	0,03

F	Konstruksi	262.620,58	8,77	292.504,84	8,87	330.574,4	9,07	362.948,34	9,15	39.9904,1	9,36
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	690.154,42	23,05	775.781,59	23,53	878.320,2	24,14	968.068,33	24,42	1.072.998,3	25,11
H	Transportasi dan Pergudangan	304.326,98	10,16	334.866,68	10,14	371.189,9 8	10,18	400.859,68	10,11	437.305,4	10,23
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	91.206,42	3,05	102.663,90	3,11	113.788,3 5	3,13	122.731,08	3,09	131.804,1	3,08
J	Informasi dan Komunikasi	44.737,74	1,49	48.885,10	1,48	54.610,19	1,5	59.244,19	1,5	63.644,7	1,49
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	68.924,34	2,3	76.910,35	2,33	88.851,42	2,43	97.637,27	2,46	100.666,5	2,36
L	Real Estate	163.474,41	5,46	179.414,50	5,44	194.014,65	5,32	212.403,72	5,36	227.502,9	5,32
M,N	Jasa Perusahaan	10.675,67	0,36	11.676,75	0,35	12.682,88	0,35	13.852,59	0,35	14.988,4	0,35
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	395.400,82	13,21	419.257,39	12,71	444.130,76	12,19	473.484,95	11,94	470.752,6	11,02
P	Jasa Pendidikan	233.738,97	7,81	260.345,44	7,89	284.510,02	7,81	307.186,34	7,75	336.242,2	7,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	94.918,44	3,17	103.073,40	3,12	111.274,79	3,06	125.746,02	3,17	134.701,6	3,15
R,S,T,U	Jasa lainnya	104.950,21	3,51	115.009,32	3,49	129.682,80	3,56	141.835,57	3,58	156.207,9	3,66
PDRB		**2.994.127,6**	**100**	**3.299.429,61**	**100**	**3.642.135,96**	**100**	**3.964.172,73**	**100**	**4.273.635**	**100**

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

Tabel 2.15.
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kota Bima (juta rupiah), 2015 – 2019

NO	Kategori	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	362.720,26	14,87	325.508,30	14,35	341 777,7 0	14,09	352.595,60	12,41	414 616,9	
B	Pertambangan dan Penggalian	10.247,07	0,42	10.833,90	0,42	11.738,30	0,43	12.328,60	0,43	12.988	
C	Industri Pengolahan	86 266,01	3,54	91 288,9	3,54	96 310,10	3,5	100,135,4	3,53	104.653	
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5.329,26	0,22	6.253,90	0,24	6.472,10	0,24	6.596,90	0,23	7089	
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	860,19	0,04	899,6	0,03	944,6	0,03	952,9	0,03	986	
F	Konstruksi	234.125,70	9,6	253.432,50	9,82	277.812,70	10,09	291.237,70	10,25	303.867	

NO	Kategori	2015		2016		2017		2018		2019	
		Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	%	Rp (Juta)	
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	556.890,99	22,84	600.847,00	23,29	652.227,90	23,94	691.296,10	24,34	740.615	
H	Transportasi dan Pergudangan	260.644,79	10,69	274.928,40	10,66	295.608,50	10,73	307.766,90	10,84	327.337	
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	60.993,37	2,5	66.069,50	2,56	70.497,20	2,56	74.293,40	2,62	78.075	
J	Informasi dan Komunikasi	43.826,09	1,8	47.351,10	1,84	50.910,20	1,85	54.282,30	1,91	57.500	
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	56.675,02	2,32	60.744,10	2,35	66.513,50	2,42	70.859,60	2,49	72.085	
L	Real Estate	122.808,55	5,04	129.988,50	5,04	137.445,20	4,99	145.334,60	5,12	153.890	
M	Jasa Perusahaan	8.524,27	0,35	8.980,00	0,35	9.435,30	0,34	10.049,90	0,35	10.558	
N	Administrasi Pemerintahan, aPertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	262.778,38	10,78	269.722,20	10,46	277.004,70	10,06	283.597,40	9,99	279.953	
o	Jasa Pendidikan	189.031,70	7,75	200.287,40	7,76	212.638,30	7,72	224.397,20	7,9	241.354	
p	Jasa Kesehatan dan Kgt Sosial	83.773,40	3,44	88.707,50	3,44	93.533,40	3,4	102.689,50	3,58	106.260	
Q	Jasa lainnya	92.992,43	3,81	98.978,70	3,84	106.649,50	3,87	112.743,30	3,97	119.905	
PDRB		2.438.487,46	100	2.579.582,50	100	2.753.883,80	100	2.887.465,40	100	3.031.730,30	

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kota Bima pada tahun 2019 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Kota Bima atas dasar harga konstan mencapai 3,02 trilyun rupiah. Angka tersebut naik dari 2,88 trilyun rupiah pada tahun 2018. Hal

tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2019 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,22 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya yang mencapai 4,74 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2019 dipercepat oleh adanya investasi dan perbaikan infrastruktur. Investasi yang dimaksud utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan jalan terutama di sepanjang Jalan Sukarno Hatta dan perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa pendidikan yaitu sebesar 7,56 persen. Salah satu penyebabnya adalah adanya tuntutan kurikulum pendidikan yang mengharuskan para siswa lebih aktif dalam mencari alternatif sumber pengetahuan diluar sekolah.

Delapan lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar lima hingga tujuh persen antara lain: lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 7,56 persen, lapangan usaha Pengadaan listrik dan Gas sebesar 7,46 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 7,13 persen, lapangan usaha Jasa Lainnya sebesar 6,35 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan 6,18 persen, lapangan usaha real estat sebesar 5,89 persen, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 5,93 persen, dan lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan social sebesar 5,25 persen

Sedangkan tiga lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen adalah Lapangan usaha industri pengolahan sebesar 4,52 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengeolaan sampah,limbah dan daur ulang sebesar 3,43 persen dan administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 1,07 persen.

Lapangan usaha yang pertumbuhannya menurun dan dibawah lima persen adalah lapangan usaha Pertambangan dan penggalian sebesar 4,72 persen menurun dibanding 2018 sebesar 5,65 pesen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 4,24 persen menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 4,93 persen, dan lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan makan minum sebesar 4,61 persen dibanding Tahun 2018 sebesar 5,86 persen.

Tabel 2.16.
Laju Pertumbuhan Riil PDRB Kota Bima Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2015-2019

Kategori		2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,94	3,70	4,01	1,91	4,55
B	Pertambangan dan Penggalian	(5,10)	6,36	7,39	6,21	7,85
C	Industri Pengolahan	5,18	3,84	3,82	5,84	5,55
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,96	39,81	-5,25	17,35	3,49
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,35	2,44	4,58	5,51
F	Konstruksi	6,76	6,50	6,62	8,35	9,62
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	9,28	7,32	7,25	8,01	8,55
H	Transportasi dan Pergudangan	5,02	5,56	5,88	5,46	7,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,86	6,36	6,78	8,12	6,70
J	Informasi dan Komunikasi	4,06	6,84	7,14	8,54	7,96
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	7,71	6,12	6,38	7,18	9,58
L	Real Estate	6,00	5,80	6,43	5.85	5,84
M,N	Jasa Perusahaan	4,89	6,87	5,15	5,35	5,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,36	4,92	3,83	2,64	2,70
P	Jasa Pendidikan	4,55	4,55	6,45	6,28	5,87
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,38	5,06	5,30	5,89	5,54
R,S,T	Jasa lainnya	7,54	7,85	6,03	6,60	7,95
PDRB		**5,58**	**5,89**	**5,75**	**5,80**	**6,76**

Sumber : BPS Kota Bima, 2020
**) Angka Sementara ; **) Angka Sangat Sementara*

b. PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kota Bima atas dasar harga berlaku sejak tahun 2015 hingga 2019 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun

2015 PDRB per kapita tercatat sebesar 15,5 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2019 mencapai 21,90 juta rupiah. Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh faktor inflasi.

Tabel 2.17.
PDRB Perkapita Kota Bima Tahun 2015-2019

Nilai PDRB (Milliar Rupiah)					
	2015	**2016**	**2017**	**2018**	**2019**
- ADHB	2.994	3.301	3.645	3,95	4,28
- ADHK	2.178	2.306	2.438	2.580	2.754
PDRB per Kapita (Ribu Rupiah)					
- ADHB	15.504	17.079	18.744	20.237	21.902
- ADHK	14.233	14.743	15.266	15.818	16.552
- Pertumbuhan PDRB per Kapita ADHK 2010/	3,30	3,66	3,54	3,62	4,64
Jumlah Penduduk (ribu orang)	153,1	156,4	159,7	163,1	166,4
Pertumbuhan Jumlah Penduduk	2,20	2,15	2,13	2,11	2,03

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

c. Laju Inflasi

Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur stabilitas ekonomi adalah kestabilan harga-harga. Harga yang merupakan hasil interaksi antara permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) barang dan jasa yang beredar di masyarakat, perlu dipantau perkembangannya sebagai salah satu indikator penentu kebijakan pemerintah di bidang pendapatan, fiskal maupun moneter. Untuk memperoleh gambaran mengenai kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat dari waktu ke waktu dilakukan dengan menghitung indeks harga konsumen. Berdasarkan IHK inilah kemudian didapat besaran angka inflasi/deflasi yaitu besarnya persentase perubahan IHK antar periode.

Nilai inflasi yang terlalu tinggi akan mendorong turunnya investasi, sehingga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi inflasi maka semakin rendah daya beli dari uang dan dengan sendirinya semakin rendah pula daya beli masyarakat terhadap barang dan jasa

kebutuhan rumah tangga. Laju inflasi yang tidak terlalu tinggi akan membuat stabilitas tetap terjaga dan roda perekonomian dapat terus bergulir.

Selama periode 2015-2019 laju inflasi tahun kalender Kota Bima mengalami perkembangan yang fluktuatif. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2015 yaitu sebesar 10,06 persen diikuti tahun 2014 sebesar 7,16 persen. Pada tahun 2015 laju inflasi Kota Bima sudah rendah, yaitu 4,29 persen dan terus turun hingga mencapai titik terendahnya selama periode 2015-2019 yaitu di tahun 2018 pada angka 3,10 persen yang kemudian sedikit naik menjadi 4,04 persen pada tahun 2019.

Tabel 2.18.
Nilai inflasi rata-rata Tahun 2015-2019 Kota Bima

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Bima	10,06	7,16	4,29	3,10	4,04

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

a. Pendidikan

1. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan indikator yang mencerminkan seberapa lama masyarakat yang berusia 7 tahun di suatu wilayah memiliki harapan untuk bersekolah. Harapan lamanya penduduk Kota Bima untuk bersekolah sejak tahun 2015 sampai 2019 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2015, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk bersekolah selama 14,70 tahun, berbeda dengan pada tahun 2019 dimana penduduk Kota Bima telah memiliki harapan untuk bersekolah selama 14,97 tahun atau hampir 15 tahun. Hal ini berarti telah terjadi peningkatan HLS Kota Bima sebesar 1,84 persen selama periode 2015-2019. Peningkatan sebesar 1,84 persen juga berarti terjadi peningkatan harapan lama bersekolah selama 1 bulan lebih setiap tahunnya.

Tabel 2.19.
Harapan Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Bima	14,70	14,92	14,95	14,96	14,97
Provinsi NTB	12,46	12,73	13,04	13,16	13,46

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

Penduduk usia 7 tahun Kota Bima memiliki harapan lama sekolah yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata penduduk usia 7 tahun Provinsi NTB. Pada tahun 2015, penduduk usia 7 tahun Kota Bima memiliki harapan untuk bersekolah selama 14 tahun atau sudah lewat dari pendidikan Diploma 1, sementara rata-rata penduduk usia 7 tahun di Provinsi NTB hanya memiliki harapan lama bersekolah selama 12 tahun atau setara dengan tamat SMA. Selanjutnya, pada tahun 2019 angka HLS Kota Bima hampir mencapai angka 15 tahun yang berarti penduduk usia 7 tahun Kota Bima telah memiliki harapan untuk bersekolah sampai ke jenjang pendidikan Diploma 3, berbeda dengan rata-rata penduduk usia 7 tahun Provinsi NTB yang hanya memiliki harapan untuk bersekolah selama 13 tahun atau setara Diploma 1.

Kota Bima sendiri memiliki angka HLS dengan peringkat kedua di Provinsi NTB setelah Kota Mataram. Sejak tahun 2015 baik Kota Mataram maupun Kota Bima mengalami peningkatan angka HLS. Meskipun begitu, terlihat perbedaan kecepatan tumbuh dari HLS Kota Mataram dan Kota Bima. Selisih HLS Kota Mataram dan Kota Bima di tahun 2015 hanya sebesar 0,12 tahun, sementara di tahun 2019 selisihnya sudah mencapai 0,54 tahun. Artinya, dalam 5 tahun terakhir Kota Mataram lebih cepat tumbuh setengah tahun dibandingkan dengan Kota Bima. Salah satu faktor yang mempengaruhi hal tersebut adalah kualitas dan kuantitas lembaga pendidikan yang ada di kedua kota. Kota Mataram memiliki fasilitas pendidikan yang lebih memadai dibandingkan dengan Kota Bima sehingga Kota Mataram terus mengalami peningkatan harapan lama sekolah yang lebih tinggi.

2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Sejalan dengan kondisi HLS, rata-rata Lama Sekolah (RLS) di Kota Bima selama periode 2015-2019 selalu lebih tinggi daripada rata-rata Provinsi NTB. Sejak tahun 2015, penduduk Kota Bima telah bersekolah dengan rata-rata lama bersekolah 9,46 tahun. Angka 9,46 ini jauh lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi NTB yang hanya sebesar 6,54 di tahun yang sama. Selanjutnya, pada tahun 2019 Kota Bima telah berhasil memperpanjang rata-rata lama sekolahnya dengan berbagai program pengembangan bidang pendidikan dalam kurun waktu 5 tahun menjadi sebesar 10,14 tahun.

Tabel 2.20.
Rata-Rata Lama Sekolah di Kota Bima Tahun 2015-2019

Rata-Rata Lama Sekolah	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Bima	9,46	9,58	9,96	10,13	10,14
Provinsi NTB	6,54	6,67	6,71	6,79	6,90

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama.

Tabel 2.21.
Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Bima
Tahun 2015-2019

No	Angka Partisipasi Murni	2015	2016	2017	2018	2019
1	PAUD	94,37	100,56	96,66	97,88	54,7
2	SD/MI	94,37	100,56	96,66	97,88	99,38
3	SMP/MTs	116.69	117,08	117,52	105.12	96,91

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020 (diolah)

4. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu jenjang pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.22.
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Bima
Tahun 2015-2019

No	Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017	2018	2019
1.	APK PAUD (%)	88’85	56,01	48,23	54,76	56,23
2.	APK SD/MI (%)	104,13	108,75	97,64	98,87	109,42

No	Angka Partisipasi Kasar	2015	2016	2017	2018	2019
3.	APK SMP/MTs (%)	166,41	158,73	118,70	106,18	100,82

Sumber : Kota Bima Dalam Angka 2021 (BPS) & Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bima

5. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APT)

APT merupakan persentase jumlah penduduk, baik yang masih sekolah ataupun tidak sekolah lagi, menurut pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan.

Tabel 2.23.
Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (Orang) di Kota Bima
Tahun 2016-2019

No	Tingkat Pendidikan	Ijazah Tertinggi yang Ditamatkan (Jiwa)				APT (%)			
		2016	2017	2018*)	2019*)	2016	2017	2018	2019
1.	SD/MI	2.730	2.710	2.813	2.949	1,74	1,66	2,04	2,12
2.	SMP/MTs	2.901	2.878	2.990	2.831	1,85	1,76	2,17	2,03
3.	SMA/MA/SMK	7.749	1.946	3.190	3.364	4,94	1,19	2,31	2,41
Jumlah Penduduk		156.820	163.337	137.851	139.366	156.820	163.337	137.851	139.366

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2020 (diolah)

*Ket : *) Jumlah Penduduk versi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2019*

b. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi (AKB)

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kota Bima selama kurun tahun 2015–2019 menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan. Pada tahun 2015, AKB di Kota Bima tercatat sebesar 9,3 per 1.000 KH. Pada tahun 2016 AKB di Kota Bima turun menjadi 5,75 per 1.000 KH, dan terus turun menjadi 5,14 per 1.000 KH pada tahun 2017, akan tetapi pada tahun 2018 naik menjadi 7,42 per 1000 KH, dan Ditahun 2019 Turun signifikan menjadi 2,32 per 1.000 KH. Artinya, terjadi penurunan angka kematian bayi di Kota Bima dalam kurun waktu 1 tahun terakhir.

Tabel 2.24.
Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Bima
Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Kematian Bayi (Berumur <1 Tahun)	16 KSS	19 KSS	17 KSS	25 KSS	6 KSS
Jumlah Kelahiran Hidup	3.211	3.306	3.306	3.370	3.551
Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup (KH)	9,3	5,75	5,14	7,42	2,32

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Bima, 2020

2. Angka Usia Harapan Hidup

Pembangunan manusia sebagai suatu proses untuk memperluas pilihan-pilihan bagi penduduk. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu diupayakan agar penduduk dapat mencapai usia hidup yang panjang dan sehat. Salah satu indikator yang dapat menggambarkan usia hidup yang telah ditetapkan oleh UNDP adalah Angka Harapan Hidup (AHH). Angka ini memperkirakan lama hidup rata-rata penduduk sejak dilahirkan, dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Penghitungan AHH dilakukan dengan metode tidak langsung, dari keterangan anak lahir hidup dan anak masih hidup pada suatu kurun waktu tertentu. Dengan menggunakan tabel kematian, AHH dapat diperoleh untuk penduduk pada tahun tertentu. Perhitungan AHH masih menggunakan metode tidak langsung karena pelaksanaan registrasi vital yang menyangkut perubahan aktivitas vital penduduk (kelahiran, kematian, dan migrasi) belum dilakukan secara optimal di Indonesia.

Keberhasilan pemerintah dan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup penduduk di bidang kesehatan dapat terlihat dari peningkatan AHH Kota Bima dari tahun ke tahun pada periode 2015-2019. Pada tahun 2015, penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk dapat hidup selama hampir 68,88 tahun. Angka ini terus meningkat hingga di tahun 2019 penduduk Kota Bima memiliki harapan untuk hidup sampai usia hampir 69,58 tahun. Dengan kata lain, terjadi peningkatan AHH Kota Bima sebesar hampir 3 persen selama 5 tahun atau jika diubah dalam

satuan waktu AHH Kota Bima meningkat sebesar kurang lebih 3 bulan per tahunnya.

Tabel 2.25.
Angka Harapan Hidup Kota Bima Tahun 2015 - 2019

AHH	2015	2016	2017	2018	2019
Kota Bima	68,88	69,03	69,12	69,35	69,58
NTB	64,74	64,90	65,38	65,48	65,55

Sumber : BPS Kota Bima, 2020

3. Prevalensi Balita Gizi Buruk

Balita gizi buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan Z-score <-3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda-tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmus-kwasiorkor).

Data Dinas Kesehatan Kota Bima menyebutkan bahwa dari jumlah kasus balita gizi buruk di Kota Bima pada tahun 2019 adalah sebanyak 13 kasus gizi buruk dari 13.601 balita. Sedangkan pada tahun 2018 dengan jumlah kasus sebanyak 15 kasus dari 14.089 balita.

Persentase balita gizi buruk diperoleh dari membandingkan jumlah balita gizi buruk yang terjadi pada periode tertentu dengan Jumlah balita yang ada pada periode yang sama.

Persentase balita gizi buruk pada tahun 2019 sebesar 0,078 dari target 0,075. Bila dibandingkan dengan tahun 2015 dan 2018, Persentase balita gizi buruk di Kota Bima tahun 2019 mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,059 % dari target 0,085%, dan pada tahun 2018 yaitu sebesar 0,077% dari target 0,080. hal ini menjukan tingkat keberhasilan program dalam rangka menekan kejadian kasus gizi buruk yang ada di Kota Bima masih kurang. Demikian pula jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2018 sebesar 0,070%, capaian Dinas Kesehatan Kota Bima masih sekitar 0,05% yang harus dipenuhi.

Kegiatan–kegiatan yang dilakukan untuk mendukung program yaitu adanya kegiatan penjaringan kasus secara bekala, surveilans gizi, konsultasi, pemeriksaan balita oleh dokter ahli, pemantauan ASI Eksklusif dan Inisiasi

Menyusui Dini (IMD) serta pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kelas gizi di puskesmas. Program lain yang dilakukan dalam mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini adalah adanya kegiatan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) pemulihan gizi buruk, Pemberian Makanan Tambahan (PMT) gizi kurang, Pemberian Makanan Tambahan (PMT)-ASI, pemberian biaya perawatan gizi buruk, diskusi refleksi kasus gizi buruk rakorcam tentang hasil penimbangan balita.

Penyebab masih terjadinya kasus gizi buruk di Kota Bima ada 2 hal yaitu asupan gizi dan penyakit infeksi. Asupan gizi dipengaruhi oleh ketersediaan pangan, daya beli, tingkat pendidikan dan pengetahuan gizi ibu. Sedangkan Infeksi dipengaruhi oleh hygiene dan sanitasi serta pelayanan kesehatan.

Tabel 2.26.
Prevalensi Balita Gizi Buruk Kota Bima Tahun 2016 – 2019

No	Keterangan	Realisasi				
		Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Angka Balita Gizi Buruk	0,059 %	0,060 %	0,059 %	0,077 %	0,078 %

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Bima, 2020

c. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin atau tingkat kemiskinan di Kota Bima pada tahun 2019 sebesar 9,27%, mengalami penurunan sebesar 0,24% jika dibandingkan dengan tahun 2018 yakni sebesar 9,51%. Angka ini merupakan angka kemiskinan terendah di Propinsi NTB dan berada di bawah rata-rata nasional. Namun demikian, kalau dilihat dari sebaran penduduk miskin dalam wilayah Kota Bima, Kecamatan RasanaE Timur yaitu sebesar 14,86%, sedangkan kecamatan yang terendah tingkat kemiskinannya adalah kecamatan RasanaE Barat dengan tingkat tingkat kemiskinan sebesar 2,52% yang merupakan kawasan sentra perdagangan di Kota Bima.

Secara umum, perkembangan tingkat kemiskinan di Kota Bima dari tahun ke tahun semakin membaik, walaupun pada tahun 2015 mengalami kenaikan namun pada tahun 2019 kembali mengalami penurunan, hal ini

menunjukkan bahwa capaian hasil-hasil pembangunan semakin efektif dalam menurunkan tingkat kemiskinan .

Tabel 2.27.
Jumlah Penduduk Miskin Kota Bima Tahun 2015–2019

Kota Bima	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	15.70	15.42	15.36	14.84	14.80
Tingkat Kemiskinan (%)	9,85	9,51	9,27	8,79	8,60

Sumber : BPS Kota Bima, 2021

2.1.3. Aspek Pelayanan umum

Aspek pelayanan umum adalah semua produk pelayanan umum yang berupa bentuk barang publik sebagai bagian dari tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Aspek pelayanan umum meliputi fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan, yang terdiri dari infrastruktur dasar baik secara fisik maupun sosial seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup serta layanan yang menyangkut kinerja aparatur pemerintahan.

2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

a. Urusan Pendidikan

Gambaran umum kondisi layanan urusan wajib bidang pendidikan di Kota Bima akan mencakup keadaan yang meliputi tinjauan terhadap Angka Partisipasi Sekolah (APS) baik untuk pendidikan dasar maupun pendidikan menengah. Disamping itu juga akan mencakup tinjauan rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk, rasio guru dengan murid, rasio guru dengan murid per kelas rata-rata serta sebaran bangunan sekolah berdasarkan kecamatan.

1. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah. Angka tersebut memperhitungkan adanya perubahan penduduk terutama usia muda. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan jumlah murid lebih menunjukkan

perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di setiap jenjang sekolah. Sehingga, naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah. APS di Kota Bima adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar, sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut.

Tabel 2.28.
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar Kota Bima
Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	APS SD/MI	97,64	98,87	93,76	84,83	109,42
2.	APS SMP/MTs	118,70	106,18	104,26	84,65	100,82

Sumber : Dinas Statistik Daerah, 2020

2. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah

Hal yang penting dalam rangka pembangunan dan pelayanan umum urusan wajib bidang pendidikan adalah mengetahui apakah bangunan sekolah yang ada sekarang telah memenuhi standar dan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah tingkat pendidikan (dasar dan menengah). Untuk itu perlu diketahui rasio ketersediaan sekolah terhadap jumlah penduduk usia sekolah. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.29.
Rasio Ketersediaan Sekolah Pendidikan Dasar di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD/MI					
1.1.	Jumlah gedung sekolah	94	90	90	88	88
1.2.	Jumlah penduduk kelompok usia	19.154	17.577	18.426	17.226	16.643

No.	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
	7-12 tahun					
1.3.	Rasio	49,08	51,20	48,84	51,09	52,9
2	SMP/MTs					
2.1.	Jumlah gedung sekolah	38	38	38	33	35
2.2.	Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 tahun	7.892	9.050	9.268	7.735	8.679
2.3.	Rasio	48,15	41,99	41,00	42,66	40,3

Sumber : Dinas Statistik Daerah, 2020

Dari tabel tersebut diatas bahwa penduduk usia sekolah pendidikan 7-12 tahun (SD/MI) pada 2019 perbandingan satu gedung sekolah menampung 53 orang, kemudian pada penduduk usia sekolah 13-15 tahun (SMP/MTs) perbandingan satu sekolah menampung 41 orang.

3.Rasio Guru/Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.30.
Rasio Guru/Murid Sekolah Negeri di Kota Bima
Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	SD					
1.1.	Jumlah Guru	1.947	2.015	2.015	1.906	1.777
1.2.	Jumlah Murid	15.178	15.178	14.317	13.959	14.758
1.3.	Rasio	7,80	7,53	7,11	7,32	8,31
2	SMP					
2.1.	Jumlah Guru	788	741	855	788	788
2.2.	Jumlah Murid	5.306	5.641	5.474	5.480	5.945
2.3.	Rasio	6,73	7,61	6,40	6,95	7,54

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2020

Tabel 2.31.
Rasio Guru/Murid Madrasyah Negeri di Kota Bima
Tahun 2015 – 2019

No	Jenjang Pendidikan	2015	2016	2017	2018	2019
1	MI					
1.1.	Jumlah Guru	46	49	49	49	191
1.2.	Jumlah Murid	764	770	778	828	1.925
1.3.	Rasio	16,61	15,71	15,88	16,90	10,08
2	MTs					
2.1.	Jumlah Guru	104	140	202	150	350
2.2.	Jumlah Murid	2.016	1.929	2.221	1.952	2.963
2.3.	Rasio	19,38	13,78	11	13,01	8,47

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2020

4. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata adalah jumlah guru pendidikan dasar per kelas per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar per kelas. Disamping itu juga untuk mengukur jumlah ideal guru per kelas terhadap jumlah murid agar tercapai mutu pengajaran.

Tabel 2.32.
Rasio Guru dan Murid per Kelas Rata-rata per 1000 Jumlah Murid
di Kota Bima Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah ruang kelas jenjang SD/MI	768	832	841	840	847
Jumlah ruang kelas jenjang SMP/MTs	370	408	408	366	391
Total jumlah ruang kelas pendidikan dasar	1.138	1.240	1.249	1.206	1.238
Jumlah guru pada jenjang pendidikan dasar	3.806	3.740	3.851	3.394	3.549
Rata-rata jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas	3,34	3,02	3,51	3,15	3,20
Jumlah murid jenjang pendidikan	28.070	26.988	21.589	26.589	25.322

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
dasar					
Rata-rata jumlah murid pendidikan dasar per kelas	24,67	21,76	19,71	24,64	23,45
Rasio guru per kelas rata-rata per 1.000 jumlah murid	0,119	0,112	0,163	0,116	0,105

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2020

b. Urusan Kesehatan

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat diperlukan adanya kegiatan yang dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat akan kesehatan yang paling mendasar untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik.

Penyelenggaran urusan pemerintah bidang kesehatan bisa dilihat dari capaian indikator angka usia harapan hidup, yang dihitung menggunakan variabel angka kematian bayi (AKB) dan Angka Kematian Ibu (AKI). Angka Kematian bayi menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (per seribu kelahiran hidup). Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua bayi. Kemajuan yang dicapai dalam bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit penyebab kematian akan tercermin secara jelas dengan menurunnya tingkat AKB. Dengan demikian angka kematian bayi merupakan tolok ukur yang sensitif dari semua upaya intervensi yang dilakukan oleh pemerintah khususnya di bidang kesehatan.

Jumlah kematian bayi dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi dan pada tahun 2015 pernah mengalami penurunan sampai pada 17 kasus. Kasus kematian ibu juga terus menurun selama 5 tahun terakhir. Capaian ini cukup akseleratif untuk mendukung pencapaian indikator usia harapan

hidup. Pelayanan ibu hamil hingga melahirkan telah berhasil menekan angka kematian bayi meskipun masih cukub banyak kasus kematiannya. Pada tahun 2019 jumlah kasus kematian ibu mencapai 122/100.000 KH.

Dalam upaya percepatan penuruan angka kematian ibu dan bayi, Kesiapsiagaan Kelurahan Siaga yang ada memiliki kontribusi yang positif. Pengembangan Kelurahan Siaga Aktif merupakan program pengembangan desa siaga yang sudah dimulai tahun 2006. Pengembangan Kelurahan siaga aktif dilaksanakan melalui pemberdayaan masyarakat, yaitu upaya memfasilitasi proses belajar masyarakat kelurahan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan. Pelaksanaan pengembangan Kelurahan Siaga di Kota Bima sampai dengan tahun 2019 tercatat dari 41 kelurahan, 38 diantaranya telah mengembangkan Kelurahan Siaga aktif.

Tabel 2.33
Perkembangan Pelayanan Kesehatan Kota Bima
tahun 2015 - 2019

No.	*Urusan Kesehatan*	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Bayi	17 kss	25 kss	19 kss	24 kss	28 kss
2.	Angka Kematian Ibu AKI)	151/100 000KH	87/10000 0KH	148/100 000KH	148/100 000KH	183/100 000KH
3.	Persentase Kelurahan STBM	100%	100%	100%	100%	100%
4.	Persentase sarana Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	60%	60%	60%	65%	70%
5.	% Desa Siaga Aktif	89%	94%	98%	98%	98%
6.	% Pembinaan Sekolah Sehat	18 sklh	20 sklh	20 sklh	22 sklh	24 sklh
7.	Puskesmas	5	5	5	5	5
8.	Cakupan Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani	103,88%	111,41%	114,42%	169,17%	94,49%
9.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	91,81%	83,00%	83,00%	94,05%	92,90%

10.	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	96,74%	88,71%	88,71%	96,61%	95,18%
11.	Cakupan peserta KB aktif	82,56%	87,74%	87,74%	99,59%	90,30%
12.	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN3)	94,91%	99,13%	99,13%	96,48%	95,87%
13.	Cakupan Kunjungan Bayi	94,66%	86,16%	86,16%	97,08%	91,50%
14.	Cakupan Kunjungan Balita	81,79%	73,41%	73,41%	91,47%	78,40%

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2020 dan Dinas Kesehatan Kota Bima, 2020

Jumlah tenaga medis Kota Bima sebanyak 470 orang yang terdiri dari 55 orang dokter umum, 24 orang dokter spesialis,12 orang dokter gigi, 1 orang dokter spesialis gigi, 253 orang tenaga perawat dan 125 orang tenaga bidan.

Strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus khusus pada ibu dan anak dapat dilakukan pada Posyandu. Analisis rasio posyandu terhadap jumlah balita perlu dilakukan dalam upaya peningkatan fasilitasi pelayanan pemenuhan kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan, dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Pada kondisi ideal, satu Posyandu melayani 100 balita. Artinya, minimal terdapat 10 posyandu per 1000 balita.

Untuk kondisi di Kota Bima, rasio ketersediaan posyandu terhadap balita terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Pada tahun 2015, satu posyandu telah mampu melayani 107 balita, sedangkan pada tahun 2019 jumlah pelayanan posyandu meningkat terus, sehingga perbandingan satu posyandu hanya melayani 91 balita, artinya perbandingan rasio posyandu dengan jumlah balita telah terpenuhi.

Tabel 2.34.
Jumlah Posyandu dan Balita Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	2015		2016		2017		2018		2019	
		posyandu	Balita	posyandu	Balita	posyandu	Balita	posyandu	posyandu	Balita	posyandu
1	Kecamatan Rasanae Barat	32	3.923	32	4.219	32	1	Kecamatan Rasanae Barat	32	3.923	32
2	Kecamatan Rasanae Timur	26	2.044	26	2.195	26	2	Kecamatan Rasanae Timur	26	2.044	26
3	Kecamatan Mpunda	35	4.089	35	4.406	35	3	Kecamatan Mpunda	35	4.089	35
4	Kecamatan Raba	40	4.399	40	4.723	40	4	Kecamatan Raba	40	4.399	40
5	Kecamatan Asakota	30	3.515	30	3.784	30	5	Kecamatan Asakota	30	3.515	30
Jumlah		163	17.970	163	19.327	163		Jumlah	163	17.970	163

Sumber : Kota Bima Dalam Angka dan Dinas Kesehatan, 2020

Puskesmas adalah sarana pelayanan dasar dan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam system pelayanan kesehatan harus mampu dijangkau dan diakses oleh masyara secara luas dan mudah. Salah satu indikator yang digunakan untuk mengetahui keterjangkauan penduduk terhadap puskesmas adalah dengan mengetahui rasio puskesmas per 100.000 penduduk.

Sampai dengan tahun 2019, Puskesmas di Kota Bima adalah sejumlah 7 (tujuh) unit yang tersebar secara merata di 5 kecamatan dan didukung oleh 15 puskesmas pembantu.

Sejak tahun 2018 Pemerintah Kota Bima sudah memiliki rumah sakit sendiri yang terletak di Kecamatan Asakota. Ada pula rumah sakit dengan Tipe C yaitu RSUD Bima yang pengelolaannya masih dibawah Pemerintah Kabupaten Bima meskipun lokasinya berada dalam wilayah administrasi Pemerintah Kota Bima. dikelola oleh swasta masih dalam bentuk klinik yaitu PKU Muhammadiyah dan RS. Dr. Agung, Klinik Salma Husada dan Klinik Arsyafi.

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter melayani 2.500 penduduk. Jumlah dokter dan dokter spesialis di Indonesia belum memenuhi kebutuhan sesuai rasio jumlah penduduk Indonesia. Selain itu distribusi dokter dan dokter spesialis tidak merata serta kualitasnya masih perlu ditingkatkan.

Tabel 2.35.
Jumlah Dokter Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	Jumlah Dokter				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kecamatan Rasanae Barat	12	15	12	11	9
2	Kecamatan Rasanae Timur	0	0	0	3	10
3	Kecamatan Mpunda	21	25	27	15	8
4	Kecamatan Raba	24	25	30	40	5
5	Kecamatan Asakota	2	3	6	19	23
Jumlah		59	68	75	88	55

Sumber: Dinas Kesehatan diolah, 2020

c. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Jalan dan jembatan merupakan prasarana mutlak untuk memperlancar kegiatan ekonomi suatu daerah. Jalan dan jembatan dibutuhkan untuk meningkatkan mobilitas penduduk maupun perdagangan barang antar wilayah.

Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, hingga tahun 2019 di Kota Bima telah dibangun jalan sepanjang 311,43 km Jalan Kota. Dari total panjang Jalan Kota, 54,90% dalam kondisi baik, 26,97% dalam kondisi sedang, dan sedangkan sisanya sebesar 18,11% kondisi jalan masih kategori rusak ringan maupun rusak berat.

Tabel 2.36
Kondisi Jalan Kota Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

Kondisi Jalan (km)	2015	2016	2017	2018	2019
Aspal	149,81	153,83	165,83	175,47	232,96
Tidak di aspal	108,30	104,28	92,3	82,64	78,47
Baik	160,82	109,06	145,49	109,99	171
Sedang	30,23	60,10	51,13	92,24	84
Rusak	36,79	40,69	26,13	34,63	31
Rusak Berat	30,28	48,26	35,36	21,26	25

Sumber : Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima 2020

Terjadinya peningkatan panjang jalan dalam kondisi rusak berat ini dikarenakan banyaknya pembukaan ruas jalan baru dalam beberapa tahun terakhir sehingga kecenderungan terdapat peningkatan jalan rusak dan rusak berat khususnya jalur jalan ekonomi yang mengarah ke perbukitan dan gunung-gunung.

Rasio Jaringan Irigasi adalah perbandingan panjang jaringan irigasi terhadap luas lahan budidaya. Pada tahun 2019, rasio pelayanan jaringan irigasi di Kota Bima baru mencapai angka 54,80.

Tabel 2.37.
Panjang Jaringan Irigasi Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jaringan primer (meter)	9.631	9.631	9.631	5.578	5.578
2.	Jaringan Sekunder (meter)	36,841	36,841	36,841	28.880	29.440
3.	Jaringan Tersier (meter)	-	-	-	19.244	19.844
4.	Luas lahan budidaya (Ha)	2.420	2.420	2.420	1.005,56	1.001,12
	Rasio	19,20	19,20	19,20	53,41	54,80

Sumber : Dinas Statistik Daerah 2020

Tabel 2.38
Rasio Jaringan Irigasi menurut Kecamatan Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasanae Barat	-	-	-	-	-
2	Mpunda	37	37	37	123,96	71,45
3	Raba	13,78	13,78	13,78	45,82	65,12
4	Rasanae Timur	19,28	19,28	19,28	56,78	72,21
5	Asakota	26,82	26,82	26,82	47,78	65,23
	Kota Bima	19,20	19,20	19,20	53,41	54,80

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Bidang SDA, 2020

Rumah tinggal berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, yaitu fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah (air bekas), dan pembuangan sampah.

Tabel 2.39
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi di Kota Bima
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah rumah tinggal bersanitasi	30.695	30.794	33.479	34.242	35.672
2.	Jumlah rumah tinggal	39.842	38.414	38.414	38.713	39.020
3.	Persentase (%)	77,04	80,16	87,15	88,45	91,41

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2020

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan. Akses air bersih meliputi air minum yang berasal dari air mineral, air leding/PAM, pompa air, sumur, atau mata air yang terlindung dalam jumlah yang cukup sesuai standar kebutuhan minimal. Dalam bidang pelayanan air minum, penduduk Kota Bima yang memiliki akses air minum pada tahun 2019 mencapai 94,89%.

Tabel 2.40
Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum
Tahun 2015 - 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah penduduk yang berakses air Minum (Jiwa)	141.577	150.173	155.174	160.914	164.206
Jumlah penduduk (Jiwa)	155.281	163.101	166.407	169.714	173.031
Persentase penduduk berakses air minum (%)	91,17	92,07	93,25	94,81	94,89

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2020

Tabel 2.41
Proporsi Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Minum Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kecamatan Rasanae Barat	85	88	91,18	94,35	94,51
2	Kecamatan Rasanae Timur	89,93	90,11	90,35	92,38	92,61
3	Kecamatan Mpunda	91	91,50	92,91	95,62	95,73
4	Kecamatan Raba	89	90	90,74	94,74	94,83
5	Kecamatan Asakota	92,80	93,16	94,76	96,76	96,80

Sumber : Dinas PUPR Kota Bima, 2020

Secara umum kinerja pelayanan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang dalam kurun waktu 2015 – 2019 sebagaimana ditunjukkan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.42
Perkembangan Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	URUSAN PEKERJAAN UMUM	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik (%)	67,16	72,01	76,18	70,75	69,08
2.	Rasio Jaringan Irigasi Teknis	0,51	0,55	0,72	0,70	0,71
3.	Persentase Jaringan Irigasi Teknis (%)	51,20	54,53	71,74	70,44	70,92
4.	Rumah tangga pengguna air bersih (%)	80,87	87,19	93,25	84,04	94,89

No	URUSAN PEKERJAAN UMUM	2015	2016	2017	2018	2019
5.	Rumah tangga bersanitasi layak (%)	76,50	80,23	87,23	88,45	91,41
6.	Luas permukiman kumuh (%)	3,43	8,17	6,03	0,79	0,38
7.	luas kawasan tepian air (*waterfront city*) yang tertata (%)	14,23	27	33	38	41
8.	konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi (%)	96,98	100,51	99,85	100	100
9.	Penerangan Jalan Umum yang berfungsi baik (%)	45,00	79,64	100,00	100,00	100,00
10.	Meningkatnya Kelancaran Saluran Drainase (%)	36,20	43,99	57,03	70,62	74,54
11.	Panjang Sungai Tertangani (%)	45,92	47,26	50,89	54,71	60,12
12.	Luas Wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang (%)	20	20	20	20	20
13.	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	4,81	5,20	5,54	6,88	8,84

Sumber: Dinas PUPR Kota Bima, 2020

Pada bidang penataan ruang yang mencakup aspek perencanaan, pemanfaatan maupun pengendalian, salah satunya memfokuskan pada ketersediaan dokumen bidang penataan ruang yang akan dijadikan pedoman dalam proses pembangunan secara umum. Indikatornya yaitu dengan tersedianya dokumen perencanaan sesuai Undang-Undang Penataan Ruang, yaitu Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031, telah terealisasi.

Adapun sistem perkotaan menurut Perda Nomor 4 Tahun 2012, yaitu menyebutkan bahwa Pusat Kegiatan Nasional (PKN) berada di Kota Bima; Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) berada di Bima; Sub Pusat Kota berada di Mpunda dan Raba.

d. Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman

Menurut Undang-Undang Nomor 4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman, rumah adalah bangunan yang berfungsi sebagai tempat

tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa. Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Lebih lanjut, Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat menyatakan bahwa Pemerintah memberikan pelayanan dalam bidang perumahan rakyat agar masyarakat mampu menghuni rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat dan aman yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU).

Tabel 2.43
Perkembangan Permukiman Kumuh dan Rumah Layak Huni di Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No.	Perumahan dan Kawasan Permukiman	2015	2016	2017	2018	2019
1.	% luas permukiman kumuh	3,43	8,17	6,03	8,03	7,23
2.	% Rumah Layak Huni	91,51	88,88	91,28	85,26	103,47

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bima, 2020

Persentase luas permukiman yang tertata adalah proporsi luas area permukiman yang sesuai dengan peruntukan berdasarkan rencana tata ruang satuan permukiman terhadap luas area permukiman keseluruhan.

Tabel 2.44
Luas Permukiman yang Tertata di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	luas area permukiman tertata (Ha)	1.463,78	1.656,61	1.587,03	1.688,98	1.701,12
2.	luas area permukiman keseluruhan (Ha)	1.755,13	1.804	1.816,07	1.863,96	1.885,23
3.	Persentase Luas	83,40	91,83	87,39	90,61	90,23

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
	Permukiman yang Tertata (%)					

Sumber : Dinas Statistik Daerah, 2020

Tabel 2.45
Persentase Kawasan Permukiman yang Tertata Menurut Kecamatan di Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kecamatan Rasanae Barat	83	85,83	97,04	98,65	97,54
2	Kecamatan Rasanae Timur	69	93,87	66,90	77,84	77,34
3	Kecamatan Mpunda	90	95,71	94,31	95,65	95,15
4	Kecamatan Raba	94	96,10	90,75	90,95	91,03
5	Kecamatan Asakota	81	87,67	87,95	89,91	90,12
Rata-rata		80,8	83,40	91,83	87,39	90,61

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2020

e. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Salah satu faktor syarat terlaksananya pembangunan adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, konflik yang terjadi terus menunjukkan trend penurunan sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.46.
Kondisi Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat di Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2015	2016	2017	2018	2019
19.1.	jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0
19.2	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	15%	20%	20%	20%	20%
19.3	% Gejala Konflik yang diatasi	10%	15%	30%	30%	35%
19.4	Persentase Cakupan wilayah potensi konflik	10%	5%	15%	20%	20%
19.5	Presentase Pembinaan terhadap LMS dan Ormas	20%	15%	40%	45%	60%

No.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	2015	2016	2017	2018	2019
19.6	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat	15%	25%	20%	30%	45%

Sumber: Bakesbangpol Kota Bima, 2020

Upaya penurunan konflik dilakukan dengan melakukan pemilihan strategi, kebijakan, dan program yang tepat dengan meningkatkan koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini. Namun demikian jika konflikpun terjadi maka akan diusahakan agar cepat diselesaikan secara optimal agar tidak berdampak luas.

Untuk penanganan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota telah dilakukan secara preventif. Selama kurun waktu tahun 2015 – 2019, jumlah pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebanyak 115 kasus dan telah tertangani seluruhnya.

f. Urusan Sosial

Permasalahan sosial merupakan permasalahan yang harus dihadapi oleh Kota Bima saat ini dan di masa yang akan datang, berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Bima dan masyarakat serta swasta diantaranya pemberdayaan fakir miskin dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), kegiatan penanganan PMKS, dan jumlah sarana sosial (seperti panti sosial, panti jompo, dan panti rehabilitasi). Adapun jumlah sarana sosial pada tahun 2019 di Kota Bima baru berjumlah 3 LKS.

Pemerintah Kota Bima dalam melakukan penanganan terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) hingga kini terus diupayakan oleh Dinas Sosial dengan berbagai cara, salah satunya pendampingan serta pemberian pekerjaan bagi orang-orang yang bekerja di jalan agar menjadi produktif. Jenis dan jumlah masalah kesejahteraan sosial di Kota Bima pada tahun 2019 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.47.
PMKS Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No	PMKS	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Anak Balita Terlantar (jiwa)	8	2	313	313	22
2.	Anak Terlantar (jiwa)	169	81	699	721	378
3.	Anak Yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	0	0	78	78	0
4.	Anak Nakal (jiwa)	114	154	493	493	0
5.	Anak Jalanan (jiwa)	56	9	94	94	63
6.	Korban Tindak Kekerasan (jiwa)	0	105	161	161	0
7.	Anak yang berhadapan dengan Hukum	0	0	11	11	58
8.	Anak Dengan Kedisabilitasan (ADK)	3	45	137	137	0
9.	Penyandang Disabilitas	113	118	568	568	907
10.	Penyandang Disabilitas Berat	33	0	163	163	0
11.	Lanjut Usia Terlantar (jiwa)	306	312	1.438	1.626	285
12.	Korban Tindak Kekerasan	36	0	345	345	80
13.	Tuna Susila (jiwa)	0	0	16	16	16
14.	Gelandangan (jiwa)	5	7	24	24	0
15.	Keluarga Bermasalah Sosial	8	26	109	109	0
16.	Bekas Warga Binaan Lembaga Kemasyarakatan (BWBLK)	95	87	342	343	290
17.	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (jiwa)	6	32	246	212	60
18.	Korban Penyalahgunaan Napza (jiwa)	25	67	212	246	224
19.	Orang dengan HIV/AIDS (jiwa)	0	3	3	3	0
20.	Kelompok Minoritas	0	2	39	39	0
21.	Korban Trafficking	0	0	0	0	0
22.	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi (jiwa)	33	81	795	1.007	0
23.	Keluarga Fakir Miskin (KK)	107	984	4.615	20.015	9.618
24.	Keluarga Berumah Tidak Layak Huni (KK)	55	147	1.111	1.111	0
25.	Korban Bencana Alam (KK)	10	102	996	996	221
26.	Korban Bencana Sosial atau Pengungsi (KK)	7	56	179	179	136
Total		1.189	2.417	10.067	29.007	12.768

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2020

Dari jumlah PMKS sebagaimana ditunjukan dalam tabel tersebut di atas, penanganan PMKS di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 2015 hanya 16,10 persen PMKS yang ditangani dan pada tahun 2019 telah meningkat menjadi 84,59 persen.

2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

a. Ketenagakerjaan

Sampai dengan tahun 2019, Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Bima telah mencapai 3,51 persen atau setara dengan 2.089, jika dibandingkan dengan tahun 2018, TPT mencapai 8,89 persen dan pada tahun 2017 TPT mencapai 10,15 persen. Kondisi ini lebih rendah 5,38 poin. Menurunnya tingkat pengganggguran, menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja produktif dan berkualitas telah mampu memperoleh pekerjaan untuk dapat hidup layak, berkualitas dan sejahtera.

Tabel 2.48.
Angka Pengangguran di Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	JUMLAH PENDUDUK ≥ 15 THN (JIWA)	114.688	117.003	120.178	122.780	122.780
2	ANGKATAN KERJA (JIWA)	76.867	80.768	86,954	87,544	87.544
	Bekerja	69.063	76.164	83.905	85.455	85.455
	Pengangguran/TPT	7.804	4.604	3.049	2.39	4,18

Sumber: Kota Bima Dalam Angka, BPS Kota Bima, 2020

Adapun penanganan keselamatan dan perlindungan tenaga kerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja mencapai 73,24%, serta kasus ketenagakerjaan yang diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 13 kasus.

Strategi yang yang dilakukan dalam penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan diantaranya mendukung Pembentukan Layanan Terpadu Satu Pintu (LTSP) dalam rangka mendekatkan Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI di LTSP, kegiatan Informasi Pasar Kerja (*job fair*), peningkatan kompetensi kepada calon tenaga kerja melalui pendidikan dan

pelatihan, dan menjaga kondusifitas hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja dengan meningkatkan peran Pengawas ketenagakerjaan dalam mengawasi/penegakan penerapan Undang-Undang Ketenagakerjaan di perusahaan.

b. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak

Untuk melihat pemberdayaan perempuan, kita dapat melihat dua indikator makro yang dapat mengukur sejauh mana upaya pengarusutamaan gender dilakukan di Kota Bima yaitu indikator Partisipasi perempuan dalam pembangunan serta tingkat penanganan pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Partisipasi perempuan dalam lembaga pemerintah maupun lembaga swasta menunjukan peningkatan selama kurun waktu 2015-2019. Pada tahun 2015 partispasi perempuan di lembaga pemerintahan (Pemerintah dan DPRD) mencapai 50 persen turun menjadi 37,31 persen pada tahun 2019. Sedangkan partisipasi perempuan di lembaga swasta pada tahun 2019 telah mencapai 57,94 persen.

Tabel 2.49.
Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	2015	2016	2017	2018	2019
11.1	Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah (%)	50	44,91	37,31	69,99	37,31
11.2	Partisipasi perempuaan di Lembaga Swasta (%)	50	47,48	57,94	20,86	57,94
11.3	Partisipasi perempuan di lembaga legislative (%)	12,00	12,00	12,00	16,00	16,00
11.4	Pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan (%)	0,05	0,09	100,00	0,16	0,72
11.5	Terwujudnya Kota Bima Kota Layak Anak	-	-	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas PPPA Kota Bima, 2020

c. Pangan

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan, menjelaskan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup,

baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif secara berkelanjutan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH adalah susunan beragam pangan atau kelompok pangan yang didasarkan atas sumbangan energi terhadap total energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan yang mampu mencukupi kebutuhan konsumsi pangan penduduk secara kualitas, kuantitas maupun keragamannya, dengan mempertimbangkan aspek-aspek sosial, ekonomi, budaya, agama dan cita rasa. PPH menggambarkan kualitas konsumsi pangan masyarakat untuk hidup sehat dan dikatakan ideal bila mendekati skor 100 berdasarkan kesepakatan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi tahun 1998 yang menggunakan bobot (rating) FAO RAPA (1989) yang terus disempurnakan menjadi Pola Pangan Harapan (PPH) tahun 2020.

Tabel 2.50.
Perkembangan Pola Pangan Harapan Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	Ketahanan Pangan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	- Skor pola pangan dan harapan (PPH)	83,60	85,00	85,30	95,30	94
2.	- Penanganan daerah rawan pangan	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Kota Bima, 2020

Subsistem ketahanan pangan yang sangat menentukan ketersediaan pangan adalah subsistem ketersediaan pangan. Hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012 mensyaratkan penyediaan pangan setara energi minimal yang harus disediakan sebesar 2.200 kal/kapita/hari dan protein sebesar 57 gr/kapita/hari, sebagai penilaian jumlah zat gizi yang diperlukan setiap individu untuk hidup sehat dan beraktifitas. Ketersediaan energi dan protein di Kota Bima tahun 2015-2019 cukup berfluktuatif,

namun selalu melampaui ketersediaan minimal yang dipersyaratkan. Secara keseluruhan ketersediaan energi mengalami peningkatan rata-rata mencapai 5,69 persen/tahun.

Selain menjamin ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi, penyediaan pangan melalui pengembangan cadangan pangan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan pangan dalam mengisi kesenjangan antara produksi dan kebutuhan terutama pada saat terjadi bencana, paceklik serta menjaga stabilitas harga. Cadangan pangan merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kuatnya ketahanan pangan suatu wilayah atau daerah.

d. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dalam melaksanakan Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Bidang Administrasi Kependudukan dan Capil, tergambar bahwa Rasio penduduk yang telah memiliki e-KTP terus mengalami peningkatan dimana pada tahun 2015 adalah sebesar 89,31% naik menjadi 99,14% pada tahun 2019.

Rasio penduduk ber-KTP adalah perbandingan jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas yang ber-KTP terhadap jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau telah menikah.

Tabel 2.51.

Jumlah Penduduk Menurut Kepemilikan KTP dan Akte Lahir Tahun 2015 – 2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk keseluruhan	137.851	139.366	143.804	146.959	149.498
Jumlah Penduduk Wajib KTP	95.983	97.107	101.452	102.173	104.547
Jumlah Penduduk Pemegang e-KTP	66.381	92.852	96.404	98.987	103.651
Jumlah Penduduk Pemegang KTP Manual (non e-KTP)	-	-	-	-	-
Total Penduduk ber-KTP	85.726	92.852	96.404	98.987	103.651
Kepemilikan KTP (%)	89,31	95,61	95,02	67,36	99,14

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Penduduk ber-akte lahir	44.868	52.359	57.170	69.663	70.015
Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk)	325,48	375,69	397,55	473,84	468,33

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, 2020

e. Urusan Lingkungan Hidup

Pelayanan pengelolaan sampah di Kota Bima selama kurun waktu tahun 2015-2019 terus mengalami peningkatan. Kondisi kinerja pada tahun 2015 dalam pelayanan persampahan sebesar 20,50 %, selanjutnya meningkat pada tahun 2019 menjadi sebesar 54,10%. Pelayanan persampahan ini di Kota Bima masih difokuskan pada kawasan perkotaan yang meliputi kecamatan Rasanae Barat, Kecamatan Mpunda dan Kecamatan Raba serta sebagian Kecamatan Asakota. Sedangkan Kecamatan Rasanae Timur baru sebagian Kelurahan yang sudah terlayani dengan baik penanganan persampahannya.

Tabel 2.52.
Jumlah Volume Sampah dan Produksi Sampah di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah volume produksi sampah (M3)	397,80	407,73	419,95	416,02	389,72

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, 2020

Tabel 2.53.
Penanganan Sampah Menurut Kecamatan di Kota Bima
Tahun 2015 – 2019

No	Kecamatan	Jumlah volume produksi sampah (M3)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kecamatan Rasanae Barat	81,06	89,03	93,16	95,05	110
2	Kecamatan Mpunda	92,36	92,96	97,76	97,69	48,5
3	Kecamatan Raba	99,03	99,67	102,89	102,74	48
4	Kecamatan Rasanae Timur	46,05	46,35	46,34	43,41	12

No	Kecamatan	Jumlah volume produksi sampah (M3)				
		2015	2016	2017	2018	2019
5	Kecamatan Asakota	79,30	79,72	79,8	77,11	26,5
Jumlah		219,00	397,80	407,73	416,02	245

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, 2020

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Daya tampung TPS dihitung dengan satuan Ton. Dengan menggunakan konversi maka 1 ton setara dengan 3 M3.

Tabel 2. 54.
Rasio TPS terhadap Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	TPS		Rasio (Per 1000 Penduduk)
			Jumlah (unit)	Jumlah Daya Tampung (Ton)	
1.	Rasanae Barat	38.778	12	48	1,23
2.	Mpunda	39.852	10	40	1,00
3.	Raba	41.915	3	12	0,29
4.	Rasanae Timur	17.711	3	12	0,68
5.	Asakota	31.458	6	24	0,76
Jumlah		169,714	34	136	3,96

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Bima, 2020

Angka Pencemaran dan Perusakan Lingkungan juga dapat dikendalikan seiring dengan makin meningkatnya peran lembaga masyarakat yang peduli terhadap pelstarian sumber daya alam, dimana pada tahun 2019 telah terbentuk 5 POKMAS Peduli lingkungan.

Dari aspek ketersediaan Ruang Hijau Publik minimal 20% juga sudah memenuhi ketentuan minimum tersebut dimana pada tahun 2015 luas RTH Publik baru mencapai 16,90% dan pada tahun 2019 telah mencapai 23,75%.

f. Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama.

Pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diukur oleh 3 (tiga) indikator kinerja kunci yan harus dicapai oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bima. Yang pertama adalah cakupan peserta KB aktif dari kondisi tahun 2015 sebesar 62,00% dan pada tahun 2016 sampai dengan 2019 mengalami peningkatan dengan capaian menjadi 98,36%. Begitu pula untuk indikator yang kedua yaitu Jumlah peserta KB aktif dari 2,21% pada tahun 2015 naik menjadi 2,74% pada tahun 2019. Untuk indikator yang ketiga yaitu % keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I mulai tahun 2016 sampai dengan 2018 capaian kinerja mencapai lebih dari 100% tetapi pada tahun 2019 mengalami sedikit peningkatan dimana dari target 51,25% hanya terealisasi sebesar 53,88%.

g, Urusan Perhubungan

Meningkatnya jumlah penduduk kota akan disertai dengan penambahan jumlah sarana angkutan darat baik angkutan publik yaitu kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta angkutan umum, dan menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah bagaimana memfasilitasi kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Pada tahun 2019 jumlah kendaraan angkutan umum di Kota Bima sebanyak 2.577 unit yang terdiri dari 2.214 kendaraan bermotor dan sebanyak 343 unit kendaraan tidak bermotor. Lambannya pertumbuhan angkutan umum disebabkan oleh wilayah Kota Bima yang tidak terlalu luas serta jumlah kepemilikan kendaraan bermotor roda dua yang tinggi di Kota Bima.

Tabel 2.55.
Kendaraan Angkutan Umum di Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	Kendaraan Umum	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bus	136	138	189	189	189
2	Mobil Penumpang	359	675	362	692	680
3	Mobil Barang	1.249	1.249	747	1.345	1.365
4	Kendaraan tidak bermotor	405	405	243	400	343
	Jumlah	2.149	2.464	1.541	2.626	2.577

Sumber: BPS Kota Bima, 2020

Sedangkan berdasarkan trayek, Angkutan umum di Kota Bima didominasi oleh trayek Antar Kota Antar Provinsi dan Antar Kota Dalam Provinsi terutama Bus Malam jurusan Bima- Mataram PP. Hal ini ditunjang oleh keberadaan terminal AKAP Dara, serta terminal type C Kumbe dan Jatibaru.

Tabel 2.56.
Jumlah Angkutan Umum Menurut Trayek di Kota Bima
Tahun 2015-2019

No	Trayek	2015	2016	2017	2018	2019
1	AKAP dan AKDP	371	194	208	208	208
2	Trayek Dalam Kota	195	40	40	38	38
3	Trayek Angkutan Pedesaan	58	34	82	85	85

Sumber: BPS Kota Bima, 2020

Adapun pelayanan pada urusan perhubungan terkait dengan penyediaan fasilitas dan prasarana perhubungan menunjuKkan peningkatan dari tahun 2015 sebanyak 35 persen bertambah menjadi 64 persen pada tahun 2019 sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.57.
Ketersediaan Prasarana Perhubungan di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No	Prasarana LLAJ	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Persentase ketersediaan fasilitas dan prasarana LLAJ (%)	35,00	37,00	55,00	64,00	64,00
2.	Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi (%)	97,33	98,51	100,00	100,00	100,00
3.	Persentase angkutan umum yang lulus uji KIR (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Bima, 2020

h. Urusan Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Kota Bima telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui https://bimakota.go.id .

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Kota Bima menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai data perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, capaian kinerja, statistik, regulasi, LHKPN dan data aset. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik meliputi maklumat pelayanan, daftar informasi pelayanan (DIP), jenis pelayanan, standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporan permohonan dan keberatan terpublikasikan dalam website Kota Bima. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran Pemerintah Kota diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Kota Bima dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

i. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah UMKM, pada awal tahun 2015 tercatat sebanyaak 4.944 UMKM dan pada tahun 2019 telah tumbuh mencapai 8.654 UMKM.

Sedangkan Jumlah Koperasi Aktif, pada tahun 2015 tercatat sebanyak 64 koperasi dan pada tahun 2019 bertambah menjadi sebanyak 94 koperasi koperasi aktif.

Selain itu, Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) KUMKM juga telah didirikan dan mulai beroperasi sejak tahun 2014 dengan tujuan untuk memberikan pelayanan konsultan pelatihan bisnis, pendampingan bisnis, fasilitasi akses pembiayaan, fasilitasi pemasaran dan promosi, networking dan layanan perpustakaan usaha, yang dibantu oleh 7 orang konsultan pendamping untuk mendampingi KUMKM.

Tabel 2.58.
Pertumbuhan UMKM di Kota Bima Tahun 2015 – 2019

No	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah UMKM	4944	6303	7080	7905	8654
2.	Jumlah Koperasi Aktif	85	93	108	108	94

Sumber: Dinas Koperindag Kota Bima, 2020

j. Penanaman Modal

Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun asset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestic maupun ekspor. Krusial karena memerlukan daya visioner yang jauh kedepan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional. Sehubungan dengan itu diperlukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas peran dan kegiatan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat lainnya dalam mengelola kegiatan investasi untuk membangun Kota Bima.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat disuatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi jamak jika kebijakan ekonomi pemerintah diarahkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dan untuk menjaga kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ketahun.

Guna mendorong pertumbuhan semakin cepat, dan kesempatan berusaha yang semakin luas, diperlukan berbagai kemudahan usaha yang semakin baik, kemudahan untuk menjangkau permodalan dan pasar yang semakin luas bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Kebijakan penanaman modal daerah harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan. Penanaman modal yang kondusif dengan terus mengembangkan kegiatan-kegiatan ekonomi yang bisa mengubah keunggulan komperatif menjadi keunggulan kompetitf. Untuk mencapai hal tersebut, diperlukan arah perencanaan penanaman modal yang jelas dalam jangka panjang yang termuat dalam sebuah dokumen Rencana Umum Penanaman Modal. Untuk mendukung pelaksanaan RUPMP guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan diperlukan kelembagaan yang kuat baik di Kota. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, dan koordinasi masing masing pihak.

Nilai investasi PMDN di Kota Bima sesungguhnya baru mulai ditertibkan data-datanya pada akhir tahun 2016 sehingga data investasi yang bisa disajikan adalah data mulai tahun 2017. Namun demikian reformasi di bidang pelayanan perijinan juga sudah dimulai juga dengan melaksanakan survey kepuasan konsumen untuk memperoleh nilai indeks kepuasan konsumen terhadap pelayanan perijinan dan pelayanan penanaman modal di Kota Bima.

Tabel 2.59.
Nilai Investasi PMDN di Kota Bima Tahun 2015 – 2019

No	Nilai Investasi PMDN	2015	2016	2017	2018	2019
1	I. Jumlah Realisasi Nilai Investasi PMDN - SIUP Mikro Rp. 9.629.000.000 - SIUP Kecil Rp. 83.626.000.000 - SIUP Menengah Rp.46.600.000.000 - SIUP Besar Rp. 95.500.000.000 - Izin Prinsip Rp. 558.300.000.000	NA	NA	Rp. 793.655.000.000	Rp. 196.883.397.742	Rp. 604.275.484.278

	I. Jumlah Investor PMDN - SIUP Mikro 332 Investor - SIUP Kecil 438 Investor - SIUP Menengah 38 Investor - SIUP Besar 4 Investor - Izin Prinsip 1 Investor	NA	NA	813 Investor	692 Investor	926 Investor
2	Indeks Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan - Persyaratan Nilai 71,83 - Prosedur Nilai 74,83 - Waktu pelayanan Nilai 74,67 - Biaya/ Tarif Nilai 88,00 - Produk spesifikasi jenis pelayanan Nilai 89,00 - Kompetensi pelaksana Nilai 81,00 - Perilaku pelaksana Nilai 81,83 - Maklumat pelayanan Nilai 85,83 - Penanganan Pengaduan, saran dan masukan Nilai 84,33	NA	NA	81,25 (Kategori Baik)	76,86 (Kategori Baik)	80,90 (Kategori Baik)

Sumber: DPMPTSP Kota Bima, 2020

k. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan pelayanan bidang Kepemudaan dan Olahraga di Kota Bima tahun 2015-2019 untuk peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, dan peningkatan capaian prestasi pemuda dan olah raga.

Tabel 2.60.
Prestasi dan Prasarana Olah Raga Kota Bima
Tahun 2015-2019

No	Urusan Kepemudaan dan Olahraga	2015	2016	2017	2018	2019
1	Capaian PrestasiPemuda dan Olahraga	7	5	13	10	7
2	Jumlah Klub Olahraga	25	27	27	27	27
3	Jumlah Gedung Olahraga	2	2	3	3	3

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bima, 2020

l. Kebudayaan

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2015-2019 telah oleh Pemerintah Kota Bima dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat serta nilai budaya lokal yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai budaya dan pembentukan pranata adat di masyarakat. Pranata adat adalah nilai luhur nenek moyang yang telah

ada, terpatri dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bima sehingga menjadi sebuah karakter budaya. Perkembangan pembentukan pranata adat di Kota Bima tahun 2015-2019 sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.61.
Perkembangan Pranata Adat Yang Terbentuk Menurut di Kota Bima Tahun 2015 – 2019

No	Pranata Adat	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah lembaga Pranata Adat	5	10	5	38	41
	Jumlah	5	10	5	38	41

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bima, 2019

m. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses informasi saat ini terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik, melalu pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia.

Tabel 2.62.
Perkembangan Pranata Adat yang Terbentuk Menurut di Kota Bima Tahun 2015 – 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan (orang)	3.000	3.874	4.124	15.000	19.057

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bima, 2020

n. Kearsipan

Kearsipan merupakan suatu proses yang diawali dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

2.1.3.3. Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Perikanan dan Kelautan

Luas wilayah daratan pesisir Kota Bima yang diukur dari luas wilayah administratif (desa/kelurahan pesisir) sekitar 50,78 km2 dan luas wilayah laut yang menjadi wilayah pengelolaannya sekitar 11,48 km2 dengan panjang garis pantai sekitar 26 km. Ditinjau dari luas wilayahnya, baik wilayah pesisir dan laut maupun wilayah daratan yang hanya sekitar 222,25 km2, Kota Bima memiliki luas wilayah yang lebih sempit dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Propinsi NTB. Meskipun demikian pada kawasan pesisir dan laut yang menjadi kewenangan Kota Bima memiliki nilai-nilai strategis dan keunggulan dari aspek sarana dan prasarana maupun keanekaragaman hayati dan non hayati. Hal ini juga didukung oleh kebijaksanaan Propinsi NTB yang menetapkan Kawasan Teluk Bima sebagai Kawasan Strategis Pariwisata dan Perikanan Provinsi NTB.

Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan ini perlu diupayakan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas perikanan dan kelautan sehingga mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat pesisir. Kebijakan yang ditempuh untuk mencapai sasaran yang ditetapkan adalah optimalisasi pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan yang didukung program pengadaaan sarana dan prasarana perikanan dan kelautan, revitalisasi kelompok tani nelayan, peningkatan pengetahuan kelompok tani dan nelayan serta kebijakan layanan pembinaan petani nelayan.

Tabel. 2.63.
Perkembangan Pelayanan Urusan Perikanan dan Kelautan Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	Perikanan dan Kelautan	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	14 klp	15 klp	22 klp	26 klp	15 klp
2.	Jumlah Produksi Perikanan	2.689,30 ton	2.526,27 ton	2.822,61 ton	2.847,73 ton	2.870,02 ton
3.	Jumlah Produk olahan yang dihasilkan	976,70 ton	781,67 ton	827,27 ton	857,57 ton	6.324,632 ton
4.	Tingkat konsumsi ikan perkapita pertahun	33,90 kg/kapita/	31,96 kg/kapita/	38,83 kg/kapita/	42,33 kg/kapit	38,46 kg/kapita/

No	Perikanan dan Kelautan	2015	2016	2017	2018	2019
		tahun	tahun	tahun	a/ tahun	tahun

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima, 2020

Cakupan Bina Kelompok Kelautan dan perikanan, pada tahun 2015 tercatat 14 kelompok dan terjadi peningkatan cakupan bina kelompok pada tahun 2019 yaitu 15 kelompok. Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan meliputi peningkatan kelas kelompok yaitu kelompok pemula, kelompok madya dan kelompok utama.

Jumlah produksi perikanan, pada tahun 2015 tercatat 2.689,30 ton dan pada tahun 2016 mengalami penurunan, namun pada tahun 2017 terus mengalami peningkatan sampai tahun 2019. Beberapa faktor yang menyebabkan produksi budidaya antara lain bertambah nya sarana dan prasarana budidaya. Produksi Perikanan Budidaya di Kota Bima cenderung stabil atau menunjukan tren yang positif di mana pada setiap tahunnya mengalami pertumbuhan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini tidak terlepas dari adanya dukungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Bima terkait dengan bantuan bibit ikan unggul bagi kelompok budidaya baik tawar, laut maupun payau, bantuan sarana dan prasarana budidaya serta semakin tingginya kesadaran dari kelompok pembudidaya ikan untuk terus mengembangkan usahanya.

Jumlah produk olahan yang dihasilkan semakin meningkat sampai tahun 2019 sebesar 6.324,632 ton. Pengembangan produk hasil perikanan yang bernilai tambah merupakan suatu hal yang harus terus dilakukan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa pergeseran yang terjadi di masyarakat antara lain adanya perubahan gaya hidup, perubahan pola konsumsi, banyaknya wanita/ibu rumah tangga yang bekerja, konsumen yang lebih menyukai produk yang lebih praktis, daya simpan produk olahan lebih lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Tingkat Konsumsi ikan perkapita pertahun pada tahun 2015 sebesar 39,35 Kg/Kapita/Tahun dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2019 yaitu sebesar 38,46 Kg/Kapita/Tahun. Tingkat Konsumsi Ikan di Kota Bima cenderung menurun meskipun pada setiap tahunnya mengalami kenaikan dan penurunan. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada Tahun

2018 walaupun pada tahun 2019 ada sedikit penurunan, hal ini terjadi karena adanya program/kegiatan yang mendukung pengolahan dan pemasaran seperti penyediaan sarana prasarana pengolahan dan pemasaran hasil yang bersumber dari DAK. Di samping itu, penurunan jumlah konsumsi ikan disebabkan karena semakin rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengkonsumsi ikan terutama ikan segar.

2. Pariwisata

Sektor pariwisata Kota Bima memiliki potensi yang besar sebagai daerah transit wisata dengan banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia yang ada di Kabupaten Bima maupun di Kabupaten Dompu seperti Pantai Lariti, Pantai Pink, Pulau Ular, Gunung Sangiang Api, Pantai Lakey, Gunung Tambora maupun kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Pembangunan pariwisata memiliki kontribusi signifikan dalam pembangunan ekonomi daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah. Keberhasilan kinerja pembangunan pariwisata ini ditunjukkan dengan Peningkatan Kunjungan Wisatawan baik mancanegara dan nusantara seperti yang terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.64.
Angka Kunjungan Wisatawan Tahun 2015 - 2019

Indikator	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Kunjungan wisatawan	19.168	19.503	37.617	17.771	71.646
- Mancanegara	1.157	1.157	1.152	1.159	1.966
- Nusantara	18.011	18.012	36.565	36.462	69.680

Sumber: Dinas Pariwisata Kota Bima, 2020

3. Pertanian

Jumlah produksi pertanian tanaman pangan pada tahun 2015 adalah 52.681 ton dan meningkat menjadi 83.823 ton pada tahun 2019.

Adapun jumlah ternak yang sudah mendapat pengkartuan ternak pada tahun 2015 sebanyak 15.396 ekor dan bertambah menjadi 18,057 ekor pada tahun

2019. Sedangkan jumlah ternak yang mendapat vaksinasi pada tahun 2019 sebanyak 18.959 ekor.

Tabel 2.65.
Perkembangan Produksi Pertanian di Kota Bima
Tahun 2015 – 2019

No	Pertanian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan (Ton)	52,681	47,460	48,330	62,726	83,823
	- Padi (GKG)	42,425	35,808	34,615	31,269	29,251
	- Jagung	8,028	9,955	12,406	30,307	53,573
	- Kedelai	2,228	1,697	1,309	1,150	53,573
	-Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton)	55,731.0	50,553.0	50,817.0	63.084	138.260
	- Padi (GKP)	42,425	35,808	34,615	31,269	29,251
	- Jagung (PK)	8,028	9,955	12,406	30,307	53,573
	- Kedelai (BK)	2,228	1,697	1,309	1,150	53,573
	- Kacang Tanah (BK)	281	383	368	283	280
	- Kacang Hijau (BK)	11	110	62	45	13
	- Ubi Kayu (UB)	2,679	2,600	2,313	30	1,570
	- Ubi Jalar (UB)	79	-	26	-	-
3.	Produksi perkebunan (Ton) = Jumlah produksi perkebunan pada tahun n 1) Tembakau 2) Jambu mente 3) Kelapa	 1) 2,10 2) 58,41 3) 25,56	 1) 2,10 2) 155,91 3) 27,45	 1) 2,10 2) 157,65 3) 27,07	 1) 1,40 2) 150,40 3) 26,08	 1) 1,00 2) 144,62 3) 21,75
4.	Pengkartuan Ternak (ekor)	15,396	15,186	18,134	16,479	18,057
5.	Vaksinasi Ternak (ekor)	16,818	21,970	18,388	17,303	18,959
6.	Penurunan Angka Kematian Pedet	17%	20%	19%	20%	20%
7.	Penurunan Kasus	26%	42%	99%	82%	87%

No	Pertanian	2015	2016	2017	2018	2019
	Penyakit Hewan Menular					

Sumber: Dinas Pertanian Kota Bima, 2020

4. Perdagangan

Penyediaan pasar tradisional sebagai pusat distribusi perdangan, pada tahun 2015 tercatat sebanyak 6 pasar tradisional. Adapun realisasi penyediaan pasar tradisional setiap tahun hingga tahun 2019 yaitu masing-masing satu unit los pasar tradisional yang dibangun.

Jumlah Pedagang Kaki Lima dan Asongan yang ditangani, pada tahun 2015 sebanyak 272 dan pada tahun 2019 sebanyak 450 orang pedagang kaki lima dan pedagang asongan dapat ditangani.

5. Industri

Jumlah industri Kecil Menengah (IKM), pada tahun 2015 sebanyak 121 IKM dan pada tahun 2019 berkembang menjadi 151 IKM. Sedangkan jumlah sentra industri yang ditangani, mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 73 sentra.

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1. Angka Konsumsi Per Rumah Tangga Per Kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi RT semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dapat diketahui dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih. Bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

Untuk mengatahuai pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita yaitu dengan menghitung angka rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita, dimana Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. konsumsi per rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar rasio atau angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan kemampuan ekonomi daerah.

Tabel 2.66.
Angka Konsumsi RT per Kapita di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Pengeluaran RT (Rp)	848.976	1.301.852	1.100.618	1.084.821	1.399.041
2	Jumlah RT	39.020	39.842	40.681	42.331	43.498 *
3	Rasio (1/2)	21,76	32,68	27,05	25,63	32,16

Sumber : BPS Kota Bima, 2020 (diolah)

2. Konsumsi non pangan

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita dibuat untuk mengetahui pola konsumsi rumah tangga di luar pangan. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita dapat dicari dengan menghitung persentase konsumsi RT untuk non pangan, yaitu proporsi total pengeluaran rumah tangga untuk non pangan terhadap total pengeluaran.

Tabel 2.67.
Persentase Konsumsi RT non-Pangan di Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Pengeluaran RT non pangan (Rp)	587.289,59	639.824,07	546.726	506.559,55	718.651
2	Total Pengeluaran (Rp)	848.976	1.301.852	1.100.618	1.084.821	1.399.041
3	Rasio (%)	69,18	49,15	49,67	46,70	51,37

Sumber : BPS Kota Bima, 2020 (diolah)

2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Aksesibilitas daerah

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan perekonomian suatu daerah akan berdampak terhadap meningkatnya jumlah perjalanan atau mobilisasi dimana kebutuhan terasportasi akan semakin tinggi. Meningkatnya kebutuhan transportasi harus disertai dengan pengembangan sarana dan prasarana transportasi (kendaraan, jalan dan lingkungan).

Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan merupakan salah satu indikator penting aksesibilitas daerah yang digunakan untuk melihat ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan dalam rangka memberikan kemudahan/akses bagi seluruh masyarakat dalam melakukan segala aktivitas di semua lokasi dengan kondisi dan karakteristik fisik yang berbeda.

Ketersediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan di Kota Bima pada tahun 2015 mencapai 1:125 yang berarti bahwa setiap 1 km panjang jalan dapat diakses kendaraan sebanyak 103 kendaraan, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 1:198 atau setiap 1 km jalan dapat di akses oleh 198 kendaraan. Hal ini menunjukkan keterediaan sarana jalan terhadap jumlah kendaraan terus mengalami penurunan yang disebabkan oleh terus meningkatnya jumlah kendaraan setiap tahunnya.

Tabel 2.68.
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No.	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Panjang Jalan (Km)	258,5	312,27	312,27	312,27	312,265
2.	Jumlah Kendaraan	32.287	32.287	51.269	53.415	61.825*
3.	Rasio	1:125	1:103	1:164	1:171	1:198

**) Proyeksi*
Sumber : BPS Kota Bima, 2019, 2018. Dinas PUPR 2020 (diolah)

2. Arus Penumpang dan Barang di Pelabuhan Bima

Pelabuhan merupakan salah satu penggerak perekonominan dengan aktifitas yang ada di dalamnya, baik arus pergerakan penumpang maupun barang. Menginggat pentingnya pelabuhan sebagai sarana transportasi laut bagi perekonomian, maka harus di kembangkan serta di manfaatkan dengan baik sebagai penunjang pertumbuhan perekonomian. Di Kota Bima Terdapat

satu pelabuhan laut, dimana kegiatan bongkar muat barang tercatat mangalami peningkatan pada tahun 2019. Pada tahun 2017 kegiatan bongkar muat barang tercatat sebesar 816.013 ton dan pada tahun 2018 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kegiatan bongkar muat barang yaitu sebesar 1.034.053 ton, sedangkan untuk tahun 2019 sebesar 639.746 ton.

Tabel 2.69.
Jumlah Orang/Barang yang Terangkut Angkutan Umum
Tahun 2017 – 2019

No	Uraian	Tahun		
		2017	2018	2019
1	**Orang**	**85.027**	**93.306**	**84.023**
	Turun	43.015	46.004	44.238
	Naik	42.012	47.302	39.785
2	**Barang**	**816.013**	**1.034.053**	**639.746**
	Bongkar	683.107	752.871	390.899
	Muat	132.906	281.182	248.847

Sumber : Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas IV Bima 2020

3. Penataan Wilayah

Ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah diindikasikan dengan diterbitkanya peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, dimana pada tahun 2012 telah di tetapkan peraturan daerah No 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011 – 2031. Yang merupakan pedoman pemerintah beserta masyarakat dalam upaya pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan peruntukannnya.

Adapun wilayah produktif di Kota Bima meliputi wilayah pertanian, wilayah pertanian holtikultura, wilayah perkebunan, wilayah hutan produksi terbatas serta wilayah hutan produksi tatap, dimana luasan wilayah produktif akan mengalami pergeseran setiap tahunnya mengingat perubahan peruntukan lahan khususnya perkembangan pemukiman atau perumahan yang sangat cepat.

Lusan wilayah produktif adalah persentase realisasi luas wilayah produktif terhadap luas rencana kawasan budidaya sesuai dengan RTRW. Berdasarkan RTRW luas wilayah produktif adalah 14.003 Ha, dengan rincian wilayah pertanian seluas 2.253 ha, wilayah pertanian holtikultura 5.363 ha, wilayah perkebunan 3.632 ha, hutan produksi terbatas 1.497 ha, dan wilayah hutan produksi tetap seluas 1.258 ha. Sedangkan luas wilayah budidaya

18.896 ha, beedasarkan luas wilayah tersebut persentase luasan wilayah produktif terhadap luaasan wilayah budidaya adalah sebesar 74,10%.

Kawasan peruntukkan industri dan pergudangan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima adalah seluas 60,94 Herktar, yang merupakan peruntukan industri menengah, industri pengolahan hasil perikanan, industri garam rakyat, serta industri pengolahan hasil pertanian. Untuk industri kecil seperti tenun dan lainnya menyatu dengan permukiman yang berada pada Kelurahan Ntobo, Nitu, Rabadompu Barat, Raba Dompu Timur, Kumbe, yang didukung oleh kegiatan industri tenun di seluruh kelurahan yang berada di Kota Bima.

4. Fasilitas Bank dan Non Bank

Bank memiliki peran yang sangat penting dan strategis di dalam menopang pembangunan ekonomian. Sebagai lembaga jasa keuangan, bank memiliki peran terhadap bergeraknya laju pertubuhan perekonomian pada suatu daerah, baik melalui penyaluran dana ataupun modal terhadap usaha mikro, usaha kecil, ataupun usaha menengah, dimana secara tidak langsung menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat.

Keberadaan bank sebagai pendorong perekonomian masyarakat harus di tunjang oleh keberadaan fasilitas yang di milikinya, dimana fasilitas bank ataupun non bank diukur dengan jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya. Jumlah bank di Kota Bima adalah sebanyak 17 unit, dengan rincian fasilitas bank dan non bank pada tabel berikut.

Tabel 2.70.
Jenis dan Jumlah Bank di Kota Bima Tahun 2019

NO	NAMA BANK	CABANG	UNIT	TERAS
1	BNI	1	1	
2	BRI	1	1	3
3	MANDIRI	1		
4	MANDIRI SYARIAH	1		
5	BNI SYARIAH	1		
6	BRI SYARIAH	1		
7	NTB	1	1	
8	NTB SYARIAH	1		
9	SINAR MAS	1		
10	BUKOPIN	1		

NO	NAMA BANK	CABANG	UNIT	TERAS
11	BTN	1		
12	BTPN	1		
13	BPR Lopok Ganda	1		
14	DANAMON	1		
15	PESISIR AKBAR	1		
16	BANK DINAR	1		
17	BANK PUNDI	1		

Sumber : Hasil Survei 2020

5. Ketersediaan Air Bersih

Air merupakan kebutuhan dasar manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagi keberlanjutan kehidupan, dalam pemenuhan kebutuhan tersebut dibutuhkan sumber-sumber air bersih yang aman untuk di konsumsi. Adapun ketersedian air bersih di Kota Bima yang di akses oleh masyarakat bersumber dari sumur gali terlindung, sumur gali dengan pompa, sumur bor dengan pompa, terminal air, mata air terlindungi, depot air minum, perpipaan (PDAM, BPSPAM), serta perpipaan non PDAM.

6. Fasilitas Listrik

Penyediaan infrastruktur menjadi salah satu aspek penting pada suatu daerah, karena laju pertumbuhan ekonomi tidak terlepas dari pengaruh infrastruktur. Pembangunan dan infrastruktur yang baik akan mampu mendorong peningkatan perekonomian pada suatu daerah yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

Terkait penyediaan fasilitas infrastruktur, penyediaan tenaga listrik menjadi salah satu bagian penting dalam mendorong pertumbuhan perekonomian pada suatu daerah, dimana gambaran umum kondisi daerah terhadap fasilitas listrik dapat dilihat dari jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik. Di Kota Bima Pada tahun 2019 tercatat total rumah tangga pengguna listrik sebanyak 40.271 pelanggan, dimana jumlah rumah tangga yang menggunakan fasilitas listrik dalam kurun waktu 2016 – 2019 terus mengalami peningkatan. Berikut adalah gambaran lengkap jumlah rumah tangga yang menggunakan listrik di Kota Bima.

Tabel 2.71.
Jumlah Pelanggan PLN Kota Bima
Tahun 2015 - 2019

No	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Total Jumlah Rumah Tangga Menggunakan Listrik PLN	Pelanggan	34.550	36.698	39.231	42.734	45.634

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2020

Tabel 2. 72.
Daya Listrik Terpasang dan Jumlah Kebutuhan Listrik
Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	URAIAN	SATUAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Daya Listrik Terpasang	VA	40.453.170	41.453.170	44.896.620	54.655.520	59.010.870
2	Jumlah Kebutuhan Listrik	kWh	155.307.577	63.948.033	68.295.765	75.820.914	76.166.677

Sumber : PT. PLN (Persero) Wilayah NTB Area Bima, 2020

7. Ketersediaan Restoran

Pertumbuhan jumlah penduduk serta pergerakan/ mobilitas yang meningkat dan di tambah dengan kecenderungan masyarakat saat ini lebih memilih makanan cepat saji yang praktis, mendorong berkembangnya sektor industri restoran. Ketersediaan restoran pada suatu daerah menunjukan tingkat daya tarik investasi suatu daerah. Banyaknya restoran dan rumah makan menunjukan perkembangan kegiatan ekonomi suatu daerah dan peluang-peluang yang ditimbulkannya. Di Kota Bima pada tahun 2016 tercatat terdapat 48 restoran/ rumah makan dan pada tahun 2019 jumlahnya mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebanyak 250 restoran/rumah makan, ini menunjukkan bahwa daya tarik investasi dan perkembangan perekonomin barjalan dengan baik.

8. Ketersediaan Penginapan

Ketersediaan penginapan/hotel merupakan salah satu aspek yang penting dalam meningkatkan daya saing daerah, terutama dalam menerima dan melayani jumlah kunjungan dari luar daerah. Semakin berkembangnya investasi ekonomi daerah akan meningkatkan daya tarik kunjungan ke daerah tersebut. Dengan semakin banyaknya jumlah kunjungan orang dan wisatawan ke suatu daerah perlu didukung oleh ketersediaan

penginapan/hotel. Di Kota Bima sendiri pada tahun 2019 jumlah hotel tercatat sebanyak 22 unit dengan jumlah kamar sebanyak 454 kamar.

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Untuk menciptakan realisasi investasi yang berkesinambungan diperlukan sebuah iklim investasi yang kondusif. Iklim investasi yang kondusif dalam perekonomian terkait erat dengan angka kriminalitas, dimana semakin rendahnya angka kriminalitas, maka semakin tinggi tingkat keamanan yang sekaligus merupakan harapan bagi masyarakat, investor, pelaku usaha dan pemerintah. Indikator kriminalitas berguna untuk menggambarkan tingkat keamanan masyarakat. Angka kriminalitas dihitung berdasarkan delik aduan dari masyarakat korban kejahatan dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 2.73.
Angka Kriminalitas Kota Bima Tahun 2015 - 2019

No	Jenis Kriminal	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah Laporan Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	690	496	898	551	442
2.	Jumlah Penduduk	159.736	163.101	166.407	169.714	173.031
Angka Kriminalitas		0,43	0,30	0,54	0,32	0,26

Sumber : Kepolisian Resor Bima Kota, 2020 (diolah)

2. Kemudahan perijinan

Pertumbuhan ekonomi ditentukan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah investasi. Investasi penting untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dengan mendatangkan lebih banyak input kedalam proses produksi. Selain itu investasi memiliki multiplier effects dan memberikan banyak keuntungan bagi banyak pihak, baik perusahaan, masyarakat, maupun pemerintah. Adapun Investasi yang akan masuk ke suatu daerah bergantung kepada daya saing investasi yang dimiliki oleh daerah tersebut. Daya saing investasi suatu daerah tidak terjadi dengan serta merta. Pembentukan daya saing investasi, berlangsung secara terus-menerus dari waktu ke waktu dan dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satunya kemudahan perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses pengurusan perijinan yang terkait dengan persoalan investasi relatif sangat mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari).

Tabel 2.74.
Lama Proses Perijinan Kota Bima Tahun 2019

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	PENANAMAN MODAL			
1	Izin Pendaftaran Penanaman Modal	13	21	Rp. 0,-
2	Izin Perubahan Penanaman Modal	13	6	Rp. 0,-
3	Izin Perluasan Penanaman Modal	13	8	Rp. 0,-
4	Izin Penggabungan Penanaman Modal	13	7	Rp. 0,-
	KOPERINDAG			
5	Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas KSP	13	28	Rp. 0,-
6	Izin Usaha Simpan Pinjam	13	27	Rp. 0,-
7	Surat Izin Menempati Kios (SIMK)	4	8	Rp. 0,-
8	Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	3	20	Rp. 0,-
9	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	3	11	Rp. 0,-
10	Nomor Induk Berusaha (NIB)	3	8	Rp. 0,-
11	Tanda Daftar Gudang (TDG)	3	11	Rp. 0,-
12	Izin Usaha Play Station/Video Game	13	18	Rp. 0,-
13	Izin Usaha Toko Modern (IUTM)	13	21	Rp. 0,-
14	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT)			Rp. 0,-

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
15	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)	13	28	Rp. 0,-
16	Izin Usaha Air Isi Ulang	13	23	Rp. 0,-
17	Izin Usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK)	13	27	Rp. 0,-
18	Izin Penyimpanan Bahan Bakar Minyak (IP BBM)	13	20	Rp. 0,-
19	Izin Agen, Pangkalan Gas Elpiji			Rp. 0,-
20	Izin Usaha Industri (IUI)	13	14	Rp. 0,-
21	Tanda Daftar Industri (TDI)	3	12	Rp. 0,-
	DINAS PEKERJAAN UMUM & PENATAAN RUANG			
22	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	14	7	(Rp. Biaya)
23	Izin Lokasi (investasi)	13	11	(Rp. Biaya)
	PERTANIAN DAN PETERNAKAN			
24	Tanda Daftar Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	14	11	Rp. 0,-
25	Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras	14	11	Rp. 0,-
26	Izin Usaha Pemasukan dan Pengeluaran Ternak	14	20	Rp. 0,-
27	Izin Usaha Peternakan	13	20	Rp. 0,-
28	Izin Usaha Budidaya Burung Walet	13	19	Rp. 0,-
29	Izin Usaha Pemotongan Hewan	13	23	Rp. 0,-
30	izin Usaha toko Obat Hewan	13	25	Rp. 0,-
31	Izin Prakter Dokter Hewan			Rp. 0,-
32	Izin Pengolahan Hasil Pertanian Sertifikasi Benih			Rp. 0,-

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
33	Izin Pengolahan Hasil Perkebunan			Rp. 0,-
	DINAS PERHUBUNGAN			
34	Izin Usaha Angkutan Orang	14	18	Rp. 0,-
35	Izin Usaha Sewa Kendaraan/Rentcar	13	17	Rp. 0,-
36	Izin Parkir Tempat Khusus			Rp. 0,-
	DINAS KOMINFO			
37	Izin Usaha TV Kabel	13	14	Rp. 0,-
38	Izin Penyelenggaraan Reklame	13	20	Rp. 0,-
39	Izin Usaha Menara Telekomunikasi (TOWER)	13	19	Rp. 0,-
	DINAS LINGKUNGAN HIDUP			
40	Izin Lingkungan Hidup	13	3	Rp. 0,-
41	Izin Penyimpanan Sementara Limbah Cair B3	13	13	Rp. 0,-
42	Izin PembuanganLimbah Cair B3	13	15	Rp. 0,-
43	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	13	16	Rp. 0,-
	DINAS KESEHATAN			
44	Izin usaha Apotik	13	21	Rp. 0,-
45	Izin Usaha Penyelenggaraan Optikal	13	21	Rp. 0,-
46	Izin Usaha Toko Obat	13	21	Rp. 0,-
47	Izin usaha Laboratorium Swasta	13	22	Rp. 0,-
48	Izin Usaha Salon Kecantikan	13	23	Rp. 0,-
49	Izin Usaha Praktek Dokter Kecantikan, Dokter Umum, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi	13	21	Rp. 0,-
50	Izin Praktek Bidan	13	20	Rp. 0,-

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
51	Izin Praktek Perawat	13	16	Rp. 0,-
52	Izin Praktek Radiografer	13	19	Rp. 0,-
53	Izin Praktek Pengobatan Tradisional	13	21	Rp. 0,-
54	Izin Kerja Perawat Gigi	13	22	Rp. 0,-
55	Izin Usaha klinik Rawat Inap	13	26	Rp. 0,-
56	izin Usaha Penyaluran Kesehatan	13	36	Rp. 0,-
57	Izin usaha Dental Gigi	13	20	Rp. 0,-
58	Izin rumah Sakit Umum (Tipe C dan Tipe D)	13	20	Rp. 0,-
59	Izin PIRT Laike Higienis Sanitasi (LHS)			Rp. 0,-
60	Izin Praktek Fisiotrapi			Rp. 0,-
	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
61	Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	14	11	Rp. 0,-
62	Izin Usaha Budidaya Ikan	14	11	Rp. 0,-
63	Surat Izin Usaha Penangkapan Ikan (SIPI)	14	12	(Rp. Biaya)
64	Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	14	16	(Rp. Biaya)
65	Izin Usaha Budidaya Mutiara	14	13	Rp. 0,-
66	Izin Usaha Budidaya Rumput Laut	14	13	Rp. 0,-
67	Izin Usaha Budidaya Udang	14	15	Rp. 0,-
68	Izin Usaha Budidaya Bandeng	14	13	Rp. 0,-
69	Izin Usaha Budidaya Ikan Air Tawar	14	13	Rp. 0,-
70	Izin Usaha Pengelolaan dan Penyelenggaraan TPI	13	14	Rp. 0,-

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
	BAPPEDA LITBANG			
71	Izin Penelitian	3	6	Rp. 0,-
	DINAS DIKBUD			
72	Izin Pendirian Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)	13	26	Rp. 0,-
73	Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Non Formal (IPLPNF)	13	18	Rp. 0,-
74	Izin Pendirian Sekolah Swasta	13	19	Rp. 0,-
75	Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	13	21	Rp. 0,-
76	Izin Usaha Lapangan Futsal	13	13	Rp. 0,-
77	Izin Usaha Pendidikan dan Pelatihan Mengemudi	13	25	Rp. 0,-
78	Izin Usaha Titipan barang/Kantor Cabang	13	24	Rp. 0,-
79	Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh masyarakat			Rp. 0,-
80	Izin Penyelenggaraan Pusat Kebugaran Jasmani	13	18	Rp. 0,-
	DINAS PARIWISATA			
81	Izin Usaha Daya Tarik Wisata	13	17	Rp. 0,-
82	izin Usaha jasa Perjalanan wisata	13	17	Rp. 0,-
83	Izin Usaha Restoran	13	19	Rp. 0,-
84	Izin Usaha Rumah Makan, warung Wisata	13	13	Rp. 0,-
85	Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi	13	15	Rp. 0,-
86	Izin Usaha Penyediaan Akomodasi	13	14	Rp. 0,-
87	Izin Usaha Jasa konsultan Pariwisata	13	14	Rp. 0,-

NO	NAMA - NAMA IZIN / URAIAN	Lama Mengurus (Hari)	Jumlah Persyaratan (Dokumen)	Biaya Resmi (Rata-rata mks Rph)
1	*2*	*3*	*4*	*5*
88	Izin Usaha Jasa Pramuwisata	13	14	Rp. 0,-
89	izin Usaha Wisata Tirta	13	14	Rp. 0,-
90	Izin Usaha Santa Par Aqua (SPA)	13	15	Rp. 0,-
91	Surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata (STUP)	13	14	Rp. 0,-
92	Izin Usaha Hotel	13	19	Rp. 0,-
93	Izin Usaha Pondok Wisata	13	19	Rp. 0,-
94	Izin Usaha Kawasan Pariwisata	13	19	Rp. 0,-
95	Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata	13	15	Rp. 0,-
96	Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konfrensi dan Pameran	13	12	Rp. 0,-
97	Izin Usaha Karaoke/Café	13	18	Rp. 0,-

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan PTSP, 2020

3. Pajak Dan Retribusi Daerah

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, pemerintah pun memberikan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah, serta memberikan kewenangan dalam penetapan tarifnya. Adapun jenis pajak dan objek pajak yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima adalah berupa *Pajak Hotel* yang terdiri dari hotel bintang satu, hotel melati dua, losmen/rumah penginapan/pesanggrahan/hostel/ rumah kos, dan rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh), *Pajak Restoran* yang terbagi dalam restoran, rumah makan, kafetaria, kantin, catering, dan warung, *Pajak Hiburan* berupa Karaoke, permainan bilyar,

balapkendaraan bermotor, permainan ketangkasan, mandi uap/spa, serta hiburan anak, *Pajak Reklame* berupa reklame papan/billboard/videotron/megatron, reklame kain, reklame berjalan, reklame cat, *Pajak Penerangan Jalan* adalah pajak penerangan jalan PLN, *Pajak Parkir* berasal dari parkir yang ada di Kota Bima, *Pajak Air Tanah*, *Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Logam dan Batuan* yang terdiri dari pasir, kerikil, batu gunung/kali, pasir batu/sirtu, tanah liat, dan tanah urug, *Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan dan perkotaan (PBB Sektor Perkotaan),* dan *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB – Pemindahan Hak).* Adapun untuk retribusi di Kota Bima adalah berupa *Retribusi Jasa Usaha* yang didalamnya terdapat retribusi pamakaian kekayaan daerah dan retribusi pasar grosir/pertokoan.

2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja yang ada. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaga kerjanya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaiakan S1, S2 dan S3, Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Bima pada tahun 2015 tercatat sebesar 765 per 10.000 penduduk dan pada tahun 2019 tercatat sebesar 794 per 10.000 penduduk.

Tabel 2. 75.
Rasio Lulusan S1/S2/S3 Tahun 2015 - 2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Jumlah lulusan S1	11.689	11.257	11.257	12372	13.110
2.	Jumlah lulusan S2	515	486	471	559	607
3.	Jumlah lulusan S3	14	12	12	13	14
4.	Jumlah lulusan S1/S2/S3	12.218	11.755	11.740	12.944	13.731
5.	Jumlah penduduk	159.736	163.101	166.407	169.714	173.031
Rasio lulusan S1/S2/S3 per 10.000 penduduk		765	721	705	763	794

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 2020, (diolah)

2. Tingkat ketergantungan

Rasio ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk tidak produktif dan penduduk produktif, adapun penduduk tidak produktif berada dalam kelompok umur 0 – 14 tahun, ditambah dengan penduduk dalam kelompok umur 65 tahun keatas, sedangkan penduduk produktif pada umumnya berada dalam kelompok umur 15 – 64 tahun, dimana pada kelompok umur ini adalah penduduk usia kerja yang dianggap masih produktif.

Rasio ketergantungan digunakan untuk mengukur besarnya beban yang harus ditanggung oleh setiap penduduk berusia produktif terhadap penduduk yang tidak produktif. Atas dasar konsep ini dapat digambarkan berapa besar jumlah penduduk yang tergantung pada penduduk usia kerja. Meskipun tidak terlalu akurat, rasio ketergantungan semacam ini memberikan gambaran ekonomis penduduk dari sisi demografi.

Rasio ketergantungan *(dependency ratio)* merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase *dependency ratio* menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sebaliknya persentase *dependencyratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Berdasarkan data kependudukan yang telah di publikasikan oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Bima, pada tahun 2019 penduduk yang termasuk dalam ketegori tidak produktif sebanyak 56.865 jiwa, dan

penduduk produktif sebanyak 116.364 jiwa, dengan rasio ketergantungan sebesar 48,87, yang dapat diartikan bahwa setiap 100 jiwa penduduk produktif di Kota Bima menanggung 48,87 jiwa penduduk tidak produktif.

2.2. Analisis Gambaran Umum Kondisi Daerah terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Analisis gambaran umum kondisi daerah terhadap capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan merupakan interprestasi capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci pada setiap penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.76

Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama RPJMD Kota Bima Tahun 2014-2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN								STANDAR	Interprestasi (<, =, >)
			2014		2015		2016		2017			
			T	R	T	R	T	R	T	R		
1	Meningkatnya kepatuhan terhadap ajaran agama	Jumlah penerimaan zakat,	750.000.000	785.000.000	1.500.000.000	1.391.336.000	3.000.000.000	4.335.858.840	4.000.000.000	4.230.456.000	4.000.000.000	>
		Rasio rumah ibadah		2,66	3	2,85	3	3	3	3,35	3	>
2	Meningkatnya kerukunan hidup beragama	Jumlah konflik SARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	=
3	Meningkatnya pelestarian nilai-nilai budaya	Persentase nilai budaya yang ditinggalkan (%)	5		4		3	7,69	2	5	1	>
4	Meningkatnya mutu pendidikan	Rata-rata lama	10,71	9,58	11,19	9,96	11,62	10,13	12	10,14	12	<
		Rata-rata nilai UN SD	6,51		7,01	5,6	7,51	6,89	8,01	7,25	8,51	<
		Rata-rata nilai UN SMP	6,18		6,88	5,71	7,18	3,75	7,68	4,7	8,16	<
5	Meningkatnya daya saing	Indeks Pembangunan	71,23	72,23	72,75	72,99	73,27	73,67	73,79	74,36	74,31	>
		Persentase penduduk miskin (%)	9,74	9,74	9,11	9,85	8,53%	9,51	7,9	9,27	7	>
		Pengangguran terbuka (%)	5,74	8,69	5,18	10,15	4,67	8,89	4,22	3,57	3,8	<
6	Meningkatnya derajat kesehatan	Angka Harapan	64,07	69,03	64,32	69,12	65,27	69,35	66,22	69,58	67,17	>
		Angka Balita Gizi Buruk	0,002	0,06	0,487	0,059	0,049	0,077	0,012	0,078	0	<

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN								STANDAR	Interprestasi (<, =, >)
			2014		2015		2016		2017			
			T	R	T	R	T	R	T	R		
	Masyarakat	Angka kematian ibu melahirkan	150/100.000 KH	*75/100000KH*	120/100.000 KH	*151/100000KH*	100/100.000 KH	*87/100000KH*	80/100.000 KH	*148/100000KH*	75/100.000 KH	<
7	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar	Persentase Rumah Tangga berakses	75,88	88,18	80,83	91,17	87	92,07	95,00%	93,25	100	<
		Persentase Rumah Layak Huni (%)	94	88,18	95	90,55	97	91,13	99	92,77	100	<
		Persentase Rumah Tangga bersanitasi baik (%)	74,67	76,65	76,5	78,66	80	79,96	90	87,32	100	<
		Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	97,37	94	97,75	94,46	98,5	95,04	99,2	98,61	100	<
8	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik	Nilai akuntabilitas	CC	C	B	CC	BB	B	A	B	A	<
		Persentase SKPD dengan indeks SAKIP baik (%)	52,94	60	64,71	78	76,47	85	88,24	98	100	<
		Opini BPK terhadap LKPD	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	=
9	Meningkatnya pelayanan publik yang prima	Rata-rata lama proses pelayanan	3-Jan	2,25	3-Jan	2	3-Jan	1,25	3-Jan	1,25	1-2,5	=
		Indeks kepuasan masyarakat	85	-	85	-	85	80	85	81,25	85	<
10	Meningkatnya Pertumbuhan	Pertumbuhan PDRB (%)	5,5	5,89	5,7	5,75	5,9	5,8	6,2	6,76	6,5	>
11	Meningkatnya Pendapatan Masyarakat	Pendapatan Per Kapita Rp. Juta)	17	17,08	18,5	18,74	20	20,25	22	23,18	25	<
12	Meningkatnya produksi	Jumlah produksi pertanian tanaman	39.000	41.879	40.000	42.425	42.000	35.808	44.000	41.169	50.000	<

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TAHUN								STANDAR	Interprestasi (<, =, >)
			2014		2015		2016		2017			
			T	R	T	R	T	R	T	R		
13	Meningkatnya kualitas infrastruktur perkotaan yang baik	Persentase panjang jalan dalam kondisi	61,63	64,67	67,15	67,13	75	72,01	80	76,18	85	<
		Persentase luas permukiman kumuh (%)(%)	9	27,15	7	27	5	24,04	3	17,03	0	<
		Persentase luas kawasan tepian air (*waterfront city*) yang tertata (%)	2	2,53	2,71	3,98	20	7,39	45	10,13	60	<
14	Terpeliharanya keamanan dan ketertiban	Angka kriminalitas (kasus)	190	197	187	156	180	187	170	296	150	<

Tabel 2.77

Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima Periode Tahun 2014-2017

(Berdasarkan indikator pada RPJMD periode sebelumnya)

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT												
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi												
1.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											
1.1.	Pertumbuhan Ekonomi (PDRB ADHK)	5,46%	5,50%	5,89%	5,70%	5,75%	5,90%	5,80%	6,20%	6,76%	6,50%	>
1.2	PDRB Per Kapita (Juta Jiwa)		Rp.17 jt	Rp. 17,08 jt	Rp.18,50jt	Rp. 18,74jt	Rp.20 jt	Rp. 20,24 jt	Rp. 22 jt	23,18 jt	Rp. 25 jt	<
1.3.	% penduduk miskin	9,91%	9,74%	9,74%	9,11%	9,85%	8,53%	9,51%	7,90%	9,27%	7,00%	<
1.4.	IPM	71,72	71,23	72,23	72,75	72,99	73,27	73,67	73,79	74,36	74,31	>
Fokus Kesejahteraan Masyarakat												
1.	Urusan Pendidikan											
1.1.	Angka melek huruf	92	93,15	96,4	94,3	96,42	95,45	96,26	96,55	99,85	97,76	>
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah (Tahun)	10,22	10,71	9,58	11,19	9,96	11,62	10,13	12	10,14	12	<
1.3.	Angka Partisipasi Kasar (APK)	280,9	280,9		299		305,1		313,3		320,5	<
	a. Angka Partisipasi Kasar (APK) anak usia dini	79,32	79,32	62,72	80,92	88,85	82,51	56,01	84,09	63,04	85,68	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	b. Angka Partisipasi Murni (APM) anak Usia Dini	79.30	79,3	62,7	80,99	88,83	81,77	56	82,55	63,04	83,33	<
1.4.	Rasio guru per kelas rata-rata per 1000 jumlah murid dan rasio guru dengan murid											
	a. SD/MI	1:28	1:27	1:27	1:26	1:26	1:25	1:25	1:24	1:22	1:23	<
	b. SMP/MTs	1:29	1:29	1:29	1:28	1:28	1:27	1:26	1:26	1:26	1:25	>
2.	Urusan Kesehatan											
2.1.	Usia Harapan Hidup	63,22	64,07	69,03	64,32	69,12	65,27	69,35	66,22	69,58	67,17	>
2.2.	Cakupan Balita gizi buruk yang mendapat perawatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.3.	Persentase balita gizi buruk		0,00%	0,06%	0,49%	0,06%	0,05%	0,08%	0,01%	0,08%	0,00%	<
Fokus Seni Budaya dan Olahraga												
1.	Urusan Kebudayaan											
1.1	Jumlah Atraksi Budaya	2 Kali setahun	1 kali		2 kali		3 kali		4 kali	6	5 kali	>i
1.2	Jumlah grup kesenian (sanggar seni) per 10.000 Penduduk	4	4	64	5	24	6	24	7	63	10	>
1.3	sanggar seni yang aktif	5	7		10		15		17	26	20	>
2.	Urusan Pemuda dan Olahraga											
2.1.	Capaian prestasi pemuda dan olah raga Tingkat Provinsi	9	12	16	12	17	12	13	12		12	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	- Capaian Prestasi Pemuda	2	5	4	5	6	5	3	5		5	<
	- Capaian Prestasi Olah Raga	7	7	12	7	11	7	10	7		7	<
ASPEK PELAYANAN UMUM												
Fokus Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar												
1.	Urusan Pendidikan											
1.1.	Angka melek huruf	92	93,2	96,4	94,3	96,4	95,5	96,3	96,6	99,85	97,76	<
1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10,22 Thn	10,71	9,58	11,19	9,96	11,62	10,13	12	10,14	12.00	<
1.3.	Rata2 Nilai Ujian Nasional SD/MI/Paket A	5,91	6,51	6,51	7,01	5,6	7,51	6,89	8,01	7,25	8,51	<
1.4	Rata2 Nilai Ujian Nasional SMP/MTs/Paket B	5,96	6,18	6,18	6,88	5,71	7,18	3,75	7,68	4,7	8,16	<
	Jumlah Siswa yang berprestasi Osn Tingkat Nasional											
	- SD/MI/Paket A	1	1	-	1	-	1	-	1	0	1	<
	- SMP/MTs/Paket B	1	1	-	1	-	1	-	1	0	1	<
	- SD/MI/Paket A	100	100	98,28	100	100	100	97,35	100	97,35	100	<
	- SMP/MTs/Paket B	100	100	99,35	100	100	100	98,25	100	98,25	100	<
	Persentase Angka Mengulang Kelas											
	- SD/MI/Paket A	0	0	360 siswa	0	322 siswa	0	242 siswa	0	163 siswa	0	<
	- SMP/MTs/Paket B	0	0	15 siswa	0	20 siswa	0	3 siswa	0	11 siswa	0	<
	Persentase Angka Putus Sekolah											

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	- SD/MI/Paket A	0,03	0,03	51 siswa	0,02	30 siswa	0,01	47 siswa	0,01	36 siswa	0	<
	- SMP/MTs/Paket B	0	0,04	4 siswa	0,04	51 siswa	0,03	31 siswa	0,03	6 siswa	0,01	<
	Porsentase Jumlah Guru yang lulus UKG											
	- SD/MI	-	-	-	-	-	0,08	-	0,1		0,14	<
	- SMP/MTs	-	-	-	-	-	0,1	-	0,14		0,21	<
	Rasio Siswa Perkelas											
	- SD/MI	25:01:00	24:01:00	25:01:00	23:01	22:01	"22:1	21:01	21:01	21:01	20:01	<
	- SMP/MTs	29:01:00	29:01:00	30:01:00	28:01:00	21:01	27:01:00	24:01:00	26:01:00	26:01:00	25:01:00	<
	Persentase Sarana Pembelajaran Teknologi Informasi											
	- SD/MI	0	1	0	2	7	3	12	5	12	6	<
	- SMP/MTs	0	1	0	2	3	4	14	5	14	6	<
1.5	Rasio guru per kelas rata-rata per 1000 jumlah murid dan rasio guru dengan murid											
	- SD/MI	1:28	1:27		1:26	22:01	1:25	21:01	1:24	1:21	1:23	<
	- SMP/MTs	1:29	1:29		1:28	21:01	1:27	24:01:00	1:26	1:24	1:25	<
1.6	Persentase sekolah yang menerapkan pembelajaran berbasis TIK											
	- SD/MI	50	50	0	60	0	70	7	80	12	100	<
	- SMP/MTs	30	30	0	40	0	50	3	60	14	70	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2.	Urusan Kesehatan											
2.1	Persentase Balita Gizi Buruk	0,20%	0,00%	0,06%	0,49%	0,06%	0,05%	0,08%	0,01%	0,08%	0,00%	<
2.2	Angka Kematian Bayi	9,27/1000 kh	7.02/1000 kh	19 kss	5,81/1000 kh	17 kss	3,60/1000 kh	25 kss	2,39/1000 kh	6 kss	0,59/1000 kh	<
2.3	Angka Kematian Ibu AKI)	198,7/100.000 KH	150/100.000 KH	75/100000KH	120/100.000 KH	151/100000KH	100/100.000 KH	87/100000KH	80/100.000 KH	148/100000KH	75/100.000 KH	<
2.4	Persentase Kelurahan STBM	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	=
2.5	Persentase sarana Pelayanan kesehatan yang memenuhi standar	50%	50%	60%	60%	60%	70%	60%	80%	60%	90%	<
2.6.	Persentase penduduk miskin penerima kartu Jaminan Kesehatan 'JUJUR SEHATI'	65%	70%	100%	75%	100%	80%	74%	85%	100%	90%	<
2.7.	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	2%	9%	60%	8%	93%	7%	95%	6%	95%	5%	<
2.9.	% Kelurahan Siaga Aktif	100%	100%	84%	100%	89%	100%	94%	100%	98%	100%	<
2.12.	% Pembinaan Sekolah Sehat	15 sklh	15 sklh	17 sklh	15 sklh	18 sklh	15 sklh	20 sklh	15 sklh	20 sklh	15 sklh	>
2.17.	% Puskesmas	1/5	1/5	5-Jan	1/5	5-Jan	1/5	5-Jan	1/5	5-Jan	1/5	=
2.20.	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	85,98%	85,00%	91,04%	85%	91,81%	90%	83,00%	90%	83,00%	95%	<
2.21.	Cakupan kunjungan ibu hamil (K4)	92,42%	95,00%	98,27%	95%	96,74%	95%	88,71%	97%	88,71%	97%	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
2.22.	Cakupan peserta KB aktif	28,30%	70%	82,74%	70%	82,56%	75%	87,74%	80%	87,74%	80%	>
2.23.	Cakupan Kunjungan Neonatus (KN3)	89,52%	97,93%	93,02%	90%	94,91%	99%	99,13%	100%	99,13%	100%	<
2.24.	Cakupan Kunjungan Bayi	89,47%	92%	94,43%	90%	94,66%	90%	86,16%	90%	86,16	95%	<
2.25.	Cakupan Kunjungan Balita	71,35%	87,47%	72,39%	80%	81,79%	80%	73,41%	80%	73,41%	82%	<
3.	Urusan Pekerjaan Umum											
3.1.	% panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	53,00%	61,63%	61,63%	67,16%	67,16%	75,00%	72,01%	80,00%	76,18%	85,00%	<
3.2.	Rasio Jaringan Irigasi Teknis	43,00%	47,00%	0,49	50,00%	0,51	52,00%	0,55	60,00%	0,72	65,00%	<
3.3.	Persentase Jaringan Irigasi Teknis	43,00%	47,00%	48,75%	50,00%	51,20%	52,00%	54,53%	60,00%	71,74%	65,00%	>
3.4.	% rumah tangga pengguna air bersih	70,00%	75,88%	76,21%	80,83%	80,87%	87,00%	87,19%	95,00%	93,25%	100,00%	<
3.5.	% rumah tangga bersanitasi	71,00%	74,67%	74,92%	76,50%	76,50%	80,00%	80,23%	90,00%	87,23%	100,00%	<
3.6.	% luas permukiman kumuh	10,33%	9,00%	3,30%	7,00%	3,43%	5,00%	8,17%	3,00%	6,03%	0,00%	<
3.7.	% luas kawasan tepian air (waterfront city) yang tertata	1,00%	2,00%	10,00%	2,71%	14,23%	20,00%	27,00%	45,00%	33,00%	60,00%	<
3.8.	% konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	96,98%	97,37%	96,98 %	97,75%	96,98 %	98,50%	100,51%	99,20%	99,85%	100,00%	<
3.9.	%Penerangan Jalan Umum yang berfungsi baik	45%	0,00%	45,00%	0,00%	45,00%	79,64%	79,64%	100,00%	100,00%	100,00%	=

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
3.10.	% Meningkatnya Kelancaran Saluran Dreinase	27,00%	27,00%	27,86%	35,00%	36,20%	42,00%	43,99%	46,00%	57,03%	70,00%	<
3.11	% Panjang Sungai Tertangani	12,60%	12,60%	43,97%	14,45%	45,92%	16,30%	47,26%	18,15%	50,89%	70,00%	<
3.12.	Luas Wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	20,00%	20,00%	20,00%	40,00%	20,00%	60,00%	20,00%	100,00%	20,00%	100,00%	<
3.13.	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB	22,31%	27,00%	4,31%	32,00%	4,81%	37,00%	5,20%	42,00%	5,54%	47,00%	<
4.	Urusan Perumahan											
4.1.	% luas permukiman kumuh	10,33%	9,00%	3,35%	7,00%	3,43%	5,00%	8,17%	3,00%	6,03%	0,00%	<
4.2.	% Rumah Layak Huni	92,82%	94,00%	93,66%	95,00%	91,51%	97,00%	88,88%	99,00%	91,28%	100,00%	<
4.3.	Ketepatan waktu Tanggap Darurat Bencana Kebakaran	> 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	< 15 menit	<
6.	Urusan Perencanaan Pembangunan											
6.1	% SKPD yang dokumen perencanaannya selaras RPJMD	60,00%	60,00%	-	70,00%	58,43%	80,00%	83,01%	90,00%	100,00%	100,00%	=
6.2	% Program RKPD yang selaras dengan RPJMD	60,00%	70,00%	88,66%	80,00%	88,66%	90,00%	97,15%	100,00%	88,95%	100,00%	<
6.3	% Dokumen RKPD dalam KUA PPAS	60,00%	70,00%	100,00%	80,00%	100,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	=

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6.4	% Perencanaan SKPD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku (PerPres 29/2014, Permen PAN 53/2014, Permendagri 54/2010)	35,00%	50,00%	-	65,00%	-	75,00%	80,61%	85,00%	100,00%	90,00%	>
6.5	% Dokumen Perencanaan Strategis SKPD dalam RKPD	45,00%	48,00%	-	52,00%	-	57,00%	45,00%	60,00%	60,00%	80,00%	<
6.6	Tersedianya Rencana Induk Kelitbangan sesuai dengan ketentuan penyusunan	-	-	20,00%	-	30,00%	-	40,00%	50,00%	50,00%	60,00%	<
6.7	% Penyajian Basis Data Kelitbangan	-	-	10,00%	-	15,00%	-	20,00%	30,00%	30,00%	50,00%	<
6.8	% Hasil Kelitbangan yang menjadi bahan masukan perumusan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	10,00%	15,00%	1,00%	20,00%	3,00%	25,00%	9,00%	30,00%	35,00%	40,00%	<
7.	Urusan Perhubungan											
7.1.	% ketersediaan fasilitas dan prasarana LLAJ	58,00%	60,00%	25,00%	70,00%	35,00%	80,00%	37,00%	90,00%	55,00%	100,00%	<
7.2.	Persentase konektivitas pusat kegiatan dan pusat produksi	96,98%	97,37%	97,11%	97,75%	97,33%	98,50%	98,51%	99,20%	99,83%	100%	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
7.3.	Persentase angkutan umum yang lulus uji KIR	85,00%	90,00%	90,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	=
8.	Urusan Lingkungan Hidup											
8.1.	% penanganan sampah	20,50%	25,00%	90,00%	30,00%	95,07%	35,00%	65,87%	40,00%	54,10%	65,00%	<
8.2.	Penurunan angka pencemaran dan perusakan lingkungan	30,00%	48,00%	50,00%	52,00%	55,00%	58,00%	65,00%	78,00%	76,00%	100,00%	<
8.3.	% Sumber mata air terlindungi	60%	62%	3 lokasi	71%	4 lokasi	38%	5 lokasi	41%	5 lokasi	43%	<
8.4.	Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian SDA	0 Pokmas	0 Pokmas	4 pokmas	2 Pokmas	4 pokmas	0 Pokmas	5 pokmas	4 Pokmas	5 pokmas	6 Pokmas	<
8.5.	% tersedianya RTH publik minimal 20%	6,60%	8,00%	19,00%	10,00%	20,90%	21,00%	22,80%	25,00%	23,75%	30,00%	<
9.	Urusan Pertanahan											
9.1.	Cakupan lahan pemerintah daerah yang bersertifikat	2,24 Ha	1,19 Ha		3,07 Ha		2 Ha		2 Ha		2 Ha	<
10.	Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil											
10.1	Rasio penduduk yang telah memiliki e-KTP	6,13%	65,13%	58,17%	70,05%	64,86%	78,98%	6,66%	85,35%	78,31%	95,73%	<
11.	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan											

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
11.1	% Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah	31,43%	38,26%	50,37%	43%	50%	50,04%	44,91%	52,74%	37,31%	52,74%	<
11.2	% partisipasi perempuaan di Lembaga Swasta	44,89%	45,68%	49,63%	48%	50%	49,02%	47,48%	49,63%	57,94%	49,63%	>
11.3	% partisipasi perempuan di lembaga legislatif	4,00%	12,00%	8,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	=
11.4	% pengaduan tindak kekerasan terhadap perempuan	58,84%	89,47%	0,02%	81,81%	0,05%	70,51%	0,09%	100,00%	100,00%	100,00%	=
12.	Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera											
12.1	Cakupan peserta KB aktif	62,00%	64,00%	44,90%	65%	76,80%	66,00%	98,01%	68,00%	98,36%	69,57%	>
12.2.	Jumlah peserta KB aktif tambahan	2,21%	2,54%	104,78%	3%	100,82%	2,69%	105,60%	2,74%	405,84%	2,78%	>
12.3.	% keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	34,72%	35,00%	131,43%	39%	115,38%	40,00%	102,50%	45,00%	71,11%	67,50%	>
13.	Urusan Sosial											
13.1	Persentase PMKS yang ditangani	16,10%	70,10%	48,13%	75,52%	74,99%	80,30%	78,69%	85,50%	84,59%	90,18%	<
14.	Urusan Ketenagakerjaan											
14.1	Persentase	10,12	8%	9,21%	7%	10%	6%	10,15%	5%	8,89%	4%	<
14.2	Porsentase keselamatan dan	60,00%	60,50%	69,32%	61%	67%	70,00%	67,02%	75,00%	73,24%	80,50%	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
14.3	Persentase Kasus yang diselesaikan dengan	100,00%	100,00%	100,00%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	<
15.	Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah											
15.1	Jumlah UMKM	1874 UMKM	1956 UMKM	3535 UMKM	2042 UMKM	4944UMKM	2135 UMKM	6303 UMKM	2226 UMKM	7080 UMKM	2323 UMKM	>
15.2	Jumlah Koperasi Aktif	64	74	72	81	85	86	93	96	93	108	<
16	Urusan Penanaman Modal											
16.1	Rata-rata lama proses pelayanan perijinan	1-4 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-3 hari	1,25 hari	1-2,5 hari	1,25 hari	1-2,5 hari	=
17.	Urusan Kebudayaan											
17.1	Persentase Kesenian/Seni Bima yang dilestarikan	0,35%	35,00%	-	45,00%	-	55,00%	-	65,00%	65,00%	75,00%	<
17.2	Persentase Permainan Tradisional yang dilestarikan	6,67%	6,67%	-	13,33%	-	20,00%	-	26,67%	26,67%	33,33%	<
17.3	Persentase Adat Tradisi dan Budaya yang dilestarikan	25,00%	25,00%	-	32,50%	-	40,00%	-	47,50%	47,00%	55,00%	<
18.	Urusan Kepemudaan dan Olahraga											
18.1.	Capaian prestasi pemuda dan olah raga	2	5	5	5	7	5	5	5	13	25	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
18.2	Jumlah Klub Olahraga	20	25	25	27	25	30	27	37	27	38	<
18.3	Jumlah gedung olahraga	1	1	1	2	2	3	2	3	3	4	<
19.	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri											
19.1.	jumlah konflik SARA	1	0	-	0	-	0	-	0	-	0	=
19.2	Persentase Pembinaan Terhadap Aparatur dan Masyarakat dalam menghadapi potensi konflik	2%	5%	15%	10%	15%	15%	20%	30%	20%	50%	<
19.3	% Gejala Konflik yang diatasi	10%	15%	10%	20%	10%	25%	15%	30%	30%	30%	=
19.4	Persentase Cakupan wilayah potensi konflik	30%	25%	5%	20%	10%	18%	5%	15%	15%	10%	>
19.5	Presentase Pembinaan terhadap LMS dan Ormas	20%	30%	5%	40%	20%	50%	15%	60%	40%	65%	<
19.6	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat	5%	8%	10%	13%	15%	17%	25%	20%	20%	20%	=
20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian											

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
20.1.	% SKPD dengan indeks SAKIP baik	45%	52,94%	60,00%	64,71%	78,00%	76,47%	85,00%	88,24%	98,00%	100,00%	<
20.2.	Indeks SAKIP	C	CC	C	B	CC	BB	B	A	B	A	<
20.4.	Jumlah Penerimaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS)	350 juta	750 juta	785.000.000	1.5 M	1.391.336.000	3 M	4.335.858.840	4 M	4,230 M	4 M	>
20.5.	% APIP yang mengikuti peningkatan kapasitas	85,00%	88,00%	100,00%	90,00%	88,00%	95,00%	93,33%	96,00%	94,29%	97,00%	<
20.7.	Perolehan nilai pada MTQ tingkat Provinsi	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu		5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'9 medali emas, 6 medali perak, 5 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'3 medali emas, 3 medali perak, 2 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	'7 medali emas, 8 medali perak, 4 medali perunggu	5 medali emas, 3 medali perak, 1 medali perunggu	<
20.13.	Jumlah kelurahan Tangguh Bencana	0,00%	6	6	15	15	20	20	25	26	38	<
21.	Ketahanan Pangan											
21.1.	- Ketersediaaan energi dan protein perkapita	93,81%	80,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	0,00%	90,00%	75,35%	90,00%	<
21.2.	- Penguatan cadangan pangan	0,00%	55,00%	0,00%	60,00%	58,33%	60,00%	62,21%	60,00%	64,12%	60,00%	>
21.3.	- Ketersediaan informasi pasokan, harga dan akses pangan didaerah	66,67%	81,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	100,00%	90,00%	>
21.5.	- Skor pola pangan dan harapan (PPH)	71,00%	87,00%	80,00%	90,00%	83,60%	90,00%	85,00%	90,00%	85,30%	90,00%	<
21.9.	Jumlah Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton):	42.889	47.584	51.515	52.830	55.731	58.695	50.553	65.266	50.817	72.635	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
21.10.	Petani yang menerapkan tekhnologi pertanian sesuai anjuran	10,00%	15,00%	100,00%	20,00%	100,00%	23,50%	100,00%	30,00%	100,00%	30,00%	>
21.11.	Penyuluh yang terampil dalam pendampingan dan pengawalan penerapan tekhnologi pertanian sesuai anjuran	24,00%	30,00%	100,00%	35,00%	100,00%	40,00%	100,00%	45,00%	100,00%	50,00%	>
21.12.	Meningkatnya ketersediaan dan cadangan pangan	18.000 ton	18.500 ton	-	19.500ton	-	20.000 ton	5143 ton	22.567 Ton	8017 ton	24.000 ton	<
22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa											
22.1.	Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) yang ditangani	30%	150 unit (8,20%)	75 unit (6,34%)	150 unit (8,20%)	463 unit (8,49%)	150 unit (8,20%)	534 unit (11,12)	275 unit (15,04%)	810 unit (8,72%)	275 unit (15,04%)	<
22.3.	Perolehan prestasi keikutsertaan Lomba Kelurahan	0,05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	=
22.4.	Perolehan prestasi keikutsertaan Lomba Posyandu	0,05	5	5	5	5	5	5	5	5	5	=
22.5.	Jumlah Aplikasi IT dalam Tata Kelola Pemerintah	2	2	0	4	0	6	0	8	17	10	>
23.	Statistik											
23.3.	Tersedianya informasi potensi sumber daya	1dokumen	2 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	=

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
	investasi daerah											
25.	Komunikasi dan Informatika											
25.1.	Jumlah Aplikasi IT dalam Tata Kelola Pemerintah	2	2	0	4	0	6	0	8	17	10	>
26.	Perpustakaan											
26.1.	Jumlah pengunjung perpustakaan	150 orang	1000 orang	2598 orang	1700 orang	3000 orang	2500 orang	3874 orang	3000 orang	4124 orang	3500 orang	>
Fokus Layanan Urusan Pilihan												
1.	Pertanian											
1.2.	Produksi Pertanian Tanaman Pangan (ton)	42.889	47.584	51.515	52.830,00	55.731,00	58.695,00	50.553,00	65.266,00	50.817,00	72.635,00	<
1.3.	Produksi perkebunan (Ton)											>
	1) Tembakau 2) Jambu mente 3) Kelapa							1) 210 2)155,91 3) 27,45	1) 3,40	1) 2,10 2)157,65 3) 27,07	1)3,40	
		1) 3,30	1) 3,40	1) 3,40 2) 61,13 3) 25,71	1) 3,40	1) 2,10 2)158,41 3) 25,56	1) 3,40		2)173,84		2)73,84	
		2) 168,78	2)173,84		2)173,84		)173,84		3)27,49		3) 27,49	
		3) 26,69	3) 27,49		3)27,49		3) 27,49					
1.4.	Pengkartuan Ternak (ekor)	18.373	20.110	15.212	21.799	15.396	23.631	15.186	25.616	18.134	27.767	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
1.5.	Vaksinasi Ternak	17.500	18.445	17.814	19.441	16.818	20.491	21.970	21.597	18.388	22.764	<
3.	Energi dan Sumber Daya Mineral											
3.1.	Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan	13,20%	15,26%	100,00%	17,38%	99,85%	19,68%	0,00%	22,24%	0,00%	25,00%	<
3.2.	Kontribusi sektor pertambangan dan	5,58%	5,78%	0,39%	5,87%	0,39%	5,90%	0,37%	5,96%		5,99%	<
4.	Pariwisata											
4.1.	Kunjungan wisata	7.785 Org	8.583 Org	18805 org	9.464 Org	19168 org	10.434 Org	19.503 org	11.505 Org	36.465 org	12.685 Org	>
5.	Kelautan dan Perikanan											
5.1.	Cakupan bina kelompok kelautan dan perikanan	9 klp	9 Klp	11 klp	12 klp	14 klp	15 klp	15 klp	18 klp	22 klp	21 klp	>
	- Jumlah kelompok pemula	5 klp	5 klp	5 klp	6 klp	7 klp	7 klp	7 klp	8 klp	10 klp	9 klp	>
	- Jumlah kelompok madya	2 klp	2 klp	4 klp	3 klp	7 klp	4 klp	4 klp	5 klp	6 klp	6 klp	=
	- Jumlah kelompok utama	2 klp	2 klp	3 klp	3 klp	0 klp	4 klp	4 klp	5 klp	6 klp	6 klp	=
5.2.	Jumlah Produksi perikanan:	2370,30 Ton	2.466,92 Ton	2908,89 Ton	2622,85 (ton)	2689,30 Ton	2780.22 Ton	2526,27 Ton	2947.03 Ton	2822,61 Ton	3123.85 Ton	<
	a. Perikanan tangkap	1.580,50 Ton	1.675,33 Ton	1630,50 Ton	1775,85 (ton)	1712,60 Ton	1882,40 Ton	1744,60 Ton	1995,34 Ton	1995,34 Ton	2115,06 Ton	<
	b. Perikanan budidaya	789,80 Ton	791,59 Ton	1278,39 Ton	847 (ton)	976,70 Ton	897,82 ton	781,67 Ton	951,69 ton	827,27 Ton	1008,79 Ton	<

NO	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target dan Realisasi Capaian Setiap Tahun								STANDAR	Interpretasi (<,=,>)
			2014		2015		2016		2017			
			Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi		
6.	Perdagangan											
6.1.	Penyediaan pasar tradisional sebagai pusat distribusi perdangan	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	>
7.	Perindustrian											
7.1.	Jumlah industri Kecil Menengah (IKM)	121 IKM	129 IKM	-	142 IKM	-	149 IKM	275 IKM	157 IKM	151 IKM	164	<
7.2.	Jumlah sentara industri yang ditangani	73 sentra	73 sentra	73 sentra	73 sentra	73 sentra	74 sentra	73 sentra	74 sentra	73 sentra	74 sentra	<

Sumber: Data diolah

Tabel 2.78

Capaian Indikator Kinerja Daerah Pemerintah Kota Bima Periode Tahun 2018 – 2019

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Evaluasi Capaian Tahun 2019	
		2018	Target	Realisasi
1	*2*	*3*	*4*	
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
1	**Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi**			
1.1.	Pertumbuhan ekonomi	6,5	5,8	5,22
1.2.	Pengeluaran Per Kapita	10.825 (Rp. 000/tahun)	10.925	11.334
1.3.	PMKS yang tertangani	70	70	75
1.4.	Angka pengangguran terbuka	3,51	2,86	4,18
1.5.	Angka kriminalitas yang tertangani	85%	85%	33%
1.6.	Indeks kerukunan umat beragama	83	84	82,11
2	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat**			
2.1.	**Pendidikan**			
2.1.1.	Angka melek huruf	96%	98%	98%
2.1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10,13 Thn	10,30 Thn	10,14 Thn
2.1.3.	Angka Harapan lama Sekolah	14,,98	14,99	14,97
2.2.	**Kesehatan**			
2.2.1.	Angka Harapan Hidup	69,35	69,55	70, 20
2.3	**Fokus Seni Budaya**			
2.3.1.	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari	95	95	N/A
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	**Pendidikan**			
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,55	0,58	0,54
1.2	Angka partisipasi kasar	54,77	57,92	54,7
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan	2.399,00	2.699,00	2.949,00
1.4	Angka Partisipasi Murni			

1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,76	93,37	99,38
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	103,38	103,38	96,91
1.5	Angka partisipasi sekolah			
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	926,84	943,12	943,12
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	1.044,24	1.044,24	1.044,24
1.6	Angka Putus Sekolah:			
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05	0,05	0,05
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,11	0,11	0,1
1.7	Angka Kelulusan:			
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,89	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,56	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM):			
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100
1.9.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	6,62	6,92	6,5
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	45,86	45,86	52,9
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1.306,62	1.292,13	8,31
1.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan menengah	127,09	123,27	7,54
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	132,69	130,39	105
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,63	100	100
2	**Kesehatan**			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8	8	28
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9	9	198,13
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	7	7	198,13
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	137	137	183
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	9,8	9,8	9,7
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	20	30	
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	30,98		27,18
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	95	92,9
2.13	Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	75	80	97,6

2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100
2.15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	75	80	85
2.16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	30,00%	30,00%	100,00%
2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	38	39	30,9
2.189	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	33	35	38
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	169	170	166
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
3.1	Pekerjaan Umum:			
3.1.1	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	74,27%	74,67%	91,41%
3.1.2	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	77,82%	75,88%	94,89%
3.1.4	Persentase jaringan irigasi teknis	64,20%	47,00%	70,92%
3.1.5	Persentase panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	83,60%	60,93%	69,08%
3.1.8	Persentase meningkatnya kelancaran saluran drainase	70,62%	27,00%	74,54%
3.1.9	Persentase panjang sungai yang tertangani	52,80%	44,00%	41,00%
3.1.10	Persentase cakupan Layanan air minum dan air limbah	6%	6,13%	7,30%
3.1.11	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	38,87	50,81%	54,90%
3.1.12	Persentase konektivitas jalan kota	10,69	5,95%	6,50%
3.1.13	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik diluar kawasan kumuh	74,85	2,82%	3,20%
3.1.14	Persentase panjang sungai yang berfungsi baik	50,89	2,88%	60,12%
3.2	Penataan Ruang:			
3.2.1	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana Rinci Tata Ruang	0,00%	20,00%	20,00%
3.2.2	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB		4,46%	8,84%
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**			
4.1	Persentase peningkatan rumah layak huni	21,68%	21,68%	20,00%
4.2	Persentase KK yang memiliki rumah layak huni	75,06%	2,69%	N/A
4.3	Persentase rumah tidak layak huni akibat bencana alam/sosial yang ditangani	%	100,00%	100,00%
4.4	Persentase kawasan permukiman kumuh	43,66%	7,00%	6,23%

4.5	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	100,00%	64,22%
4.6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	26,25%	26,25%	27,68%
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	85%	85%	85%
5.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	79%	79%	77%
5.3	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	85%	77%
5.4	Persentase Penegakan PERDA	85%	85%	85%
6	**Sosial**			
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	69%	75%	85%
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	53%	55%	65%
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	8%	10%	8%
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	69%	69%	70%
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	77%	80%	90%
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%
Layanan Urusan Wajib Non Dasar				
1	**Tenaga Kerja**			
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	90,56%	100,00%	100,00%
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100,00%	100,00%	100,00%
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	76,00%	80,80%	83,00%

1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,00%	100,00%	100,00%
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100,00%	100,00%	100,00%
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100,00%	100,00%	100,00%
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,47	53,47	37,31
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	46,52	46,52	57,94
2.4	Rasio KDRT	0,25	0,2	0,7
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,02	0,02	0,03
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	45	45,5	45
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	50	50	50
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	88,3	90	90
3	**Pangan**			
3.1	Ketersediaan pangan utama	27.517.438 kg	27.527.450 kg	138.260.000 kg
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita			
	Ketersediaan energi	13.114 kkal/kaphr	13.124 kkal/kap/hr	13.124 kkal/kap/hr
	Ketersediaan protein	795,27 gr/kap/hr	796,27 gr/kap/hr	796,27 gr/kap/hr
4	**Pertanahan**			
4.1	Persentase asset tanah pemerintah yang bersertifikat	17,49%	0,12%	0,12%
4.2	Persentase Tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik	100,00%	100,00%	100,00%
5	**Lingkungan Hidup**			

5.1	Persentase Pelayanan Persampahan	47% penganan dan	52% penanganan	64,0% penanganan
		2% pengurangan	4% pengurangan	7,51% pengurangan
5.1.1.	**Persentase sampah yang tertangani**	47%	52%	50%
5.2	Porsentase Luas RTH Publik	17.6%	17.6%	23,75%
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94,31%	94,58%	99,14%
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	92,97%	93,31%	93,31%
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	16,82%	17,03%	17,03%
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,31%	94,59%	99,14%
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	90,74%	91,26%	91,26%
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
7.1	Cakupan sarana prasarana kelurahan	34	36	36
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,10%	2,09%	1,95%
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,34%	2,31%	2,3%
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	29,26%	40,00%	40,00%
8.4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,2	3	3
8.5	Ratio Akseptor KB	10,15%	13%	12,15%
8.6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	89,61%	90,00%	98,76%
8.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	50/1000	45/1000	40/1000
8.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	40%	40%	38%
8.9	Rata-rata usia kawin pertama wanita	22	22	22

9	**Perhubungan**			
9.1	Angka kecelakaan transportasi darat		10	136
9.2	Persentase indeks pengendalian dan pengamanan lalulintas	90%	95%	95%
9.3	Cakupan pelayanan angkutan umum yang layak	75%	80	85
9.4	Persentase indeks kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	75%	80%	85%
9.5	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	85%	90%	95%
10	**Komunikasi dan Informatika**			
10.1	Persentase pemanfaatan layanan publik berbasis TIK	10,34%	24,14%	30,00%
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**			
11.1	Persentase koperasi aktif	60%	61%	87%
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	0	0	0
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	0	0	0
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	11%	13%	13%
12	**Penanaman Modal**			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738	753	926
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 129.991.397.742	Rp 132.591.225.697	Rp. 604.275.484.278
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	3,065	3,1263	2,089
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**			
13.1	Persentase cabor yang meraih medali di tingkat propinsi dan nasional	25%	25%	25%
14	**Statistik**			
14.1	Tersedianya Data Statistik Sektoral	60%	65%	80%
15	**Persandian**			
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	9%	10%
16	**Kebudayaan**			

16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	3
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	75,73	80,58	85
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	25	27	30
17	**Perpustakaan**			
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	18024	12400	19.057
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	9846	1400	1400
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	-	-	-
18	**Kearsipan**			
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	10%	10%	10%
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2%	2%	2,50%
Layanan Urusan Pilihan				
1	**Pariwisata**			
1.1	Kunjungan wisata	36.465 orang	36.465 orang	71.646 orang
1.2	Lama kunjungan Wisata	2 hari	2 hari	2 hari
1.3	PAD sektor pariwisata	102.000.000	102.000.000	102.000.000
2	**Pertanian**			
2.1	Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan	2%	2,58%	3,28%
2.2.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	60%	60%	60%
2.4.	Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	0,87%	0,65%	1,70%
5	**Perdagangan**			
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	0	0	0
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	6.303	6.450	6.453
6	**Perindustrian**			
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	1.197	1.200	1.207
7	**Kelautan dan Perikanan**			
8.1	Produksi perikanan	3123,85 Ton	2975,89 Ton	2.870,02 Ton

8.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	2115,06 Ton	2136,21 Ton	2031,02 Ton
8.1.2	Produksi Perikanan Budidaya	1008,79 Ton	839,68 Ton	839 Ton
8.2	Konsumsi ikan	43,31 Kg/kapita/thn	39,92 Kg/kapita/thn	38,46 kg/kapita/ tahun
8.3	Jumlah produk Olahan yang dihasilkan	1008,79 Ton	843,00 Ton	6.324,632 Ton
Penunjang Urusan				
1	**Perencanaan Pembangunan**			
1.1	Persentase program Renja SKPD bidang pemerintahan dan sosial yang selaras dengan RKPD	80%	95%	95%
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA	ADA
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA	ADA
1.4	Persentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%
2	**Keuangan**			
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**			
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	11,67%	80%	80%
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural			
	Eselon II yang mengikuti Pim TK. II	62%	62%	62%,5
	Eselon III yang mengikuti Pim TK. III	51%	51%	52%
	Staf dan Eselon II yang mengikuti Pim TK. IV	20%	20%	21%
4	**Penelitian dan pengembangan**			
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	0	10	10
ASPEK DAYA SAING				
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah			
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	5,56	5,7	5,62

	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur			
	Perhubungan			
9.1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	75%	80%	64%
9.2	Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal	80%	85%	85%
	Penataan Ruang			
3.2.3	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan	0	-	-
3.2.4	Persentase Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	0	20,00%	20,00%
3.2.5	Persentase kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF	3,94%	4,46%	4,20%
4	**Fokus Iklim Berinvestasi**			
4.1.	Rata-tata lama pelayanan perijinan	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari
5.	**Fokus Sumber Daya Manusia**			
5.1.	Angka pengangguran terbuka	8,89	3,51	4,18

Sumber: Diolah

Tabel 2.79.

Capaian Kinerja Standar Pelayanan Minimal per Urusan

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja 2019	
			Target	Capaian
I	**PENDIDIKAN**			
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	**100%**	98,50%
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan	**100%**	93,85%
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 6 Tahun yang berpartisipasi alam pendidikan PAUD	**100%**	94,54%
II	**KESEHATAN**			
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu\hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	95%	100,19%
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	90%	103,06%
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	90%	106,52%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	85%	92,24%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan	85%	60%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	25%	118,16%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	70%	72,49%
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	20%	0,13%
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan	20%	0,22%
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	50%	23%
11	Pelayanan kesehatan	CDR	50%	38,23%

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja 2019	
			Target	Capaian
	orang terduga tuberkulosis	CURRE RATE (KESEMBUHAN)	85%	92,22%
		SUCCES RATE (KEBERHASILAN PENGOBATAN)	85%	92,22%
12	Pelayanan kesehatan orang dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human *Immunodeficiency Virus*	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	50%	30,39%
III	**SEKSI GIZI**			
1	Perbaikan Gizi Masyarakat	cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan dapat ASI Ekslusif	80%	78,.37%
		Presentasi balita underweight	15%	15.,90%
		Presentase balita stunting	32%	34.,14%
		presentase balita wasting	3%	9,68%
		presentase Ibu Hamil anemia	8,81%	8.,71%
		Presentasi BBLR	4%	4,80 %
		Presentasi bayi usia < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	50%	78.,37%
2	Pencegahan & penanggulangan Gizi Mikro (KVA, AGB, GAKY)	Presentase Ibu Hamil dapat tablet tambah darah minimal 90 tablet maksimal 270 tablet	98%	95.,13%
		Presentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan makanan tambahan	95%	78.,55%
		Presentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	82%	77.,12%
		Presentase Remaja Putri mendapat Tablet tambah Darah	30%	54%
		Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini	50%	68.,20%
		Presentase balita yang ditimbang berat badannya	80%	75,57%
		Presentase Balita yang mempunyai buku KIA/KMS	100%	98.,26%
		Presentase Balita ditimbang yang naik berat badannya	80%	52,58%
		Presentase balita ditimbang yang tdk naik berat badannya 2 kali berturut-turut (2T)	5,1%	5.,45%
		Presentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A	90%	96.,05%
		Presentase Ibu Nifas mendapat kapsul vitamin A	98%	93.,84%

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja 2019	
			Target	Capaian
		Presentase Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium	80%	66%
		Presentase kasus balita gizi buruk yg mendapat perawatan	100%	100%
IV	**PEKERJAAN UMUM**			
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	75,88%	73,65%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,67%	78,83%
IV	**PERUMAHAN RAKYAT**			
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang yang memperoleh fasilitasi peyedidiaan rumah yang layak huni	100%	64,22%
V	**TRANTIBUMLINMAS**			
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakanhukum Perda dan perkada	100%	61,54%
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2,88%
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasikorban kebakaran	100%	77,42%
VI	**SOSIAL**			
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yangmemperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	12.10%
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang Memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	12.10%

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja 2019	
			Target	Capaian
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	12.10%
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	12.10%
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagikorban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%
VII	**SUB-URUSAN BENCANA**			
1	Pelayanan Ketentramana dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh Pelayanan akibat dari penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota per Jumlah warga Negara yang dilakukan penegakkan Peraturan Daerah /Peraturan Walikota kali 100%	100%	
2	pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana per seluruh penduduk di kawasna rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana kali 100%	100%	
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaanterhadap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan tambah jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops tambah Jumlah Warga Negara dikawasan rawan bencana kali 100%	100%	
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB tambah Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana tambah Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana tambah Jumlah Korban yang berhasil dicari ,ditolong dan dievakuasi per Jumlah seluruh penetapan status KLB tambah Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana tambah Jumlah keseluruhan petugas dalam penangnan darurat bencana tambah perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana kali 100%	100%	

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 2.80

Capaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan TPB Kota Bima Tahun 2019

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	sosial	45	8,60	Memenuhi Target
		1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	kesehatan		148.466 (99,31%)	Memenuhi Target
		1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	tenaga kerja			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Disesuaikan dengan SPM Sosial	sosial	907	13,23	Ada Data Tidak Memiliki Target
		1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	sosial	19.700	6.063	Tidak Memenuhi Target
		1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	kesehatan	85	109,13	Memenuhi Target
		1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	kesehatan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	kesehatan, PPKB	78	115,77	Memenuhi Target
		1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	perumahan rakyat & kawasan permukiman			Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
			1.4.1.(f)	Luas Kawasan kumuh (Ha)		256,79	226,19	
		1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	pendidikan		99,38	Memenuhi Target
		1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	pendidikan		96,91	Memenuhi Target
		1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	administrasi kependudukan & catatan sipil	85	106,25	Memenuhi Target
			1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-18 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.			91,06	

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	energi & sumber daya mineral			Tidak Ada Data
		1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	sosial, trantiblinmas		136	Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	sosial	100	100	Memenuhi Target
		1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	pendidikan			Tidak Ada Data
		1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	sosial	100	65	Ada Data Tidak Memiliki Target
		1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	sosial	100	100	Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) .	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pangan			Tidak Ada Data
		2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	kesehatan	15	15,9	Tidak Memenuhi Target
		2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pangan			Tidak Ada Data
		2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	pangan	79,5	83,38	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan	32	34,14	Ada Data Tidak Memiliki Target
		2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	kesehatan	32	34,14	Memenuhi Target
		2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan			Tidak Ada Data
		2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	kesehatan	8,81	8,71	Tidak Memenuhi Target
		2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	kesehatan	50	78,37	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	pangan	86,5	Belum Ada Data	Memenuhi Target
		2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja			Tidak Ada Data
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	kesehatan	305/ 100000KH	140	Memenuhi Target
		3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	kesehatan	92	100,98	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan	32/ 1000KH	198,13	Ada Data Tidak Memiliki Target
		3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan	'32/1000KH	198,13	Ada Data Tidak Memiliki Target
		3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	kesehatan	24/ 1000KH	9	Memenuhi Target
		3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	kesehatan		51,49%	Tidak Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	kesehatan		0%	Memenuhi Target
		3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	kesehatan	175	175,92	Memenuhi Target
		3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan	10	0	Ada Data Tidak Memiliki Target
		3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	kesehatan		2,47	Ada Data Tidak Memiliki Target
		3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	kesehatan		30,15	Tidak Memenuhi Target
		3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	kesehatan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	kesehatan, PPKB			Tidak Ada Data
		3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	kesehatan, PPKB	65	100	Memenuhi Target
		3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	kesehatan, PPKB	51,25	100	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	kesehatan, PPKB	39/1000	39/1000	Tidak Memenuhi Target
		3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	kesehatan, PPKB	2,28	2,28	Memenuhi Target
		3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan			Tidak Ada Data
		3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan		30,15%	Ada Data Tidak Memiliki Target
		3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan	100	100	Ada Data Tidak Memiliki Target
		3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	kesehatan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pendidikan			Tidak Ada Data
		4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	pendidikan		77	Tidak Memenuhi Target
		4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	pendidikan		27	Tidak Memenuhi Target
		4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	pendidikan		109,42	Tidak Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	pendidikan		100,82	Tidak Memenuhi Target
		4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	pendidikan		0	Memenuhi Target
		4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	pendidikan		94,53	Memenuhi Target
		4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	pendidikan			Tidak Ada Data
		4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	pendidikan			Tidak Ada Data
		4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	pendidikan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pendidikan			Tidak Ada Data
		4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pendidikan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	5 Dok	6 Dok	Tidak Memenuhi Target
		5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		56 Kasus	Ada Data Tidak Memiliki Target
		5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		14 Kasus	Tidak Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		8 Kasus (Perempuan Dewasa) dan 8 Kasus (Anak Perempuan)	Ada Data Tidak Memiliki Target
		5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		72 (100%)	Memenuhi Target
		5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		79 Kasus	Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak			Tidak Ada Data
		5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	PPKB		38/1000 KH	Memenuhi Target
		5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak			Tidak Ada Data
		5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	4%	4%	Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, PPKB			Tidak Ada Data
		5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	kesehatan, PPKB			Tidak Ada Data
		5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	kesehatan, PPKB			Tidak Ada Data
		5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	komunikasi & informatika		94,20%	Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	pekerjaan umum & penataan ruang		73,62	Tidak Memenuhi Target
		6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	pekerjaan umum & penataan ruang		78,83	Ada Data Tidak Memiliki Target
		6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	pekerjaan umum & penataan ruang			Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
			6.2.1.(e)	Jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skalakawasan			1 unit/200 kk	
			6.2.1.(e)	Jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala komunal.				
			6.2.1.(e)	Jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem indifidual			709	
		6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	lingkungan hidup			Tidak Ada Data
		6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	lingkungan hidup		4,3	Tidak Memenuhi Target
		6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	lingkungan hidup			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	kehutanan, tata ruang			Tidak Ada Data
		6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	kehutanan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	lingkungan hidup	5	5	Memenuhi Target
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	energi & sumber daya mineral			Tidak Ada Data
		7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	energi & sumber daya mineral			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	statistik		ADHB	Ada Data Tidak Memiliki Target
							6,13%	
							ADHK	
							3,20%	
		8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	statistik		ADHB	Tidak Memenuhi Target
							24.698.667,00	
							ADHK	
							17.521.311,00	

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	tenaga kerja	3%	7,31%	Memenuhi Target
		8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja			Tidak Ada Data
		8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	tenaga kerja	47%	45,51%	Tidak Memenuhi Target
		8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja	88%	89,90%	Ada Data Tidak Memiliki Target
		8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	koperasi, usaha kecil, & menengah	10,5	90,29	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja			Tidak Ada Data
		8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja	4,50%	4,18%	Ada Data Tidak Memiliki Target
		8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja	20%	21,36%	Ada Data Tidak Memiliki Target
		8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	tenaga kerja			Tidak Ada Data
		8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	pariwisata			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	pariwisata		1.966	Tidak Memenuhi Target
		8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pariwisata		69.680	Ada Data Tidak Memiliki Target
		8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pariwisata			Tidak Ada Data
		8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja			Tidak Ada Data
		8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	penanaman modal			Tidak Ada Data
		8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	penanaman modal			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	koperasi, usaha kecil, & menengah			Tidak Ada Data
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	perhubungan			Tidak Ada Data
		9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	perhubungan			Tidak Ada Data
		9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	perhubungan			Tidak Ada Data
		9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	perhubungan		1	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	perindustrian	5,62	79,36	Ada Data Tidak Memiliki Target
		9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	perindustrian		4,52	Memenuhi Target
		9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	tenaga kerja			Tidak Ada Data
		9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	perindustrian			Tidak Ada Data
		9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	perindustrian			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pendidikan			Tidak Ada Data
		9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	komunikasi & informatika			Tidak Ada Data
		9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	komunikasi & informatika		94,20%	Ada Data Tidak Memiliki Target
		9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	komunikasi & informatika		54,13%	Ada Data Tidak Memiliki Target
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	sosial			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	sosial			Tidak Ada Data
		10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	sosial			Tidak Ada Data
		10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).				Tidak Ada Data
		10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	tenaga kerja			Tidak Ada Data
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	perumahan rakyat & kawasan permukiman	678	32.082	Tidak Memenuhi Target
		11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	perhubungan			Tidak Memenuhi Target
			11.2.1.(a)	Jumlah Moda Transportasi Umum			2933	
		11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	perhubungan			Tidak Ada Data
		11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	0	0,21	Ada Data Tidak Memiliki Target
		11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	119,7	112,17	Tidak Memenuhi Target
		11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience).	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Memenuhi Target
			11.5.1.(b)	Jumlah Kelurahan tangguh bencana yang terbentuk.		40	35	
		11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat	1	1	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	lingkungan hidup		57	Tidak Memenuhi Target
		11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	lingkungan hidup			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	pekerjaan umum & penataan ruang			Tidak Ada Data
		11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	lingkungan hidup			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	lingkungan hidup			Tidak Ada Data
		12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	lingkungan hidup	6	6	Tidak Memenuhi Target
		12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	lingkungan hidup			Tidak Ada Data
		12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	lingkungan hidup			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	kehutanan		Luas Hutan 4.497,76 Ha Luas Lahan 22.225 Ha 4,94 %	Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	lingkungan hidup	2 hektar	2 hektar	Tidak Memenuhi Target
		15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	lingkungan hidup	ada	100	Ada Data Tidak Memiliki Target
		15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	lingkungan hidup	ada	100	Memenuhi Target
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
	Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan							
		16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Ada Data Tidak Memiliki Target
			16.1.3.(a)	Jumlah Laporan Tindak Kriminal Selama 1 tahun		0	442	

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
		16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		25 Kasus	Ada Data Tidak Memiliki Target
		16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		23 Kasus (L) 14 Kasus (P)	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak		9 Kasus (P)	Ada Data Tidak Memiliki Target
		16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	statistik		3,7	Memenuhi Target
		16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Keuangan	905.526.991.381,85	87,56%	Ada Data Tidak Memiliki Target
		16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Keuangan		WTP (>65%)	Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Keuangan			Tidak Ada Data
		16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Keuangan			Tidak Ada Data
		16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Keuangan			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Balitbang Daerah			Tidak Ada Data
		16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	15%	16%	Tidak Memenuhi Target
		16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	pemberdayaan perempuan & perlindungan anak	15%	14,28%	Tidak Memenuhi Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	administrasi kependudukan & catatan sipil			Tidak Ada Data
		16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	administrasi kependudukan & catatan sipil			Tidak Ada Data
		16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	administrasi kependudukan & catatan sipil			Ada Data Target Berbeda
			16.9.1.(b)	Jumlah Anak yang memiliki akta kelahiran			51.170	

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	komunikasi & informatika	4	2	Memenuhi Target
		16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat			Tidak Ada Data
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Keuangan		25,53%	Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Keuangan		87,14%	Memenuhi Target
		17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Keuangan			Tidak Ada Data
		17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	komunikasi & informatika			Tidak Ada Data
		17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	komunikasi & informatika			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	komunikasi & informatika		54,13%	Ada Data Tidak Memiliki Target
		17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	Keuangan			Tidak Ada Data
		17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	Keuangan			Tidak Ada Data
		17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	statistik	96%	97,87%	Ada Data Tidak Memiliki Target

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	statistik	90%	86,67%	Ada Data Tidak Memiliki Target
		17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	statistik	8	8	Ada Data Tidak Memiliki Target
		17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Perencanaan			Tidak Ada Data
		17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	statistik			Tidak Ada Data

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	JENIS URUSAN	TAHUN 2019		KETERANGAN
						TARGET	REALISASI	
		17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	statistik	7.500	12.298	Ada Data Tidak Memiliki Target
		17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	statistik	96%	98,51%	Ada Data Tidak Memiliki Target

Sumber: Hasil Analisis

2.3. Permasalahan Pembangunan Berdasarkan Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

Permasalahan pembangunan dapat diperoleh dari hasil pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Permasalahan ini dapat diperoleh dari hasil evaluasi RPJMD periode yang lalu, dan laporan tahunan yang dibuat seperti LKPJ Walikota baik tahunan maupun akhir masa jabatan.

Permasalahan pembangunan Kota Bima digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2.81

Rumusan Permasalahan Pembangunan Kota Bima Berdasarkan Evaluasi Capaian RPJMD Sampai Dengan Tahun 2019

Urusan	Permasalahan Pembangunan
2	*3*
Urusan Wajib	
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
Urusan Wajib Bidang Pendidikan	
	Angka *drop out* atau persentase putus sekolah mengalami peningkatan, dimana pada capaian tahun 2017 angka putus sekolah pada tingkat SD/MI/Paket A adalah 0,01% dan tingkat SMP/MTs/Paket B adalah 0,03%. Sementara pada capaian tahun 2018 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mencapai 0,05% dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,11%
	Rasio jumlah murid terhadap guru pada Sekolah Negeri mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 6,95% meningkat menjadi 7,54% pada tahun 2019
Urusan Wajib Bidang Kesehatan	
	Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 24 kasus meningkat menjadi 28 kasus pada tahun 2019. Demikian pula angka kematian ibu, pada tahun 2018 sebanyak 148 kasus per 100.000 kelahiran, meningkat menjadi 183 kasus pada tahun 2019.
	Cakupan peserta KB aktif mengalami penurunan dari 99,59% pada tahun 2018 menjadi 90,30% pada tahun 2019.
	Penurunan cukup signifikan terjadi pada angka ketersediaan dokter, dimana pada tahun 2018 terdapat 88 orang tenaga dokter yang bertugas di Kota Bima sementara pada tahun 2019 berkurang menjadi 55 orang.

Urusan	Permasalahan Pembangunan
Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik belum mencapai 100%, Masih terdapat jalan yang dalam kondisi sedang dan rusak, Belum semua jalan memiliki drainase dan trotoar
	Banyak bangunan belum memiliki IMB, Luas RTH/RTP Masih belum memenuhi 20%, Terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan, Banyak bangunan rumah pada melewati garis sempadan sungai
	Kesenjangan pembangunan infrastruktur pada wilayah timur dan barat
	Banyak saluran drainase yang tersumbat, Luas daerah genangan masih tinggi
	Belum semua rumah tangga bersanitasi baik
Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
	Masih terdapat rumah tidak layak huni dalam jumlah yang banyak
	Masih ada masyarakat yang belum memiliki rumah
	Luas kawasan kumuh masih cukup luas
	Penanganan rumah korban bencana banjir belum selesai
Urusan Wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	
	LSM dan Ormas yang terdaftar sedikit tapi yang beraktifitas politik cukup banyak
	Penegakan Perda belum berjalan optimal
	ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana belum optimal, Lambatnya pelayanan bencana kebakaran
Urusan Wajib Bidang Sosial	
	Jaminan sosial masih terbatas, pelayanan dan perlindungan sosial pada saat bencana masih kurang
	Belum seluruh PMKS tertangani
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar	
Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	Menurunnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan, dimana pada tahun 2018 sebesar 69,99% menurun menjadi 37,31% pada tahun 2019
	Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu masih terbatas, Tidak semua korban kekerasan melaporkan ke APH
Urusan Wajib Bidang Pangan	

Urusan	Permasalahan Pembangunan
	Skor pola pangan harapan belum optimal, dengan capaian pada tahun 2019 lebih rendah daripada tahun 2018
Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup	
	Luas RTH Publik kurang dari 15%, Ketersediaan pemakaman umum terbatas
	Menurunnya kualitas dan kuantitas air, Terjadi kerusakan lahan dan mata air
	Penanganan sampah masih 40%, Lahan untuk TPS/kontainer belum tersedia, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal
	terjadi pencemaran tanah, terjadi polusi udara
Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
	Kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan masih rendah
Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
	Angka partisipasi KB masih rendah, Pengembangan dan advokasi KIE belum optimal
	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi belum merata
Urusan Wajib Bidang Perhubungan	
	Terdapat angkutan umum yang tidak melakukan uji kir
	Jaringan jalan yang dilengkapi oleh rambu-rambu lalu lintas masih terbatas, Pengawasan dan pengendalian kendaraan umum masih rendah
	Pengelolaan transportasi laut belum optimal
	Pelayanan Parkir dan terminal belum optimal
Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan	
	Belum semua pekerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
	Penyelenggaran pelatihan masih terbatas
	Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat secara signifikan pada tahun 2019, dimana sebelumnya tercatat 2,39% pada tahun 2018 menjadi 4,18% pada tahun 2019
Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika	
	Keterbukaan informasi publik masih terbatas,Belum semua wilayah terlayani telekomunikasi, Pemanfataan IT masih rendah
	Belum terbentuk kelompok/ kampung media di setiap kecamatan
Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	

Urusan	Permasalahan Pembangunan
	Banyak koperasi yang tidak aktif, Banyak koperasi yang aktif tetapi tidak sehat
	Akses modal UMKM yang terbatas
Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal	
	Terbatasnya investasi baik dalam negeri maupun luar negeri
Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga	
	Minimnya organisasi pemuda yang aktif
	Kurangnya kompetisi antar sekolah dan usia dini
Urusan Wajib Bidang Kebudayaan	
	Pemahaman dan Implementasi nilai Maja Labo Dahu sebagai nilai Budaya Lokal yang berlandaskan nilai agama semakin dilupakan
	Kurangnya upaya pelestarian cagar budaya, Degradasi nilai-nilai kebudayaan lokal
Urusan Perpustakaan	
	Kurangnya minat baca masyarakat
	Koleksi buku bacaan yang terbatas, Tidak representatifnya gedung perpustakaan
Urusan Kearsipan	
	Belum tertibnya penataan kearsipan
Urusan Pilihan	
Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan	
	Keterbatasan peralatan tangkap
	Pengembangan perikatan darat masih kurang
	Daya saing produk olahan masih rendah
Urusan Pilihan Bidang Pariwisata	
	Pengembangan destinasi wisata masih kurang, Sarana dan prasarana belum memadai
	Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
	Promosi kepariwisataan masih kurang,
Urusan Pilihan Bidang Pertanian	
	Alih fungsi lahan pertanian produktif
	Daya saing produk olahan masih rendah
	Belum fokusnya program ternak sapi sebagai produk unggulan daerah
	Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal
Urusan Pilihan Bidang Perdagangan	
	Pengembangan produk unggulan lokal belum optimal
	Pengelolaan Pasar belum optimal
Urusan Pilihan Bidang Perindustrian	

Urusan	Permasalahan Pembangunan
	Pengembangan Industri Kecil belum memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan
	Pengembangan produk unggulan industri lokal belum optimal
Urusan Penunjang	
Bidang Administrasi Pemerintahan	
	Indeks SAKIP dan LKIP masih rendah
Bidang Perencanaan	
	Proses perencanaan pembangunan belum berbasis kinerja
	Integrasi program lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan belum terlaksana dengan baik
	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD kurang berkualitas
	Masih terjadi pelanggaran terhadap RTRW
Bidang Keuangan	
	Capaian realisasi PAD belum mampu mencapai target
	Penetapan target PAD belum sesuai potensi
	Pengelolaan Aset Daerah belum optimal
	Proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan belum optimal
	Pelatihan dan sosialisasi tentang sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih kurang
Bidang Pengawasan	
	Belum optimalnya peningkatan kapasitas APIP
	Maturitas SPIP masih dalam tingkat berkembang
	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan
	Masih adanya temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material

Sumber: Hasil Analisis

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan Pemerintah Kota Bima dikelola berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Periode 2015-2019

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kondisi keuangan dimasa lalu. Analisis terhadap kinerja keuangan Kota Bima mencakup kinerja pelaksanaan APBD dan neraca daerah. Keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Ditinjau dari sisi APBD, keuangan daerah dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dari tahun ke tahun diperkirakan akan terus meningkat, dimana peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan, baik secara fisik maupun non fisik.

Kinerja keuangan masa lalu dapat diukur dari kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Neraca Daerah sebagaimana dibawah ini.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Struktur APBD terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah. Asumsi dasar sebagai bahan penyusunan APBD dari tahun 2015 sampai dengan 2019 yaitu dengan memperkirakan faktor ekonomi makro antara lain; 1) pertumbuhan ekonomi; 2) tingkat inflasi; 3) stabilitas harga minyak; dan juga asumsi perkembangan PDRB maupun asumsi-asumsi lain yang berkaitan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD tahun sebelumnya dapat dilihat dari aspek tingkat realisasi atau penyerapan APBD setiap tahunnya. Secara umum gambaran kinerja pelaksanaan APBD disajikan berikut ini:

3.1.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua penerimaan yang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah di bagi kedalam tiga komponen yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan/Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan daerah yang disajikan secara serial menginformasikan mengenai rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2015-2019 sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima
Tahun 2015-2019

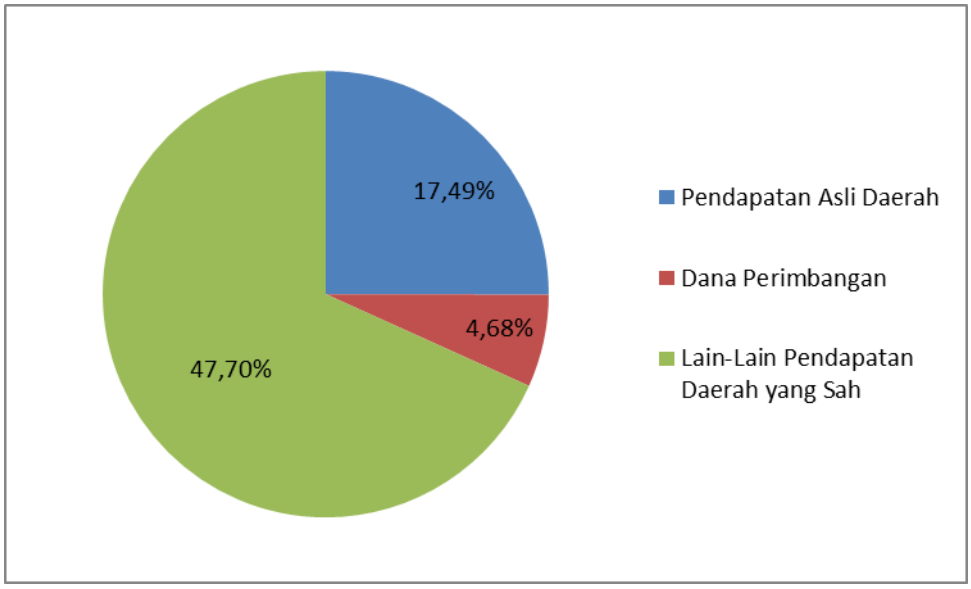
No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	**PENDAPATAN**	**710.708.239.303,47**	**781.084.159.160,86**	**973.642.401.972,96**	**768.070.688.024,82**	**774.410.991.653,59**	**3,57**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**30.266.723.064,23**	**30.524.799.755,78**	**52.465.170.257,96**	**46.115.436.512,62**	**50.422.855.052,89**	**17,49**
1.1.1	Pajak daerah	11.228.422.668,00	12.341.769.989,00	13.910.270.478,00	15.953.336.197,49	17.441.637.810,41	11,66
1.1.2	Retribusi daerah	5.268.428.826,00	5.132.141.660,00	5.048.756.746,00	5.851.506.595,00	10.194.288.416,00	21,48
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.225.903.335,00	1.678.676.756,00	2.059.377.247,72	1.650.003.101,00	1.461.853.201,38	7,08
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	12.543.968.235,23	11.372.211.350,78	31.446.765.786,24	22.660.590.619,13	21.325.075.625,10	33,34
1.2	**Dana Perimbangan**	**552.406.937.496,00**	**698.913.856.025,00**	**707.754.462.556,00**	**640.693.906.827,00**	**643.423.884.046,00**	**4,68**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	18.252.678.496,00	62.125.501.412,00	58.616.143.982,00	32.683.048.442,00	32.734.418.891,00	47,66
1.2.2	Dana alokasi umum	435.279.239.000,00	464.125.442.000,00	455.972.250.000,00	455.972.250.000,00	484.764.635.000,00	2,80
1.2.3	Dana alokasi khusus	98.875.020.000,00	172.662.912.613,00	193.166.068.574,00	152.038.608.385,00	125.924.830.155,00	12,01
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**128.034.578.743,24**	**51.645.503.380,08**	**213.422.769.159,00**	**81.261.344.685,20**	**80.564.252.554,70**	**47,70**
1.3.	Hibah	0,00	12.000.000.000,00	168.997.000.000,00	16.658.547.534,20	17.864.981.905,70	306,35

No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1							
1.3.2	Dana darurat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	29.631.421.743,24	31.011.603.805,08	36.619.697.140,00	36.843.221.871,00	49.161.940.649,00	14,20
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	98.403.157.000,00	5.000.000.000,00	7.500.000.000,00	27.750.000.000,00	13.537.330.000,00	43,47
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	0,00	3.633.899.575,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	306.072.019,00	9.575.280,00	0,00	(49,22)

Sumber: LRA, Tahun 2015–2019

Berdasarkan Tabel 3.1 diperoleh gambaran bahwa realisasi pendapatan Pemerintah Kota Bima memiliki prosentase rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan kurun waktu 2015-2019 mengalami peningkatan sebesar 3,57%, dimana komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah yang paling tinggi peningkatannya dengan rata-rata 47,70% kemudian pendapatan asli daerah dengan rata-rata realisasi sebesar 17,49%, dan dana perimbangan dengan rata-rata 4,68%. Dengan demikian Pemerintah Kota Bima belum memiliki kemadirian yang cukup atas pendapatan daerah karena sumber pendapatan daerah terbesar dari dana perimbangan.

Gambar 3.1.
Rata-rata Komposisi Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2015-2019



Sumber : Diolah dari LRA Tahun 2015-2019

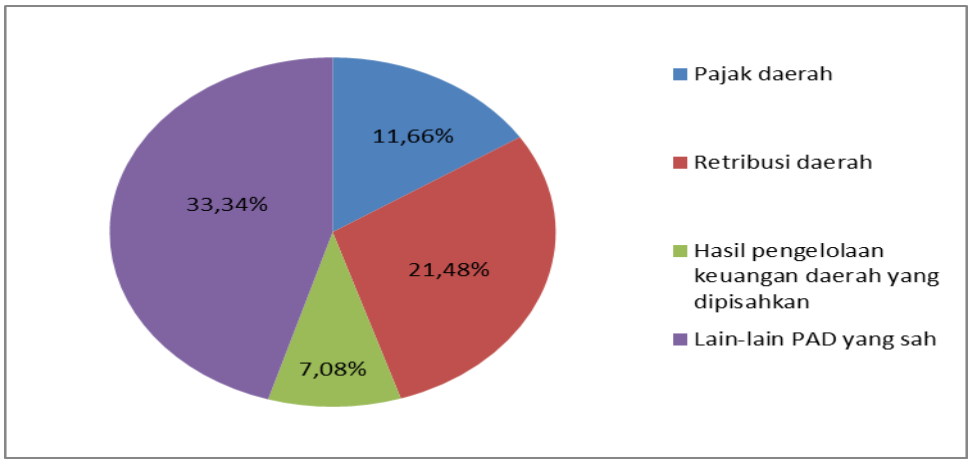
Dari gambar di atas dapat disimpulkan bahwa rata–rata proporsi komponen Pendapatan Daerah Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 terbesar dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar 47,70%, Pendapatan Pajak Asli Daerah urutan kedua yaitu sebesar 17,49% dan Dana Perimbangan sebesar 4,68% dari seluruh total pendapatan.

Rincian dari Pendapatan Asli Daerah dari Tahun 2015-2019 disajikan sebagai berikut:

1) Pendapatan Asli Daerah

Rata–rata proporsi komponen Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019 terbesar berasal dari lain-lain pendapatan asli daerah sebesar 33,34%, Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 21,48%, Pendapatan Pajak Daerah yaitu sebesar 11,66%. Dan sisanya Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 7,08%.

Gambar 3.2.
Rata-rata Komposisi Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015-2019

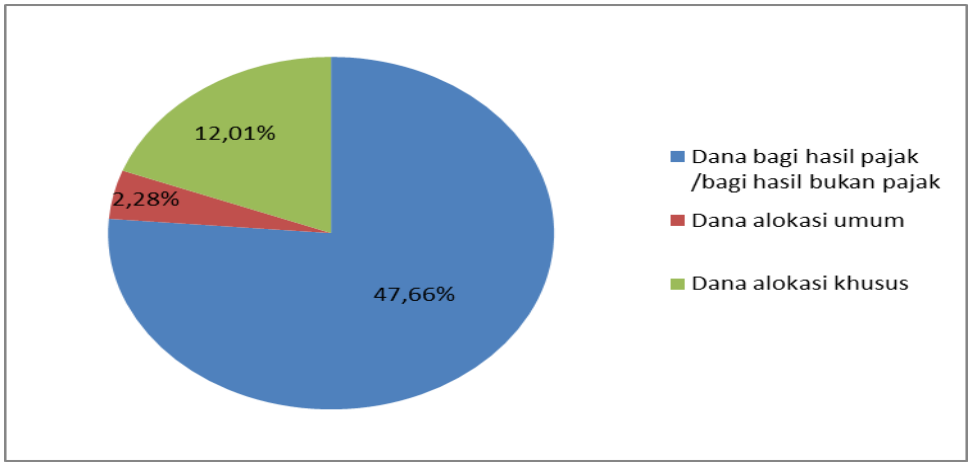


Sumber : Diolah dari LRA Tahun 2015-2019

2) Dana Perimbangan

Komposisi dana perimbangan selama Tahun 2015-2019 berasal dari Dana Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak sebesar 47,66%, Dana Alokasi Khusus sebesar 12,01% dan sisanya Dana Alokasi Umum Sebesar 2,28%.

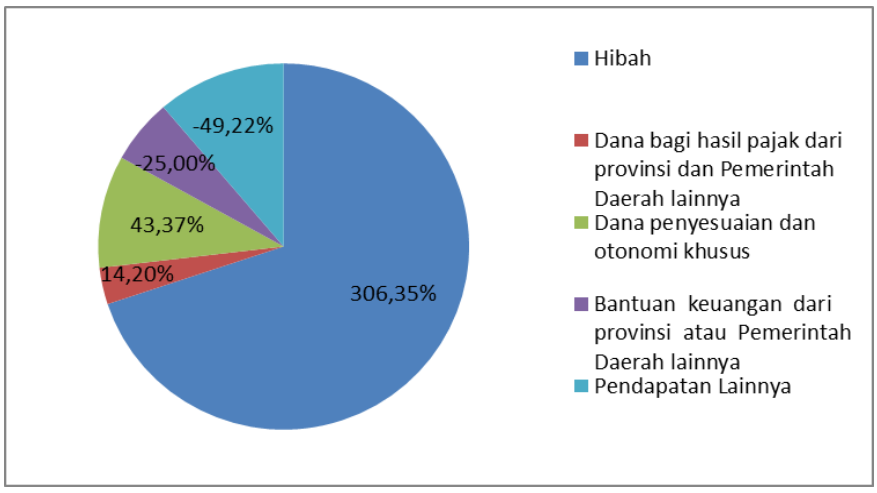
Gambar 3.3.
Rata-rata Komposisi Pertumbuhan Dana Perimbangan
Tahun 2015-2019



3) Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penyumbang terbesar dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah berasal dari Pendapatan Hibah dan 306,35%, Dana Penyesuaian sebesar 43,37%, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp14,20% sisanya Bantuan keuangan dari Provisinsi atau Pemeritah Lainnya serta Penadapatan Lainnya mengalami pertumbuhan negatif sebagaimana yang terlihat dalam gambar 3.4.

Gambar 3.4.
Rata-rata Komposisi Pertumbuhan Lain–Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Tahun 2015-2019



Sumber : Diolah dari LRA Tahun 2015-2019

3.1.1.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Kalsifikasi belanja menurut jenis belanja sebagaimana dimaksud terdiri dari :

1) Belanja pegawai;
2) Belanja bunga;
3) Belanja subsidi;
4) Belanja hibah;
5) Belanja bantuan sosial;
6) Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota/desa;
7) Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kotadan pemerintah; dan
8) Belanja tak terduga

Sedangkan Belanja Langsung meliputi :

1) Belanja Pegawa;
2) Belanja barang dan jasa; dan
3) Belanja modal

Pengukuran kinerja suatu daerah juga dapat dilihat dari seberapa besar realisasi belanja yang telah terserap, semakin besar realisasi belanja semakin bagus kinerja suatu daerah. Alokasi belanja daerah sebagian besar dialokasikan untuk pelayanan kepada masyarakat sehingga bisa menggerakkan perekonomian sektor riil yang berakibat pada peningkatan pendapatan masyarakat. Realisasi belanja daerah Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	**BELANJA**	**704.320.191.400,37**	**788.330.723.322,00**	**799.297.246.755,00**	**852.955.415.742,94**	**796.259.444.362,27**	**3,35**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**391.281.034.964,50**	**404.598.354.952,00**	**352.296.942.725,00**	**407.048.426.741,00**	**389.313.792.271,23**	**0,42**
2.1.1	Belanja Pegawai	370.131.535.433,00	384.659.690.823,00	319.790.767.150,00	307.775.708.108,00	316.954.237.194,94	(3,43)
2.1.2	Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	15.571.160.387,50	12.990.865.338,00	21.313.903.978,00	36.873.284.336,00	27.055.474.030,00	23,47
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.943.457.490,00	4.650.060.300,00	9.392.865.500,00	59.806.857.104,00	43.492.027.021,29	157,34
2.1.6	Belanja Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan	822.411.654,00	776.995.041,00	775.531.097,00	822.411.652,00	812.054.025,00	(0,23)
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	812.470.000,00	1.520.743.450,00	1.023.875.000,00	1.770.165.541,00	1.000.000.000,00	20,97
2.2	**Belanja Langsung**	**313.039.156.435,87**	**383.732.368.370,00**	**447.000.304.030,00**	**445.906.989.001,94**	**406.945.652.091,04**	**7,52**
2.2.1	Belanja Pegawai	32.221.834.373,00	35.710.069.137,00	38.554.835.050,00	43.254.612.720,00	46.628.343.376,00	9,70
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	105.805.925.834,00	130.876.300.975,00	163.478.787.993,00	168.033.893.974,00	168.667.626.819,33	12,94
2.2.3	Belanja Modal	175.011.396.228,87	217.145.998.258,00	244.966.680.987,00	234.618.482.307,94	191.649.681.895,71	3,59

Sumber: LRA Tahun 2015-2019

Berdasarkan tabel 3.2 dapat dilihat bahwa selama kurun waktu tahun 2015-2019, pertumbuhan belanja mengalami kenaikan sebesar 3,35% dengan rincian pertumbuhan belanja terdiri dari belanja tidak langsung tumbuh 0,42% dan belanja langsung tumbuh sebesar 7,52%. Pada komponen belanja tidak langsung bantuan sosial mengalami pertumbuhan rata-rata 157,34%, belanja hibah mengalami pertumbuhan 23,47%. Sedangkan untuk belanja langsung rata-rata 9,70% pada belanja pegawai, belanja barang dan jasa rata-rata 12,94 % dan belanja modal rata-rata 3,59 %.

3.1.1.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan Pemerintah Kota Bima terdiri dari:

1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah;
2) pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (Investasi) pemerintah daerah, dan pembayaran pokok utang; dan
3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan.

Sumber pembiayaan pemerintah daerah dalam rangka perimbangan keuangan pusat dan pemerintah daerah diperoleh berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan ditetapkan kebijakan otonomi daerah, penyelenggaraan pemerintah di daerah dilaksanakan dengan lebih berorientasi kepada kepentingan daerah yang diimplementasikan dalam bentuk program kegiatan SKPD.

Gambaran tentang realisasi pembiayaan daerah yang disajikan pada Tabel 3.3 menginformasikan mengenai rata-rata perkembangan/kenaikan realisasi penerimaan dan pengeluaran daerah Pemerintah Kota Bima.

Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Pembiayaan Daerah
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
3	**PEMBIAYAAN**	**28.624.520.598,60**	**33.276.795.711,70**	**26.030.809.470,56**	**200.458.301.376,52**	**115.089.886.350,39**	**155,49**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	32.646.231.028,60	35.029.426.631,70	26.030.809.470,56	200.458.301.376,52	115.589.886.350,39	152,34
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	4.021.710.430,00	1.752.630.920,00	0,00	0,00	500.000.000,00	(39,11)
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		32.610.673.378,60	35.024.381.001,70	26.030.231.550,56	200.447.971.628,52	115.573.573.658,39	152,36

Sumber: LRA Tahun 2015-2019

Berdasarkan Tabel 3.3 diperoleh gambaran bahwa realisasi pembiayaan Pemerintah Kota Bima mulai tahun 2015-2019 dengan rata-rata perkembangan/kenaikan 155,49%.

3.1.2 Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas pada waktu tertentu. Laporan neraca daerah akan menggambarkan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, Pihak Legislatif Daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luar lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau ekuitas dana pada tanggal tertentu. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio *likuiditas* dan *solvabilitas*. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Pemerintah Kota Bima dalam kurun waktu Tahun 2015-2019 disajikan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Pertumbuhan Neraca Pemerintah Kota Bima
Tahun 2015-2019

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
2	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
A S E T						
ASET LANCAR						
Kas						
Kas di Kas Daerah	32.918.076.589,70	23.817.020.618,56	198.116.818.888,52	114.215.610.773,28	89.608.912.549,96	160,07
Kas di Kas Dana Kapitasi JKN FKTP	2.094.491.912,00	2.232.804.230,00	1.243.534.287,00	632.531.059,92	679.401.466,05	(19,86)
Kas di Kas Bendahara Penerimaan	0,00	77.041.231,00	40.071.160,00	349.821.300,00	31.560.314,02	195,39
Kas di Kas Bendahara Pengeluaran	53.200,00	76.318.501,00	0,00	0,00	1.616.000,00	35.813,96
Kas di Kas Dana BOS	58.429.714,00	82.972.917,00	1.087.618.453,00	725.431.825,20	2.951.503.625,70	381,59
Kas Lainnya - di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00	140.872.484,00	4.246.927,00	57.718.744,76	290,52
Kas Lainnya - Kas Dana Bantuan	0,00	12.563.690.876,00	0,00	0,00	0,00	(25,00)

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Jumlah Kas	**35.071.051.415,70**	**38.849.848.373,56**	**200.628.915.272,52**	**115.927.641.885,40**	**93.330.712.700,49**	**91,37**
Piutang						
Piutang Pajak	3.405.173.663,00	4.641.153.078,00	6.405.759.215,42	7.763.570.136,71	8.847.322.680,50	27,37
Penyisihan Piutang Pajak	(876.842.627,02)	(1.497.687.796,00)	(2.611.912.497,63)	(3.552.486.268,13)	(4.549.551.078,22)	52,32
Piutang Pajak Neto	2.528.331.035,98	3.143.465.282,00	3.793.846.717,79	4.211.083.868,58	4.297.771.602,28	14,52
Piutang Retribusi	899.889.981,36	855.651.621,36	825.522.975,36	1.479.336.405,36	3.378.085.348,36	49,78
Penyisihan Piutang Retribusi	(879.182.499,73)	(716.236.240,72)	(788.637.442,02)	(952.727.773,94)	(1.403.511.024,57)	14,92
Piutang Retribusi Neto	20.707.481,63	139.415.380,64	36.885.533,34	526.608.631,42	1.974.574.323,79	525,59
Piutang Dana Bagi Hasil	10.407.021.932,08	16.441.273.928,00	10.163.878.445,00	21.339.374.118,00	10.505.792.473,00	19,75
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Dana Bagi Hasil Netto	10.407.021.932,08	16.441.273.928,00	10.163.878.445,00	21.339.374.118,00	10.505.792.473,00	19,75
Piutang Deviden	129.609.015,00	701.315.460,00	8.191.200,00	0,00	0,00	60,57
Piutang Lainnya	0,00	111.122.350,00	23.625.100,00	0,00	0,00	(44,69)
Penyisihan Piutang Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Lainnya Netto	0,00	111.122.350,00	23.625.100,00	0,00	0,00	(44,69)
Belanja Dibayar Dimuka	418.080.952,38	215.416.666,67	261.041.666,67	148.958.333,34	2.520.980.222,03	380,54

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	79.562.617,24	47.303.581,25	2.717.721.564,09	2.850.445.021,14	2.987.002.079,23	1403,60
Penyisihan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Netto	79.562.617,24	47.303.581,25	2.717.721.564,09	2.850.445.021,14	2.987.002.079,23	1403,60
Jumlah Piutang	**13.583.313.034,31**	**20.799.312.648,56**	**17.005.190.226,89**	**29.076.469.972,48**	**22.286.120.700,33**	20,63
Persediaan	**3.983.956.695,42**	**2.853.986.801,33**	**3.448.406.360,67**	**2.763.263.518,35**	**3.887.421.184,79**	**3,32**
JUMLAH ASET LANCAR	**52.638.321.145,43**	**62.503.147.823,45**	**221.082.511.860,08**	**147.767.375.376,23**	**119.504.254.585,61**	**55,04**
INVESTASI JANGKA PANJANG						
Investasi Non Permanen						
Investasi Dana Bergulir	3.566.446.733,00	3.561.401.103,00	3.560.823.183,00	3.550.493.435,00	3.534.180.743,00	(0,23)
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	(2.564.360.136,00)	(2.716.265.446,00)	(2.974.633.594,00)	(3.185.293.736,00)	(3.346.647.667,50)	6,90

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Jumlah Investasi Non Permanen	**1.002.086.597,00**	**845.135.657,00**	**586.189.589,00**	**365.199.699,00**	**187.533.075,50**	**(33,16)**
Investasi Permanen						
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	10.159.739.474,00	11.912.370.394,00	11.912.370.394,00	11.912.370.394,00	12.412.370.394,00	5,36
Jumlah Investasi Permanen	**10.159.739.474,00**	**11.912.370.394,00**	**11.912.370.394,00**	**11.912.370.394,00**	**12.412.370.394,00**	**5,36**
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	**11.161.826.071,00**	**12.757.506.051,00**	**12.498.559.983,00**	**12.277.570.093,00**	**12.599.903.469,50**	**3,28**
ASET TETAP						
Tanah	91.140.010.862,00	93.774.306.862,00	95.205.913.362,00	98.752.770.652,00	106.572.203.992,00	4,02
Peralatan dan Mesin	167.387.458.190,36	178.451.735.295,28	179.874.914.403,84	188.333.945.974,35	221.863.700.059,41	7,48
Gedung dan Bangunan	400.157.450.449,07	466.520.476.084,74	473.001.196.536,73	505.640.234.260,41	534.274.175.792,30	7,63
Jalan, Irigasi, Jaringan	502.113.507.224,67	637.146.470.774,67	746.297.741.723,03	905.891.882.912,91	1.023.816.130.074,23	19,61
Aset Tetap Lainnya	23.317.435.218,79	22.369.995.168,26	37.440.158.037,14	55.218.150.109,57	65.864.847.668,80	32,52
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	38.946.955.878,68	34.411.422.015,41	43.414.140.630,69	3,63
Akumulasi Penyusutan	(358.350.343.078,38)	(416.037.702.321,51)	(457.043.665.851,03)	(541.827.114.711,74)	(645.467.592.900,41)	15,91
JUMLAH ASET TETAP	**825.765.518.866,51**	**982.225.281.863,44**	**1.113.723.214.090,39**	**1.246.421.291.212,91**	**1.350.337.605.317,02**	**13,15**
ASET LAINNYA						

Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	2.726.802.815,41	2.748.516.578,67	6.624.520,83	618.679.232,78	117.440.440,87	2264,81
Aset Tak Berwujud	454.300.000,00	454.300.000,00	1.109.126.000,00	1.542.126.000,00	1.547.126.000,00	45,88
Amortisasi Aset Tak Berwujud	(58.627.500,00)	(81.342.500,00)	(158.678.988,00)	(235.785.288,00)	(313.141.588,00)	53,81
Aset Lain-lain	37.203.245.575,28	52.579.590.998,41	36.245.006.242,67	16.235.108.783,14	17.865.992.067,83	(8,72)
JUMLAH ASET LAINNYA	**40.325.720.890,69**	**55.701.065.077,08**	**37.202.077.775,50**	**18.160.128.727,92**	**19.217.416.920,70**	**(10,11)**
JUMLAH ASET	**929.891.386.973,63**	**1.113.187.000.814,97**	**1.384.506.363.708,97**	**1.424.626.365.410,06**	**1.501.659.180.292,83**	**13,10**
KEWAJIBAN						
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK						
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	0,00	95.911.799,00	140.872.484,00	4.246.927,00	57.718.744,76	302,24
Pendapatan Diterima Dimuka	17.032.462,36	131.291.943,08	164.436.462,51	218.166.992,65	186.523.993,86	178,56
Utang Belanja	932.111.200,00	148.827.529,00	1.713.253.162,00	228.268.928,00	148.747.599,00	211,41
Utang Jangka Pendek Lainnya	258.050.039,00	0,00	332.754.981,00	905.952.906,43	6.180.768.565,81	163,63
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	**1.207.193.701,36**	**376.031.271,08**	**2.351.317.089,51**	**1.356.635.754,08**	**6.573.758.903,43**	**199,68**
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG						
Utang Dalam Negeri-Sektor Perbankan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
JUMLAH KEWAJIBAN	**1.207.193.701,36**	**376.031.271,08**	**2.351.317.089,51**	**1.356.635.754,08**	**6.573.758.903,43**	**199,68**
EKUITAS						
Ekuitas	928.684.193.272,27	1.112.810.969.543,89	1.382.155.046.619,46	1.423.269.729.655,98	1.495.085.421.389,40	13,01
JUMLAH EKUITAS	**928.684.193.272,27**	**1.112.810.969.543,89**	**1.382.155.046.619,46**	**1.423.269.729.655,98**	**1.495.085.421.389,40**	**13,01**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**929.891.386.973,63**	**1.113.187.000.814,97**	**1.384.506.363.708,97**	**1.424.626.365.410,06**	**1.501.659.180.292,83**	**13,10**

Sumber: Neraca Tahun 2015- 2019

3.1.2.1 Aset

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa yang akan datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Berdasarkan tabel diatas jumlah Aset Kota Bima selama kurun waktu tahun 2015-2019 mengalami pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 13,10%. Nilai jumlah aset Kota Bima pada tahun 2019 adalah sebesar Rp1.501.659.180.292,83. Jika dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar Rp929.891.386.973,63. Sementara pertumbuhan nilai Aset lancar Pemerintah Kota Bima rata-rata sebesar 55,04%, Investasi Jangka Panjang pertumbuhannya rata-rata sebesar 3,28%, Aset Tetap pertumbuhan rata-rata sebesar 13,15% dan Aset lainnya mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar 10,11% disebabkan oleh penghapusan barang milik daerah dalam kondisi rusak berat dan semakin besarnya nilai amortisasi aset tak berwujud serta pada tahun 2017 terjadi reklasifikasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke akun Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

Apabila dilihat secara lebih rinci, kas mengalami petumbuhan rata-rata sebesar 91,37% sejak tahun 2015-2019 sedangkan Piutang mengalami pertumbuhan sebesar 20,63% dan persediaan mengalam trend peningkatan dengan rata rata sebesar 3,32%,

Investasi jangka panjang Pemerintah Kota Bima terdiri atas investasi permanen berupa penyertaan modal kepada BUMD dan investasi non permanen berupa dana bergulir, dimana investasi non permanen mengalami pertumbuhan negatif rata-rata sebesar 33,16% karena adanya pelunasan dari debitur dan dilakukan penyisihan dana bergulir diragukan tertagih sedangkan investasi permanen mengalami trend pertumbuhan positif sebesar 5,36% karena ada penambahan penyertaan modal tahun 2019 pada PT. Bank NTB Syariah sebesar Rp500.000.000,00.

Aset tetap dalam Neraca Pemerintah Kota Bima mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 13,15% selama kurun waktu tahun 2015-2019 . Pada tahun 2015 aset tetap Pemerintah Kota Bima sebesar Rp825.765.518.866,51 mengalami kenaikan menjadi Rp1.350.337.605.317,02 pada tahun 2019. Pertumbuhan aset tetap ini didorong oleh berbagai faktor diantaranya penambahan belanja modal, hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya dan Pemerintah Pusat serta dilakukan kegiatan inventarisasi, klasifikasi dan penilaian aset tetap sesuai dengan aturan yang berlaku.

Aset Lainnya selama kurun waktu tahun 2015-2019 rata-rata mengalami pertumbuhan negatif sebesar 10,11% disebabkan oleh penghapusan barang milik daerah dalam kondisi rusak berat dan semakin besarnya nilai amortisasi aset tak berwujud serta pada tahun 2017 terjadi reklasifikasi Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah ke akun Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah.

3.1.2.2 Kewajiban

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Kota Bima dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 199,68 %. Pertumbuhan kewajiban mengalami peningkatan karena dipengaruhi oleh utang kepada pihak ketiga atas pencairan Belanja Modal kurang dari realisasi fisik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah senilai Rp6.168.078.765,81 dan utang klaim BPJS senilai Rp12.689.800,00 pada RSUD Kota Bima Dinas Kesehatan pada tahun 2019.

Selanjutnya, tingkat kualitas pengelolaan keuangan daerah dapat diketahui berdasarkan analisis rasio atau perbandingan antara kelompok/elemen laporan keuangan yang satu dengan kelompok yang lain. Beberapa rasio yang dapat diterapkan di sektor publik adalah rasio likuiditas

dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio Likuiditas terdiri dari terdiri rasio lancar (current ratio), rasio cepat (quick ratio) dan rasio kas (cash ratio). Sedangkan Rasio Solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi seluruh kewajibann sekaligus menunjukan indikasi tingkat keamanan bagi para kreditur. Kualitas pengelolaan keuangan daerah dikategorikan baik apabila nilai rasio lebih dari satu. Rata-rata pertumbuhan rasio keuangan Pemerintah Kota Bima Tahun Anggaran 2015-2019 dapat dilihat pada Tabel 3.5 sebagai berikut:

Tabel 3.5.
Analisa Rasio Keuangan
Tahun 2015-2019

No	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019	Rata-rata Pertumbuhan (%)
Rasio Likuiditas							
1	Rasio Lancar	4.360,39	16.621,80	9.402,50	10.892,19	1.817,90	8.618,95
2	Rasio Quick	3.995,74	15.805,53	9.244,74	10.677,53	1.720,41	8.288,79
3	Rasio Kas	29,05	103,32	85,33	85,45	14,20	63,47
Rasio Solvabilitas							
1	Rasio Hutang terhadap Aset	0,13	0,03	0,17	0,10	0,44	0,17
2	Rasio Hutang terhadap Modal	0,13	0,03	0,17	0,10	0,44	0,17

Sumber: Hasil Perhitungan

Dari Tabel 3.5 terlihat selama tahun 2015-2019 rata-rata pertumbuhan rasio lancar sebesar 8.618,95%. Hal ini menunjukan likuiditas Pemerintah Kota Bima cukup bagus karena kemampuan membayar utangnya cukup tinggi.

Trend quick rasio hampir sama polanya dengan current rasio, tetapi rata-rata pertumbuhan quick rasio senilai 8.288,79% memberikan jaminan bahwa kemampuan Pemerintah Kota Bima dalam melunasi utang jangka pendeknya cukup tinggi.

Sementara rata-rata pertumbuhan Rasio Kas selama tahun 2015-2019 senilai 63,47%, ini menunjukan bahwa kemampuan perusahaan untuk melunasi kewajiban jangka pendeknya cukup tinggi juga.

Rasio utang terhadap aset dan utang terhadap total modal menunjukan seberapa besar pengaruh utang terhadap aktiva dan seberapa perlu utang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki. Nilai leverage menunjukan kisaran angka dibawah 1%. Hal ini menunjukan bahwa mayoritas aset Pemerintah Kota Bima didanai dari modal sendiri. Rendahnya tingkat leverage mengindikasikan bahwa Pemerintah Kota Bima pada kondisi yang kuat.

3.1.2.3 Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

Ekuitas Pemerintah Daerah Pemerintah Kota Bima selama kurun waktu 2015-2019 mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 13,01%. Nilai Ekuitas pada taun 2015 sebesar Rp928.684.193.272,27 dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp1.495.085.421.389,40.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Periode 2015-2019

Keuangan daerah merupakan komponen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk mengetahui kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan kesadaran untuk secara efektif memberikan perhatian kepada isu dan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan menghasilkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan memprioritaskan pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta berdasarkan skala prioritas yang memenuhi kriteria realistis, terukur, penting dan mendesak sehingga anggaran yang terbatas tersebut dapat berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1) Kebijakan Pendapatan

Kebijakan pendapatan daerah Pemerintah Kota Bima merupakan perkiraan yang terukur secara Nasional, dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan pendapatan daerah tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari: sektor pajak daerah, retribusi

daerah, dan dana perimbangan. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dilakukan upaya-upaya sebagai berikut**:**

a. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
b. Meningkatkan koordinasi dan perhitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
c. Meningkatkan Penyertaan Modal kepada BUMD sehingga menghasilkan deviden dalam upaya meningkatkan secara signifikan terhadap pendapatan daerah;
d. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
e. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
f. Peningkatan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
g. Pemantapan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak/retribusi;
h. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah yaitu dengan meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan DBH Pajak yang bersumber dari Provinsi.

2) Kebijakan Belanja

Belanja daerah dikelompokan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Salah satu terobosan Pemerintah Kota Bima dalam mendanai pembangunan kota sebagai bahan pendukung kebijakan pimpinan di dalam penyusunan APBD Pemerintah Kota Bima. Formulasi yang dimaksud adalah beberapa indikator yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2016 sebagaimana terakhir diubah menjadi Permendagri Nomor 21 tahun 2011.

Kebijakan yang dilakukan dalam pengelolaan belanja daerah antara lain :

a. Mengupayakan penggunaan dana fungsi pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan;
b. Mengupayakan penggunaan dana fungsi kesehatan 10%, dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan Pemerintah Kota Bima secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari total belanja;
c. Optimalisasi pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang meliputi sebagai daya dukung dalam pengembangan daerah dan peningkatan perekonomian daerah;
d. Peningkatan aktifitas perekonomian melalui pemberdayaan UMKM dengan upaya perluasan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat;
e. Pendukungan untuk optimalisasi penggunaan barang milik daerah; dan
f. Pembangunan dan pengembangan pusat pelayanan publik dan sosial.

3) Kebijakan Pembiayaan

Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terjadi defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA), transfer dari dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diperuntukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyertaan modal dan pembelian surat berharga/saham), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah dan sisa lebih perhitungan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah adalah mengoptimalkan bantuan keuangan, bantuan provinsi dan nasional, belanja bantuan hibah maupun belanja bantuan sosial untuk urusan non pemerintahan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah adalah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dianggarkan untuk rencana penerimaan yang berasal dari pemberian pinjaman dana bergulir dan penyertaan modal kepada BUMD. Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD mempunyai fungsi sebagai berikut :

1) Fungsi otorisasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yg bersangkutan;
2) Fungsi perencanaan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;
3) Fungsi pengawasan, mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kesuaian kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan ketetuan yang telah ditetapkan;
4) Fungsi alokasi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efiensi dan efektivitas perekonomian;
5) Fungsi distribusi, mengandung arti bahwa anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
6) Fungsi stabilitas, mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan melalui sistem yang terintegrasi dalam rangkaian siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai pada pertanggungjawaban atas APBD yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Daerah telah menyampaikan pertanggungjawaban yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Namun dalam penyusunan data yang digunakan terkait dengan APBD Tahun 2015-2019 adalah data APBD yang sudah diaudit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi NTB sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan Pemerintah Kota Bima pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembelanjaan dan pengeluaran pembiayaan di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah serta untuk menentukan kebijakan pembelanjaan di masa datang.

Tabel 3.6.
Analisis Proporsi Realisasi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Tahun 2015-2019

No	Uraian	Total belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur (Rp)	Total pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp)	Prosentase
1	Tahun Anggaran 2015	460.074.302.273,00	708.341.901.830,37	64,95
2	Tahun Anggaran 2016	497.145.693.428,00	790.083.354.242,00	62,92
3	Tahun Anggaran 2017	441.680.555.936,00	799.297.246.755,00	55,26
4	Tahun Anggaran 2018	431.663.716.745,00	852.955.415.742,94	50,61
5	Tahun Anggaran 2019	452.657.686.788,20	796.759.444.362,27	56,81

Sumber: Laporan KeuanganTahun 2015-2019, diolah

Berdasarkan tabel di atas, bahwa kontribusi realisasi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dari tahun 2015-2019 mengalami penurunan, pada tahun 2015 prosentase sebesar 64,95%, tahun 2016 sebesar 62,92%, tahun 2017 sebesar 55,26%, tahun 2018 sebesar 50,61%

dan tahun 2019 sebesar 56,81%. Dari data tersebut diatas kebutuhan belanja aparatur masih cukup besar sehingga dapat disimpulkan bahwa belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur cukup besar dibandingkan dengan belanja untuk pembangunan. Namun kedepan sesuai arahan dan petunjuk dari pemerintah pusat agar setiap daerah secara bertahap terus melakukan penurunan persentase belanja untuk kebutuhan aparatur menjadi seminimal mungkin dan atau kurang dari 50%.

3.2.2. Analisa Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang.

Berikut ini disajikan penghitungan penutup defisit riil anggaran pada periode 2015-2019.

Tabel 3.7.
Defisit Riil Anggaran
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	710.708.239.303,47	781.084.159.160,86	973.642.401.972,96	768.070.688.024,82	774.410.991.653,59
	Dikurangi realisasi:					
2	Belanja Daerah	704.320.191.400,37	788.330.723.322,00	799.297.246.755,00	852.955.415.742,94	796.259.444.362,27
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	4.021.710.430,00	1.752.630.920,00	0,00	0,00	500.000.000,00
Surplus/Defisit riil		2.366.337.473,10	(8.999.195.081,14)	174.345.155.217,96	(84.884.727.718,12)	(22.348.452.708,68)

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2015-2019, diolah

Dari tabel 3.7 tersebut diatas, terlihat bahwa terdapat surplus/defisit riil anggaran selama tahun 2015-2019 yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015 dan 2017 terjadi surplus riil anggaran sebesar Rp2.366.337.473,10 (2015) dan sebesar Rp174.345.155.217,96 (2017), sementara pada tahun 2016, 2018 dan 2019 mengalami defisit riil anggaran yaitu tahun 2016 sebesar Rp8.999.195.081,14, tahun 2018 sebesar Rp84.884.727.718,12 dan tahun 2019 sebesar Rp22.348.452.708,68.

Perencanaan penganggaran Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran tahun anggaran sebelumnya. Hal ini untuk menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran berjalan yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SILPA yang direncanakan.

Untuk menutupi defisit anggaran tersebut dilakukan optimalisasi pembiayaan melalui realisasi Penerimaan Pembiayaan dan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3.8.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	32.610.673.378,60	35.024.381.001,70	26.030.231.550,56	200.447.971.628,52	115.573.573.658,39
2	Koreksi	0,00	11.812.500,00	0,00	82.336.688,00	0,00
3	Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	35.557.650,00	5.045.630,00	577.920,00	10.329.748,00	16.312.692,00
4	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	326.573.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Kembali	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

No.	Uraian	Proporsi dari total defisit riil				
		2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
	Pemberian Pinjaman Daerah					
7	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2015-2019, diolah

Dari tabel komposisi penutup defisit riil anggaran tahun 2015-2019 mengalami fluktuasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya, terhitung SiLPA tahun 2015 sebesar Rp32.610.673.378,60, tahun 2016 sebesar Rp35.024.381.001,70, tahun 2017 sebesar Rp26.030.231.550,56, tahun 2018 sebesar Rp200.447.971.628,52 dan tahun 2019 sebesar Rp115.573.573.658,39.

Analisis yang dapat dilakukan untuk mendapat gambaran realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan dalam kurun waktu tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 dapat dilihat pada Tabel 3.9 berikut ini:

Tabel 3.9.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun 2015-2019

No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
1	Jumlah SiLPA	32.610.673.378,60	35.024.381.001,70	26.030.231.550,56	200.447.971.628,52	115.573.573.658,39
2	Pelampauan penerimaan PAD	0,00	0,00	0,00	2.934.271.153,92	1.806.300.307,42
3	Pelampauan penerimaan dana perimbangan	0,00	0,00	9.459.848.593,00	12.423.445.882,00	0,00
4	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00	159.028.141.931,25	0,00
5	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	42.949.533.491,01	50.530.753.351,26	21.787.078.163,08	25.990.105.721,35	144.519.169.074,78
6	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	1.138.050.039,00	0,00	1.685.417.629,00	905.952.906,43	6.180.768.565,81

No.	Uraian	2015 (Rp)	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)
7	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	4.562.984.596,06	20.700.982.284,34

Sumber: Laporan Keuangan Tahun 2015-2019, diolah

Beberapa hal yang dapat dikemukakan terkait dengan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu periode 2015-2019 Pemerintah Kota Bima antara lain:

1. Adanya kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan belanja setiap tahunnya, hal ini tercermin dari selisih antara jumlah usulan anggaran pada setiap musrenbang dengan pagu indikatif yang ada.
2. Adanya ketergantungan yang besar terhadap pemerintah pusat dan provinsi, yang tercermin dari perbedaan yang mencolok antara pendapatan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dan provinsi dengan pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD).
3. Keterbatasan sumberdaya manusia aparatur yang mampu mengelola perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan keuangan sesuai dengan stándar akuntansi pemerintah.
4. Belanja daerah masih didominasi oleh belanja pegawai, sehingga dana yang tersedia untuk alokasi belanja pembangunan menjadi terbatas.
5. Belanja daerah belum mampu menggerakan ekonomi lokal dan sekaligus memperbaiki kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan output perekonomian, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan pendapatan masyarakat.
6. Pengeluaran belanja daerah belum berorientasi pada kinerja dan kepentingan publik.

Adapun opini BPK atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bima untuk Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. LKPD Kota Bima tahun 2015 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**
2. LKPD Kota Bima tahun 2016 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

3. LKPD Kota Bima tahun 2017 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**
4. LKPD Kota Bima tahun 2018 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**
5. LKPD Kota Bima tahun 2019 dengan opini **Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

3.3. Kerangka Pendanaan

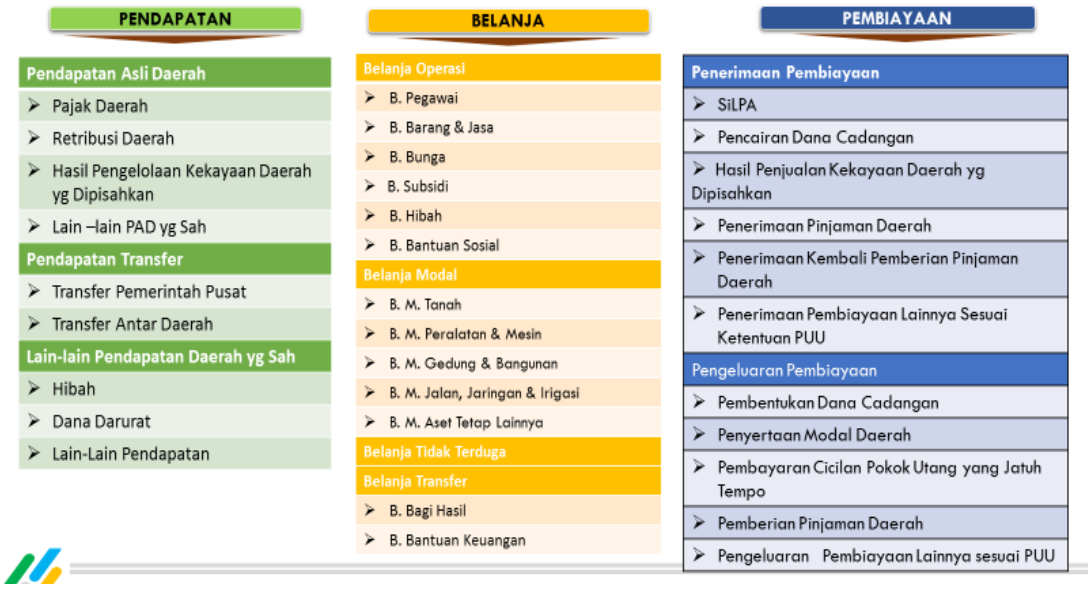
Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas total keuangan daerah, yang akan dialokasikan untuk mendanai belanja/pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama dan program-program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan serta alokasi untuk belanja daerah dan pengeluaran daerah lainnya**.** Kapasitas keuangan daerah adalah total pendapatan dan penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan dan kegiatan lanjutan yang akan didanai pada tahun anggaran berikutnya.

Pada akhir tahun 2019, beberapa peraturan baru yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diterbitkan pemerintah pusat, termasuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang merupakan pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodesifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah. Kesemuanya ini merupakan hal baru di dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diterapkan dan diberlakukan mulai Tahun Anggaran 2021.

Pemerintah Kota Bima dalam penyusunan APBD Tahun 2021 sudah mempedomani dan melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, sehingga berbeda dengan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020. Hal ini diperkuat

dengan Surat Edaran Nomor 130/736/SJ tentang Percepatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang salah satu butir SE tersebut berisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Gambar 3.5
Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019



Selain adanya peraturan baru yang terbit di akhir tahun 2019, terjadinya Kejadian Luar Biasa (KLB) wabah Pandemi Covid-19 yang berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan, hal ini berdampak pada banyak aspek, antara lain aspek sosial dan ekonomi. Sektor usaha masyarakat kecil dan menengah, bahkan industri dalam skala besar juga terkena imbasnya akibat dampak pandemi COVID-19 ini.

Perkembangan penyebaran COVID-19 yang semakin mengkhawatirkan membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi dan memutus penyebaran pandemi ini, kebijakan *Adaptasi kebiasan baru (AKB)*, *social distancing* dan anjuran *work from home* yang diambil pemerintah, mengakibatkan beberapa sektor perekonomian, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan

aktivitasnya sementara sampai waktu yang belum ditentukan. Kebijakan tersebut mengakibatkan berkurangnya aktivitas masyarakat yang berimplikasi terhadap lesunya sendi-sendi perekonomian baik dalam skala makro maupun mikro. Pandemi COVID-19 berdampak pada terkoreksinya pertumbuhan ekonomi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020 dan hal ini mempengaruhi capaian indikator-indikator ekonomi makro lainnya pada perencanaan di Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023.

Kondisi yang sama juga berlaku pada sektor penerimaan daerah Pemerintah Kota Bima. Diterapkannya kebijakan pemerintah yang meminta agar masyarakat berdiam diri di rumah selama pandemi COVID-19 ini berdampak terhadap penerimaan pendapatan daerah, khususnya dari retribusi maupun potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penurunan pendapatan dialami karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat merambat pada dampak sosial di kehidupan masyarakat, dengan meningkatnya jumlah pengangguran dan berkurangnya tingkat daya beli yang pada akhirnya berdampak pada penurunan beberapa jenis penerimaan pendapatan daerah.

Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima pada Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan bila dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan pendapatan daerah yang menurun, maka Belanja Daerah yang sebelumnya fokus untuk melaksanakan dan menuntaskan program/kegiatan yang sudah diamanatkan dalam RPJMD Kota Bima, pada tahun mendatang selain tetap menuntaskan program/kegiatan strategis, juga harus mendanai kegiatan-kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi dan kesehatan pasca pandemi COVID-19.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kota Bima tahun 2021 -2023 yaitu rata-rata realisasi pendapatan dan belanja Tahun Anggaran 2015-2019, Pertumbuhan ekonomi nasional pada tahun 2020 secara nasional sebesar 2,07% dan Propinsi Nusa tenggara Barat sebesar 3,03%, proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional berdasarkan Kementerian Keuangan tahun 2021 sebesar 4,5%-5,5% dan pada tahun 2022 sebesar 4,8% dan diperkirakan inflasi berdasarkan data

Bank Indonesia berkisar 5,26%-8,15% di Tahun 2021 dan 3,26%-4,13% di tahun 2022.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Proyeksi pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Adapun komponen dari pendapatan daerah, meliputi: pendapatan asli daerah, dana perimbangan/pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pada awalnya proyeksi pendapatan daerah terdapat beberapa asumsi yang menjadi dasar proyeksi, diantaranya asumsi proyeksi pajak, retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah seperti telah diuraikan di atas bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima pada kurun waktu Tahun 2015–2019 tercapai rata-rata 11,66%, hal ini mengindikasikan bahwa dalam tahun-tahun mendatang komponen Pajak Daerah, retribusi dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi tumpuan dan andalan di dalam peningkatan pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bima.

Terkait proyeksi Dana Perimbangan/Pendapatan Transfer, penyusunan target dana bagi hasil pajak/bukan pajak pada tahun-tahun mendatang secara umum terdapat kenaikan per tahun. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh Dana Alokasi Umum dan Dana insentif Daerah.

Sementara penyusunan Proyeksi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah mengalami stagnan dari tahun 2020 -2023.

Tetapi dengan merebaknya pandemi COVID-19 ini, terdapat beberapa komponen pendapatan yang mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan kondisi normal, walaupun diharapkan pada tahun-tahun mendatang tidak terjadi lagi bencana sosial tersebut atau tidak sampai berkepanjangan sampai tahun mendatang. Hal ini diperkuat dengan kondisi bahwa Pemerintah akan memfokuskan pemulihan ekonomi dan reformasi nasional pada sejumlah sektor akibat COVID-19 di tahun 2021. Setidaknya ada 3 (empat) sektor akan menjadi fokus pemerintah yakni pemulihan sektor industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional dan reformasi sistem jaringan pengaman sosial, yang tentu saja hal ini akan berdampak pada pelaksanaan pembangunan daerah di Pemerintah Kota Bima.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bima melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan melalui penerapan secara penuh penyesuaian tarif terhadap pajak daerah dan retribusi daerah;
2. dilakukan pemutakhiran terhadap data Pendapatan Asli Daerah;
3. Inovasi pelayanan pada Pendapatan Asli Daerah, antara lain metode pembayaran/transaksi pembayaran terhadap pajak daerah akan dikembangkan melalui non tunai dan mobile, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi perpajakan dimana saja dan kapan saja, saat ini untuk pembayaran pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dapat dilakukan melalui mesin ATM Bank NTB Syariah dan beberapa aplikasi mobile;
4. Integrasi data perpajakan antara instansi terkait, sehingga akan meminimalisir terjadinya data yang tidak valid;
5. Perkembangan infrastruktur di Kota Bima semakin meningkat serta perkembangan ekonomi penduduk;
6. Menambah penyertaan modal pada perusahan daerah sehingga diharapkan meningkatkan deviden;
7. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
8. Meningkatkan dan mengoptimalkan pengelolaan aset daerah secara profesional;
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan/dana transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh) OPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;.

3. Pertukaran informasi dan kerjasama dalam pengawasan terkait peningkatan penerimaan yang bersumber dari pajak yang dikelola oleh provinsi yang berada pada wilayah Kota Bima.

Strategi pencapaian Lain-lain Pendapatan Yang Sah yang optimal ditempuh melalui Koordinasi dengan kementerian teknis dan lembaga non pemerintah.

Pada sisi lain, terdapat belanja daerah yang merupakan kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bima yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan, fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Selain hal tersebut, seperti telah diuraikan sebelumnya bahwa belanja daerah selain dialokasikan untuk penuntasan program/kegiatan yang telah diamanatkan dalam RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023 juga harus dialokasikan pada program/kegiatan dalam rangka pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19.

Kebijakan belanja daerah dilakukan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif. Adapun kebijakan belanja daerah Pemerintah Kota Bima, sebagai berikut:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
   Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; dan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
2. Dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
3. Pelaksanaan tujuan pembangunan berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs).
4. Sinkronisasi prioritas pembangunan dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP);

5. Penggunaan dana fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan.
6. Penggunaan dana fungsi kesehatan dalam rangka peningkatan fungsi kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen dari total belanja APBD di luar gaji, pembiayaan tidak hanya urusan kesehatan tetapi non urusan kesehatan yang merupakan fungsi kesehatan seperti sarana olahraga dan sumber daya insani;
7. Penggunaan dana fungsi infrastruktur 10 persen dari penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dari Provinsi, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan modal dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009;
8. Dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya untuk mendanai program-program perangkat daerah yang menjadi kewenangan provinsi namun tidak menjadi prioritas Kepala Daerah Tahun 2018-2023, serta merupakan program pendukung penyelenggaraan perkantoran;
9. Pemenuhan anggaran untuk alokasi tertentu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya seperti untuk peningkatan kapasitas SDM Aparatur dan peningkatan kapasitas APIP;
10. Mengalokasikan dana untuk pemulihan ekonomi, kesehatan dan sosial yang terdampak pandemi COVID-19.

Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018-2019 merupakan realisasi APBD dan tahun 2020 bersumber dari APBD sementara itu proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022-2023 berdasarkan proyeksi dari APBD tahun 2021, disajikan pada Tabel 3.10 dan tabel 3.11 berikut:

Tabel 3.10.
Realisasi dan Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Realisasi APBD		APBD
		2018	2019	2020
1	**PENDAPATAN**	**768.070.688.024,82**	**774.410.991.653,59**	**736.298.044.130,13**
1.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**46.115.436.512,62**	**50.422.855.052,89**	**53.995.874.355,63**
1.1.1	Pajak daerah	15.953.336.197,49	17.441.637.810,41	19.719.858.600,00
1.1.2	Retribusi daerah	5.851.506.595,00	10.194.288.416,00	13.747.340.985,00
1.1.3	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.650.003.101,00	1.461.853.201,38	1.650.003.101,00
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	22.660.590.619,13	21.325.075.625,10	18.878.671.669,63
1.2	**Dana Perimbangan**	**640.693.906.827,00**	**643.423.884.046,00**	**598.430.733.255,00**
1.2.1	Dana bagi hasil pajak /bagi hasil bukan pajak	32.683.048.442,00	32.734.418.891,00	34.640.574.255,00
1.2.2	Dana alokasi umum	455.972.250.000,00	484.764.635.000,00	442.038.321.000,00
1.2.3	Dana alokasi khusus	152.038.608.385,00	125.924.830.155,00	121.751.838.000,00
1.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**81.261.344.685,20**	**80.564.252.554,70**	**83.871.436.519,50**
1.3.1	Pendapatan Hibah	16.658.547.534,20	17.864.981.905,70	17.768.000.000,00
	Pendapatan Lainnya	9.575.280,00	0,00	0,00
1.3.2	Pendapatan Dana darurat	0,00	0,00	0,00
1.3.3	Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	36.843.221.871,00	49.161.940.649,00	46.617.667.519,50
1.3.4	Dana penyesuaian dan otonomi khusus	27.750.000.000,00	13.537.330.000,00	19.485.769.000,00
2	**BELANJA**	**852.955.415.742,94**	**796.259.444.362,27**	**828.544.477.771,84**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**398.903.884.426,00**	**379.324.041.749,94**	**401.844.478.289,78**
2.1.1	Belanja Pegawai	307.775.708.108,00	316.954.237.194,94	310.826.429.717,52
2.1.4	Belanja Hibah	36.873.284.336,00	27.055.474.030,00	28.003.091.026,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	51.662.314.789,00	33.492.276.500,00	34.612.728.546,26
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	822.411.652,00	812.054.025,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.770.165.541,00	1.000.000.000,00	28.402.229.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**454.051.531.316,94**	**416.945.402.612,33**	**426.699.999.482,06**
2.2.1	Belanja Pegawai	43.254.612.720,00	46.628.343.376,00	58.133.382.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.178.436.289,00	178.667.377.340.62	196.158.147.165,90
2.2.3	Belanja Modal	234.618.482.307,94	191.649.681.895,71	172.408.469.816,16
3	**PEMBIAYAAN**	**200.458.301.376,52**	**115.089.886.350,39**	**92.246.433.641,71**
3.1	Penerimaan Pembiayaan	200.458.301.376,52	115.589.886.350,39	93.246.433.641,71
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	200.458.301.376,52	115.573.573.658,39	93.241.433.641,71
3.1.2	Pengembalian Dana	0,00	16.312.692,00	5.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi APBD		APBD
		2018	2019	2020
	Bergulir			
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		**115.573.573.658,40**	**93.241.433.641,71**	**0,00**

Sumber: Tim Penyusun RPJMD

Tabel 3.11.
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Tahun 2021-2023

Struktur APBD berdasarkan PP 12/2019

No.	Uraian	APBD	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	
4	**PENDAPATAN**	**751.247.135.434,00**	**774.995.625.625,99**	**799.561.217.491,48**	**3,17**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**58.137.204.299,00**	**61.625.436.556,94**	**65.322.962.750,36**	**6,00**
4.1.01	Pajak daerah	23.051.077.198,00	24.434.141.829,88	25.900.190.339,67	6,00
4.1.02	Retribusi daerah	19.732.335.000,00	20.916.275.100,00	22.171.251.606,00	6,00
4.1.03	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	1.650.003.101,00	1.749.003.287,06	1.853.943.484,28	6,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang sah	13.703.789.000,00	14.526.016.340,00	15.397.577.320,40	6,00
4.2	**Pendapatan Transfer**	**675.341.931.135,00**	**695.602.189.069,05**	**716.470.254.741,12**	**3,00**
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	630.270.506.166,00	649.178.621.350,98	668.653.979.991,51	3,00
4.2.02	Transfer Antar Daerah	45.071.424.969,00	46.423.567.718,07	47.816.274.749,61	3,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah**	**17.768.000.000,00**	**17.768.000.000,00**	**17.768.000.000,00**	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.768.000.000,00	17.768.000.000,00	17.768.000.000,00	0,00
5	**BELANJA**	**764.747.135.434,00**	**787.689.549.497,02**	**811.320.235.981,93**	**3,00**
5.1	**Belanja Operasi**	**597.178.338.732,00**	**615.093.688.893,96**	**633.546.499.560,78**	**3,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	361.849.943.379,00	372.705.441.680,37	383.886.604.930,78	3,00

No.	Uraian	APBD	Proyeksi		Rata-rata Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.185.649.353,00	192.591.218.833,59	191.158.955.398,60	4,94
5.1.05	Belanja Hibah	52.973.746.000,00	47.562.958.380,00	56.199.847.131,40	(3,61)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.169.000.000,00	2.234.070.000,00	2.301.092.100,00	3,00
5.2	**Belanja Modal**	**164.138.796.702,00**	**169.062.960.603,06**	**174.134.849.421,15**	**3,00**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.030.000.000,00	3.120.900.000,00	3.214.527.000,00	3,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.518.661.648,00	33.494.221.497,44	34.499.048.142,36	3,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.609.005.654,00	74.787.275.823,62	77.030.894.098,33	3,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.962.829.400,00	57.641.714.282,00	59.370.965.710,46	3,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.300.000,00	18.849.000,00	19.414.470,00	3,00
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**3.430.000.000,00**	**3.532.900.000,00**	**3.638.887.000,00**	**3,00**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.430.000.000,00	3.532.900.000,00	3.638.887.000,00	**3,00**
	Surplus/(Defisit)	**(13.500.000.000,00)**	**(12.693.923.871,03)**	**(11.759.018.490,45)**	**(6,67)**
6	**PEMBIAYAAN**	**13.500.000.000,00**	**12.693.923.871,03**	**11.759.018.490,45**	**(6,67)**
6.1	Penerimaan Pembiayaan	**16.000.000.000,00**	**15.193.923.871,03**	**14.259.018.490,45**	**(5,60)**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	16.000.000.000,00	15.187.923.871,03	14.252.418.490,45	(5,62)
	Pengembalian Dana Bergulir	0,00	6.000.000,00	6.600.000,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**0,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	0,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Sumber: Sumber: Tim Penyusun RPJMD (Hasil Proyeksi masih sangat sementara)

3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan keuangan daerah meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kerangka pendanaan keuangan daerah dikelola dengan menganut azas-azas: tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Kemampuan kerangka pendanaan keuangan daerah dapat dilihat dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. Keuangan daerah dalam APBD Pemerintah Kota Bima yang dipergunakan untuk membiayai program/kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kota Bima dari tahun ke tahun terus meningkat. Peningkatan ini menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pembangunan.

1) Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)

Proyeksi SILPA dilakukan berdasarkan pertumbuhan realisasi besaran SiLPA periode tahun 2018-2019. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang proses perencanaan, penganggaran, sistem pengendalian dan evaluasi dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga penggunaan anggaran semakin efektif serta sesuai dengan perencanaan.

Tabel 3.12.
Proyeksi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) Tahun 2018-2023

Uraian	APBD				Proyeksi	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun sebelumnya (SiLPA)	200.447.971.628,52	115.573.573.658,39	93.241.433.641,71	16.000.000.000,00	15.187.923.871,03	14.252.418.490,45

Sumber : Hasil proyeksi Tim Penyusun RPJMD

2) Proyeksi Kebutuhan Pengeluaran Wajib dan Mengikat

Belanja pengeluaran wajib dan mengikat proyeksi tahun 2018 sampai dengan 2019 menggunakan data realisasi APBD dan tahun 2020 menggunakan data APBD serta tahun 2022-2023 menggunakan proyeksi yang bersumber dari APBD tahun 2021. Berdasarkan data tersebut nilai dan tingkat pertumbuhan belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 mengalami penurunan. Lebih rinci mengenai proyeksi tersebut ditunjukkan melalui tabel di bawah.

Tabel 3.13.
Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
Tahun 2018-2020

No	Uraian	Realisasi		Proyeksi
		2018	2019	2020
A	**Belanja Tidak Langsung**	**308.598.119.760,00**	**317.766.291.219,94**	**305.097.296.669,29**
1	Belanja Gaji dan Tunjangan	288.151.919.669,00	294.360.999.655,00	285.526.694.336,00
2	Tambahan Penghasilan PNS	16.931.412.790,00	19.421.385.085,00	16.680.888.000,00
3	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	499.999.999,00	639.029.006,94	499.999.999,64
4	Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	101.546.050,00	158.823.848,00	99.714.733,65
5	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD	2.090.829.600,00	2.373.999.600,00	2.289.999.600,00
6	Belanja BantuanKeuangan Kepada Partai Politik	822.411.652,00	812.054.025,00	0,00
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**
1	Penyertaan Modal Daerah	0,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00
Total Belanja Wajib dan pengeluaran yang wajib mengiikat (A+B)		**308.598.119.760,00**	**318.266.291.219,94**	**306.097.296.669,29**

Sumber: Hasil proyeksi

Proyeksi belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat Pemerintah Kota Bima Tahun 2021-2023 sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.14.
Realisasi dan Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang Wajib dan Mengikat
Tahun 2021-2023

No	Uraian	APBD	Proyeksi	
		2021	2022	2023
A	**Belanja Mengikat**	**361.849.943.379,00**	**372.705.441.680,37**	**383.886.604.930,78**
1	Belanja Pegawai	361.849.943.379,00	372.705.441.680,37	383.886.604.930,78
B	**Belanja Wajib**	**258.048.784.120,00**	**265.790.247.643,60**	**273.763.955.072,91**
1	Pendidikan	47.244.742.559,00	48.662.084.835,77	50.121.947.380,84
2	Kesehatan	111.452.502.103,00	114.796.077.166,09	118.239.959.481,07
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	64.085.774.222,00	66.008.347.448,66	67.988.597.872,12

No	Uraian	APBD	Proyeksi	
		2021	2022	2023
4	Perumahan dan Kawasan Permukiman	10.560.991.856,00	10.877.821.611,68	11.204.156.260,03
5	Polisi Pamong Praja	10.170.924.529,00	10.476.052.264,87	10.790.333.832,82
6	Penanggulangan Bencana Daerah	4.945.971.664,00	5.094.350.813,92	5.247.181.338,34
7	Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	4.021.211.020,00	4.141.847.350,60	4.266.102.771,12
8	Sosial	5.566.666.167,00	5.733.666.152,01	5.905.676.136,57
B	**Pengeluaran Pembiayaan**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**
1	Penyertaan Modal	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Total Belanja Wajib dan Mengingkat (A+B+C)		**622.398.727.499,00**	**640.995.689.323,97**	**660.150.560.003,69**

Sumber: Hasil proyeksi

3) Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan perhitungan proyeksi pendapatan dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) serta belanja tidak langsung dapat diproyeksikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Tahun 2018-2023 untuk mendanai pembangunan Pemerintah Kota Bima.

Adapun proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2020 disajikan pada Tabel 3.15.

Tabel 3.15.
Realisasi dan Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2018-2020

No.	Uraian	Realisasi APBD		APBD
		2018	2019	2020
1	Pendapatan	768.070.688.024,82	774.410.991.653,59	736.298.044.130,13
2	Penerimaan Dana Bergulir	0,00	0,00	5.000.000,00
3	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	0,00	0,00	0,00
4	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	200.447.971.628,52	115.573.573.658,39	93.241.433.641,71
	Total penerimaan	968.518.659.653,34	889.984.565.311,98	829.544.477.771,84
	Dikurangi:			
5	Belanja Tidak Langsung	398.903.884.426,00	379.314.041.749,94	401.844.478.289,78
6	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	500.000.000,00	1.000.000.000,00

No.	Uraian	Realisasi APBD		APBD
		2018	2019	2020
Kapasitas riil kemampuan keuangan		569.614.775.227,34	510.170.523.562,04	426.699.999.482,06

Sumber : Hasil proyeksi

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, menyebabkan pengertian belanja tidak langsung dan belanja langsung tidak digunakan lagi dan diganti dengan a. belanja operasi; b. Belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. Hal ini menyebabkan konsep kapasitas riil keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tidak sesuai lagi digunakan dengan adanya perubahan Belanja Daerah. Dengan kondisi tersebut maka proyeksi belanja tahun 2021 sampai dengan 2023 disusun sesuai konsep dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.

Berdasarkan hasil proyeksi, terlihat bahwa pada tahun 2021 belanja daerah lebih rendah dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Adapun proyeksi kapasitas keuangan daerah Pemerintah Kota Bima untuk Tahun 2021-2023 disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.16.
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2023

No	Uraian	APBD	Proyeksi	
		2021	2022	2023
5	**BELANJA**	**764.747.135.434,00**	**787.689.549.497,02**	**811.320.235.981,93**
5.1	**Belanja Operasi**	**597.178.338.732,00**	**615.093.688.893,96**	**633.546.499.560,78**
5.1.1	Belanja Pegawai	361.849.943.379,00	372.705.441.680,37	383.886.604.930,78
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	180.185.649.353,00	185.591.218.833,59	191.158.955.398,60
5.1.5	Belanja Hibah	52.973.746.000,00	54.562.958.380,00	56.199.847.131,40
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	2.169.000.000,00	2.234.070.000,00	2.301.092.100,00
5.2	**Belanja Modal**	**164.138.796.702,00**	**169.062.960.603,06**	**174.134.849.421,15**
5.2.1	Belanja Modal Tanah	3.030.000.000,00	3.120.900.000,00	3.214.527.000,00

No	Uraian	APBD	Proyeksi	
		2021	2022	2023
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.518.661.648,00	33.494.221.497,44	34.499.048.142,36
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.609.005.654,00	74.787.275.823,62	77.030.894.098,33
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.962.829.400,00	57.641.714.282,00	59.370.965.710,46
5.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.300.000,00	18.849.000,00	19.414.470,00
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**3.430.000.000,00**	**3.532.900.000,00**	**3.638.887.000,00**
5.3.1	Belanja Tak Terduga	3.430.000.000,00	3.532.900.000,00	3.638.887.000,00
6	**PEMBIAYAAN**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00
Total		**767.247.135.434,00**	**790.189.549.497,02**	**813.820.235.981,93**

Sumber : Hasil proyeksi

4) Kebijakan Alokasi Anggaran

Kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Mengingat keterbatasan anggaran, maka pengalokasiannya berdasarkan skala prioritas (money follow program) dan kebutuhan. Rencana penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah ditunjukkan pada Tabel 3.17.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dikelompokkan menjadi 2 (dua) skala prioritas sebagai berikut:

a. **Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
b. **Prioritas II,** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah pilihan serta pemerintahan lainnya.

Tabel 3.17.
Realisasi dan Rencana Penggunaan
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2018-2020

Uraian	Realisasi APBD		APBD
	2018	2019	2020
Kapasitas riil kemampuan keuangan	569.614.775.227,34	510.170.523.562,04	426.699.999.482,06
Prioritas I	304.123.924.261,45	269.394.718.379,05	290.666.468.684,06
Prioritas II	265.490.850.965,89	240.775.805.182,99	136.033.530.798,00

Sumber : Hasil Analisis

Rencana pengunaan kapasitas keuangan tetap akan dialokasikan kedalam 2 (dua) skala prioritas dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, sehingga pernyataan prioritas masih sama dengan tahun 2019 dan 2020, tetapi pengertian/lingkup belanja wajib dan mengikat pada prioritas I dan belanja pada prioritas II berbeda untuk Tahun 2021 sampai dengan 2023.

Alokasi kapasitas keuangan daerah Pemerintah Kota Bima untuk mendanai pembangunan Tahun 2021-2023, sebagai berikut:

a. **Prioritas I,** dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat.
b. **Prioritas II,** dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah dan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah pilihan serta pemerintahan lainnya.

Lebih rinci mengenai alokasi masing-masing prioritas disajikan pada tabel di bawah.

Tabel 3.18.
Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Tahun 2021-2023

Uraian	APBD	Proyeksi	
	2021	2022	2023
Kapasitas riil kemampuan keuangan	767.247.135.434,00	790.189.549.497,02	813.820.235.981,93

Uraian	APBD	Proyeksi	
	2021	2022	2023
Prioritas I	506.156.440.989,00	521.353.628.118,67	536.994.236.962,23
Prioritas II	261.090.694.445,00	268.835.921.378,35	276.825.999.019,70

Sumber : Hasil proyeksi

BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara pencapaian kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Permasalahan pembangunan dapat diperoleh dari hasil pencapaian target-target pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan baik jangka pendek, menengah dan panjang. Permasalahan ini dapat diperoleh dari hasil evaluasi RPJMD periode yang lalu, dan laporan tahunan yang dibuat seperti LKPJ Walikota baik tahunan maupun akhir masa jabatan.

Selain pencapaian target pembangunan, permasalahan dapat diperoleh melalui penelaahan kondisi lingkungan strategis baik regional, nasional maupun internasional yang mungkin akan mempengaruhi rencana pembangunan Kota Bima pada lima tahun yang akan datang.

Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kinerja daerah atau kondisi masyarakat yang belum ideal. Isu strategis merupakan tantangan atau peluang yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi masyarakat di masa mendatang. Suatu analisis isu-isu strategis menghasilkan rumusan kebijakan yang bersifat antisipatif dan solutif atas berbagai kondisi yang tidak ideal di masa depan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka menengah. Pemahaman permasalahan pembangunan dan isu-isu yang relevan menjadi sangat penting dan sebagai acuan dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah Kota Bima. Dengan demikian, rumusan tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan bagian penting dalam penentuan kebijakan pembangunan jangka menengah Kota Bima.

Permasalahan pembangunan pada masing-masing urusan di Kota Bima dan keterkaitannya dengan permasalahan pembangunan nasional dan Provinsi Nusa Tenggara Barat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 4.1

Permasalahan pembangunan pada masing-masing urusan di Kota Bima

No	Urusan	Permasalahan	
1	Pendidikan	1	Rata-rata lama sekolah belum memenuhi standar wajib belajar 12 tahun karena baru sampai angka 10,14 tahun dari target 12 tahun
		2	Angka partisipasi PAUD masih rendah yaitu baru mencapai 54,7% dan angka partisipasi SMP/MTs baru mencapai 98,04%
2	Kesehatan	1	Angka Kematian Bayi masih sangat yaitu mencapai angka 28 kasus pada tahun 2019. Demikian pula angka kematian ibu, pada tahun 2019sebanyak 183 per 100.000 kelahiran hidup.
		2	Gizi buruk masih menjadi kasus di Kota Bima dengan angka gizi buruk 0,078%
		3	Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan baru mencapai 92,90%
	PUPR	1	Jalan dalam kondisi baik baru mencapai angka 69,08%. Masih terdapat jalan yang dalam kondisi sedang, rusak dan rusak berat sepanjang 140 km.
		2	Rasio jaringan irigasi teknis masih minim yaitu baru mencapai 0,71%
		3	Rumah tangga bersanitasi baik baru mencapai angka 91,41%, belum mencapai target 100%.
		4	Persentase penduduk berakses air minum masih pada angka 94,89 %
	Perumahan Rakyat dan Kawasan	1	Luas permukiman kumuh 7,23%

No	Urusan	Permasalahan	
	permukiman		
		2	Masih ada masyarakat yang belum memiliki rumah
		3	Luas kawasan kumuh masih cukup luas
		4	Penanganan rumah korban bencana banjir belum selesai
	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	1	Cakupan wilayah potensi konflik masih cukup tinggi yaitu mencapai 20%
		2	Angka kriminalitas cenderung meningkat terutama penyalahgunaan Narkoba
		3	Pembinaan terhadap LSM dan Ormas masih cukup rendah yitu baru mencapai 35%
	Sosial	1	Masih banyak PMKS yang belum tertangani
	Tenaga Kerja		Angka pengangguran terbuka masih tinggi yaitu 4,18%
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1	Menurunnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan, dimana pada tahun 2018 sebesar 69,99% menurun menjadi 37,31% pada tahun 2019
			Ksadaran untuk melaporkan kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga masih rendah yaitu baru mencapai angka 0,72%
	Pangan	1	Skor pola pangan harapan belum optimal, dengan capaian pada tahun 2019 (94) lebih rendah daripada tahun 2018 (95,30)
	Lingkungan Hidup	1	Luas RTH Publik kurang dari 15%, Ketersediaan pemakaman umum terbatas
		2	Menurunnya kualitas dan kuantitas air, Terjadi kerusakan lahan dan mata air

No	Urusan	Permasalahan	
		3	Penanganan sampah masih 490%, Lahan untuk TPS/kontainer belum tersedia, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal
		4	terjadi pencemaran tanah, terjadi polusi udara
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1	Jumlah penduduk ber KTP elektronik baru mencapai angka 99,14%
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1	Cakupan peserta KB aktif mengalami penurunan dari 99,59% pada tahun 2018 menjadi 90,30% pada tahun 2019. Pengembangan dan advokasi KIE belum optimal
	Perhubungan	1	Persentase ketersediaan fasilitas dan prasarana LLAJ belum optimal yaitu barfu mencapai 64%
		4	Pelayanan Parkir dan terminal belum optimal
	Komunikasi, Informatika dan statistik	1	Indeks penyelenggaraan pemerintahan berbasisi elektronik masih harus ditingkatkan
		2	Implementasi Kota Bima satu data belum terbangun secara optimal
	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	Banyak koperasi yang tidak aktif dan tidak sehat yang ditunjukan dengan angka koperasi aktif hanya berjumlah 94 koperasi pada tahun 2019
		2	UMKM sejumlah 8654 unit belum sepenuhnya ditingkatkan kapasitasnya
	Penanaman Modal	1	Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan dan penanaman modal masih perlu ditingkatkan dari angka 80,90 pada tahun 2019
		2	Nilai investasi PMDN maupun PMDA masih minim
	Kepemudaan dan Olahraga	1	Minimnya organisasi pemuda yang aktif dan prestasi olah raga

No	Urusan	Permasalahan	
		2	Kurangnya kompetisi olah raga
	Kebudayaan	1	Sanggar seni dan budaya aktif masih sangat minim
		2	Data base pranata adat dan adat budaya belum terbangun dengan baik
	Perpustakaan	1	Angka kunjungan ke perpustakaan masih minim
		2	Belum ada gedung perpustakaan daerah
	Kearsipan	1	Belum tertibnya penataan kearsipan
	Kelautan dan Perikanan	1	Keterbatasan peralatan tangkap
		2	Pengembangan perikatan darat masih kurang
		3	Daya saing produk olahan masih rendah
	Pariwisata	1	Pengembangan destinasi wisata masih kurang, Sarana dan prasarana belum memadai
		2	Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
		3	Promosi kepariwisataan masih kurang,
	Pertanian	1	Alih fungsi lahan pertanian produktif
		2	Daya saing produk olahan masih rendah
		3	Belum fokusnya program ternak sapi sebagai produk unggulan daerah
		4	Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal
	Perdagangan	1	Pengembangan produk unggulan lokal belum optimal
		2	Pengelolaan Pasar belum optimal
	Perindustrian	1	Pengembangan Industri Kecil belum memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan
		2	Pengembangan produk unggulan industri lokal belum optimal
	Administrasi Pemerintahan	1	Indeks SAKIP dan LKIP masih rendah
	Perencanaan	1	Proses perencanaan pembangunan belum menintegrasikan

No	Urusan	Permasalahan	
			peta peta proses bisnis sebagai dasar membangun cascading kinerja
		2	Integrasi program lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan belum terlaksana dengan baik
		3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD belum optimal
		4	Masih terjadi pelanggaran terhadap RTRW
	Keuangan	1	Capaian realisasi PAD belum mampu mencapai target
		2	Penetapan target PAD belum sesuai potensi
		3	Pengelolaan Aset Daerah belum optimal
		4	Proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan belum optimal
		5	Pelatihan dan sosialisasi tentang sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih kurang
	Pengawasan	1	Belum optimalnya peningkatan kapasitas APIP
		2	Maturitas SPIP masih dalam tingkat berkembang
		3	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan
		4	Masih adanya temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 4.2

Keterkaitan Permasalahan dan Isu Strategis Daerah Nasional, Provinsi NTB dan Kota Bima

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
	Urusan Wajib						
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
	Urusan Wajib Bidang Pendidikan						
		1	Akses dan kualitas layanan pendidikan yang belum merata	1	Angka drop out jenjang pendidikan menengah masih tinggi, pada tahun 2016/2017 angka drop out SD Sederajat 0,15%, SMP Sederajat 0,24%, dan SMA 0,66%, SMK 1,36%. Sedangkan pada tahun 2018/2019, angka drop out dapat terus ditekan sehingga menjadi untuk SD Sederajat 0,09%, SMP Sederajat 0,15%, dan SMA 0,37%, SMK 0,65%	1	Angka *drop out* atau persentase putus sekolah mengalami peningkatan, dimana pada capaian tahun 2017 angka putus sekolah pada tingkat SD/MI/Paket A adalah 0,01% dan tingkat SMP/MTs/Paket B adalah 0,03%. Sementara pada capaian tahun 2018 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI mencapai 0,05% dan Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs sebesar 0,11%
				2	Partisipasi Pendidikan jenjang menengah atas masih rendah (Data BPS Tahun 2016/2017 APM 83,35% (masih tersisa sekitar 40 ribu anak usia 15-17 tahun yang tidak menempuh pendidikan menengah) dan APK 93,89%). Khusus untuk Sekolah Luar Biasa APK-nya baru mencapai 67,72%. Adapun pada tahun 2018/2019 telah berhasil ditingkat menjadi	2	Terdapat kelompok umur diluar usia sekolah masih dan/atau telah bersekolah

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
					88,22% dan APK sebesar 98,55%		
				3	Tidak meratanya penempatan guru antar daerah. Meskipun secara keseluruhan angka rasio murid-guru sudah memenuhi standar nasional, namun pada beberapa kabupaten masih menunjukan kondisi yang di bawah standar. Misalnya di Kabupaten Lombok Utara, rasio murid-guru SMP 1:36 dan pada jenjang SMA 1:29	3	Rasio jumlah murid terhadap guru pada Sekolah Negeri mengalami peningkatan, dimana pada tahun 2018 sebesar 6,95% meningkat menjadi 7,54% pada tahun 2019
				4	Persentase buta huruf pada penduduk usia 45+ masih cukup tinggi (di atas 30%), pendidikan masyarakat belum berjalan dengan optimal		
				5	Masih ada sekolah yang mendapat akreditasi C dan bahkan masih ada yang belum terakreditasi. Pada jenjang SMK, 11% sekolah masih terakreditasi C dan 64,8% belum terakreditasi. Pada jenjang SMA, 12,30% terakreditasi C dan 19,50% belum terakreditasi. Pada pendidikan non formal, lembaga PAUD baru terakreditasi 8,24% sedangkan sisanya belum terakreditasi. LKP baru terakreditasi 10,97% dan PKBM sebanyak 11,30%		
				6	Hasil UN 2017 masih relatif rendah yaitu 47,75 dan di bawah rata-rata nasional sebesar 53,75		
				7	Uji kompetensi guru (UKG) pada jenjang SMA dan SMK masih rendah dan di bawah nilai nasional SMA sebesar 56,30 (nasional 61,47)		

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
					dan SMK sebesar 54,96 (nasional 58,30)		
				8	Masih ada guru dengan kualifikasi <D4/S1 yaitu 2,3% pada SMA dan 5,7% pada jenjang SMK		
				9	Pendidikan belum berhasil menghasilkan SDM siap kerja (pendidikan vokasi), hal ini terlihat dari banyaknya pengangguran yang berpendidikan SMA/SMK. Pengangguran dari SMA sebesar 6,43% dan dari SMK sebesar 9,67%		
				10	Pandemi Covid-19 telah berdampak pada terganggunya proses pembelajaran dari sekolah/madrasah menjadi dirumah melalui media pembelajaran daring, namun tidak efektivitas pelaksanaan akibat: (a) penguasaan teknologi yang masih rendah; (b) kepemilikan perangkat teknologi yang terbatas; (c) Tidak semua sekolah sudah terkoneksi jaringan internet; (d) Biaya menjadi mahal untuk menyediakan kuota untuk kebutuhan internet		
	Urusan Wajib Bidang Kesehatan						

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
		1	Akses dan kualitas layanan kesehatan dan gizi masyarakat yang masih belum merata	1	Kesehatan ibu dan anak belum optimal, hal ini ditandai dengan: (1) masih adanya kematian bayi dan ibu melahirkan, Kasus kematian bayi pada tahun 2017 terjadi sebanyak 929 kasus dengan proporsi 9,0 per 1.000 kelahiran hidup, jumlah tersebut menurun menjadi 866 kasus pada tahun 2018 dengan proporsi 7,91 per 1.000 kelahiran hidup, kemudian pada tahun 2019 kasus kematian bayi terus mengalami penurunan menjadi 863 kasus, dengan proporsi 7,7 per 1.000 kelahiran hidup dan AKI sebesar 82 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2017 dan cenderung meningkat menjadi 93,92 pada tahun 2019; (2) masih adanya kelahiran ditolong non tenaga kesehatan, pada tahun 2019 masih sekitar 4,60%. Terganggunya pelaksanaan pelayanan kesehatan rutin ibu dan anak serta menurunya ketersediaan pangan akibat pandemi akan berdampak pada peningkatan kematian ibu dan anak yang signifikan	1	Angka Kematian Bayi mengalami peningkatan, pada tahun 2018 sebanyak 24 kasus meningkat menjadi 28 kasus pada tahun 2019. Demikian pula angka kematian ibu, pada tahun 2018 sebanyak 148 kasus per 100.000 kelahiran, meningkat menjadi 183 kasus pada tahun 2019.
				2	Prevalensi Kurang Gizi di Provinsi NTB masih cukup tinggi, meskipun menunjukkan trend yang cenderung menurun, terutama pada tahun 2019 menurun dari 33,49% tahun 2018 menjadi 26,41%. Pandemi COVID-19 ini juga berdampak pada meningkatnya masalah gizi kurang pada anak (wasting), akibat dari dampak ekonomi yang meluas, dimana angka kemiskinan meningkat sehingga ketersediaan	2	Asupan gizi kurang

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
					pangan dan akses terhadap makanan yang bergizi berkurang		
				3	Belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, ditandai dengan: (1) Success Rate/Angka Keberhasilan Pengobatan tuberkulosis semua tipe 61,48% nasional 77,57%; (2) pada penyakit DBD dengue incidence rate per 100.000 penduduk sebesar 26,86 di atas angka nasional 22,55% dan Case Fatality Rate 0,15%; (3) angka morbiditas 2016 sebesar 20,81% masih di atas nilai nasional (15,18%); (4) persentase merokok pada penduduk ≥ 15 tahun pada tahun 2017 sebesar 30,88% di atas nilai nasional 28,97%. Penyakit Kardiovaskular menjadi satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, selain itu orang dengan komorbiditas Penyakit Tidak Menular (PTM) beresiko tinggi mengalami sakit yang lebih parah akibat terinfeksi COVID-19, sehingga orang dengan PTM harus tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkelanjutan di tengah keterbatasan pelayanan kesehatan saat pandemi ini	3	Angka TB masih cukup tinggi (berdasarkan capaian indikator pembangunan berkelanjutan). Seharusnya Kota Bima sudah bebas malaria, namun sampai dengan tahun 2019 masih terdata penderita penyakit malaria. Penyandang HIV terus mengalami peningkatan.
				4	Akses dan mutu pelayanan kesehatan belum optimal yang ditandai dengan beberapa permasalahan: (1) Persentase puskesmas yang terakreditasi masih 55%; (2) Persentase rumah sakit terakreditasi baru 65,63%; (3)	4	Belum ada rumah sakit berstandar. Penurunan cukup signifikan terjadi pada angka ketersediaan dokter, dimana pada tahun 2018 terdapat 88 orang tenaga dokter yang bertugas di

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
					Masih cukup rendahnya Posyandu yang aktif yaitu 51,11% pada tahun 2017 dan meningkat menjadi 61.4% tahun 2019		Kota Bima sementara pada tahun 2019 berkurang menjadi 55 orang.
				5	Sistem Jaminan Sosial belum seluruhnya dinikmati oleh seluruh penduduk Provinsi NTB (71,42% pada tahun 2017 dan tahun 2019 menjadi 86,47%)	5	Masyarakat miskin belum seluruhnya memiliki kartu BPJS kesehatan
				6	Mutu dan penyebaran tenaga kesehatan belum merata, permasalahan diantaranya: (1) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter dengan status kurang sebesar 35,44%; (2) persentase Puskesmas dengan kecukupan dokter gigi dengan status kurang sebesar 40,51%; (3) persentase Puskesmas memiliki 5 jenis tenaga kesehatan promotif preventif 50,63% pada tahun 2017 menjadi 63,9% tahun 2019; (4) Jumlah tenaga kesehatan belum optimal, terutama di daerah terpencil	6	Masyarakat belum sepenuhnya mau diimunisasi
				7	Penduduk dengan akses terhadap sanitasi yang layak (jamban sehat) hingga tahun 2019 baru mencapai 88,6%, Sarana air minum memenuhi syarat baru mencapai 39,3%		
	Urusan Wajib Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang						

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
		1	Tata kelola layanan dasar yang belum terlaksana sesuai standar	1	Belum optimalnya layanan infrastruktur jaringan jalan, ketimpangan layanan infrastruktur dan utilitas antar wilayah pulau	1	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik belum mencapai 100%, Masih terdapat jalan yang dalam kondisi sedang dan rusak, Belum semua jalan memiliki drainase dan trotoar
		2	Rendahnya aksesibilitas masyarakat di desa, kawasan perdesaan, daerah tertinggal, kawasan perbatasan, dan kawasan transmigrasi terhadap pelayanan dasar, prasarana dan sarana dasar, dan pusat kegiatan ekonomi	2	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang di daerah	2	Banyak bangunan belum memiliki IMB, Luas RTH/RTP Masih belum memenuhi 20%, Terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan, Banyak bangunan rumah pada melewati garis sempadan sungai
		3	Penurunan kuantitas, kualitas, dan aksesibilitas air untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, pertanian, dan industri	3	Belum optimalnya sinergitas rencana tata ruang dan rencana pembangunan sektoral	3	Kesenjangan pembangunan infrastruktur pada wilayah timur dan barat
		4	Peraturan perundangan yang diamanatkan UU Nomor 26 Tahun	4	Penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang belum optimal	4	Banyak saluran drainase yang tersumbat, Luas daerah genangan masih tinggi

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
			2007 tentang Penataan Ruang belum seluruhnya ditetapkan				
		5	Masih terbatasnya ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Peraturan Zonasi (PZ) sebagai acuan pemanfaatan dan pengendalian penataan ruang	5	Belum optimalnya pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil	5	Belum semua rumah tangga bersanitasi baik
		6	Kualitas SDM di bidang penataan ruang di pusat dan daerah masih perlu ditingkatkan	6	Meningkatnya permintaan fungsi ruang seiring meningkatnya permintaan investasi di daerah yg mengakibatkan perlunya penyesuaian fungsi ruang dalam RTRW Provinsi		
		7	Penataan ruang belum menjadi acuan pembangunan sektor				
		8	Kelembagaan penataan ruang belum optimal baik di pusat maupun di daerah				

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
	Urusan Wajib Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman						
		1	Akses rumah tangga terhadap perumahan dan pemukiman layak yang belum merata	1	Rendahnya kualitas keselamatan bangunan	1	Masih terdapat rumah tidak layak huni dalam jumlah yang banyak
				2	Kurangnya luas lantai per kapita	2	Masih ada masyarakat yang belum memiliki rumah
				3	Kurangnya penyediaan sanitasi dan pengolahan limbah rumah tangga dikawasan perumahan	3	Luas kawasan kumuh masih cukup luas
				4	Rendahnya keterjangkauan perumahan untuk MBR	4	Penanganan rumah korban bencana banjir belum selesai
	Urusan Wajib Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat						
		1	Kurangnya kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat terhadap bencana	1	Aspek hak-hak politik masih di bawah nasional, 62,08 (nasional 70,11)	1	LSM dan Ormas yang terdaftar sedikit tapi yang beraktifitas politik cukup banyak

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
		2	Tingginya angka kejahatan siber, narkoba, dan konvensional	2	Adanya angka kejahatan atau kriminalitas yang masih tinggi meskipun sudah berhasil diturunkan dari 17.25 (2018) menjadi 12,71 sampai dengan tahun 2019	2	Angka kriminalitas cenderung meningkat terutama penyalahgunaan Narkoba
		3	kerawanan pelaksanaan Pemilu dan netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN)	3	Meningkatnya gangguan tibumtranmas dan pelanggaran peraturan daerah (2017 terjadi 32 kasus pelanggaran, terhadap 14 Perda dan pada tahun 2019 menjadi 18 kasus pelanggaran terhadap 5 Perda dan 2 Pergub)	3	Penegakan Perda belum berjalan optimal
		4	belum optimalnya penegakan hukum dan pelaksanaan reformasi birokrasi	4	NTB masuk dalam kawasan rawan bencana	4	ketangguhan wilayah terhadap risiko bencana belum optimal, Lambatnya pelayanan bencana kebakaran
				5	Beberapa daerah rawan konflik sosial (2017 terjadi 21 kasus konflik sosial) dan kondisi terakhir berhasil diturunkan menjadi 7 kasus pada tahun 2019		
				6	Peranan Bale Mediasi sebagai mediator sengketa hukum belum optimal		
				7	Aspek kebebasan sipil masih di bawah nasional yaitu sebesar 65,06 (nasional sebesar 76,45)		
	Urusan Wajib Bidang Sosial						
		1	Penurunan kemiskinan yang melambat	1	Program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan belum terpadu	1	Jaminan sosial masih terbatas, pelayanan dan perlindungan sosial pada saat bencana masih kurang

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
				2	Penanganan PMKS (kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, korban bencana, konfilik sosial, komunitas adat terpencil) masih belum optimal (Cakupan penanganan MKS pada 2017 sebesar 5,07%, dari 658.398 jiwa,244 yang diberikan penanganan 33.412 jiwa), sedangkan tahun 2019 mencapai 1,90%)	2	Belum seluruh PMKS tertangani
				3	Belum terpenuhinya hak dasar penyandang disabilitas		
				4	Beberapa prasarana dasar belum optimal diberikan (akses air minum layak 73,98%, sanitasi layak 69,76%, masih ada rumah tangga yang tidak memiliki jamban, rumah tidak layak huni masih ditemui)		
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
	Urusan Wajib Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						
				1	IDG Provinsi NTB tahun 2017 baru mencapai angka 59,95 tertinggal dari IDG Nasional sebesar 71,74 dan tahun 2018 meningkat menjadi 60,19, sedangkan IPG meningkat dari 90,36 tahun 2017 menjadi 90,40 tahun 2019	1	kurangnya usaha pemberdayaan ekonomi, sosial, dan politik bagi perempuan/ibu rumah tangga

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
				2	Masih adanya kasus kekerasan pada perempuan dan anak, dimana 50% perempuan mendapatkan kekerasan secara fisik dan dilihat dari tempat mayoritas dilakukan di lingkungan rumah tangga	2	Layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu masih terbatas, Tidak semua korban kekerasan melaporkan ke APH
				3	Keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas yaitu 9,38%	3	Menurunnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintahan, dimana pada tahun 2018 sebesar 69,99% menurun menjadi 37,31% pada tahun 2019
				4	Perempuan sebagai tenaga profesional relatif rendah yaitu 44,10%		
				5	Relatif rendahnya sumbangan pendapatan perempuan yaitu 32,69%		
				6	Rendahnya TPAK perempuan (BPS, Agustus 2017 TPAK Laki-laki 82,11%, TPAK Perempuan 56,18% dan pada tahun 2019 menjadi TPAK Lakilaki 82,10%, TPAK Perempuan 56,46%)		
	Urusan Wajib Bidang Pangan						
		1	Semakin tingginya tantangan produksi bahan pangan dalam negeri, penyediaan cadangan pangan	1	Masih adanya desa dengan kategori rentan dan rawan pangan	1	Skor pola pangan harapan belum optimal, dengan capaian pada tahun 2019 lebih rendah daripada tahun 2018

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
			pemerintah, serta peningkatan dan fluktuasi harga pangan				
				2	Tingginya tuntutan pasar global dan internasional dalam penerapan standar mutu dan keamanan pangan segar		
				3	Belum terpetakannya ketersediaan pangan, bahkan ada kecenderungan menurunnya ketersediaan pangan dan konsumsi pangan yg berimbang dan bergizi akibat pandemi Covid-19 menyebabkan kesulitan ekonomi masyarakat		
				4	Proporsi Penduduk Dengan Asupan Kalori Minimum Di Bawah 1400 Kkal/Kapita/Hari pada tahun 2017 sebesar 5,60% masih di bawah nilai nasional sebesar 7,90%		
	Urusan Wajib Bidang Lingkungan Hidup						
			Tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup masih tinggi dan banyaknya kasus-kasus lingkungan hidup	1	Adanya peningkatan lahan kritis	1	Luas RTH Publik kurang dari 15%, Ketersediaan pemakaman umum terbatas
		1	Dinamika lingkungan yang	2	Rendahnya kualitas air yang tercermin dari indeks kualitas air sebesar 22,75 poin jauh di	2	Menurunnya kualitas dan kuantitas air, Terjadi kerusakan lahan dan mata air

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
			dapat mengganggu kedaulatan bangsa dan negara		bawah nasional 60,38 poin		
				3	Pengelolaan persampahan belum optimal.	3	Penanganan sampah masih 40%, Lahan untuk TPS/kontainer belum tersedia, Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah belum optimal
						4	terjadi pencemaran tanah, terjadi polusi udara
	Urusan Wajib Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil						
				1	Belum semua wajib KTP ber-KTP. Dari total wajib KTP 3.704.007 orang, yang telah melalukan perekaman e-KTP sebanyak 3.666.347 (98.98%)	1	Kesadaran masyarakat untuk mengurus administrasi kependudukan masih rendah
				2	Persentase yang tidak memiliki akte kelahiran sebesar 41,11% (0-4 tahun) dan 24,72% (0-17 tahun)		
	Urusan Wajib Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana						
				1	Persentase peserta KB aktif baru mencapai 88%	1	Cakupan peserta KB aktif mengalami penurunan dari 99,59% pada tahun

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
							2018 menjadi 90,30% pada tahun 2019. Pengembangan dan advokasi KIE belum optimal
				2	Angka pernikahan usia anak masih tinggi (Rata-rata usia kawin pertama perempuan 20,27 tahun)	2	Tingkat pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi belum merata
				3	Total Fertility Rate (TFR) masih di atas 2 persen (2,56%		
	Urusan Wajib Bidang Perhubungan						
		1	belum meratanya jaringan transportasi, jaringan logistik, dan konektivitas nasional dalam menunjang sektor unggulan	1	Jumlah kecelakaan lalu lintas di jalan raya pada periode 2015-2017 mengalami penurunan sebesar 43,75 persen, namun pada periode 2017-2019 cenderung naik sebesar 23,92 persen dari 1.463 kasus menjadi 1.813 kasus	1	Terdapat angkutan umum yang tidak melakukan uji kir
		2	Tingginya biaya logistik dan harga komoditas di daerah-daerah yang memiliki keterbatasan aksesibilitas terutama di wilayah Papua dan Papua Barat	2	Meningkatnya jumlah korban baik meninggal maupun luka berat dan ringan	2	Jaringan jalan yang dilengkapi oleh rambu-rambu lalu lintas masih terbatas, Pengawasan dan pengendalian kendaraan umum masih rendah

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
				3	Konektivitas antar moda transportasi masal yang menghubungkan destinasi wisata darat dan pulau-pulau kecil belum terbangun	3	Pengelolaan transportasi laut belum optimal
				4	Frekuensi penerbangan dan maskapai penerbangan dari negara potensial asal wisatawan masih kurang dan bahkan ditutup akibat lamanya pandemic covid-19	4	Pelayanan Parkir dan terminal belum optimal
	Urusan Wajib Bidang Ketenagakerjaan						
		1	Belum optimalnya penciptaan nilai tambah perekonomian dari pemanfaatan modal dasar pembangunan baik SDA maupun tenaga kerja	1	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja dilihat dari pendidikan (menengah 22% dan pendidikan rendah 67%)	1	Belum semua pekerja terdaftar sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan
				2	Mayoritas tenaga kerja bekerja di sektor informal (73,61%) dan paling banyak di sektor pertanian	2	Penyelenggaran pelatihan masih terbatas
				3	Tingginya setengah penganggur 16,70%	3	Tingkat Pengangguran Terbuka meningkat secara signifikan pada tahun 2019, dimana sebelumnya tercatat 2,39% pada tahun 2018 menjadi 4,18% pada tahun 2019
				4	Kemampuan pekerja migran untuk berusaha sendiri (mandiri) masih rendah		
				5	Masih rendahnya minat untuk berwirausaha		

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
				6	Pengawasan ketenagakerjaan dan penanganan pengaduan hubungan industrial belum optimal		
				7	Dampak dari covid-19 menyebabkan banyak PHK dan tidak berjalan dengan baik roda perekonomian yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yg mengalami kontraksi sehingga memicu bertambahnya pengangguran baru		
	Urusan Wajib Bidang Komunikasi dan Informatika						
				1	Rendahnya proporsi individu yang menggunakan internet yaitu 17,69% sedangkan nasional sudah mencapai angka 25,37%	1	Keterbukaan informasi publik masih terbatas,Belum semua wilayah terlayani telekomunikasi, Pemanfataan IT masih rendah
				2	Akses dan infrastruktur TIK belum merata	2	Belum terbentuk kelompok/ kampung media di setiap kecamatan
				3	Konektivitas telekomunikasi belum merata		
				4	Pengelolaan E-Gov dilingkungan NTB belum optimal		
				5	Belum terintegrasinya Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
	Urusan Wajib Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
		1	Terbatasnya kemampuan sumber daya koperasi dalam tata kelola koperasi dan kewirausahaan	1	Masih tingginya persentase koperasi tidak aktif (59,61% tahun 2019)	1	Banyak koperasi yang tidak aktif, Banyak koperasi yang aktif tetapi tidak sehat
				2	Pengembangan usaha mikro menjadi usaha kecil menengah berjalan lamban (90% usaha masih tergolong usaha mikro), bahkan banyak diantaranya yang perlu dilakukan pemulihan akibat dampak covid-19	2	Akses modal UMKM yang terbatas
				3	Terbatasnya SDM yang memiliki kualifikasi pada Koperasi Syariah.		
	Urusan Wajib Bidang Penanaman Modal						
				1	Kesiapan data dan informasi investasi yang belum sesuai dengan trend permintaan investor nasional maupun internasional dan lemahnya pengendalian dan pengawasan perizinan	1	Terbatasnya investasi baik dalam negeri maupun luar negeri
	Urusan Wajib Bidang Kepemudaan dan Olahraga						
				1	Tidak tersedianya sarana olah raga yang mumpuni, pembinaan olah raga prestasi kurang optimal dan SDM olah raga relatif terbatas	1	Minimnya organisasi pemuda yang aktif

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
						2	Kurangnya kompetisi antar sekolah dan usia dini
	Urusan Wajib Bidang Kebudayaan						
				1	Makin berkurangnya peran dan jumlah lembaga adat	1	Pemahaman dan Implementasi nilai Maja Labo Dahu sebagai nilai Budaya Lokal yang berlandaskan nilai agama semakin dilupakan
				2	Kurangnya perlindungan kebudayaan	2	Kurangnya upaya pelestarian cagar budaya, Degradasi nilai-nilai kebudayaan lokal
				3	Kurangnya pemanfataan kebudayaan,		
				4	Kurangnya pengembangan kebudayaan		
	Urusan Perpustakaan						
				1	Rendahnya literasi masyrakat Nusa Tenggara Barat	1	Kurangnya minat baca masyarakat
						2	Koleksi buku bacaan yang terbatas, Tidak representatifnya gedung perpustakaan
	Urusan Kearsipan						
				1	Masih banyaknya koleksi Deposit Perpustakaan yang belum didigitalisasi	1	Belum tertibnya penataan kearsipan
	Urusan Pilihan						

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
	Urusan Pilihan Bidang Kelautan dan Perikanan						
		1	Belum memadainya sarana dan prasarana sistem logistik perikanan	1	Penanganan kawasan konservasi laut dan pesisir belum optimal	1	Keterbatasan peralatan tangkap
				2	Terbatasnya jangkauan penangkapan ikan	2	Pengembangan perikatan darat masih kurang
				3	Kurangnya industri pengolah hasil perikanan	3	Daya saing produk olahan masih rendah
				4	Makin mahalnya harga pakan ikan budidaya		
				5	Potensi tambak yang belum optimal pengembangannya (potensi tambak yang belum optimal yakni 73,26% atau ekuivalen dengan produksi 95.148 ton)		
	Urusan Pilihan Bidang Pariwisata						
				1	Akses dan infrastruktur penunjang pada destinasi pariwisata masih terbatas	1	Pengembangan destinasi wisata masih kurang, Sarana dan prasarana belum memadai
				2	Belum tersertifikasinya destinasi wisata dan sektor pendukung, terutama pada sektor wisata halal (sertifikasi halal produk, layanan dan lain-lain)	2	Pengembangan ekonomi kreatif belum optimal
				3	Belum berkembangnya desa-desa yang memiliki potensi pariwisata untuk menjadi desa wisata	3	Promosi kepariwisataan masih kurang,

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
				4	Rata-rata Lama Menginap (RLM) wisatawan cenderung masih rendah (RataRataLamaTamuMenginap(RLTM)di hotel bintang pada tahun 2019 mencapai 2,13 hari, sedangkan untuk hotel non bintang hanya selama 1,72 hari		
	Urusan Pilihan Bidang Pertanian						
				1	Diversifikasi Budidaya tanaman eksotik belum dilakukan secara optimal	1	Alih fungsi lahan pertanian produktif
				2	Penggunaan teknologi (permesinan maupun budidaya) masih relatif rendah	2	Daya saing produk olahan masih rendah
				3	Peternakan masih berskala kecil dengan kepemilikan hewan ternak yang relatif kecil	3	Belum fokusnya program ternak sapi sebagai produk unggulan daerah
				4	Nilai tambah produk pertanian dan peternakan masih terbatas	4	Penerapan teknologi pada lahan kering belum optimal
				5	Ketersediaan pakan ternak yang masih tergantung dari luar NTB		
	Urusan Pilihan Bidang Kehutanan						
				1	Berkurangnya tutupan hutan, tingginya degradasi kawasan hutan dan masih luasnya lahan kritis yang belum ditangani		
	Urusan Pilihan Bidang ESDM						

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
		1	Produksi minyak dan gas bumi terus menurun, serta masih terbatasnya kapasitas infrastruktur energi, sementara kebutuhan energi terus meningkat	1	Masih rendahnya peningkatan nilai tambah eksport bahan tambang, akses masyarakat terhadap listrik belum optimal dan masih terbatasnya ketersediaan Energi terbarukan		
	Urusan Pilihan Bidang Perdagangan						
				1	Banyaknya peredaran produk usaha mikro kecil yang belum memenuhi standar (SNI, Halal, kadaluarsa)	1	Pengembangan produk unggulan lokal belum optimal
				2	Pasar tradisional masih belum terkelola dengan baik	2	Pengelolaan Pasar belum optimal
				3	Nilai ekspor masih tergantung pada komoditas pertambangan (persentase nilai ekspor pertambangan sampai tahun 2019 masih tinggi sebesar 99%) dan lebih banyak dalam bentuk bahan mentah		
				4	Akses pasar komoditas dan produk unggulan daerah belum optimal		
	Urusan Pilihan Bidang Perindustrian						
				1	Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas unggulan belum optimal	1	Pengembangan Industri Kecil belum memberikan hasil yang optimal dan berkelanjutan

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
				2	Research and development industri komoditas unggulan masih kurang	2	Pengembangan produk unggulan industri lokal belum optimal
				3	Kawasan industri terintegrasi belum ada		
				4	Industri yang berkembang di masyarakat dan berorientasi ekspor tidak didukung ketersediaan bahan baku dalam jangka panjang		
				5	Standarisasi mutu bagi beberapa produk industri yang berorientasi ekspor belum terpenuhi		
				6	Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal		
	Urusan Penunjang						
	Bidang Administrasi Pemerintahan						
				1	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai pelaksanaan dari manajemen kinerja sektor publik blm sepenuhnya menggambarkan pengelolaan kinerja yang berkualitas dan efektif	1	Indeks SAKIP dan LKIP masih rendah
	Bidang Perencanaan						
				1	Belum optimalnya perencanaan kinerja birokrasi	1	Proses perencanaan pembangunan belum berbasis kinerja

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
				2	Dokumen perencanaan masih perlu ditingkatkan kualitasnya dengan meningkatkan kualitas perencanaan kinerja yang berorientasi pada hasil atau manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas indikator kinerja, keterpaduan perencanaan, dan mekanisme cascade kinerja	2	Integrasi program lintas sektor untuk penanggulangan kemiskinan belum terlaksana dengan baik
						3	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan APBD kurang berkualitas
						4	Masih terjadi pelanggaran terhadap RTRW
	Bidang Keuangan						
				1	Kontribusi PAD yang cenderung menurun pada lima tahun terakhir yaitu dari 39,80 persen pada tahun 2015 hingga menjadi 34,77 persen pada tahun 2019	1	Capaian realisasi PAD belum mampu mencapai target
				2	Potensi penerimaan pendapatan daerah dari berbagai sumber belum tergali (retribusi, IGU dari OPD dll);	2	Penetapan target PAD belum sesuai potensi
				3	Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Rendah	3	Pengelolaan Aset Daerah belum optimal

No	Urusan	Rumusan Permasalahan					
		Nasional		Provinsi NTB		Kota Bima	
1	*2*	*3*		*4*		*5*	
				4	Pola belanja daerah belum seragam	4	Proses verifikasi pertanggungjawaban keuangan belum optimal
						5	Pelatihan dan sosialisasi tentang sistem pelaporan dan akuntabilitas keuangan masih kurang
	Bidang Pengawasan						
				1	Pencapaian level kapabilitas APIP belum optimal	1	Belum optimalnya peningkatan kapasitas APIP
				2	Formasi APIP yang bersertifikat auditor dan P2UPD masih rendah	2	Maturitas SPIP masih dalam tingkat berkembang
				3	Penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan belum optimal	3	Belum optimalnya penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksanaan
						4	Masih adanya temuan berulang yang berindikasi kerugian bersifat material

Sumber: Hasil Analisis

4.1.1. Perumusan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Permasalahan utama pembangunan Kota Bima tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan.
2. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan
3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik
4. Belum optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan

Permasalahan pembangunan daerah tersebut selanjutnya diidentifikasi melalui kajian data dan informasi pembangunan daerah khususnya data strategis pembangunan. Berikut penjabaran permasalahan pembangunan Kota Bima berdasarkan gambaran umum kondisi pembangunan daerah di Kota Bima

4.1.1.1. Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat masih perlu ditingkatkan

Permasalahan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Kota Bima berhubungan dengan masalah pokok antara lain; derajat kesehatan masyarakat yang masih perlu ditingkatkan, rendahnya akses dan kualitas penyelenggaraan layanan pendidikan, Tingkat Pengangguran Terbuka masih cukup tinggi, dan masih tingginya angka kemiskinan serta nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat belum terimplementasi dengan optimal, Peningkatan derajad kesehatan akan mempengaruhi usia harapan hidup karena akan mengurangi fluktuatifnya angka kesakitan dan juga angka kematian ibu - bayi – balita. Penyelesaian permasalahan pendidikan dan kesehatan akan menaikkan IPM yang merupakan indeks komposit dari variabel pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Berdasarkan posisi relatif IPM tahun 2017, capaian IPM Kota Bima mencapai nilai 74,36 Nilai ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sebesar 66,58 Jika dibandingkan dengan dengan nilai IPM kota/kabupaten di NTB, nilai IPM Kota Bima hanya kalah dari Kota Mataram yang sudah mencapai angka 77,84. Meskipun relatif tinggi, nilai IPM Kota Bima masih

perlu untuk ditingkatkan lagi, terutama jika dilihat dari komponen-komponen pembentuk IPM.

Pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga tercipta sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Kemudahan akses dan mutu pendidikan sangat diperlukan dalam rangka menaikkan angka rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah atau melanjutkan sekolah. Pembangunan sumberdaya manusia juga harus diimbangi dengan implementasi nilai-nilai religiusitas dalam kehidupan bermasyarakat.

Meskipun angka pengangguran mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017, namun Pemerintah Kota Bima harus mengatasi permasalahan yaitu perkembangan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak seimbang dengan pertambahan jumlah angkatan kerja. Kualitas dan produktifitas tenaga kerja juga menjadi perhatian, mengingat di era global dituntut tenaga kerja yang berdaya saing untuk dapat eksis.

Permasalahan penurunan angka kemiskinan yang muncul adalah bahwa semakin kecil persentase kemiskinan, maka akan semakin sulit melakukan penurunan, karena sudah semakin detail mengarah kepada individu yang spesifik mengalami kondisi miskin. Hal ini menjadi sulit, karena jenis kemiskinan ataupun penyebab kemiskinan ikut bagian sebagai kendala. Selain itu, Kebijakan Pembangunan yang berpihak kepada masyarakat miskin juga sering menjadi permasalahan, khususnya terkait dengan kebijakan pemerataan hasil-hasil pembangunan, baik dalam hal pemerataan kesempatan bekerja ataupun pemerataan kesempatan berusaha, yang pada akhirnya akan lebih meningkatkan pemerataan pendapatan per kapita penduduk. Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut ini.

Tabel 4.3.

Rumusan Permasalahan Kualitas Hidup dan Kesejahteraan Masyarakat

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan	Masih tingginya Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi	Kurangnya asupan dan kecukupan gizi
		Pernikahan dini
		Tingkat pendidikan (kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap pelayanan

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
		kesehatan)
		Lingkungan yang kurang sehat
		Komplikasi penyakit lainnya
		Pelayanan kesehatan yang terstandar belum merata di seluruh wilayah
	Masih tingginya Angka Gizi Buruk	Kurangnya asupan gizi keluarga
		Kemiskinan
		Tingkat pendidikan (kesadaran/pemahaman masyarakat terhadap pelayanan kesehatan)
	Jaminan kesehatan penduduk miskin belum sepenuhnya tercover	Data kemiskinan yang tidak terupdate setiap tahun
		Alokasi anggaran untuk subsidi kesehatan masyarakat miskin masih kurang
	Belum optimalnya pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar dan rujukan	Masih rendahnya sarana/prasarana pelayanan di tingkat puskesmas, pustu, maupun polindes
		Belum adanya rumah sakit rujukan yang benar-benar representatif
	Akses jamban keluarga belum 100% terpenuhi	Faktor prilaku masyarakat yang masih tidak terbiasa dengan jamban keluarga
		Data base tentang rumah tangga yang memiliki jamban keluarga belum terupdate
Akses layanan dan kualitas penyelenggaraan pendidikan masih belum optimal	Angka putus sekolah masih relatif tinggi	Keterbatasan biaya (kemiskinan)
	Belum meratanya akses layanan pendidikan khususnya untuk warga miskin dan difabel	Beasiswa untuk masyarakat miskin masih terbatas
		sarana dan prasarana pendidikan di wilayah pinggiran kota sangat terbatas
		Distribusi guru yang kurang merata
	Kualitas penyelenggaraan manajemen pendidikan masih belum optimal/ sekolah tersertifikasi	Belum dibangun unit pengelolaan pengaduan masyarakat
		Dana operasional penyelenggaraan pendidikan yang terbatas
		Sarana pembelajaran berbasis IT masih sangat terbatas
		Penyelenggaraan penjaminan mutu yang belum optimal
	Guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten tidak	Jumlah guru dan tenaga pendidikan yang berpendidikan tinggi dan kompeten masih

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	merata dan terbatas	sangat terbatas
		Beasiswa pendidikan untuk guru berprestasi masih sangat terbatas
	Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan masih kurang merata	Updating database sarana dan prasarana pendidikan belum optimal
		Dukungan anggaran untuk penyediaan sarana prasarana belum optimal
	Rendahnya minat baca	Partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi masih terbatas
		Belum ada perpustakaan daerah yang representatif
		Koleksi buku pada perpustakaan sekolah masih terbatas
Angka pengangguraan terbuka masih cukup tinggi	Ketrampilan angkatan kerja terbatas	Belum terbangun Balai Latihan Kerja yang bermutu
		Tingkat pendidikan angkatan kerja yang terbatas
	Kesempatan kerja terbatas	Lapangan kerja belum tersedia secara luas
		Dukungan untuk terciptanya wirausaha baru masih sangat terbatas
	Kualitas dan produktifitas angkatan kerja masih perlu ditingkatkan	Penyelenggaran pelatihan kerja masih sangat minim
Masih tingginya angka kemiskinan	Belum Optimalnya Pelayanan perlindungan, rehabilitasi , pemberdayaan dan jaminan sosial warga miskin dan PMKS.	Data PMKS masih belum valid dan terupdate
		Alokasi anggaran daerah untuk pelayanan PMKS masih sangat terbatas
	Belum optimalnya peran serta pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Kebijakan yang *pro poor* masih belum terinternalisasi secara kelembagaan pada berbagai stakeholder (CSR, NGO, dll)

Sumber : *Hasil Analisa*

4.1.1.2. Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah masih perlu ditingkatkan

Penyumbang PDRB terbesar di Kota Bima masih didominasi oleh sektor perdagangan dan jasa. Sektor perdagangan menyumbang 23,71% dalam struktur PDRB Kota Bima tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Kota Bima sebagian besar ditopang oleh sektor-sektor ekonomi, namun belum semua potensi ekonomi kreatif digali dan dikembangkan secara optimal sehingga sektor pariwisata belum dapat dioptimalkan .

Permasalahan belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; pertumbuhan industri rendah, rendahnya kunjungan wisata ke Kota Bima, masih rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM, belum optimalnya nilai ekspor perdagangan, belum optimalnya hasil produksi pertanian, maupun kelautan dan perikanan, serta masih minimnya ajang pentas seni yang akan mendorong peningkatan kreativitas seni dari masyarakat.

Masalah industri tenun yang selama ini dikeluhkan oleh pengrajin adalah terkait dengan ketersediaan bahan baku. Harga maupun kualitas benang sebagai bahan baku menjadi permasalahan yang terus dihadapi oleh pengrajin. Permasalahan selanjutnya adalah terkait dengan adanya produksi batik cetak dengan menggunakan motif khas Bima juga menjadi tantangan yang sangat serius dalam mengembangkan maupun memasarkan produk tenun tradisional. Persaingan dengan daerah lain yang juga memiliki produk tenun maupun batik sangat mempengaruhi pertumbuhan usaha kerajinan tenun di Kota Bima. Disisi lain, kelembagaan sentra dan penyediaan sarana dan fasilitas pendukung masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus ditingkatkan.

Masalah permodalan bagi UMKM juga menjadi salah satu hal yang belum dapat diatasi dengan optimal. Akses permodalan ke lembaga keuangan masih terkendala dengan jaminan kredit. Disisi lain belum kuatnya kelembagaan koperasi menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran koperasi dalam peningkatan ekonomi kerakyatan, termasuk didalamnya dalam penyediaan akses modal bagi UMKM.

Kualitas produk menjadi faktor yang harus mendapatkan perhatian di era pasar global. Produk yang tidak berdaya saing akan sulit sekali memasuki pasar regional maupun internasional. Dengan demikian, hanya produk dengan keunggulan kompetitif dan komparatif yang bisa bertahan di pasar global. Pasar global juga menuntut pelaku industri dalam penguasaan akses dan informasi pasar.

Produk pertanian merupakan produk unggulan terutama dengan pertanian tanaman pangan. Namun demikian produksinya cenderung terus mengalami penurunan karena luas areal pertanian yang semakin hari semakin berkurang. Produk perikanan juga merupakan produk unggulan. Namun demikian produksi perikanan tangkap menjadi kurang optimal karena masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan. Di sisi pengolahan perikanan, masih ditemukan kualitas produk yang kurang berdaya saing.

Dari sektor pariwisata, pengemasan obyek wisata budaya belum terintegrasi dengan aspek sosial lainnya, sehingga masih berjalan sendiri-sendiri. Even-even budayakalau dikemas dan dipertunjukkan secara rutin akan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Hal ini kemudian akan menarik kegiatan-kegiatan kreatif lainnya yang juga akan memajukan ekonomi Kota Bima. Destinasi wisata belum tertata secara sistem dan terhubung dengan pendukung lainnya, baik infrastruktur, moda angkutan akses ke lokasi wisata, sarana prasana akomodasi dan penginapan serta pemasaran wisata dan kerjasama dengan pihak swasta. Penciptaan identitas dan ciri khas sebuah obyek wisata juga belum dilakukan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Pemerataan pembangunan dan pengembangan potensi ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan daerah dapat dilihat pada tabel 4.4 berikut ini.

Tabel 4.4.
Rumusan Permasalahan Pemerataan Pembangunan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Potensi Unggulan Daerah

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Pertumbuhan Industri rendah	Melambatnya pertumbuhan industri tenun tradisional	Keterbatasan bahan baku
		Tingginya ongkos produksi
		Kurangnya pembinaan pada pengrajin
		Kurangnya media promosi dan pemasaran produk
		Masih rendahnya kualitas

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
		produk (luntur dan panas)
	Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung pengembangan industri kecil masih sangat terbatas	Akses permodalan dan teknologi yang terbatas
	Potensi industri kreatif belum dikembangkan secara optimal	Pembinaan dan pendampingan untuk pengembangan industri kreatif belum optimal
	PMDN dan PMA masih rendah	Belum optimalnya iklim penanaman modal
Rendahnya kunjungan wisata	Rendahnya daya saing obyek wisata	Obyek wisata belum ditata secara baik
		Akses menuju obyek wisata belum seluruhnya baik
		Kebersihan lingkungan obyek wisata masih kurang
		Sarana dan prasarana obyek wisata masih sangat minim
		Keamanan dan ketertiban
	Rendahnya upaya promosi pariwisata	Masih kurangnya kerjasama pengembangan pariwisata
		Festival dan atraksi pendukung pariwisata masih kurang
Rendahnya peran koperasi dan lembaga keuangan dalam pengembangan UMKM	Jumlah koperasi aktif masih sangat kurang	Pembinaan terhadap koperasi masih minim
		Kualitas kelembagaan koperasi belum optimal
	Fasilitas akses permodalan ke lembaga keuangan bagi UMKM masih sangat terbatas	Produktifitas UMKM masih rendah
Belum optimalnya Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk pengembangan ekonomi kreatif	Masyarakat masih kurang melek teknologi	Kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknologi informasi
Belum optimalnya nilai ekspor perdagangan	Belum optimalnya produk lokal yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berorientasi ekspor	Kapasitas produksi dan produktifitas masih rendah
		Kualitas produksi masih terbatas
		penguasaan akses dan informasi pasar, kemitraan/kerjasama usaha masih terbatas
Menurunya hasil produksi pertanian	Lahan pertanian semakin berkurang	Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun
	Masih belum berkembangnya industri pengolahan hasil pertanian	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan industri hasil pertanian masih terbatas
Belum optimalnya hasil produksi	Produk perikanan dan pengolahan ikan kurang	Masih rendahnya produksi ikan yang didaratkan di TPI

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
kelautan dan perikanan	berdaya saing	Masih rendahnya budidaya perikanan

Sumber : *Hasil Analisa*

4.1.1.3. Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik

Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik di setiap lingkungan pemerintahan, maka-maka prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kualitas pelayanan publik menjadi faktor yang harus dipenuhi. Permasalahan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; masih kurangnya kualitas perencanaan kinerja, masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah, belum optimalnya tingkat kematangan SPIP, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, belum optimalnya keterbukaan informasi publik.

Pada aspek perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan kinerja, meskipun telah termasuk dalam 14 Kota Nominasi untuk memperoleh anugerah bidang perencanaan yaitu Penghargaan Pembangunan Daerah, namun Kota Bima masih dihadapkan pada persoalan penyajian RKPD yang belum mencantumkan secara lengkap rincian kegiatan dari setiap program pembangunan pada setiap urusan. Disamping itu juga masih terbatasnya inovasi dan terobosan program maupun kegiatan dalam melakukan akselerasi pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bima sampai dengan saat ini meskipun sudah berada pada kategori Baik namun nilainya masih terbatas. Dari hasil evaluasi akuntabilitas kinerja menunjukkan bahwa salah satu kelemahan yang menjadi penyebab rendahya nilai akuntabilitas Kota Bima adalah belum optimalnya penyusunan penjabaran *cascading* kinerja untuk setiap tingkatan jabatan. Indikator juga belum sepenuhnya memenuhi kaidah SMART, yaitu; *Spesific*, *Measureable, Attainable, Relevant* dan *Timely.*

Akuntabilitas keuangan ditunjukkan dengan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hasil capaian akuntabilitas keuangan Kota Bima terus mengalami peningkatan. Pemerintah Kota Bima

mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 4 tahun berturut-turut mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2017. WTP adalah opini tertinggi yang berarti akuntabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah lebih baik, sehingga *good* dan *clean government* dapat terwujud. Namun demikian, pengelolaan tata pemerintahan perlu terus ditingkatkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan melayani.

Dari sisi efektifitas pengawasan dan pengendalian internal, masih ditemukan belum optimalnya tingkat kematangan SPIP, yang salah satunya disebabkan oleh kompetensi dan kapabilitas APIP belum seluruhnya baik. Keterbukaan informasi publik sebagai salah satu bentuk transparansi juga masih perlu ditingkatkan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat pada tabel 4.5 berikut ini.

Tabel 4.5.
Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Perencanaan kinerja masih kurang optimal	Hasil kajian dan litbang masih sangat minim sebagai masukan perumusan kebijakan dan rencana pembangunan	Alokasi anggaran kegiatan penelitian dan pengembangan masih sangat terbatas
		Jabatan fungsional peneliti belum ada
	Belum optimalnya tingkat kesesuaian perencanaan	Perda Perencanaan dan penganggaran belum tersedia
		Penganggaran belum didukung oleh SOP yang memadai
		Cascading perencanaan kinerja belum sepenuhnya diakomodir dalam penganggaran
		Sumberdaya manusia perencanaan pada setiap unit kerja masih terbatas
Masih rendahnya akuntabilitas kinerja dan keuangan daerah	Masih rendahnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dan perangkat daerah	Data kinerja belum terbangun dengan baik
		Sistem monev pada setiap tingkatan belum berjalan optimal
		Kurang tersedianya SDM monev dan pelaporan yang berkompeten
Belum optimalnya SPIP	Belum optimalnya kompetensi dan	Jumlah auditor terlatih masih terbatas

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
	kapabilitas APIP	Implementasi SPIP mandiri pada setiap unit kerja belum optimal
		Banyak koperasi yang gak aktif
Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Manajemen pengelolaan keuangan daerah belum terkelola dengan maksimal	Masih terdapat kode rekening ganda
		Sumber-sumber PAD potensial belum dikelola secara optimal
	PAD masih rendah	Pengelolaan PAD belum dilakukan online
Belum optimalnya keterbukaan informasi publik	Transparansi melalu keterbukaan informasi publik masih perlu ditingkatkan	Peran PPID belum optimal
		Website OPD maupun Kota belum dikelola secara optimal

Sumber : *Hasil Analisa*

4.1.1.4. Belum optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting untuk mempercepat proses pembangunan daerah. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Permasalahan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan berhubungan dengan masalah pokok, antara lain; belum optimalnya penanganan kawasan kumuh, belum optimalnya Infrastruktur jaringan jalan yang dapat melayani warga, belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif, belum optimalnya penataan kawasan strategis serta rendahnya kualitas lingkungan hidup.

Penanganan kawasan kumuh memerlukan upaya terintegrasi dalam pemenuhan standar kualitas lingkungan permukiman, antara lain; penanganan genangan banjir, pelayanan sampah, pelayanan air minum, kualitas perumahan penduduk berpenghasilan rendah, dan pelayanan air limbah permukiman. Genangan air atau banjir disebabkan karena elevasi/ kemiringan lahan Kota Bima masih cukup luas. Genangan juga disebabkan oleh proses sedimentasi sungai dan saluran drainase yang relatif tinggi, baik pada saluran primer, sekunder, ataupun tersier dan juga saluran lingkungan perumahan dan permukiman. Penanganan sampah permukiman dan penanganan air limbah permukiman masih memerlukan upaya lebih dalam mengurangi kawasan kumuh.

Berkaitan dengan pelayanan air minum, Kota Bima memiliki ketergantungan dari PDAM Kabupaten Bima yang saat ini sedang mengalami

krisis managemen. Sementara pemanfaatan sumur dalam, baik PAMSIMAS dan Swasta seperti hotel ataupun perusahaan dapat menjadi pemicu terjadinya penurunan permukaan tanah.

Dilihat dari penataan dan pemanfaatan ruang untuk memberikan rasa nyaman bagi warga, penyediaan fasilitas publik pada kawasan strategis serta pengawasan pemanfaatan ruang masih perlu ditingkatkan. Peningkatan kualitas lingkungan khususnya peningkatan kualitas air sungai dan penyediaan ruang terbuka hijau akan menaikkan kenyamanan warga Kota. Perambahan lahan perbukitan untuk menjadi area tanam jagung juga menimbulkan ancaman serius terhadap potensi bencana banjir dan longsor maupun penurunan daya dukung lingkungan.

Rumusan permasalahan yang berhubungan dengan belum optimalnya infrastruktur dan daya dukung lingkungan dapat dilihat pada tabel 4.6 berikut ini.

Tabel 4.6.
Rumusan Permasalahan Belum Optimalnya Infrastruktur dan Daya Dukung Lingkungan

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh	Belum optimalnya penanganan genangan banjir	Sarana dan prasarana penanganan banjir masih terbatas
		Sistem saluran belum terintegrasi dengan baik
	Cakupan pelayanan sampah belum optimal	Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih rendah
		Tatalaksana pengelolaan sampah belum terpadu
		Sarana dan prasarana pengelolaan sampah masih kurang
	Cakupan pelayanan air minum belum optmal	Belum adanya PDAM yang berfungsi dengan baik
	Rendahnya kualitas perumahan	Rendahnya pendapatan masyarakat (kemiskinan)
		Banyaknya rumah terdampak banjir
	Keterbatasan cakupan pelayanan air limbah permukiman	Sarana dan prasarana pengelolaan air limbah masih terbatas
		Ketersediaan lahan untuk pengolahan air limbah terbatas
Belum optimalnya kemantapan jalan	Jaringan jalan kota dalam kondisi baik	Banyak jaringan jalan terdampak banjir dan bencana

Permasalahan Pokok	Masalah	Akar Masalah
yang dapat melayani warga	belum optimal	Banyak jaringan jalan yang baru dibuka belum ditetapkan dengan keputusan Walikota
Belum optimalnya kualitas ruang publik kreatif	Masih terbatasnya sarana dan prasarana ruang publik	Keterbatasan lahan untuk penyediaan sarana dan prasarana ruang public
Belum optimalnya penataan kawasan strategis	Belum optimalnya penataan fasilitas publik pada kawasan strategis	Belum adanya Perda RDTR kawasan strategis
	Belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang	Keterliban masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang masih sangat kurang
		Belum adanya Perda RDTR
		Kurangnya sosialisasi tentang rencana tata ruang
Rendahnya kualitas lingkungan hidup	Rendahnya kualitas air sungai, tanah dan udara	Pengelolaan sampah dan air limbah yang belum optimal
	Terbatasnya ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau publik masih kurang dari 20%
	Alih fungsi lahan perbukitan untuk areal jagung secara massif	Belum adanya regulasi terkait dengan budidaya jagung
		Kurangnya lapangan kerja dan rendahnya pendapatan petani

Sumber : *Hasil Analisa*

4.1.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

Permasalahan pada bagian ini merupakan permasalahan pembangunan yang berhasil didentifikasi pada setiap urusan pemerintahan berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja pada periode RPJMD tahun 2013-2018. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah ini untuk memastikan bekerjanya perangkat daerah untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi yang menjadi kewenangannya dalam melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

Adapun permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dapat dilihat pada tabel 4.7. berikut ini.

Tabel 4.7.
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
ASPEK PELAYANAN UMUM				
Layanan Urusan Wajib Dasar				
1	**Pendidikan**			
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	<	Belum optimalnya pengelolaan PAUD	Pembinaan dan dukungan anggaran
1.2	Angka partisipasi kasar	>	Terdapat kelompok umur diluar usia sekolah masih dan/atau telah bersekolah	Kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan	<	Tidak semua siswa mengikuti ujian	Tidak ada biaya dan kenakalan remaja
1.4	Angka Partisipasi Murni	<		
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	<	Ada siswa yang drop out	Tidak ada biaya
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	<	Ada siswa yang drop out	Tidak ada biaya dan kenakalan remaja
1.5	Angka partisipasi sekolah			
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	➢		Fasilitasi wajib belajar 9 tahun
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	>		Fasilitasi wajib belajar 9 tahun
1.6	Angka Putus Sekolah:			
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	<	Tidak ada biaya (Kemiskinan)	Bantuan Pemerintah

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	<	Tidak ada biaya (Kemiskinan)	Bantuan Pemerintah
1.7	Angka Kelulusan:			
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	<	Mutu pendidikan masih perlu ditingkatkan	Standarisasi mutu/sertifikasi sekolah
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	<	Mutu pendidikan masih perlu ditingkat kan	Standarisasi mutu/sertifikasi sekolah
1.8	Angka Melanjutkan (AM):			
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	=		Fasilitasi wajib belajar 9 tahun
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	=		Fasilitasi wajib belajar 9 tahun
1.9	Fasilitas Pendidikan:			
1.9.1	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	<	Terdapat beberapa sekolah yang perlu diperbaiki kondisinya	Dana DAK
1.9.2	Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	=		Dana DAK
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	=		Dana DAK
1.12	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	=		Banyak guru K2
1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan	=		Tingkat pendidikan

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	laki-laki			
1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	<	Masih ada warga buta aksara	Pendidikan non formal
1.19	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	<	Belum semua guru tersertifikasi	Uji sertifiasi
2	**Kesehatan**			
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	<	Kasus kematian bayi masih tinggi	Faktor pendidikan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	<	Kasus kematian balita masih tinggi	Faktor pendidikan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	<	Angka kematian Ibu masih tinggi	Faktor pendidikan masyarakat dan kualitas pelayanan kesehatan
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	=		Posyandu tersebar di seluruh kelurahan
2.7	Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk	=		Setiap puskesmas sdah memiliki puskesmas
2.8	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	<	Belum ada rumah sakit berstandar	Alokasi anggaran pembangunan rumah sakit
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	<	Sebaran dokter umum belum merata di seluruh wilayah	Jumlah dokter masih terbatas
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	<	Sebaran tenaga medis belum merata	Jumlah tenaga meidis masih terbatas
2.11	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	=		Ketersediaan bidan kelurahan
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi	=		Ketersediaan bidan elurahan

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	kebidanan			
2.13	Cakupan Desa/kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	=		Ketersediaan bidan kelurahan
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	<	Asupan gizi kurang	Pelayanan gizi dan kesehatan keluarga
2.16	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	<	Masyarakat belum sepenuhnya mau diimunisasi	Faktor pendidikan masyarakat
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	<	Angka TB masih cukup tinggi	Kesehatan dan kebersihan lingkungan yang rendah
2.23	Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	=		Ketetapatan penanganan dan pelayanan kesehatan
2.24	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	=		Fogging
2.25	Penderita diare yang ditangani	=		Ketetapatan penanganan dan pelayanan kesehatan
2.26	Angka kejadian Malaria	<	Seharusnya bebas malaria	Kesehatan dan kebersihan lingkungan
2.27	Tingkat kematian akibat malaria	=		Ketepatan penangangan
2.30	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	<	Penyandang HIV terus mengalami peningkatan	Kesadaran dan agama
2.33	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	<	Masyarakat miskin belum seluruhnya memiliki kartu BPJS kesehatan	Subsidi dari Pemerintah
2.34	Cakupan kunjungan bayi	=		Sosialisasi dan pembinaan oleh kader posyandu
2.37	Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	=		Pembinaan dan pendampingan oleh bidan desa
2.38	Cakupan	=		Pembinaan dan pendampingan oleh bidan desa

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	pelayanan nifas			
2.42	Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat	=		Promosi sekolah sehat
2.43	Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin	=		Alokasi dana kesehatan untuk warga miskin
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**			
3.1	Pekerjaan Umum:			
3.1.1	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	<	Jalan dan jembatan dalam kondisi baik belum mencapai 100%	Peningkatan dan pemeliharaan
3.1.2	Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	>		Pembukaan jalan baru cukup banyak
3.1.3	Persentase kawasan pemukiman yang yang belum dapat dilalui kendaraan roda 4	<	Terdapat lingkungan permukiman yang hanya memiliki akses gang	Kepadatan penduduk
3.1.4	Persentase jalan kota dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	<	Masih terdapat jalan yang dalam kondisi sedang dan rusak	Pemeliharaan dan peningkatan jalan
3.1.5	Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	<	Belum semua jalan memiliki drainase dan trotoar	Perencanaan jaringan jalan dan saluran
3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	<	Belum semua rumah tangga bersanitasi baik	Pola hidup dan ketersediaan jamban kelurga
3.1.8	Persentase sempadan sungai yang dipakai	<	Banyak bangunan rumah pada melewati garis sempadan	Pengendalian pemanfaatan ruang

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	bangunan liar		sungai	
3.1.9	Persentase drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	<	Banyak saluran drainase yang tersumbat	Elevasi dan pemeliharaan
3.1.10	Tidak terjadi genangan > 2 kali setahun	<	Luas daerah genangan masih tinggi	Revitalisasi saluran air
3.1.11	Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor	<	Turap belum terpasang di seluruh jalan penghubung	Penataan sistem transportasi
3.1.13	Rasio Jaringan Irigasi	<	Luas areal yang terbatas	Alih fungsi lahan pertanian
3.1.14	Persentase penduduk berakses air minum	<	Penduduk belum seluruhnya terlayani oleh air minum layak	Keberadaan PDAM
3.1.16	Persentase areal kawasan kumuh	<	Luas kawasan kumuh masih cukup luas	Sarana dan prasarana lingkungan permukiman
3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan	=		Sarana pemilahan sampah tersedia
3.1.18	Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	<	Ketersediaan pemakaman umum terbatas	Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi
3.1.19	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk	>		Semangat masyarakat dalam beragama
3.2	Penataan Ruang:			
3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	<	Masih belum memenuhi 20%	Ketersediaan lahan dan pengendalian pemanfaatan ruang
3.2.2	Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan	>		Dikontribusi oleh lahan pertanian, perkebunan dan kawasan konservasi

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	perkotaan			
3.2.3	Rasio bangunan ber- IMB per satuan bangunan	<	Banyak bangunan belum memiliki IMB	Sosialisasi dan penegakan PERDA
3.2.6	Ketaatan terhadap RTRW	<	Terjadi pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukan	Pengendalian pemanfaatan ruang
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**			
4.1	Rasio rumah layak huni	<	Masih terdapat rumah tidak layak huni dalam jumlah yang banyak	Kemiskinan
4.2	Rasio permukiman layak huni	<	Permukiman kurang layak huni cukup luas	Ketersediaan sarana/prasarana/infrastruktur permukiman
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**			
5.1	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	=		Petugas linmas tersedia cukup
5.2	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	<	Angka kriminalitas cenderung meningkat	Pengangguran dan Narkoba
5.3	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	=		Unit pemadam kebakaran yang terlatih
5.4	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	<	Ada beberapa pelayanan RTRnya kurang dari 15 menit	Jarak yang jauh
5.5	Persentase Penegakan	<	Belum optimal	Koordinasi lintas OPD

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	PERDA			
5.6	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	=		Peran FKUB
5.7	Persentase gejala konflik yang diatasi	=		Partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan aparat keamanan
5.8	Persentase cakupan wilayah potensi konflik	=		Partisipasi masyarakat dan kerjasama dengan aparat kemaanan
5.9	Jumlah konflik social	=		Kesadaran dan partisipasi masyarakat
5.10	Persentase pembinaan terhadap LSM dan Ormas	<	LSM dan Ormas yang terdaftar sedikit tapi yang beraktifitas cukup banyak	Data base LSM dan ORMAS
5.11	Persentase pembinaan politik terhadap aparatur dan masyarakat	<		Sosialisasi dan gerakan revolusi mental
6	**Sosial**			
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan social	<	Bantuan untuk PMKS sangat terbatas	Anggaran bantuan sosial
6.2	Persentase PMKS yang tertangani	<	Belum seluruh PMKS tertangani	Data base PMKS
6.3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	<	Belum seluruh PMKS tertangani	Data base PMKS
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi	<		Panti jompo

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	sejenis lainnya			
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan social	<		Panti jompo
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	=		Dana tanggap darurat
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	=		Dana tanggap darurat
6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan social	<	Jaminan sosial masih terbatas	Ketersediaan anggaran dan update data base
	Layanan Urusan Wajib Non Dasar			
1	**Tenaga Kerja**			
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	=		Jumlah kasus sengketa
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	=		Fasilitasi dan mediasi
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	<		Kualifikasi dan jumlah pencari kerja
1.4	Keselamatan dan perlindungan	<	Belum semua pekerja terdaftar sebagai anggota BPJS	

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			Ketenagakerjaan	
1.10	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	<	Penyelenggaran pelatihan masih terbatas	Alokasi anggaran minim
1.11	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	<	Penyelenggaran pelatihan masih terbatas	Alokasi anggaran minim
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**			
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	>	Partisipasi perempuan tinggi	Advokasi dan pemberdayaan
2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD	<	Belum memenuhi 30%	Advokasi dan promosi
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	>	Partisipasi perempuan tinggi	Advokasi dan pemberdayaan
2.4	Rasio KDRT	<	Masih ada tapi tidak terlalu tinggi	Ekonomi dan Prilaku menyimpang
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	=	Tidak ada tenaga kerja di bawah umur yang tercatat	Promosi wajib belajar 9 tahun
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	=	Semua pengaduan mendapatkan penanganan	Peran LPA
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga	=	Semua korban terdata ditangani	Peran LPA

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit			
2.9	Cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	<	Layanan rehabilitasi masih terbatas	Ketersediaan Petugas rehabilitasi sosial
2.10	Cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	<	Tidak semua korban kekerasan melaporkan ke APH	Laporan pengaduan dan penegakan hukum
2.11	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	<	Tidak semua korban kekerasan melaporkan ke APH	Laporan pengaduan dan penegakan hukum
3	**Pangan**			
3.1	Ketersediaan pangan utama	>	Stok tersedia cukup	Ketersediaan Gudang Pangan
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita			
	Ketersediaan energy	<		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
	Ketersediaan protein	<		Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan
3.4	Skor Pola	<	SKOR sudah	

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	Pangan Harapan		cukup tinggi tapi perlu ditingkatkan	
3.5	Penguatan cadangan pangan	>	Stok tersedia cukup	
4	**Pertanahan**			
4.1	Persentase luas lahan bersertifikat	<	Lahan pemerintah banyak yang belum bersertifikat	Pengelolaan aset
4.2	Penyelesaian kasus tanah Negara	=	Tidak ada kasus sengketa tanah Negara	Kasus yang ada
4.3	Penyelesaian izin lokasi	<		
5	**Lingkungan Hidup**			
5.26	Tersusunnya RPPLH Kota	<	Belum ada dokumen	Penganggaran
5.27	Terintegrasinya RPPLH dalam rencana pembangunan kota	<	Belum ada dokumen	Penganggaran
5.28	Terselenggaranya KLHS untuk K/R/P tingkat daerah	=	Dokumen perencanaan daerah harus didukung oleh KLHS	Penganggaran
5.29	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Air	<	Pencemaran air	Lokasi TPA yang berada pada dataran tinggi/hulu
5.30	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Udara	>	Tidak ada polusi udara	
5.31	Hasil Pengukuruan Indeks kualitas Tutupan Lahan	<	Terjadi kerusakan lahan	Budidaya jagung di area perbukitan dan pegunungan
5.41	Terlaksananya pemberian penghargaan lingkungan hidup		Belum optimal	Keterbatasan peran serta dan anggaran
	Adiwiyata	<		
	Permata	<		
	Semi Kalpataru	<		

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
	Kebersihan Lingkungan	=		
	Eco Office	<		
5.43	Timbulan sampah yang ditangani	<	Belum tertangani sepenuhnya	Tenaga dan sarana/prasarana yang terbatas
5.44	Persentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R	<	Pengelolaan sampah melalui 3R masih rendah	Advokasi, promosi dan sosialisasi
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**			
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	<	Belum seluruhnya terlayani	Aksesibilitas
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	<	Belum seluruhnya terlayani	Aksesibilitas
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	<	Belum seluruhnya terlayani	Aksesibilitas
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	=		SIMDUK
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	<	Belum seluruhnya terlayani	Keterbatasan kartu
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	<	Belum seluruhnya terlayani	Keterbatasan kartu
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**			
7.1	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	<	Sarana prasarana perkantoran tingkat kelurahan belum seluruhnya baik	Ketersediaan lahan
7.3	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	<	Kelompok binaan PKK yang aktif terbatas jumlahnya	Pembinaan dan pendampingan
7.4	Persentase LSM aktif	<	LSM banyak yang tidak aktif	Pembinaan

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
7.5	Persentase LPM Berprestasi	<	LPM belum berprestasi	Pemberdayaan dan stimulan
7.6	Persentase PKK aktif	<	Banyak kader yang tidak aktif	Pembinaan dan pendampingan
7.7	Persentase Posyandu aktif	<	Banyak kader yang kurang aktif	Pembinaan dan pendampingan
7.8	Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	<	Swadaya terus menurun	Kesadaran dan kondisi ekonomi
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**			
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	<	Laju pertumbuhan penduduk masih tinggi	Program KB
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	>	Kesuburan perempuan baik	Program KB
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	<	Kampung KB baru saja dicanangkan	Sosialisasi dan Advokasi
8.8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	>	Rata-rata anak lebih dari 2	Pendidikan dan kesadaran
8.9	Ratio Akseptor KB	<	Peserta KB aktif masih rendah	Pendidikan dan kesadaran
8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi *(unmet need)*	=		
8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	>		
8.15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	=		

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
8.16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	=		
8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	>	Sudah berada pada umur 22 tahun	Tingkat pendidikan
8.31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD	<	Alokasi anggaran terbatas	Subsidi Pemerintah Pusat
9	**Perhubungan**			
9.1	Jumlah arus penumpang angkutan umum	>	Mobilisasi penduduk cukup tinggi	Kualitas angkutan umum
9.2	Rasio ijin trayek	=		
9.3	Jumlah uji kir angkutan umum	<	Terdapat angkutan umum yang tidak melakukan uji kir	Sosialisasi dan penegakan hukum
9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	=	Sudah sesuai dengan kebutuhan	
9.5	Persentase layanan angkutan darat	<	Angkutan kota berkurang drastis	Kepemilikan kendaraan pribadi dan ojek
9.7	Pemasangan Rambu- rambu	<	Jaringan jalan yang dilengkapi oleh rambu-rambu lalu lintas masih terbatas	Keterbatasan anggaran
10	**Komunikasi dan Informatika**			
10.1	Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	<	Belum terbentuk kelompok/ kampung media di setiap kecamatan	Pembinaan dan pendampingan
10.2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	<	Belum semua wilayah terlayani	Kondisi topografi

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
			telekomunikasi	
10.6	Pelaksanaan Desiminasi Informasi	<	Keterbukaan informasi publik masih terbatas	Peran PPID
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**			
11.1	Persentase koperasi aktif	<	Banyak koperasi tidak aktif	Pembinaan kelembagaan koperasi
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	<	BPR/LKM aktif terbatas	Akses modal
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	<	BPR/LKM aktif terbatas	Akses modal
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	<	UMK produktif terbatas	Pelatihan, pendampingan dan bantuan modal
12	**Penanaman Modal**			
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
12.4	Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN (milyar rupiah)	<	Investasi masih terbatas	Iklim investasi dan perijinan
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**			
13.1	Persentase organisasi pemuda yang aktif	<	Organisasi pemuda yang aktif masih minim	Pembinaan dan pendampingan
13.2	Persentase wirausaha muda	<	Jumlah wirausaha muda sangat minim	Pembinaan dan penguatan modal
13.3	Cakupan pembinaan olahraga	<	Pembinaan olah raga usia dini masih sangat minim	Kurangnya kompetisi antar sekolah dan usia dini
13.4	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	<	Sudah tersedia tapi masih terbatas	Pelatihan dan Uji Sertifikasi

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN
13.6	Jumlah atlet berprestasi	>	Atlet berprestasi internasional	Pembinaan usia muda
13.7	Jumlah prestasi olahraga	>	Bidang atletik dan volley pantai sudash berprestasi nasional dan internasional	Pembinaan usia muda
14	**Statistik**			
14.1	Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi (SIPD)	=	Terisi	Aplikasi kemendagri
14.2	Buku ”kota bima dalam angka”	=	Ada	BPS
14.3	Buku ”PDRB”	=	Ada	BPS
14.4	Tersedianya Data Statistik Sektoral	<	Baru seluruhnya tersedia	
14.5	Terbentuknya Kota Bima Satu Data	<		
16	**Kebudayaan**			
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	<	Sudah ada festival seni dan budaya tapi masih terbatas	Kalender budaya
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	<	Pelestarian situs dan cagar budaya masih belum optimal	Lembaga pengelola
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	<	Inventarisasi dan revitalisasi masih terbatas	Partisipasi lembaga non pemerintah
16.4	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	<	Belum ada cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Lembaga pengelola dan dukungan anggaran
17	**Perpustakaan**			
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	<	Kunjungan perpustakaan masih minim	Minat baca
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	<		

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	<	Ketersediaan perpustakaan yang terbatas		
17.4	Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan/tahun	<	Kunjungan perpustakaan masih minim	Minat baca	
17.5	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	<	Judul buku masih terbatas		
17.6	Jumlah pustakawan, tenaga teknis, dan penilai yang	<	SDM terbatas	Pendidikan dan pelatihan khsusus	
18	**Kearsipan**				
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	<		SOP	
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	<	SDM terbatas	Pendidikan dan pelatihan khsusus	
Layanan Urusan Pilihan					
1. Pariwisata					
1.1	Kunjungan wisata		<	Jumlah kunjungan wisata masih rendah	Daya tarik wisata
1.2	Lama kunjungan Wisata		<	Rata-rata lama kunjungan belum mencapai 2 hari	Daya tarik wisata
1.3	PAD sektor pariwisata		<	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD masih sangat minim	Pengelolaan pariwisata
2	**Pertanian**				
2.1	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB		>	Kontribusi sektor tinggi tapi produktifikas menurun	Ketersediaan lahan, bibit, pupuk dan teknologi
2.2	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB		>	Kontribusi sektor tinggi tapi produktifikas menurun	Ketersediaan lahan, bibit, pupuk dan teknologi
2.3	Kontribusi Pertanian Hortikultura Terhadap PDRB		>	Kontribusi sektor tinggi tapi produktifikas menurun	Ketersediaan lahan, bibit, pupuk dan teknologi
2.3.1	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB		<	Kontribusi sektor tinggi tapi produktifikas menurun	Ketersediaan lahan, bibit, pupuk dan teknologi
2.3.2	Kontribusi Peternakan terhadap PDRB		>	Populasi ternak cukup tersedia	RPH

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	
2.5	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	=		Swasembada pangan	
2.6	Cakupan bina kelompok petani	<		Kelompok tani yang dibina masih terbatas	Data kelompok tani
5	**Perdagangan**				
5.1	Ekspor Bersih Perdagangan	<		Nilai eksport belum terdata	Inventarisasi produk eksport
5.2	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	<		Jumlah kelompok yang dibina terbatas	Ketersediaan anggaran
6	**Perindustrian**				
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	<		Jumlah kelompok yang dibina terbatas	Ketersediaan anggaran
8. Kelautan dan Perikanan					
8.1	Produksi perikanan				
8.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	<		Hasil perikanan tangkap belum optimal	Sarana/prasarana dan teknologi
8.1.2	Produksi Perikanan Budidaya	<		Budidaya perikanan masih rendah	Minat masyarakat dan pembinaan
8.2	Konsumsi ikan	>		Tingkat konsumsi ikan cukup baik	Ketersediaan dan harga ikan
	Jumlah produk Olahan yang dihasilkan	<		Kelompok industri pengolahan hasil perikanan terbatas	Pembinaan dan pendampingan
8.3	Cakupan bina kelompok nelayan			Ada pembinaan kelompok	Ketersediaan anggaran
8.3.1	Jumlah Kelompok Pemula	=		Ada pembinaan kelompok	Ketersediaan anggaran
8.3.2	Jumlah Kelompok Madya	=		Ada pembinaan kelompok	Ketersediaan anggaran
8.3.3	Jumlah Kelompok Utama	<		Ada pembinaan kelompok	Ketersediaan anggaran
8.4	Produksi perikanan kelompok nelayan	<		Jumlah tangkapan ikan belum optimal	Ketersediaan sarana dan
8.6	Rasio kawasan lindung perairan terhadap total luas perairan teritorial	=			Penataan kawasan pesisir dan pantai
8.7	Nilai tukar nelayan	>		Melebihi UMK	Produktifitas
Penunjang Urusan					
1. Perencanaan Pembangunan					
1.1	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	=			Regulasi tentang perencanaan dan penganggaran
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	=			Regulasi tentang perencanaan dan penganggaran
1.3	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	=			Regulasi tentang perencanaan dan penganggaran

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	
1.4	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	=		Regulasi tentang perencanaan dan penganggaran	
1.5	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	=		Regulasi tentang perencanaan dan penganggaran	
1.6	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	=		Regulasi tentang perencanaan dan penganggaran	
1.7	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	<	Masih terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang	Pengendalian pemanfaatan ruang	
2. Keuangan					
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	=	WTP	Kepatutan terhadap regulasi	
2.2	Persentase SILPA	<			
2.3	Persentase SILPA terhadap APBD	<			
2.4	Persentase program/kegiatan yang tidak terlaksana	<			
2.5	Persentase belanja pendidikan (20%)	=		Sudah terpenuhi jika dihitung dengan gaji guru	
2.6	Persentase belanja kesehatan (10%)	<	Hampir mencapai 10%	Kebijakan penganggaran	
2.7	Perbandingan antara belanja langsung dengan belanja tidak langsung	=	Proporsi berimbang	Kapasitas fiskal	
2.9	Penetapan APBD	=	Tepat waktu	Kepatuhan terhadap peraturan	
3.Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan					
3.1	Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan	=		Ketentuan dan SOP	
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	<	Masih banyak ASN yang belum mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	Ketersediaan anggaran	
	Pim TK. II	<			
	Pim TK. III	<			
	Pim TK. IV				
3.4	Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	=		Keterisian jabatan pada Perangkat Daerah	
3.5	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	=		Keterisian jabatan pada Perangkat Daerah	
3.6	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	>		Kelebihan guru tapi penyebaran tidak merata	
4.Penelitian dan pengembangan					

NO	BIDANG URUSAN DAN INDIKATOR KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH	INTERPRETASI BELUM TERCAPAI (<) SESUAI (=) MELAMPAUI (>)	PERMASALAHAN	FAKTOR –FAKTOR PENENTU KEBERHASILAN	
4.1	Persentase implementasi rencana kelitbangan.		<	Belum optimal	Komitmen Penganggaran dan SDM Peneliti
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.		<	Belum optimal	Komitmen Penganggaran dan SDM Peneliti
	Penerapan SIDa:		<	Belum optimal	Komitmen Penganggaran dan SDM Peneliti
4.3	Persentase perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah.		<	Belum optimal	Komitmen Penganggaran dan SDM Peneliti
4.4	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.		<	Belum optimal	Komitmen Penganggaran dan SDM Peneliti

Sumber : *Hasil Pengolahan Data Laporan Kinerja OPD*

4.2. Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu ada tahap selanjutnya yaitu proses pembobotan permasalahan menjadi isu strategis. Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi penyusunan visi dan misi.

Ada lima kriteria pembobotan dalam penyusunan isu strategis pada dokumen RPJMD ini yaitu: (1) Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional: (2) Merupakan tugas

dan tanggung jawab Pemerintah Daerah; (3) Dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat; (4) Memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah dan (5) Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Sebelum dilakukan pembobotan isu strategis provinsi, dilakukan analisis isu strategis pada tingkat nasional dan regional. Berikut ini analsis isu strategis pada tingkat nasional, regional dan Provinsi NTB.

4.2.1. Analisis Isu Strategis Global

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada tahun 1997 di Kula Lumpur, menghasilkan sebuah visi yang sama antar negara negara ASEAN yakni ASEAN vision 2021, dimana tujuan dari visi ini menjadikan kawasan ekonomi Asia Tenggara menjadi lebih makmur dan pengembangan serta pemerataan ekonomi di setiap negara anggota ASEAN.

MEA memiliki empat karakterisik utama yang termuat dalam Cetak Biru MEA yang ditetapkan pada Pertemuan ke-38 ASEAN Economic Ministers (AEM) di Kuala Lumpur, Malaysia bulan Agustus 2006 yaitu (1) pasar tunggal dan basis produksi; (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (3) kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, serta (4) kawasan yang terintegrasi penuh dengan ekonomi global.

a. Pasar Tunggal dan Basis Produksi

ASEAN sebagai pasar tunggal dan basis produksi memiliki lima elemen utama, yaitu (i) aliran bebas barang, (ii) aliran bebas jasa, (iii) aliran bebas investasi, (iv) aliran modal yang lebih bebas, serta (v) aliran bebas tenaga kerja terampil. Disamping itu, pasar tunggal dan basis produksi juga mencakup dua komponen penting lainnya, yaitu *Priority Integration Services (PIS)* dan kerja sama bidang pangan, pertanian, dan kehutanan.

b. Kawasan Ekonomi yang Kompetitif

Dalam upaya menciptakan sebuah kawasan yang kompetitif, ASEAN telah menetapkan beberapa sektor kerja sama yang perlu ditingkatkan, antara lain: perlindungan konsumen, hak kekayaan intelektual, pengembangan infrastruktur, perpajakan, dan e-commerce.

c. Pembangunan Ekonomi yang setara

MEA menguraikan rencana kerja strategis untuk pemerataan pembangunan ekonomi melalui: Pengembangan UKM dan Inisiatif Integrasi ASEAN.

d. Integrasi ke dalam Ekonomi Global

ASEAN beroperasi dalam lingkungan global yang terus berubah, dengan pasar yang saling tergantung dan industri yang menglobal. Agar para pelaku usaha ASEAN dapat bersaing secara internasional, dan menjadikan ASEAN sebagai bagian yang lebih dinamis dan kuat dalam mata rantai pasokan global *(global supply chain),* serta agar pasar ASEAN tetap menarik bagi para investor asing, maka sangat penting bagi ASEAN untuk melihat kawasan lain di luar MEA.

Adanya MEA bisa menjadi peluang sekaligus tantangan dan ancaman bagi Indonesia termasuk Kota Bima, hal ini terkait dengan terbukanya pasar bagi pasar bebas dalam satu basis produksi. Tantangan utama dari MEA adalah bagaimana menciptakan manusia yang bisa bersaing, produk yang bermutu dan berdaya saing serta mengembangkan industri yang berorientasi nilai tambah.

Oleh karena itu hilirasi produk dalam industri menjadi sangat penting, bagaimana hilirisasi produk menjadi kunci dalam perekonomian. Bagaimana bahan baku tidak selalu dijadikan bahan ekspor namun dapat diolah sedemikian rupa sehingga dapat menjadi produk yang memiliki nilai yang jauh lebih tinggi. Selain itu industri harus dapat menciptakan produk unggulan, selain untuk tujuan ekspor juga untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri di hilir, dengan demikian diharapkan impor barang jadi bisa berkurang.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan agar dapat bersaing dalam MEA, yaitu:

- Meningkatkan kualitas dan daya saing produk unggulan daerah
- Mendorong peningkatan investasi di sektor-sektor unggulan daerah yang dapat menciptakan nilai tambah
- Meningkatkan mutu dan daya saing manusia baik dari sisi pendidikan maupun keterampilan
- Menyediakan infrastruktur dan sarana dan prasarana pendukung

- Meningkatkan sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah

e. *Sustainable Development Goals (SDGs)*

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan deklarasi milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara pada tahun 2015. Sejak disepakatinya pada bulan September 2000, MDGs telah menjadi suatu paradigma pembangunan hampir seluruh negara-negara di dunia. MDGs sendiri memiliki 8 goal, 17 target dan 67 indikator dan telah berakhir pada tahun 2015. Selanjutnya sebagai tindak lanjut pelaksanaan MDGs muncul istilah baru yang disebut dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau dikenal juga dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).



Pada bulan September 2015, Sidang Umum PBB yang diikuti oleh 159 Kepala Negara, termasuk Indonesia, telah menyepakati Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals (SDGs)* menjadi agenda global 2030. TPB/SDGs tersebut berisikan 17 Goals dan 169 Target untuk periode pelaksanaan tahun 2015-2030. Sejalan dengan perumusan TPB/SDGs di tingkat global, Indonesia juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPMN) tahun 2015-2019, sehingga substansi yang terkandung dalam TPB/SDGs telah selaras dengan RPJMN yang merupakan penjabaran Nawacita sebagai Visi dan Misi Presiden. Hal ini diperkuat dengan ditetapkannya Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berikut ini 17 *goals* yang diusung dalam SDGs yang harus dijadikan perhatian dalam perencanaan pembangunan di daerah termasuk indikator yang digunakan.

1) Tujuan 1. Tanpa Kemiskinan *(No Poverty-End poverty in all its forms everywhere)*

2) Tujuan 2. Tanpa Kelaparan *(zero hunger- End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture)*
3) Tujuan 3. Kehidupan Sehat dan Sejahtera *(Good Health and well-being- Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages)*
4) Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas *(Quality Education- Ensure inclusive and quality education for all and promote lifelong learning)*
5) Tujuan 5. Kesetaraan Gender *(Gender Equality- Achieve gender equality and empower all women and girls)*
6) Tujuan 6. Air Bersih dan Sanitasi Layak *(Clean Water and Sanitaton- Ensure access to water and sanitation for all)*
7) Tujuan 7. Energi Bersih dan Terjangkau *(Affordable and Clean Energy- Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy for all)*
8) Tujuan 8. Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi *(Decent Work and Economic Growth- Promote inclusive and sustainable economic growth, employment and decent work for all)*
9) Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur *(Industri, Innovation and Infrastructure- Build resilient infrastructure, promote sustainable industrialization and foster innovation)*
10) Tujuan 10. Berkurangnya Kesenjangan *(Reduced Inequalities- Reduce inequality within and among countries)*
11) Tujuan 11. Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan *(Sustainable Cities and Communities- Make cities inclusive, safe, resilient and sustainable)*
12) Tujuan 12. Konsumsi dan Produksi yang Berkelanjutan *(Responsible Consumption and Production- Ensure sustainable consumption and production patterns)*
13) Tujuan 13. Penanganan Perubahan Iklim *(Climate Action- Take urgent action to combat climate change and its impacts)*
14) Tujuan 14. Ekosistem Lautan *(Life Below Water- Conserve and sustainably use the oceans, seas and marine resources)*
15) Tujuan 15. Ekosistem Daratan *(Life on Land- Sustainably manage forests, combat desertification, halt and reverse land degradation, halt biodiversity loss)*

16) Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh *(Peace, Justice and Strong Institution- Promote just, peaceful and inclusive societies)*
17) Tujuan 17. Kemitraan untuk Mencapai Tujuan *(Partnerships for the Goals- Revitalize the global partnership for sustainable development)*

Pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen dan keseriusan dalam melaksanakan agenda Sustainable Development Goals (SDGs). Hal ini terlihat pada terintegrasinya 169 indikator SDGs ke dalam RPJMN 2020-2024 dan penerbitan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Perpres SDGs).

Upaya Indonesia untuk melaksanakan agenda SDG's dibangun berdasarkan pengalaman atas pelaksanaan agenda Millenium Development Goals (MDGs) yang lalu. Selama 15 tahun pelaksanaan MDGs, Indonesia berhasil mencapai 49 dari 67 target indikator yang ditetapkan. Pelaksanaan agenda SDGs menjadi langkah strategis pertama pembangunan nasional. Dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional.

Perpres SDGs tersebut menekankan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, melalui empat platform partisipasi, yaitu pemerintah dan parlemen, filantropi dan bisnis, ormas, akademisi dan Pakar dalam rangka menyukseskan pelaksanaan agenda SDGs.

Selain itu, Perpres SDGs bertujuan menjaga peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Tabel 4.8

Keterkaitan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dengan Indikator Kinerja Pemerintah Daerah

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.7	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Cakupan jenis pelayanan dasar SPM Sosial	sosial
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Meningkat menjadi 95%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.1.5	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		tenaga kerja
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Disesuaikan dengan SPM Sosial	Meningkat menjadi 17,12%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.6.9	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	SOSIAL	sosial

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Menurun menjadi 2,8 juta	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		sosial
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Meningkat menjadi 70%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KESEHATAN	kesehatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Meningkat menjadi 63%.	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	KESEHATAN	kesehatan, PPKB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Meningkat menjadi 18,6 juta	Pusat	Provinsi		Kota	A.2.UWD.4.6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		perumahan rakyat & kawasan permukiman
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Meningkat menjadi 94,78%	Pusat		Kabupaten	Kota	A.2.UWD.1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	PENDIDIKAN	pendidikan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Meningkat menjadi 82,2%	Pusat		Kabupaten	Kota	A.2.UWD.1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	PENDIDIKAN	pendidikan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Meningkat menjadi 77,4%.	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran		administrasi kependudukan & catatan sipil

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 100%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UP.4.1	Persentase rumah tangga penggunaa listrik		energi & sumber daya mineral
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Meningkat menjadi 39 daerah	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Meningkat menjadi 151 ribu	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SOSIAL	sosial, trantiblinmas
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SOSIAL	sosial
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah / Madrasah Aman Bencana)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkat menjadi 450	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Menurun menjadi 118,6	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				sosial

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.PU.2.5; A.2.PU.2.6	Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%)		sosial
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		pangan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Menurun menjadi 17%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.15	Prevalensi balita gizi kurang	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.30	Penanganan daerah rawan pangan		pangan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Menurun menjadi 8,5 %	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.15	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		pangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KESEHATAN	kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Menurun menjadi 28%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KESEHATAN	kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM. 14/15	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Menurun menjadi 28%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KESEHATAN	kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Meningkat menjadi 50%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KESEHATAN	kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UP.8.2	Konsumsi ikan		pangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Menurun menjadi 306	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.5.	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Meningkat menjadi 95%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85 %	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Menurun menjadi 24	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Meningkat menjadi 95%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.13	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Menurun menjadi <0,5%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.3	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Menurun menjadi 245	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.26	Angka kejadian Malaria		kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Meningkat menjadi 300	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Meningkat menjadi 34 provinsi	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Meningkat menjadi 35.	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Menurun menjadi 5,4%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Menurun menjadi 24,3%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Meningkat menjadi 280	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	Menurun menjadi angka 0,02%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Meningkat menjadi 66%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KESEHATAN	kesehatan, PPKB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	KESEHATAN	kesehatan, PPKB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Meningkat menjadi 23,5%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	KESEHATAN	kesehatan, PPKB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Menurun menjadi 38	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	KESEHATAN	kesehatan, PPKB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Menurun menjadi 2,28	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.2	Total Fertility Rate (TFR)		kesehatan, PPKB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Menurun menjadi 9,91%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Meningkat menjadi minimal 95%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	KESEHATAN	kesehatan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			Kabupaten	Kota			PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	Meningkat menjadi 84,2%	Pusat		Kabupaten	Kota				pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Meningkat menjadi 81%	Pusat		Kabupaten	Kota				pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Meningkat menjadi 114,09%	Pusat		Kabupaten	Kota	A.2.UWD.1.2	Angka partisipasi kasar	PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Meningkat menjadi 106,94%	Pusat		Kabupaten	Kota	A.2.UWD.1.2	Angka partisipasi kasar	PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.12	Angka rata-rata lama sekolah	PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Meningkat menjadi 77,2%			Kabupaten	Kota	A.2.UWD.1.2	Angka partisipasi kasar	PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.1.9	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		tenaga kerja
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/ sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.1.4.1; A.2.UWD.1.4.2; A.2.UWD.1.4.3	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Meningkat menjadi 96,1%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.1.18	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.1.17	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota		Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	bertambah sebanyak 16	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.2.4	Rasio KDRT		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Meningkat menjadi 70%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	Meningkat menjadi 21 tahun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.30	Rata-rata usia kawin pertama wanita		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Menurun menjadi 38 tahun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		PPKB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, PPKB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Menurun menjadi 9,9%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.8.13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		kesehatan, PPKB
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Meningkat menjadi 85%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kesehatan, PPKB
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.10.3	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		komunikasi & informatika

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.1.15	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.1.7	Persentase rumah tinggal bersanitasi	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Air		lingkungan hidup
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.5.6	Peningkatan Indeks Kualitas Air		lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				lingkungan hidup
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kehutanan, tata ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	8 WS	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	10 WS (skala nasional)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				kehutanan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	10-16%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				energi & sumber daya mineral
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				energi & sumber daya mineral
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.1	Pertumbuhan PDRB		statistik

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.3	PDRB per Kapita		statistik
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.21	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja		tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	51%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	25%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				koperasi, usaha kecil, & menengah

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.19	Tingkat pengangguran terbuka		tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Meningkat menjadi 8%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.39	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		pariwisata

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UP.1.1	Kunjungan wisata		pariwisata
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UP.1.1	Kunjungan wisata		pariwisata

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UP.1.3	PAD sektor pariwisata		pariwisata
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				penanaman modal
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Menurun (mendekat)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				penanaman modal

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				koperasi, usaha kecil, & menengah
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	1000 Km (skala nasional)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	Bertambah 3.258 km	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				perhubungan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	Meningkat	Pusat	Provinsi	kabupaten	Kota	A.2.UWND.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	24 pelabuhan (skala nasional)	Pusat	Provinsi	kabupaten	Kota	A.2.UWND.9.4	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.42	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		perindustrian

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.42	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		perindustrian
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				tenaga kerja
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				perindustrian

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				perindustrian
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	kabupaten	Kota				pendidikan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.10.3	Presentase penduduk yang menggunakan hp/telepon		komunikasi & informatika
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Menurun menjadi 0,36	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.4	Indeks Gini		sosial
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.7	Presentase penduduk di atas garis kemiskinan		sosial

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				sosial
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).	Meningkat menjadi 87	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				ketentera man, ketertiban umum, & perlindun gan masyarak at

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.1.5	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		tenaga kerja
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	3,7 juta rumah tangga			Kabupaten	Kota	A.2.UWD.4.1	Rasio rumah layak huni	PERUMAHAN RAKYAT	perumahan rakyat & kawasan permukiman

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)	Pusat	Provinsi	kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)	Pusat	Provinsi		Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Meningkat menjadi 32%	Pusat	Provinsi		Kota	A.2.UWND.9.9	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		perhubungan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	ada	Pusat	Provinsi		Kota				perhubungan
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.	Minimal 20 kota sedang (skala nasional)	Pusat	Provinsi		Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	5 metropolitan (skala nasional)	Pusat	Provinsi	kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat	Pusat	Provinsi		Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana t	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Menurun menjadi 30%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience).	Meningkat	Pusat	Provinsi		Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Meningkat menjadi 80%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.1.17	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				lingkungan hidup
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.2.1	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat/ada				Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.5.11	Jumlah limbah B3 yang dikelola		lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	20 ton per hari (skala nasional)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.WND.5.44	Presentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		lingkungan hidup
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				lingkungan hidup
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				lingkungan hidup
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota			KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.2.5	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara		kehutanan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	5,5 juta ha (skala nasional)	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWD.3.1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Meningkat	Pusat	Provinsi	kabupaten	kota				lingkungan hidup
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				ketentraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				ketentera man, ketertiban umum, & perlindun gan masyarak at
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				ketentera man, ketertiban umum, & perlindun gan masyarak at

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Meningkat	Pusat	Provinsi	kabupaten	kota				ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.2.4	Rasio KDRT		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Menurun	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Pusat	Provinsi	kabupaten	kota				pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	Meningkat menjadi 4,0	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				statistik

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Keuangan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.27	Opini BPK		Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Meningkat menjadi: Kementerian /Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/ Kota: 50%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Keuangan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Menjadi menjadi 80%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Meningkatk menjadi: Kementerian /Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/ Kota: 45%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/ Kota: 80%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Balitbang Daerah
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.2.2	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.2.1	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			Kabupaten	Kota	A.2.UWND.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran		administrasi kependudukan & catatan sipil

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 77,4%			Kabupaten	Kota	A.2.UWND.6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran		administrasi kependudukan & catatan sipil
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85%			Kabupaten	Kota	A.2.UWND.6.2	Rasio bayi berakte kelahiran		administrasi kependudukan & catatan sipil

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				komunikasi & informatika
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.1.AKM.26	Persentase PAD terhadap pendapatan		Keuangan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Di atas 12%	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Keuangan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota	A.2.UWND.10.4	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				Keuangan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				statistik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				statistik

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				statistik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	kabupaten	Kota				Perencanaan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				statistik

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	KEWENANG-AN PUSAT	KEWENANG-AN PROVINSI	KEWENANG-AN KABUPATEN	KEWENANGAN KOTA	NO. INDIKATOR RPJMD	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				statistik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pusat	Provinsi	Kabupaten	Kota				statistik

Sumber: Hasil Analisis

f. *Corona Virus Disease 2019*

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) pertama kali ditemukan di kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan *lockdown* dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini.

COVID-19 telah menimbulkan dampak yang sangat besar terhadap perekonomian dunia, dimana pertumbuhan perekonomian dunia terkoreksi tajam dengan ancaman resesi. Indonesia mengeluarkan kebijakan keuangan Negara dan stabilitas keuangan untuk penanganan Covid-19. Hal ini dilakukan Pemerintah untuk mengurangi dampak yang buruk di masyarakat.

4.2.2. Analisis Isu Strategis Nasional

Dalam Buku III RPJMN Tahun 2020-2024 tema pembangunan pada wilayan Nusa Tenggara diarahkan pada optimalisasi keunggulan wilayah dalam perikanan, perkebunan, peternakan, pertambangan dan pariwisata yang mengutamakan pendekatan gugus pulau. Kebijakan pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri *Meeting, Incentive, Convetion, Exhibition* (MICE); industri kreatif berbasis budaya, percepatan pembangunan perekonomian berbasis maritim (kelautan) melalui pengembangan industri perikanan, garam, dan rumput laut; pengembangan industri berbasis peternakan sapi dan perkebunan jagung; serta pengembangan industri mangan dan tembaga.

Strategi pembangunan Wilayah Nusa Tenggara akan mengutamalan pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut :
(1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatkan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan,

pendidikan vokasional pertanian, perikanan pertambangan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilakukan dengan fokus pada pemenuhan pelayanan dasar, pengembangan ekonomi lokal berbasis komoditas unggulan dengan memanfaatkan teknologi digital, dan pengembangan infrastruktur; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilaksanakan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020-2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; dan (f) pelaksanaan pembangunan afirmatif.

(2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan komoditas unggulan Wilayah Nusa Tenggara yaitu lada, pala, cengkeh, kopi, kelapa, tebu, garam, tembaga, emas, perikanan budidaya, dan perikanan tangkap; (b) pengembangan sentra perikanan dan industri pengolahan hasil perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi peternakan dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN, (d) revitalisasi kawasan transmigrasi; (e) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (f) pengembangan kawasan strategis, dan pengolahan sumber daya alam berupa perkebunan dan pertambangan; (g) destinasi pariwisata alam, budaya dan sejarah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal melalui sector jasa pada Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); (h) pengembangan kawasan perkotaan; (i) pengembangan kawasan pusat pertumbuhan baru dengan bertumpu pada skema investasi swasta; (j) peningkatan peran dan efisiensi pelayanan kota besar, menengah, dan kecil untuk meningkatkan sinergi pembangunan perkotaan dan perdesaan; dan (k) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

(3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar, pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta

pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; dan (c) percepatan penerapan SPM, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antardaerah.

(4) Penguatan konektivitas dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antarmoda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi; (b) penyediaan pusat perdagangan komoditas mentah dan barang hasil olahan di Nusa Tenggara; dan (c) pengembangan jaringan telekomunikasi dan informasi.

(5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapaitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan utara dan selatan Kepulauan Nusa Tenggara dan pemantapan pemulihan pascabencana di Pulau Lombok dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana; dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.

Selanjutnya, dalam RPJMN Tahun 2020-2024, terdapat sembilan program prioritas atau dikenal dengan NAWACITA KEDUA yang harus diperhatikan yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya
7. Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Disamping itu terdapat 5 (lima) arahan Presiden Republik Indonesia dalam RPJMN Tahun 2020-2024, dengan 60 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan dalam implementasi arahan tersebut. Dari 60 indikator tersebut, terdapat sejumlah indikator dan target yang menjadi isu strategis bagi Kota Bima untuk menjadi perhatian dalam perumusan rencana pembangunan jangka menengah Kota Bima. Tabel berikut menunjukkan rincian arahan Presiden beserta indikator kinerja dan target nasional yang memerlukan dukungan daerah.

Tabel 4.9.

Arahan Presiden Beserta Indikator Kinerja dan Target Nasional yang Memerlukan Dukungan Daerah

NASIONAL			DAERAH
	ARAHAN PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024	**TARGET**	**PERLU DUKUNGAN DAERAH**
A	**PEMBANGUNAN SDM**		
1	Penduduk memiliki NIK, akta kelahiran, buku nikah, pencatatan perceraian, kematian serta penyebab kematian	100%	√
2	Penduduk mendapatkan perlindungan social	98%	√
3	Kelahiran hidup angka kematian ibu	183 per 100.000	√
4	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	9,18 tahun	√
5	Rumah tangga miskin dan rentan memiliki asset produktif	40%	√
6	Indeks Perlindungan Anak	73,49	√
7	Indeks Pembangunan Pemuda	57,67	√
8	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,39	√
9	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	74,18	√
10	Angkatan kerja berpendidikan	49,8%	√

NASIONAL			DAERAH
	ARAHAN PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024	**TARGET**	**PERLU DUKUNGAN DAERAH**
	menengah ke atas		
11	Lulusan Perguruan Tinggi langsung Bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan	66,7%	
12	Hasil inovasi Prioritas Riset Nasional	40%	
13	Medali Emas baik Olympic Games maupun Paralympic Games tahun 2024	3	
14	Pekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi	50%	
15	Indeks Capaian Revolusi Mental	74,3	√
16	Indeks Pembangunan Kebudayaan	62,7	√
17	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,65	√
18	Indeks Kerukunan Umat Beragama	75,8	√
19	Nilai Budaya Literasi	71,0	√
20	Indeks Pembangunan Keluarga	61,0	√
21	Median usia kawin pertama Perempuan	22,1	√
B	**PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR**		
1	**Infrastruktur Pelayanan Dasar**		
-	Rumah Tangga Menempati Hunian Layak	70%	√
-	Hunian dengan Akses Air Minum Layak » Termasuk Akses Aman 15%	100%	√
-	Hunian dengan Akses Sanitasi Layak »Termasuk Akses Aman 15%	90%	√
-	Hunian dengan Akses Air Minum	30%	√

NASIONAL			DAERAH
	ARAHAN PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024	**TARGET**	**PERLU DUKUNGAN DAERAH**
	Perpipaan		
-	Jaringan Irigasi Baru	500 Ribu ha	√
-	Tambahan Air Baku Industri & Domestik	50 m3/detik	√
-	Bendungan Multiguna	63	√
-	Produktivitas Air untuk Padi	3 m3/kg	√
-	Provinsi berisiko bencana tinggi mengalami peningkatan ketahanan bencana	20	√
2	**Infrastruktur Ekonomi**		
-	KA Kecepatan Tinggi Pulau Jawa	Jakarta-Semarang & Jakarta-Bandung	
-	Kereta Api	Makassar - Parepare	
-	Meningkatkan Standarisasi Kinerja dan Pengelolaan Pelabuhan Terpadu	Jaringan Pelabuhan Utama Terpadu	
-	Jembatan Udara	43 Rute	
-	Jalan Tol Baru dan/atau Beroperasi	2.500 km	
-	Jalan Nasional Baru	3.000 km	
-	Kondisi Mantap Jalan Nasional	97%	√
-	Waktu Tempuh pada Jalan Lintas Utama Pulau	1,9 jam/100 km	√
-	Rute Pelayaran yang Saling Terhubung (loop)	27%	√

NASIONAL			DAERAH
	ARAHAN PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024	**TARGET**	**PERLU DUKUNGAN DAERAH**
3	**Infrastruktur Perkotaan**		
-	Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan	6	
-	Hunian Dengan Akses Sampah Terkelola Baik	80% Penanganan dan 20% Pengurangan	√
	Energi Dan Ketenagalistrikan		
	Konsumsi Listrik Per Kapita Nasional	1.400 kWh	√
	Rasio Elektrifikasi	100%	√
	Sambungan Rumah Baru Jaringan Gas Kota	4 Juta	
	Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak (2 Grass Root Refinery/GRR dan 4 Refinery Development Master Plan/RDMP)	6 Unit	
	Transformasi Digital		
	Desa Terjangkau Infrastruktur Jaringan Bergerak Pita Lebar	95%	
	Cakupan Jaringan Tetap Pita Lebar	60% Kecamatan	√
	Populasi Terjangkau Siaran Digital	80%	√
	Unicorn Baru Start Up	3	
C	**PENYEDERHANAAN REGULASI**		
-	177 UU terkait Cipta Lapangan Kerja (termasuk regulasi terkait kemudahan dan perlindungan	RUU Cipta Lapangan Kerja	

NASIONAL			DAERAH
	ARAHAN PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024	**TARGET**	**PERLU DUKUNGAN DAERAH**
	UMKM)		
-	73 Peringkat Kemudahan Berusaha di Indonesia (peringkat EoDB)	40 menuju	
D	**PENYEDERHANAAN BIROKRASI**		
-	waktu memulai usaha (EoDB)	4 hari	
-	Indeks Maturitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	≥ 2,6 (predikat baik)	√
-	Waktu ratarata pengeluaran barang (dwelling time)	2,9-3,2 hari	
E	**TRANSFORMASI EKONOMI**		
	Industrialisasi		
-	Kontribusi PDB industri pengolahan	21,0 persen	√
-	Kontribusi PDB industri pengolahan non migas	18,9 persen	√
-	Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja	15,7 persen	√
	Pengembangan Destinasi Unggulan		
-	Devisa pariwisata	USD 30 miliar	√
	Penguatan Ekonomi Kreatif Dan Ekonomi Digital		
-	Nilai tambah ekonomi kreatif	Rp 1.846	√

NASIONAL			DAERAH
	ARAHAN PRESIDEN DALAM RPJMN 2020-2024	**TARGET**	**PERLU DUKUNGAN DAERAH**
		triliun	
-	Nilai transaksi e-commerce	Rp 600 triliun	

Sumber: RPJMN 2020-2024

Disamping 5 (lima) arahan Presiden Republik Indonesia tersebut, dalam penyusunan perubahan RPJMD ini juga harus memperhatikan 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional sebagai satu kesatuan dalam system perencanaan nasional yang saling terintegrasi.

Tabel 4.10.

Agenda Pembangunan Nasional yang berpengaruh terhadap Perencanaan Pembangunan Kota Bima

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
I	**Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas Dan Berkeadilan**				
A	**Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan**				
I.	**Pemenuhan kebutuhan energy dengan mengutamakan peningkatan energy terbarukan**				
2	Peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	Luas minimal kawasan berfungsi lindung (juta ha)	55	65	
		Pembangunan jaringan irigasi baru (%)			
		Peningkatanketersediaan air baku domestic dan industry (kumulatif) (m3/detik)	81,4	131,4	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	63	
3	Peningkatan ketersediaan, akses dan kualitas konsumsi pangan	Skor Pola Pangan Harapan	86,4	95,2	
		Angka kecukupan energy (AKE) (kkal/kapita/hari)	2.121	2.1	
		Angka kecukupan protein (AKP) (gram/kapita/hari)	62,	57	
		Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	6,7	5	
		Prevalensi Penduduk dengan Kerawanan Pangan	5,8	4	
		Konsumsi ikan	50,7	62	
		Konsumsi daging	13,2	14,6	
		Konsumsi protein asal ternak	10,9	11	
		Konsumsi sayur dan buah			
		Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan	94	85-95	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Luas lahan Produksi beras biofortifikasi (ha padi)	195	200	
		Akses terhadap beras biofortifikasi dan fortifikasi bagi keluarga yang kurang mampu dan kurang gizi	480 ton	100 % penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)	
		Persentase pangsa pangan organik (%)	2	20	
		Penggunaan benih bersertifikat (%)	53	80	
		Ketersediaan beras** (juta ton)	38,4	46,8	
		Ketersediaan protein hewani (juta ton)	2,4	2,9	
		Produksi jagung (juta ton)	24,8	35,3	
		Produksi daging (juta ton)	3,8	4,9	
		Produksi umbi-umbian (juta ton)	23,3	25,5	
		Teknologi yang diterapkan oleh petani (%)	65	80-95	
		Nilai tambah per tenaga kerja pertanian (2.3.1*) (Rp.juta/tenaga kerja)	46,9	59,9	
		Nilai tukar petani	100	105	
		Persentase lahan baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan	50	100	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) (%)			
		Jumlah varietas unggul tanaman dan hewan untuk pangan yang dilepas (2.5.1*)	30 varietas unggul tanaman baru dan 8 galur hewan ternak	30 varietas unggul tanaman baru dan 8 galur hewan ternak	
		Sumber daya genetika tanaman dan hewan sumber pangan yang terlindungi/tersedia (2.5.2*) (aksesi)	4.250	4.25	
		Global food security index	62,6	69,8	
4	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan, dan kelautan	Penjaminan akurasi pendataan stok sumberdaya ikan dan pemanfaatan WPP	11 WPP	11 WPP	
		Model percontohan penguatan tata kelola WPP (14.2.1(b))	3 WPP	11 WPP	
		Luas kawasan konservasi laut/perairan (14.5.1*) (juta ha)	22,7	26,9	
		Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir	24 RZ	102 RZ (kumulatif)	
		Pemetaan bathimetri prioritas skala 1:50.000 (km2)	5.689	50	
		Produksi ikan (juta ton)	14,8	20,4	
		Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis	53,6	80	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		yang aman (14.4.1*) (%)			
		Produksi rumput laut (juta ton)	9,9	12,3	
		Produksi garam (juta ton)	2,8	3,4	
		Jumlah pendanaan pelaku usaha kelautan dan perikanan skala kecil (Rp.triliun)	2,8	4,2	
		Jumlah hasil riset kemaritiman, kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan	5	15	
		Kawasan klaster sentra produksi perikanan budidaya unggulan	10	50	
		Nilai tukar nelayan	100	107	
		Nilai tukar pembudidaya ikan	100	105	
		Persentase Kepatuhan (Compliance) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	93,5	98	
B	**Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian**				
1	Penguatan kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan	Rasio kewirausahaan nasional (%)	3,3	3,9	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
	Menengah (UMKM), dan Koperasi				
		Kontribusi UMKM terhadap PDB (%)	57,2	65	
		Kontribusi koperasi terhadap PDB (%)	5,1	5,5	
		Proprosi Industri Mikro Kecil (IMK) yang menjalin kemitraan (%)	8,1	11	
		Proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal (8.10.1(b)) (%)	24,7	30,8	
		Rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan (%)	19,7	22	
		Proporsi nilai penyaluran pinjaman perbankan kepada IKM (9.3.2*) (%)	2,4	5	
		Proporsi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Sektor Produksi (%)	50,4	80	
		Nilai penyaluran KUR (Rp. Triliun)	140	325	
		Jumlah koperasi modern yang dikembangkan (unit)	0	500 (kumulatif)	
		Pertumbuhan wirausaha (%)	1,7	4	
		Jumlah sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) baru di luar Jawa	22 (kumulatif)	30 (kumulatif)	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		yang beroperasi (sentra)			
		Proporsi nilai tambah IKM terhadap total nilai tambah industri pengolahan non migas (9.3.1*) (%)	18,5	20	
		Kontribusi usaha sosial (% PDB)	1,9	2,5	
		Penumbuhan *start-up* (unit) h)	748	3500 (kumulatif)	
2	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Pertumbuhan PDB industri pengolahan (9.2.1(a)) (%)	3,9	8,1	
		Pertumbuhan PDB industri pengolahan non migas (%)	4,5	8,4	
		Kontribusi PDB industri pengolahan (9.2.1*) (%)	19,9	21,0	
		Kontribusi PDB industri pengolahan non migas (%)	17,6	18,9	
		Pertumbuhan PDB pertanian (%)	3,5	4,1	
		Pertumbuhan perdagangan besar dan eceran, bukan mobil dan sepeda motor (%)			
		Pertumbuhan PDB Perkebunan (%)	4,9	5,0	
		Peningkatan Produksi Kakao (%)	1,7	2,7	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Peningkatan Produksi Kopi (%)	1,4	1,5	
		Peningkatan Produksi Kelapa Sawit (%)	5,7	6,0	
		Pertumbuhan PDB Hortikultura (%)	5,8	6,0	
		Peningkatan Produksi Buah-buahan (%)	3,5	5,7	
		Peningkatan Produksi Sayuran (%)	2,5	3,1	
		Peningkatan Produksi Florikultura (%)	5,0	5,5	
		Kontribusi PDB kemaritiman (%)	6,0	7,8	
		Pertumbuhan PDB perikanan (%)	5,2	7,8	
		Produksi kayu terutama dari hutan produksi (juta m3/tahun)	45	60	
		Kontribusi PDB pariwisata (8.9.1*) (%)	4,8	5,5	
		Percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas (destinasi)	4 (kumulatif)	10 (kumulatif)	
		Destinasi wisata alam berkelanjutan berbasiskan kawasan hutan prioritas	9	25 (kumulatif)	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Destinasi wisata *global geopark* (*global geopark)*	4	12 (kumulatif)	
		Destinasi wisata bahari (destinasi)	6	6 (kumulatif)	
		Nilai tambah ekonomi kreatif (Rp Triliun)	989	1.846	
		Jumlah kab/kota kreatif yang dikembangkan (kab/kota)	20	20 (kumulatif)	
		Jumlah kawasan dan klaster kreatif yang dikembangkan (lokasi)	N/A	11	
		Revitalisasi ruang kreatif (unit)	39	154 (kumulatif	
		Kontribusi ekonomi digital (%)	2,5	4,7	
		Pertumbuhan PDB informasi dan telekomunikasi (%)	9,3	11,2	
		Nilai transaksi *e-commerce* (Rp Triliun)	170	600	
		Penyediaan lapangan kerja per tahun (juta orang)	2,5	2,6-3,0	
		Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja (8.2.1*) (%)	3,0-4,0	3,7-4,5	
		Jumlah tenaga kerja industri pengolahan (juta orang)	18,9	22,5	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja (9.2.2*) (%)	14,9	15,7	
		Jumlah tenaga kerja pariwisata (8.9.2*) (juta orang)	13	15	
		Jumlah tenaga kerja ekonomi kreatif (juta orang)	19	21	
		Persentase pekerja migran Indonesia yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum terhadap total pekerja migran (10.7.2(b)) (%)	57	70	
		Pertumbuhan investasi (PMTB) (%)	4,7	8,4	
		Peringkat kemudahan berusaha di Indonesia (ranking EoDB) yang ditunjukkan antara lain dengan meningkatnya indikator memulai usaha:	73	Menuju 40	
		a. jumlah prosedur	11	5	
		b. waktu (hari)	13	4	
		Nilai realisasi PMA dan PMDN (Rp Triliun)	792,0	1.5	
		Kontribusi PMDN terhadap total realisasi PMA dan PMDN (%)	47,1	49,5	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Nilai realisasi PMA dan PMDN industri pengolahan (Rp Triliun)	198,0	782,0	
		Kontribusi realisasi investasi luar Jawa (%)	45,1	49,7	
		Penerapan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Bertahap	Selesai	
		Belanja modal (*Capex*) BUMN (Rp Triliun)	488	680	
		Profitabilitas BUMN (Rp Triliun)	171	325	
		Pembentukan holding BUMN (*holding*)	1	3	
		Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri (negara)	30	54	
		Jumlah Kawasan Industri (KI) prioritas di luar Jawa yang beroperasi dan meningkatkan investasi (KI)	8 (kumulatif)	9 (kumulatif)	
		Jumlah Kawasan Industri (KI) yang dikembangkan (KI)	15 (kumulatif)	18 (kumulatif)	
		Fasilitas percepatan pembangunan smelter di luar Jawa (unit)	2	31 (kumulatif)	
		Fasilitasi kawasan industri dengan zona tematik (kawasan)	N/A	3 (kumulatif)	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Jumlah Daerah Tertib Ukur (DTU)	N/A	10	
		Indeks persepsi persaingan usaha	4,7	5,0	
		Persentase SNI bidang industri yang diterapkan (%)	3	20	
3	Peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN)	Neraca perdagangan (USD Miliar)	-3,1	15,0	
		Pertumbuhan ekspor riil barang dan jasa (%)	-1,2	6,2	
		Pertumbuhan ekspor nonmigas (%)	-5,7	9,8	
		Ekspor hasil pertanian (FOB) (US$ Miliar)	3,2	5,5	
		Ekspor hasil perikanan (USD Miliar)	4,4	8,0	
		Pertumbuhan ekspor industri pengolahan (%)	-3,6	10,1	
		Nilai ekspor produk industri pengolahan (USD Miliar)	115,7	183,4	
		Kontribusi Ekspor Produk Industri berteknologi tinggi (9B.1) (%)	10,7	13,0	
		Rasio ekspor jasa terhadap PDB	2,6	3,0	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		(BoP) (%)			
		Nilai devisa pariwisata (8.9.1(c)) (USD Miliar)	19,3	30	
		Jumlah wisatawan mancanegara (8.9.1(a)) (juta kunjungan)	16,3	22,3	
		Jumlah warisan budaya yang diregenerasi (cultural heritage regeneration) (lokasi)	N/A	20 (kumulatif)	
		Nilai ekspor ekonomi kreatif (USD Miliar)	19,8	24,5	
		Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) (Rerata Tertimbang) (%)	43,3	50	
		Jumlah produk tersertifikasi TKDN ≥ 25% yang masih berlaku	6.097	8.4	
		Jumlah perjalanan wisatawan nusantara (8.9.1(b) (juta perjalanan)	303,4	350-400	
		Jumlah promosi *Tourism, Trade and Investment (TTI) terintegrasi*	6	8	
		Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan nilai perdagangan dengan Indonesia	71	98	
		Jumlah negara akreditasi yang mencapai target peningkatan jumlah wisatawan mancanegara ke	84	94	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Indonesia			
		Jumlah ratifikasi perjanjian kerjasama ekonomi internasional	4	4	
		Pertumbuhan jumlah produk dalam negeri dalam pengadaan barang/jasa pemerintah (%)	5	5	
		PTA/FTA/CEPA yang disepakati	14 (kumulatif)	40 (kumulatif)	
4	Penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi	Kontribusi sektor jasa keuangan/PDB (%)	4,2	4,4	
		Rasio M2/PDB (%)	38,9	43,2	
		Jumlah ATM per 100.000 penduduk (8.10.1*) (unit)	54,0	57,5	
		Jumlah kantor bank per 100.000 penduduk (8.10.2*) (unit)	15,6	15,3	
		Skema pembiayaan Ekonomi Kreatif berbasis HKI	N/A	1	
		Biaya logistik terhadap PDB (%)	23,2	20	
		Skor *logistic performance index*	3,1	3,5	
		Tingkat Inflasi (%)	2,3	2,7	
		Inflasi pangan bergejolak (%)	4,3	3,1	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Jumlah pelaku kreatif yang difasilitasi infrastruktur TIK (orang)	8,5	43 (kumulatif)	
		Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) ≥ 3.0 (perusahaan)	24	60 (kumulatif)	
		Jumlah perusahaan yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	28	71	
		Jumlah lokasi penerapan *sustainable tourism development (12.b.1) (lokasi)*	12	22	
		Peringkat *Travel and Tourism Competitiveness Index*	40	29-34	
		Rasio perpajakan terhadap PDB (17.1.1(a)) (%)	9,6	10,7-12,3	
		Imbal Hasil (*Yield*) Surat Berharga Negara (%)	7,3	Menurun	
		Rasio TKDD yang berbasis kinerja terhadap TKDD meningkat (%)	10,4	20,6	
		Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax administration system) (%)	0	Selesai	
		Ketersediaan data statistik pariwisata dan ekonomi kreatif	3	3	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		(database)			
		Ketersediaan data statistik *e-commerce (database)*	1	1	
		Pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 dan perbaikan data pangan (database)	2	2 (kumulatif)	
II					
1	Menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah KTI yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa Bali dan Sumatera	Pengembangan Kawasan Strategis			
		Rasio pertumbuhan investasi kawasan (KEK/KI/KSPN) terhadap pertumbuhan investasi	N/A	>1 wilayah (perpulau/provinsi)	
		Jumlah kawasan pusat pertumbuhan yangdifasilitasi dan			

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		dikembangkan			
		a. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)	14 kawasan	18 kawasan	
		b. Kawasan Industri (KI)	8 KI (kumulatif)	27 KI(kumulatif)	
		c. Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP)	3 destinasi	10 destinasi	
		Pengembangan Sektor Unggulan			
		a. Kelapa Sawit (%)	8,6	6,0	
		b. Kelapa (%)	0,0	0,5	
		c. Kakao (%)	0,4	2,7	
		d. Kopi (%)	3,4	1,5	
		e. Karet (%)	3,1	1,9	
		f. Tebu (%)	7,6	8,0	
		g. Lada, Pala, dan Cengkeh (%)	0,0	1,0	
		h. Perikanan Budidaya (ikan dan rumput laut) (%)	0,4	5,3	
		i. Perikanan Tangkap (%)	5,0	5,9	
		Pengembangan Kawasan Perkotaan			

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Jumlah WM di luar Jawa yang direncanakan	3 WM	3 WM	
		Jumlah WM di luar Jawa yang dikembangkan	N/A	6 WM	
		Jumlah wilayah metropolitan Jawa yangditingkatkan kualitasnya	N/A	4 WM	
		Luas area pembangunan Ibu Kota Negara (ha)	0	5.600	
		Jumlah Kota Besar, Sedang, Kecil yangdikembangkan sebagai PKN/PKW	N/A	52	
		Pembangunan kota baru	N/A	4 kota baru	
		Pembangunan Daerah Tertinggal, KawasanPerbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi			
		Perkembangan status pembangunan desa (desa)a)			
		a. Desa Mandiri	1.444	10.559	
		b. Desa Berkembang	54.291	59.879	
		c. Desa Tertinggal	19.152	3.232	
		Penurunan angka kemiskinan desa (%)	12,9	9,9	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Jumlah revitalisasi Bumdes berdasarkan status	187	222	
		a. Bumdes Berkembang	5	10	
		b. Bumdes Maju	600	1.8	
		Jumlah revitalisasi Bumdes Bersama berdasarkanstatus			
		a. Bumdes Bersama Berkembang	200	300	
		b. Bumdes Maju	120	200	
		Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasannegara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tatakelolanya (kecamatan)	187	222	
		Rata-rata nilai Indeks Pengelolaan KawasanPerbatasan (IPKP) di 18 PKSN	0,42	0,52	
		Jumlah daerah tertinggal (kabupaten)	62	37(terentaskan25 kabupaten)	
		Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal(%)	26,1 (2018), 25,5(2019)	23,5 – 24	
		Rata-rata IPM di daerah tertinggal	58,11 (2018), 58,82(2019)	62,2 – 62,7	
		Rata-rata nilai indeks perkembangan 60 KawasanPerdesaaan Prioritas	51,10	58,70	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Nasional (KPPN)			
		Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 kawasantransmigrasi yang direvitalisasi	48,74	57,50	
		Kelembagaan dan Keuangan Daerah			
		Jumlah daerah dengan penerimaan daerahmeningkat (Kab/Kota)	313	542	
		Jumlah daerah dengan realisasi belanjaberkualitas (Kab/Kota)	102	542	
		Jumlah daerah yang melaksanakan tata kelola keuangan yang efektif dan efisien (Kab/Kota)	102	542	
		Persentase jumlah daerah yang memiliki indeksinovasi tinggi (%)	12	36	
		Jumlah daerah yang memiliki PTSP Prima berbasiselektronik (Kab/Kota)	200	542	
		Jumlah daerah yang mengimplementasikanKesepakatan dan Perjanjian Kerja Sama Daerah(Kab/Kota)	10	58	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Persentase capaian penerapan SPM di daerah (%)	N/A	100	
		Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(EPPD)	2,8	3,2	
		Jumlah daerah dengan indeks kinerja Gubernursebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) kategoribaik (Provinsi)	N/A	34	
		Jumlah pelaksanaan kebijakan (regulasi) padadaerah otonomi khusus dan daerah istimewa	1 regulasi	2 regulasi	
		Jumlah lembar Peta Dasar skala 1: 5.000 (Nomor Lembar Peta/NLP)	5,013	125810 (seluruh Wilayah Indonesia non hutan)	
		Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional (KSN) (Rancangan Perpres)	10	18	
		RDTR Perbatasan Negara	10 Matek RDTR KPN	10 Rancangan Perpres	
		Daerah yang Memiliki Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Berketahanan Bencana dan Perubahan Iklim (kab/kota)	37	250	
		Luas bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi dan berkualitas	13,78	52,12	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		baik (juta Ha)			
		Kantor Wilayah ATR/BPN dan Kantor Pertanahan yang menerapkan pelayanan pertanahan modern berbasis digital	0	34 Kantor Wilayah ATR/BPN dan 467 Kantor Pertanahan	
		Pembentukan dan operasionalisasi Bank Tanah	0	1 Bank Tanah	
III					
1	Terkendalinya pertumbuhan penduduk dan menguatnya tata kelola kependudukan	Angka Kelahiran Total (*Total Fertility Rate/ TFR*)	2,28 (SUPAS, 2015)	2,10	
		Persentase cakupan kepemilikan NIK	96	100	
		Persentase kepemilikan akta kelahiran penduduk usia 0-17 tahun	83,55	100	
		Persentase kepemilikan akta kematian	N.A	100	
		Persentase kepemilikan buku nikah	N.A	100	
		Persentase kepemilikan akta perceraian	N.A	100	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Penyebab kematian	Belum Diterapkan	100	
		Persentase daerah yang menyelenggarakan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	35	100	
		Persentase provinsi/kabupaten/kota yang memanfaatkan sistem perencanaan, penganggaran dan monitoring evaluasi unit terpadu dalam proses penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan (%)	16	100	
		Persentase daerah yang aktif melakukan pemutakhiran data terpadu penanggulangan kemiskinan (%)	15	100	
2	Meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh penduduk	Persentase penduduk yang tercakup dalam program perlindungan sosial:			
		a. Proporsi penduduk yang tercakup dalam program jaminan sosial (%)	78,7	98	
		b. Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%)	65,2 (Susenas, 2018)	80	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Cakupan penerima bantuan sosial non-tunai dan subsidi tepat sasaran:			
		a. Bantuan bersyarat bagi keluarga untuk kesehatan dan pendidikan (juta KK)	10	10	
		b. Bantuan Pangan Melalui Program Sembako (juta KK)	15,6	15,6	
		c. Bantuan elpiji 3 kg (juta KK)	31,4	31,4	
		d. Bantuan listrik daya 450 VA dan 900 VA (juta KK)	31,4	31,4	
		Cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dari 40 persen penduduk berpendapatan terbawah (juta penduduk)	96,8 (Desember 2019)	112,9	
		Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan beraktivitas (%)	92,1 (Supas,2015)	94	
		Persentase penduduk lansia yang tidak mengalami kesulitan melihat, membaca dan mendengar (%)	88,6 (Supas,2015)	90	
		Cakupan kepesertaan JKN (%)	84,1 (13 Desember 2019)	98	
		Cakupan kepesertaan BPJS TK			

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		a. Pekerja formal (%)	40	> 30	
		b. Pekerja informal (%)	5	> 30	
		Jumlah cakupan penerima bantuan iuran (PBI) Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan (juta pekerja)		20	
		Persentase instansi pusat dan daerah yang mengadopsi sistem perlindungan sosial adaptif (%)	0	30	
		Indeks keberfungsian sosial penyandang disabilitas	0,34	0,41	
		Indeks keberfungsian sosial lanjut usia	0,26	0,34	
		Indeks keberfungsian sosial anak	0,34	0,41	
		Indeks keberfungsian sosial korban penyalahgunaan NAPZA	0,34	0,41	
		Indeks keberfungsian sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang	0,34	0,41	
		Persentase rumah tangga dengan lanjut usia yang memperoleh bantuan sosial (%)	18,9	25	
		Persentase anak dengan disabilitas usia sekolah yang memiliki akses terhadap layanan pendidikan	37,5	50	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		dasar (%)			
		Persentase pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip kabupaten/kota inklusif (%)	2,7	20	
3	Tepenuhinya layanan dasar	Angka kematian ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	305 (SUPAS, 2015)	183	
		Angka kematian bayi (per 1.000 kelahiran hidup)	24 (SDKI, 2017)	16	
		Angka prevalensi kontrasepsi modern/*Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR) (%)*	57,2 (SDKI, 2017)	63,4	
		Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) (%)	10,6 (SDKI, 2017)	7,4	
		Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (*Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)*	36 (SDKI, 2017)	18	
		Prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	27,7 (SSGB, 2019)	14	
		Prevalensi *wasting* (kurus dan sangat kurus) pada balita (%)	10,2 (Riskesdas 2018)	7	
		Insidensi HIV (per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV)	0,24 (Kemkes, 2018)	0,18	
		Insidensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	319 (Global Tuberculosis Report,	190	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
			2017)		
		Eliminasi malaria (kab/kota)	285 (Kemkes, 2018)	405	
		Persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun (%)	9,1 (Riskesdas, 2018)	8,7	
		Prevalensi obesitas pada penduduk umur > 18 tahun (%)	21,8 (Riskesdas, 2018)	21,8	
		Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan (%)	57,9 (Riskesdas, 2018)	90	
		Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi (%)	40 (Kemkes, 2018)	100	
		Persentase rumah sakit terakreditasi (%)	63 (Kemkes, 2018)	100	
		Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar (%)	23 (Kemkes, 2018)	83	
		Persentase puskesmas tanpa dokter (%)	12 (Kemkes, 2019)	0	
		Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial (%)	86 (Kemkes, 2018)	96	
		Persentase obat memenuhi syarat (%)	78,6 (BPOM, 2019)	92,3	
		Persentase makanan memenuhi syarat (%)	76 (BPOM, 2019)	86	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas (Tahun)	8,52 tahun (Susenas 2018)	9,18	
		Harapan Lama Sekolah (Tahun)	12,92 tahun (Susenas, 2018)	13,89	
		Tingkat Penyelesaian Pendidikan (%)			
		a. SD/MI/ sederajat	91,80 (Susenas 2018)	94,78	
		b. SMP/MTs/ sederajat	81,70 (Susenas 2018)	89,49	
		c. SMA/SMK/MA/sederajat	61,52 (Susenas 2018)	76,47	
		Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi (PT) (%)	30,19 (Susenas 2018)	37,63	
		Persentase anak kelas 1 SD/MI/SDLB yang pernah mengikuti pendidikan anak usia dini (%)	63,34 (Susenas, 2018)	72,77	
		Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) 20 Persen Termiskin dan 20 Persen Terkaya			
		a. SMA/SMK/MA/Sederajat	0,67 (Susenas 2018)	0,78	
		b. Pendidikan Tinggi	0,16 (Susenas 2018)	0,23	
		Nilai rata-rata hasil PISA:			
		a. Membaca	371	396	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		b. Matematika	379	388	
		c. Sains	396	402	
		Proporsi Anak di Atas Standar Kompetensi Minimum dalam Test PISA (%):			
		a. Membaca	30,1	34,1	
		b. Matematika	28,1	30,9	
		c. Sains	40,0	44,0	
		Proporsi Anak di Atas Batas Kompetensi Minimal dalam Asesmen Kompetensi (%):			
		a. Literasi	53,2	61,2	
		b. Numerasi	22,9	30,1	
4	Meningkatnya kualitas anak perempuan dan pemuda	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	62,72 (Tahun 2018)	73,49	
		Proporsi perempuan umur 20 – 24 tahun yang menikah sebelum 1 tahun	11,21 (susenas, 2018)	8,74	
		Prevalensi anak usia 13-17 tahun yang pernah mengalami kekerasan sepanjang hidupnya (%)	Laki-laki: 61,7, perempuan: 62 (SNPHR), 2018	Menurun	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	90,99 (2018)	91,39	
		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	72,10 (2018)	74,18	
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan	51,89	55,00	
		Prevalensi kekerasan terhadap perempuan usia 15-64 tahun di 12 bulan terakhir (%)	9,40 (SPHPN, 2016)	Menurun	
		Indeks Pembangunan Pemuda	51,50 (Tahun 2018)	57,67	
5	Terwujudnya Pengentasan kemiskinan	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang memiliki aset produktif (layanan keuangan, modal, lahan, pelatihan) (%)	27,9	40	
		Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang mengakses pendanan usaha (%)	25,6	50	
		Luas kawasan yang dikelola oleh masyarakat (juta ha)	5,5	12,1	
		Luas bidang tanah yang diredistribusi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif) (Ha)	553,14	3.946.860	
		Luas bidang tanah yang dilegalisasi dalam kerangka Reforma Agraria (Kumulatif) (Ha)	0	4.500.0000	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Luas kawasan hutan yang dilepaskan untuk TORA (juta Ha)	1,5	4,1	
		Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema HD, HKm, HTR, IPHPS, dan kemitraan kehutanan (juta Ha)	4	8	
		Jumlah Kelompok Tani Hutan (KTH) Mandiri	100	500	
6	Meningkatnya produktivitas dan daya saing	Persentase angkatan kerja berpendidikan menengah ke atas (%)	43,72 (Sakernas, 2019)	49,8	
		Proporsi pekerja yang bekerja pada bidang keahlian menengah dan tinggi (%)	40,60 (Sakernas, 2019)	43,1	
		Persentase lulusan pendidikan vokasi yang mendapatkan pekerjaan dalam 1 tahun setelah kelulusan (%)	46,60 (Sakernas, 2019)	52,6	
		Jumlah lulusan pelatihan vokasi (juta orang)	0,78 (13 K/L, 2018)	2,8	
		Persentase lulusan PT yang langsung bekerja dalam jangka waktu 1 tahun setelah kelulusan (%)	64,3 (Sakernas, 2019)	66,7	
		Jumlah PT yang Masuk ke dalam World Class university:			

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		a. Top 200		1 (UI)	
		b. Top 300	1 (UI)	2 (ITB DAN UGM)	
		c. Top 500	2 (ITB dan UGM)	3 (IPB, Unair, Unpad)	
		Jumlah publikasi ilmiah dan sitasi di jurnal internasional:			
		a. Jumlah Publikasi (Artikel) Internasional	14.606	31.159	
		b. Jumlah Sitasi di Jurnal Internasional	38.586 (Kemristekdikti, 2018)	59,77	
		Jumlah Prototipe dari Perguruan Tinggi	94 (Kemristekdikti,2017)	304	
		Jumlah KI yang didaftarkan dari hasil litbang perguruan tinggi	762 (Kemristekdikti, 2017)	1.812	
		Jumlah produk inovasi dari tenant Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) yang dibina	143 (Kemristekdikti, 2018)	700	
		Jumlah produk inovasi yang dimanfaatkan industri/ badan usaha	52 (Kemristekdikti, 2018)	210	
		Permohonan Paten yang Memenuhi Syarat Administrasi	1.362 (Kemhukham, 2018)	3	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Formalitas KI (Domestik)			
		Pemberian paten (Domestik)	790 (Kemhukham, 2018)	1000	
		Persentase SDM Iptek Berkualifikasi S3	14,08 (Kemristekdikti, 2018)	20	
		Pusat Unggulan Iptek yang ditetapkan	81 (Kemristekdikti, 201)	138	
		Jumlah pranata litbang yang terakreditasi (aktif)	48 (KNAPP, 2018)	75	
		Jumlah infrastruktur Iptek strategis yang dikembangkan	6	10	
		Jumlah STP strategis yang dikembangkan hingga beroperasi secara penuh:	45	8	
		a. Berbasis Perguruan Tinggi	17	5	
		b. Berbasis Non Perguruan Tinggi	28	3	
		Produk inovasi dan produk riset Prioritas Riset Nasional yang dihasilkan	N/A	40	
		Penerapan teknologi untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan:			

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		a. Penerapan teknologi untuk keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam	12	24	
		b. Penerapan teknologi untuk pencegahan dan mitigasi pascabencana	35	35	
		Persentase anggaran litbang terhadap PDB	0,25	0,42	
		Budaya dan prestasi olahraga:			
		a. Persentase penduduk berumur 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga selama seminggu terakhir	31,39 (Tahun 2018)	40	
		b. Peringkat Asian Games	4 (Tahun 2018)	5 (2022)	
		c. Peringkat Asian Para Games	5 (Tahun 2018)	4 sampai 6 (2022)	
		d. Jumlah perolehan medali emas pada Olympic Games		3	
		e.Jumlah perolehan medali emas		3	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		pada Paralympic Games			
		Tersedianya Sistem Penguatan Pendampingan Pembangunan (SP3)		1	
		a. Standar nasional pendampingan pembangunan (%)	N/A	100	
		b. Penyetaraan jenjang kualifikasi pendampingan pembangunan (%)	N/A	100	
		c. Skema sertifikasi kompetensi pendampingan pembangunan (%)	N/A	100	
		Tersedianya kebijakan pendukung penguatan pendampingan pembangunan			
		a. Penerbitan Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendampingan Pembangunan		1	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		b. Basis Data dan Sistem Informasi Pendampingan Pembangunan		1	
IV	**Revolusi Metal dan Pembangunan Kebudayaan**				
	Menguatnya revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila untuk memantapkan ketahanan budaya	Indeks Capaian Revolusi Mental	67,0 (2018)	74,3	
		Indeks Aktualisasi Nilai Pancasila	N/A	77,0	
	Meningkatnya pemajuan kebudayaan untuk meningkatkan peran kebudayaan dalam pembangunan	Indeks Pembangunan Kebudayaan	53,7 (2018)	62,7	
	Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat	Indeks Pembangunan Masyarakat	0,61 (2018)	0,65	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
	dan daya rekat sosial				
	Menguatnya moderasi beragama untuk mewujudkan kerukunan umat dan membangun harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat	Indeks Kerukunan Umat Beragama	73,8	75,8	
	Meningkatnya ketahanan keluarga untuk memperkukuh karakter bangsa	Indeks Pembangunan Keluarga	53,6 (2018)	61,0	
		Median Usia Kawin Pertama Perempuan	21,8 (2017)	22,1	
	Meningkatnya budaya literasi untuk mewujudkan masyarakat	Nilai Budaya Literasi	55,0 (2018)	71,0	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
	berpengetahuan, inovatif dan kreatif				
V	**Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung embangunan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar**				
1	Meningkatnya penyediaan infrastruktur layanan dasar	Rumah Tangga yang menempati hunian layak dan terjangkau (%)	54,1 (2018)	70	
		Rasio KPR terhadap PDB (%)	2,9 (2017)	4%	
		Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses air minum layak dan aman (%)	87,8 layak dan 6,7 aman (2018)	100 layak dan 15 aman	
		Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%)	20 (2018)	30	
		Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman (%)	74,6 layak, termasuk 7,42 aman (2018)	90 layak termasuk 15 aman	
		Jumlah sambungan rumah yang terlayani SPALD- T skala	1,3 juta (2015-2019)	3 juta	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		permukiman/kota/regional (Rumah tangga)			
		Jumlah rumah tangga yang terlayani instalasi pengolahan lumpur tinja (Rumah Tangga)	N/A	6,5 juta	
		Rumah tangga yang masih mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS) di tempat terbuka (%)	9,36 (2018)	0	
		Rumah Tangga yang menempati hunian dengan akses sampah yang terkelola dengan baik di perkotaan (%)	59,45 penanganan dan 1,19 pengurangan (2016)	80 penanganan dan 20 pengurangan	
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar metode lahan urug saniter (Rumah tangga)	N/A	19 juta	
		Pembangunan jaringan irigasi baru (kumulatif) (Ha)	I juta	500000	
		Penurunan rasio fatalitas kecelakaan jalan per10.000 kendaraan terhadap angka dasar tahun 2010 (%)	53	65	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Rata-rata waktu tanggap pencarian dan pertolongan (menit)	28	25	
		Peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri (m3/detik)	81,36	131,36	
		Pembangunan bendungan multiguna (unit)	45	63	
		Peningkatan produktivitas pemakaian air untuk produksi padi (m3/kg)	N/A	3	
		Penurunan resiko bencana dengan risiko bencana tinggi (provinsi)	N/A	20	
2	Meningkatnya Konektivitas Wilayah	Waktu tempuh pada jalan lintas utama pulau (Jam/100 Km)	2,3	1,9	
		Panjang jalan tol baru yang terbangun dan/atau beroperasi (Km)	1.461	2.5	
		Panjang jalan baru yang terbangun (Km)	3.387	3000	
		Persentase kondisi mantap jalan nasional/provinsi/kabupaten-kota (%)	92/68/57	97/75/65	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Panjang jaringan KA yang terbangun (kumulatif) (Km's)	6.164	7.451	
		Kondisi jalur KA sesuai standar Track Quality Index (TQI) kategori 1 dan 2 (%)	81,5	94,0	
		Rute pelayaran yang paling terhubung (loop) (%)	23	27	
		Jumlah pelabuhan utama yang memenuhi standar (lokasi)	1	7	
		Jumlah rute subsidi tol laut (rute)	14	25	
		Jumlah pelabuhan penyeberangan baru yang dibangun (lokasi)	24	36	
		Jumlah bandara baru yang dibangun (lokasi)	15	21	
		Jumlah rute jembatan udara (rute)	35	43	
3	Meningkatnya layanan angkutan umum massal di 6 (enam) kota metropolitan	Jumlah kota metropolitan dengan sistem angkutan 1 umum massal perkotaan yang dibangun dan dikembangkan (kota)	1	6	
		Jumlah kota yang dibangun	3	6	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		perlintasan tidak 2 sebidang (kota)			
4	Meningkatnya akses dan pasokan energi dan tenaga listrik yang merata, andal, dan efisien	Jumlah Sambungan Jaringan Gas untuk Rumah Tangga (kumulatif) (Sambungan Rumah/SR)	537.936	4.000.000	
		Jumlah Kapasitas Kilang Minyak (kumulatif) (Barrel per Calendar Day/BPCD)	1.151.000	1.276.000	
		Kebutuhan (konsumsi) listrik per kapita nasional (kWh)	1.077	1.4	
		Rasio Elektrifikasi (%)	98,86	-100	
5	Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta	Jangkauan infrastruktur jaringan tetap pitalebar (% total kecamatan)	35,71	60	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
	kontribusi sector informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi				
		Jangkauan infrastruktur jaringan bergerak pitalebar (% Desa)	87,4	95	
		Populasi yang terlayani penyiaran digital (%)	52,28	80	
		Fasilitasi start up unicorn baru (perusahaan)	5	8	
VI	**Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, Dan Perubahan Iklim**				
1	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Udara (IKU)	86,8	84,5	
		Indeks Kualitas Air (IKA)	47,0	55,5	
		Indeks Kualitas Air Laut (IKAL)	N/A	60,5	
		Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Ekosistem	60,6	65,5	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Gambut (IKTL)			
	1.1 Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lokasi pemantauan kualitas lingkungan (lokasi)	1.048	1.141	
		Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan (perusahaan)	1.705b	3750	
		Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang dipertahankan secara nasional (juta ha)	52	70	
		Luas kawasan konservasi yang dikelola (juta ha)	27	27	
		Luas Kawasan Konservasi Perairan (juta ha)	22,68	26,9	
		Persentase penurunan luas areal hutan dan lahan yang terbakar setiap tahun (persen)	942.485 ha area terbakar	2	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Akurasi informasi meteorologi (persen)	77	80	
		Akurasi informasi klimatologi (persen)	77	79	
	1.2 Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	67,45b	339,4c	
		Persentase penurunan sampah yang terbuang ke laut dari baseline (persen)	N/A	60	
		Jumlah limbah B3 yang terkelola (juta ton)	367,3b	539,8c	
	1.3 Pemulihan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Jumlah lahan terkontaminasi limbah B3 yang dipulihkan (ton)	475.676b	1.200.000c	
		Jumlah kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil rusak yang dipulihkan (lokasi)	17	26	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya (jenis)	25	25	
	1.4 Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum diBidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase pemegang izin yang taat terhadap peraturan terkait pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan (persen)	30	70	
		Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus)	193	540	
		Jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (ha)	4.384.918	10.000.000c	
		Jumlah daerah yang memiliki perencanaan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup (provinsi)	N/A	34C	
		Persentase potensi kehilangan PDB akibat dampak	N/A	0,10	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		bencana (persen PDB)			
2	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB sektor terdampak bahaya iklim (persen PDB)	N/A	1,15	
		Kecepatan penyampaian informasi peringatan dini bencana kepada masyarakat (menit)	5,0	3,0	
		Rasio investasi PRB terhadap APBN (persen)	0,04	1,36	
	2.1 Penanggulangan Bencana	Persentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi (persen)	87	100	
	2.2 Peningkatan Ketahanan Iklim	Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kelautan dan pesisir (persen PDB)	N/A	0,372	
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor air	N/A	0,072	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		(persen PDB)			
		Persentase penurunan potensi kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor pertanian (persen PDB)	N/A	0,251	
		Persentase potensi penurunan kehilangan PDB akibat bahaya iklim di sektor kesehatan (persen PDB)	N/A	0,093	
3	Pembangunan Rendah Karbon	Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor energi (persen)	10,3b	13,2	
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor lahan (persen)	36,4b	58,3	
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor limbah (persen)	8,0b	9,4	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor IPPU (persen)	0,6b	2,9	
		Persentase penurunan emisi GRK terhadap baseline pada sektor pesisir dan kelautan (persen)	N/A	7,3	
		Porsi energi baru terbarukan dalam bauran energi nasional (persen)	8,55b	Menuju 23	
	3.1 Pembangunan Energi Berkelanjutan	Intensitas Energi Primer (SBM/miliar Rp)	141,0	133,8	
		Penurunan Intensitas Energi Final (SBM/miliar Rp)	0,9	0,8	
		Luas lahan gambut terdegradasi yang dipulihkan dan difasilitasi restorasi gambut (ha)	122.833	330.000 ha per tahun	
	3.2 Pemulihan Lahan Berkelanjutan	Luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional (ha)	206	420.000 ha per tahun	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Persentase lahan baku baku sawah yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B (persen)	50	100	
		Jumlah sampah yang terkelola secara nasional (juta ton)	67,5b	339,4c	
	3.3 Pengelolaan Limbah	Jumlah rumah tangga yang terlayani TPA dengan standar sanitary landfill (KK)	N/A	3.885.755	
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPS3R (RT)	N/A	409.078	
		Jumlah rumah tangga yang terlayani TPST (RT)	N/A	494.152	
		Persentase perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau/SIH (perusahaan)	N/A	10	
	3.4 Pengembangan	Jumlah rancangan standar penurunan GRK sektor	3	20	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
	Industri Hijau	industri (rancangan standar)			
		Jumlah rancangan standar penanganan masalah limbah B3 sektor industri dan penerapan ekonomi sirkular dalam pembangunan industri berkelanjutan (rancangan standar)	3	20	
	3.5 Rendah Karbon Pesisir dan Laut	Luas pemulihan ekosistem mangrove dan pantai (Ha)	1000	50.000c	
VII	**Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik**				
	Menguatnya Stabilitas Polhukhankam dan Terlaksananya Transformasi Pelayanan Publik				
1	Konsolidasi Demokrasi	Indeks demokrasi indonesia	72,39 (2018)	78,37*	
		Indeks Kerawanan Pemilu	49	39	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Persentase kepuasan masyarakat terhadap konten informasi publik terkait Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah (%)	70	72	
		Jumlah SDM Bidang Komunikasi dan Informatika yang kompeten dan profesional (Orang)	37	50	
2	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Indeks Pelayanan dan Perlindungan WNI dan BHI di Luar Negeri	92,46* (2018)	90	
		Jumlah program/kegiatan kerja sama Selatan- Selatan dan Triangular	76	152	
		Jumlah pendanaan kegiatan kerja sama pembangunan internasional termasuk KSST (Rp Miliar)	112	190	
		Tingkat partisipasi aktor non pemerintah dalam kegiatan kerja sama pembangunan	2,23	2,96-3,16	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		internasional (%)			
		Indeks Citra Indonesia di dunia Internasional	3,8 (2018)	4,0	
		Jumlah forum yang dipimpin oleh Indonesia pada tingkat regional dan multilateral	8	16	
3	Penegakan Hukum Nasional yang Mantap	Indeks Pembangunan Hukum	0,61 (2018)	0,73	
		Persentase judicial review yang dikabulkan (%)	13,15 dan 12,05 (2018)	8,15 dan 7,05	
		Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penegakan kontrak	146	70	
		Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek penyelesaian kepailitan	36	20	
		Peringkat EoDB Indonesia untuk aspek mendapatkan kredit	44	20	
		Persentase pelaku residivis (%)	9,06	6,56	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,70	4,14	
		Indeks Akses terhadap Keadilan (%)	69,6	71-80	
4	Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks RB ≥ Baik*			
		a. Kementerian/Lembaga (%)	93,98 (2018)	85	
		b. Provinsi (%)	70,59 (2018)	85	
		c. Kabupaten/Kota (%)	11,22 (2018)	70	
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Sistem Merit Kategori ≥ Baik			
		a. Kementerian (%)	32 (2018)	100	
		b. LPNK (%)	24 (2018)	100	
		c. Provinsi (%)	15 (2018)	85	
		d. Kabupaten/Kota (%)	0,58 (2018)	30	
		Instansi Pemerintah (IP) dengan tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Kategori Baik (IP)	90 per 277	164 per 623	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Indeks Maturitas SPBE kategori baik			
		a. Kementerian/Lembaga (%)	43,3 (2018)	100	
		b. Provinsi (%)	32,4 (2018)	82	
		c. Kabupaten/Kota (%)	6,1 (2018)	50	
		Persentase Instansi Pemerintah pusat (K/L) yang mendapatkan Opini WTP			
		a. Kementerian/Lembaga (%)	94 (2018)	95	
		b. Provinsi (%)	94 (2018)	95	
		c. Kabupaten (%)	79 (2018)	85	
		d. Kota (%)	90 (2018)	95	
		Persentase Instansi Pemerintah dengan Skor Sakip ≥ B:			
		1. Kementerian/Lembaga (%)	92,77 (2018)	100	
		2. Provinsi (%)	94,12 (2018)	100	
		3. Kabupaten/Kota (%)	46,85 (2018)	80	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
5	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Global Fire Power Index	0,28	0,20	
		Global Terrorism Index	5,07	4,24	
		Proporsi orang yang merasa aman berjalan Sendirian (%)	53,32 (2017)	>60	
		Indeks Keamanan dan Ketertiban Nasional	N/A*	3,4	
		Indeks Risiko Terorisme (Pelaku)	38,24 (2018)	37,80	
		Indeks Risiko Terorisme (target)	54,46 (2018)	54,00	
		Angka Pelanggaran Lintas Batas Negara	332	<150	
		Angka Kejadian Konflik	60	35	
		Angka Korban Pengungsi Internal	16 (2018)	14	
		Terpenuhinya Minimum Essential Force (MEF) (%)	68,9	100	
		Kontribusi Industri Pertahanan terhadap Pemenuhan Alutsista (%)	41,9	≥50	
		Angka Pelanggaran Hukum dan Gangguan	300	202	

No	Agenda dan Sasaran Pembangunan Nasional	Indikator Kinerja	Baseline 2019	Target 2024	Dukungan RPJMD Kota Bima
		Keamanan di Laut			
		Angka Prevalensi Penyalahgunaan Narkotika (%)	1,8	1,69	
		Tingkat Kriminalitas (Orang/100.000 Penduduk)	113 (2018)	111	
		Pelayanan Publik Polri yang Prima (%)	61	65	
		Skor Global Cyber Security Index	0,776 (2018)	0,838	

Sumber: RPJMN 2020-2024

Mengacu pada tabel tersebut diatas, maka 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional berikut sasaran dan indikator kinerjanya sebagai kebijakan dan prioritas pembangunan nasional harus menjadi bagian dari isu strategis nasional yang mempengaruhi perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan maupun prioritas pembangunan yang akan dituangkan dalam perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023.

4.2.3. Analisis Isu Strategis Provinsi NTB 2018-2023

Berikut disajikan beberapa isu strategis Propinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2019-2023, sebelum memasukan aspek politis dari kepala dan wakil kepala daerah terpilih.

1. Daerah rawan bencana yang ditandai dengan ;
   a. Belum maksimalnya upaya mitigasi bencana
   b. Terbatasnya sumber daya untuk keadaan darurat bencana serta Rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
2. Penataan ruang konektivitas, dan ketersediaan infrastruktur wilayah belum optimal, yang ditandai dengan ;
   a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal.
   b. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai.
   c. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata
   d. Sarana dan prasarana teknologi, komunikasi dan informasi belum merata
   e. Potensi energy baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal
   f. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan beum merata
   g. Ketersediaan dan system pengelolaan air minum regional belum terintegrasi
3. Tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan optimal, yang ditandai dengan ;
   a. Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil
   b. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah
   c. Penataan dan pengembangan SDM aparatur brlum optimal
   d. MAsih retalif rendahnya indek kepuasan masyarakat
   e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik
   f. Penerapan goodgovernance yang didukung teknologi informasi belum optimal

g. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan
h. Belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan

4. Derajad kesehatan masyarakat relative rendah, yang ditandai dengan ;
   a. Angka Harapan Hidup saat lahir masih relative rendah
   b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relative masih tinggi
   c. Tingginya prevalensi kurang gizi dan stunting
   d. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar
   e. Belum meratanya SDM kesehatan antar daerah
   f. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal
   g. Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal
   h. Masih relatif mudanya usia perkawinan pertama perempuan kurang dari 21 Tahun
5. Mutu dan daya saing luaran pendidikan belum optimal, yang ditandai dengan;
   a. Rata-rata lama sekolah masih rendah
   b. Masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi
   c. Pendidikan kejuruan dengan kebutuhan dunia usaha , dunia industry belum sesuai
   d. RElatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukkan nilai UKG, mutu lulusan melalui nilai UN
   e. Penyebaran tenaga pendidik belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah
   f. Cukup tingginya angka buta huruf dewasa
   g. Akses Pendidikan yang belum merata
   h. Fasilitas aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah.
6. Kualitas dan daya dukung lingkungan belum optimal, yang ditandai dengan;
   a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurunl
   b. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan dan penegakan hokum) belum optimal

c. Terjadi degredasi ekosistim hutan , danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut
d. Penegakkan hukum terhadap eksploitasi illegal sumber daya alam (Ilegal logging, Illegal fising, illegal mining) masih lemah.

7. Pertumbuhan ekonomi relative stagnan, ditandai dengan ;
   a. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung pada pertambangan
   b. Rendahnya realisasi investasi diluar sector pertambangan dan pariwisata
   c. Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor
   d. Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan
   e. Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relative rendah.
   f. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih rendah
   g. Terbatasnya akses terhadap sumberdaya ekonomi yang murah dan berkelanjutan.
   h. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat.
   i. Penanganan sector petanian secara komprehensip belum optimal
   j. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan optimal
   k. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal

8. Industialisasi produk unggulan daerah belum optimal, yang ditandai dengan;.
   a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal
   b. Konektifitas sector hulu (produksi) dan sector hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal
   c. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industry kreatif belum optimal
   d. Industi pengolahan dan industry komoditas masih kurang
   e. Fasilitas dan pemanfaatan hasil karya industry local belum optimal
   f. Infrastruktur, perizinan dan investasi industry belum difasilitasi secara khusus dan optimal

9. Belum terciptanya kehidupan masyarakat kehidupan masyarakat yang aman dan damai secara optimal, yang ditandai dengan ;
   a. Indeks Demokrasi masih rendah
   b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial
   c. Nilai agama, budaya dan kearifan local belum diimplementasikan dalam kehidupan secara optimal
   d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi

4.2.4. Hasil Telaahan RPJPD Kota Bima Tahun 2008-2028

RPJMD disusun dengan berpedoman pada RPJPD. Dalam Dokumen RPJPD tersebut, visi yang akan diwujudkan adalah ***Mewujudkan Kota Bima yang Sejahtera, Maju dan Mandiri pada tahun 2028.***

Dengan rumusan visi tersebut di atas, dalam kurun waktu 20 (duapuluh) tahun ke depan, diharapkan kondisi Kota Bima akan mengalami perubahan secara signifikan dengan ditandai oleh:

a. Terwujudnya Kota Bima yang Sejahtera dan Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.

b. Masyarakat Kota Bima yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index), yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur

berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

Misi pembangunan sebagai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Bima dirumuskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat Bima yang sejahtera dan mandiri melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan dengan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan standar pelayanan minimum bidang kesehatan, pendidikan, dan pelayanan publik lainnya melalui penyediaan sarana dan prasarana pendukung, peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur dalam bidang permukiman dan prasarana wilayah, peningkatan SDM yang berkualitas, meningkatkan keamanan dan ketertiban penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan daerah.
2. Mewujudkan masyarakat yang maju dan berdaya saing melalui pembangunan manusia yang berkualitas, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan iptek melalui penelitian, pengembangan secara berkelanjutan maupun pembangunan bidang infrastruktur yang maju serta reformasi di bidang hukum dan aparatur Negara.
3. Mewujudkan Kota Bima sebagai Kota Pendidikan yang dilaksanakan melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas dan penciptaan iklim belajar yang kondusif dalam lingkungan kehidupan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat
4. Mewujudkan masyarakat religius, berakhlak mulia, dan berbudaya dengan membentuk manusia yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antarumat beragama, melaksanakan interaksi antarbudaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan kearifan local.

5. Mewujudkan Kota Bima asri dan lestari yang diwujudkan melalui upaya-upaya nyata dalam pembenahan pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan, dan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan.

6. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan melalui meningkatkan pembangunan daerah secara menyeluruh, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat, kelompok dan wilayah yang masih lemah; menanggulangi kemiskinan dan pengangguran secara drastis; menyediakan akses yang sama bagi masyarakat terhadap berbagai pelayanan sosial serta sarana dan prasarana ekonomi.

Arah Kebijakan untuk RPJM ke-3 (2018 – 2023)

a) Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-2, RPJM ke-3 ditujukan untuk lebih memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan sumber daya alam dan sumber daya manusia berkualitas serta kemampuan ilmu dan teknologi yang terus meningkat.

b) Kesejahteraan rakyat terus membaik, dan merata yang didorong oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas yang disertai terwujudnya lembaga jaminan sosial. Kualitas sumber daya manusia terus membaik ditandai oleh meningkatnya kualitas dan relevansi pendidikan, termasuk yang berbasis keunggulan lokal dan didukung oleh manajemen pelayananan pendidikan yang efisien dan efektif; meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat; meningkatnya kesetaraan.

4.2.5. Hasil Telaahan Terhadap KLHS

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program, yang bertujuan mengidentifikasi pengaruh kebijakan, rencana dan program pembangunan Kota Bima terhadap berbagai aspek dan komponen lingkungan hidup untuk kemudian diintegrasikan dengan visi, misi kepala daerah. Kajian Lingkungan Hidup Strategis merupakan dokumen pendukung dalam penyusunan RPJMD. Hasil telaahan KLHS ini diintegrasikan ke dalam rancangan akhir dokumen RPJMD sebelum dibahas di DPRD dan dievaluasi di tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil telaahan KLHS menunjukkan bahwa terdapat 10 (sepuluh) Tujan Pembangunan Berkalajutan dan 19 (sembilan belas) indikator yang menjadi isu strategis di Kota Bima yang terdiri dari:

1. Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun
   a. Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.
   b. Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.
2. Menghilang kan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan
   a. Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.
3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia
   a. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua
   a. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.
5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdaya kan Kaum Perempuan
   a. Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.

b. Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan.
c. Perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan.
d. Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.

6. Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan
   a. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.
   b. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.
7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua.
   a. Laju pertumbuhan PDB per kapita.
   b. PDB per kapita.
   c. Persentase tenaga kerja formal.
8. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi.
   a. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.
9. Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
   a. Rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.
   b. Sampah perkotaan yang tertangani.
10. Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan
    a. Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
    b. Keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif

Berdasarkan hasil telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) maka dirumuskan rekomendasi berupa program, kegiatan dan sub kegiatan yang terintegrasi kedalam kebijakan, Rencana dan/atau program sebagaimana

telah diimplementasikan kedalam Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adapun rumusan rekomendasi program, kegiatan dan sub kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

Tabel 4.11

Rekomendasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Berdasarkan Hasil KLHS

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional	**Program Pemberdayaan Sosial**	*Pemberdayaan sosial komunitas adat terpencil (KAT)* - *Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT* - *Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT*	Dinas Sosial
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota - *Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	
		Program Rehabilitasi Sosial	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial* - *Penyediaan sandang* - *Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat* - *Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar*	
			Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial - *Penyediaan Sandang* - *Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti* - *Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
			dan NAPZA	
		Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	*Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar* - *Pementauan terhadap pelaksanaan pemeliharaan anak terlantar*	
			Pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/Kota - *Pendataan fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota*	
1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	**Program Rehabilitasi Sosial**	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial* - *Penyediaan sandang* - *Penyediaan alat bantu* - *Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat* - *Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar*	Dinas Sosial
2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	*Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat*	Dinas Kesehatan
		Program Pemberdayaan masyarakat Bidang kesehatan	*Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	
3.8.2.(a)	Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	**Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat**	*Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* - *Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	Dinas Kesehatan
4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	**Program Pengelolaan Pendidikan**	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar* - *Penambahan Ruang Kelas Baru* - *Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah* - *Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah* - *Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas* - *Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa* - *Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar*	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - *Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* - *Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* - *Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan* - *Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan*	
		Program pengembangan	*Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
		Kurikulum	- *Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar*	
		Program Pendidik dan tenaga Kependidikan	*Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan* - *Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	
5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	**Program Pengarustamaan gender dan Pemberdayaan Perempuan**	*Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota* - *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender)* - *Sosialisasi kebijakan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG*	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota - *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi*	
			Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota - *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota* - *Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	
5.2.1*	perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan	**Program Perlindungan Perempuan**	*Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* - *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan*	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
	dalam 12 bulan terakhir.		*Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - *Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	
5.2.2*	perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	**Program Perlindungan Perempuan**	*Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota* - *Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota - *Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota*	
5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	*Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota* - *Advokasi Kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG* - *Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG*	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota - *Advokasi Kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, social, dan ekonomi.*	
6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki	Program Pengelolaan dan Pengembangan	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah*	Dinas PUPR

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
	akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Sistem Penyediaan Air Minum	*Kabupaten/Kota* - *Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM* - *Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.*	
6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota* - *Pembangunan/Penyediaa n Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota* - *Pembangunan/Penyediaa n Sub Sistem Pengolahan Setempat* - *Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik* - *Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik*	Dinas PUPR
8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Kualitas SDG hewan/ Tanaman*	Dinas Pertanian
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - *Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	*Pengembangan Prasarana Pertanian* - *Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya*	
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	*Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner* - *Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan* - *Pengawasan peredaaran hewan dan produk hewan*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* - *Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha Pertanian*	
			Peningkatan lapangan usaha kehutanan	DLHK
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	*Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota* - *Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap*	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - *Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil* - *Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil* - *Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usah*	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	*Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil* - *Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil* - *Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Keci* - *Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknolog dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	*Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil* - *Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu)	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			Daerah Kabupaten/ Kota - *Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* - *Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	
			peningkatan lapangan usaha pertambangan dan penggalian	ESDM
		Program pemberdayaan usaha Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	*Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui endataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan* - *Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - *Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi*	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota* - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Suberdaya Industri*	
			pengadaan Listrik dan Gas	PLN/ Pertamina
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota* - *Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM* - *Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.*	Dinas PUPR

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
		Program Pengelolaan Persampahan	*Pengelolaaan persampahan* - *Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan* - *Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.*	Dinas Dinas Lingkungan Hidup
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta - *penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah.*	
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	*Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota* - *Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS* - *Penyediaan Sarana Persampahan*	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan Permukiman	*Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota* - *Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	
		Program Penataan Bangunan Gedung	*Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung* - *Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan gedung, serta implementasi SIMBG* - *Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	*Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota* - *Penataan Bangunan dan Lingkungan*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			- *Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan*	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	*Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi* - *Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi*	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - *Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha*	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	*Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C* - *Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*	Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	
		Program Pengelolaan Pelayaran	*Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal* - *Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal*	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	*Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik* *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* - *Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas*	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Aplikasi Informatika	*engelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah* *Daerah Kabupaten/Kota* - *Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah* - *Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah* - *Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik* - *Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
			- *Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas*	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah* - *Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah* - *Perencanaan pengelolaan pajak daerah* - *Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.* - *Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah* - *Penetapan Wajib Pajak Daerah* - *Penagihan Pajak Daerah*	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	*Penataan AdministrasiPemerintahan* *Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* *Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	Sektretariatan Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan)
		Program Pengelolaan Pendidikan	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar* - *Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar* - *Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa* *Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* - *Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* - *Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - *Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD*	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - *Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	*Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* - *Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*	Dinas Kesehatan
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan*	
		Program Pemberdayaan masyarakat Bidang kesehatan	*Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			Hidup Bersih dan Sehat	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	
		Program Pemberdayaan Sosial	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial* - *Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar*	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	*Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota* - *Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	Dinas Pariwisata
		Program Pemasaran Pariwisata	*Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* - *Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* - *Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
8.1.1.(a)	PDB per kapita.	**Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian**	*Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Kualitas SDG hewan/ Tanaman*	Dinas Pertanian
			Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota - *Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil*	
		Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	*Pengembangan Prasarana Pertanian* - *Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya*	
		Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	*Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner* - *Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan* - *Pengawasan peredaaran hewan dan produk hewan*	
		Program Perizinan Usaha Pertanian	*Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota* - *Penilaian kelayakan dan pemberian pertimbangan teknis izin usaha Pertanian*	
			Peningkatan lapangan usaha kehutanan	DLHK
		Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	*Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota* - *Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap*	Dinas Kelautan dan Perikanan
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota - *Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil* - *Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil* - *Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usah*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	*Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil* - *Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil* - *Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Keci* - *Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknolog dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan*	
		Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	*Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil* - *Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil*	
			Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota - *Peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota* - *Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota*	
			peningkatan lapangan usaha pertambangan dan penggalian	ESDM
		Program pemberdayaan usaha Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	*Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui endataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan* - *Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
			Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil - *Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
			Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta desain dan Teknologi	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota* - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Suberdaya Industri*	
			pengadaan Listrik dan Gas	PLN/ Pertamina
		Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	*Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota* - *Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perkotaan* - *Pengembangan SDM dan Kelembagaan Pengelolaan SPAM* - *Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan.*	Dinas PUPR
		Program Pengelolaan Persampahan	*Pengelolaaan persampahan* - *Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan* - *Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.*	Dinas Dinas Lingkungan Hidup
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta - *penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah.*	
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	*Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota* - *Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS* - *Penyediaan Sarana Persampahan*	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Program Pengembangan	*Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
		Permukiman	*Kabupaten/Kota* - *Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	
		Program Penataan Bangunan Gedung	*Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung* - *Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan gedung, serta implementasi SIMBG* - *Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota*	
		Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	*Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota* - *Penataan Bangunan dan Lingkungan* - *Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan*	
		Program Pengembangan Jasa Konstruksi	*Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi* - *Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi*	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota - *Penyusunan Data dan Informasi Tenaga Kerja dan Badan Usaha*	
		Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	*Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C* - *Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C*	Dinas Perhubungan
			Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir - *Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota*	
		Program Pengelolaan Pelayaran	*Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal*	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			- *Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal*	
		Program Informasi Dan Komunikasi Publik	*Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik* *Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota* - *Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas*	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Program Aplikasi Informatika	*engelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah* *Daerah Kabupaten/Kota* - *Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah* - *Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah* - *Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik* - *Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah* - *Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas*	
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	*Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah* - *Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah*	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	*Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah* - *Perencanaan pengelolaan pajak daerah* - *Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah.* - *Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah* - *Penetapan Wajib Pajak Daerah* - *Penagihan Pajak Daerah*	
		Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	*Penataan AdministrasiPemerintahan* *Pengelolaan Administrasi Kewilayahan* *Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah*	Sektretariatan Daerah (Bagian Administrasi Pemerintahan)

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
		Program Pengelolaan Pendidikan	*Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar* - *Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar* - *Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama - *Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama* - *Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa*	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) - *Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD*	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan - *Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan* - *Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/Kesetaraan*	
		Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	*Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif* - *Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat* - *Pengelolaan Jaminan Kesehatan*	Dinas Kesehatan

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			Masyarakat	
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan*	
		Program Pemberdayaan masyarakat Bidang kesehatan	*Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat*	
			Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat*	
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota - *Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)*	
		Program Pemberdayaan Sosial	*Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota*	Dinas Sosial
		Program Rehabilitasi Sosial	*Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial* - *Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar*	
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	*Pengelolaan Destinasi Pariwisata*	Dinas Pariwisata

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
		Pariwisata	*Kabupaten/Kota* - *Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota*	
		Program Pemasaran Pariwisata	*Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota* - *Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri* - *Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri*	
8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	**Program pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja**	*Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta* - *Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta*	Dinas Tenaga Kerja
		Program Penempatan Tenaga Kerja	*Pelayanan Antar kerja di daerah Kabubaten/ Kota* - *Penyuluhan dan Bimbingan jabatan bagi pencari kerja* - *Perluasan kesempatan kerja*	
			Pengelolaan Informasi Pasarkerja - *Pelayanan dan penyediaan informasi pasarkerja online.* - *JobFair/ Bursa Kerja*	
9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	**Program pemberdayaan usaha Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)**	*Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan* - *Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro*	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	**Kegiatan/ Sub Kegiatan**	
		Program Pengembangan UMKM	*Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil* - *Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam pengembangan Produksi dan Pengolahan,Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi*	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	*Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota* - *Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Suberdaya Industri*	
11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	**Program Kawasan Permukiman**	*Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha* - *Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni*	Dinas perumahan & kawasan permukiman
		Program Pengembangan Perumahan	*Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota.* - *Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota* - *Pengumpulan Data Rumah Korban Bencana Kejadian Sebelumnya yang Belum Tertangani*	
			Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus - *Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus*	
11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	**Program Pengelolaan Persampahan**	*Pengelolaaan persampahan* - *Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota* - *Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan* - *Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan.*	Dinas Lingkungan Hidup
			Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak	

No Indikator	Indikator TPB	Rekomendasi		OPD Pelaksana
		Program	Kegiatan/ Sub Kegiatan	
			swasta - *penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah.*	
		Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	*Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota* - *Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS* - *Penyediaan Sarana Persampahan*	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	**Program penyelenggaraan pengawasan**	*Penyelenggaraan Pengawasan Internal* - *Pengawasan kinerja pemerintah daerah.* - *Pengawasan keuangan pemerintah daerah.* - *Kerjasama pengawasan internal* - *Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.*	Inspektorat
			Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan - *Penanganan penyelesaian kerugian Negara/daerah.* - *Pengawasan dengan tujuan tertentu.*	
		Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	*Pendampingan dan Asistensi* - *Pendampingan dan asistensi urusan pemerintah daerah.* - *Pendampingan, asistensi, verifikasi dan penilaian reformasi birokrasi.* - *Pendampingan, asistensi, dan verifikasi penegakan integritas*	
16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	**Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan**	*Pelembagaan pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota* - *Advokasi Kebijakan dan pendampingan pelaksanaan PUG termasuk PPRG* - *Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG*	Dinas Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
			Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan kewenangan Kabupaten/Kota - *Advokasi Kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, social, dan ekonomi.*	

4.2.6. Hasil Telaahan terhadap RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031. Pengembangan ruang Kota Bima mengacu pada hierarki fungsional sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan selaras dengan RTRW Provinsi antara lain; Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sehingga dalam penataan ruang Kota Bima tidak terlepas dari penataan ruang diatasnya. Berdasarkan RTRWN, Kota Bima ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Sedangkan berdasarkan RTRW Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kota Bima merupakan simpul dari pertumbuhan Pulau Sumbawa bagian Timur yang memiliki *hinterland* wilayah Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Bima adalah untuk mewujudkan ruang wilayah kota yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan dalam rangka mendorong perkembangan wilayah kota sebagai kawasan perdagangan dan jasa, serta pendidikan.

Disamping tujuan umum tersebut, penataan ruang wilayah Kota Bima juga memiliki beberapa tujuan khusus yaitu :

1. Mendorong pertumbuhan Kota Bima sebagai pusat kegiatan wilayah di bagian timur Pulau Sumbawa melalui pengalokasian ruang secara efektif dan efisien bagi kegiatan perdagangan dan jasa, pendidikan, pariwisata dan industri.
2. Menciptakan keseimbangan alokasi pola ruang untuk peningkatan pelayanan perkotaan melalui penyediaan sarana dan prasarana wilayah yang baik dan berwawasan lingkungan.
3. Menetapkan pengelolaan kawasan lindung dan pengembangan kawasan budidaya yang dapat menjamin keberlanjutan lingkungan perkotaan yang sehat dan pemanfaatan sumber daya alam perkotaan yang terkendali.
4. Menetapkan kawasan-kawasan strategis kota yang mampu menjamin berlangsungnya fungsi lindung terhadap lingkungan maupun kawasan yang dapat menjadi mesin penggerak laju pertumbuhan ekonomi wilayah
5. Merumuskan arahan pemanfaatan ruang maupun ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang yang dapat dijadikan pedoman bagi seluruh

stakeholder pembangunan di Kota Bima dalam memanfaatkan potensi ruang dan lahan yang ada.

Rumusan tujuan tersebut diatas berangkat dari potensi dan perkembangan Kota Bima yang secara historis berawal dari pusat Kesultanan Bima dan pusat perdagangan dan jasa skala nasional dan internasional. Kemudian berkembang menjadi pusat kegiatan pemerintahan dan pelayanan umum. Dengan tingkat aksesibilitas yang cukup tinggi dan ditunjang ketersediaan moda transportasi, menjadikan Kota Bima merupakan pusat koleksi distribusi barang, jasa, dan penduduk di bagian timur Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah tersebut, maka ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, sebagaimana pada tabel di bawah ini.

Tabel 4.12.

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kota Bima

No	Kebijakan	Strategi
1	penetapan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan kota secara merata sesuai dengan hirarki pelayanannya;	mengembangkan pusat pelayanan yang sudah ada dan membentuk pusat pelayanan baru dalam rangka pemerataan pelayanan dan peningkatan pemanfaatan potensi wilayah kota;
		mengembangkan fasilitas-fasilitas perkotaan secara merata sesuai dengan fungsi pelayanan, daya dukung, dan daya tampung kawasan;
		mengembangkan sistem transportasi secara berjenjang yang menghubungkan pusat-pusat pelayanan kota serta sistem jaringan prasarana kota lainnya
		mengembangkan sub pusat pelayanan kota yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung
2	pengembangan sistem jaringan dan infrastruktur lintas wilayah dalam sistem perkotaan wilayah kota, wilayah provinsi, dan nasional;	meningkatkan keterpaduan sistem jaringan jalan nasional, sistem jaringan jalan provinsi, dan sistem jaringan jalan kota, termasuk didalamnya membangun jalan lingkar luar Selatan dan lingkar luar Utara (outer ring road) untuk mendistribusikan pergerakan eksternal;
		mengembangkan integrasi sistem

No	Kebijakan	Strategi
		prasarana terpadu antar wilayah dan perkotaan terdiri atas sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki, serta jalur evakuasi bencana secara terpadu dengan berbasis kerjasama dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat
		meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan transportasi perkotaan yang terpadu antara jaringan jalan, jalur pedestrian, jalur evakuasi bencana dan transportasi massal yang berbasis moda jalan
		memelihara, merehabilitasi serta membangun sistem jaringan transportasi dan infrastruktur wilayah untuk mendukung fungsi kawasan dan fungsi pelayanan kota
3	peningkatan kualitas pelayanan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah serta fungsi dan keterkaitan antar pusat pelayanan secara optimal;	mengembangkan sistem jaringan jalan terpadu di dalam kota yang terintegrasi dengan jaringan jalan antar wilayah dan antar sistem pusat pelayanan
		mengembangkan sistem pelayanan angkutan umum massal terpadu
		membuka jaringan-jaringan jalan baru sesuai dengan fungsinya untuk meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara pusat pelayanan kota dengan sub pusat pelayanan kota dan pusat lingkungan serta antar kawasan di dalam wilayah kota dan antar wilayah
		meningkatkan pengawasan dan pengelolaan kawasan pesisir serta pembangunan kota tepian air (water front city
		merestrukturisasi pola grid pada jalan utama kota sesuai dengan morfologi kota
		mengembangkan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan dan/atau

No	Kebijakan	Strategi
		persimpangan
		meningkatkan kualitas perlengkapan jalan untuk mendukung kelancaran pergerakan; d
		mengembangkan dan memantapkan tatanan kepelabuhan dan alur pelayaran pada Pelabuhan Bima sebagai pelabuhan rakyat maupun pelabuhan bongkar muat dan meningkatkan kelengkapan sarana dan prasarananya
4	pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan prasarana dan sarana jaringan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana;	Strategi pengembangan kualitas dan jangkuan pelayanan sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi, sistem jaringan sumber daya air, sistem prasarana penyediaan air minum kota, sistem pengelolaan air limbah kota, sistem persampahan kota, sistem drainase kota, penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana jaringan jalan pejalan kaki, dan jalur evakuasi bencana meliputi meningkatkan kualitas dan jangkauan sarana dan prasarana kota
5	pelestarian fungsi lingkungan hidup secara berkesinambungan dan mendukung perkembangan wilayah kota	menetapkan komponen-komponen kawasan lindung kota
		memadukan arahan kawasan lindung provinsi dalam kawasan lindung kota
		memanfaatkan kawasan budidaya yang dapat berfungsi lindung sebagai bagian dari RTH
		menyediakan kawasan sempadan pantai sejauh 30 - 100 (tiga puluh sampai dengan seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat
		memberikan perlindungan dan penyangga kanan-kiri sempadan sungai;
		melibatkan semua lapisan masyarakat dalam memelihara kawasan lindun
6	pencegahan dampak negatif yang dapat menimbulkan kerusakan	mengendalikan pemanfaatan alam dan buatan pada kawasan lindung;

No	Kebijakan	Strategi
	lingkungan hidup akibat dari pemanfaatan ruang	mengendalikan kegiatan budidaya yang terdapat di dalam kawasan lindung melalui konversi atau rehabilitasi tanah, pembatasan kegiatan, serta pemindahan kegiatan perumahan penduduk secara bertahap ke luar kawasan lindung
		menyediakan informasi kepada masyarakat mengenai batas-batas kawasan lindung, kawasan budidaya serta syarat-syarat pelaksanaan kegiatan budidaya dalam kawasan lindung.
7	penetapan kawasan ruang terbuka hijau minimal 30 % (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota	menerapkan ketentuan luas ruang terbuka hijau publik minimal 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat minimal 10% (sepuluh persen
		merevitalisasi dan memantapkan kualitas ruang terbuka hijau yang ada;
		mengembangkan ruang terbuka hijau secara berjenjang mulai dari skala lingkungan hingga skala kota sesuai dengan standar kebutuhan ruang terbuka hijau
		mengembangkan ruang terbuka hijau berupa lahan konservasi dan resapan air, hutan kota, taman kota, tempat pemakaman umum, serta lapangan olahraga
		mempertahankan jalur-jalur hijau yang berada di sepanjang jaringan jalan
8	perlindungan kawasan cagar budaya dan aktifitas yang memiliki nilai histroris dan spiritual;	melestarikan dan melindungi kawasan cagar budaya, bangunan bersejarah, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah
		revitalisasi kawasan-kawasan yang mendukung pencitraan kota berwawasan budaya loka
		merehabilitasi kawasan cagar budaya yang telah mengalami kerusakan;
		melarang kegiatan-kegiatan budidaya yang mengganggu fungsi kawasan cagar budaya
9	pengembangan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana;	menetapkan ruang yang memiliki potensi rawan bencana
		mengendalikan kegiatan budidaya

No	Kebijakan	Strategi
		terbangun di kawasan rawan bencana;
		menyiapkan jalur-jalur dan ruang evakuasi bencana;
		mengembangkan sistem penanggulangan bencana wilayah kota secara terpadu
		meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta dan masyarakat tentang bahaya bencana serta upaya antisipasi terjadinya bencana
		memprioritaskan upaya mitigasi dan adaptasi bencana pada kawasan perumahan dan pusat-pusat kegiatan ekonomi perkotaan
		mengembangkan ruang terbuka hijau pada kawasan rawan bencana alam
10	pengembangan kawasan budidaya	pengembangan kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan ruang terbuka non hijau, kawasan ruang evakuasi bencana, kawasan sektor informal, kawasan pendidikan, kawasan kesehatan, kawasan peribadatan, 16 kawasan pertahanan dan keamanan, kawasan pertanian, kawasan perikanan dan kawasan pertambangan.
11	pengendalian perkembangan kegiatan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan	meningkatkan kualitas kawasan perumahan perkotaan
		menata kawasan padat dan/atau kumuh di wilayah perkotaan;
		mengembangkan sarana dan prasarana perumahan;
		mengatur dan menata kembali perumahan di sepanjang sempadan sungai
12	pengembangan keterpaduan pengelolaan kawasan strategis nasional dan kawasan strategis provinsi di wilayah kota	menata dan merevitalisasi kawasan perdagangan dan jasa;
		mengembangkan super blok sebagai pusat perdagangan dan jasa skala internasional, nasional, regional, dan local
		memberikan ruang yang memadai untuk menampung aktifitas pedagang kaki lima di pusat-pusat keramaian maupun

No	Kebijakan	Strategi
		kawasan perdagangan skala besar
		menyediakan ruang parkir yang memadai di setiap kawasan perdagangan

Sumber : *Perda Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima*

Dalam rangka menjalankan kebijakan dan strategi tersebut, penataan ruang wilayah mengatur rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.

Rencana struktur ruang menjadi panduan dan kerangka dalam pembentukan sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota secara berjenjang dan memiliki hubungan fungsional yang dibentuk oleh sistem jaringan prasarana wilayah kota. Rencana struktur ruang wilayah juga dihajatkan untuk menciptakan lingkungan di wilayah Kota Bima secara optimal dengan mewujudkan intensitas penggunaan lahan yang sesuai dengan kondisi lingkungan, terutama fisik wilayah, serta untuk menciptakan sistem pelayanan yang optimal dengan mewujudkan adanya jenjang fungsi pelayanan pada wilayah sesuai dengan skala pelayanan dengan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan kota yang baik. Rencana struktur ruang wilayah kota ini tetap mengacu pada rencana struktur ruang wilayah diatasnya baik itu RTRW Nasional maupun RTRW Provinsi serta memperhatikan rencana struktur ruang wilayah kabupaten/kota berbatasan. Rencana struktur ruang wilayah kota, terdiri atas: sistem jaringan prasarana kota dan sistem pusat pelayanan kota. Rencana sistem jaringan prasarana kota terdiri atas: a) sistem jaringan prasarana transportasi; b) sistem jaringan energi; c) sistem jaringan telekomunikasi; d) sistem jaringan sumber daya air; dan e) infrastruktur perkotaan. Infrastruktur perkotaan yang dikembangkan meliputi: i) sistem prasarana penyediaan air minum kota; ii) sistem pengelolaan air limbah kota; iii) sistem persampahan kota; iv) sistem drainase kota; v). penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pejalan kaki; dan vi) penetapan jalur evakuasi bencana. Pada dasarnya, sistem jaringan prasarana kota adalah untuk mendukung sistem pusat pelayanan kota.

Pada dasarnya, sistem jaringan prasarana kota akan sangat ditentukan oleh sistem pusat pelayanan kota. Sistem pusat pelayanan kota akan menentukan arah pengembangan wilayah kota. Sistem jaringan prasarana

kota merupakan sistem jaringan untuk melayani sistem pusat pelayanan kota. Oleh karena itu, uraian tentang sistem pusat pelayanan kota sangat dibutuhkan karenana menentukan arah pengembangan wilayah kota kedepan. Rencana sistem pusat pelayanan kota dijabarkan dalam 3 (tiga) hirarki Pusat Pelayanan Kota, terdiri atas: a) Pusat pelayanan kota (PPK); b) Sub pusat pelayanan kota; dan c) Pusat pelayanan lingkungan.

Rencana struktur ruang Kota Bima belum sepenuhnya terbentuk dengan baik dilihat dari sistem pusat pelayanan, sebaran kegiatan fungsional dan sistem jaringan pergerakan. Pusat kota masih terpusat di kecamatan Rasanae Barat, sedangkan kecamatan Asakota yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan kota kedua pada RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031 belum berkembang. Selain itu pula subpusat pelayanan kota yang belum terbentuk adalah kelurahan Oi Fo'o dan Nitu yang berfungsi sebagai pusat pengembangan industri marmer.

Pusat Pelayanan Kota meliputi kawasan perdagangan dan jasa di sekitar Lapangan Sera Suba sampai Kawasan Pantai Amahami dan Pelabuhan Laut. Sub pusat pelayanan kota meliputi kawasan sekitar Lewirato dan penatoi yang merupakan pusat pemerintahan serta Kawasan sekitar Lapangan Pahlawan sebagai sub pusat pelayanan kota. Sedangkan pusat pelayanan lingkungan meliputi Kelurahan Manggemaci, kelurahan Kodo, Kelurahan Kumbe, kelurahan Jatiwangi, Kelurahan Sadia, Kelurahan Sambinae, kelurahan Kolo.

Tabel 4.13.

Rencana Pusat Pelayanan dan Sistem Perkotaan Kota Bima

Hirarki dan sistem kota-kota			
Pusat Kegiatan Wilayah	**Pusat Pelayanan Kota**	**Sub Pusat Pelayanan Kota**	**Pusat Pelayanan Lingkungan**
Raba - Bima	• Kecamatan Rasanae Barat • Sebagian Kecamatan Asakota • Sebagian Kecamatan Mpunda	Di Kecamatan Mpunda • Kel. Penatoi • Kel. Sadia • Kel Sambinae Di Kecamatan Raba • Kel. Rabangodu Utara • Kel. Rangodu Timur • Kel. Rabadompu Barat Di Kel. Oi Fo'o, dan Kel. Nitu	Kel. Jatiwangi Kel. Mande Kel. Jatibaru Kel Santi Kel. Kodo Kel. Kolo

Sumber: *Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012*

Selanjutnya dalam tabel berikut juga ditetapkan fungsi dan kegiatan utama pada masing-masing pusat pelayanan kota, sub pusat pelayan kota, dan pusat pelayanan lingkungan.

Tabel 4.14.

Fungsi dan Kegiatan Utama Pelayanan di Kota Bima

Fungsi Kawasan	Lokasi	Kegiatan Utama	Peran dan fungsi
Pusat Pelayanan Kota	• Kecamatan Rasanae Barat • Sebagian Kecamatan Asakota • Sebagian Kecamatan Mpunda	Perdagangan dan jasa Pariwisata	• Pusat pengembangan perdagangan dan jasa skala nasional dan regional • Simpul transportasi darat dan laut skala nasional dan regional • Daerah tujuan wisata budaya dan bahari • Pengembangan perikanan tangkap

Fungsi Kawasan	Lokasi	Kegiatan Utama	Peran dan fungsi
Sub Pusat Pelayanan Kota	Mpunda dan sekitarnya : - Kelurahan Penatoi - Kelurahan Sadia - Kelurahan Sambinane	Pendidikan, Pemerintahan administrasi umum,	• Pusat pendidikan skala Regional • Pusat pelayanan pemerintahan dan administrasi umum skala nasional dan regional • Pusat pelayanan kesehatan
	Raba dan sekitarnya (Kelurahan Rabadompu Timur, Kelurahan Rabadompu BaratKelurahan a Rabangodu Utara)	Industri, Kerajinan Kesehatan	• Pusat pengembangan industri kerajinan dan industri kecil • Pusat pelayanan kesehatan skala regional
	Kelurahan Oi Fo'o dan Kelurahan Nitu)	Industri kecil menengah	• Pusat pengembangan Industri marmer
Pusat Lingkungan	Kelurahan Jatiwangi		• Pusat perdagangan dan jasa lokal • Pusat pelayanan kesehatan skala lokal
	Kelurahan Mande		• Pusat pendidikan • Pusat perdagangan dan jasa skala regional.
	Kelurahan Jatibaru		• Pusat perdagangan dan jasa skala lokal • Pusat Pelayanan kesehatan skala lokal
	Kelurahan Santi		• Pusat perdagangan dan jasa skala lokal
	Kelurahan Kodo		• Pusat pengembangan pertanian tanaman pangan dan hortikultura • Pusat perdagangan dan jasa skala lokal. • Pusat pelayanan kesehatan skala lokal • Simpul transportasi darat skala lokal
	Kelurahan Kolo		Pusat Pariwisata bahari Pusat perdagangan dan jasa skala lokal,dan

Fungsi Kawasan	Lokasi	Kegiatan Utama	Peran dan fungsi
			pusat pelayanan kesehatan skala lokal.

Sumber: *Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012*

Tabel 4.15

Arahan Pemanfaatan Struktur Ruang Kota Bima

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemenfaatan Struktur Ruang				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I 2011 -	Tahap II 2016 - 2020	Tahap III 2021 -	Tahap IV 2026 -
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG/INDIKASI PROGRAM						
A. Perwujudan Pusat Pelayanan						
	Penataan kawasan pantai	Kelurahan				
	Pembangunan Superblock Bina	Kelurahan				
	Pembangunan Universitas Negeri Bima	Kelurahan Sambinae				
	Pembangunan Rumah Sakit	Kelurahan Sambinae				
B. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah						
	Pembangunan jalan lingkar luar selatan	Kecamatan Mpunda				
	Pembangunan jalan tembus Panggi –	Kecamatan Mpunda				
	Pembangunan jalan tembus mulai dari Jalan Gatot Subroto - di belakang SMAN 4 Kelurahan Penatoi	Kecamatan Mpunda, Kecamatan Raba				
	Mengembangkan terminal bongkar muat barang	Kecamatan Rasanae Barat				
	Normalisasi aliran sungai-sungai utama, yaitu Sungai Lampe, Sungai Padolo, Sungai Melayu, dan Sungai Jatibaru beserta anak- anak sungainya yang sekaligus berfungsi sebagai drainase primer	Tersebar				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemenfaatan Struktur Ruang				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I 2011 -	Tahap II 2016 - 2020	Tahap III 2021 -	Tahap IV 2026 -
	Pengembangan kolam retensi untuk menampung dan menghambat kecepatan aliran air hujan	di Kelurahan Rontu, Kelurahan Penanae, Kelurahan Monggonao, Matakando dan Kelurahan Jatibaru				
	Pengembangan PDAM Kota	Kota Bima				
	Pemeliharaan pelayanan jaringan distribusi yang telah ada	Kota Bima				
	Pengembangan dan pengelolaan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kelurahan Oi Fo'o	Kecamatan Rasanae Timur				
	Meningkatkan peran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan dan pengelolaan sampah melalui konsep 3R(*Reduce, Recycle, Reuse*)	Kota Bima				
	Mengembangkan jaringan air limbah komunal	Kota Bima				
	Menata jalur pejalan kaki sesuai dengan standar keamanan dan kenyamanan	Kota Bima				
	Menyediakan jalur pejalan kaki di kawasan sempadan sungai	Kota Bima				
	Penyediaan saluran drainase pada kawasan terbangun dan kawasan rawan genangan	Kota Bima				
	Pengembangan dan penataan sistem aliran Sungai Melayu, Sungai Padolo, Sungai Romo sebagai saluran utama	Kota Bima				

No	RENCANA STRUKTUR RUANG	Rencana Pentahapan Pemenfaatan Struktur Ruang				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I 2011 -	Tahap II 2016 - 2020	Tahap III 2021 -	Tahap IV 2026 -
	Pengembangan sistem pengendalian banjir lintas kota-kabupaten dari hulu - hilir	Kota Bima				
B.10. Program Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana						
	Mengembangkan jalur-jalur evakuasi untuk menjauhi lokasi-lokasi genangan dan bencana banjir	Kecamatan Rasanae Barat, kecamatan Mpunda				
	Mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gelombang pasang/tsunami dan abrasi pantai	Kecamatan Rasanae				
	Mengembangkan jalur-jalur evakuasi bencana gempa bumi.	Kota Bima				

Sumber: *Perda Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012*

Sementara itu rencana Pola Ruang Kota, terdiri atas: a) Rencana pengembangan kawasan lindung; dan b) Rencana pengembangan kawasan budidaya. Kawasan Lindung kota terdiri atas: a) pengelolaan kawasan perlindungan setempat; b) pengelolaan kawasan cagar budaya; c) pengembangan ruang terbuka hijau (RTH) kota; d) pengelolaan kawasan rawan bencana alam; dan e) pengelolaan kawasan lindung geologi. Rencana kawasan budidaya Kota terdiri atas: a) kawasan peruntukan pertanian; b) kawasan peruntukan perikanan; c) kawasan peruntukan perumahan; d) kawasan peruntukan perdagangan dan jasa; e) kawasan peruntukan perkantoran; f) kawasan peruntukan industri; g) kawasan peruntukan pariwisata; h) kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal; i) ruang evakuasi bencana; j) ruang terbuka non hijau; dan k) kawasan peruntukan pertahanan-keamanan negara.

Tabel 4.16
Arahan Pemanfaatan Pola Ruang Kota Bima

No	RENCANA POLA RUANG	LOKASI	Rencana Pentahapan Pemenfaatan Pola Ruang			
			Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
ARAHAN PEMANFAATA RUANG/ INDIKASI PROGRAM						
	Pengelolaan Kawasan Mata Air dilakukan ke seluruh kawasan mata air yang berada pada radius minimum 25 -	Kota Bima				
	Reboisasi Kawasan Rawan Bencana Alam di kawasan rawan longsor	Kota Bima				
	Pengembangan ruang terbuka hijau Kota Bima sebesar 20% dari luas Kota Bima	Kota Bima				
	Percepatan rehabilitasi kawasan	Kota Bima				
	Pengembangan kawasan perumahan	Kota Bima				
	Pengembangan kawasan perdagangan dan jasa dengan konsep superblok	Kecamatan Rasanae Barat				
	Penataan kawasan destinasi pariwisata pantai Niu-Lawata-	Kecamatan Rasanae Barat				
	Mempertahankan budaya lokal dan bangunan bersejarah	Kecamatan Rasanae Barat				
	Membangkitkan industri pariwisata	Kota Bima				
	Pengembangan kawasan sektor informal dilakukan di areal rekreasi sepanjang	Kota Bima				
	Pengembangan kawasan peruntukan peribadatan dilakukan pada Masjid Raya dan Pusat Kajian Islam					
	Pengembangan lahan npertanian untuk budidaya komoditas hortikultura	Kecamatan Rasanae Timur				

No	RENCANA POLA RUANG	Rencana Pentahapan Pemenfaatan Pola Ruang				
		LOKASI	Waktu Pelaksanaan			
			Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
			2011 - 2015	2016 - 2020	2021 - 2025	2026 - 2031
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
	Pengembangan pertanian lahan basah untuk peningkatan ketahanan pangan	Kecamatan Rasanae Timur				
	Membatasi alih fungsi lahan pertanian beririgasi teknis	Kecamatan Rasanae Timur				
	Peningkatan sarana prasarana di sekitar pelabuhan Bima	Kelurahan Tanjung				
	Revitalisasi Kawasan Istana Kesultanan Bima dan sekitarnya	Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, dan kelurahan Dara.				
	Penataan Kawasan lindung dan kawasan hutan produksi di Kecamatan Rasanae Timur dan Kecamatan Asakota	Kota Bima				

4.2.7. Hasil Telaahan Terhadap RPJMD Daerah Sekitarnya

Berdasarkan hasil diskusi dan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bima terkait aspek-aspek penting yang ada dalam RPJMD Kabupaten Bima yang berpengaruh terhadap isu strategis pembangunan Kota Bima, dapat diidentifikasi empat kebijakan pada RPJMD Kabupaten Bima yang mempengaruhi pencapaian sasaran strategis Kota Bima periode 2018-2023.

Tabel 4.17
Identifikasi Kebijakan RPJMD Daerah Tetangga yang Mempengaruhi Pencapaian Sasaran Strategis Daerah

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
1.	Kabupaten Bima	Tahun 2016-2021	Keamanan, ketertiban dan supremasi hukum	Kebijakan ini turut mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kota Bima yang ke-16 "Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban".
2.	Kabupaten Bima	Tahun 2016-2021	Infrastruktur, penataan ruang, pariwisata dan konekstifitas wilayah	Kebijakan ini turut mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kota Bima yang ke-5 "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi".
3.	Kabupaten Bima	Tahun 2016-2021	Ekonomi kreatif, agroindustri dan ketahanan pangan	Kebijakan ini turut mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kota Bima yang ke-5 "Meningkatnya pertumbuhan ekonomi".
4	Kabupaten Bima	Tahun 2016-2021	Lingkungan hidup dan Penanggulangan bencana	Kebijakan ini turut mempengaruhi pencapaian Sasaran Strategis Kota Bima

No.	Daerah Lain	Periode RPJMD	Kebijakan Terkait	Keterangan
				yang ke-12 "Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup" dan Sasaran Strategis yang ke-15 "Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana".

Sumber: Hasil analisis

4.2.8. Analisis Isu Strategis Kota Bima 2018-2023

Adapun isu-isu strategis pembangunan Kota Bima pada tiap urusan yang perlu menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 4.18.
Isu Strategis Pembangunan Kota Bima pada tiap urusan

Urusan	Isu Strategis Urusan
Urusan Wajib Pelayanan Dasar	
Pendidikan	Penuntasan pendidikan dasar
	Keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan akses dan pembiayaan
	Pendidikan Anak Usia Dini
	Kualitas pendidikan mencakup tenaga pendidik yang berkualitas, materi dan metode pembelajaran, sarana dan prasarana serta prestasi anak didik.
	Peningkatan kegiatan pendidikan luar sekolah
Kesehatan	Kesehatan Ibu hamil dan melahirkan
	Kesehatan Bayi
	Kasus gizi buruk dan Stunting

Urusan	Isu Strategis Urusan
	Kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang berkompeten.
	Ketersediaan Rumah Sakit Rujukan
	Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
	Jangkauan pelayanan kesehatan oleh karena belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan BPJS terutama warga miskin
	Kasus penderita HIV meningkat
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Kemantapan jalan dan jembatan
	Penataan jalan dan drainase lingkungan
	Pengelolaan sumber daya air belum optimal
	Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi Layak terutama bagi warga miskin
	Ketersediaan Ruang terbuka publik masih terbatas
	Ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang
	Perlunya pemerataan pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan dan pengembangan potensi
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	Akses terhadap pelayanan dasar: rumah layak bagi masyakat miskin
	Penuntasan Backlog perumahan
	Penuntasan Kawasan kumuh
	Penanganan Rumah Pasca bencana banjir
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	Tindakan kriminalitas dan Penyalahgunaan Narkoba
	Pembinaan terhadap LSM dan Ormas
	peningkatan layanan terhadap bencana kebakaran
	optimalisasi penegakan perda
	Ketangguhan wilayah terhadap resiko

Urusan	Isu Strategis Urusan
	bencana
Sosial	Rehabilitasi sosial dasar dan perlindungan terhadap kelompok disabilitas, anak telantar dan kelompok usia lanjut dan penyandang penyakit sosial
	Kemandirian Fakir Miskin melalui program bantuan sosial
	Pelayanan dan perlindungan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana
	Peningkatan peran Pemda dalam usaha kesejahteraan sosial
Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar	
Tenaga Kerja	Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kerja bagi semua pekerja
	Kualitas tenaga kerja
	Lapangan kerja dan kesempatan berusaha
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Indeks Pemberdayaan Gender relatif masih rendah
	Pencegahan dan penuntasan kasus Kekerasan kepada perempuan dan anak
Pangan	Peningkatan Ketahanan pangan
Pertanahan	Peningkatan Penguasaan dan penatagunausahaan tanah pemerintah
Lingkungan Hidup	Ketersediaan RTH publik masih terbatas
	Indeks kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun
	Peningkatan Kerjasama antar daerah dalam upaya pengelolaan DAS Rontu yang berkelanjutan
	Melindungi dan merestorasi kawasan mata air dan daerah penyangga yang rusak akibat kegiatan pertanian yang tidak mengedepankan prinsip berkelanjutan
	Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 belum tertangani dengan baik

Urusan	Isu Strategis Urusan
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Peningkatan kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Partisipasi masyarakat dan kelembagaan masyarakat
	Peningkatan Pelayanan Publik
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pertumbuhan penduduk relatif tinggi
Perhubungan	Peningkatan Pelayanan transportasi
Komunikasi dan Informatika	Keterbukaan Informasi Publik
	Pengembangan Smart City
Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah	Pemberdayaan koperasi dan UMKM
Penanaman Modal	Peningkatan jumlah investasi
Kepemudaan dan Olah Raga	Peningkatan Peran dan wiarusaha Pemuda
	Pembinaan Olahraga sejak dini
Statistik	Penyediaan data statistik sektoral yang valid dan berkualitas
	Peningkatan kapasitas SDM aparatur statistik
Persandian	Pengelolaan Persandian untuk pengamanan informasi

Urusan	Isu Strategis Urusan
Kebudayaan	Pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai tradisi, adat budaya maupun benda cagar budaya
	Implementasi nilai-nilai *Maja Labo Dahu*
	Implementasi nilai-nilai dan pendidikan keagamaan dalam kehidupan masyarakat
	Peran petugas keagamaan dan lembaga keagamaan
	Pusat kebudayaan islam dan *Islamic Centre*
Perpustakaan	Budaya baca masyarakat
	Kualitas pelayanan perpustakaan
Kearsipan	Pengelolaan kearsipan
Urusan Pilihan	
Kelautan dan Perikanan	Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis dan Peningkatan produk unggulan daerah
Pariwisata	Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis
	Peningkatan produk unggulan daerah
Pertanian	Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis
	Peningkatan produk unggulan daerah
Perdagangan	Pengembangan jaringan pemasaran
	Peningkatan produk unggulan daerah
	Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis
Perindustrian	Pengembangan Industri Kecil Menengah
	Industrialisasi produk unggulan daerah belum optimal
	Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis
Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang	

Urusan	Isu Strategis Urusan
Pengawasan	Kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP
	Akuntabilitas kinerja
Perencanaan Pembangunan	Akuntabilitas kinerja
	Kebijakan dan integrasi program kemiskinan
	Perencanaan kinerja yang berkualitas,
	Ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang
Keuangan	rendahnya kemandirian keuangan daerah
	Pengelolaan aset yang tertib dan akuntabel
	Pengelolaan keuangan yang efisien, tertib dan akuntabel
	Akuntabilitas pertanggungjawaban keuangan
Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan	Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN

Berdasarkan isu-isu strategis pembangunan Kota Bima pada tiap urusan diatas, maka isu strategis daerah yang menjadi perhatian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut.

a. Kualitas dan Daya Saing Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan

Tolak ukur penting dalam memotret pembangunan sumber daya manusia adalah tercermin dari tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan penduduk. Isu Strategis pada Bidang kesehatan meliputi:

- Kasus gizi buruk.
- Kesehatan Ibu hamil
- Kesehatan Ibu melahirkan

- Kesehatan Bayi
- Stunting
- Kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang berkompeten.
- Jangkauan pelayanan kesehatan oleh karena belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan BPJS
- Ketersediaan Rumah Sakit Rujukan
- Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
- Tata kelola layanan lembaga kesehatan

Isu Strategis pada bidang Pendidikan meliputi:

- Keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan akses dan pembiayaan
- Pendidikan Anak Usia Dini
- Penuntasan pendidikan dasar
- Kualitas pendidikan mencakup tenaga pendidik yang berkualitas, materi dan metode pembelajaran, sarana dan prasarana serta prestasi anak didik.
- Tata kelola layanan lembaga pendidikan

b. **Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi**

Kesejahteraan masyarakat sangat berkaitan erat dengan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan harus dipandang sebagai kondisi yang tidak saja berkaitan dengan ketidakmampuan ekonomi tetapi juga kegagalan dalam memenuhi hak-hak dasar, perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani hidupnya secara bermartabat. Adapun isu strategis terkait dengan kemiskinan dan pengangguran meliputi:

- Akses terhadap sumber daya: modal, asset, teknologi
- Akses terhadap pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, rumah layak, air bersih, sanitasi layak
- Rehabilitasi sosial dasar dan perlindungan terhadap kelompok disabilitas, anak telantar dan kelompok usia lanjut
- Tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan

- Kebijakan dan integrasi program *pro poor*
- Lapangan kerja dan kesempatan berusaha
- Kualitas tenaga kerja

Pada aspek pembangunan ekonomi, meskipun menunjukan pertumbuhan setiap tahunnya, sektor-sektor unggulan dan produktif belum berkembang dan memberikan nilai tambah secara optimal pada pendapatan masyarakat. Sektor pariwisata maupun industri kreatif pada dasarnya sangat potensial untuk dikembangkan mengingat kekayaan budaya maupun komoditi produk unggulan yang kita miliki. Isu strategis terkait dengan pembangunan ekonomi mencakup:

- Pengembangan Industri Kecil Menengah
- Pemberdayaan UMKM
- Peningkatan produk unggulan daerah
- Ketahanan pangan
- Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis
- Pengembangan jaringan pemasaran

c. **Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik**

Isu tata kelola pemerintahan yang baik di Kota Bima mencakup:

- Perencanaan kinerja yang berkualitas,
- Kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP
- Akuntabilitas kinerja dan keuangan
- Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN
- Peningkatan kualitas pelayanan publik (perijinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan).
- Pengelolaan keuangan yang efisien, tertib dan akuntabel
- Keterbukaan Informasi Publik
- Partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan

d. **Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Penataan Ruang yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana**

Isu strategis pada aspek ini meliputi:

- Kemantapan jalan dan jembatan
- Pelayanan Air bersih
- Backlog perumahan
- Penuntasan Kawasan kumuh
- Kesenjangan pembangunan wilayah timur dan barat
- Ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang
- Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pelayanan informasi rawan bencana
- Ketangguhan wilayah terhadap resiko bencana

e. **Eksistensi Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.**

Pembangunan masyarakat berkarakter berkaitan erat dengan penerapan tradisi dan budaya serta kearifan lokal di Kota Bima. Falsafah hidup masyarakat Bima yang sampai saat ini bahkan telah menjad motto pemerintah Kota Bima yaitu ***Maja Labo Dahu***. Falsafah hidup ini selalu menjadi nasehat atau amanat orang-orang tua terhadap anak-anaknya yang pergi merantau ke luar daerah. *Maja Labo Dahu* diartikan sebagai Malu dan Takut (*Maja* = Malu; *Dahu* = Takut). Merujuk pada kitab BO kesultanan Bima, maja labo dahu berarti malu untuk berbuat hal-hal yang diluar batas norma susila dan takut untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama.

Isu strategis terkait dengan pembangunan masyarakat berkarakter dan agamais meliputi:

- Implementasi nilai-nilai *Maja Labo Dahu*
- Pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai tradisi, adat budaya maupun benda cagar budaya
- Implementasi nilai-nilai dan pendidikan keagamaan dalam kehidupan masyarakat
- Peran petugas keagamaan dan lembaga keagamaan
- Pusat kebudayaan islam dan *Islamic Centre*
- Penyalahgunaan Narkoba
- Tindakan kriminalitas

f. Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak.

Isu strategis terkait dengan Pengarusutamaan Gender dan Perlindungan Anak meliputi:

- Indeks Pemberdayaan Gender relatif masih rendah;
- Pencegahan dan penuntasan kasus Kekerasan kepada perempuan dan anak.

Berdasarkan isu-isu strategis yang telah dirumuskan, maka berikut ditampilkan table matriks sinkronisasi isu-isu pembangunan global, nasional, provinsi dan Kota Bima.

Tabel 4.19.
Matriks sinkronisasi isu Strategis Pembangunan Global, Nasional, Provinsi NTB dan Kota Bima

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
I.	***Mengakhiri segala bentuk kemiskinan di mana pun***		***Tingkat Kemiskinan masih di atas rata-rata nasional***	***Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi (Pada aspek Kemiskinan dan Pengangguran)***
1.	Pada tahun 2030, mengurangi setidaknya setengah proporsi laki-laki, perempuan dan anak-anak dari semua usia, yang hidup dalam kemiskinan di semua dimensi, sesuai dengan definisi nasional.	1.1.1 Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015 : 11,13%).	a. Kedalaman kemiskinan masih relatif tinggi	Tata kelola kelembagaan penanggulangan kemiskinan
		1.2.1 Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019.	b. Angka Setengah Penganggguran yang cukup tinggi	- Lapangan kerja dan kesempatan berusaha
		1.2.2 Meningkatnya persentase penyandang difabilitas miskin dan rentan yang menerima bantuan pemenuhan kebutuhan dasar pada tahun 2019		- Akses terhadap sumber daya: modal, asset, teknologi

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
		menjadi 17,12% (2015: 14,84%).		
		1.2.3 Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	c. Koordinasi dan integrasi program penanggulangan kemiskinan belum optimal	Kebijakan dan integrasi program *pro poor*
		1.2.4 Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014:Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta)	d. Kualitas tenaga kerja dan calon tenaga kerja memiliki pendidikan, keterampilan, serta sikap mental relatif rendah	Kualitas tenaga kerja
2.	Menerapkan secara nasional sistem dan upaya perlindungan sosial yang tepat bagi semua, termasuk kelompok yang paling miskin, dan pada tahun 2030 mencapai cakupan substansial bagi kelompok miskin dan rentan.	1.3.1 Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%.	Belum meratanya masyarakat miskin mendapatkan jaminan sosial	Rehabilitasi sosial dasar dan perlindungan terhadap kelompok disabilitas, anak telantar dan kelompok usia lanjut
3.	Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrim terkait iklim dan guncangan ekonomi, sosial, lingkungan, dan bencana.	1.4.1 Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Infrastruktur dasar masih terbatas (akses terhadap air bersih, sanitasi, listrik, dan rumah layak huni)	Akses terhadap pelayanan dasar: pendidikan, kesehatan, rumah layak, air bersih, sanitasi layak

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
II.	***Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.***			
1.	Pada tahun 2030, menghilangkan kelaparan dan menjamin akses bagi semua orang, khususnya orang miskin dan mereka yang berada dalam kondisi rentan, termasuk bayi, terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup sepanjang tahun.	2.1.1 Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013:19,6 %).		
2.	Pada tahun 2030, menghilangkan segala bentuk kekurangan gizi, termasuk pada tahun 2025 mencapai target yang disepakati secara internasional untuk anak pendek dan kurus di bawah usia 5 tahun, dan memenuhi kebutuhan gizi remaja perempuan, ibu hamil dan menyusui, serta manula.	2.2.1 Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013:32,9%)	Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting*	· Kasus gizi buruk. · Stunting

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
3.	Pada tahun 2030, menjamin sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian tangguh yang meningkatkan produksi dan produktivitas, membantu menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir, dan bencana lainnya, serta secara progresif memperbaiki kualitas tanah dan lahan.	2. 3. 1 Ditetapkannya kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	Masih ada desa yang masuk dalam kategori rawan pangan	Ketahanan pangan
III.	***Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia.***		***Derajat Kesehatan Masyarakat Relatif Rendah***	***Kualitas dan Daya Saing Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan (Pada aspek Kesehatan)***
1.	Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.	3. 1. 1 Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	a. Angka harapan hidup saat lahir masih relatif rendah	
		3. 1. 2 Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	b. Angka kematian ibu, bayi dan balita relatif masih tinggi	Kesehatan Ibu hamil
		3. 1. 3 Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015:91,51%).		Kesehatan Ibu melahirkan
				·Kesehatan Bayi

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
2.	Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup) dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.	3.2.2 Meningkatnya persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).		
3.	Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, serta penyakit menular lainnya.	3.3.1 Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Tingginya prevalensi kurang gizi dan *stunting*	· Kasus gizi buruk. · Stunting
4.	Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.	3.4.1 Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%). 3.4.2 Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Upaya promotif dan preventif masalah kesehatan belum optimal	Penyehatan lingkungan dan perilaku hidup sehat
5.	Memperkuat pencegahan dan pengobatan penyalahgunaan zat, termasuk penyalahgunaan narkotika dan penggunaan alkohol yang membahayakan.	3.5.1 Meningkatnya jumlah korban penyalahgunaan NAPZA yang mendapatkan rehabilitasi sosial di dalam panti sesuai standar pelayanan pada tahun 2019 menjadi 4.319 (2015: 1.464).(2015:200) dan di luar panti pada tahun 2019 menjadi 210		

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
6.	Pada tahun 2020, mengurangi hingga setengah jumlah kematian global dan cedera dari kecelakaan lalu lintas.	3.6.1 Menurunnya jumlah korban kematian dan luka berat akibat kecelakaan lalu lintas.		
7.	Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional.	3.7.1 Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6). 3.7.2 Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013:61,9%).	Masih relatif mudanya usia kawin pertama perempuan < 21 tahun	
8.	Mencapai cakupan kesehatan universal, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses terhadap pelayanan kesehatan dasar yang baik, dan akses terhadap obat- obatan dan vaksin dasar yang aman, efektif, berkualitas, dan terjangkau bagi semua orang.	3.8.1 Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	a. Belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi dan terstandar	- Kualitas pelayanan berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, keterbatasan dokter spesialis dan tenaga kesehatan yang berkompeten. - Ketersediaan Rumah Sakit Rujukan
			b. Belum meratanya SDM kesehatan antar daerah	Tata kelola layanan lembaga kesehatan
		3.8.2 Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	c. Akses terhadap layanan kesehatan belum optimal	Jangkauan pelayanan kesehatan oleh karena belum seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan BPJS
IV.	***Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk***		***Mutu dan Daya Saing Luaran Pendidikan Belum Optimal***	***Kualitas dan Daya Saing Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan (Pada aspek Pendidikan)***

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
	semua.			
1.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah tanpa dipungut biaya, setara, dan berkualitas, yang mengarah pada capaian pembelajaran yang relevan dan efektif.	4.1.1 Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	a. Rata-rata lama sekolah masih rendah	Penuntasan pendidikan dasar
		4.1.2 Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	b. Masih banyak sekolah dan lembaga pendidikan yang terakreditasi C atau belum terakreditasi	
		4.1.4 Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun v	c. Relatif rendahnya nilai evaluasi atas mutu guru yang ditunjukan nilai UKG, mutu lulusan melalui nilai UN	Kualitas pendidikan mencakup tenaga pendidik yang berkualitas, materi dan metode pembelajaran, sarana dan prasarana serta prestasi anak didik.
		4.1.5 Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	d. Penyebaran tenaga pendidikan belum merata, sehingga rasio guru murid tidak merata antar daerah	Tata kelola layanan lembaga pendidikan
		4.1.6 Meningkatnya APK SMA/SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63% (2015: 76,4%).	e. Cukup tingginya angka buta huruf dewas	
		4.1.7 Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada	f. Akses Pendidikan yang belum	Keterjangkauan pelayanan pendidikan yang berkaitan dengan

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
		tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015:8,25 tahun).	merata	akses dan pembiayaan
2.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua anak perempuan dan laki- laki memiliki akses terhadap perkembangan dan pengasuhan anak usia dini, pengasuhan, pendidikan pra-sekolah dasar yang berkualitas, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar.	4.2.1 Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).		Penyediaan akses pendidikan anak usia dini yang memadai
3.	Pada tahun 2030, menjamin akses yang sama bagi semua perempuan dan laki-laki, terhadap pendidikan teknik, kejuruan dan pendidikan tinggi, termasuk universitas, yang terjangkau dan berkualitas.	4.3.1 Meningkatnya APK SMA/ SMK/MA/sederajat pada tahun 2019 menjadi 91,63 % (2015: 76,4 %).	a. Pendidikan Kejuruan dengan kebutuhan Dunia Usaha Dunia Industri belum sesuai	
		4.3.2 Meningkatnya APK Perguruan Tinggi (PT) pada tahun 2019 menjadi 36,73 % (2015: 29,9%).	b. Fasilitasi aksesibilitas ke pendidikan tinggi dalam dan luar negeri masih rendah	
4.	Pada tahun 2030, menghilangkan disparitas gender dalam pendidikan, dan menjamin akses yang sama untuk semua tingkat pendidikan dan pelatihan kejuruan, bagi masyarakat rentan termasuk penyandang cacat, masyarakat penduduk asli, dan anak-anak dalam kondisi rentan.	4.4.1 Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019.		
		4.4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019.		
		4.4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019.		

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
		4.4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.		
5.	Pada tahun 2030, menjamin bahwa semua remaja dan proporsi kelompok dewasa tertentu, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kemampuan literasi dan numerasi.	4.5.1 Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015:95,2%).	e. Cukup tingginya angka buta huruf dewasa	
V.	***Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum perempuan.***		***Partisipasi perempuan dalam pembangunan dan ketahanan keluarga belum optimal***	
1.	Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan di mana pun.	5.1.1 Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015:19).		
2.	Menghilangkan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan manusia dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.	5.2.1 Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Kekerasan kepada perempuan dan anak masih cukup banyak	Pencegahan dan penuntasan kasus Kekerasan kepada perempuan dan anak
3.	Menghilangkan semua praktek berbahaya, seperti pernikahan anak, pernikahan dini dan paksa, serta sunat perempuan.	5.3.1 Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).		
4.	Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi	5.4.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014:16,6%).	a. Pembangunan manusia berbasis gender	Indeks Pemberdayaan Gender relatif masih rendah

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
	perempuan untuk memimpin di semua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.		masih di bawah nilai capaian nasional	
		5.4.2 Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	b. Peran serta perempuan dalam politik dan ekonomi masih relatif rendah	
5.	Menjamin akses universal terhadap kesehatan seksual dan reproduksi, dan hak reproduksi seperti yang telah disepakati sesuai dengan Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Beijing Platform serta dokumen-dokumen hasil reviu dari konferensi-konferensi tersebut.	5.5.1 Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).		Pertumbuhan penduduk relatif tinggi
		5.5.2 Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).		
		5.5.3 Tersedianya regulasi yang menjamin perempuan untuk mendapatkan pelayanan, informasi, dan pendidikan terkait keluarga berencana dan kesehatan reproduksi.		
VI.	***Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.***			
1.	Pada tahun 2030, mencapai akses universal dan merata terhadap air minum yang aman dan terjangkau bagi semua.	6.1.1 Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	a. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan	Peningkatan akses Pelayanan Air bersih layak

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
			belum merata	
		6.1.2 Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015:51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	b. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi	
2.	Pada tahun 2030, mencapai akses terhadap sanitasi dan kebersihan yang memadai dan merata bagi semua, dan menghentikan praktik buang air besar di tempat terbuka, memberikan perhatian khusus pada kebutuhan kaum perempuan, serta kelompok masyarakat rentan.	6.2.1 Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).		Peningkatan akses Pelayanan Sanitasi Layak dengan prioritas pada masyarakat miskin
3.	Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, menghilangkan pembuangan, dan meminimalkan pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangi setengah proporsi air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan meningkatkan daur ulang, serta penggunaan kembali barang daur ulang yang aman secara global.	6.3.1 Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.		Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pelayanan informasi rawan bencana

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
4.	Pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan efisiensi penggunaan air di semua sektor, dan menjamin penggunaan dan pasokan air tawar yang berkelanjutan untuk mengatasi kelangkaan air, dan secara signifikan mengurangi jumlah orang yang menderita akibat kelangkaan air.	6.4.1 Pengendalian dan penegakan hukum bagi penggunaan air tanah yang berlebihan yang diiringi dengan percepatan penyediaan dan pengelolaan air baku kawasan perekonomian, dan penerapan kebijakan pengenaan tarif air industri yang kompetitif.		Peningkatan akses Pelayanan Air bersih layak
5.	Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat.	6.5.1 Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana TataRuang Wilayah (RTRW).		Peningkatan Kerjasama antar daerah dalam upaya pengelolaan DAS Rontu yang berkelanjutan
6.	Pada tahun 2020, melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.	6.6.1 Meningkatnya kualitas air pada 15 danau pada tahun 2019.		Melindungi dan merestorasi kawasan mata air dan daerah penyangga yang rusak akibat kegiatan pertanian yang tidak mengedepankan prinsip berkelanjutan
VIII.	***Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua.***		***Pertumbuhan ekonomi relatif stagnan***	***Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan Ekonomi (Pada aspek Pembangunan Ekonomi)***
1.	Mempertahankan pertumbuhan ekonomi per kapita sesuai dengan kondisi nasional dan, khususnya, setidaknya 7% pertumbuhan produk domestik	8.1.1 Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	a. Pertumbuhan ekonomi masih tergantung kepada sektor pertambangan	

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
	bruto per tahun di negara kurang berkembang.		b. Masih defisitnya nilai perdagangan, impor masih lebih tinggi dari nilai ekspor	
			c. Rendahnya realisasi investasi diluar sektor pertambangan dan pariwisata	
2.	Mencapai tingkat produktivitas ekonomi yang lebih tinggi, melalui diversifikasi, peningkatan dan inovasi teknologi, termasuk melalui fokus pada sektor yang memberi nilai tambah tinggi dan padat karya.	8.2.1 Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Penanganan sektor pertanian secara komprehensif belum optimal	Peningkatan produk unggulan daerah
3.	Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan.	8.3.1 Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015:42,2%).	a. Wirausaha yang produktif dan inovatif masih kurang	Pemberdayaan UMKM
			b. Terbatasnya akses terhadap sumber daya ekonomi yang murah dan berkelanjutan	kses terhadap sumber daya: modal, asset, teknologi
			c. Masih minimnya akses masyarakat terhadap produk dan pendidikan keuangan	

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
4.	Pada tahun 2030, mencapai pekerjaan tetap dan produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua perempuan dan laki-laki, termasuk bagi pemuda dan penyandang difabilitas, dan upah yang sama untuk pekerjaan yang sama nilainya.	8.4.1 Terciptanya kesempatan kerja sebesar 10 juta selama 5 tahun.		Lapangan kerja dan kesempatan berusaha
5.	Pada tahun 2020, secara substansial mengurangi proporsi pemuda yang tidak bekerja, tidak menempuh pendidikan atau pelatihan.	8.5.1 Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.		
6.	Mengambil tindakan cepat dan untuk memberantas kerja paksa, mengakhiri perbudakan dan penjualan manusia, mengamankan larangan dan penghapusan bentuk terburuk tenaga kerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan tentara anak-anak, dan pada tahun 2025 mengakhiri tenaga kerja anak dalam segala bentuknya.	8.6.1 Menguatnya sistem perlindungan anak termasuk upaya melindungi anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya.		
7.	Melindungi hak-hak tenaga kerja dan mempromosikan lingkungan kerja yang aman dan terjamin bagi semua pekerja, termasuk pekerja migran, khususnya pekerja migran perempuan, dan mereka yang	8.7.1 Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat.		

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
	bekerja dalam pekerjaan berbahaya			
8.	Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.	8.8.2 Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	a. Pengaruh sektor pariwisata belum signifikan terhadap perekonomian masyarakat	Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis
			b. Potensi pesisir, laut, dan pulau-pulau kecil belum dikelola secara optimal	
		8.8.3 Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	c. Lahan potensial yang belum dimanfaatkan secara optimal	
9.	Memperkuat kapasitas lembaga keuangan domestik untuk mendorong dan memperluas akses terhadap perbankan, asuransi dan jasa keuangan bagi semua.	8.9.1 Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Peranan koperasi, koperasi syariah, BUMDes dalam perekonomian relatif rendah	Pengembangan jaringan pemasaran
IX.	***Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong inovasi.***			

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
2.	Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan proporsi industri dalam lapangan kerja dan produk domestik bruto, sejalan dengan kondisi nasional, dan meningkatkan dua kali lipat proporsinya di negara kurang berkembang.	9.2.1 Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015:4,3%).	a. Pengembangan dan pemberdayaan pelaku industri kreatif belum optimal	Pengembangan Industri Kecil Menengah
			b. Industri pengolahan dan industri pendukung komoditas masih kurang	
		9.2.2 Meningkatnya kontribusi industri manufaktur menjadi 21,6% terhadap PDB pada tahun 2019 (2015: 20,8%).	a. Penciptaan nilai tambah ekonomi komoditas belum optimal	Peningkatan produk unggulan daerah
			b. Konektivitas sektor hulu (produksi) dan sektor hilir (pengolahan dan perdagangan) belum optimal	
			c. Fasilitasi dan pemanfaatan hasil karya industri lokal belum optimal	Pengembangan jaringan pemasaran
3.	Pada tahun 2030, meningkatkan infrastruktur dan retrofit industri agar dapat berkelanjutan, dengan peningkatan efisiensi penggunaan sumberdaya dan adopsi yang lebih baik dari teknologi dan proses industri bersih dan ramah lingkungan, yang dilaksanakan	9.3.1 Berkurangnya emisi CO2 mendekati 26% pada tahun 2019.	Infrastruktur, perizinan dan investasi industri belum difasilitasi secara khusus dan optimal	

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
	semua negara sesuai kemampuan masing-masing.			
X.	***Mengurangi kesenjangan intra dan antarnegara.***			
1.	Pada tahun 2030, secara progresif mencapai dan mempertahankan pertumbuhan pendapatan penduduk yang berada di bawah 40% dari populasi pada tingkat yang lebih tinggi dari rata-rata nasional.	10.1.1 Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).		Kesnjangan Pembangunan pada wilayah timur dan Barat
3.	Mengadopsi kebijakan, terutama kebijakan fiskal, upah dan perlindungan sosial, serta secara progresif mencapai kesetaraan yang lebih besar.	10.3.1 Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).		Penyediaan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Kerja bagi semua pekerja
4.	Memfasilitasi migrasi dan mobilitas manusia yang teratur, aman, berkala dan bertanggung jawab, termasuk melalui penerapan kebijakan migrasi yang terencana dan terkelola dengan baik.	10.4.1 Meningkatnya kerjasama dalam rangka melindungi hak dan keselamatan tenaga migran.		
		10.4.2 Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penempatan tenaga migran.		

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
XI.	***Menjadikan kota dan permukiman inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan***		***Penataan Ruang, konektivitas, dan ketersediaan Infrastruktur Wilayah belum optimal***	***Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Penataan Ruang yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana (Pada aspek Infrastruktur dan Penataan Ruang)***
1.	Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, termasuk penataan kawasan kumuh, serta akses terhadap pelayanan dasar perkotaan.	11.1.1 Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019.		Kesenjangan pembangunan wilayah timur dan barat
				Rumah tidak layak huni
				Penuntasan Kawasan kumuh
2.	Pada tahun 2030, menyediakan akses terhadap sistem transportasi yang aman, terjangkau, mudah diakses dan berkelanjutan untuk semua, meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan mereka yang berada dalam situasi rentan, perempuan, anak, penyandang difabilitas dan orang tua.	11.2.1 Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014:23%).	a. Tingkat kemantapan jalan yang tinggi belum diimbangi dengan tingkat kenyamanan dan standar pelayanan memadai	Kemantapan jalan dan jembatan
			b. Aksesibilitas, kualitas, dan kelancaran transportasi masal antar pusat pertumbuhan dan pulau-pulau kecil belum merata	
			c. Sarana dan prasarana teknologi komunikasi dan informasi	

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
			belum merata	
3.	Pada tahun 2030, memperkuat urbanisasi yang inklusif dan berkelanjutan, serta kapasitas partisipasi, perencanaan penanganan permukiman yang berkelanjutan dan terintegrasi di semua negara.	11.3.1 Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.	a. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang belum optimal	Ketaatan terhadap RTRW dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang
4.	Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dunia dan warisan alam dunia.	11.4.1 Terwujudnya kota dan kawasan perkotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.		
5.	Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan jumlah orang terdampak, dan secara substansial mengurangi kerugian ekonomi relatif terhadap PDB global yang disebabkan oleh bencana, termasuk bencana yang berhubungan dengan air, dengan fokus melindungi orang miskin dan orang-orang dalam situasi rentan.	11.5.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	a. Ketersediaan sarana dan prasarana sumber daya air yang mendukung ketahanan pangan belum merata	Pelayanan Air bersih
			b. Ketersediaan dan sistem pengelolaan air minum regional belum terintegrasi	

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
6.	Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan, termasuk dengan memberi perhatian khusus pada kualitas udara, termasuk penanganan sampah kota.	11.6.1 Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Potensi energi baru dan terbarukan baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri belum dikelola secara optimal	Penuntasan Kawasan kumuh
7.	Pada tahun 2030, menyediakan ruang publik dan ruang terbuka hijau yang aman, inklusif dan mudah dijangkau terutama untuk perempuan dan anak, manula dan penyandang difabilitas.	11.7.1 Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.		Ketersediaan RTH dan Ruang terbuka publik masih terbatas
XII.	***Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.***			
1.	Melaksanakan the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns, dengan semua negara mengambil tindakan, dipimpin negara maju, dengan mempertimbangkan pembangunan dan kapasitas negara berkembang.	12.1.1 Tersusunnya konsep kebijakan rencana operasional pola konsumsi dan produksi berkelanjutan dan pengembangan sistem pendukungnya berupa kolaborasi tematik quick wins program hingga tahun 2019.		Peningkatan Ketahanan pangan

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
2.	Pada tahun 2020 mencapai pengelolaan bahan kimia dan semua jenis limbah yang ramah lingkungan, di sepanjang siklus hidupnya, sesuai kerangka kerja internasional yang disepakati dan secara signifikan mengurangi pencemaran bahan kimia dan limbah tersebut ke udara, air, dan tanah untuk meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.	12.2.1 Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).		Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 belum tertangani dengan baik
3.	Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali.	12.3.1 Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).		
XIII.	***Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya.***			
1.	Memperkuat kapasitas ketahanan dan adaptasi terhadap bahaya terkait iklim dan bencana alam di semua negara.	13.1.1 Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.		Ketangguhan wilayah terhadap resiko bencana
XIV.	***Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan.***			

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
1.	Pada tahun 2020, mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak buruk yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, dan melakukan restorasi untuk mewujudkan lautan yang sehat dan produktif.	14.1.1 Terwujudnya tata kelola pemanfaatan sumber daya kelautan melalui ketersediaan kebijakan, kerangka hukum, dan instrumen terkait penataan ruang laut nasional, serta terkelolanya 11 wilayah pengelolaan perikanan (WPP) secara berkelanjutan hingga tahun 2019 (2015: 5 WPP).		Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis dan Peningkatan produk unggulan daerah pada sektor perikanan
2.	Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan, penangkapan ikan ilegal dan praktek penangkapan ikan yang merusak, serta melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, untuk memulihkan persediaan ikan secara layak dalam waktu yang paling singkat yang memungkinkan, setidaknya ke tingkat yang dapat memproduksi hasil maksimum yang berkelanjutan sesuai karakteristik biologisnya.	14.2.1 Meningkatnya produksi perikanan tangkap menjadi 6.982.560 ton pada tahun 2019 (2015: 6.299.290 ton).		Pembentukan sentra-sentra ekonomi dan pembangunan kawasan strategis dan Peningkatan produk unggulan daerah pada sektor perikanan
3.	Pada tahun 2020, melestarikan setidaknya	14.3.1 Bertambahnya luasan kawasan konservasi perairan seluas 20 juta ha sampai dengan tahun 2019 (2015: 17,3 juta Ha).		

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
4.	Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebihan, menghilangkan subsidi yang berkontribusi terhadap penangkapan ikan ilegal, yang tidak dilaporkan dan tidak diatur dan menahan jenis subsidi baru, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif untuk negara berkembang dan negara kurang berkembang harus menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan pada the World Trade Organization.	14.4.1 Terkendalinya Illegal, Unreported, Unregulated (IUU) fishing dan kegiatan di laut yang merusak ditandai dengan kepatuhan sebanyak 87% pelaku usaha pada tahun 2019 (2015: 66 %).		
XV.	***Melindungi, merestorasi, dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati***		***Kualitas dan Daya Dukung Lingkungan belum optimal***	***Pembangunan Infrastruktur Perkotaan dan Penataan Ruang yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana (Pada aspek Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengurangan Risiko Bencana)***

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
1.	Pada tahun 2020, menjamin pelestarian, restorasi dan pemanfaatan berkelanjutan dari ekosistem daratan dan perairan darat serta jasa lingkungannya, khususnya ekosistem hutan, lahan basah, pegunungan dan lahan kering, sejalan dengan kewajiban berdasarkan perjanjian internasional.	15.1.1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019.		
2.	Pada tahun 2020, meningkatkan pelaksanaan pengelolaan semua jenis hutan secara berkelanjutan, menghentikan deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi dan meningkatkan secara signifikan aforestasi dan reforestasi secara global.	15.2.1 Tercapainya luas kawasan konservasi terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya seluas 100.000 ha hingga tahun 2019 (2015:10.000 ha).	a. Indeks kualitas lingkungan hidup semakin menurun	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pelayanan informasi rawan bencana
		15.2.2 Meningkatnya usaha pemanfaatan hasil hutan kayu restorasi ekosistem seluas 500.000 ha hingga tahun 2019 (2015:100.000 ha).	b. Terjadinya degradasi ekosistem hutan, danau, dataran rendah, serta pesisir dan laut	
			c. Penegakan hukum terhadap eksploitasi ilegal sumberdaya alam (*illegal logging, illegal fishing, illegal mining*) masih lemah	

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
3.	Pada tahun 2020, menghentikan penggurunan, memulihkan lahan, dan tanah kritis, termasuk lahan yang terkena penggurunan, kekeringan dan banjir, dan berusaha mencapai dunia yang bebas dari lahan terdegradasi.	15.3.1 Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	a. Penanganan sampah dan limbah (partisipasi publik, cakupan, dan penegakan hukum) belum optimal	Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup Pelayanan informasi rawan bencana
4.	Melakukan tindakan cepat dan signifikan untuk mengurangi degradasi habitat alami, menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati, dan pada tahun 2020, melindungi dan mencegah lenyapnya spesies yang terancam punah.	15.4.1 Meningkatnya 10% populasi 25 jenis satwa terancam punah pada tahun 2019 (2015: 2%).		
5.	Melakukan tindakan cepat untuk mengakhiri perburuan dan perdagangan jenis flora dan fauna yang dilindungi serta mengatasi permintaan dan pasokan produk hidupan liar secara ilegal.	15.5.2 Meningkatnya persentase penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup sampai dengan P21 sebesar 5% per tahun dari jumlah kasus yang terjadi hingga tahun 2019 (2015: 5%/tahun).		
6.	Pada tahun 2020, memperkenalkan langkah- langkah untuk mencegah masuknya dan secara signifikan mengurangi dampak dari jenis asing invasif pada ekosistem darat dan air, serta mengendalikan atau memberantas jenis asing invasif prioritas.	15.6.1 Meningkatnya sistem karantina dan keamanan hayati melalui pelaksanaan tiga kebijakan terkait pada tahun 2019 (2015: 3).		

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
7.	Pada tahun 2020, mengintegrasikan nilai-nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan daerah, proses pembangunan, strategi dan penganggaran pengurangan kemiskinan.	15.7.1 Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.		
XVI.	***Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan.***		***Belum Terciptanya Kehidupan Masyarakat yang aman dan damai secara optimal.***	***Eksistensi Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.***
1.	Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan angka kematian dimana pun.	16.1.1 Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	a. Indeks Demokrasi masih rendah	
			b. Beberapa daerah masih masuk dalam kawasan rawan konflik sosial	
			c. Nilai agama,	Implementasi nilai-nilai *Maja Labo*

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
			budaya dan kearifan lokal belum diimplemetasikan dalam kehidupan secara optimal	*Dahu*
				Implementasi nilai-nilai dan pendidikan keagamaan dalam kehidupan masyarakat
				Peran petugas keagamaan dan lembaga keagamaan
				Pusat kebudayaan islam dan *Islamic Centre*
				Pelestarian dan revitalisasi nilai-nilai tradisi, adat budaya maupun benda cagar budaya
			d. Angka kriminalitas dan penyalahgunaan NAPZA masih tinggi	Penyalahgunaan Narkoba
				Tindakan kriminalitas
			e. Potensi bencana relatif tinggi	Ketangguhan wilayah terhadap resiko bencana
2.	Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, dan segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.	16.2.1 Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013:38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).		
3.	Menggalakkan kedaulatan hukum di tingkat nasional dan internasional dan menjamin akses yang sama terhadap keadilan bagi semua.	16.3.1 Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi sebanyak 3.021 orang dan non litigasi sebanyak 3.645 orang pada tahun 2019.		
		16.3.2 Jumlah pelayanan peradilan bagi masyarakat miskin melalui sidang di luar gedung pengadilan pada		

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
		tahun 2019: 55.665 perkara; pembebasan biaya perkara pada tahun 2019: 3.200 perkara; dan Pos Layanan Hukum pada tahun 2019: 96.500 perkara.		
4.	Secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya.	16.4.1 Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	***Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Belum Berjalan Optimal***	***Peningkatan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik***
5.	Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkat.	16.5.1 Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi:85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	a. Belum optimalnya pelayanan kependudukan dan catatan sipil	Peningkatan kualitas pelayanan publik (perijinan, administrasi kependudukan, kesehatan dan pendidikan).
			b. Masih relatif rendahnya indeks kepuasan masyarakat	
			c. Belum optimalnya proses fasilitasi pengurusan perizinan	
		16.5.2 Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi:75%, Kabupaten/Kota:	d. Penataan dan pengembangan SDM aparatur belum optimal	Perencanaan kinerja yang berkualitas, Akuntabilitas kinerja dan keuangan

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
		50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi:30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).		
				Peningkatan kapasitas dan profesionalisme ASN
		16.5.3 Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013:30%).	e. Level maturitas pengendalian internal pemerintah belum baik	Kualitas pengawasan dan kapabilitas APIP
		16.5.4 Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L:47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	f. Penerapan *Good Governance* yang didukung teknologi informasi belum optimal	Pengelolaan keuangan yang efisien, tertib dan akuntabel
		16.5.5 Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga:100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	g. Belum optimalnya pemutakhiran data dan informasi dalam pembangunan	Keterbukaan Informasi Publik
			h. Masih rendahnya kemandirian keuangan daerah	rendahnya kemandirian keuangan daerah
6.	Menjamin pengambilan keputusan yang responsif, inklusif, partisipatif dan representatif di setiap tingkatan.	16.6.1 Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).		Partisipasi masyarakat dalam perencanaan maupun pengawasan

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
7.	Pada tahun 2030, memberikan identitas yang sah bagi semua, termasuk pencatatan kelahiran.	16.7.1 Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.		Peningkatan kualitas pelayanan publik administrasi kependudukan
9.	Mendorong dan meningkatkan kerjasama pemerintah-swasta dan masyarakat sipil yang efektif, berdasarkan pengalaman dan bersumber pada strategi kerjasama.	17.9.1 Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).		Pengembangan Kemitraan Pemerintah dan Swasta serta BUMD
10.	Pada tahun 2020, meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional.	17.10.1 Meningkatnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.		Penyediaan data statistik sektoral yang valid dan berkualitas
11.	Pada tahun 2030, mengandalkan inisiatif yang sudah ada, untuk mengembangkan pengukuran atas	17.11.1 Meningkatnya kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) statistik yang profesional, integritas, dan		Peningkatan kapasitas SDM aparatur statistic

NO.	TUJUAN GLOBAL/SASARAN GLOBAL	SASARAN NASIONAL RPJMN 2015-2019	ISU STRATEGIS PROVINSI NTB	ISU STRATEGIS KOTA BIMA
	kemajuan pembangunan berkelanjutan yang melengkapi Produk Domestik Bruto, dan mendukung pengembangan kapasitas statistik di negara berkembang.	amanah 2019.		
		17.1.1.2 Meningkatnya kualitas, kuantitas dan penggunaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam kegiatan statistik.		Pengembangan Smart City
		17.1.1.3 Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data dan informasi pembangunan yang akurat dan tepat waktu, serta pemanfaatan data dan informasi untuk perencanaan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan.		

Sumber: Hasil Analisis

BAB V
VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023

Adapun visi Kota Bima untuk periode RPJMD Tahun 2018-2023 adalah

"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"

Visi tersebut di atas memiliki makna sebagai berikut:

Bagian Pertama : ***Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA***

a. **Kota Bima yang Berkualitas** adalah terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
b. SETARA adalah akronim dari kata Sejahtera, Transparan, Akuntabel, Ramah dan Agamais. dengan demikian, pengertian dari masing-masing kata tersebut dijelaskan sebagai berikut:
   - Masyarakat **Sejahtera** adalah suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal;
   - **Transparan** adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah;
   - **Akuntabilitas** adalah proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel akan diwujudkan dengan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik yang Sungguh-sungguh Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Serta Meningkatkan Nilai-nilai Efektif, Efisien dan Partisipatif;

- Lingkungan Perkotaan yang Ramah adalah lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah.
- Masyarakat Agamais adalah masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama.

Bagian Kedua : ***menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri***

Pengertian kalimat Visi pada bagian Kedua merupakan bagian dari pernyataan Visi Rencana Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028 sebagaimana telah disebutkan diatas. Oleh karenanya pengertian kalimat visi pada bagian kedua tidak dapat dipisahkan dari dokumen RPJPD Kota Bima tersebut.

Adapun berdasarkan Rencana Jangka Panjang tersebut, dijelaskan sebagai berikut:

a. Terwujudnya Masyarakat yang Maju ditandai dengan adanya perkembangan dan kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan dan meningkatnya kesejahteraan. Kondisi tersebut diukur berdasarkan peningkatan dalam Pendapatan per Kapita; Angka Kemiskinan; Indeks Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan daya beli masyarakat; tingkat layanan penyediaan sarana, prasarana dan fasilitas publik, tingkat layanan penyediaan modal bagi masyarakat.
b. Masyarakat Masyarakat yang mandiri diukur berdasarkan perubahan Indeks Pembangunan Manusia, yang mencakup: Tingkat Pendidikan Penduduk; Tingkat Partisipasi Sekolah; Daya Serap Lembaga Pendidikan Formal; Usia Harapan Hidup Penduduk; Lama Hari Sakit Penduduk; Status Gizi Balita; Tingkat Kematian Bayi dan Ibu Hamil dan Nisbah Sarana Kesehatan per Penduduk. Berkaitan dengan derajat otonomi fiskal, yaitu kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan otonominya berdasarkan penerimaan yang berasal dari sumber-sumber

keuangan asli daerah, derajat otonomi fiskal diukur berdasarkan perubahan Indeks Kemampuan Rutin yaitu proporsi dan kontribusi penerimaan yang berasal dari sumber-sumber keuangan asli daerah dan penerimaan yang berasal dari pemerintah Propinsi dan Pusat.

Tabel 5.1
Perumusan Penjelasan Visi

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
"Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri"	**Kota Bima yang Berkualitas**	terbentuknya suatu komunitas yang mampu berfikir secara komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor pembangunan. Masyarakat yang berkualitas dapat dilihat dari beberapa aspek penting, yakni aspek fisik/jasmani, aspek psikis dan intelektual serta aspek kultural.
	Masyarakat **Sejahtera**	suatu kondisi dimana taraf hidup masyarakat secara keseluruhan menjadi lebih baik dan lebih menyenangkan dari keadaan sebelumnya. Dalam perseptif ekonomi kondisi ini dapat dicapai dengan mengupayakan peningkatan ekonomi produktif dan pemerataan pembangunan serta Keadilan sosial ekonomi bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan keberpihakan kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal
	Transparan	keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah
	Akuntabilitas	proses pertanggungjawaban terhadap pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang

Visi	Pokok-Pokok Visi	Penjelasan Visi
		dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik
	Lingkungan Perkotaan yang Ramah	lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah
	Masyarakat Agamais	masyarakat yang bertaqwa, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama

Sumber : *Hasil Analisa*

5.2. Misi Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023

Untuk mewujudkan tercapainya visi tersebut, maka dijabarkan kedalam 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kota Bima yang akan dijelaskan pada tabel V.2.

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik;
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**.

Tabel 5.2
Perumusan Penjelasan Misi

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
1	**Kota Bima yang Berkualitas**	**Misi Pertama :** *Mewujudkan Masyarakat* ***Berkualitas*** *yang Berdaya Saing*	Mewujudkan suatu kondisi masyarakat baik secara kolektif maupun individual memiliki wawasan yang luas, cara berfikir komperhensip dan selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang serta sektor
2	Masyarakat **Sejahtera**	***Misi Kedua :*** Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	- Adanya peningkatan kondisi kesejahteraan masyarakat secara signifikan yang terlihat dari pertumbuhan ekonomi daerah yang meningkat disertai dengan pemerataan pertumbuhan ekonomi daerah. selain itu juga dengan memberikan keberpihakan/affirmatif dalam peningkatan ekonomi khususnya kepada masyarakat lemah, kelompok rentan dan wilayah yang masih tertinggal. - Peningkatan ekonomi masyarakat akan berbasis pada potensi produk unggulan yang ada di Kota Bima baik di sektor pertanian maupun non pertanian, yang pada pengembangannya dapat memberikan lapangan kerja baru dan nilai tambah ekonomi;
3	**Transparan**	***Misi Ketiga :*** Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan	Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui pelaksanaan

No	Pokok-Pokok Visi	Misi	Penjelasan Misi
		mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	tahapan-tahapan reformasi birokrasi sehingga akan meningkatkan Efektifitas capaian hasil pembangunan, Efisiensi dalam proses penganggaran dan pelaksanaan pembangunan, serta membuka ruang Partisipasi masyarakat dan swasta dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
4	**Akuntabilitas**		
5	**Lingkungan Perkotaan yang Ramah**	***Misi Keempat:*** Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Terwujudnya lingkungan Kota yang bisa memberikan akses kemudahan, kenyamanan, keamanan dan adil bagi seluruh warganya serta dapat meningkatkan vitalitas, sumber daya serta potensi yang ada di masyarakat dan wilayah. Sehubungan dengan wilayah administrasi Kota Bima yang masih memiliki potensi terjadinya bencana terutama bencana banjir, maka Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan akan difokuskan terintegrasi dengan upaya pengurangan risiko bencana;
6	**Masyarakat Agamais**	***Misi Kelima :*** Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**	Terwujudnya masyarakat yang memiliki keimanan dan ketqwaan yang baik, mematuhi aturan hukum negara dan agama, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama serta memiliki karakter individu dan komunitas yang bercirikan nilai agama melalui

Sumber : *Hasil Analisa*

Keselarasan antara misi Kota Bima dengan misi Nasional dan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 5.3

Keselarasan Visi dan Misi Pembangunan Nasional, Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kota Bima

No	Perubahan RPJMD Kota Bima 2018-2023	RPJMD NTB 2019-2023	RPJMN 2020-2024
		VISI	
	Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri	Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
		MISI	
1	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing	NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas sunber daya manusia sebagai pondasi daya saing daerah	Peningkatan Kualitas manusia Indonesia (Misi 1)
2	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulan kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi	Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (Misi 2) Pembangunan yang merata dan berkeadilan (Misi 3)
3	Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi	Penegakan sistem Hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya (Misi 6) Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya (Misi 8)

No	Perubahan RPJMD Kota Bima 2018-2023	RPJMD NTB 2019-2023	RPJMN 2020-2024
		VISI	
	Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat yang Maju dan Mandiri	Membangun Nusa Tenggara Barat yang Gemilang	Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong
		MISI	
4	Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan	Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan (Misi 4)
		NTB TANGGUH DAN MANTAP Melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah	Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga (Misi 7)
5	Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	NTB AMAN DAN BERKAH melalui Perwujudan masyarakat madani yang beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan	Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa (Misi 6) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga (Misi 7) Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka Negara kesatuan (Misi 9)

Sumber: Hasil Analisis

Berdasarkan hasil pemetaan keselarasan Visi dan Misi antara RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2019-2023 menunjukkan adanya keselarasan, dimana

semua misi yang ada dalam RPJMD Kota Bima mengakomodir Sembilan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024.

5.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023

Dalam mewujudkan Visi melalui pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan tersebut diatas, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap misi menyangkut tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang akan dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud.

Tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing misi diuraikan dalam matriks berikut:

Tabel 5.4
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota Bima Tahun 2018-2023

VISI : Mewujudkan Kota Bima yang BERKUALITAS dan SETARA menuju masyarakat Maju dan Mandiri

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			
								2018	2019		2020	2021	2022	2023
									Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Angka	74,49	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,35	69,55	70, 20	69,75	69,95	70,15	70,35
					Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas)	Persen (%)	98,29	98,5	98,79	99,29	99,79	100	100
						Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	Persen (%)	23,17	25,17	26,12	27,17	29,17	31,17	33,17
					Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/ Tahun	10.825	10.925	11.334	11.025	11.125	11.225	11.335

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			
								2018	2019		2020	2021	2022	2023
									Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	59,9	63	63,52	63,5	63,58	63,6	63,65
Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Angka	0,380	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB	Persen (%)	6,5	5,8	5,22	3	3,3	3,6	3,9
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Angka kemiskinan	%	8,67	Menurunnya tingkat kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	8,79	8,88	8,6	8,81	8,74	8,67	8,67

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			
								2018	2019		2020	2021	2022	2023
									Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
					Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	2,39	4,5	4,18	4	3,85	3,70	3,55
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Indeks Reformasi Birokrasi	Angka dan Huruf	70,01	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (63,64)	B (65,58)	B	B (67,60)	B (68,00)	B (69,00)	BB (70,01)
						Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,1845)	Sangat Tinggi (3,1930)	Sangat Tinggi (3,2595)	Sangat Tinggi (3,200)	Sangat Tinggi (3,2100)	Sangat Tinggi (3,2200)	Sangat Tinggi (3,2300)
						Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
					Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persen (%)	5,56	5,7	5,62	5,72	5,02	5,12	5,22
					Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor IKM	Angka	83,64	84	82,36	84,5	84,5	85	85,5

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			
								2018	2019		2020	2021	2022	2023
									Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Penguranga n Resiko Bencana;	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen (%)	85	95	98,1	98	98,1	98,2	98,3
					Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	76,41	74	74,13	60	61	62	63
	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Persentase luas kawasan permukiman layak	%	99	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	Persen (%)	31,45	38,81	39	40	41	42	43
					Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80,9	83,3	84,3	83,5	83,7	83,9	84,1
Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan	Indeks Ketentraman	Angka	0,88	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Persentase penurunan angka kriminalitas	Persen	20	25	33	30	30,5	31	31,5

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Target Akhir Periode RPJMD (Tahun 2023)	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target			
								2018	2019		2020	2021	2022	2023
									Target	Realisasi				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Agamais.	agamais													
						Persentase penurunan Angka Konfllik Sosial	Persen	11,2	12,5	12,5	12,5	13	13,5	14
					Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	Persen (%)	1,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5
					Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	83	84	82,11	84	84	84	84

Sumber : *Hasil Analisa dan Cascading*

Pada tabel berikut akan diuraikan definisi operasional variabel untuk masing-masing indikator kinerja sasaran beserta formula perhitungan dalam rangka pengukuran tingkat capaian setipa target kinerja.

Tabel 5.5.

Definisi Operasional Variabel dan Formula Perhitungan setiap Indikator Kinerja Sasaran RPJMD Kota Bima

Tahun 2018-2023

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
1.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	$AHH = \frac{\text{Kumulatif umur masing-masing orang yang meninggal tahun n}}{\text{Jumlah orang yang meninggal tahun n}}$ **Penjelasan :** a. AHH adalah Angka Harapan Hidup b. AHH adalah perkiraan jumlah tahun hidup dari penduduk yang berdiam di suatu wilayah tertentu.	Dokumen IPM (BPS)	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 3. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Angka Partisipasi Wajib Belajar ditentukan oleh Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). $APK = \frac{\text{Jumlah siswa sedang sekolah jenjang SD dan SMP}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia sekolah jenjang SD dan SMP}} x\ 100$ **Penjelasan :**	APK, IPM dan data mutu pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			a. APK : Angka Partisipasi Kasar b. Tujuan APK dalam rangka mengetahui banyaknya siswa yang bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu. $APM = \frac{\text{Jumlah siswa usia sekolah jenjang SD dan SMP}}{\text{Jumlah penduduk usia sekolah jenjang SD dan SMP}} x\ 100$ **Penjelasan :** a. APM : Angka Partisipasi Murni b. Siswa usia sekolah adalah jumlah siswa yang sedang sekolah sesuai jenjang pendidikan dasar. c. Penduduk usia sekolah adalah penduduk yang wajib sekolah selama setahun pada jenjang pendidikan dasar. d. Tujuan APM dalam rangka mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai.		
		Persentase peningkatan mutu pendidikan	$= \frac{\text{Mutu Pendidikan Tahun (n) - Mutu Pendidikan Tahun (n-1)}}{\text{Mutu Pendidikan Tahun n}} x\ 100$ **Penjelasan:** Mutu pendidikan diukur dari komponen dengan bobot yang sama yaitu: (1) jumlah siswa berprestasi di tingkat provinsi dan nasional, (2) jumlah guru bersertifikat dan berprestasi tingkat provinsi dan nasional, dan (3) jumlah sekolah berakreditasi minimal B.		
3.	Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	$= \frac{\text{Total Pengeluaran Rumah Tangga}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} x\ 100$	Data Pengeluaran Per kapita (BPS)	1. Dinas Koperasi, Perindustrian dan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			a. Pengeluaran rata-rata per kapita adalah biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan baik yang berasal dari pembelian, pemberian maupun produksi sendiri dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga dalam rumah tangga tersebut. b. Pengeluaran adalah biaya yang dikeluarkan oleh seluruh anggota rumah tangga selama sebulan. c. Rumah Tangga adalah adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik atau sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur.		Perdagangan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Tenaga Kerja
4.	Meningkatnya ketahanan pangan	Indeks Ketahanan Pangan	$$Y(j) = \sum_{i=1}^{9} a_i X_{ij}$$ Keterangan : i : Indikator ke 1,2,3,....7,8 dan 9 j : Kabupaten ke 1,2,3,....414,415 dan 416; kota ke 1,2,3...96,97, dan 98 Y_i : Indeks Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota ke-j a_i : Bobot masing-masing indikator ke – j X_{ij} : Nilai standarisasi masing-masing indikator ke-i pada kabupetn/kota ke-j		1. Dinas Ketahanan Pangan 2. Dinas Pertanian 3. Dinas Kelautan Dan Perikanan
5.	Meningkatnya	Pertumbuh	Angka pertumbuhan PDRB diterbitkan oleh Badan pusat Statistik (BPS) secara rutin setiap tahun.	Data PDRB	1. Dinas Koperasi, Perindustrian

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
	pertumbuhan ekonomi	an PDRB	**Penjelasan :** Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. a. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. b. PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.	(BPS)	dan Perdagangan 2. Dinas Penanaman Modal dan PTSP 3. Dinas Pariwisata 4. Dinas Pertanian 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 6. Dinas Kelautan dan Perikanan
6.	Menurunnya angka kemiskinan	Tingkat Kemiskinan	$= \frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$ **Penjelasan** : a. Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. b. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) terdapat 14 kriteria masyarakat	Data Kemiskinan (BPS)	1. Dinas Sosial 2. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman 3. Dinas Kesehatan 4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5. Dinas Kependuduka

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			miskin antara lain : 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m^2 per orang 2. Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan 3. Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester. 4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain. 5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6. Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan. 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah 8. Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu. 9. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun 10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari 11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik 12. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan 13. Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD. 14. Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.		n dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 7. Dinas Pengendalian Penduduk dan KB

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
7.	Meningkatnya kesempatan kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	$= \frac{\text{Jumlah yang tidak bekerja}}{\text{Angkatan kerja}} \times 100\%$ **Penjelasan** : a. Pengangguran adalah jumlah penduduk berusia 15 tahun atau lebih yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari atau mempersiapkan pekerjaan, dan penduduk usia 15 tahun atau lebih yang telah memiliki pekerjaan, tetapi belum memulai bekerja. b. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.	Data Ketenagakerjaan (BPS)	1. Dinas Tenaga Kerja 2. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
8.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP adalah hasil penilaian dari jumlah komponen-komponen yang digunakan untuk menentukan tingkat akuntabilitas instansi. **Penjelasan :** 1. Komponen penilaian, antara lain perencanaan kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (25 %), Pelaporan Kinerja (15%), Evaluasi Internal (10%), Capaian Kinerja (20%) 2. Kriteria penilaian sebagai berikut: a. > 90 – 100 : Sangat Memuaskan (AA) b. > 80 – 90 : Memuaskan (A) c. > 70 – 80 : Sangat Baik (BB) d. > 60 – 70 : Baik (B) e. > 50 – 60 : Cukup (CC) f. > 30 – 50 : Kurang (C) g. > 0 – 30 : Kurang (D)	Hasil Penilaian SAKIP (Kementerian PANRB)	1. Bappeda Litbang 2. Inspektorat 3. Bagian Organisasi SETDA 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Skor LPPD	Hasil Penilaian Kementerian Dalam Negeri R I terhadap Pemerintah Daerah atas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya yang tertuang dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah kepada pemerintah pusat, dengan kriteria prestasi capaian kinerja: a. Skor 3 < ST ≥ 4 : Sangat Tinggi (ST) b. Skor 3 < ST ≥ 4 : Tinggi (T) c. Skor 3 < ST ≥ 4 : Sedang (S) d. Skor 3 < ST ≥ 4 : Rendah (R)	Hasil Penilaian LPPD(Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri R I)	1. Bagian Administrasi Pemerintahan SETDA 2. Bappeda Litbang
		Opini BPK	Penilaian opini yang dikeluarkan oleh BPK terhadap laporan keuangan daerah. BPK dapat memberikan opini dengan memperhatikan penilaian terhadap berbagai komponen, antara lain; (a) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; (b) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*); (c) kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan (d) efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Opini BPK terdapat 4 (empat) kriteria, antara lain ; a. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/*unqualified Opinion*); b. Wajar Dengan Pengecualian (WDP/*Qualified Opinion*; c. Tidak Memberikan Pendapat (TMT/*Disclaimer Opinion*); d. Tidak Wajar (TW/*Adverse Opinion*).	Hasil Penilaian BPK (BPK)	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Inspektorat
9.	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap APBD	$= \frac{\text{Jumlah Pendapatan Asli Daerah setahun}}{\text{Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah setahun}} x\ 100\%$ **~~Penjelasan~~ :**	Data PAD dan APBD (BPKAD)	1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2. Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber di dalam wilayah suatu daerah tertentu, yang dipungut berdasarkan Undang-undang yang berlaku. PAD sebagai salah satu sumber penerimaan daerah mencerminkan tingkat kemandirian daerah. Semakin besar PAD, mengindikasikan bahwa sebuah daerah mampu melaksanakan desentralisasi fiskal dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat berkurang. b. APBD adalah anggaran pendapatan belanja daerah selama satu tahun.		3. Dinas Lingkungan Hidup 4. Dinas Pariwisata
10	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor Indeks Kepuasan Masyarakat	$Rata - rata\ IKM = \frac{\text{Kumulatif IKM Unit Pelayanan}}{\text{Jumlah Unit Layanan}}$ **Penjelasan :** 1. Indeks Kepuasan Masyarakat atau IKM adalah hasil pengukuran dari Survei Kepuasan terhadap pelaksanaan pelayanan publik, khususnya pada 9 unsur pelayanan, diantaranya; a. Persyaratan b. Prosedur c. Waktu pelayanan d. Biaya/tarif e. Produk layanan f. Kompetensi pelaksanaan g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan h. Sarana dan prasarana 2. Kriteria penilaian, sebagai berikut; a.25,00 – 66,99 : Sangat Baik (A) b. 65,00 – 76,60 : Baik (B) c.76,61 – 88,30 : Kurang Baik (C) d. 88,31 – 100 : Tidak Baik (D)	Dokumen Hasil Suvei Kepuasan Masyarakat Lingkup Pemerintah Kota Bima	1. Bagian Organisasi SETDA 2. DPMPTSP 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4. Dinas Kesehatan 5. Dinas Perhubungan 6. Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			3. Unit Pelayanan adalah Perangkat Daerah yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan.		
11.	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Angka perhitungan dari hasil *overlay* peta land use pada tahun berkenaan terhadap peta rencana pola ruang. Berdasarkan UU No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa untuk dapat mengefektifkan pelaksanaannya, diperlukan suatu aturan Pola Pemanfaatan Ruang (*Zoning Regulation*) sebagai alat operasional rencana tata ruang. Pola Pemanfaatan Ruang tersebut berfungsi sebagai acuan untuk mengontrol setiap pembangunan atau pemanfaatan lahan di wilayah yang bersangkutan.	Data Laporan Kesesuaian Tata Ruang (Dinas PUPR)	1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2. Dinas Perhubungan
12.	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Indeks kualitas lingkungan hidup	IKLH = (IPA x 30%) + (IPU x 30 %) + (ITH x 40 %) Dimana: IKLH = Indeks kualitas lingkungan hidup IPA = Indeks kualitas air IPU = Indeks Kualitas Udara ITH = Indeks tutupan hutan	Data IKLH (Dinas Lingkungan Hidup)	1. Dinas Lingkungan Hidup 2. Bagian Perekonomian SETDA
13.	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	$\frac{\text{(Infrastruktur dalam kondisi baik Tahun n)-(Infrastruktur dalam kondisi baik Tahun n-1)}}{\text{Infrastruktur dalam kondisi baik Tahun n-1}} \times 100$ **Penjelasan :** a. Infrastruktur adalah seluruh fasilitas untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasa, baik fisik dan sosial untuk pelayanan publik, seperti jalan raya, jembatan, drainase, air bersih, limbah,	Data Infrastruktur (Dinas PUPR)	1. Dinas PUPR 2. Dinas Perhubungan

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya. b. kondisi baik adalah terpeliharanya kondisi infrastruktur yang memenuhi persyaratan.		
14.	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks Ketahanan Daerah adalah instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Pelaksanaan penilaian Indeks Ketahanan Daerah dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).	Data Indeks Ketahanan Daerah (BNPB)	1. BPBD 2. Satuan Polisi Pamong Praja
15.	Meningkatnya keamanan, ketenteraman dan ketertiban	Persentase penurunan angka kriminalitas	$\frac{\text{Angka kriminalitas tahun (n-1) - Angka kriminalitas tahun (n)}}{\text{Kriminalitas tahun (n-1)}} \text{x100}$ **Penjelasan :** a. Kriminalitas adalah perbuatan seseorang yang dapat diancam hukuman berdasarkan KUHP atau Undang-Undang serta peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia. b. Tahun (n-1) adalah satu tahun sebelumnya; c. Tahun n adalah tahun terjadinya kriminalitas.	Statistik Kriminalitas (BPS)	1. Bakesbangpol 2. Satuan Polisi Pamong Praja

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
		Persentase penurunan Angka Konfllik Sosial	$\frac{\text{Jumlah konflik sosial tahun (n-1)} - \text{Jumlah konflik sosial tahun (n)}}{\text{Jumlah konflik sosial tahun (n-1)}} \text{x100}$ **Penjelasan :** a. Konflik Sosial adalah pertentangan kelompok masyarakat, baik suku, agama, ras dan antar golongan yang berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. b. Tahun (n-1) adalah satu tahun sebelumnya; c. Tahun n adalah tahun terjadinya konflik sosial.	Data Konflik Sosial (Bakesbangpol)	1. Bakesbangpol 2. Satuan Polisi Pamong Praja
16	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	$\frac{\text{Jumlah nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina tahun (n)} - \text{Jumlah nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina tahun (n-1)}}{\text{Jumlah nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina tahun (n)}} \text{ x 100}$ **Penjelasan:** a. Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang, dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. b. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang lazim dilakukan di suatu kelompok. c. Tradisi adalah sesuatu yang telah dilakukan untuk sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan.	Dinas Pariwisata	1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 2. Dinas Pariwisata

No	Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*
			d. Pengertian “dibina” pada indikator ini adalah bentuk pendampingan berupa fasilitasi, publikasi, edukasi, advokasi maupun bantuan anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada entitas budaya, adat serta tradisi daerah.		
17.	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks Kerukunan Umat Beragama	Kerukunan umat beragama adalah keadaan atau kondisi kehidupan umat beragama yang berinteraksi secara harmonis, toleran, damai, saling menghargai, dan menghormati perbedaan agama dan kebebasan menjalankan beribadah masing-masing.	Kementerian Agama	1. Bakesbangpol 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat SETDA

Sumber: Hasil Analisis

Keselarasan antara tujuan dan sasaran pembangunan Kota Bima dengan Provinsi NTB serta arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 5.6.

Keselarasan Tujuan Pembangunan Kota Bima dalam RPJMD Tahun 2018-2023 dengan Arahan Presiden dan Agenda Pembangunan Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023			Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023	ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**			
Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing	1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	4. Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	PEMBANGUNAN SDM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		1.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	5. Terwujudnya Pengelolaan pendidikan untuk SDM yang berdaya saing	PEMBANGUNAN SDM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
		1.1.3. Meningkatnya Daya Beli masyarakat		TRANSFORMASI EKONOMI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
		1.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan		TRANSFORMASI EKONOMI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023			Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023	ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**			
Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan	2.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	2.1.1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	7. Terwujudnya pertumbuhan pertanian / agribisnis dan investasi yang berkualitas	TRANSFORMASI EKONOMI	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
			8. Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	
			9. Terwujudnya perindustrian yang unggul		Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
	2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	2.2.1. Menurunnya angka kemiskinan		TRANSFORMASI EKONOMI	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
		2.2.2. Meningkatnya kesempatan kerja		PEMBANGUNAN SDM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola	3.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	3. Terwujudnya pemerintahan yang bersih bebas KKN dan Akuntabel	PENYEDERHANAAN BIROKRASI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023			Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023	ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**			
Pemerintahan Yang Baik					Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		3.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah		PENYEDERHANAAN BIROKRASI	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
				PENYEDERHANAAN REGULASI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
		3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik		PENYEDERHANAAN REGULASI	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023			Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023	ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**			
Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	4.1.1. Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	6. Terwujudnya lingkungan hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan	TRANSFORMASI EKONOMI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
				PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
		4.1.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup		TRANSFORMASI EKONOMI	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
	4.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	4.2.1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman		PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023			Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023	ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**			
		4.2.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	2. Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
		4.2.3. Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	1. Terwujudnya ketangguhan menghadapi resiko bencana	PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR TRANSFORMASI EKONOMI PEMBANGUNAN SDM	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**	5.1. Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	5.1.1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	10. Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB yang Madani (Bahagia)	PEMBANGUNAN SDM	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
		5.1.2. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal			

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023			Tujuan Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2019-2023	ARAHAN PRESIDEN	AGENDA PEMBANGUNAN NASIONAL
MISI	**TUJUAN**	**SASARAN**			
		5.1.3. Meningkatnya pengamalan ajaran agama			

Sumber: Hasil Analisis

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah merupakan cara atau metode pendekatan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima. Strategi, arah kebijakan dan program pembangunan juga merupakan bagian dari rumusan perencanaan komprehensif dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi pembangunan daerah. Pendekatan yang komprehensif menempatkan strategi sebagai instrumen untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan.

Rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah ini disusun berdasarkan serangkaian proses perencanaan strategis, mempertimbangan isu-isu strategis pembangunan daerah yang akan dihadapi selama 5 tahun kedepan.

6.1. Strategi

Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas Pemerintahan, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi.

Strategi juga dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi, yang dirumuskan dengan kriterianya mencakup: (a) hubungan yang rasional antara visi dan misi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, (b) hubungan yang kuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, (c) pernyataan

yang umum guna memandu pengembangan program pembangunan tahunan selama lima tahun, dan (d) dikembangkan dalam suatu pemetaan strategi daerah. Strategi diperlukan untuk memperjelas arah pengembangan program prioritas kepala daerah, mempercepat implementasi dan konsistensi visi, misi, tujuan dan sasaran dalam proses pembangunan daerah sehingga dinamika pembangunan tetap terarah, terpadu dan berkesinambungan.

Untuk menentukan strategi, dilakukan dengan menggunakan metoda analisis SWOT (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dengan memperhatikan berbagai isu strategis yang berkembang. Selanjutnya strategi yang telah ditentukan dijabarkan ke dalam berbagai kegiatan yang akan mendukung tercapainya sasaran yang diinginkan. Pada akhirnya rumusan alternatif tersebut ditetapkan menjadi strategi melalui aktivitas FGD, *scoring*, analisis *balanced scorecard*.

Tabel 6.1.

Analisa SWOT Bagi Perumusan Strategi Pembangunan

MISI 1: Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing			
TUJUAN 1: Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia			
SASARAN 1.1.: Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Meningkatnya kinerja layanan kesehatan yang terstandar	MEMBANGUN KEKUATAN	Membangun system kesehatan untuk pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas
KELEMAHAN	Belum optimalnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar
	Masih kurangnya layanan kesehatan di RSUD		Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD
	Masih banyak fasilitas layanan kesehatan yang belum terakreditasi		Melaksanakan penilaian akreditasi bagi seluruh fasilitas pelayanan kesehatan
PELUANG	Partisipasi dan atensi masyarakat terhadap	MENANGKAP PELUANG	Menyediakan media bagi partisipasi masyarakat

	pelayanan kesehatan sangat baik		untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
ANCAMAN	Kesehatan lingkungan yang masih rendah sehingga rentan terhadap penyakit menular	MEREDUKSI ANCAMAN	Menggalakan promosi kesehatan lingkungan dan meningkatkan afirmasi pemerintah terhadap upaya lingkungan sehat.
STRATEGI	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif		
SASARAN 1.2: Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Sarana dan prasarana pendidkan dasar relative memadai	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan wajib belajar pelayanan pendidikan dasar
	Sekolah terakreditasi meningkat setiap tahunnya		Meningkatkan kompetensi guru dan daya saing siswa didik
KELEMAHAN	Angka partisipasi PAUD masih relative rendah	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan pelayanan pendidikan PAUD
	Pelayanan pendidikan inklusif belum optimal		Meningkatkan kualitas layanan pendidikan inklusif
PELUANG	Perhatian dan partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam memajukan pendidikan	MENANGKAP PELUANG	Menguatkan motivasi dan diseminasi dikalangan masyarakat tentang pentingnya pendidikan melalui berbagai media
ANCAMAN	Belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan yang layak dan memenuhi standar	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di daerah-daerah pinggiran

STRATEGI	**Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD dan Pendidikan dasar yang berkualitas**		
SASARAN 1.3: Meningkatnya Daya Beli masyarakat			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Infrastruktur perkotaan yang baik dan mendukung kelancaran distribusi logistik	MEMBANGUN KEKUATAN	Peningkatan kualitas infrastruktur di kawasan strategis ekonomi
KELEMAHAN	Fasilitas perdagangan dan jasa maupun fasilitas umum masih terkonsetrasi di pusat kota sehingga menimbulkan disparitas wilayah	MENGATASI KELEMAHAN	Pemerataan pembangunan wilayah melalui pendekatan cluster unggulan
PELUANG	Pengembangan KEK Mandalika dan Kawasan Komodo menjadikan Kota Bima sebagai salah satu kawasan penyangga	MENANGKAP PELUANG	Mendorong pihak swasta untuk mengembangkan usaha dan berinvestasi di Kota Bima
ANCAMAN	Kondisi ekonomi makro yang sulit diprediksi akibat covid 19	MEREDUKSI ANCAMAN	Menguatkan potensi unggulan daerah
STRATEGI	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat Kota bima melalui stabilisasi perekonomian, pembangunan kawasan dan penguatan sector strategis		
SASARAN 1.4: Meningkatnya ketahanan pangan			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Ketersediaan bahan pangan	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan kecukupan konsumsi kalori dan protein
	Ketersediaan infrastruktur yang baik		Meningkatkan distribusi cadangan pangan
KELEMAHAN	Masih ada kelurahan yang rawan pangan	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan kualitas pangan masyarakat

			melalui pengendalian harga pangan
PELUANG	Supply bahan pangan dari kawasan daerah penyangga cukup tinggi	MENANGKAP PELUANG	Meningkatkan kapasitas dan fasilitas penyimpanan cadangan pangan
ANCAMAN	Keamanan pangan	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan intensitas dan kualitas pengujian bahan pangan
STRATEGI	**Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan**		
MISI 2: Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan			
TUJUAN 2.1 : Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat			
SASARAN 2.1.1: Meningkatknya pertumbuhan ekonomi			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Posisi strategis Kota bima sebagai daerah transit dan penyangga kawasan labuhan Bajo dan KEK Mandalika	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan iklim investasi dan produktifitas sector-sektor unggulan: pariwisata, pertanian tanaman pangan, kelautan dan perikanan, perdagangan dan jasa serta industry
	Daya tarik investasi yang didukung oleh ketersediaan infrastruktur perkotaan yang memadai		
KELEMAHAN	Lemahnya kemampuan dan daya saing UMKM	MENGATASI KELEMAHAN	Fasilitasi pelatihan, akses modal dan pendampingan pelaku usaha dan UMKM dalam meningkatkan dan mengembangkan skala

			usahanya
	Belum optimalnya pemasaran produk sektor unggulan		Meningkatkan akses pemasaran produk unggulan daerah
	Belum efisien dan efektifnya Alsintan dalam menunjang produktifitas		Integrasi sector pertanian dengan sektor pariwisata melalui Pengembangan Agrowisata
PELUANG	Fokus pemerintah pusat untuk mengembangan kawasan KEK Mandalika dan Kawasan Pulau Komodo	MENANGKAP PELUANG	Integrasi dan supporting arah kebijakan dan prioritas pembangunan bidang pariwisata dan ekonomi oleh Pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi NTB
	Fokus Pemerintah Provinsi NTB untuk mendorong pengembangan sector pariwisata dan industry		
ANCAMAN	Penurunan kualitas lingkungan hidup akibat perladangan di pegunungan dan perbukitan.	MEREDUKSI ANCAMAN	Melakukan reorientasi pengembangan produksi dan produktifitas pertanian
	Kemudahan akses internet dan belanja online meningkatkan arus masuk produk dan budaya luar		Menyelenggarakan event-event budaya lokal sebagai daya tarik pariwisata yang berbasis kearifan lokal
STRATEGI	**Mengembangkan sector pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan**		
TUJUAN 2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat			

SASARAN 2.2.1. Menurunnya angka kemiskinan			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Optimalnya kinerja pengentasan kemiskinan dan penanganan penyandang masalah kesejahteraan social	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan pengintegrasian dan kerjasama lintas urusan serta keterlibatan multipihak dalam penanggulangan kemiskinan
KELEMAHAN	Data terpadu kesejahteraan social belum diupdate seluruhnya	MENGATASI KELEMAHAN	Melakukan update dan validasi DTKS secara massif
PELUANG	Perhatian dan partisipasi NGO sangat tinggi dalam upaya penanggulangan kemiskinan	MENANGKAP PELUANG	Mengembangkan regulasi tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemanfaatan dana CSR
ANCAMAN		MEREDUKSI ANCAMAN	
STRATEGI	**Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS**		
TUJUAN 2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat			
SASARAN 2.2.2. Meningkatnya kesempatan kerja			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Jumlah penduduk dan usia produktif serta angkatan kerja potensial cukup tinggi	MEMBANGUN KEKUATAN	Menguatkan afirmasi pemerintah dengan melibatkan stakeholder dalam perluasan kesempatan dan penciptaan lapangan kerja baru
KELEMAHAN	Kota Bima belum memiliki BLK terpadu	MENGATASI KELEMAHAN	Membentuk UPTD BLK dan membangun gedung

			serta fasilitas BLK yang berkualitas
PELUANG	Pengembangan produk unggulan dan pariwisata membuka lapangan kerja dan peluang usaha	MENANGKAP PELUANG	Memfasilitasi dan menstimulasi penciptaan lapangan kerja baru dan peluang usaha melalui akses permodalan dan pelatihan
ANCAMAN	Tidak meratanya sebaran dan kepadatan penduduk	MEREDUKSI ANCAMAN	Membangun pusat pertumbuhan baru di wilayah pinggiran kota
STRATEGI	**Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga kerja terampil serta peningkatan akses permodalan**		
MISI 3: Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.			
TUJUAN 3.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan			
SASARAN 3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan enyelenggaraan pemerintahan daerah			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Komitmen pemerintah kota Bima untuk memaksimalkan implementasi SAKIP serta membangun smart city	MEMBANGUN KEKUATAN	Mengoptimalkan dan mengakselerasi implementasi rencana aksi reformasi birokrasi
KELEMAHAN	Proses bisnis birokrasi dan pelayanan public belum optimal	MENGATASI KELEMAHAN	Membangun bisnis proses pemerintah daerah yang berorientasi pada hasil
	Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah daerah		Mengintegrasikan prose perencanaan, penganggaran dan pengendalian/monev pelaksanaan

			pembangunan daerah
PELUANG	Intervensi Pemerintah Pusat yang tinggi melalui berbagai regulasi	MENANGKAP PELUANG	Menyediakan media bagi partisipasi masyarakat untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
	Restrukturisasi kelembagaan organisasi perangkat daerah		Memastikan kelembagaan organisasi perangkat daerah sesuai dengan tujuan pembangunan daerah
ANCAMAN	Regulasi pusat yang diskresi dan cepat berubah	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan kapasitas SDM Aparatur
STRATEGI	**Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui internalisasi delapan agenda reformasi birokrasi.**		
TUJUAN 3.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan			
SASARAN 3.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Instrumen untuk peningkatan pendapatan asli daerah sudah tersedia	MEMBANGUN KEKUATAN	Menerapkan system pembayaran pajak dan retribusi secara non tunai
KELEMAHAN	Sumber-sumber pendapatan potensial belum dieksplor secara optimal	MENGATASI KELEMAHAN	Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah
PELUANG	Investasi dan aktifitas ekonomi terus tumbuh dan berkembang	MENANGKAP PELUANG	Menciptakan ingkatkan kemudahan iklim investasi dan usaha yang
ANCAMAN		MEREDUKSI ANCAMAN	
STRATEGI	**Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah**		

TUJUAN 3.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan			
SASARAN 3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Komitmen yang kuat dari Pemerintah Kota Bima untuk mengimplementasikan e-government guna peningkatan pelayanan public	MEMBANGUN KEKUATAN	Mengembangkan pelayanan publik berbasis online
KELEMAHAN	Command centre belum terisi secara optimal baik dari data base maupun perangkat lunaknya	MENGATASI KELEMAHAN	Mengoptimalkan fungsi command centre
PELUANG	Partisipasi masyarakat tinggi dalam pengawasan kualitas pelayanan public	MENANGKAP PELUANG	Melibatkan stakeholder dalam pelaksanaan survey kepuasan dan pengelolaan pengaduan masyarakat
ANCAMAN	Penguasaan terhadap teknologi IT di kalangan masyarakat masih rendah	MEREDUKSI ANCAMAN	Mengembangkan aplikasi yang mudah diaplikasikan di kalangan masyarakat
STRATEGI	**Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik**		
MISI 4: Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana			
TUJUAN 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang			
SASARAN 4.1.1. Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang			
ANALISIS SWOT SASARAN 1			
KEKUATAN	Rancangan revisi RTRW dan RDTRK yang telah mengadaptasi penanggulangan bencana telah tersedia	MEMBANGUN KEKUATAN	Mempercepat penetapan Perda Revisi RTRW dan RDTRK

KELEMAHAN	Pelanggaran pemanfaatan ruang masih terjadi	MENGATASI KELEMAHAN	Mwngintensifkan sosialisasi rencana tata ruang kepada seluruh masyarakat
	Revisi RTRW dan RDTRK belum ditetapkan menjadi PERDA		Mempercepat penetapan Perda Revisi RTRW dan RDTRK
PELUANG	Perhatian dan kontribusi pemerintah pusat dan provinsi dalam penataan ruang khususnya kawasan pesisir dan pantai tinggi	MENANGKAP PELUANG	Mensinergikan perencanaan tata ruang wilayah dengan rencana tata ruang pesisir dan pulau-pulau kecil
ANCAMAN	Pemanfaatan ruang dan pembangunan masih yang tidak dilengkapi dengan ijin masih sering terjadi di masyarakat	MEREDUKSI ANCAMAN	Mengoptimalkan pengendalian pemanfaatan ruang oleh PPNS dan BKPRD
STRATEGI	**Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Bima**		
TUJUAN 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang			
SASARAN 4.1.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Komitmen pemerintah untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui Gerakan BERSATU	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan wajib belajar pelayanan pendidikan dasar
	Sudah ada Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah		
KELEMAHAN	Sampah belum ditangani secara optimal	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan sarana dan prasarana pengelolaan sampah
	Kawasan hulu mengalami kerusakan massif		Membangun DAM dan Bendungan di daerah

	sehingga terjadi kekeringan		Hulu
PELUANG	Perhatian pemerintah pusat dan provinsi terhadap rehabilitasi lahan hutan sangat tinggi	MENANGKAP PELUANG	Meningkatkan kerjasama penanganan hutan dan lingkungan hidup di kawasan perbatasan
ANCAMAN	Kerusakan lingkungan di wilayah sekitar terjadi secara masif	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan gerakan promosi lingkungan sehat
STRATEGI	**Membangun system pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat secara terpadu**		
TUJUAN 4.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana			
SASARAN 4.2.1. 4.2.1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Atensi Pemerintah Kota Bima dalam penataan kawasan permukiman layak cukup tinggi dan memperoleh dukungan dari lembaga non pemerintah	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan ketersediaan dan kualitas PSU pada kawasan permukiman
	Telah melakukan relokasi permukiman yang berada di kawasan bantaran sungai		Melakukan penataan kawasan bantaran dan sempadan sungai
KELEMAHAN	Kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni masih tinggi	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan cakupan penanganan kawasan kumuh dan rumah tidak layak huni
PELUANG	Dukungan pemerintah pusat terhadap penanganan kumuh dan rumah tidak layak huni sangat tinggi	MENANGKAP PELUANG	Melaksanakan program sharing bersama pemerintah pusat

ANCAMAN	Potensi bencana yang dapat terjadi setiap saat	MEREDUKSI ANCAMAN	Membangun kawasan dan rumah layak huni yang tanggap bencana
STRATEGI	**Meningkatkan penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan ketersediaan PSU dan pembangunan rumah layak huni**		
SASARAN 4.2.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Pembangunan infrastruktur daerah selalu menjadi prioritas pembangunan tahunan Kota Bima	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan pembangunan infrastruktur daerah yang memenuhi standar.
KELEMAHAN	Cakupan pembangunan infrastruktur daerah belum merata di seluruh wilayah	MENGATASI KELEMAHAN	
	Masih ada infrastruktur yang belum direhabilitasi akibat bencana banjir bandang		
PELUANG	Perhatian pemerintah pusat dalam penyediaan infrastruktur daerah sangat tinggi	MENANGKAP PELUANG	Melaksanakan program sharing bersama pemerintah pusat
ANCAMAN	Potensi bencana yang dapat terjadi setiap saat	MEREDUKSI ANCAMAN	Membangun infrastruktur yang tahan bencana
STRATEGI	**Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung produktifitas sector unggulan daerah dan investasi**		
SASARAN 4.2.3. Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Telah tersedia peraturan daerah tentang Pananggulangan bencana	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan mitigasi bencana dan tanggap darurat penanganan bencana.
	Sistem kesiapsiagaan		

	terhadap bencana terus meningkat		
KELEMAHAN	Cakupan kesiapsiagaan terhadap bencana masih terbatas	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana
	Belum optimalnya system peringatan dini bencana		
PELUANG	Perhatian pemerintah pusat dalam mitigasi dan tanggap darurat bencana sangat tinggi	MENANGKAP PELUANG	Melaksanakan program sharing bersama pemerintah pusat
ANCAMAN	Potensi bencana yang dapat terjadi setiap saat	MEREDUKSI ANCAMAN	Membangun infrastruktur yang tahan bencana
STRATEGI	**Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana**		
MISI 5: Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais			
TUJUAN 5.1. Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais			
SASARAN 5.1.1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban			
ANALISIS SWOT SASARAN 1			
KEKUATAN	Pemerintah Kota Bima mampu menjaga stabilitas keamanan daerah	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan keamanan ketentraman dan ketertiban mulai dari skala lingkungan
KELEMAHAN	Cakupan pengendalian stabilitas keamanan daerah belum menyeluruh	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan koordinasi dan kerjasama FKPD dalam mewjudkan stabilitas keamanan daerah
PELUANG	Partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan ketentraman dan ketertiban cukup tinggi	MENANGKAP PELUANG	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana kelurahan termasuk didalamnya menjaga K3.
ANCAMAN	Kota Bima masih dianggap zona merah	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan peran lembaga keagamaan,

	terorisme dan rawan konflik sosial		organisasi social kemasyarakatan dan tokoh aga,a/tokoh masyarakat
STRATEGI	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik social guna mewujudkan stabilitas daerah		
SASARAN 5.1.2. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Sarana dan prasarana pengembangan budaya sudah terbangun	MEMBANGUN KEKUATAN	Meningkatkan cakupan wajib belajar pelayanan pendidikan dasar
	Upaya perlindungan dan pengembangan budaya lokal terus meningkat baik secara formal maupun informal		Meningkatkan kompetensi guru dan daya saing siswa didik
KELEMAHAN	Cakupan upaya perlindungan dan pengembangan budaya masih terbatas	MENGATASI KELEMAHAN	Meningkatkan cakupan pelayanan adat budaya dan tradisi
	Data base tentang adat budaya maupun tradisi belum dibangunan dengan baik		Membangun data base budaya dan tradisi daerah
PELUANG	Peran dan partisipasi lembaga adat dan NGO yang konsen dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah berkembang dengan baik	MENANGKAP PELUANG	Memberikan stimulasi kepada lembaga adat dan NGO yang konsen dalam perlindungan dan pengembangan budaya daerah
ANCAMAN	Masuknya budaya asing secara online dan bebas	MEREDUKSI ANCAMAN	Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan di daerah-

			daerah pinggiran
STRATEGI	**Memperluas cakupan perlindungan dan pengembangan budaya daerah**		
SASARAN 5.1.3. Meningkatnya pengamalan ajaran agama			
ANALISIS SWOT			
KEKUATAN	Perhatian Pemerintah kota Bima dalam peningkatan pe mahaman dan pengamalan ajaran agama di Kota Bima sangat baik	MEMBANGUN KEKUATAN	Melanjutkan fasilitasi dan atensi terhadap keberadaan fasilitas keagamaan
KELEMAHAN	Penyelesaian pembangunan Masjid Agung Al-Muwahiddin tersendat-sendat	MENGATASI KELEMAHAN	Menyelesaikan pembangunan Masjid Agung Al Muwahiddin Kota Bima
PELUANG	Toleransi antar umat beragama sangat tinggi	MENANGKAP PELUANG	Mengoptimalkan peran FKUB
ANCAMAN	Terorisme yang mengatasnamakan agama	MEREDUKSI ANCAMAN	
STRATEGI	**Meningkatkan kerukunan umat beragama dan mendorong syiar keagamaan di kalangan masyarakat.**		

Sumber: Hasil Analisis

Secara umum strategi dipetakan kedalam empat perspektif yaitu perspektif masyarakat/layanan, perspektif internal, perspektif kelembagaan dan perspektif keuangan.

1. **Perspektif Masyarakat/Layanan**: bagaimana strategi dapat menjadikan pengaruh langsung terhadap pengguna layanan atau segmen masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Jenis strategi antara lain sosialisasi, konsolidasi, konsultasi, negosiasi, mediasi, promosi, intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, mobilisasi
2. **Perspektif Proses Internal**: strategi harus mampu menjadikan perbaikan proses dan pemberian nilai tambah pada proses birokrasi (*internal business*

process). Jenis strategi antara lain koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, sinergi.

3. **Perspektif Kelembagaan**: strategi harus mampu menjelaskan dengan investasi apa pada sistem, teknologi, dan sumber daya manusia (SDM) untuk menjamin terselenggaranya layanan pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) dalam jangka panjang. Jenis strategi antara lain rasionalisasi, revitalisasi, restrukturisasi, reorganisasi, rekonstruksi, akreditasi, reposisi, ratifikasi, desentralisasi.
4. **Perspektif Keuangan**: strategi harus dapat menempatkan aspek pendanaan sebagai tujuan sekaligus sebagai konstrain (*cost-effectiveness*) serta untuk mencapai manfaat yang terbesar dari dana yang terbatas (*allocative efficiency*). Jenis strategi antara lain investasi, divestasi, mobilisasi deregulasi.

Tabel 6.2 berikut akan menyajikan strategi pembangunan untuk setiap sasaran sebagaimana hasil analisis SWOT.

Tabel 6.2.

Strategi Pembangunan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;			
1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD dan Pendidikan dasar yang berkualitas
		Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat Kota bima melalui stabilisasi perekonomian,

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			pembangunan kawasan dan penguatan sector strategis
		Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;			
2.1	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan sector pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya angka Kemiskinan	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS
		Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			wadah penyediaan tenaga kerja trampil serta peningkatan akses permodalan
Misi 3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.			
3.1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui internalisasi delapan agenda reformasi birokrasi.
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik
Misi 4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;			
4.1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Bima
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Membangun system pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup berbasis

No	Tujuan	Sasaran	Strategi
			masyarakat secara terpadu
4.2.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung produktifitas sector unggulan daerah dan investasi
		Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.			
5.1.	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik social guna mewujudkan stabilitas daerah
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Memperluas cakupan perlindungan dan pengembangan budaya daerah
		Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Meningkatkan kerukunan umat beragama dan mendorong syiar keagamaan di kalangan masyarakat.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi

Sumber : Hasil Analisa dan Cascading

Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2018-2023 digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 6.3

Keterkaitan Tujuan, Sasaran, dan Strategi Pembangunan Kota Bima dan Provinsi NTB Tahun 2018-2023

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;						**Misi 3 NTB SEHAT DAN CERDAS melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai pondasi daya saing daerah**					
						Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrialisasi					
1.1.	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	1.1.1	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif	3.1	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	3.1.1	Meningkatnya derajat kesehatan dan gizi masyarakat	1	Peningkatan kualitas kesehatan keluarga
										2	Peningkatan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular
										3	Peningktan kualitas pelayanan kesehatan korban bencana dan penanggulangan masalah kesehatan
										4	Peningkatan Akses dan pelayanan fasilitas kesehatan yang bermutu dan terstandar
										5	Peningkatan kualitas asupan gizi masyarakat
										6	Peningkatan promosi kesehatan dan pemberdaaan masyarakat

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
						5.1	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	5.1.3	Meningkatnya jaminan kesehatan dan sosial bagi penduduk miskin	1	Peningkatan perlindungan dan jaminan sosial dan kesehatan
		1.1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	1	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD dan Pendidikan dasar yang berkualitas	3.1	Terwujudnya pengelolaan kesehatan untuk SDM yang berdaya saing	3.1.2	Meningkatnya kualitas dan jangkauan layanan pendidikan	1	Peningkatan pemerataan pendidikan
										2	Peningkatan akses, mutu, dan daya saing pendidikan
										3	Peningkatan kualitas data dan tingkat literasi masyarakat
										4	Peningkatan pembinaan pemuda dan olahraga berprestasi
		1.1.3	Meningkatnya Daya Beli masyarakat		Meningkatkan kualitas belanja masyarakat Kota bima melalui stabilisasi perekonomian, pembangunan kawasan dan penguatan sector strategis	5.1	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	5.1.7	Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup	1	Pemberdayaan pedagang kaki lima dan asongan
		1.1.4	Meningkatnya ketahanan		Meningkatkan ketersediaan			5.1.2	Meingkatnya produksi sektor	1	Peningkatan produksi pertanian dengan

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
			pangan		cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan				primer		mengembangkan kawasan berbasis pertanian
										2	Peningkatan Produksi dan pengelolaan hasil pertenakan
										3	Pengembangan pengelolaan dan budidaya perikanan
										4	Peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya hutan
								5.1.4	Meningkatnya ketahanan dan keragaman konsumsi pangan		Peningkatan ketersediaan, distribusi dan keamanan pangan segar asal tumbuhan (PSAT) (usulan Ketahanan Pangan)
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;						**Misi 5 NTB SEJAHTERA DAN MANDIRI melalui penanggulangan kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan pertumbuhan ekonomi inklusif bertumpu pada pertanian, pariwisata dan industrilisasi**					
2.1	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	2.1.1	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	1	Mengembangkan sektor pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk	5.1	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	5.1.1	Meningkatnya investasi, kerjasama pemerintah dan badan usaha	1	Optimalisasi manfaat destinasi unggulan an kawasan strategis (Mandalika dan SAMOTA dll) untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
					unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan			5.1.6	Terjaganya stabilitas harga kebutuhan pokok	1	pengawasan terhadap stabilitas harga kebutuhan pokok
						5.2	Terwujudnya pariwisata yang dapat diandalkan	5.2.1.	Meningkatnya daya saing pariwisata	1	Pengembangan Desa wisata dan wisata halal
								5.2.2	Meningkatnya pendapatan asli daerah	1	Peningkatan kemandirian daerah
2.2	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	2.2.1	Menurunnya angka Kemiskinan	1	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS	5.1	Terwujudnya pertumbuhan agribisnis dan investasi yang berkualitas	5.1.5	Terpenuhinya pelayanan dasar bagi penduduk miskin	1	Pembangunan sistim dan pengelolaan air minum yang terintegrasi untuk pemenuhan air minum layak
										2	Penyambungan listrik murah dan hemat
										3	Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan layak huni
										4	Mendorong penyediaan sarana dan prasarana dasar lingkungan permukiman

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
		2.2.2.	Meningkatnya kesempatan kerja	1	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga kerja trampil serta peningkatan akses permodalan	5.3	Terwujudnya perindustrian yang unggul	5.3.1	Meningkatnya daya saing industri	1	Pengakajian dan penerapan terknologi permesinan, teknologi pengelohan pangan, teknologi digital dan industri kreatif, serta teknologi pertanian, perikanan, dan peternakan (Pengembangan Scince Technology Industrial Park (STIP)
										2	Peningkatan daya saing produk industri
								5.3.2	Menurunnya pengangguran terbuka	1	Peningkatan pelatihan produktivitas dan pengembangan penempatan tenaga kerja
										2	Peningkatan perlindungan hubungan industrial, jaminan sosial tenaga kerja dan pengembangan pengawasan ketenagakerjaan
Misi 3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.						**Misi 2 NTB BERSIH DAN MELAYANI melalui transformasi birokrasi yang berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dari KKN dan berdedikasi**						

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
3.1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	3.1.1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	1	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui internalisasi delapan agenda reformasi birokrasi.	2.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel	1	Meningkatnya akuntabilitas dan keuangan daerah	1	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
		3.1.2	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	1	Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah			2	Meningkatnya kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan	1	Penguatan fungsi pengawasan penyelanggaraan fungsi pemerintah
										2	Peningkatan dan penguatan profesionalisme aparat pengawas intern pemerintah (APIP)
										3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
		3.1.3	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik			3	Meningkatnya profesionalisme ASN	1	Penguatan fungsi pengawasan penyelanggaraan fungsi pemerintah
										2	Peningkatan dan penguatan profesionalisme aparat pengawas intern

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
											pemerintah (APIP)
										3	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik
								4	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	1	Peningkatan standarisasi pelayanan pada unit pelayanan publik
										2	Peningkatan kualitas pelayanan melalui pemanfaatan teknologi informasi
Misi 4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;							**Misi 1 NTB TANGGUH DAN MANTAP melalui penguatan mitigasi bencana dan pengembangan infrastruktur serta konektivitas wilayah**				
							Misi 4 NTB ASRI DAN LESTARI melalui pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan				
4.1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	4.1.1	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	1	Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Bima	4.1	Terwujudnya Lingkungan Hidup dan pengelolaan persampahan yang bersih dan berkelanjutan				
		4.1.2	Meningkatnya kualitas Lingkungan	1	Membangun system pengelolaan sampah dan			4.1.1	Meningkatnya kualitas, daya dukung dan daya tampung	1	Peningkatan upaya konservasi dan rehabilitasi lahan, sungai, danau, laut dan sumber

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
			Hidup		pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat secara terpadu				lingkungan hidup		air
										2	Peningkatan upaya perlindungan hutan melalui penjagaan batas kawasan berbasis pemberdayaan masyarakat
										3	Peningkatan upaya perlindungan dan pengawasan sumber daya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil melalui penegakan aturan dan partisispasi kelompok
										4	Peningkatan pengawasan dan dan pengendalian RTRW dan RZWP3K
								4.1.2	Meningkatknya pengelolaan persampahan	1	Peningkatan kinerja pengelolaan sampah
										2	Optimalisasi peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
4.2.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	4.2.1	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	1	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung produktifitas sector unggulan daerah dan investasi	1.1	Terwujudnya aksesibilitas antar wilayah untuk pengembangan sektor unggulan	1.1.1	Meningkatnya pembangunan infrastruktur wilayah	1	Peningkatan kemantapan jalan
										2	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian jaringan irigasi pertanian
										3	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku
								1.1.2	Peningkatan ketersediaan dan keberfungsian infrastruktur air baku	1	Peningkatan perhubungan antar wilayah yang berkualitas
		4.2.2	Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	1	Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	1.2	Terwujudnya Ketangguhan menghadapi resiko bencana	1.2.1	Meningkatnya kualitas dalam penanggulangan bencana	1	Peningkatan upaya pencegahan, kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.							**Misi 6 NTB AMAN DAN BERKAH melalui Perwujudan masyarakat madani dan beriman, berkarakter dan penegakan hukum yang berkeadilan**				

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
5.1.	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	5.1.1	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	1	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik social guna mewujudkan stabilitas daerah	6.1	Terwujudnya kehidupan masyarakat NTB madani (bahagia)	6.1.1	Meningkatnya nilai sosial budaya & toleransi masyarakat	1	Pembinaan lembaga-lembaga sosial, agama, adat dan kemasyarakatan
		5.1.2	Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	1	Memperluas cakupan perlindungan dan pengembangan budaya daerah			6.1.2	Meningkatnya kualitas & penegakan produk hukum daerah	1	Penanganan pelanggaran PERDA melalui tindakan preventif dan represif
										2	Penguatan kemitraan bersama aparat penegak hukum dan masyarakat
										3	Penataan peraturan perundang-undangan dan pelayanan hukum
		5.1.3	Meningkatnya pengamalan ajaran agama	1	Meningkatkan kerukunan umat beragama dan mendorong syiar keagamaan di kalangan			6.1.3	Meningkatnya kesadaran politik masyarakat	1	Peningkatan keterlibatan masyarakat dalam politik
								6.1.4	Meningkatnya pemberdayaan	1	peningkatan pemberdayaan

Perubahan RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023											
No	**Tujuan**		**Sasaran**		**Strategi**	**No**	**Tujuan**	**No**	**Sasaran**	**No**	**Strategi**
					masyarakat.				perempuan dan perlindungan anak		perempuan dalam pembangunan
										2	Peningkatan Kabupaten/Kota yang mampu memenuhi hak-hak anak

Sumber: Hasil Analisis

6.2. Arah Kebijakan

Strategi yang sudah dirumuskan sebagaimana disajikan pada bagian sebelumnya, lebih lanjut dijabarkan kedalam arah kebijakan pembangunan tahunan dengan mempertimbangkan urgensi permasalahan dan penekanan yang berbeda tiap tahunnya, namun tetap berkesinambungan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah. Namun demikian pada permasalahan-permasalahan tertentu tidak diberlakukan penekanan yang berbeda pada setiap tahunnya disebabkan oleh pelaksanaannya harus dilakukan secara berkelanjutan.

Arah kebijakan pembangunan Kota Bima juga mengacu kepada hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan.

KLHS telah mengidentifikasi pengaruh kebijakan, rencana dan program pembangunan Kota Bima terhadap berbagai aspek dan komponen lingkungan hidup untuk kemudian diintegrasikan dengan visi, misi kepala daerah.

Tabel 6.4

Arah Kebijakan Pembangunan

No	Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif	Pemenuhan upaya kesehatan baik perorangan maupun masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM kesehatan, ketersediaan farmasi, alkes dan sarana prasarana kesehatan lainnya				
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD dan Pendidikan dasar yang berkualitas	Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan serta pengembangan perpustakaann				
		Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat Kota bima melalui stabilisasi perekonomian, pembangunan kawasan dan penguatan sector strategis	Pengembangan Wirausaha baru mandiri dan pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan pembangunan kawasan strategis				
		Meningkatnya ketahanan	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama,	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan dan pengawasan keamanan pangan				

No	Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
		pangan	distribusi, konsumsi dan keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan					
2	Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;	Meningkatknya pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan sector pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan	Pembangunan pariwisata, peningkatan iklim dan promosi penanaman modal, peningkatan produksi dan produktifitas kelautan dan perikanan, pertanian, industry serta pengembangan pariwisata				
		Menurunnya Angka Kemiskinan	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas cakupan penanganan PMKS	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan sosial masyarakat kelurahan, serta memperluas cakupan rehabilitasi, perlindangan dan jaminan sosial				
		Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai	Peningkatan perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja.				

No	Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
			wadah penyediaan tenaga kerja trampil serta peningkatan akses permodalan					
3	Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui internalisasi delapan agenda reformasi birokrasi.	Peningkatan penyelenggaraan pengawasan dan pendampingan perumusan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan, pengembangan sumber daya manusia ASN, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta SPBE dan penataan kelembagaan				
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah	Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah				
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pelayanan perijinan penanaman modal serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik				

No	Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
4	Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Bima	Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan perencanaan inffrastruktur dan kewilayahan, SDA dan sector-sektor strategis				
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Membangun system pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat secara terpadu	Optimalisasi perencanaan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan persampahan				
		Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan ketersediaan PSU dan pembangunan rumah layak huni	Optimalisasi pengembangan permukiman dan perumahan, penataan kawasan kumuh, peningkatan sarana prasarana dan utilitas umum,pengembangan system penyediaan air minum, pengolahan limbah dan drainase.				
		Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung produktifitas sector unggulan daerah dan	Peningkatan penyelengaraan jalan, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, penerangan jalan, taman dan hutan kota serta pengelolaan sumber daya air,				

No	Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
			investasi					
		Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana				
5	Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta konflik social guna mewujudkan stabilitas daerah	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum,penguatan idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan serta peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi penanganan konflik sosial				
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan	Memperluas cakupan perlindungan dan pengembangan budaya daerah	Pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, serta pengelolaan cagar budaya				

No	Misi	Sasaran	Strategi	Kebijakan				
				2019	2020	2021	2022	2023
		pemanfaatan budaya lokal						
		Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Meningkatkan kerukunan umat beragama dan mendorong syiar keagamaan di kalangan masyarakat.	Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta fasilitasi kegiatan keagamaan oleh organisasi keagamaan.				

Sumber : *Hasil Analisa dan Cascading*

Tabel 6.5

Keterkaitan Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Kota Bima

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing;						
1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat Kota Bima baik dalam preventif maupun kuratif	Pemenuhan upaya kesehatan baik perorangan maupun masyarakat dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui peningkatan kualitas SDM kesehatan, ketersediaan farmasi, alkes dan sarana prasarana kesehatan lainnya	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Bidang Kesehatan
					Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Bidang Kesehatan
					Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Bidang Kesehatan
					Program sediaan farmasi, alat	Bidang Kesehatan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					kesehatan dan makanan minuman	
					Program Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pendidikan PAUD dan Pendidikan dasar yang berkualitas	Peningkatan kualitas pengelolaan pendidikan, pengembangan kurikulum, pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	Program pengelolaan pendidikan	Bidang Pendidikan
					Program Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				serta pengembangan perpustakaan	Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program pengembangan kurikulum	Bidang Pendidikan
					Program pendidik dan tenaga kependidikan	Bidang Pendidikan
					Program pengendalian perizinan pendidikan	Bidang Pendidikan
					Program pengembangan bahasa dan sastra	Bidang Pendidikan
					Program Pembinaan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
		Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Meningkatkan kualitas belanja masyarakat Kota bima melalui stabilisasi perekonomian, pembangunan kawasan dan penguatan sector strategis	Pengembangan Wirausaha baru mandiri dan pemberdayaan UMKM, stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan pembangunan kawasan strategis	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (UMKM)	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program pengembangan UMKM	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
					Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Perdagangan
					Program Standardisasi Dan Perlindungan	Bidang Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					Konsumen	
					Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
					Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan
					Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung
		Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatkan ketersediaan cadangan pangan utama, distribusi, konsumsi dan	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan, penanganan kerawanan pangan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Bidang Pangan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			keamanan pangan serta diversifikasi bahan pangan	dan pengawasan keamanan pangan	Program penanganan kerawanan pangan	Bidang Pangan
					Program pengawasan keamanan pangan	Bidang Pangan
Misi 2. **Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;**						
2.1	Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi	Mengembangkan sector pariwisata sebagai poros integrasi pembangunan produk unggulan dalam kerangka pembangunan ekonomi Kota Bima yang berkelanjutan	Pembangunan pariwisata, peningkatan iklim dan promosi penanaman modal, peningkatan produksi dan produktifitas kelautan dan perikanan, pertanian, industry serta pengembangan pariwisata	Program pengembangan iklim penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
					Program promosi penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
					Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
					Program pengelolaan data	Bidang Penanaman Modal

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					dan sistem informasi penanaman modal	
					Program pengelolaan perikanan tangkap	Bidang Kelautan dan Perikanan
					Program pengelolaan perikanan budidaya	Bidang Kelautan dan Perikanan
					Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Pertanian
					Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Pertanian
					Program Pengendalian	Bidang Pertanian

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Pertanian
					Program Perizinan Usaha Pertanian	Bidang Pertanian
					Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Pertanian
					Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Perdagangan
					Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bidang Perindustrian
					Program peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bidang Pariwisata
					Program pemasaran pariwisata	Bidang Pariwisata
					Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Bidang Pariwisata
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya angka Kemiskinan	Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap kebutuhan dasar dan memperluas	Peningkatan kesejahteraan keluarga dan pemberdayaan sosial masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Sosial
					Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			cakupan penanganan PMKS	kelurahan, serta memperluas cakupan rehabilitasi, perlindangan dan jaminan sosial	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
					Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
					Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan
		Meningkatnya kesempatan kerja	Meningkatkan partisipasi angkatan kerja serta tumbuhnya wirausaha baru mandiri melalui pembanguna BLK sebagai wadah penyediaan tenaga	Peningkatan perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja dan produktifitas tenaga kerja serta penempatan tenaga kerja.	Program perencanaan tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja
					Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja
					Program penempatan tenaga	Bidang Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			kerja trampil serta peningkatan akses permodalan		kerja	
					Program hubungan industrial	Bidang Tenaga Kerja
Misi 3. **Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.**						
3.1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani melalui internalisasi delapan agenda reformasi birokrasi.	Peningkatan penyelenggaraan pengawasan dan pendampingan perumusan kebijakan, perencanaan dan evaluasi pembangunan, pengembangan sumber daya manusia ASN, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta SPBE dan penataan kelembagaan	Program Administrasi Umum	Unsur Pendukung
					Program pengembangan sumber daya manusia	Unsur Penunjang (Kepegawaian)
					Program penyelenggaraan pengawasan	Unsur Pengawasan
					Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Unsur Pengawasan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Unsur Penunjang (Perencanaan)
					Program pengelolaan keuangan daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
					Program pengelolaan barang milik daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
					Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Unsur Penunjang (Perencanaan)
					Program Penyelenggaraan Urusan	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					Pemerintahan Umum	
					Program informasi dan komunikasi Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika
					Program aplikasi informatika	Bidang Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Meningkatkan tata kelola pendapatan daerah	Optimalisasi pengelolaan pendapatan daerah	Program pengelolaan pendapatan Daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Peningkatan cakupan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pelayanan perijinan penanaman modal	Program pendaftaran penduduk	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program pencatatan sipil	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				serta penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik		Sipil
					Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program pengelolaan profil kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
					Program pelayanan penanaman modal	BidangPenanaman Modal
					Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
Misi 4. **Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang**						

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;						
4.1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Meningkatkan kinerja perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang Kota Bima	Optimalisasi penyelenggaraan penataan ruang dan pengembangan perencanaan infrastruktur dan kewilayahan, SDA dan sektor-sektor strategis	Program penyelenggaraan penataan ruang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Unsur Penunjang (Perencanaan)
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Membangun system pengelolaan sampah dan pelestarian lingkungan hidup berbasis masyarakat secara terpadu	Optimalisasi perencanaan lingkungan, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan dan pengelolaan persampahan	Program perencanaan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
					Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan	Bidang Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					keanekaragaman hayati (kehati)	
					Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah B3)	Bidang Lingkungan Hidup
					Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH)	Bidang Lingkungan Hidup
					Program peningkatan	Bidang Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	
					Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Bidang Lingkungan Hidup
					Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
					Program pengelolaan persampahan	Bidang Lingkungan Hidup
					Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					regional	
4.2.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Meningkatkan penanganan kawasan kumuh melalui peningkatan ketersediaan PSU dan pembangunan rumah layak huni	Optimalisasi pengembangan permukiman dan perumahan, penataan kawasan kumuh, peningkatan sarana prasarana dan utilitas umum,pengembangan system penyediaan air minum, pengolahan limbah dan drainase.	Program pengembangan permukiman	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program kawasan permukiman	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program perumahan dan kawasan permukiman kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program pengelolaan dan	Bidang Pekerjaan Umum dan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					pengembangan sistem penyediaan air minum	Penataan Ruang
					Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program pengembangan perumahan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
					Program penataan bangunan gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program penataan bangunan dan lingkungannya	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur daerah yang mendukung produktifitas sektor unggulan daerah dan investasi	Peningkatan penyelengaraan jalan, peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan, penerangan jalan, taman dan hutan kota serta pengelolaan sumber daya air,	Program penyelenggaraan jalan	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
					Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
					Program pengelolaan pelayaran	Bidang Perhubungan
		Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Meningkatkan cakupan kesiapsiagaan, tanggap darurat dan rehabilitasi rekonstruksi pasca	Peningkatan kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			bencana		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Program Penanganan Bencana	Bidang Sosial
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais.						
5.1.	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Meningkatkan peran serta masyarakat dan stakeholder lainnya dalam menekan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban serta	Peningkatan keamanan dan ketertiban umum,penguatan idiologi Pancasila dan karakter kebangsaan serta peningkatan kewaspadaan nasional dan fasilitasi	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
					Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			konflik social guna mewujudkan stabilitas daerah	penanganan konflik sosial	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
					Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
					Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Memperluas cakupan perlindungan dan pengembangan budaya daerah	Pengembangan kebudayaan dan kesenian tradisional, serta pengelolaan cagar budaya	Program pengembangan kebudayaan	Bidang Kebudayaan
					Program pengembangan kesenian tradisional	Bidang Kebudayaan
					Program pembinaan sejarah	Bidang Kebudayaan
					Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Meningkatkan kerukunan umat beragama dan mendorong syiar	Penguatan idiologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan serta fasilitasi	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			keagamaan di kalangan masyarakat.	kegiatan keagamaan oleh organisasi keagamaan.	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Sumber : Hasil Analisa dan Cascading

6.3. Program Pembangunan Daerah

Program pembangunan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan guna mewujudkan Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023.

Selain *output* yang diharapkan, program pembangunan daerah juga tentunya memberikan dampak terhadap berbagai aspek dan komponen lingkungan hidup. Hal ini dianalisis dalam dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang selanjutnya menjadi acuan dan terintegrasi kedalam RPJMD Kota Bima.

Untuk itu dirumuskan Prioritas Pembangunan Kota Bima sebagai berikut:

1. Pembangunan Pendidikan
2. Pembangunan Kesehatan
3. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran
4. Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat
5. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik
6. Pemantapan Infrastruktur , Perumahan Rakyat.
7. Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana (PRB)
8. Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama.

Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam program-program pembangunan menurut sasaran pada setiap misi pembangunan sebagaimana ditunjukan dalam tabel berikut.

Tabel 6.6.

Program Pembangunan Daerah yang disertai Pagu Indikatif

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Misi 1. Mewujudkan Masyarakat Berkualitas yang Berdaya Saing																						
Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	70,8	71,4	61.015.130.775,59	72,01	60.966.171.198,00	72,62	109.859.508.017,07		**Tujuan 1.1. Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia**	Indeks Pembangunan Manusia	Nilai	73,24	142.066.580.704,00	73,24	146.328.578.125,12	74,49	150.718.435.468,87	74,49	609.939.273.513,06	
Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Harapan Hidup	Tahun	N/A	69,35	20.350.354.310,99	69,55	25.839.562.402,00	69,75	65.379.172.506,37		**Sasaran 1.1.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat**	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,95	73.073.181.056,00	70,15	75.265.376.487,68	70,35	77.523.337.782,31	70,35	317.080.630.234,36	
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya	persen		90	9.449.018.523,99	90	6.803.205.421,00	90	2.660.269.500,00	Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	Persentase penurunan Angka kesakitan	persen	14,00	69.446.112.846,00	13,5	71.529.496.231,38	13,00	73.675.381.118,32	13,00	214.650.990.195,70	Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT											
												Penurunan Angka Kematian Bayi	KH	2/1000		1/1000		0/1000		0/1000		
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit menular	Persentase Penurunan Jumlah Kasus Penyakit Menular	%		81.2	865.216.950,00	82.2	801.470.300,00	83.5	930.980.673,00	Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi Standar	persen	92,00	404.705.800,00	92,00	416.846.974,00	92,00	429.352.383,22	92,00	1.250.905.157,22	Kesehatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak menular	Persentase penanganan kasus penyakit tidak menular	%		0	-	0	0,00	83.5	92.198.000,00	Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANA	Jumlah Fasilitas Pelayanan Farmasi dan Alkes yang aman	persen	100,00	591.216.100,00	100,00	608.952.583,00	100,00	627.221.160,49	100,00	1.827.389.843,49	Kesehatan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											N MINUMAN											
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Prosentase Puskesmas yang terakreditasi	%		5 PKM Pratama	1.091.174.703,00	7 Pkm Pratama,1 Pkm madya	2.211.393.669,00	7 Pkm Pratama, 3 Pkm madya	26.449.379.086,00	Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Keluarga yang menerapkan PHBS	persen	76,25	525.307.810,00	80,25	541.067.044,30	85,25	557.299.055,63	85,25	1.623.673.909,93	Kesehatan
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit	Persentase sarana pelayanan kesehatan yang direhabilitasi	unit				1	1.998.733.131,00	1	14.735.246.371,37	Kesehatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate)	persen	2,50	228.154.600,00	2,20	234.999.238,00	2,00	242.049.215,14	2,00	705.203.053,14	Pengendalian Penduduk dan KB
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Cakupan UHC	%		100	8.421.431.009,00	100	11.886.968.971,00	100	18.369.803.926,00	Kesehatan												
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 KH						137/100.000 KH	876.572.500,00	Kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENC	Persentase penurunan angka unmet need	persen	7,15	1.877.683.900,00	6,35	1.934.014.417,00	5,00	1.992.034.849,51	5,00	5.803.733.166,51	Pengendalian Penduduk dan KB

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											ANA (KB)											
	Angka Kematian Bayi	Per 1000 KH						8/1000 KH	0,00	Kesehatan		Persentase peningkatan angka prevalensi penggunaan MCPR (Modern Contraceptive Prevalensi Rate)		68,00%		69,00 %		70,00		70,00		
Program Keluarga Berencana	Rasio peserta KB Aktif	%		3	296.873.525,00	4	2.017.764.910,00	10	796.012.450,00	Pengendalian Penduduk dan KB		Persentase penurunan ASFR (Age Spesific Fertility Rate)		38/1000		37/1000		36/1000		36/1000		
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan penguatan Kelembagaan Anak	Cakupan pengembangan Kota Layak Anak	%		30	226.639.600,00	35	120.026.000,00	50	468.710.000,00	PPPA												

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sasaran 1.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Indeks Pendidikan	Angka	N/A	10,14	31.365.725.991,36	10,39	32.683.900.372,00	10,64	42.709.232.725,70		**Sasaran 1.1.2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan**	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajardikdas)	Persen (%)	99,29	59.134.604.547,00	99,79	60.908.642.683,41	100	62.735.901.963,91	100	258.172.282.292,02	
												Persentase Peningkatan Mutu Pendidikan	Persen (%)	35,83		40		44,17		44,17		
Program Pendidikan Anak Usia Dini	Capaian peserta pendidikan anak usia dini	%		56	2.444.571.146,45	100	5.281.490.000,00	100	5.876.088.000,00	Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Persentase sekolah yang terakreditasi A	Persen	86,56	46.351.409.659,00	87,56	47.741.951.948,77	88,56	49.174.210.507,23	88,56	143.267.572.115,00	Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Capaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	%		98	27.288.314.649,91	100	26.143.650.523,00	100	36.390.584.025,70	Pendidikan	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	persen	42,86	233.008.000,00	47,62	239.998.240,00	54,76	247.198.187,20	100,00	720.204.427,20	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Capaian Peningkatan mutu dan tenaga kependidikan.	%		80	1.207.326.076,00	100	496.598.505,00	100	271.920.500,00	Pendidikan	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	persen	100,00	565.550.400,00	100,00	582.516.912,00	100,00	599.992.419,36	100,00	599.992.419,36	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Program Pengembangan Budaya Baca dan pembinaan Perpustakaan	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	Angka		5,15	425.514.119,00	15,15	762.161.344,00	5.15	170.640.200,00	Pendidikan	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	Persentase sekolah yang melaksanakan mulok	Persen	100,00	211.325.000,00	100,00	217.664.750,00	100,00	224.194.692,50	100,00	653.184.442,50	Pendidikan
											PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Persentase Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Izin	Persen	100,00	29.145.700,00	100,00	30.020.071,00	100,00	30.920.673,13	100,00	90.086.444,13	Pendidikan
											PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Representatif	persen	70,00	11.744.165.788,00	72,00	12.096.490.761,64	75,00	12.459.385.484,49	75,00	36.300.042.034,13	Perpustakaan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/ Tahun	N/A	10.825	627.547.095,00	10.925	980.340.535,00	11.025	878.391.100,00		**Sasaran 1.1.3. Meningkatnya Daya Beli masyarakat**	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/ Tahun/Orang	11.125	8.562.693.881,00	11.225	8.819.574.697,43	11.335	9.084.161.938,35	11.335	28.325.162.151,78	
Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja		%		70	215.728.000,00	76	279.979.465,00	78	355.781.600,00	Tenaga Kerja	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Kualitas Sumber Daya Pengelola Koperasi	persen	100,00	213.763.700,00	100,00	220.176.611,00	100,00	226.781.909,33	100,00	660.722.220,33	Koperasi dan UKM
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan Wirausaha Baru	%		100	87.282.222,00	100	404.096.193,00	120	163.279.500,00	Koperasi dan UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Meningkatnya Produktifitas UKM	persen	100,00	23.366.500,00	100,00	24.067.495,00	100,00	24.789.519,85	100,00	72.223.514,85	Koperasi dan UKM
Program Pengembanga	Cakupan Koperasi	%		100	324.536	100	296.264.877,00	100	359.330.000,00	Koperasi dan	PROGRAM	Peningkatan	persen	100,00	1.198.573.200,	100,00	1.234.530.396,	100,00	1.271.566.307,	100,00	3.704.669.903,	Koperasi

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
n Sistem Pendukung BagiUsaha Mikro Kecil menengah	Aktif				.873,00					UKM	PENGEMBANGAN UMKM	Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil			00		00		88		88	dan UKM
											PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Meningkatnya Pemenuhan Barang dan Jasa	persen	100,00	309.828.100,00	100,00	319.122.943,00	100,00	328.696.631,29	100,00	957.647.674,29	Perdagangan
											PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen	persen	100,00	92.588.000,00	100,00	95.365.640,00	100,00	98.226.609,20	100,00	286.180.249,20	Perdagangan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	persen	30,00	3.632.979.222,00	32,00	3.741.968.598,66	32,00	3.854.227.656,62	32,00	11.229.175.477,28	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
											PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Jumlah Produk Olahan	Ton	877,06	1.067.830.550,00	894,60	1.099.865.466,50	912,49	1.132.861.430,50	912,49	3.300.557.447,00	Kelautan dan Perikanan
												Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Perkapita/Thn	42,65		45,20	0,00	47,80	0,00	47,80		
											PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBAN	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan	persen	85,00	2.023.764.609,00	85,00	2.084.477.547,27	87,00	2.147.011.873,69	87,00	6.255.254.029,96	Unsur Pendukung Urusan Peme

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											GUNAN	Pembangunan										rintah
Sasaran 1.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan	Skor Pola Pangan harapan	Angka	N/A	80,9	8.671.503.378,24	83,3	1.462.367.889,00	85,7	892.711.685,00		**Sasaran 1.1.4. Meningkatnya ketahanan pangan**	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	63,58	1.296.101.220,00	63,6	1.334.984.256,60	63,65	1.375.033.784,30	63,65	6.361.198.834,90	
Program peningkatan ketahanan pangan	Persentase peningkatan ketahanan pangan	%		100	7.827.017.620,24	100	860.003.592,00	100	260.970.300,00	Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Angka ketersediaan energi	kka/kap/hari	2632,00	1.158.000.020,00	2662,00	1.192.740.020,60	2692,00	1.228.522.221,22	2692,00	3.579.262.261,82	Pangan
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi	%		100	59.801.600,00	100	84.165.800,00	100	69.851.285,00	Pertanian		Angka ketersediaan protein	gram/kap/hari	66,68		67,18	0,00	67,68	0,00	67,68		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Cakupan produk olahan hasil perikanan	%		40 %	784.684.158,00	45 %	518.198.497,00	50%	561.890.100,00	Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase keluraha n rawan/ rentan pangan yang ditangani	persen	20,00	20.229.200,00	20,00	20.836.076,00	20,00	21.461.158,28	20,00	62.526.434,28	Pangan
											PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	persen	85,00	117.872.000,00	88,00	121.408.160,00	90,00	125.050.404,80	90,00	364.330.564,80	Pangan
Misi 2. Mewujudkan Masyarakat Sejahtera melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;																						
Tujuan 2.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat	Indeks Gini	Nilai	0,39	0,409	23.534.499.348,61	0,371	25.264.375.631,00	0,375	28.537.053.823,27		**Tujuan 2.1. Meningkatkan pemerataan ekonomi masyarakat**	Indeks Gini	Nilai	0,413	8.621.022.575,00	0,400	8.879.653.252,25	0,380	9.146.042.849,82	0,380	80.448.148.131,34	Lintas urusan
Sasaran 2.1.1. Meningkatnya pertumbuhan	Pertumbuhan PDRB	Persen (%)	6,76	6,5	23.534.499.348,61	5,8	25.264.375.631,00	3	28.537.053.823,27		**Sasaran 2.1.1. Meningk**	Pertumbuhan PDRB	Persen (%)	3,3	8.621.022.575,00	3,6	8.879.653.252,25	3,9	9.146.042.849,82	3,9	80.448.148.131,34	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
ekonomi											**atnya pertumbuhan ekonomi**											
Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi perikanan budidaya	ton		1.008,79	816.247.000,00	839,68	737.006.989,00	849,75	752.108.550,00	Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan invetasi menegah keatas yang berizin	persen	10,00	41.693.800,00	10,00	42.944.614,00	10,00	44.232.952,42	10,00	128.871.366,42	Penanaman Modal
Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi perikanan tangkap	ton		2.115,06	1.420.275.537,00	2136,21	1.668.548.694,00	2.168,25	2.366.191.250,00	Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Porsentase peningkatan investasi yang telah memenuhi ketentuan perizinan	persen	100,00	385.993.000,00	100,00	397.572.790,00	100,00	409.499.973,70	100,00	1.193.065.763,70	Penanaman Modal
Program pengembangan pemasaran pariwisata	Jumlah program promosi pemasaran industri pariwisata	Kali		2	1.013.877.411,00	2	2.292.817.173,00	2	1.093.185.000,00	Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM	Cakupan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem	hari	100,00	15.075.000,00	100,00	15.527.250,00	100,00	15.993.067,50	100,00	46.595.317,50	Penanaman Modal

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											INFORMASI PENANAMAN MODAL	informasi penanaman modal										
Program pengembangan destinasi pariwisata	Persentase pengembangan destinasi wisata	%		50	1.712.297.416,75	50	3.629.112.580,00	50	2.831.789.000,00	Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	Ton	2201,00	1.034.926.300,00	2233,78	1.065.974.089,00	2267,30	1.097.953.311,67	2267,30	3.198.853.700,67	Kelautan dan Perikanan
Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata	Lembaga pelaku industri pariwisata	Usaha		10 ush	230.496.950,00	10 ush	48.655.315	10 ush	80.966.000	Pariwisata	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Ton	858,25	553.317.520,00	866,83	569.917.045,60	875,50	587.014.556,97	875,50	1.710.249.122,57	Kelautan dan Perikanan
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Produktifitas hasil produksi pertanian/perkebunan	ton		51	129.617.500,00	53,8	597.167.800,00	53,8	439.824.125,00	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Porsentase penyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	persen	100,00	688.576.860,00	100,00	709.234.165,80	100,00	730.511.190,77	100,00	2.128.322.216,57	Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program peningkatan produksi hasil peternakan	Populasi Ternak Besar, Kecil dan Unggas	ekor		800	234.453.006,00	1000	344.114.565,00	1500	2.500.920.000,00	Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase peningkatan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian dalam kondisi baik (%)	persen	60,00	20.020.200,00	61,00	20.620.806,00	62,00	21.239.430,18	62,00	61.880.436,18	Pertanian
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial	Meningkatnya Sentra Industri di daerah	sentra		74	1.071.417.121,46	74	296.595.473,00	74	1.666.637.600,00	Perindustrian	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase penurunan ternak yang terinveksi PHMS (%)	persen	0,12	156.221.185,00	0,13	160.907.820,55	0,14	165.735.055,17	0,14	482.864.060,72	Pertanian
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Cakupan Pemenuhan Barang dan Jasa	%		100	2.752.911.211,97	100	3.414.989.188,00	100	1.934.925.000,00	Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANG	Persentase penanganan terhadap DPI	Nilai	50,00	491.492.320,00	51,00	506.237.089,60	52,00	521.424.202,29	52,00	1.519.153.611,89	Pertanian

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											GULANGAN BENCANA PERTANIAN											
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Persentase pertumbuhan Investasi PMDN	%		20	225.889.797,00	20	109.332.155,00	20	93.652.300,00	Penanaman Modal	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	persen	50,00	76.755.800,00	51,00	79.058.474,00	52,00	81.430.228,22	52,00	237.244.502,22	Pertanian
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1 % pertahun	%		20		20	177.595.999,00	20		Penanaman Modal	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	persen	20,00	90.819.700,00	21,00	93.544.291,00	22,00	96.350.619,73	22,00	280.714.610,73	Pertanian
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	% wilayah strategis dan cepat tumbuh kota bima yang ditangani	%		20	13.927.016.397,43	20	11.948.439.700,00	20	14.776.854.998,27	PUPR	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Pembangunan Industri Kota Bima	persen	26,00	744.977.900,00	27,00	767.327.237,00	28,00	790.347.054,11	28,00	2.302.652.191,11	Perdagangan
											PROGRAM PENGEN	Persentase Capaian	persen	75,00	22.293.000,00	80,00	22.961.790,00	85,00	23.650.643,70	85,00	68.905.433,70	Industri

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											DALIAN IJIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah											
											PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase pengembangan ODTW	persen	30,00	2.888.270.330,00	31,00	2.974.918.439,90	32,00	3.064.165.993,10	32,00	8.927.354.763,00	Pariwisata
											PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase jumlah kunjungan wisatawan	persen	30,00	827.589.860,00	31,00	852.417.555,80	32,00	877.990.082,47	32,00	2.557.997.498,27	Pariwisata
											PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBE	Persentase SDM kepariwisataan yang terlibat	persen	30,00	582.999.800,00	31,5	600.489.794,00	32,5	618.504.487,82	32,5	1.801.994.081,82	Pariwisata

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											R DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF											
Tujuan 2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	**Angka kemiskinan**	**Persentase**	**N/A**	**8,79**	**3.573.591.650,00**	**8,6**	**3.830.297.115,00**	**8,81**	**1.354.982.200,00**		**Tujuan 2.2. Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat**	**Tingkat kemiskinan**	**Persentase**	**8,74**	**7.886.449.688,00**	**8,67**	**8.123.043.178,64**	**8,67**	**8.366.823.620,50**	**8,67**	**29.561.595.802,14**	
Sasaran 2.2.1. Meningkatnya kualitas hidup PMKS	Persentase Penurunan Angka Kemiskinan	PMKS yang tertangani	Persen (%)	70	3.325.164.150,00	70	3.329.388.130,00	75	868.459.000,00		**Sasaran 2.2.1. Menurunnya angka kemiskinan**	**Tingkat kemiskinan**	Persen (%)	**8,74**	7.084.638.048,00	**8,67**	7.297.177.189,44	**8,67**	7.516.092.505,12	**8,67**	26.095.754.872,56	
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan	Persentase PMKS yang Terlatih	%		60	706.436.000,00	60	465.832.500,00			Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PMKS yang terlatih	persen	80,00	491.800.000,00	80,00	506.554.000,00	80,00	521.750.620,00	80,00	1.520.104.620,00	Sosial

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya																						
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi Sosial	%		60	530.224.500,00	60	598.557.130,00	80	490.976.500,00	Sosial	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	persen	60,00	935.182.219,00	60,00	963.237.685,57	60,00	992.134.816,14	60,00	2.890.554.720,71	Sosial
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang tertangani	%		50	22.800.000,00	50	83.270.000,00			Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	persen	80,00	152.496.200,00	80,00	157.071.086,00	80,00	161.783.218,58	80,00	471.350.504,58	Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang	%		60	133.222.000,00	80	122.258.000,00	80	112.972.500,00	Sosial	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUAR	Presentase penurunan keluarga Pra Sejahtera dan	persen	7,30	182.375.450,00	7,10	187.846.713,50	6,90	193.482.114,91	6,90	563.704.278,41	Pengendalian Penduduk dan KB

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial										GA SEJAHTERA (KS)	Pra Sejahtera 1										
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial	Prosentase rumah tidak layak huni akibat bencana alam/social yang ditangani	%		50	1.932.481.650,00	56,5	2.059.470.500,00	100	264.510.000,00	Perumahan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	persen	100,00	5.322.784.179,00	100,00	5.482.467.704,37	100,00	5.646.941.735,50	100,00	16.452.193.618,87	Unsur Kewilayahan
Sasaran 2.2.2. Meningkatnya kesempatan kerja	Partisipasi Angkatan Kerja	Persen (%)	N/A	96,44	248.427.500,00	98	500.908.985,00	99	486.523.200,00		**Sasaran 2.2.2. Meningkatnya kesempatan kerja**	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	3,85	801.811.640,00	3,7	825.865.989,20	3,55	850.731.115,38	3,55	3.465.840.929,58	
	Angka Penganggguran Terbuka			3,56	248.427.500,00	4,5	500.908.985,00	4	486.523.200,00													
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas	Besaran tenaga kerja yang mendapatka	%		50	0	70	279.979.465,00	75	355.781.600,00	Tenaga Kerja	PROGRAM PERENCANAAN	Persentase Keseuaian	persen	95	2.885.000,00	95,00	2.971.550,00	95,00	3.149.843,00	95,00	9.006.393,00	Tenaga Kerja

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tenaga Kerja	n pelatihan berbasis masyarakat										TENAGA KERJA	Perencanaan Tenaga Kerja dengan Kebijakan Ketenagakerjaan										
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	%		70	248.427.500,00	89	220.929.520,00	90	130.741.600,00	Tenaga Kerja	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	37 juta	570.595.000,00	38 juta	587.712.850,00	40 Juta	605.344.235,50	40 Juta	1.763.652.085,50	Tenaga Kerja
											PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan	persen	97,00	118.359.640,00	98,00	121.910.429,20	98,00	125.567.742,08	98,00	365.837.811,28	Tenaga Kerja
												Tingkat kepuasan pelayana	persen	95,00		96,00		97,00		97,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												n ketenaga kerjaan										
											PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3	persen	20,00	109.972.000,00	25,00	113.271.160,00	30,00	116.669.294,80	30,00	339.912.454,80	Tenaga Kerja
												Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	persen	70,00		75,00		80,00		80,00		
												Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	persen	25,00		30,00		35,00		35,00		
Misi 3. Menghadirkan Penyelenggaraan Pemerintahan dengan mengedepankan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik.																						
Tujuan 3.1. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**N/A**	**N/A**	**27.709.151.410,53**	**N/A**	**41.611.216.480,62**	**55**	**18.328.609.990,00**		**Tujuan 3.1. Meningkatkan kinerja**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Nilai**	**60**	**15.044.452.095,00**	**65**	**15.495.785.657,85**	**70**	**15.960.659.227,59**	**70,01**	**106.440.723.451,06**	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
pemerintahan											**penyelenggaraan pemerintahan**											
Sasaran 3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (62,58)	B (63,64)	12.813.202.710,00	B (65,58)	14.058.561.360,00	B (67,60)	15.039.575.090,00		**Sasaran 3.1.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah**	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (68,00)	13.355.653.095,00	B (69,00)	13.756.322.687,85	BB (70,01)	14.169.012.368,49	BB (70,01)	70.379.124.601,34	Lintas urusan
	Skor LPPD	Angka	N/A	Sangat Tinggi (3,1845)		Sangat Tinggi (3,1930)		Sangat Tinggi (3,200)				Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,2100)		Sangat Tinggi (3,2200)		Sangat Tinggi (3,2300)		Sangat Tinggi (3,2300)		Lintas urusan
	Opini BPK	Huruf	N/A	WTP		WTP		WTP				Opini BPK	Huruf	WTP		WTP		WTP		WTP		Lintas urusan
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota	Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Bima sesuai dengan SAP dan SPI	Dokumen (Laporan)		Sesuai	102.154.151,00	Sesuai	128.441.846,00	Sesuai	804.200.875,00	Pengawasan	PROGRAM ADMINISTRASI UMUM	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	persen	100,00	445.819.800,00	100,00	459.194.394,00	100,00	472.970.225,82	100,00	1.377.984.419,82	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	Persentase menurunnya temuan APIP dan BPK	%		53,13 %	1.913.712.887,00	94,12 %	1.785.580.637,00	88,24%	1.656.583.000,00	Pengawasan	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi teknis dan manajerial	persen	39,00	2.591.443.700,00	42,00	2.669.187.011,00	50,00	2.749.262.621,33	46,46	8.009.893.332,33	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelatihan teknis, subtasi,penjenjangan, dan profesi	ASN APIP		82,50 %	142.535.998,00	64,71 %	210.435.466,00	66,67%	231.544.172,00	Pengawasan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Persentase OPD yang tidak mendapat temuan bersifat materiil	persen	70,73	762.800.800,00	75,00	785.684.824,00	80,00	809.255.368,72	80,00	2.357.740.992,72	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Program perencanaan pembangunan daerah	Persentase sasaran Renstra SKPD yang selaras dengan Sasaran RPJMD	%			2.058.737.718,00	100	1.702.363.896,00	100	4.125.442.750,00	Perencanaan Pembangunan		Persentase tindaklanjut penyelesaian temuan hasil pemeriksaan APIP dan BPK	persen	88,00		90,00		92,00		92,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Persentase program RKPD yang selaras dengan RPJMD	%				100		100			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Level Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi NTB Terhadap Maturitas SPIP Kota Bima	Level	Terdefinisi	58.369.200,00	Terdefinisi	60.120.276,00	Terdefinisi	61.923.884,28	Terdefinisi	180.413.360,28	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK atas audit laporan keuangan daerah	WTP		WTP	6.267.684.547,00	WTP	7.207.723.264,00	WTP	6.322.686.693,00	Keuangan		Level Kapabilitas APIP	Level	Integrated		Integrated		Integrated		Integrated		
Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	Opini BPK atas audit laporan keuangan daerah	WTP		WTP	1.237.176.419,00	WTP	1.134.252.815,00	WTP	1.162.116.600,00	Keuangan		Nilai SAKIP	Nilai	BB		BB		BB		BB		
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur	Porsentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi	%			909.307.650,00	2,32%	1.526.948.302,00	4,03%	582.635.000,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatiha		Persentase Pengaduan Masyara	persen	100,00		100,00		100,00		100,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
										n		kat yang ditindaklanjuti									
Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima	Cakupanm statistic kepegawaian yang diterbitkan oleh BKD	%		90	181.893.340,00	100	362.815.134,00	100	154.366.000,00	Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		Persentase capaian pencegahan elemen-elemen risiko korupsi	persen	77,00		82,00		85,00		85,00		
											PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Capaian kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah	persen	100,00	273.335.500,00	100,00	281.535.565,00	100,00	289.981.631,95	100,00	844.852.696,95	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
											PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase PD yang mengelola keuangan dengan	persen	100,00	5.705.216.130,00	100,00	5.876.372.613,90	100,00	6.052.663.792,32	100,00	17.634.252.536,22	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												baik										an
											PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Persentase PD yang mengelola BMD dengan baik	persen	92,00	327.669.700,00	95,00	337.499.791,00	100,00	347.624.784,73	100,00	1.012.794.275,73	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
											PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Peresentase program dan kegiatan yang diakomodir dalam RKPD	persen	100,00	860.797.800,00	100,00	886.621.734,00	100,00	913.220.386,02	100,00	2.660.639.920,02	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan
												Persentase renja perangkat daerah yang di akomodir dalam	persen	100,00		100,00		100,00		100,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												RKPD										
												Persentase keselarasan antar bab dalam setiap dokumen perencanaan	persen	100,00		100,00		100,00		100,00		
											PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan capaian pelaksanaan urusan pemerintahan umum	persen	80,00	6.666.125,00	80,00	6.866.108,75	80,00	7.072.092,01	80,00	20.604.325,76	Unsur Kewilayahan
											PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase jumlah layanan informasi dan komunikasi publik yang dimanfaatkan	persen	100,00	698.620.500,00	100,00	719.579.115,00	100,00	741.166.488,45	100,00	2.159.366.103,45	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Kearsipan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan E-government dan pelayanan TIK	persen	100,00	1.624.913.840,00	100,00	1.673.661.255,20	100,00	1.723.871.092,86	100,00	5.022.446.188,06	Komunikasi dan Informatika, Statistik, Kearsipan
Sasaran 3.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persen (%)	N/A	5,56	2.757.234.533,00	5,7	2.964.653.763,00	5,72	1.640.412.100,00		**Sasaran 3.1.2. Meningkatnya kemandirian keuangan daerah**	Kontribusi PAD terhadap APBD	Persen (%)	5,02	440.217.600,00	5,12	453.424.128,00	5,22	467.026.851,84	5,22	5.965.734.442,84	
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan PAD tiap tahun	%		1,7	2.757.234.533,00	1,7	2.604.126.763,00	1,7	1.183.322.100,00	Keuangan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Objek Pajak Daerah Yang dilakukan Pendataan dengan baik Tiap Tahunnya	persen	100,00	440.217.600,00	100,00	453.424.128,00	100,00	467.026.851,84	100,00	1.360.668.579,84	Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Peningkatan Layanan Perparkiran	Persentase pelayanan jasa perparkiran	%		10		20	360.527.000,00	40	457.090.000,00	Perhubungan												
Sasaran 3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Rata-rata skor IKM	Angka	77,54	83,64	12.138.714.167,53	84	24.588.001.357,62	84,5	1.648.622.800,00		**Sasaran 3.1.3. Meningkatnya kualitas pelayanan publik**	Rata-rata skor IKM	Angka	84,5	1.248.581.400,00	85	1.286.038.842,00	85,5	1.324.620.007,26	85,5	30.095.864.406,88	
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya	Prosentase Puskesmas yang memiliki sarana prasarana Rawat Inap sesuai standar	%		14,29	9.500.769.462,53	28,57	20.729.546.229,62		0,00	Kesehatan	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Pendaftaran Penduduk	persen	97,42	458.464.850,00	97,45	472.218.795,50	97,50	486.385.359,37	97,50	1.417.069.004,87	Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Per Tahun	persen	100,00	123.369.500,00	100,00	127.070.585,00	100,00	130.882.702,55	100,00	381.322.787,55	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk	%		94,31	1.849.735.876,00	94,58	1.845.030.564,00	95,33	1.452.742.800,00	Kependudukan dan catatan Sipil	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Informasi Administrasi Kependudukan	persen	89,00	363.165.650,00	90,00	374.060.619,50	91,00	385.282.438,09	91,00	1.122.508.707,59	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengembangan dan Pengelolaan Terminal	% ketersediaan layanan terminal sesuai kebutuhan	%		45	100.800.000,00	50	120.200.000,00		0,00	Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	Persentase Perkembangan Kependudukan	persen	90,00	13.262.000,00	92,00	13.659.860,00	95,00	14.069.655,80	100,00	40.991.515,80	Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Pengembangan e-Goverment dan pelayanan TIK	Prosentase penyelenggaraan sistem E-government	%				20	1.279.229.401,00			Kominfo	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayana	hari	1,0	179.977.000,00	1,0	185.376.310,00	1,0	190.937.599,30	1,0	556.290.909,30	Penanaman Modal

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											MODAL	n perizinan										
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan	%		20	687.408.829,00	20	613.995.163,00	20	195.880.000,00	Penanaman Modal	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat kepuasan masyarakat keluraha n terhadap pelayana n publik	persen	80,00	110.342.400,00	80,00	113.652.672,00	80,00	117.062.252,16	80,00	341.057.324,16	Unsur Kewilayaha n
Misi 4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan Ramah, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana																						
Tujuan 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	**Persentase Ketaatan terhadap tata Ruang**	**Angka**	**N/A**	**N/A**	**14.399.918.169,40**	**74,12**	**13.497.731.204,23**	**76,4**	**11.602.126.501,81**		**Tujuan 4.1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang**	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**	**Angka**	**61**	**8.070.034.359,00**	**62**	**8.312.135.389,77**	**63**	**8.561.499.451,46**	**63**	**50.043.526.906,27**	
Sasaran 4.1.1. Meningkatnya ketaatan terhadap	Persentase Ketaatan terhadap tata Ruang	Persen (%)	N/A	85	4.580.364.554,00	95	1.292.424.466,00	98	3.997.344.600,00		**Sasaran 4.1.1. Meningkatnya**	Persentase Kesesuaian Tata	Persen (%)	98,1	614.706.385,00	98,2	633.147.576,55	98,3	652.142.003,85	98,3	7.189.765.031,40	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
rencana tata ruang											**ketaatan terhadap rencana tata ruang**	Ruang										
Program Perencanaan Tata Ruang	% ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan	%			1.177.265.394,00	20	786.241.866,00	20	609.869.030,00	PUPR/Perencanaan Pembangunan	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	% ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan	persen	3,31	614.706.385,00	3,47	633.147.576,55	3,65	652.142.003,85	3,65	1.899.995.965,40	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang	% pemanfataan ruang sesuai Rencana Tata Ruang	%			572.059.400,00	20	360.827.600,00	20	177.397.500,00	PUPR												
Program pengendalian pemanfaatan Ruang	kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF	%		3,94%	244.419.100,00	4,46%		4,93%	217.025.000	PUPR												

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pengembangan Kawasan	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%		0	208.270.000,00	15,38	145.355.000,00	38,46	21.575.000,00	PERKIM												
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	Persentase asset tanah Pemerintah Kota yang bersetifikat	%		10	2.378.350.660,00	25	8.288.509.620,00	40	2.971.478.070,00	PERKIM												
	Persentase Tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik	%		0		10		30														
Sasaran 4.1.2. Meningkatnya kualitas Lingkungan	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	N/A	76,41	9.819.553.615,40	74	12.205.306.738,23	60	7.604.781.901,81		**Sasaran 4.1.2. Meningkatnya**	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	61	7.455.327.974,00	62	7.678.987.813,22	63	7.909.357.447,62	63	42.853.761.874,88	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Hidup											**kualitas Lingkungan Hidup**											
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Jumlah mata air yang dilindungi	%		94	532.638.000,00	94	326.465.000,00	95	179.315.000,00	Lingkungan Hidup	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	persen	75,00	160.161.150,00	60,00	164.965.984,50	40,00	169.914.964,04	40,00	495.042.098,54	Lingkungan Hidup
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Persentase sumber mata air terlindungi	%		94	167.970.000,00	94	263.360.000,00	94	546.620.000,00	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Air dan Udara	indeks	80,00	219.438.810,00	82,00	226.021.974,30	85,00	232.802.633,53	104,44 / 125	678.263.417,83	Lingkungan Hidup
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Peningkatan jumlah lembaga masyarakat yang peduli akan kelestarian	kelompok masyarakat		5	81.450.000,00	10		15	0,00	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN	Persentase Luas RTH Publik	persen	11,01	3.741.593.314,00	11,34	3.853.841.113,42	11,64	3.969.456.346,82	11,64	11.564.890.774,24	Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	SDA										HAYATI (KEHATI)											
Program Pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya	% jaringan irigasi yang berfungsi baik	%	56,25	43,00 %	4.461.409.532,23	47,00 %	5.420.319.162,23	50,00%	902.960.000,00	PUPR	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	persen	55,00	43.679.300,00	60,00	44.989.679,00	75,00	46.339.369,37	75,00	135.008.348,37	Lingkungan Hidup
Program pembangunan saluran Drainase dan Gorong-gorong	% saluran drainase yang berfungsi baik	%	71,04	74,85	4.576.086.083,17	2,82	6.195.162.576,00	3,52	5.975.886.901,81	PUPR	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkung	persen	100,00	39.912.600,00	100,00	41.109.978,00	100,00	42.343.277,34	100,00	123.365.855,34	Lingkungan Hidup

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	an										
											PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	persen	100,00	33.405.000,00	100,00	34.407.150,00	100,00	35.439.364,50	100,00	103.251.514,50	Lingkungan Hidup
											PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Sampah yang tertangani	persen	67,00	3.217.137.800,00	70,00	3.313.651.934,00	70,00	3.413.061.492,02	70,00	9.943.851.226,02	Lingkungan Hidup
												Persentase Pengurangan sampah	persen	15,00		20,00		30,00		30,00		

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Tujuan 4.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	**Persentase luas kawasan permukiman layak**	**Persen**	**N/A**	**93,97**	**147.155.723.953,02**	**95,47**	**102.880.354.912,88**	**96,97**	**100.955.336.857,58**		**Tujuan 4.2. Meningkatkan kualitas infrastruktur dan kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana**	**Persentase luas kawasan permukiman layak**	**Persen**	**98,47**	**70.178.840.258,00**	**99**	**72.284.205.465,74**	**99**	**74.452.731.629,71**	**99**	**420.751.469.123,91**	
Sasaran 4.2.1. Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luas kawasan kumuh	Persen (%)	N/A	22,69 %	31.732.351.562	15,79 %	35.880.624.125	4,83 %	41.224.640.273													
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Prosentase kelurahan yang melaksanakan STBM	%		90	189.422.500,00	92	188.416.750,00	94	100.670.000,00	Kesehatan	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	% wilayah strategis dan cepat tumbuh kota bima yang ditangani	persen	2,09	8.053.460.697,00	2,20	8.295.064.517,91	2,31	8.543.916.453,45	2,31	15.975.734.375,88	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pembangunan turap/talud/bronjong	% Panjang sungai yang berfungsi baik	%	50,89	50,89	5.338.603.701,58	2,88	6.110.167.356,00	4,81	4.012.295.000,00	PUPR	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	persen	75,00	4.731.417.300,00	77,00	4.873.359.819,00	80,00	5.019.560.613,57	80,00	14.624.337.732,57	Perumahan dan Pemukiman
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	% cakupan Layanan air minum perpipaan di luar kawasan kumuh	%	58,7	57,09	19.966.532.686,02	6,13	11.710.809.734,08	6,44	12.088.753.223,47	PUPR												

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	% cakupan Layanan air limbah	%	71,81	70,75		4,19		4,4		Kecamatan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	% jumlah penduduk yang memperoleh akses air minum layak	persen	90,66	6.579.342.960,00	93,44	6.776.723.248,80	96,36	6.980.024.946,26	96,36	27.798.657.191	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan
Program pembangunan sarana dan Prasarana kelurahan	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana di kelurahan	%	65,34	65,34	145.419.400,00	0	9.494.788.325,00	0,01	16.932.142.400,00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	% rumah tangga yang mengakses IPAL	persen	83,53	2.981.201.855,00	87,93	3.070.637.910,65	92,33	3.162.757.047,97	92,33	25.551.593.734,80	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kesehatan
Program Pengembangan Perumahan	Persentase RTLH yang ditangani di luar Kawasan Kumuh	%		33,33	1673512104	45	714.480.350,00	58,33	4.427.675.600,00		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM	% luas wilayah permukiman bebas genangan	persen	84,71	5.120.780.500,00	88,23	5.274.403.915,00	91,75	5.432.636.032,45	91,75	26.288.731.925,26	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kese

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											DRAINASE											hatan
	Persentase RTLH yang ditangani pada Kawasan Kumuh			20		34		50			PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	persentase pengembangan perumahan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah	persen	96,60	1.202.487.625,00	98,32	1.206.062.253,75	100,00	1.401.844.121,36	100,00	8.406.653.850,11	Perumahan dan Pemukiman
Program Perencanaan Pemukiman Kumuh	Persentase luas kawasan permukiman kumuh yang ditangani	%		30,39	60.966.500,00	59,37	479.530.230,00	88,34	264.510.000,00	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	%bangunan gedung pemerintah yang dibangun sesuai dengan ketentuan penataan bangunan gedung	persen	100,00	195.938.500,00	100,00	201.816.655,00	100,00	207.871.154,65	100,00	605.626.309,65	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
												milik pemerintah										
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Persentase penanganan sampah	%		47	4.357.894.670,00	52 %	7.182.431.380,00	60	3.398.594.050,00	Lingkungan Hidup	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	% terwujudnya bangunan lingkungan yang tertata rapi	persen	75	5.348.773.000	80	5.509.236.190	85	5.674.513.276	90	34.722.578.649	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sasaran 4.2.2. Meningkatnya kualitas infrastruktur daerah	Jalan dalam kondisi baik	Persen (%)	N/A	31,45	90.195.630.330,65	38,81	50.916.758.175,79	40	27.887.848.669,59		**Sasaran 4.2.1. Meningkatn ya kualitas infrastruktur**	Persentase peningkatan infrastruktur daerah	Persen (%)	41	32.903.004.681,00	42	33.890.094.821,43	43	34.906.797.666,07	43	180.504.504.013,88	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											daerah	dalam kondisi baik										
	Indeks konektifitas transportasi	Angka	N/A	0		0,5		1														
Program Peningkatan Jalan & Jembatan	% Jalan Kota dalam kondisi mantap	%	31,45	38,87	56.366.443.897,74	5,81	18.705.799.930,00	9,69	2.674.933.099,52	PUPR	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	% Jalan Kota dalam kondisi mantap	persen	2,21	17.760.977.419,00	2,32	18.293.806.741,57	2,43	18.842.620.943,82	2,43	54.897.405.104,39	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program pembangunan jalan dan jembatan	% konektivitas jalan kota	%	98,61			5,95	16.412.819.460,00		6.662.968.379,59	PUPR	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	% luas wilayah pertanian yang terlayani irigasi teknis	persen	63,39	7.524.459.660	68,2	7.750.193.450	73,01	7.982.699.253	73,01	38.845.716.481	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	% jalan kota kondisi baik	%		2,82	5.306.553.419,48	2,82	426.979.000,00	0,29	2.865.718.000,00	PUPR	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	% menurunnya angka kecelakaan transportasi darat	persen	90,00	7.548.160.602,00	95,00	7.774.605.420,06	100,00	8.007.843.582,66	100,00	23.330.609.604,72	Perhubungan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											JALAN (LLAJ)											
											PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Cakupan penataan dan pengelolaan pelayaran	persen	90,00	69.407.000,00	90,00	71.489.210,00	90,00	73.633.886,30	90,00	214.530.096,30	Perhubungan
Program pembangunan infrastruktur perdesaan	% jalan lingkungan di luar kawasan kumuh dalam kondisi baik	%	65,34	65,34	19.236.075.124,43	0	9.317.424.813,00	0,01	8.872.631.370,48	PUPR												
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	%penerangan jalan umum yang tersedia dan berfungsi baik sesuai kebutuhan	%	100	108,43	9.217.749.389,00	6,47	5.812.845.972,79	12,93	6.724.012.820,00	PUPR												
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan	% ketersediaan sarpras perhubungan sesuai kebutuhan sistem	%		30	68.808.500,00	40	240.889.000,00	55	87.585.000,00	Perhubungan												

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Sasaran 4.2.3. Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Indeks ketangguhan bencana	Angka	75	80,9	25.227.742.060,36	83,3	16.082.972.612,01	83,5	31.842.847.914,52		**Sasaran 4.2.2. Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana**	Indeks ketahanan daerah	Angka	83,7	1.812.433.140,00	83,9	1.866.806.134,20	84,1	1.922.810.318,23	84,1	53.527.870.118,96	
Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan	Cakupan sistem kesiapsiagaan terhadap bencana	%		56,51	667.042.341,00	61,25	1.143.783.632,00	82,88	1.042.926.800,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase pemenuhan sistem kesiapsiagaan dan pencegahan terhadap bencana	persen	75,00	1.124.034.140,00	80,00	1.157.755.164,20	85,00	1.192.487.819,13	85,00	3.474.277.123,33	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, BPBD
Program Peningkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik	Cakupan pemenuhan layanan kedaruratan dan logisitik	%		100	168.610.000,00	100	586.711.708,00	100	502.648.400,00	BPBD												

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi	Cakupan sarana dan prasarana fisik, ekonomi dan sosial yang telah direhabilitasi /rekonstruksi pascabencana	%	1,57	7,96	24.392.089.719,36	57,61	14.352.477.272,01	79,15	30.297.272.714,52	BPBD		Persentase sarana dan prasarana terdampak bencana yang dimanfaatkan kembali	persen	94,87		100,00		100,00		100,00		
												Persentase kelompok usaha ekonomi terdampak yang kembali pulih	persen	68,42		100,00		100,00		100,00		
											PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN	% capaian pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyela	persen	80,00	615.899.000,00	85,00	634.375.970,00	90,00	653.407.249,10	90,00	1.903.682.219,10	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	matan non kebakaran										Masyarakat, BPBD
											PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	persen	100,00	72.500.000,00	100,00	74.675.000,00	100,00	76.915.250,00	100,00	224.090.250,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, BPBD, Sosial
Misi 5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan Agamais																						
Tujuan 5.1. Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	**Indeks Ketentraman**	**Nilai**	**N/A**	**0,79**	**8.048.699.447,72**	**0,81**	**8.914.460.784,00**	**0,84**	**7.274.588.576,00**		**Tujuan 5.1. Meningkatkan masyarakat yang**	**Indeks Ketentraman**	**Nilai**	**0,87**	**50.385.808.340,00**	**0,88**	**51.897.382.590,20**	**0,88**	**53.454.304.067,91**	**0,88**	**171.926.544.358,11**	

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											tentram, bermoral dan agamais											
Sasaran 5.1.1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Angka kriminalitas yang tertangani	Persen (%)	N/A	85 %	3.516.145.089,00	85,00 %	4.909.724.883,00	90	4.935.224.000,00		Sasaran 5.1.1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban	Persentase Penurunan Angka Kriminalitas	Persen (%)	30,5	4.875.543.100,00	31	5.021.809.393,00	31,5	5.172.463.674,79	31,5	24.914.765.050,79	
												Persentase penurunan Angka konflik sosial	Persen (%)	13		13,5		14		14		
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	%		80 %	1.443.515.500,00	80 %	1.302.392.000,00	85%	1.227.753.800,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Tingkat penyelesaian keamanan, ketentraman dan ketertiban (K3)	persen	100,00	2.582.026.000,00	100,00	2.659.486.780,00	100,00	2.739.271.383,40	100,00	7.980.784.163,40	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Penegakan PERDA	%		100 %	610.344.089,00	100 %	332.232.000,00	100 %	340.195.000,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase penurunan gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban lingkungan	persen	80,00	104.512.000,00	80,00	107.647.360,00	80,00	110.876.780,80	80,00	323.036.140,80	Unsur Kewilayahan
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%		90 %	24.291.000,00	90 %	25.171.000,00			Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGE	Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	persen	80,00	1.270.175.500,00	90,00	1.308.280.765,00	100,00	1.347.529.187,95	100,00	3.925.985.452,95	Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											MBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK											
Program pengembangan wawasan kebangsaan	Konflik Sosial	kasus		0	272.111.000,00	0	500.028.460,00	0	351.482.000,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Keterlibatan Organisasi Kemasyarakat Dalam Pengawasan	persen	80,00	458.509.200,00	85,00	472.264.476,00	95,00	486.432.410,28	95,00	1.417.206.086,28	Kesatuan Bangsa dan Politik
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Persentase pembinaan terhadap aparatur dan masyarakat dalam mengantisipasi potensi konflik	%		10	1.165.883.500,00	12	2.749.901.423,00	14	3.015.793.200,00	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI	Persentase Penguatan Kewaspadaan Nasional	persen	90,00	460.320.400,00	100,00	474.130.012,00	100,00	488.353.912,36	100,00	1.422.804.324,36	Kesatuan Bangsa dan Politik

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											PENANGANAN KONFLIK SOSIAL											
Sasaran 5.1.2. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari	Persen (%)	N/A	95	1.708.751.157,72	95	810.469.356,00	95	369.308.476,00		**Sasaran 5.1.2. Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal**	Persentase nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	Persen (%)	2,3	315.340.700,00	2,4	324.800.921,00	2,5	334.544.948,63	2,5	2.154.464.401,63	
Program Pengembangan Nilai Budaya	Cakupan Pengembangan Budaya	%		20		25	210.020.500,00	30	250.308.476,00	Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase SDM Kebudayaan yang dibina	persen	30,00	217.295.700,00	30,00	223.814.571,00	30,00	230.529.008,13	30,00	671.639.279,13	Kebudayaan
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	%		50		60	113.385.000,00		0,00		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN	Persentase Lembaga Kesenian yang dibina	persen	70,00	2.000.000,00	70,00	2.060.000,00	70,00	2.121.800,00	70,00	6.181.800,00	Kebudayaan

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
											TRADISIONAL											
Program Pembangunan Sarana Prasarana Seni dan Budaya	Cakupan Pengembangan sarana dan prasarana budaya	%		30	1.708.751.157,72	35	810.469.356,00	40	119.000.000,00		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	persen	70,00	1.005.300,00	70,00	1.035.459,00	70,00	1.066.522,77	70,00	3.107.281,77	Kebudayaan
											PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Jumlah Cagar Budaya yang teridentifikasi	persen	40,00	95.039.700,00	40,00	97.890.891,00	40,00	100.827.617,73	40,00	293.758.208,73	Kebudayaan
Sasaran 5.1.3. Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	N/A	N/A	2.823.803.201,00	84	3.194.266.545,00	84	1.970.056.100,00		**Sasaran 5.1.3. Meningkatnya pengamalan ajaran agama**	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	84	45.194.924.540,00	84	46.550.772.276,20	84	47.947.295.444,49	84	144.857.314.905,69	
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial	Jumlah lembaga keagamaan yang aktif	lembaga		100	2.823.803.201,00	100	3.170.266.545,00	100	1.970.056.100,00	Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAA	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerint	persen	92,00	44.966.456.840,00	93,00	46.315.450.545,20	95,00	47.704.914.061,56	95,00	138.986.821.446,76	Unsur Pendukung Urusan Pemerintah

Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						Urusan	Misi/Tujuan/Sasaran/ Program Pembangunan Daerah	Indikator Kinerja	Satuan	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA						KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD		Urusan
				2018		2019		2020						2021		2022		2023				
			2017	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	
1	2	3	4	5		6	7	8	9		1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Kemasyarakatan											N RAKYAT	ahan dan kesejahteraan rakyat										an
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama	meningkatkan pengamalan dan pengembangan nilai-nilai agama	%		100		100	24.000.000,00	100	0,00	Administrasi Pemerintahan	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	persen	80,00	228.467.700,00	85,00	235.321.731,00	90,00	242.381.382,93	90,00	706.170.813,93	Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber : *Hasil Analisa dan Cascading*

Pada tabel berikut akan dijabarkan sinkronisasi sasaran pembangunan dengan prioritas pembangunan dan program pembangunan daerah Kota Bima.

Tabel 6.7

Sinkronisasi Sasaran Pembangunan dengan Prioritas Pembangunan dan Program Pembangunan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
1	Meningkatkan Kualitas Sumberdaya Manusia	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Pembangunan Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Bidang Kesehatan
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Bidang Kesehatan
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Bidang Kesehatan
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Bidang Kesehatan
				Program Pengendalian Penduduk	Bidang Pengendalian Penduduk dan

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					Keluarga Berencana
				Program Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	Pembangunan Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Bidang Pendidikan
				Program Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program pengembangan kurikulum	Bidang Pendidikan
				Program pendidik dan tenaga kependidikan	Bidang Pendidikan

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program pengendalian perizinan pendidikan	Bidang Pendidikan
				Program pengembangan bahasa dan sastra	Bidang Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
		Meningkatnya Daya Beli masyarakat	Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Program pengembangan umkm	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Perdagangan

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Bidang Perdagangan
				Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung
		Meningkatnya ketahanan pangan	Pembangunan Kesehatan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Bidang Pangan
				Program penanganan kerawanan pangan	Bidang Pangan
				Program pengawasan keamanan pangan	Bidang Pangan
2.1	Meningkatkan	Meningkatnya	Pembangunan	Program pengembangan iklim	Bidang Penanaman

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
	pemerataan ekonomi masyarakat	pertumbuhan ekonomi	Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	penanaman modal	Modal
				Program promosi penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Bidang Kelautan dan Perikanan
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Bidang Kelautan dan Perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Pertanian

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Pertanian
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Perdagangan
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bidang Perindustrian
				Program peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bidang Pariwisata
				Program pemasaran pariwisata	Bidang Pariwisata

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Bidang Pariwisata
	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Menurunnya angka Kemiskinan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan
		Meningkatnya kesempatan kerja	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Program perencanaan tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja
				Program pelatihan kerja dan	Bidang Tenaga Kerja

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				produktivitas tenaga kerja	
				Program penempatan tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja
				Program hubungan industrial	Bidang Tenaga Kerja
3.1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program Administrasi Umum	Unsur Pendukung
				Program pengembangan sumber daya manusia	Unsur Penunjang (Kepegawaian)
				Program penyelenggaraan pengawasan	Unsur Pengawasan
				Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Unsur Pengawasan
				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Unsur Penunjang (Perencanaan)

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program pengelolaan keuangan daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
				Program pengelolaan barang milik daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
				Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Unsur Penunjang (Perencanaan)
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
				Program informasi dan komunikasi Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika
				Program aplikasi informatika	Bidang Komunikasi dan Informatika
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Program pengelolaan pendapatan Daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
		Meningkatnya kualitas	Reformasi Birokrasi dan Peningkatan	Program pendaftaran penduduk	Bidang Administrasi Kependudukan dan

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
		pelayanan publik	Pelayanan Publik		Pencatatan Sipil
				Program pencatatan sipil	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program pengelolaan profil kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program pelayanan penanaman modal	BidangPenanaman Modal
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
4.1.	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan tata ruang	Meningkatnya ketaatan terhadap rencana tata ruang	Pembangunan	Program penyelenggaraan penataan ruang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Perencanaan	Unsur Penunjang

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Ekonomi dan SDA	(Perencanaan)
				Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Unsur Penunjang (Perencanaan)
		Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Program perencanaan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin	Bidang Lingkungan Hidup

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	
				Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Bidang Lingkungan Hidup
				Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Bidang Lingkungan Hidup
				Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengelolaan persampahan	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4.2.	Meningkatkan kualitas infrastruktur dan	Meningkatnya kualitas infrastruktur	Pemantapan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat	Program pengembangan permukiman	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
	kawasan permukiman berbasis mitigasi bencana	daerah		Program kawasan permukiman kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program kawasan permukiman serta Permukiman kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program pengembangan perumahan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program penataan bangunan gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program penataan bangunan dan lingkungannya	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Pemantapan Infrastruktur dan Pembangunan Perumahan rakyat	Program penyelenggaraan jalan	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan	Bidang Perhubungan

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				(LLAJ)	
				Program pengelolaan pelayaran	Bidang Perhubungan
		Meningkatnya Ketahanan terhadap bencana	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Program Penanggulangan Kebakaran	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Program Penanganan Bencana	Bidang Sosial
5.1.	Meningkatkan masyarakat yang tentram, bermoral dan agamais	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban		Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
			Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

No	Tujuan	Sasaran	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama	Program pengembangan kebudayaan	Bidang Kebudayaan
				Program pengembangan kesenian tradisional	Bidang Kebudayaan
				Program pembinaan sejarah	Bidang Kebudayaan
				Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Sebagai perwujudan nyata perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari system perencanaan nasional, pada tabel berikut akan menunjukan sinkronisasi antara prioritas pembangunan nasional, Provinsi NTB dengan prioritas dan program pembangunan daerah.

Tabel 6.8

Sinkronisasi antara Prioritas Pembangunan Nasional, Provinsi NTB dengan Prioritas dan Program Pembangunan Kota Bima

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
	Peningkatan Sumberdaya Manusia	Pembangunan sumber daya manusia	Pembangunan Kesehatan	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Bidang Kesehatan
				Program pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Bidang Kesehatan
				Program peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan	Bidang Kesehatan
				Program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	Bidang Kesehatan
				Program Pengendalian	Bidang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Penduduk	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Keluarga Berencana	Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
	Peningkatan Sumberdaya Manusia	Pembangunan sumber daya manusia	Pembangunan Pendidikan	Program pengelolaan pendidikan	Bidang Pendidikan
				Program Pemenuhan Hak Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Perlindungan Khusus Anak	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program pengembangan kurikulum	Bidang Pendidikan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program pendidik dan tenaga kependidikan	Bidang Pendidikan
				Program pengendalian perizinan pendidikan	Bidang Pendidikan
				Program pengembangan bahasa dan sastra	Bidang Pendidikan
				Program Pembinaan Perpustakaan	Bidang Perpustakaan
	Penguatan Ketahanan Ekonomi	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Program pengembangan umkm	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program pendidikan dan latihan perkoperasian	Bidang Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Bidang Perdagangan
				Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Bidang Perdagangan
				Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Bidang Kelautan dan Perikanan
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Unsur Pendukung
	Peningkatan Sumber Daya Manusia	Pembangunan Sumber Daya Manusia	Pembangunan Kesehatan	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Bidang Pangan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program penanganan kerawanan pangan	Bidang Pangan
				Program pengawasan keamanan pangan	Bidang Pangan
	Penguatan Ketahanan Ekonomi Pengembangan Wilayah	Peningkatan Nilai Tambah Perekonomian melalui Modernisasi Pertanian, Industri Pengolahan dan Pariwisata	Pembangunan Pariwisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat	Program pengembangan iklim penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
				Program promosi penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
				Program pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
				Program pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	Bidang Penanaman Modal
				Program pengelolaan perikanan tangkap	Bidang Kelautan dan Perikanan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program pengelolaan perikanan budidaya	Bidang Kelautan dan Perikanan
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Bidang Pertanian
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Perizinan Usaha Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Penyuluhan Pertanian	Bidang Pertanian
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Bidang Perdagangan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Bidang Perindustrian
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Bidang Perindustrian
				Program peningkatan daya Tarik Destinasi Pariwisata	Bidang Pariwisata
				Program pemasaran pariwisata	Bidang Pariwisata
				Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif	Bidang Pariwisata
	Peningkatan Sumberdaya Manusia	Pembangunan Sumber Daya Manusia Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Program Pemberdayaan Sosial	Bidang Sosial
				Program Rehabilitasi Sosial	Bidang Sosial
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Bidang Sosial
				Program Pemberdayaan dan	Bidang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Peningkatan keluarga Sejahtera (KS)	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Unsur Kewilayahan
		Pembangunan Sumber Daya Manusia Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan	Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran	Program perencanaan tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja
				Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja
				Program penempatan tenaga kerja	Bidang Tenaga Kerja
				Program hubungan industrial	Bidang Tenaga Kerja
	Stabilitas politik hukum dan transformasi pada publik.	Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Birokrasi serta Pelayanan Publik	Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik	Program Administrasi Umum	Unsur Pendukung

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program pengembangan sumber daya manusia	Unsur Penunjang (Kepegawaian)
				Program penyelenggaraan pengawasan	Unsur Pengawasan
				Program perumusan kebijakan, pendampingan dan asistensi	Unsur Pengawasan
				Program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Unsur Penunjang (Perencanaan)
				Program pengelolaan keuangan daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
				Program pengelolaan barang milik daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
				Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Unsur Penunjang (Perencanaan)

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
				Program informasi dan komunikasi Publik	Bidang Komunikasi dan Informatika
				Program aplikasi informatika	Bidang Komunikasi dan Informatika
			Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Program pengelolaan pendapatan Daerah	Unsur Penunjang (Keuangan)
			Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik	Program pendaftaran penduduk	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program pencatatan sipil	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
				Program pengelolaan profil kependudukan	Bidang Administrasi Kependudukan dan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
					Pencatatan Sipil
				Program pelayanan penanaman modal	BidangPenanaman Modal
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
	Penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Program penyelenggaraan penataan ruang	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Perencanaan Ekonomi dan SDA	Unsur Penunjang (Perencanaan)
				Program perencanaan infrastruktur dan kewilayahan	Unsur Penunjang (Perencanaan)
	Penguatan infrastruktur;	Penguatan Mitigasi Bencana,	Pembangunan Lingkungan Hidup	Program perencanaan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
	pembangunan lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas anar Wilayah	dan Penanggulangan Bencana		
				Program pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati)	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengendalian bahan berbahaya dan beracun (b3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (limbah b3)	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (pplh)	Bidang Lingkungan Hidup

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program peningkatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat	Bidang Lingkungan Hidup
				Program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat	Bidang Lingkungan Hidup
				Program penanganan pengaduan lingkungan hidup	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengelolaan persampahan	Bidang Lingkungan Hidup
				Program pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Penguatan infrastruktur; pembangunan lingkungan hidup, ketahanna bencana dan perubahan iklim	Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas antar Wilayah	Pemantapan Infrastruktur dan Perumahan Rakyat	Program pengembangan permukiman	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
	Pengembangan Wilayah				
				Program kawasan permukiman kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program kawasan permukiman serta Permukiman kumuh	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU)	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Bidang Pekerjaan Umum dan

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Drainase	Penataan Ruang
				Program pengembangan perumahan	Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman
				Program penataan bangunan gedung	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program penataan bangunan dan lingkungannya	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas anar Wilayah	Pemantapan Infrastruktur dan Pembangunan Perumahan rakyat	Program penyelenggaraan jalan	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
				Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)	Bidang Perhubungan
				Program pengelolaan pelayaran	Bidang Perhubungan
		Penguatan Mitigasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Konektivitas anar Wilayah	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Penanggulangan Bencana	Program Penanggulangan Bencana	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Program Penanggulangan Kebakaran	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Program Penanganan Bencana	Bidang Sosial

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
	Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	Penegakan Hukum dan Partisipasi Perempuan Dalam pembangunan Pembangunan Kualitas Sumber Daya Manusia	Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama	Program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum	Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Unsur Kewilayahan (Kecamatan)
				Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)
		Meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan budaya lokal	Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama	Program pengembangan kebudayaan	Bidang Kebudayaan
				Program pengembangan kesenian tradisional	Bidang Kebudayaan
				Program pembinaan sejarah	Bidang Kebudayaan
				Program pelestarian dan pengelolaan cagar budaya	Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya pengamalan ajaran agama	Perlindungan Masyarakat dan pembangunan budaya berbasis nilai-nilai agama	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Unsur Pendukung

No	Prioritas Nasional	Prioritas Provinsi NTB	Priotas Daerah	Program Pembangunan	Urusan Pemerintahan
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Unsur Pemerintahan Umum (Kesatuan Bangsa dan Politik)

Sumber: Hasil Analisis

BAB VII
KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Indikasi rencana program dalam RPJMD Kota Bima Tahun 2018-2023 terdiri dari rencana program pembangunan daerah yang menunjang secara langsung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan program prioritas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah. Program prioritas untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah terbagi ke dalam 6 (enam) urusan wajib pelayan dasar, 17 (tujuh belas) urusan wajib bukan pelayanan dasar, dan 5 (lima) urusan pilihan, dan 5 (lima) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintah.

Secara rinci kerangka pendanaan pembangunan daerah ditunjukkan dalam tabel 7.1 dan tabel 7.2. Adapun kerangka pendanaan dan program perangkat daerah diuraikan dalam tabel 7.3.

Tabel 7.1

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 - 2020

No.	Uraian	APBD		
		2018	2019	2020
2	**BELANJA**	**852.955.415.742,94**	**796.259.444.362,27**	**828.544.477.771,84**
2.1	**Belanja Tidak Langsung**	**398.903.884.426,00**	**379.314.041.749,94**	**401.844.478.289,78**
2.1.1	Belanja Pegawai	307.775.708.108,00	316.954.237.194,94	310.826.429.717,52
2.1.4	Belanja Hibah	36.873.284.336,00	27.055.474.030,00	28.003.091.026,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	51.662.314.789,00	33.492.276.500,00	34.612.728.546,26
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Dan Partai Politik	822.411.652,00	812.054.025,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.770.165.541,00	1.000.000.000,00	28.402.229.000,00
2.2	**Belanja Langsung**	**454.051.531.316,94**	**416.945.402.612,33**	**426.699.999.482,06**
2.2.1	Belanja Pegawai	43.254.612.720,00	46.628.343.376,00	58.133.382.500,00
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	176.178.436.289,00	178.667.377.340,62	196.158.147.165,90
2.2.3	Belanja Modal	234.618.482.307,94	191.649.681.895,71	172.408.469.816,16

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 7.2

Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021 - 2023

No.	Uraian	APBD	Proyeksi	
		2021	2022	2023
5	**BELANJA**	**764.747.135.434,00**	**787.689.549.497,02**	**811.320.235.981,93**
5.1	**Belanja Operasi**	**597.178.338.732,00**	**615.093.688.893,96**	**633.546.499.560,78**
5.1.01	Belanja Pegawai	361.849.943.379,00	372.705.441.680,37	383.886.604.930,78
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	180.185.649.353,00	192.591.218.833,59	198.368.955.398,60
5.1.05	Belanja Hibah	52.973.746.000,00	47.562.958.380,00	48.989.847.131,40
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.169.000.000,00	2.234.070.000,00	2.301.092.100,00
5.2	**Belanja Modal**	**164.138.796.702,00**	**169.062.960.603,06**	**174.134.849.421,15**
5.2.01	Belanja Modal Tanah	3.030.000.000,00	3.120.900.000,00	3.214.527.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.518.661.648,00	33.494.221.497,44	34.499.048.142,36
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	72.609.005.654,00	74.787.275.823,62	77.030.894.098,33
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	55.962.829.400,00	57.641.714.282,00	59.370.965.710,46
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	18.300.000,00	18.849.000,00	19.414.470,00
5.3	**Belanja Tak Terduga**	**3.430.000.000,00**	**3.532.900.000,00**	**3.638.887.000,00**
5.3.01	Belanja Tak Terduga	3.430.000.000,00	3.532.900.000,00	3.638.887.000,00

Sumber: Hasil Analisis

Tabel 7.3.

Program Pembangunan Perangkat Daerah Disertai Pagu Indikatif Tahun 2019-2023

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
URUSAN WAJIB TERKAIT PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							213.067.910.742		409.007.959.578		244.089.265.545		433.973.400.008		406.519.604.810		418.715.192.954		431.276.648.743		2.459.460.900.262
PENDIDIKAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							34.206.708.944		188.644.683.587		44.688.480.650		193.040.952.644		195.715.563.249		201.587.030.146		207.634.641.051		1.062.757.653.428
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN							34.206.708.944		188.644.683.587		44.688.480.650		193.040.952.644		195.715.563.249		201.587.030.146		207.634.641.051		1.062.757.653.428
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		90	100	1.358.064.766	100	156.196.293.559	100	1.041.364.927	100	149.778.668.118	100	149.123.682.890	100	153.597.393.377	100	158.205.315.178	100	766.901.353.122

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengelolaan Pendidikan	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Angka Partisipasi Kasar (APK)	%		100	100	89.439.150	100	31.521.665.523	100	108.180.000	100	42.336.897.026	86,56	46.351.409.659	87,56	47.741.951.949	88,56	49.174.210.507	88,56	217.126.134.664
			Persentase Penurunan Angka Buta Aksara				0	0	100	0	0	0	100	0	100	0	100	0	100	0	100	
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Capaian Peningkatan Disiplin aparatur	Persentase Tenaga pendidik yang memenuhi Standar	%		100	100	0	80	496.598.505	100	0	85	271.920.500	90	29.145.700	95	30.020.071	100	30.920.673	100	858.605.449

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pengendalian Perizinan Pendidikan	Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase Lembaga Pendidikan yang mendapatkan Izin	%		100	100	57.765.000	100	430.126.000	100	105.593.000	100	653.467.000	100	211.325.000	100	217.664.750	100	224.194.693	100	1.736.777.443
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pengembangan Kurikulum	Nilai LKIP OPD	Cakupan pelaksanaan Hasil pengembangan kurikulum	%		BB	BB	253.050.000			BB	171.058.197									BB	424.108.197
Program Pendidikan Anak Usia Dini		Capaian pendidikan anak usia dini		%		54,77	55	5.281.490.000			56	5.876.088.000									56	11.157.578.000
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		Capaian Wajib Belajar Pendi		%		77,12	82	26.143.650.523			87	36.390.584.026									87	62.534.234.549

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		dikan Dasar Sembilan Tahun																				
Program Pendidikan Non Formal		Capaian Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal yang aktif		%			100	96.525.000			100	70.225.000									100	166.750.000
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan		Capaian Peningkatan mutu dan tenaga kependidik		%		78,57	80	496.598.505			85	271.920.500									85	768.519.005

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		an.																				
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan		Capaian Manajemen Pelayanan Pendidikan		%		90	100	430.126.000			100	653.467.000									100	1.083.593.000
KESEHATAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							52.791.451.767		86.218.695.907		75.944.648.367		111.487.063.918		111.452.502.103		114.796.077.166		118.239.959.481		662.724.929.599
Dinas Kesehatan	DINAS KESEHATAN							52.791.451.767		86.218.695.907		75.944.648.367		111.487.063.918		111.452.502.103		114.796.077.166		118.239.959.481		662.724.929.599
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantora	Persentase pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan	%		100	100	1.817.336.627	100	35.999.398.523	100	1.645.780.311	100	37.555.212.361	100	40.485.159.547	100	41.699.714.333	100	42.950.705.763	100	198.690.190.528

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		n	daerah																			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase penurunan Angka kesakitan	%		100	100	323.033.026	15,38	48.879.219.954	100	167.262.000	14,38	73.831.181.556	14	69.446.112.846	13,5	71.529.496.231	13	73.675.381.118	13	337.361.391.706
			Penurunan Angka Kematian Bayi	KH					4/1000				3/1000		2/1000		1/1000		0/1000		0/1000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Apara	Jumlah Fasilitas Pelayanan Farmasi dan Alkes yang aman	%		100	100	139.902.000	100	289.029.680	100	23.120.000	100	0	100	591.216.100	100	608.952.583	100	627.221.160	100	2.116.419.523

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		tur																				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Nilai LKIP OPD	Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi Standar	%		B	BB	291.882.730	92	188.416.750	BBA	176.634.500	92	100.670.000	92	404.705.800	92	416.846.974	92	429.352.383	92	1.539.991.907
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Presentase tersediany a obat dan perbekalan kesehatan yang cukup di sarana pelayanan kesehatan Pusk	Persentase Keluarga yang menerapkan PHBS	%		65	70	1.294.473.915	70	862.631.000	75	2.107.632.000	75	0	76,25	525.307.810	80,25	541.067.044	85,25	557.299.056	85,25	2.486.304.910

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		esmas dan jaringannya																				
Program Upaya Kesehatan Masyarakat		Cakupan Pelayanan Puskesmas dan Jaringannya		%		90	90	6.803.205.421			90	2.660.269.500									90	9.463.474.921
Program Pengawasan Obat dan Makanan		prosentase angka penggunaan Fornas		%		75	75	54.580.000														54.580.000
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia		Prosentase pengawasan saran		%		15	15	30.765.000														30.765.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		a obat tradisional																				
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		Prosentasi Masyarak Ber PHBS		%		24,36	35	862.631.000														862.631.000
Program Perbaikan Gizi Masyarakat		Angka balita gizi buruk		%		4	4	175.910.000			4	56.456.500									4	232.366.500
Program Pengembangan Lingkungan Sehat		Prosentase kelurahan yang melaksanakan STBM		%		90	92	188.416.750			94	100.670.000									94	289.086.750
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit		Persentase penurunan kasus		%		81.83	82.2	755.177.100			83.5	930.980.673									83.5	1.686.157.773

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menular		penyakit menular																				
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		Prosentase Puskesmas yang terakreditasi		%		71,43	100	2.211.393.669			100	26.449.379.086									100	28.660.772.755
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya		Prosentase Puskesmas yang memiliki sarana prasarana Rawat Inap sesuai standar		%		14,29	28,57	20.729.546.230			42,86										42,86	20.729.546.230

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata		Persentase kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit		%		47,93	50	1.998.733.131			60	14.735.246.371									60	16.733.979.502
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan		Porsentase peserta JKN yang mendapatkan pelayanan		%		100	100	11.886.968.971			100	18.369.803.926									100	30.256.772.897
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan		Persentase tempat pengolahan maka		%		99,5	100	203.684.680			100	0									100	203.684.680

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		nan yang memenuhi syarat																				
Program Kesehatan Keluarga, Kesehatan dan Reproduksi dan KB		Angka Kematian Ibu		Per 100.000 KH		188/100.000 KH	137/100.000 KH	202.666.750														202.666.750
		Angka Kematian Bayi		Per 1000 KH		7/1000 KH	6/1000 KH															
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan Dan Anak		Angka Kematian Ibu		Per 100.000 KH		188/100.000 KH		0			122/100.000 KH	876.572.500									122/100.000 KH	876.572.500
		Angka Kematian Bayi		Per 1000 KH		7/1000 KH					5/1000 KH										5/1000 KH	
Program Pengendalian Penyakit tidak menular		Cakupan pelaksana		%		94	100	0			100	92.198.000									100	92.198.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		anposbinduPTM																				
Program Bina Kesehatan Masyarakat		Porsentase Rumah Tangga ber PHBS		%		24,36	35	0			45	7.334.231.000									45	7.334.231.000
		Persentase Pembinaan UKMB		%		32,35	41				53										53	
Program Kebijakan Kesehatan, Pembiayaan Kesehatan dan Hukum Kesehatan		Adanya pembiayaan RS		%		100	100	2.821.144.767			100										100	2.821.144.767
Program Pelayanan Kesehatan Penunjang				0	0	0	0	0				218.412.000										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							94.404.764.242		93.353.443.920		70.835.394.364		68.992.957.356		64.085.774.222		66.008.347.449		67.988.597.872		450.023.128.008
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							94.404.764.242		93.353.443.920		70.835.394.364		68.992.957.356		64.085.774.222		66.008.347.449		67.988.597.872		450.023.128.008
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100	2.371.142.783	100	7.591.745.224	100	1.491.020.041	100	6.590.559.852	100	9.165.475.846	100	9.440.440.121	100	9.723.653.325	100	42.511.874.369
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penyelenggaraan Jalan	Cakupan Ketersediaan dan Kelay	% Jalan Kota dalam kondisi mantap	%		100	100	68.159.790	100	36.458.026.890	100	73.100.000	100	14.705.899.479	2,21	17.760.977.419	2,32	18.293.806.742	2,43	18.842.620.944	2,43	106.061.331.473

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		akan Sarana Prasarana Aparatur																				
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Perentase pegawai yang disiplin	% saluran drainase yang berfungsi baik	%		100	100	94.655.000	100	4.485.024.576	100	0	100	5.975.886.902	4,2	5.120.780.500	4,41	5.274.403.915	4,63	5.432.636.032	4,63	26.288.731.925
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat keahlian	% Panjang sungai yang berfungsi baik	%		10	0	0	15	10.673.109.118	20	0	30	4.915.255.000	2,21	7.524.459.660	2,32	7.750.193.450	2,43	7.982.699.253	2,43	38.845.716.481
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air	Nilai LKIP OPD	% cakupan Layanan air minum perpipaan di luar	%	N/A	A	A	296.262.000	A	3.725.441.364	A	144.864.000	A	3.737.124.672	2,65	6.579.342.960	2,78	6.776.723.249	2,92	6.980.024.946	2,92	27.798.657.191

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
dan keuangan	Minum		kawasan kumuh																			
Program Peningkatan Jalan & Jembatan	Program pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	% Jalan Kota dalam kondisi mantap	% cakupan Layanan air limbah di luar kawasan kumuh	%	31,45	60,36	1,66	18.705.799.930	1,66	7.985.368.370	2,1	2.674.933.100	2,1	8.351.628.551	2,65	2.981.201.855	2,78	3.070.637.911	2,92	3.162.757.048	2,92	25.551.593.735
Program pembangunan jalan dan jembatan	Program Pengembangan Permukiman	% konektivitas jalan kota	% wilayah strategis dan cepat tumbuh kota bima yang ditangani	%	98,61	84,08	1,66	16.258.824.460	1,66	11.723.439.700	2,1	6.662.968.380	2,1	14.776.854.998	2,09	8.053.460.697	2,2	8.295.064.518	2,31	8.543.916.453	2,31	51.392.736.367
Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya.	% saluran drainase yang berfungsi baik	% jalan lingkungan di luar kawasan kumuh dalam kondisi baik	%	71,04	74,85	3,81	4.485.024.576	3,81	9.317.424.813	4	5.975.886.902	4	8.872.631.370	100	5.348.773.000	100	5.509.236.190	100	5.674.513.276	100	34.722.578.649
Program pembangunan turap/talud/bro	Program penyelenggaraan Penataan	% Panjang	% ketersediaan	%	50,89	50,89	1,98	5.252.789.956	2	1.147.069.466	2,6	4.012.295.00	1,4	787.266.530	3,31	614.706.385	3,47	633.147.577	3,65	652.142.004	3,65	3.834.331.961

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
njong	Ruang	sungai yang berfungsi baik	dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan									0										
Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan	Program Penataan Bangunan Gedung	% jalan kota kondisi baik	%bangunan gedung pemerintah yang dibangun sesuai dengan ketentuan penataan bangunan gedung milik pemerintah	%		2,2	0,04	426.979.000	0	0	2,1	2.865.718.000	0,02	217.025.000	100	195.938.500	100	201.816.655	100	207.871.155	100	822.651.310
Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	% dokumen data dasar jalan dan jembatan yang terse	% keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penerapan jasa konstruksi	%	58,33	100	41,67	439.560.000	41,67	246.794.399	100	407.680.000	100	62.825.000	2,21	82.047.400	2,32	84.508.822	2,43	87.044.087	2,43	563.219.708

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		dia sesuai kebutuhan																				
Program peningkatan sarana dan prasarana kebinamargaan	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	% layanan alat berat bagi kebutuhan publik	% peningkatan pengelolaan sampah persampahan regional	%		55,56	77,78	626.863.500			22,22	2.094.600.000			2	658.610.000	2,2	678.368.300	2,4	698.719.349	2,4	2.035.697.649
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		% jaringan irigasi yang berfungsi baik		%	56,25	43	1,98	5.420.319.162			2	902.960.000									3,79	6.323.279.162
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah		% cakupan Layanan air minum		%	58,7	57,09	2,4	11.710.809.734			2,52	12.088.753.223									6,44	23.799.562.958

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		perpipaan di luar kawasan kumuh																				
		% cakupan Layanan air minum pada kawasan kumuh		%			2,1				2,3											
		% cakupan Layanan air limbah di luar kawa		%	71,81	70,75	4,19				4,4										4,4	

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		sankumuh																				
		% cakupan Layanan air limbah pada kawasan kumuh		%			4,5				4,7											
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		% wilayah strategis dan cepat tumbuh kota bima yang ditangani		%		0	20	11.723.439.700			100	14.776.854.998									20	26.500.294.698

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program pembangunan infrastruktur perdesaan		% jalan lingkungan di luar kawasan kumuh dalam kondisi baik		%	65,34	65,34	3,81	9.317.424.813			4	8.872.631.370									0,01	18.190.056.183
		% jalan lingkungan pada kawasan kumuh dalam kondisi baik		%			3,85				4,1											

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Perencanaan Tata Ruang		% ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan		%		15	20	786.241.866			30	609.869.030									20	1.396.110.896
Program Pemanfaatan Ruang		% pemanfaatan ruang sesuai Rencana Tata Ruang		%		85	87	360.827.600			95	177.397.500									20	538.225.100
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang		% pendirian bangunan		%		3,94	4,46				4,93	217.025.000										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		gedung yang sesuai dengan dokumen tata ruang (RTRW/RDTR)																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota		%penerangan jalan umum yang tersedia dan berfungsi baik sesuai kebutuhan		%	100	108,43	100	5.812.845.973			100	6.724.012.820									12,93	12.536.858.793

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pembinaan Bagi Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dan Swasta Dalam Penerapan Jasa Konstruksi		% keterlibatan swasta dan masyarakat dalam penerapan jasa konstruksi		%		68,00 %	13,00%	246.794.399			100	62.825.000									13,00 %	309.619.399
PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAM	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							4.375.520.164		6.099.559.203		7.119.387.080		8.980.944.320		10.560.991.856		10.877.821.612		11.204.156.260		57.665.331.831
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							4.375.520.164		6.099.559.203		7.119.387.080		8.980.944.320		10.560.991.856		10.877.821.612		11.204.156.260		57.665.331.831

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100	586.878.890	100	2.700.723.123	100	650.278.580	100	2.657.009.320	100	3.377.086.931	100	3.478.399.539	100	3.582.751.525	100	15.795.970.438
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengembangan Perumahan	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase RTLH yang ditangani di luar Kawasan Kumuh	%		100	100	115.719.194	100	2.773.950.850	100	54.964.000	100	6.037.850.000	1,67	2.452.487.625	1,69	2.526.062.254	1,71	2.601.844.121	90	16.392.194.850
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Kawasan Permukiman	Perentase pegawai yang disiplin	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat	%		85	100	0	100	624.885.230	100		100	286.085.000	75	4.731.417.300	77	4.873.359.819	80	5.019.560.614	100	15.535.307.963

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni																			
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat keahlian		%		N/a	0	0			0	0									0	0
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai LKIP OPD		Nilai		B	BB	274.086.000			A	90.209.500									A	364.295.500

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pengembangan Perumahan		Persentase RTLH yang ditangani di luar Kawasan Kumuh		%		33,33	45	714.480.350			58,33	4.427.675.600									58,33	5.142.155.950
		Persentase RTLH yang ditangani pada Kawasan Kumuh		%		20	34				50										50	
Program Lingkungan Sehat Perumahan		Persentase peningkatan penanganan		%							100	145.208.000										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		kawasan permukiman potensi kumuh																				
Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/sosial		Prosentase rumah tidak layak huni akibat bencana alam/ social yang ditangani		%		85	0,22	2.059.470.500			0,06	1.464.966.400									100	3.524.436.900
Perencanaan Pemukiman Kumuh		Persentase luas kawasan permukima		%		14,05	1,77	479.530.230			2,01	264.510.000									88,34	744.040.230

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		n kumuh																				
Program Pengembangan Kawasan		Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah		%		0	15,38	145.355.000			38,46	21.575.000									38,46	166.930.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		yang layak huni																				
KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							24.879.896.625		30.154.985.117		42.575.420.884		46.277.470.539		19.138.107.213		19.712.250.429		20.303.617.942		196.577.022.735
Satuan Polisi Pamong Praja	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA							3.468.498.457		10.824.908.933		5.884.752.350		11.549.393.872		10.170.924.529		10.476.052.265		10.790.333.833		59.444.400.380
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	100	517.435.726	100	8.532.667.248	100	452.974.550	100	6.693.940.472	100	7.588.898.529	100	7.816.565.485	100	8.051.062.449	100	38.683.134.183

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan ketenteraman dan Ketertiban Umum	%		80	80	152.096.683	80	1.678.295.000	80	275.050.000	80	3.812.526.600							80	5.490.821.600
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Perentase pegawai yang disiplin	Persentase Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	%		75	75	78.329.100	75	613.946.685	75		75	1.042.926.800	75	2.582.026.000	75	2.659.486.780	75	2.739.271.383	75	9.637.657.648
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya		%		100	100	378.095.263			85	191.306.000									85	569.401.263

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Aparatur																				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKIP OPD		Nilai	BB	BB	BB	50.300.000			A	109.968.400									A	160.268.400
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan		Cakupan keamanan lingkungan		%		100	100	1.302.392.000			100	1.227.753.800									100	2.530.145.800
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal		Jumlah Pol PP yang menjadi PPNS		Orang		4	100	332.232.000			5	340.195.000									5	672.427.000
Program Penegakan Perda												2.244.577.800										
Program penindakan dan		Persentase Pene		%		100	100	18.500.000			100										100	18.500.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
perberkasan pelanggar perda		gakan PERDA																				
Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)		Persentase pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yang ditangani		%		90	100	25.171.000			100										100	25.171.000
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		Cakupan pelayanan bencana kebakaran		%		87	87	613.946.685			88	1.042.926.800									88	1.656.873.485
Badan Kesatuan								4.111.434.069		0		4.050.52		0		0		0		0		8.161.962.219

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Bangsa dan Politik												8.150										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	57	100	100	532.546.745			100	457.347.650									100	989.894.395
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur		%		100	100	128.101.600			100	202.674.000									100	330.775.600
Program peningkatan disiplin aparatur		Perentase pegawai yang		%		100	100	32.600.000			0										0	32.600.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		disiplin																				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKIP OPD		Nilai	B	BB	BB	164.010.000			A	116.149.100									A	280.159.100
Program pengembangan wawasan kebangsaan		presentase masyarakat dan aparatur yang memperoleh Pendidikan Wawasan Kebangsaan dan Pembauran keba		%		50	60	500.028.460			70	351.482.000									70	851.510.460

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ngsaan																				
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan		Persentase potensi konflik yang dapat dicegah		%		60	70	2.158.717.423			75	2.754.790.400									75	4.913.507.823
Program pendidikan politik masyarakat		Persentase partisipasi masyarakat dalam pendidikan Politik		%		70	70	595.429.841			78	168.085.000									78	763.514.841
Badan Penanggulangan Bencana	BADAN PENANGGULANGAN							17.299.964.099		19.330.076.184		32.640.140.3		34.728.076.667		4.945.971.664		5.094.350.814		5.247.181.338		116.541.498.994

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Daerah	BENCANA DAERAH											84										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100	805.994.437	100	3.247.103.572	100	652.174.270	100	3.129.661.653	100	3.821.937.524	100	3.936.595.650	100	4.054.693.519	100	18.189.991.918
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penanggulangan Bencana	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan sistem kesiapsiagaan terhadap bencana	%		100	100	287.967.050	100	16.082.972.612	100	199.632.500	100	31.598.415.015	75	1.124.034.140	80	1.157.755.164	85	1.192.487.819	85	51.155.664.750
Program peningkatan disiplin aparatur		Perentase pegawai		%		100	100	0			100	38.950.000									100	38.950.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		yang disiplin																				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat keahlian		%		2	0	0			20	0									20	0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKIP OPD		Nilai	BB	BB	BB	123.030.000			A	150.968.600									A	273.998.600
Program Kesiapsiagaan dan Pencegahan		Cakupan sistem kesiapsiagaan terhadap benc		%		56,51	61,25	1.143.783.632			82,88										82,88	1.143.783.632

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ana																				
		Prosentase penanganan pencegahan krisis air		%		N/a	8,713692 9				31,54										31,54	
Program Peningkatan Pelayanan Kedaruratan dan Logistik		Cakupan pemenuhan layanan kedaruratan dan logisitik		%		100	100	586.711.708			100	502.648.400									100	1.089.360.108
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi		Cakupan sarana dan prasarana		%	1,57	7,96	57,61	14.352.477.272			79,15	30.297.272.715									79,15	44.649.749.987

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		fisik, ekonomi dan sosial yang telah direhabilitasi/rekonstruksi pascabencana																				
Program Kesiapsiagaan dan Peringatan Dini		Persentase upaya kesiapsiagaan dan peringatan dini		%	0	0	0	0			82	230.281.800										
Program Mitigasi dan Pencegahan		Persentase upaya mitiga		%	0	0	0	0			100	568.212.100										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		si dan pencegahan																				
	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN							0		0		0		0		4.021.211.020		4.141.847.351		4.266.102.771		12.429.161.142
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%											100%	3.329.692.020	100 %	3.429.582.781	100%	3.532.470.264	100%	10.291.745.065
	Program Penanggulangan Bencana		% capaian penanggulangan bencana	%											70%	75.620.000	75 %	77.888.600	80 %	80.225.258	80%	233.733.858
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		% capaian pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran	%											80%	615.899.000	85 %	634.375.970	90 %	653.407.249	90%	1.903.682.219

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			dan penyelamatan non kebakaran																			
SOSIAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL							2.409.569.000		4.536.591.844		2.925.934.200		5.194.011.232		5.566.666.167		5.733.666.152		5.905.676.137		29.712.834.661
Dinas Sosial	DINAS SOSIAL							2.409.569.000		4.536.591.844		2.925.934.200		5.194.011.232		5.566.666.167		5.733.666.152		5.905.676.137		29.712.834.661
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	%		100	100	805.354.370	100	3.206.687.714	100	786.910.100	100	3.281.859.732	100	3.914.687.748	100	4.032.128.380	100	4.153.092.232	100	18.588.455.806
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Ketersediaan dan	Persentase PMKS yang terlatih	%		100	100	45.237.000	100	1.223.637.630	100	25.400.000	50	1.512.193.000	80	491.800.000	80	506.554.000	80	521.750.620	80	4.255.935.250

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur																				
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Rehabilitasi Sosial	Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PMKS yang mendapatkan Pelayanan Rehabilitasi Sosial	%		100	100	29.735.000	100	106.266.500	100	0	0	0	60	935.182.219	60	963.237.686	60	992.134.816	60	2.996.821.221
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Nilai LKIP OPD	Persentase PMKS yang mendapatkan Perlindungan dan Jaminan Sosial	%		BB	BB	199.338.500			A	201.472.600	80	399.958.500	80	152.496.200	80	157.071.086	80	161.783.219	80	871.309.005

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Program Penanganan Bencana	Persentase PMKS yang Terlatih	Persentase Korban Bencana yang tertangani dalam masa tanggap darurat	%			100	465.832.500							100	72.500.000	100	74.675.000	100	76.915.250	100	224.090.250
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							0	0				399.958.500										399.958.500
Program pemberdayaan Fakir Miskin							0	0				908.244.000										908.244.000
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan pelayanan dan rehabilitasi		%			80	598.557.130			80	490.976.500									80	1.089.533.630

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Sosial																				
Program pembinaan anak terlantar, Anak berhadapan dengan Hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan perlindungan Khusus		Presentase anak terlantar, Anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan Anak yang membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK)		%			80	36.990.000			0	0									80	36.990.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma		Persentase Penyandang Cacat dan trauma yang tertangani		%		40	50	83.270.000			60	0									60	83.270.000
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)		Persentase Penyandang Penyakit Sosial yang tertangani		%		60	80	22.996.500			0	0									80	22.996.500
Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial		Persentase PMKS yang mendapatkan		%		18,73	0	0			0	0									0	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		perlindungan dan jaminan Sosial																				
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana		%			80	122.258.000			80	112.972.500									80	235.230.500

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		pelayanan kesejahteraan sosial																				
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							56.326.807.637		92.447.247.580		46.577.203.139		85.401.173.241		99.636.836.179		102.625.941.264		105.704.719.502		511.345.599.930
TENAGA KERJA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA							1.800.754.985		3.302.015.987		1.584.528.200		3.107.910.472		6.630.957.338		6.829.886.058		7.034.782.640		27.414.659.495
Dinas Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA							1.800.754.985		3.302.015.987		1.584.528.200		3.107.910.472		6.630.957.338		6.829.886.058		7.034.782.640		27.414.659.495
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Cakupan Pelayanan Administra	Persentase Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	763.013.794	100	2.475.516.002	100	584.874.000	100	2.437.871.272	100	5.829.145.698	100	6.004.020.069	100	6.184.140.671	100	22.930.693.712

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	a	si Perkantoran																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Keseuaian Perencanaan Tenaga Kerja dengan Kebijakan Ketenagakerjaan	%	94	94	100	64.841.206	94	33.685.000	100	216.511.000	94	13.446.600	95	2.885.000	95	2.971.550	95	3.060.697	95	56.048.847
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Produktivitas Tenaga Kerja	Rupiah	34jt	35jt	100	0	35jt	406.164.985	100	0	36jt	355.320.000	37 juta	570.595.000	38 juta	587.712.850	40 Juta	605.344.236	40 Juta	2.525.137.071

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Penempatan Tenaga Kerja	Nilai LKIP OPD	Pesentase Pencari Kerja yang ditempatkan	Nilai	93	94	BB	146.400.000	95	150.849.000	BB	113.104.000	96	126.406.600	97	118.359.640	98	121.910.429	98	125.567.742	98	643.093.411
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja		Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	Tingkat kepuasan pelayanan ketenagakerjaan	orang	91	92	100	279.979.465	93		125	355.781.600	94		95		96		97		97	
Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Program Hubungan Industrial	Besaran pencari kerja yang terdaftar	Persentase perusahaan yang melaksanakan K3	%	10	10	89	220.929.520	10	235.801.000	90	130.741.600	15	174.866.000	20	109.972.000	25	113.271.160	30	116.669.295	30	750.579.455

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		yang ditempatkan																				
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan		Presentase keselamatan perlindungan tenaga kerja	Persentase peserta BPJS Ketenagakerjaan	%	60	60	76	325.591.000			78	183.516.000			70	0	75	0	80	0	80	509.107.000
		Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	Persentase Perusahaan yang melaksanakan Upah Minimum Kota (UMK)	%	15	15	100				100				25	0	30	0	35	0	35	

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Besaran pekerja /buruh yang menjadi peserta Jamsostek		%			50				55										55	
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.859.318.400		3.531.834.003		1.857.032.475		3.631.459.908		7.501.361.971		7.726.402.830		7.958.194.915		31.856.249.102
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK							1.859.318.400		3.531.834.003		1.857.032.475		3.631.459.908		7.501.361.971		7.726.402.830		7.958.194.915		31.856.249.102

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan	%	100	100	100	566.190.500	100	2.484.416.003	100	599.388.000	100	2.583.146.433	100	3.003.566.749	100	3.093.673.751	100	3.186.483.964	100	14.351.286.901
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengarus Utamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase partisipasi perempuan dalam berorganisasi	%	28	28	100	96.084.900	28	420.857.400	100	129.972.500	29	727.111.000	30	3.632.979.222	32	3.741.968.599	32	3.854.227.657	32	12.377.143.877
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Perlindungan Perempuan	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap perempua	%	75	80	100	22.660.000	90	336.068.500	100		100	37.218.000	100	56.173.100	100	57.858.293	100	59.594.042	100	546.911.935

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			n yang ditangani																			
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase pemenuhan Data Gender dan anak	%	75	80	0	0	96	79.779.700	25		100	20.114.600	100	10.084.500	100	10.387.035	100	10.698.646	100	131.064.481
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Nilai LKIP OPD	Persentase lembaga yang memenuhi kriteria layak anak	40	50	N/A	B	126.965.000	42,86	186.783.400	BB	79.358.500	42,86	263.869.875	42,86	233.008.000	47,62	239.998.240	54,76	247.198.187	100	1.170.857.702
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase perempuan yang berperspektif gend	Persentase pengaduan tindak kekerasan terhadap Anak yang ditangani	%	62,5	65	62,5	120.026.000	70	23.929.000	68,75	468.710.000	96	0	100	565.550.400	100	582.516.912	100	599.992.419	100	1.771.988.731

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		er																				
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit		%			80	453.188.000			80	421.384.275									80	874.572.275

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		pelayanan terpadu																				
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di		kasus			90	326.917.500			100	87.448.000									100	414.365.500

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit																				
Program peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan		Partisipasi angkatan kerja perempuan		%			46,52%	147.286.500			46,72	70.771.200									46,72	218.057.700
PANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN							1.923.867.387		3.721.631.162		1.466.779.784		3.391.125.494		4.716.681.192		4.858.181.628		5.003.927.077		23.791.448.315
Dinas Ketahanan	DINAS KETAHANAN							1.923.867.387		3.721.631.162		1.466.77		3.391.125.494		4.716.681.192		4.858.181.628		5.003.927.077		23.791.448.315

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pangan	PANGAN											9.784										
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian pelayanan administrasi perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	100	601.155.595	100	2.777.461.770	100	440.597.413	100	2.511.029.723	100	3.420.579.972	100	3.523.197.371	100	3.628.893.292	100	15.861.162.128
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah ketersediaan energi	%		100	100	157.534.400	2.632 kka/ kap/ hari	740.920.783	100	41.250.000	2.632 kka/ kap/ hari	655.340.771	2.632 kka/ kap/ hari	1.158.000.020	2.662 kka/ kap/ hari	1.192.740.021	2.692 kka/ kap/ hari	1.228.522.221	2.692 kka/ kap/ hari	4.975.523.816
			Jumlah ketersediaan protein						66,68 gram/ kap/ hari				66,68 gram/ kap/ hari		66,68 gram/ kap/ hari		67,18 gram/ kap/ hari	0	67,68 gram/ kap/	0	67,68 gram/ kap/ hari	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
																			hari			
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase peningkatan disiplin aparatur	Persentase kelurahan rawan/ rentan pangan yang ditangani	%		100	100	24.958.000	20	176.476.139	100		20	189.105.000	20	20.229.200	20	20.836.076	20	21.461.158	100	428.107.573
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Presentase bahan pangan yang aman konsumsi	%		100	100	25.250.000	80	26.772.470	100		82	35.650.000	85	117.872.000	88	121.408.160	90	125.050.405	95	426.753.035
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilain LKIP OPD		Huruf		BB	A	170.800.000			A	104.836.600									A	275.636.600

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program peningkatan ketahanan pangan		Jumlah Ketersediaan Energi		kkal/kap/hari		2.572	2.572	860.003.592			2.602	260.970.300									2602	1.120.973.892
		Jumlah ketersediaan protein		gram/kap/hari		56	65,68				66,18										66,18	
Program Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan		Persentase peningkatan pemasaran hasil produksi		%		100	100	84.165.800			0	0									100	84.165.800
Program Peningkatan Distribusi dan Cadangan Pangan		Persentase peningkatan Cadangan		%		5	0	0			5	313.567.271									5	313.567.271

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Pangan																				
Program Peningkatan Konsumsi dan Keamanan Pangan		Jumlah konsumsi energi / Kkal		kka/ kap/ hari			0	0			2.327,80	305.558.200									2.327,80	305.558.200
		Persentase mutu keamanan pangan		%			0	0			85										85	
PERTANAHAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN							8.331.525.420		8.331.525.420		2.971.478.070		2.971.478.070		3.306.522.200		3.405.717.866		3.507.889.402		21.523.132.958
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN							8.331.525.420		8.331.525.420		2.971.478.070		2.971.478.070		3.306.522.200		3.405.717.866		3.507.889.402		21.523.132.958
Program Penataan Penguasaan,	Program Penyelesaian Ganti Kerugian	Persentase asset	Persentase asset tanah	%		54,74	4,43	8.288.509.620	4,43	8.288.509.620	2,43	2.971.478.07	2,43	2.971.478.070	3,53	3.184.269.200	9,72	3.279.797.276	9,72	3.378.191.194	84,57	21.102.245.360

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	tanah Pemerintah Kota yang bersetifikat	Pemerintah Kota yang bersetifikat									0										
	Program Pengelolaan Tanah Kosong	Persentase Tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik	Persentase Tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik	%		80	10		0	43.015.800	30	0	0	0	85	77.606.000	90	79.934.180	100	82.332.205	100	282.888.185
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	Persentase konflik pertanahan yang ditangani	Persentase konflik pertanahan yang ditangani	%		98	20	43.015.800	0	0	0	0	0	0	0,5	44.647.000	0,7	45.986.410	0,8	47.366.002	100	137.999.412

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
LINGKUNGAN HIDUP	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP							15.000.742.271		23.103.277.906		9.708.786.100		17.948.859.470		18.112.119.123		18.655.482.697		19.215.147.178		106.954.097.184
Dinas Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP							14.862.305.477		22.964.841.112		9.708.786.100		17.948.859.470		18.112.119.123		18.655.482.697		19.215.147.178		106.677.223.596
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Porentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang optimal	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100	1.185.785.031	100	9.737.806.316	100	947.047.450	100	9.498.334.820	100	10.656.791.149	100	10.976.494.883	100	11.305.789.730	100	52.175.216.898
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengelolaan Persampahan	Porsentase Ketersediaan dan Kelay	Persentase Sampah yang tertangani	%			100	191.375.650	57	7.182.431.380	100	176.784.000	62	3.398.594.050	67	3.217.137.800	70	3.313.651.934	70	3.413.061.492	70	20.524.876.656

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		akan Sarana Prasarana Aparatur																				
Program peningkatan disiplin Aparatur			Persentase Penguranggan sampah	%				0	5				10		15		20	0	30	0	30	0
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tanah	%			100	0	76	296.405.000	100			551.875.000	80	219.438.810	82	226.021.974	85	232.802.634	85	1.526.543.418
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya Aparatur	Persentase meningkatnya jumlah pokmas sadar lingkungan	%			100	258.110.000	45	203.660.000	100	134.430.000	50	108.785.000	60	39.912.600	70	41.109.978	80	42.343.277	80	435.810.855

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Program Pengelolaan Kanekaragaman Hayati (Kehati)	Nilai LKIP OPD	Persentase Luas RTH Publik	%			BB	0	11.01	5.251.118.416	A		11.01	4.164.100.600	11.01	3.741.593.314	11,34	3.853.841.113	11.64	3.969.456.347	11.64	20.980.109.791
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan	Persentase meningkatnya jumlah ijin lingkungan yang diawasi	%			100	7.182.431.380	50	72.850.000	100	3.398.594.050	50	112.085.000	55	43.679.300	60	44.989.679	75	46.339.369	75	319.943.348
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup	Persentase penanganan sampah	Persentase meningkatnya penghargaan bidang lingkungan hidup	%			52%	326.465.000	100	84.860.000	60	179.315.000	100	115.085.000	100	33.405.000	100	34.407.150	100	35.439.365	100	303.196.515
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkunga	Persentase menurunnya pengaduan	%			76%	263.360.000	100	135.710.000	100	546.620.000									100	135.710.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		n Hidup	lingkungan hidup																			
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		Persentase menurunnya pelanggaran terhadap RPPLH	%											75	160.161.150	60	164.965.985	40	169.914.964	40	495.042.099
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup								203.660.000				108.785.000										312.445.000
Program Peningkatan pengendalian Polusi								0				53.110.000										53.110.000
Program Pengelolaan Areal Pemakaman								3.644.677.458				2.103.420.000										5.748.097.458
Program Peningkatan Sarana dan								1.606.440.958				2.060.680.60										3.667.121.558

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prasarana pertamanan												0										
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah							138.436.794		138.436.794		0		0		0		0		0		276.873.588
Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat	Program Perekonomian dan Pembangunan							138.436.794		138.436.794												276.873.588
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CAPIL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.084.563.086		5.415.028.375		2.259.817.400		4.677.270.898		4.931.641.206		5.079.590.442		5.231.978.155		25.335.509.076
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL							3.084.563.086		5.415.028.375		2.259.817.400		4.677.270.898		4.931.641.206		5.079.590.442		5.231.978.155		25.335.509.076
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Admi	cakupan pelaksanaan program penunjang	%		100	100	1.021.618.879	100	3.569.997.811	100	588.436.100	100	3.224.528.098	100	3.973.379.206	100	4.092.580.582	100	4.215.358.000	100	19.075.843.697

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Kabupaten/Kota	nistrasi Perkantoran	urusan pemerintahan daerah																			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pendaftaran Penduduk	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Cakupan Pendaftaran Penduduk	%		100	100	89.013.643	97,38	1.054.853.943	100	75.367.500	97,4	62.703.000	97,42	458.464.850	97,45	472.218.796	97,5	486.385.359	97,5	2.534.625.948
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pencatatan Sipil	Perentase pegawai yang disiplin	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran dan Kematian Per Tahun	%		100	100	15.000.000	100	177.429.745	0		100	124.820.000	100	123.369.500	100	127.070.585	100	130.882.703	100	683.572.533
Program peningkatan pengembangan sistem	Program Pengelolaan Informasi Administrasi	Nilai LKIP PD	Persentase Informasi Administra	Nilai	BB	BB	BB	113.900.000	87	516.324.876	A	143.271.000	88	917.837.800	89	363.165.650	90	374.060.620	91	385.282.438	91	2.556.671.384

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Kependudukan		si Kependudukan																			
Program Penataan Administrasi Kependudukan	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Rasio penduduk ber KTP-el per satuan penduduk	Persentase Perkembangan Kependudukan	%		94,31	94,58	1.845.030.564	84	96.422.000	95,33	1.452.742.800	87	347.382.000	90	13.262.000	92	13.659.860	95	14.069.656	95	484.795.516
		Rasio bayi berakte kelahiran		%		92,79	93,31				97,95										97,95	
		Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)		%		94,31	94,58				95,33										95,33	
		Rasio pasa		%		16,82	17,03				17,44										17,44	

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ngan berakte nikah																				
		Cakupan penerbitan akta kelahiran		%		90,74	91,26				92,13										92,13	
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA								72.614.500		72.614.500		0		0		0		0		0		145.229.000
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah							72.614.500		72.614.500		0		0		0		0		0		145.229.000
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Program Administrasi Pemerintahan Desa	% peningkatan partisipasi masyarakat dalam mem	Tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pemerintahan desa/kelurahan					72.614.500		72.614.500												145.229.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		bangun Kelurahan																				
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.551.443.648		6.714.802.761		4.067.397.800		6.413.167.692		6.705.817.068		6.906.991.580		7.114.201.327		38.679.682.173
Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA							4.551.443.648		6.714.802.761		4.067.397.800		6.413.167.692		6.705.817.068		6.906.991.580		7.114.201.327		38.679.682.173
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kota/Kab	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantora	Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan	%	100	100	100	646.090.853	100	4.256.850.966	100	430.300.200	100	4.209.216.742	100	4.417.603.118	100	4.550.131.212	100	4.686.635.148	100	22.120.437.185

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		n																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengendalian Penduduk	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate)	%	2,30	2,30		1.181.347.000	2,5	34.429.480		1.247.299.730	2,5	110.443.500	2,5	228.154.600	2,20	234.999.238	2,00	242.049.215	2	850.076.033
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase penurunan angka unmet need	%	50	50		168.862.000	7,15	2.126.693.452		100.999.920	7,15	1.861.789.950	7,15	1.877.683.900	6,35	1.934.014.417	5	1.992.034.850	5	9.792.216.569
			Persentase peningkatan angka prevalensi pengguna MCPR	%											68,00 %		69,00 %		70		70	

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			(Modern Contraceptive Prevalensi Rate)																			
			Persentase penurunan ASFR (Age Spesific Fertility Rate)	%											38/1000		37/1000		36/1000		36/1000	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan pembinaan kapasitas sumber daya aparatur	Presentase penurunan keluarga Pra Sejahtera dan Pra Sejahtera 1	%	40/1000	40/1000	6	4.750.000	7,4	296.828.863	6	14.490.000	7,3	231.717.500	7,3	182.375.450	7,1	187.846.714	6,9	193.482.115	6,9	1.092.250.641
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKIP OPD		dok.		9	8	92.442.000			8	70.357.000									8	162.799.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Pergerakan KB		Laju Pertumbuhan Penduduk		%		1,29	1,27	143.358.022			1,25	1.176.221.000									1,25	1.319.579.022
Program Keluarga Berencana		Tercapainya Peningkatan Jumlah Akseptor KB baru dan Aktif		%		10,15	12,15	2.017.764.910			15,5	796.012.450									15,5	2.813.777.360
Program Peningkatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		Meningkatnya kesejahteraan keluarga yang ber KB		%			25	296.828.863			27	231.717.500									27	528.546.363

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PERHUBUNGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN							3.373.626.749		11.287.735.094		2.444.008.134		11.418.920.250		11.077.694.095		11.410.024.918		11.752.325.665		59.330.534.022
Dinas Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN							3.373.626.749		5.474.889.121		2.444.008.134		4.694.907.430		11.077.694.095		11.410.024.918		11.752.325.665		46.793.675.229
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100	927.106.547	100	3.368.346.121	100	660.412.134	100	3.201.007.430	100	3.460.126.493	100	3.563.930.288	100	3.670.848.196	100	17.264.258.528
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana	% Pengelolaan pelayanan jasa terminal	%		100	100	179.936.202	100	2.106.543.000	100	172.446.000	100	1.406.315.000	90	7.548.160.602	95	7.774.605.420	100	8.007.843.583	100	26.843.467.605

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Prasarana Aparatur																				
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pengelolaan pelayaran	Persentase pegawai yang disiplin	Cakupan penataan dan pengelolaan pelayaran	%		0	0	0			0	0	25	87.585.000	90	69.407.000	90	71.489.210	90	73.633.886	90	302.115.096
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Prosentase pegawai yang memiliki sertifikat keahlian		%		100	100	12.396.000			0										100	12.396.000
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKIP OPD		Nilai		B	BB	147.645.000			A	117.250.000									A	264.895.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pengembangan dan Pengelolaan Terminal		Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal		%		45	50	120.200.000			0										55	120.200.000
Peningkatan Layanan Perparkiran		Persentase pelayanan jasa perparkiran		%		10	20	360.527.000			0										40	360.527.000
Pengembangan Sarana dan Prasarana Perhubungan		Persentase Pengembangan Sarana dan Prasarana		%		30	40	240.889.000			0										55	240.889.000
Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		Persentase indeks peng		%		100	60	863.988.000			0										30	863.988.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		endalian dan pengamanan lalulintas																				
Peningkatan Pelayanan Angkutan		Persentase Peningkatan Pelayanan Angkutan		%		0	20	193.945.000			0										40	193.945.000
Peningkatan Kelaikan dan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		Persentase indeks kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor		%		20,83	45,83	326.994.000			0										62,5	326.994.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ		Persentase prasarana dan fasilitas LLAJ		%			0	0			0										2 Unit	0
Program Optimalisasi Layanan Parkir dan Jasa Terminal		Cakupan pelayanan parkir dan jasa terminal		%		100	0	0			100	457.090.000										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Transportasi		Persentase keselamatan pengguna jalan		%		75	0	0			76	128.725.000										
Program Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan LLAJ		Persentase indeks pengendali		%			0	0			30	820.500.000										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		an dan pengamanan lalulintas																				
Program Perhubungan Laut		Cakupan pengelolaan perhubungan laut		%		85					90	87.585.000										
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PERHUBUNGAN							0		5.812.845.973		0		6.724.012.820		0		0		0		12.536.858.793
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Penerangan Jalan, Taman dan Hutan Kota	Program Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	%penerangan jalan umum yang terse	Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal	%		100	0	0	100	5.812.845.973	0	0	100	6.724.012.820	0	0	0	0	0	0		12.536.858.793

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		dia dan berfungsi baik sesuai kebutuhan																				
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							5.148.593.134		7.081.835.215		12.649.682.900		14.713.918.588		6.821.176.094		7.025.811.377		7.236.585.718		46.500.147.594
Dinas Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							5.148.593.134		7.081.835.215		12.649.682.900		14.713.918.588		6.821.176.094		7.025.811.377		7.236.585.718		46.500.147.594
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100	100	2.024.389.532	100	4.340.531.413	100	1.904.095.000	100	4.271.859.088	100	4.497.641.754	100	4.632.571.007	100	4.771.548.137	100	22.514.151.398

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		n																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Informasi dan Komunikasi Publik	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Prosentase informasi publik yang dapat diakses	%		100	100	161.994.500	100	1.180.083.790	100	130.934.400	100	1.171.709.000	90	698.620.500	95	719.579.115	100	741.166.488	100	4.511.158.893
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Aplikasi Informatika	Perentase pegawai yang disiplin	Prosentase penyelenggaraan sistem E-government	%		100	100	68.070.000	100	1.279.229.401	100	0	100	9.026.262.000	90	1.624.913.840	95	1.673.661.255	100	1.723.871.093	100	15.327.937.589
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Prosentase pegawai yang memiliki	% OPD yang menggunakan layanan persandian	%		0	0	0	100	281.990.611	25	0	100	244.088.500								526.079.111

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		sertifikat keahlian																				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKIP OPD		Nilai		N/A	BB	152.835.300			A	172.594.000									A	325.429.300
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		Prosentase informasi publik yang dapat diakses		%		N/a	25	520.778.117			50	309.999.000									50	830.777.117
Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi		Persentase ASN yang menguasai aplikasi teknologi infor		%		0	4	28.854.000			0	0									0	28.854.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		masi																				
Pengembangan e-Goverment dan pelayanan TIK		Prosentase penyelenggaraan sistem E-government		%		10	20	1.279.229.401			0	0									80	1.279.229.401
Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika		prosentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti sesuai SOP		%		N/A	50	516.226.653			0	0									60	516.226.653

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Tata Laksana Komunikasi dan Informatika		Prosentase OPD yang menyelenggarakan E-government		%		10	20	114.225.020			0	0									80	114.225.020
Program Pengadaan Perangkat Aplikasi Dan Telematika		Persentase penerapan E-Government dan pelayanan TIK		%		10	0	0			50	9.026.262.000										
Program Peningkatan Pelayanan Telekomunikasi dan Informatika		Persentase pengadaan pelayanan TIK		%		20	0	0			50	861.710.000										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		% OPD yang menggunakan layanan persandian		%		20	20	281.990.611			50	244.088.500									50	526.079.111
KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH							2.340.595.563		4.705.084.110		3.044.703.400		5.621.005.186		6.700.816.320		6.901.840.810		7.108.896.034		31.663.297.314
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							2.222.824.553		4.587.313.100		3.044.703.400		5.621.005.186		6.700.816.320		6.901.840.810		7.108.896.034		31.427.755.294
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kot	Cakupan Pelayanan Administra	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan	%		85	100	1.162.062.168	100	3.793.569.696	100	1.656.544.400	100	4.768.887.186	100	5.194.125.020	100	5.349.948.771	100	5.510.447.234	100	24.616.977.907

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	a	si Perkantoran	pemerintahan daerah																			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase koperasi yang kelembagaan dan pengelolaan usahanya sesuai dengan peraturan perkoperasian.	%		93	95	57.324.981	100	36.762.200	95	433.888.000	100	41.224.000	100	33.412.200	100	34.414.566	100	35.447.003	100	181.259.969
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Porsentase pegawai yang disiplin	Kualitas Kelembagaan Koperasi	%		100	100	27.150.000	100	54.868.500	100		100	34.206.000	0	0	0	0	0	0	100	89.074.500
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Nilai LKIP OPD	Kualitas Sumber Daya Pengelola Koperasi	huruf		BB	A	182.544.000	100	241.374.837	A	102.153.000	100	254.078.500	100	213.763.700	100	220.176.611	100	226.781.909	100	1.156.175.557

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
dan keuangan																						
Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang konduksif	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Meningkatnya jumlah KUMKM yang berbadan hukum	Meningkatnya Produktifitas UKM	%		75	80	32.778.000	100	390.977.443	80		100	168.279.500	100	23.366.500	100	24.067.495	100	24.789.520	100	631.480.458
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya pertumbuhan Wirausaha Baru	Peningkatan Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil	WUP		100	100	404.096.193	100	69.760.424	120	163.279.500	100	354.330.000	100	1.198.573.200	100	1.234.530.396	100	1.271.566.308	100	4.128.760.328
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya pertumbuhan UMK	% koperasi yang aktif	%		85	85	178.493.867			85	359.330.000			100	37.575.700	100	38.702.971	100	39.864.060	100	116.142.731

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menengah		M																				
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi		Meningkatnya Koperasi Aktif		koperasi		105	110	178.375.344			121	329.508.500									121	507.883.844
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah							117.771.010		117.771.010		0		0		0		0		0		235.542.020
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Program Perekonomian dan Pembangunan	jumlah debitur penerima Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Usaha Mikro (Umi)	% kebijakan perkeonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	debitur		1000	1130	117.771.010	1130	117.771.010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1130	235.542.020

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PENANAMAN MODAL	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL							2.072.638.646		4.259.478.115		1.366.663.100		3.823.082.871		3.828.578.966		3.943.436.335		4.061.739.425		21.318.449.229
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU							2.072.638.646		4.259.478.115		1.366.663.100		3.823.082.871		3.828.578.966		3.943.436.335		4.061.739.425		21.318.449.229
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		20	20	657.491.829	100	3.358.554.798	20	426.787.800	100	3.228.220.371	100	3.205.840.166	100	3.302.015.371	100	3.401.075.832	100	16.495.706.538
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana	Jumlah kerjasama investasi yang terealisasi	Kegiatan		20	20	356.290.000	1	257.321.345	20	219.389.800	1	107.237.700	0	0	0	0	0	0	0	364.559.045

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Prasarana Aparatur																				
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase pegawai yang disiplin	Porsentase peningkatan invetasi menegah keatas yang berizin	%		20	20	30.233.500	10	109.332.155	20	0	10	33.669.650	10	41.693.800	10	42.944.614	10	44.232.952	10	271.873.171
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur	Porsentase peningkatan investasi yang telah memenuhi ketentuan perizinan	%		0	0	0	100	185.398.167	25	0	100	91.955.150	100	385.993.000	100	397.572.790	100	409.499.974	100	1.470.419.081
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pelayanan Penanaman Modal	Nilai LKIP OPD	Rata-rata Lama Proses penyelesaian Pelayanan perizinan	Hari		BB	A	127.700.000	1	283.121.850	A	125.623.000	1	239.246.500	1	179.977.000	1	185.376.310	1	190.937.599	1	1.078.659.259

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Realisasi dan Kerjasama Investasi	Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal		Cakupan pelaksanaan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%			0	0	100	65.749.800		93.652.300	100	122.753.500	100	15.075.000	100	15.527.250	100	15.993.068	100	235.098.618
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Promosi		Prosentase peningkatan jumlah investor		%							20	107.237.700									20	107.237.700
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, Pengaduan dan Pengembangan Pelayanan		Jumlah informasi publik yang tersedia		Dokumen							5	198.092.500									5	198.092.500
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama		Meningkatnya Invest		%		20	20	109.332.155			20	0									20	109.332.155

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Investasi		asi PMDN rata-rata 1 % pertahun																				
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi		Meningkatnya Investasi PMDN rata-rata 1 % pertahun		%		20	20	177.595.999			20	0									20	177.595.999
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan		%		20	20	613.995.163			20	195.880.000									20	809.875.163

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA							1.995.166.400		1.995.166.400		495.312.500		495.312.500		3.005.261.640		3.095.419.489		3.188.282.074		12.697.604.603
Dinas Pariwisata	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							1.995.166.400		1.995.166.400		495.312.500		495.312.500		3.005.261.640		3.095.419.489		3.188.282.074		12.697.604.603
Program peningkatan peran serta kepemudaan	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Jumlah pemuda pelopor	Porsentase Kapasitas Daya saing Kepemudaan	%		38 org	38 org	685.925.800	10	685.925.800	38 org	368.640.000	10	368.640.000	10	834.811.400	11,5	859.855.742	12,5	885.651.414	12,5	3.634.884.356
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Program Pengambangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Cakupan keikutsertaan dalam cabor	Porsentasi Atlit yang mengikuti Kejuaraan	%		47 cbr	47 cbr	417.415.600	10	1.309.240.600	47 cbr	100.335.000	10	126.672.500	10	2.170.450.240	11	2.235.563.747	12	2.302.630.660	12	8.144.557.747
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		Persentase sarana dan prasarana		%		25	25%	891.825.000			25	26.337.500									25	918.162.500

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		dalam kondisi baik																				
STATISTIK	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							1.702.284.867		3.717.766.840		977.473.050		3.147.489.675		432.056.500		445.018.195		458.368.741		4.015.201.353
Dinas Statistik Daerah	DINAS STATISTIK DAERAH							1.576.650.679		3.592.132.652		977.473.050		3.147.489.675		0		0		0		2.554.123.729
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian pelayanaan administrasi perkantoran	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%			100 %	400.422.084	100	2.924.644.276	100%	331.886.450	100	2.661.817.675							100	732.308.534
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	persentase Ketersedia	Persentase pengelolaan data	%			100	69.437.019	100	667.488.376	100	51.900.000	100	485.672.000							100	121.337.019

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Aparatur		an dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	statistik Sektoral																			
Program peningkatan disiplin Aparatur		Persentase pegawai yang disiplin		%			100	35.725.000			100	0									100	35.725.000
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur		Persentase kualitas kapasitas sumber daya aparatur		%			100	246.678.200			100	0									100	246.678.200
Program peningkatan pengembangan		Nilai LKIP OPD		Nilai		BB	A	156.900.000			A	108.014.600									A	264.914.600

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																						
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan		%			0	0			100										100	0
Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah		Persentase pengelolaan data statistik		Persentase pengelolaan data statistik	%		100	399.958.376			100	280.744.000									100	680.702.376
Program pengembangan data/informasi		Persentase Publikasi data statistik		Persentase Publikasi data statistik	dok		100	267.530.000			100	109.490.000									100	377.020.000
Program Analisis dan		Persentase		%			0	0			100	95.438.0									100	95.438.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Desiminasi Statistik		analisis dan diseminasi statistik										00										
Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah							125.634.188		125.634.188		0		0		0		0		0		125.634.188
Program pengembangan data/informasi/ statistik daerah	Program Perekonomian dan Pembangunan		% kebijakan perkeonomian dan pembangunan yang ditindaklanjuti	%				125.634.188		125.634.188												125.634.188
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK							0		0		0		0		204.680.800		210.821.224		217.145.861		632.647.885
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							0		0		0		0		204.680.800		210.821.224		217.145.861		632.647.885
	Program Penyelenggara		Persentase	%											85	204.680.800	100	210.821.224	100	217.145.861	100	632.647.885

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	an Statistik Sektoral		pengelolaan data statistik Sektoral																			
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN							0		0		0		0		227.375.700		234.196.971		241.222.880		702.795.551
	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK							0		0		0		0		227.375.700		234.196.971		241.222.880		702.795.551
	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi		% OPD yang menggunakan layanan persandian	%											100	227.375.700	100	234.196.971	100	241.222.880	100	702.795.551
KEBUDAYAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1.199.869.856		1.199.869.856		369.308.476		369.308.476		315.340.700		324.800.921		334.544.949		2.543.864.902
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	DINAS PENDIDIKAN DAN							1.199.869.856		1.199.869.856		369.308.476		369.308.476		315.340.700		324.800.921		334.544.949		2.543.864.902

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	KEBUDAYAAN																					
Program Pengembangan Nilai Budaya	Program Pengembangan Kebudayaan	Cakupan Pengembangan Nilai Budaya	Persentase SDM Kebudayaan yang dibina	%		20	25	210.020.500	25	150.000.000	30	250.308.476	30	250.308.476	30	217.295.700	30	223.814.571	30	230.529.008	30	1.071.947.755
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Cakupan Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Lembaga Kesenian yang dibina	%		50	60	65.995.000	60	923.854.356	70	0	70	119.000.000	70	2.000.000	70	2.060.000	70	2.121.800	70	1.049.036.156
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Program Pembinaan Sejarah	Cakupan Pengelolaan Keragaman Budaya	Ketersediaan Dokumen Sejarah	%		50	60	113.385.000	60	60.020.500	70	0	70	0	70	1.005.300	70	1.035.459	70	1.066.523	70	63.127.782
Program Pembangunan Sarana	Program Pelestarian dan Pengelolaan	Cakupan Peng	Jumlah Cagar Budaya	%		30	35	810.469.356	35	65.995.000	40	119.000.000	40	0	40	95.039.700	40	97.890.891	40	100.827.618	40	359.753.209

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prasarana Seni dan Budaya	Cagar Budaya	embangan sarana dan prasarana budaya	yang teridentifikasi																			
PERPUSTAKAAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							1.869.202.725		3.774.317.086		1.314.231.750		3.557.986.192		15.441.216.266		15.904.452.754		16.381.586.337		56.891.602.629
Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							1.869.202.725		3.774.317.086		1.314.231.750		3.557.986.192		15.441.216.266		15.904.452.754		16.381.586.337		56.891.602.629
Program Pelayanan Adminsrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	100	610.846.331	100	3.012.155.742	100	480.604.050	100	3.067.635.992	100	3.697.050.478	100	3.807.961.992	100	3.922.200.852	100	17.507.005.057

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pembinaan Perpustakaan	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Perpustakaan yang Representatif	%		100	100	143.430.300	100	762.161.344	100	116.509.800	100	490.350.200	100	11.744.165.788	100	12.096.490.762	100	12.459.385.484	100	37.552.553.578
Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Persentase pegawai yang memperoleh hukuman disiplin		%		0	100	19.500.000			0	0									100	19.500.000
Program peningkatan Kapasitas Aparatur		Peningkatan SDM peng		orang (arsip aris dan pusta		1	0	0			3	0									13	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		elola kearsipan dan pustakawan		kawan)																		
Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		Nilai LKIP OPD		Nilai	BB (75,33)	BB (75,33)	BB	100.000.000			BB	113.890.200									A	213.890.200
Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		Jumlah arsip statis yang terselamatkan		berkas		807	300	144.029.750			100	87.535.500									100	231.565.250
Peningkatan Kualitas pelayanan Informasi Kearsipan		Cakupan pelayanan informasi kearsipan		%		100	100	34.985.000			100	25.342.000									100	60.327.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan		Peningkatan pemeliharaan sarana dan prasarana kearsipan		%		100	100	54.250.000			0										100	54.250.000
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan		Rasio perpustakaan persatuan penduduk		angka		5,15	15,15	762.161.344			5.15	170.640.200									4,87	932.801.544
Program Peningkatan Layanan, Pengelolaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan		Cakupan pengolahan, layanan dan pelestarian baha		%			100	0			100	319.710.000									100	319.710.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		npustaka																				
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							0		233.264.750				112.877.500		109.595.500		112.883.365		116.269.866		684.890.981
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH							0		233.264.750				112.877.500		109.595.500		112.883.365		116.269.866		684.890.981
	Program Pengelolaan Arsip		Persentase Pemanfaatan Kearsipan	%					100	34.985.000			100	25.342.000	100	61.899.500	100	63.756.485	100	65.669.180	100	251.652.165
	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip		Persentase Perlindungan Arsip	%					100	198.279.750			100	87.535.500	100	47.696.000	100	49.126.880	100	50.600.686	100	433.238.816
URUSAN PILIHAN	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							29.919.753.462		41.175.034.498		21.295.914.110		32.981.490.262		30.384.711.944		31.296.253.302		32.235.140.901		203.755.838.761

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
KELAUTAN DAN PERIKANAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.216.861.009		6.313.513.425		4.495.702.800		6.653.676.558		6.424.148.290		6.616.872.739		6.815.378.921		39.535.309.912
Dinas Kelautan dan Perikanan	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN							4.216.861.009		6.313.513.425		4.495.702.800		6.653.676.558		6.424.148.290		6.616.872.739		6.815.378.921		39.535.309.912
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	100	514.738.862	100	3.322.563.345	100	436.239.200	100	2.932.906.658	100	3.768.073.920	100	3.881.116.138	100	3.997.549.622	100	17.902.209.682
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasa	Jumlah produksi Perikanan Tangkap	Ton		100	100	538.212.667	2136,21	1.689.670.594	100	150.275.500	2168	2.366.191.250	2201	1.034.926.300	2233,78	1.065.974.089	2267,3	1.097.953.312	8870	7.254.715.545

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		rana Aparatur																				
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Posentase pegawai yang disiplin	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Ton		100	100	14.714.000	839,68	737.006.989	100		849,75	752.108.550	858,25	553.317.520	866,83	569.917.046	875,5	587.014.557	4290,01	3.199.364.662
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Cakupan pembinaan Sumber Daya Aparatur	Jumlah Produk Olahan	Ton		100	100	15.145.400	843	564.272.497	100	18.135.600	859,86	602.470.100	877,06	1.067.830.550	894,6	1.099.865.467	912,49	1.132.861.430	4387,01	4.467.300.044
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKIP OPD	Angka Konsumsi Ikan (AKI)	Kg/Perkapita/Thn		BB	A	143.100.000	39,92		A	170.282.600	40,99		42,65	0	45,2	0	47,8	0	216,56	
Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan		Jumlah Kegiatan dala		kali		1	1	21.121.900			1	0									1	21.121.900

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
wawasan maritim kepada masyarakat		rangka Hari Nusantara																				
Program pengembangan budidaya perikanan		Jumlah Produksi perikanan budidaya		ton		1008,79	839,68	737.006.989			849,75	752.108.550									849,75	1.489.115.539
		Jumlah kelompok yang dibina yang meningkatkan produksi		kelompok		9	7				7										7	
Program pengembangan perikanan tangkap		Jumlah Produksi perikanan		ton		2115,06	2136,21	1.668.548.694			2168,25	2.366.191.250									2168,25	4.034.739.944

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		tangkap																				
		Jumlah kelompok yang di bina yang meningkatkan produksi		kelompok		7	8				8										8	
Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan		Jumlah kelompok yang dibina untuk penigkatan Kelasanya		kelompok		21	19	46.074.000			20	40.580.000									20	86.654.000
Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi		Jumlah produk olaha		ton		1.008,79	843	518.198.497			859,86	561.890.100									859,86	1.080.088.597

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
perikanan		n																				
		tingkat konsumsi ikan per kapita per tahun		Kg/Kapita/Thn		43,31	0	0			40,99	0									40,99	
		Jumlah kelompok yang di bina yang meningkatkan produksi		kelompok		4	0	0			5	0									5	
PARIWISATA	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							7.707.238.983		10.058.209.563		5.514.087.500		8.022.677.025		8.681.479.179		8.941.923.554		9.210.181.261		56.407.919.200

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Dinas Pariwisata	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA							7.707.238.983		10.058.209.563		5.514.087.500		8.022.677.025		8.681.479.179		8.941.923.554		9.210.181.261		56.407.919.200
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	Porsentase Capaian Pelayanan Administrasi Perkantoran	%		100%	100 %	877.087.865	100	3.492.939.195	100%	627.800.000	100	3.441.687.025	100	4.382.619.189	100	4.514.097.765	100	4.649.520.698	100	20.480.863.871
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase jumlah kunjungan wisatawan	%		80%	80%	78.700.000	25	2.329.425.573	80%	144.290.000	27	1.227.735.000	30	827.589.860	31	852.417.556	32	877.990.082	32	6.115.158.071
Program peningkatan disiplin Aparatur	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi	Kedisplinan Aparatur	Persentase pengembangan	%		1 thn	1 thn	0	25	3.629.112.580	1 thn	0	27	2.831.789.000	30	2.888.270.330	31	2.974.918.440	32	3.064.165.993	32	15.388.256.343

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Pariwisata		ODTW																			
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan	Persentase SDM kepariwisataan yang terlibat	%		100%	100 %	0	2600%	606.732.215	100%	0	2700%	521.466.000	30	582.999.800	31,5	600.489.794	32,5	618.504.488	32,5	2.930.192.297
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase laporan capaian kinerja dan keuangan sesuai ketentuan		%		100%	100 %	186.180.750			100%	161.007.500									100	347.188.250
Program pengembangan pemasaran pariwisata		Persentase pelaksana		%		25%	25%	2.292.817.173			25%	1.093.185.000		0							25%	3.386.002.173

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		an promosi pemasaran industri pariwisata																				
Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Ekonomi Kreatif		Cakupan ekonomi kreatif		Usaha		1.016 ush	1.016 ush	0			1.016 ush	0		0							1.016 ush	0
Program pengembangan destinasi pariwisata		Persentase pengembangan destinasi ODTW		%		50%	50%	3.629.112.580			50%	2.831.789.000		0							50%	6.460.901.580
Program Pengembangan Industri dan Kemitraan Pariwisata		Lembaga pelaku industri pariwi		Usaha		10 ush	10 ush	48.655.315			10 ush	80.966.000		0							10 ush	129.621.315

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		sata																				
Program Pengembangan SDM Kepariwisataan		Cakupan SDM industri pariwisata		lks		10 lokasi	10 lks	558.076.900			10 lks	440.500.000		0							10 lks	998.576.900
Program Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan Pariwisata		penguatan kelembagaan pariwisata		Lembaga		10 lbg	10 lbg	36.608.400			10 lbg	134.550.000		0							10 lbg	171.158.400
PERTANIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							12.887.852.877		19.695.510.917		6.290.991.210		13.310.004.079		13.248.143.127		13.645.587.421		14.054.955.043		88.956.655.170
Dinas Pertanian	DINAS PERTANIAN							12.887.852.877		19.695.510.917		6.290.991.210		13.310.004.079		13.248.143.127		13.645.587.421		14.054.955.043		88.956.655.170
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan	Persentase Capaian	Porsentase Capaian Pelayanan Administra	%			100	759.331.550	100	8.153.292.756	100	728.246.835	100	8.126.864.704	100	11.724.257.062	100	12.075.984.774	100	12.438.264.317	100	52.518.663.613

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Administrasi Perkantoran	si Perkantoran																			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase Capaian Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Porsentaepenyediaan sarana pertanian sesuai anjuran	%			100	432.153.166	70	941.282.365	100	176.705.000	73	3.779.341.825	100	688.576.860	100	709.234.166	100	730.511.191	100	6.848.946.407
Program peningkatan disiplin Aparatur	Program Penyuluhan Pertanian	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase peningkatan kelas kelompoktani	%			100	0	19	331.149.954	100		19,43	303.330.000	20	90.819.700	21	93.544.291	22	96.350.620	22	915.194.565

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program peningkatan kapasitas sumber daya Aparatur	Program Perizinan Usaha Pertanian	Persentase Pegawai yang Telah Mengikuti Diklat Struktural Dan Fungsional	Cakupan pelayanan proses rekomendasi teknis bidang pertanian	%			100	4.300.000	48	9.561.453.533	100	5.550.000	49	0	50	76.755.800	51	79.058.474	52	81.430.228	52	9.798.698.035
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Nilai LKIP OPD	Persentase penanganan terhadap DPI	Nilai			A	149.850.000	35	207.684.209	A	197.350.000	39,25	54.015.000	50	491.492.320	51	506.237.090	52	521.424.202	52	1.780.852.821
Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Cakupan penyediaan sarana pertanian sesua	Persentase peningkatan pemanfaatan prasarana dan sarana pertanian						0	0		69.851.285	57	289.479.300	60	20.020.200	61	20.620.806	62	21.239.430	62	351.359.736

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		i anjuran	dalam kondisi baik (%)																			
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	Persentase penurunan ternak yang terinveksi PHMS (%)	%			60	237.480.954	0	500.648.100	48		0,11	756.973.250	0,12	156.221.185	0,13	160.907.821	0,14	165.735.055	0,14	1.740.485.411
Program Peningkatan Ketahan Pangan (pertanian/perkebunan)		Ketersediaan Informasi Harga Komoditi Pertanian (mingu)		ton			48	9.561.453.533			48										48	9.561.453.533
Program peningkatan penerapan teknologi		Porsentasi Kelompok		%			35	207.684.209			50										50	207.684.209

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
pertanian/perkebunan		Tani Yang Menerapkan Teknologi Sesuai Anjuran																				
Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan		Jumlah produksi pertanian/perkebunan		ton				597.167.800				439.824.125										1.036.991.925
		Produktivitas lahan padi		ton/Ha			5,3				5,3										5,3	
		Produktivitas lahan jagung		ton/Ha			5,9				5,9										5,9	

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Produktivitas lahan kedelai		ton/Ha			1,4				1,4										1,4	
		Produktivitas lahan kacang tanah		ton/Ha			1,3				1,3										1,3	
		Produktivitas lahan kacang hijau		ton/Ha			1				1										1	
		Produktivitas lahan ubi kayu		ton/Ha			23,9				23,9										23,9	
		Produktivitas lahan ubi		ton/Ha			15				15										15	

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		jalar																				
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian												289.479.300										
Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan		Persentase Kelompok Yang Terampil		%			45	93.669.000			50										50	93.669.000
Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak		cakupan pencegahan penanggulangan penyakit ternak		ekor			20110	500.648.100			21799	756.973.250									21799	1.257.621.350

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program peningkatan produksi hasil peternakan		cakupan peningkatan produksi hasil peternakan		ekor				344.114.565				2.500.920.000										2.845.034.565
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan		cakupan pengolahan hasil peternakan		Unit			5	0			5	0									5	0
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan		Persentase Kelompok Ternak Yang Menerapkan Tekn		%			25	0			30	0									30	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ologi																				
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Perkebunan							0	0				25.990.000										
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perkebunan							0	0				54.015.000										
Program Peningkatan Produksi Perkebunan							0	0				262.489.500										
Program Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura							0	0				480.266.915										
Program Peningkatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Penyuluh							0	0				87.435.000										
Program Penguatan Kelembagaan							0	0				215.895.000										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Petani dan Pelaku Agribisnis																						
PERDAGANGAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							4.182.007.520		4.182.007.520		2.825.295.000		2.825.295.000		1.263.670.448		1.301.580.561		1.340.627.978		10.913.181.508
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							4.182.007.520		4.182.007.520		2.825.295.000		2.825.295.000		1.263.670.448		1.301.580.561		1.340.627.978		10.913.181.508
Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen	Persentase Ketersediaan Sarana Distribusi Perdagangan	%		85	95	767.018.332	95	2.880.947.188	97	890.370.000	97	1.755.600.000	0	0	0	0	0	0	997	4.636.547.188
Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan	Meningkatnya Pemenuha	Meningkatnya Pemenuhan Barang dan Jasa	%		100	100	3.414.989.188	100	631.694.000	100	1.934.925.000	100	279.325.000	100	309.828.100	100	319.122.943	100	328.696.631	100	1.868.666.674

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Barang Penting	n Barang dan Jasa																				
Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Meningkanya kesadaran dan displin pedagang kakilima dan asongan	Meningkatnya Perlindungan Terhadap Konsumen	%		70			100	669.366.332			100	790.370.000	100	92.588.000	100	95.365.640	100	98.226.609	100	1.745.916.581
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase capaian kinerja penunjang urusan pemerintahan daerah	%											100	861.254.348	100	887.091.978	100	913.704.738	100	2.662.051.064

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
PERINDUSTRIAN	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN							925.793.073		925.793.073		2.169.837.600		2.169.837.600		767.270.900		790.289.027		813.997.698		7.942.772.971
Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan	DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN							925.793.073		925.793.073		2.169.837.600		2.169.837.600		767.270.900		790.289.027		813.997.698		7.942.772.971
Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Meningkatnya mutu dan nilai tambah produk industri kecil menengah	Meningkatnya Pembangunan Industri Kota Bima	%		0	20	72.870.000	20	906.503.073	25	503.200.000	25	2.145.151.600	26	744.977.900	27	767.327.237	28	790.347.054	28	5.354.306.864
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kot	Meningkatnya kemitraan	Persentase Capaian Penerbitan Izin Usaha Industri	%		70	0	0	0	0	0	0	0	0	75	22.293.000	80	22.961.790	85	23.650.644	85	68.905.434

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	a	IKM dengan lembaga perbankan dan non perbankan	(IUI) Kecil dan IUI Menengah																			
Program peningkatan kemampuan teknologi industri	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Meningkatnya pertumbuhan industri kecil menengah (IKM) di daerah	Persentase Capaian Ketersediaan Data/ Dokumen Informasi Perindustrian	%		20	25	556.327.600	100	19.290.000	25	0	100	24.686.000							100	556.327.600
Program pengembangan sentra-sentra industri potensial		Meningkatnya Sentra		sentra		74	74	296.595.473			74	1.666.637.600									74	1.963.233.073

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Industri di daerah																				
URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN							117.630.930.771		80.696.326.104		114.737.616.688		67.053.018.925		106.177.371.678		109.362.692.828		112.643.573.613		517.704.299.742
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	SEKRETARIAT DAERAH							86.979.911.299		49.474.445.900		87.350.902.859		39.036.899.900		79.235.805.330		81.612.879.490		84.061.265.875		353.439.571.988
Sekretariat Daerah	SEKRETARIAT DAERAH							39.488.137.038		49.474.445.900		28.903.619.722		39.036.899.900		79.235.805.330		81.612.879.490		84.061.265.875		353.439.571.988
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	100	9.356.204.255	100	31.744.664.151	100	9.165.780.619	100	25.557.809.443	100	32.245.583.881	100	33.212.951.397	100	34.209.339.939	100	156.970.348.813

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	Program Administrasi Umum	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum	Unit		582	578	11.117.475.906	100	11.191.239.901	665	5.112.594.629	100	6.469.936.900								17.661.176.801
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Perekonomian dan Pembangunan	Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pembangunan	%		100	100	290.302.000	82	2.148.900.233	100	157.878.300	84	2.343.674.807	85	2.023.764.609	85	2.084.477.547	87	2.147.011.874	87	10.747.829.070
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Cakupan Pembinaan kapasitas Sumb	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerinta	%		100	100	442.878.056	88	4.389.641.615	100	746.108.917	90	4.665.478.750	92	44.966.456.840	93	46.315.450.545	95	47.704.914.062	95	148.041.941.812

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		er Daya Aparatur	han																			
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan		Tersusunnya dok. Perencanaan		Dok.		12	12	551.495.072			100	242.166.800									100	793.661.872
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah		Persentase keluarahan yang sudah memahami standar teknis pengelolaan administrasi		%		100	100	6.489.003.134			100	2.390.845.000									100	8.879.848.134

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan sarana prasarana pendukung Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah							0	0			0	2.516.433.000										
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		BUMD yang aktif		BUMD		1	1	146.832.343			2	0									2	146.832.343
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah		Jumlah Nota Kesepakatan/Kerjasama Pemerintah Kota dengan pihak		MOU		2	2	105.218.200			2	0									2	105.218.200

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		lain																				
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		Persentase Penataan Peraturan Perundang-Undangan		%		100	100	1.845.701.335			100	763.689.000									100	2.609.390.335
Program Penataan Daerah Otonomi Baru		Persentase Penataan Daerah otonomi baru		%		100	100	157.576.299			100	0									100	157.576.299
Program Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang/Jasa Peme		%		100	100	0			100	0									100	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		rintah Daerah																				
Program Administrasi Kerjasama Pembangunan		Presentase Kerjasama Pembangunan yang sesuai RKPD		%		100	100	412.101.156			100	0									100	412.101.156
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Melalui Media Cetak dan Elektronik		Persentase SKPD yang telah memiliki website		%		100	100	1.613.141.300			100	0									100	1.613.141.300
Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat		Jumlah bagian yang mem		%		100	100	2.374.131.164			100	73.069.900									100	2.447.201.064

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		enuhi Syarat nilai WBK/ WBBM																				
Program Pembinaan Dan Pengembangan Aparatur		Ratio pegawai dengan beban kerja		%		70	80	549.364.303			85	395.259.000									85	944.623.303
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv/Aids		Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat, pelajar, mahasiswa		%		100	100	122.249.600													100	122.249.600

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA												KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)		meningkatnya prestasi belajar siswa melalui pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan sekolah		Sekolah		18	18	77.013.300													20	77.013.300
Program Pembinaan Dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan Dan Sosial Kemasyarakata		Persentase qori dan qoriah yang juara		Lembaga		100	100	1.422.096.545													100	1.422.096.545

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
n		tingkat Kota																				
Program Pengembangan Seni Dan Budaya Daerah		menumbuhkan peran masyarakat dalam pelestarian adat		Kegiatan		6	6	0													8	0
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan		menumbuhkembangkan peran serta pemuda dalam pembangunan		%		100	100	22.320.000													100	22.320.000
Program Promosi		Jumlah		Kali		77	77	165.600.000													77	165.600.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Daerah		advetorial dalam media masa																				
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa		Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan		%		100	100	0													100	0
Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik		Terselenggaranya rapat koordiansi TPID dan perekonom		Kali		12	12	0													12	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ian daerah																				
Program Peningkatan Perekonomian Masyarakat		Terlaksananya koordinasi dan pengawasan pendistribusian BBM dan Gas Elpiji		%		100	100	0													100	0
Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah		terwujudnya penataan kelembagaan yang tepat fungsi dan		%		100	100	0													100	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		tepat ukuran																				
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usahan Bagi Usaha Micro Kecil Menengah		Meningkatnya pertumbuhan UMKM		%		85	85	0													85	0
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam		Persentase sumber mata air terlindungi		%		94	94	0													94	0
Program Peningkatan Dan Pengembangan Produksi Daerah		Meningkatnya Produksi Daerah		%		50	50	99.402.042													50	99.402.042
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit							100	45.293.200														

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Menular																						
Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi							100	753.308.444														
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat							100	16.269.000														
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat							100	533.304.136														
Program Pengendalian Pembangunan							100	212.238.829														
Program Peningkatan Kesegaran Jasmani Masyarakat dan ASN							100	18.600.000														

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Koordinasi dan Fasilitasi Beasiswa Pendidikan							100	0														
Program Optimalisasi Layanan Pengadaan barang/jasa							100	525.017.419														
Program Peningkatan Pemahaman, Penghayatan, Pengamalan dan Pengembangan Nilai-Nilai Agama							100	24.000.000														
Program Pembinaan Administrasi Pembangunan Daerah											100	861.232.600										
Program Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah											100	833.084.450										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Daerah																						
Program Peningkatan Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat											100	142.444.050										
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan											100	1.934.311.600										
Program Peningkatan Kerjasama dan Otonomi Daerah											100	417.257.800										
Program Administrasi Kewilayahan											100	71.113.000										
Program Penataan Administrasi Pemerintahan Umum											100	1.336.663.300										
Program Peningkatan Kebijakan Pembangunan											100	649.357.757										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Ekonomi Daerah																						
Program Dokumentasi Kebijakan dan kedinasan Pimpinan Daerah											100	1.094.330.000										
	SEKRETARIAT DPRD									31.221.880.204				28.016.119.024		26.941.566.348		27.749.813.338		28.582.307.739		164.264.727.754
Sekretariat DPRD	SEKRETARIAT DPRD							19.043.207.691		31.221.880.204		15.315.995.137		28.016.119.024		26.941.566.348		27.749.813.338		28.582.307.739		164.264.727.754
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%		100	100	6.053.405.524	100	25.298.698.726	100	4.639.723.204	100	22.497.068.091	100	18.515.894.048	100	19.071.370.869	100	19.643.511.996	100	105.026.543.730
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	Program Administrasi Umum Sekretariat	Cakupan Ketersedia	Persentase Pelayanan Administra	%		100	100	303.125.000	100	618.050.000	100	647.288.000									100	618.050.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Aparatur	DPRD Kabupaten / Kota	an dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	si Umum																			
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	%		100	100	712.780.000	100	5.305.131.478	100	249.840.000	100	5.519.050.933	100	8.425.672.300	100	8.678.442.469	100	8.938.795.743	100	36.867.092.923
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur		%		100	100	5.920.973.189			100	4.180.101.000									100	10.101.074.189
Program peningkatan pengembangan		Nilai LKIP OPD		Nilai		BB	A	129.742.500			A	79.992.000									A	209.734.500

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																						
Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah		Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Kota		Ada/tidak		ada	ada	5.923.181.478			ada	5.519.050.933									ada	11.442.232.411
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									105.917.738.993				124.249.740.408		29.690.981.780		30.581.711.233		31.499.162.570		321.939.334.985
	PERENCANAAN									8.447.964.502				7.474.946.169		4.920.246.969		5.067.854.378	-	5.219.890.009		31.130.902.027

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan									8.447.964.502				7.474.946.169		4.920.246.969		5.067.854.378		5.219.890.009		31.130.902.027
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Persentase ketersediaan sarana dan prasarana aparatur	%					100	4.568.019.065			100	3.349.503.419	100	3.786.113.669	100	3.899.697.079	100	4.016.687.991	100	19.620.021.223
	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		Persentase capaian kinerja pengendalian perencanaan pembangunan daerah	%					0	0			100	1.164.439.750	100	273.335.500	100	281.535.565	100	289.981.632	100	2.009.292.447
	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase program prioritas dan kegiatan Renja Perangkat	%					100	3.879.945.437			100	2.961.003.000	100	860.797.800	100	886.621.734	100	913.220.386	100	9.501.588.357

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Daerah yang diakomodir dalam RKPD																			
	KEUANGAN									89.664.975.532				110.753.799.477		15.778.510.052		16.251.865.354		16.739.421.314		249.188.571.728
	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah									89.664.975.532				110.753.799.477		15.778.510.052		16.251.865.354		16.739.421.314		249.188.571.728
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%					100	78.865.705.033			100	99.479.683.384	100	9.305.406.622	100	9.584.568.821	100	9.872.105.885	100	207.107.469.745
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase PD yang mengelola keuangan dengan baik	%					100	7.060.890.921			100	7.520.876.693	100	5.705.216.130	100	5.876.372.614	100	6.052.663.792	100	32.216.020.150
	Program Pengelolaan Barang Milik		Persentase PD yang mengelola	%					100	1.134.252.815			100	1.162.116.600	100	327.669.700	100	337.499.791	100	347.624.785	100	3.309.163.691

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Daerah		BMD dengan baik																			
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase Objek Pajak Daerah Yang dilakukan Pendataan dengan baik Tiap Tahunnya	%					100	2.604.126.763			100	2.591.122.800	100	440.217.600	100	453.424.128	100	467.026.852	100	6.555.918.143
	KEPEGAWAIAN									5.830.804.354				5.123.154.012		5.738.425.219		5.910.577.976		6.087.895.315		28.690.856.876
	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									5.830.804.354				5.123.154.012		5.738.425.219		5.910.577.976		6.087.895.315		28.690.856.876
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota		Persentase urusan pemerintahan daerah yang dihasilkan	%	100	100			100	3.243.403.117			100	3.102.216.562	100	4.161.033.669	100	4.285.864.679	100	4.414.440.619	100	19.206.958.647

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Program Kepegawaian Daerah		Persentase pemuktahirkan data, Pelayanan dan keterisian Formasi kepegawaian	%	100	100			100	2.587.401.237			100	2.020.937.450	100	1.577.391.550	100	1.624.713.297	100	1.673.454.695	100	9.483.898.229
	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN									1.330.423.304				97.907.000		2.591.443.700		2.669.187.011		2.749.262.621		9.438.223.636
	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA									1.330.423.304				97.907.000		2.591.443.700		2.669.187.011		2.749.262.621		9.438.223.636
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		Persentase ASN yang memenuhi syarat kompetensi teknis dan manajerial	%	35	36			37	1.330.423.304			38	97.907.000	39	2.591.443.700	42	2.669.187.011	50	2.749.262.621	50	9.438.223.636

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									643.571.301				799.933.750		662.355.840		682.226.515		702.693.311		3.490.780.717
	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN									643.571.301				799.933.750		662.355.840		682.226.515		702.693.311		3.490.780.717
	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Cakupan Pelaksanaan Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	%					100	643.571.301			100	799.933.750	100	662.355.840	100	682.226.515	100	702.693.311	100	3.490.780.717
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN									7.290.452.751				8.415.665.071		7.611.207.117		7.839.543.331		8.074.729.630		39.231.597.900

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	PENGAWASAN									7.290.452.751				8.415.665.071		7.611.207.117		7.839.543.331		8.074.729.630		39.231.597.900
	Inspektorat									7.290.452.751				8.415.665.071		7.611.207.117		7.839.543.331		8.074.729.630		39.231.597.900
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%					100	5.376.430.268			100	5.954.881.196	100	6.790.037.117	100	6.993.738.231	100	7.203.550.377	100	32.318.637.189
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		Cakupan Penyelenggaraan Pengawasan	%					70,73	128.441.846			70,73	804.200.875	88,24	762.800.800	89	785.684.824	90	809.255.369	90	3.290.383.714
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi		Cakupan Kebijakan	%					72	1.785.580.637			72	1.656.583.000	80	58.369.200	85	60.120.276	90	61.923.884	90	3.622.576.997
	UNSUR KEWILAYAHAN									54.236.814.061				70.885.358.258		79.665.955.355		82.055.934.016		84.517.612.036		428.615.615.050
	KECAMATAN									54.236.814.061				70.885.358.258		79.665.955.355		82.055.934.016		84.517.612.036		428.615.615.050

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kecamatan Rasanae Barat	KECAMATAN RASANAE BARAT							4.529.984.941		8.179.056.407		6.291.306.000		10.252.091.838		11.731.788.581		12.083.742.238		12.446.254.506		63.049.197.570
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	639.699.491	100	4.421.755.407	100	678.659.100	100	4.867.128.838	100	6.362.980.402	100	6.553.869.814	100	6.750.485.908	100	28.956.220.370
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik	%	100	100	100	105.624.450	100	29.168.000	100	182.733.900	100	37.168.000							100	66.336.000
Program peningkatan disiplin	Program Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pega	Persentase Pemberda	%	100	100	100	6.500.000	100	3.318.133.000		0	100	5.274.995.000	100	5.322.784.179	100	5.482.467.704	100	5.646.941.736	100	25.045.321.619

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
aparatur	Desa dan Kelurahan	wai yang disipli n	yaan Masyarak at																			
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai LKIP OPD	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	B	B	BB	20.860.000	100	410.000.000	BB	44.950.000	100	72.800.000							100	482.800.000
Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gejala konflik antar warga yang diatasi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	%	80	80	80	786.000.000				0			82	46.024.000	82	47.404.720	85	48.826.862	85	142.255.582
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dala	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	%	90	90	90	281.305.000			90	134.495.000									90	415.800.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		mpembangunan																				
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Persentase gejala konflik antarwarga yang diatasi		%	90	90	90	130.000.000			92	72.800.000									92	202.800.000
Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan		Persentase tertib administarasi pemerintahan kelurahan		%	90	90	90	30.000.000			95	40.500.000									95	70.500.000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru							90	29.168.000			95	37.168.000									95	66.336.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		% konektivitas jalan kota		%				0													0	0
Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan		Cakupan pembangunan infrastruktur kelurahan		%			60	300.138.000													60	300.138.000
Program Pengelolaan Area Pemakaman		Persentase sarana dan prasarana yang dibangun		%																	0	0
Program pembangunan Saluran Drainase/Goro ng-gorong		% saluran drainase yang berfu		%			30	200.000.000													30	200.000.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ngsi baik																				
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		% wilayah strategis dan cepat tumbuh kota bima yang ditangani		%			70	75.000.000													70	75.000.000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana kelurahan		%			30	1.600.690.000			40	2.081.011.200									30	3.681.701.200
Program Pemberdayaan Masyarakat		Cakupan pemb		%			70	45.000.000			80	3.018.988.800									70	3.063.988.800

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Kelurahan		erdayaan masyarakat di kelurahan										0										
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan		Persentase qori dan qoriah yang juara tingkat Kota		%	11,36	11,36	11,36	280.000.000													11,36	280.000.000
Kecamatan Rasanae Timur	KECAMATAN RASANAE TIMUR							5.327.354.100		10.040.343.117		8.450.198.600		13.432.469.758		14.743.990.121		15.186.309.825		15.641.899.119		80.588.990.740
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perka	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan	%	100	100	100	797.244.100	100%	5.722.192.117	100	920.800.000	100	6.206.641.958	100	7.676.110.587	100	7.906.393.905	100	8.143.585.722	100	35.654.924.288

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ntoran	daerah																			
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik	%	100	100	100	158.186.000	100%	105.670.000	100	222.132.500	100	120.300.000	100	110.342.400	100	113.652.672	100	117.062.252	100	567.027.324
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100		0	100%	3.771.791.000		0	100	7.097.229.000	100	6.853.025.134	100	7.058.615.888	100	7.270.374.365	100	32.051.035.387
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai LKIP OPD	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban	Nilai	B	B	B	53.773.000	100	440.690.000	BB	81.438.300	100	8.298.800	100	104.512.000	100	107.647.360	100	110.876.781	100	772.024.941

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			Umum																			
Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gejala konflik antar warga yang diatasi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	%	80	80	80	882.011.500			81	44.525.000									81	926.536.500
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	%	90	90	90	275.155.000			95	172.006.000									95	447.161.000
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan		Persentase gejala konflik		%	90	90	90	104.490.000			95	8.298.800									95	112.788.800

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Keamanan		antar warga yang diatasi																				
Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan		Persentase tertib administarasi pemerintahan kelurahan		%	90	90	90	47.096.500			92	59.660.000									92	106.756.500
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		% Jalan lingkungan dalam kondisi baik		%				0				0									0	0
Program Penataan Daerah Otonomi Baru							90	105.670.000			93	120.300.000									93	225.970.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pengelolaan Area Pemakaman		Persentase sarana dan prasarana yang dibangun		%			90	95.000.000				0									90	95.000.000
Program pembangunan Saluran Drainase/Goro ng-gorong		% saluran drainase yang berfungsi baik		%			30	700.000.000				0									30	700.000.000
Program Pengembanga n Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		% wilayah strategis dan cepat tumbuh kota bima yang ditan		%				0				0									0	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		gani																				
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		% jaringan irigasi yang berfungsi baik		%				0				0									0	0
Program Peningkatan ketahanan pangan		Jumlah produksi pertanian tanaman pangan		%				0				0									0	0
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana		%			30	1.772.528.000			40	3.320.700.000									40	5.093.228.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		kelurahan																				
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		%				0			70	3.500.338.000									0	3.500.338.000
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan		Persentase qori dan qoriah yang juara tingkat Kota		%	11,36	11,36	11,36	336.200.000				0									11,36	336.200.000
Kecamatan Asakota	KECAMATAN ASAKOTA							4.063.546.419		7.868.876.033		6.744.471.400		10.787.213.622		12.251.885.456		12.619.442.020		12.998.025.280		64.217.889.111
Program Pelayanan	Program Penunjang	Cakupan	cakupan pelaksana	%	100	100	100	853.932.219	100	4.765.587.333	100	925.333.	100	5.044.275.622	100	6.578.789.054	100	6.776.152.726	100	6.979.437.307	100	30.144.242.042

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Administrasi Perkantoran	Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Administrasi Perkantoran	an program penunjang urusan pemerintahan daerah									400										
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik	%	100	100	100	91.573.000	100	48.240.000	100	63.900.000	100	4.925.000	100	51.766.600	100	53.319.598	100	54.919.186	100	213.170.384
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100		0	100	2.651.378.700		0	100	5.614.313.000	100	5.513.741.177	100	5.679.153.412	100	5.849.528.015	100	25.308.114.304

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai LKIP OPD	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	B	B	BB	14.752.500	100	403.670.000	BB	12.300.000	100	123.700.000	100	100.922.500	100	103.950.175	100	107.068.680	100	839.311.355
Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gejala konflik antar warga yang ditasi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	%	80	80	80	1.112.730.000			83	41.050.000			85	6.666.125	87	6.866.109	89	7.072.092	89	20.604.326
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	%	90	90	90	298.944.700			92	177.625.000									92	476.569.700

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Persentase gejala konflik antar warga yang diatasi		%	90	90	90	111.700.000			91	123.700.000									91	235.400.000
Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan		Persentase tertib administarasi pemerintahan kelurahan		%	90	90	90	39.790.000			93	25.500.000									93	65.290.000
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		% Jalan lingkungan dalam kondisi baik		%			50	300.000.000				0									50	300.000.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Penataan Daerah Otonomi Baru							90	48.240.000			92	4.925.000									90	53.165.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		% konektivitas jalan kota		%				0				0									0	0
Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan		Cakupan pembangunan infrastruktur kelurahan		%			60	200.000.000				0									60	200.000.000
Program Pengelolaan Area Pemakaman		Persentase sarana dan prasarana yang dibangun		%				0				0									0	0
Program Pembangunan Sarana dan		Cakupan keter		%			30	699.914.000			50	2.703.451.200									50	3.403.365.200

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Prasarana Kelurahan		sediaan sarana dan prasarana kelurahan										0										
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		Cakupan pemberdayaan masyarakat di kelurahan		%				0			70	2.666.686.800									0	2.666.686.800
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan		Persentase qori dan qoriah yang juara tingkat Kota		%		18,75	15,91	291.970.000				0									31,25	291.970.000
Program Perayaan Hari Besar/Khusus		% capaian		%				0				0										

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		perayaan hari besar/khusus																				
Kecamatan Mpunda	KECAMATAN MPUNDA							6.692.184.523		13.006.524.677		10.094.835.000		16.994.446.889		19.078.457.748		19.650.811.480		20.240.335.825		102.246.182.444
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	778.469.848	100	7.426.072.852	100	866.318.500	100	8.211.201.389	100	10.752.138.461	100	11.074.702.615	100	11.406.943.693	100	48.871.059.010
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Saran	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik	%	100	100	100	270.625.350	100	20.238.000	100	390.683.500			100	72.792.000	100	74.975.760	100	77.225.033	100	245.230.793

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		a Prasarana Aparatur																				
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100		0	100	5.050.109.825		0	100	8.721.547.000	100	8.109.211.287	100	8.352.487.626	100	8.603.062.254	100	38.836.417.992
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai LKIP OPD	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	B	B	BB	62.637.500	100	510.104.000	BB	54.587.500	100	61.698.500	100	126.036.000	100	129.817.080	100	133.711.592	100	961.367.172
Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gejala konflik antar warga yang diatasi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	%	90	90	90	1.073.591.500			92	14.500.000			93	18.280.000	94	18.828.400	95	19.393.252	95	56.501.652

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	%	90	90	90	337.958.000			91	173.647.000									91	511.605.000
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Persentase gejala konflik antarwarga yang diatasi		%	90	90	90	110.104.000			94	35.954.000									94	146.058.000
Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan		Persentase tertib administarasi pemerintah		%	90	90															0	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		an kelurahan																				
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		% panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik		%			50	180.138.000													50	180.138.000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru		% penataan kelurahan hasil pemekaran wilayah		%			90	20.238.000													90	20.238.000
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Panjang jalan lingkungan baru		%				0													0	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		yang dibangun																				
Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan		% insfrastruktur kelurahan dalam kondisi baik		%			60	150.000.000													60	150.000.000
Program Pengelolaan Area Pemakaman		% penataan area pemakaman		%			80	95.000.000													80	95.000.000
Program pembangunan Saluran Drainase/Goreng-gorong		%saluran drainase lingkungan dalam kondisi		%			30	310.138.000													30	310.138.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		baik																				
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh		% penataan wilayah strategis dan cepat tumbuh		%			80	150.000.000													80	150.000.000
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		% talud dan bronjong lingkungan dalam kondisi baik		%			30	100.000.000													30	100.000.000
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan		% jaringan irigasi dala		%				0													0	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya		m kondisi baik																				
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		% pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		%			30	2.553.284.325			45	4.393.180.000									45	6.946.464.325
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		% masyarakat kelurahan yang ditingkatkan kapasitasnya		%			70	100.000.000			80	4.140.220.000									80	4.240.220.000
Program Pembinaan dan Peningkatan		Persentase qori dan		%	31,25	31,25	20,45	400.000.000			37,50	25.744.500									37,50	425.744.500

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan		qoriah yang juara tingkat Kota																				
Program Perayaan Hari Besar/Khusus		% capaian perayaan hari besar /khususs		%																		
Kecamatan Raba	KECAMATAN RABA							7.835.496.587		15.142.013.827		11.550.477.000		19.419.136.151		21.859.833.449		22.515.628.452		23.191.097.306		118.513.355.185
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100	100	100	1.090.355.587	100	8.715.978.827	100	1.007.451.000	100	9.459.525.151	100	11.976.998.214	100	12.336.308.160	100	12.706.397.405	100	55.195.207.757

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur	Persentase Koordinasi Pelayanan Publik	%	100	100	100	234.206.000	100	73.100.000	100	483.395.000	100	91.500.000	100	71.745.600	100	73.897.968	100	76.114.907	100	386.358.475
Program peningkatan disiplin aparatur	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase pegawai yang disiplin	Persentase Pemberdayaan Masyarakat	%	100	100	100	40.400.000	100	5.778.045.000	100	7.500.000	100	9.835.861.000	100	9.500.137.635	100	9.785.141.764	100	10.078.696.017	100	44.977.881.416
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai LKIP OPD	Persentase Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Nilai	B	B	B	44.500.000	100	574.890.000	BB	92.520.000	100	32.250.000	100	310.952.000	100	320.280.560	100	329.888.977	100	1.568.261.537

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Peningkatan dan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase gejala konflik antarwarga yang ditasi	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Umum	%	90	90	90	1.258.800.000			92	38.430.000									92	1.297.230.000
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Cakupan Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan	%	90	90	90	409.107.000			92	354.000.000									92	763.107.000
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		Persentase gejala konflik antarwarga		%	90	90	90	134.890.000			93	20.250.000									93	155.140.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		yang diatasi																				
Program Peningkatan Sarana/Prasarana dan Penataan Administrasi Pemerintah Kelurahan		Persentase tertib administrasi pemerintahan kelurahan		%	90	90	90	46.766.000			95	85.431.000									95	132.197.000
Program Peningkatan Jalan dan Jembatan		% panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik		%			50	400.000.000				0									50	400.000.000
Program Penataan Daerah Otonomi Baru		% penataan kelurahan		%			90	73.100.000			92	91.500.000									92	164.600.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		hasil pemekaran wilayah																				
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan		Panjang jalan lingkungan baru yang dibangun						0				0									0	0
Program Pembangunan Infrastruktur Kelurahan		% insfrastruktur kelurahan dalam kondisi baik		%			70	195.000.000				0									70	195.000.000
Program Pengelolaan Area Pemakaman		% penataan area pemakama						0				0									0	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		n																				
Program pembangunan Saluran Drainase/Goro ng-gorong		%saluran drainase lingkungan dalam kondisi baik		%			40	500.000.000				0									40	500.000.000
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		% penataan wilayah strategis dan cepat tumbuh						0				0									0	0
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan		% talud dan bronjong lingkungan						0				0									0	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pengairan lainnya		dalam kondisi baik																				
Program Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan		% jaringan irigasi dalam kondisi baik						0				0									0	0
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		% pembangunan sarana dan prasarana kelurahan		%			30	2.868.372.000			50	4.433.800.000									50	7.302.172.000
Program Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan		% masyarakat kelurahan yang		%			70	100.000.000			75	4.924.200.000									75	5.024.200.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ditingkatkan kapasitasnya																				
Program Pembinaan dan Peningkatan Pelayanan Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan		Persentase qori dan qoriah yang juara tingkat Kota		%	31,25	31,25	20,45	440.000.000			37,5	10.000.000									37,5	450.000.000
Program Perayaan Hari Besar/Khusus		% capaian perayaan hari besar/khusus		%				0			75	2.000.000									75	2.000.000
PENGAWASAN								3.656.140.044		0		4.205.184.727		0		0		0		0		30.049.423

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Inspektorat								3.656.140.044		0		4.205.184.727		0		0		0		0		30.049.423
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%		100	100	1.176.746.955			100	1.285.942.680									100	2.462.689.635
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur		%		100	100	33.796.000			0	99.200.000									100	132.996.000
Program peningkatan disiplin		Persentase pega		%		100	100	8.500.000			100	0									100	8.500.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
aparatur		wai yang disiplin																				
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		Persentase ASN APIP yang diangkat dalam Jabatan fungsional setelah mendapatkan sertifikat Diklat		%		33%	12,5	107.162.140			12,5	50.950.000									12,5	158.112.140
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja		Persentase Organisasi Perangkat		OPD		0%	24,14	205.477.000			29,41	76.764.000									29,41	282.241.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
dan keuangan		Daerah dengan nilai SAKIP Meningkat																				
Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota		Laporan Keuangan Pemerintah daerah Kota Bima sesuai dengan SAP dan SPI		Dokumen (Laporan)		Sesuai	Sesuai	128.441.846			Sesuai	804.200.875									Sesuai	932.642.721
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan		Persentase menurunnya		%		53,13	94,12	1.785.580.637			88,24	1.656.583.000									88,24	3.442.163.637

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		temuan APIP dan BPK																				
		Internal Audit Capability Model (IA-CM) yang terpenuhi untuk Level 3		Model		6	6				6										6	
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		Persentase ASN APIP yang mengikuti pendidikan dan pelati		ASN APIP		82,5	64,71	210.435.466			66,67	231.544.172									66,67	441.979.638

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		han teknis, subtasi,penjenjangan, dan profesi																				
PERENCANAAN								6.724.540.459		0		5.892.422.250		0		0		0	-	0		12.616.962.709
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan								6.724.540.459		0		5.892.422.250		0		0		0		0		12.616.962.709
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perka		%		100	100	1.233.508.245			100	715.665.650									100	1.949.173.895

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ntoran																				
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Aparatur		%		100	100	273.697.734			100	82.635.000									100	356.332.734
Program peningkatan disiplin aparatur		Cakupan Pembinaan kapasitas Sumber Daya Aparatur		%		100	100	47.632.800			100	0									100	47.632.800
Program peningkatan pengembangan		Nilai LKIP OPD		%		BB	BB	356.924.000			A	168.745.100									A	525.669.100

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan																						
Program pengembangan data/informasi		Persentase ketersedaan data kelitbangan		%		30	35	289.260.942			0	0									0	289.260.942
Program Kerjasama Pembangunan		Presentase Kerjasama Pembangunan yang sesuai RKPD		%			100	139.356.400			0	0									0	139.356.400
Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar		Persentase Program/Kegiatan		%			100	170.231.284			0	0									0	170.231.284

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Rencana Sektor Strategis dalam RKPD																				
Program perencanaan pembangunan daerah		Persentase sasaran Renstra SKPD yang selaras dengan Sasaran RPJMD		%			100	1.558.097.696			0	0									0	1.558.097.696
Program perencanaan pembangunan ekonomi		Persentase program		%			100	144.266.200			0	0									0	144.266.200

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Renja SKPD bidang ekonomi yang selaras dengan RKPD																				
Program perencanaan sosial dan budaya		Persentase program Renja SKPD Bidang sosial budaya yang selaras dengan		%			100	904.170.703			0	0									0	904.170.703

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		RKPD																				
Program perancanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam		Persentase program Renja SKPD bidang prasarana wilayah dan SDA yang selaras dengan RKPD		%			100	737.751.939			0	0									0	737.751.939
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana		Persentase hasil kelitbangan		%			100	226.071.215			0	0									0	226.071.215

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Daerah		yang diakomodir dalam RKPD																				
Program Penelitian dan Pengembangan Daerah		Persentase Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Bima		%			100	643.571.301			100	799.933.750									100	1.443.505.051
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial		Persentase program/kegiatan prioritas bidang pemerintah		%		100	100	0			100	688.226.000									100	688.226.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		an dan social yang diakomodi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah																				
		Persentase program/kegiatan prioritas daerah bidang peme					0	0			0	0										0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		rintahan dan social yang dilaksanakan melalui sumber pendanaan lainnay (non APBD)																				
Program Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi dan Infrastruktur		Persentase program/kegiatan prioritas bidang ekon		%		100	100	0			100	2.272.777.000									100	2.272.777.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		omi dan infrastruktur yang diakomodi dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah																				
		Persentase program/kegiatan prioritas daerah bidan					0	0			0	0										0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		g ekonomi dan infrastruktur yang dilaksanakan melalui sumber pendanaan lainnay (non APBD)																				
Program Pengendalian Perencanaan Pembangunan Daerah		Persentase keselarasan dokumen peren		%		100	100	0			100	0									100	0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		canaan tahunan																				
		Persentase Program RKPD yang selaras dengan RPJMD					0	0			0	0										0
Program Pengendalian Perencanaan Daerah							0	0			0	1.164.439.750										1.164.439.750
Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah		Produk Inovasi daerah					0	0			0	0										0
		Persentase hasil kelitb					0	0			0	0										0

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		angan yang dimanfaatkan																				
KEUANGAN								15.161.013.923		0		14.159.155.552		0		0		0		0		29.320.169.475
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah								15.161.013.923		0		14.159.155.552		0		0		0		0		29.320.169.475
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Persentase Kualitas Pelayanan Perkantoran		%		100	100	3.013.265.183			100	2.344.498.459									100	5.357.763.642
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Persentase Kualitas Sarana dan		%		100	100	297.947.159			100	325.624.000									100	623.571.159

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		Prasarana Kerja yang tersedia																				
Program peningkatan disiplin aparatur		Persentase Kualitas Kinerja Aparatur		%		80	0	0			0	0									0	0
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Persentase OPD dengan Indeks SAKIP Baik		%		52,94	52,94	1.050.531.082			64,71	214.917.000									64,71	1.265.448.082
Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah		Opini BPK atas audit laporan keua		WTP		WTP	WTP	7.060.890.921			WTP	5.429.474.379									WTP	12.490.365.300

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		ngan daerah																				
Program Peningkatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah		Opini BPK atas audit laporan keuangan daerah		WTP		WTP	WTP	1.134.252.815			WTP	1.162.116.600									WTP	2.296.369.415
Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Daerah		Persentase peningkatan PAD tiap tahun		%		20	20	2.604.126.763			20	1.183.322.100									20	3.787.448.863
Program Peningkatan Penatausahaan		Opini BPK atas Auidit LKPD		WTP																	0	0
Program Pencapaian dan Akuntabilitas Pendapatan		% capaian pengelolaa		%							100	1.407.800.700									100	1.407.800.700

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Daerah		n SIMDA Pendapatan																				
Program Peningkatan Pengendalian Tata Kelola Keuangan		Jumlah SOP Tata Kelola keuangan yang diterbitkan		Dokumen							1	1.198.190.000									1	1.198.190.000
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		Persentase capaian penerbitan sp2d tepat waktu		%							100	893.212.314									100	893.212.314
KEPEGAWAIAN								5.109.325.046		0		3.129.951.300		0		0		0		0		8.239.276.346

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
												0										
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								5.109.325.046		0		3.129.951.300		0		0		0		0		8.239.276.346
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran		%	100	100	100	922.409.505			100	809.545.850									100	1.731.955.355
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan Ketersediaan dan Kelayakan Sarana Prasarana Apara		%	100	100	100	176.571.000			100	116.440.000									100	293.011.000

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		tur																				
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan		Nilai LKIP OPD		%	35	36	100	92.520.000			100	85.121.000									100	177.641.000
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		Ratio pegawai dengan beban kerja		%		60	70	1.249.779.980			75	1.011.241.950									75	2.261.021.930
Program Peningkatan Kompetensi Aparatur		Persentase peningkatan ASN yang memenuhi syarat kompetensi		%		2,1	2,32	1.526.948.302			4,03	582.635.000									4,03	2.109.583.302

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
Program Pembinaan dan Peningkatan Kinerja ASN		Persentase Peningkatan Kinerja ASN		%			2	0			2,5	0									2,5	0
Program Penegakan Aturan Disiplin, Kode Etik, dan Kode Perilaku Pegawai ASN		Persentase Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin, Kode Etik Dan Kode Perilaku ASN Yang Terselesaik		%		99	100	288.740.200			100	0									100	288.740.200

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
		an																				
Program Pembangunan Sistem Informasi yang Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian Kota Bima		Jumlah statistik kepegawaian yang diterbitkan oleh BKD		dok.			100	362.815.134			1	154.366.000									1	517.181.134
Program Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Indeks kepuasan ASN terhadap pelayanan administrasi kepegawaian		%			100	489.540.925			100	370.601.500									100	860.142.425

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									5.487.870.797				5.584.631.599		5.060.466.571		5.212.280.568		5.368.648.985		26.713.898.520
	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									5.487.870.797				5.584.631.599		5.060.466.571		5.212.280.568		5.368.648.985		26.713.898.520
	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									5.487.870.797				5.584.631.599		5.060.466.571		5.212.280.568		5.368.648.985		26.713.898.520
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		cakupan pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah	%					100	2.233.695.073			100	2.310.274.199	100	2.457.219.171	100	2.530.935.746	100	2.606.863.819	100	12.138.988.008
	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Persentase Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya Masyarakat	%					70	500.028.460			70	351.482.000	70	185.774.600	80	191.347.838	95	197.088.273	95	1.425.721.171

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		Persentase Penguatan Kewaspadaan Nasional	%					90	2.158.717.423			90	2.754.790.400	90	460.320.400	100	474.130.012	100	488.353.912	100	6.336.312.147
	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik		Persentase Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	%					80	595.429.841			80	168.085.000	80	1.270.175.500	90	1.308.280.765	100	1.347.529.188	100	4.689.500.294
	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%											80	228.467.700	85	235.321.731	90	242.381.383	90	706.170.814

BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM	BID. URUSAN PEMERINTAHAN/PROGRAM (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	INDIKATOR KINERJA	INDIKATOR KINERJA (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)	SATUAN	KONDISI AWAL		TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAANNYA														KONDISI KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD	
							2019		2019 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2020		2020 (Permendagri No. 90 Tahun 2019 & Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		2021		2022		2023			
					2017	2018	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Persentase Keterlibatan Organisasi Kemasyarakat Dalam Pengawasan	%											80	458.509.200	85	472.264.476	95	486.432.410	95	1.417.206.086
TOTAL								**416.945.402.612**		**796.259.444.362**		**426.699.999.482**		**828.544.477.772**		**764.747.135.434**		**787.689.549.497**		**811.320.235.982**		**4.508.767.085.149**

Sumber: Hasil Analisis

BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah memberikan gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator kinerja sasaran Visi Misi Walikota dan Wakil Walikota. Indikator ini menjadi alat ukur untuk mengetahui ketercapaian visi dan misi RPJMD Tahun 2018-2023. Selanjutnya indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dari setiap aspek, fokus menurut bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah kota sesuai dengan kewenangan. lndikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (*outcome*) atau kompositnya (*impact*). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program prioritas ditetapkan. Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel 8.1, Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan disajikan pada tabel 8.2, Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disajikan pada tabel 8.3, dan Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal per Urusan pada tabel 8.4.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kota Bima

No	Indikator Sasaran	Satuan	Kondisi Awal			Target				Kondisi Akhir RPJMD (2023)
			2018	2019		2020	2021	2022	2023	
				Target	Realisasi					
1	*2*	*3*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
1	Angka Harapan Hidup	Tahun	69,35	69,55	70, 20	69,75	69,95	70,15	70,35	70,35
2	Angka Partisipasi Wajib Belajar Pendidikan Dasar	Persen	98,29	98,5	98,79	99,29	99,79	100	100	100
3	Persentase peningkatan mutu pendidikan	Persen	23,17	25,17	26,12	27,17	29,17	31,17	33,17	33,17
4	Pengeluaran Per Kapita	Rp.000/ Tahun/Orang	10.825	10.925	11.334	11.025	11.125	11.225	11.335	11.335
5	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	59,9	63	63,52	63,5	63,58	63,6	63,65	63,65
6	Pertumbuhan PDRB	Persen (%)	6,5	5,8	5,22	3	3,3	3,6	3,9	3,9
7	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	8,79	8,88	8,6	8,81	8,74	8,67	8,67	8,67
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen (%)	2,39	4,5	4,18	4	3,85	3,7	3,55	3,55
9	Nilai SAKIP	Huruf dan Angka	B (63,64)	B (65,58)	B (67,05)	B (67,60)	B (68,00)	B (69,00)	BB (70,01)	BB (70,01)
10	Skor LPPD	Angka	Sangat Tinggi (3,1845)	Sangat Tinggi (3,1930)	Sangat Tinggi (3,2595)	Sangat Tinggi (3,200)	Sangat Tinggi (3,2100)	Sangat Tinggi (3,2200)	Sangat Tinggi (3,2300)	Sangat Tinggi (3,2300)
11	Opini BPK	Huruf	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
12	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	Persen (%)	5,56	5,7	5,62	5,72	5,02	5,12	5,22	5,22
13	Rata-rata skor IKM	Angka	83,64	84	82,36	84,5	84,5	85	85,5	85,5
14	Persentase Kesesuaian Tata Ruang	Persen (%)	85	95	98,1	98	98,1	98,2	98,3	98,3
15	Indeks kualitas lingkungan hidup	Angka	76,41	74	74,13	60	61	62	63	63
16	Persentase peningkatan infrastruktur daerah dalam kondisi baik	Persen (%)	31,45	38,81	39	40	41	42	43	43

17	Indeks Ketahanan Daerah	Angka	80,9	83,3	84,3	83,5	83,7	83,9	84,1	84,1
18	Persentase penurunan angka kriminalitas	Persen	20	25	33	30	30,5	31	31,5	31,5
19	Persentase penurunan Angka Konfllik Sosial	Persen	11,2	12,5	12,5	12,5	13	13,5	14	14
20	Persentase peningkatan nilai budaya, adat dan tradisi yang dibina	Persen (%)	1,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4	2,5	2,5
21	Indeks kerukunan umat beragama	Angka	83	84	82,11	84	84	84	84	84

Sumber : Hasil Analisa

Tabel 8.2
Aspek dan Indikator Kinerja Menurut Bidang Urusan Penyelenggaraan Tingkat *Outcome* Pemerintah Daerah

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT								
1	**Fokus Kesejahteraan Dan Pemerataan Ekonomi**							
1.1.	Pertumbuhan ekonomi	6,5	5,8	3	3,3	3,6	3,9	3,9
1.2.	Pengeluaran Per Kapita	10.825 (Rp. 000/tahun)	10.925	11.334	11.025	11.125	11.225	11.335
1.3.	PMKS yang tertangani	70	70	75	80	82	85	85

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.4.	Tingkat pengangguran terbuka	2,39	4,5	4	3,85	3,7	3,55	3,55
1.5.	Angka kriminalitas yang tertangani	80%	85%	90%	90%	90%	90%	90%
1.6.	Indeks kerukunan umat beragama	83	84	84	84	84	84	84
2	**Fokus Kesejahteraan Masyarakat**							
2.1.	**Pendidikan**							
2.1.1.	Angka melek huruf	96%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
2.1.2.	Angka rata-rata lama sekolah	10,13 Thn	10,30 Thn	10,40 Thn	10,50 Thn	10,70 Thn	11 Thn	11 Thn
2.1.3.	Angka Harapan lama Sekolah	14,,98	14,99	15	15,1	15,15	15,2	15,2
2.2.	**Kesehatan**							
2.2.1.	Angka Harapan Hidup	69,35	69,55	69,75	69,95	70,15	70,35	70,35
2.3	**Fokus Seni Budaya**							
2.3.1.	Cakupan nilai budaya, adat dan tradisi yang lestari	95	95	95,5	96	96,5	97	97
ASPEK PELAYANAN UMUM								
Layanan Urusan Wajib Dasar								
1	**Pendidikan**							
1.1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	0,55	0,58	0,61	0,64	0,67	0,71	0,71
1.2	Angka partisipasi kasar	54,77	57,92	61,07	64,22	67,37	70,52	70,52
1.3	Angka pendidikan yang ditamatkan	2.399,00	2.699,00	2.999,00	3.299,00	3.599,00	3.899,00	3.899,00
1.4	Angka Partisipasi Murni							

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.4.1	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	91,76	93,37	94,98	96,59	98,2	99,82	99,82
1.4.2	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	103,38	103,38	103,38	103,38	103,38	103,38	103,38
1.5	Angka partisipasi sekolah							
1.5.1	Angka partisipasi sekolah (APS) SD/MI/Paket A	926,84	943,12	959,41	975,69	991,97	1.008,25	1.008,25
1.5.2	Angka partisipasi sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	1.044,24	1.044,24	1.044,24	1.044,24	1.044,24	1.044,24	1.044,24
1.6	Angka Putus Sekolah:							
1.6.1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,05	0,05	0	0	0	0	0
1.6.2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,11	0,11	0	0	0	0	0
1.7	Angka Kelulusan:							
1.7.1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	99,89	100	100	100	100	100	100
1.7.2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	99,56	100	100	100	100	100	100
1.8	Angka Melanjutkan (AM):							
1.8.1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	100	100	100	100	100	100	100
1.8.2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	100	100	100	100	100	100	100
1.9.	Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	6,62	6,92	7,45	7,76	8,07	8,37	8,37
1.10	Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah pendidikan dasar	45,86	45,86	45,86	45,86	45,86	45,86	45,86
1.11	Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar	1.306,62	1.292,13	1.277,96	1.264,10	1.250,54	1.237,26	1.237,26
1.12	Rasio guru terhadap murid pendidikan	127,09	123,27	119,67	116,28	113,07	110,04	110,04

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	menengah							
1.13	Rasio guru/murid per kelas rata-rata sekolah dasar	132,69	130,39	128,18	126,04	123,97	121,97	121,97
1.14	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	98,63	100	100	100	100	100	100
2	**Kesehatan**							
2.1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	8	8	8	8	7	7	7
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	9	9	9	9	8	8	8
2.4	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	7	7	7	7	6	6	6
2.5	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	137	137	137	137	106	106	106
2.6	Rasio posyandu per satuan balita	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
2.9	Rasio dokter per satuan penduduk	20	30	45	45	50	50	50
2.10	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	30,98						
2.12	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	95	95	95	95	95	95	95
2.13	Cakupan kelurahan *Universal Child Immunization* (UCI)	75	80	85	87	90	92	92
2.14	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100
2.15	Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	75	80	85	87	90	92	92

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2.16	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	30,00%	30,00%	40,00%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
2.17	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	38	39	41	43	45	47	47
2.189	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	33	35	40	45	50	60	60
2.20	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	169	170	175	180	185	190	190
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**							
3.1	Pekerjaan Umum:							
3.1.1	Persentase rumah tangga bersanitasi layak	74,27%	74,67%	76,50%	80,00%	90,00%	100,00%	100,00%
3.1.2	Persentase rumah tangga pengguna air bersih	77,82%	75,88%	80,83%	87,00%	95,00%	100,00%	100,00%
3.1.4	Persentase jaringan irigasi teknis	64,20%	47,00%	50,00%	52,00%	60,00%	65,00%	65,00%
3.1.5	Persentase panjang jaringan jalan kota dalam kondisi baik	83,60%	60,93%	65,00%	70,00%	73,42%	85,00%	85,00%
3.1.8	Persentase meningkatnya kelancaran saluran drainase	70,62%	27,00%	35,00%	42,00%	50,89%	59,79%	59,79%
3.1.9	Persentase panjang sungai yang tertangani	52,80%	44,00%	46,00%	48,00%	50,00%	52,00%	52,00%
3.1.10	Persentase cakupan Layanan air minum dan air limbah	6%	6,13%	6,44%	6,76%	7,10%	7,46%	33,89%
3.1.11	Persentase jalan kota dalam kondisi mantap	38,87	50,81%	9,69%	11,62%	11,62%	11,62%	50,37%
3.1.12	Persentase konektivitas jalan kota	10,69	5,95%	3,72%	1,51%	1,51%	1,51%	12,40%
3.1.13	Persentase saluran drainase yang berfungsi baik diluar kawasan kumuh	74,85	2,82%	3,52%	4,69%	4,69%	3,05%	18,77%
3.1.14	Persentase panjang sungai yang berfungsi baik	50,89	2,88%	4,81%	6,25%	5,29%	5,77%	25,00%
3.2	Penataan Ruang:							
3.2.1	Luas wilayah yang telah terlayani oleh Rencana	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%	100,00%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Rinci Tata Ruang							
3.2.2	Peningkatan jumlah bangunan ber IMB		4,46%	4,93%	5,36%	5,76%	6,13%	6,13%
4	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman**							
4.1	Persentase peningkatan rumah layak huni	21,68%	21,68%	19,58%	19,58%	19,58%	19,58%	19,58%
4.2	Persentase KK yang memiliki rumah layak huni	75,06%	2,69%	3,37%	3,02%	3,03%	3,01%	15,12%
4.3	Persentase rumah tidak layak huni akibat bencana alam/sosial yang ditangani	%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.4	Persentase kawasan permukiman kumuh	43,66%	7,00%	3,00%	5,00%	5,00%	3,66%	3,66%
4.5	Persentase masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	0%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
4.6	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan	26,25%	26,25%	18,43%	18,43%	18,43%	18,43%	18,43%
5	**Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**							
5.1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	85%	85%	90%	90%	95%	100%	100%
5.2	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	79%	79%	80%	85%	90%	100%	100%
5.3	Tingkat waktu tanggap (*response time rate*) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	85%	85%	85%	85%	85%	100%	100%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.4	Persentase Penegakan PERDA	85%	85%	90%	90%	95%	100%	100%
6	**Sosial**							
6.1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	69%	75%	75%	75%	75%	75%	75%
6.3	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	53%	55%	60%	65%	70%	75%	75%
6.4	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	8%	10%	20%	30%	40%	50%	50%
6.5	Persentase panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	69%	69%	70%	75%	77%	80%	80%
6.7	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	77%	80%	82%	85%	90%	100%	100%
6.8	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Layanan Urusan Wajib Non Dasar								
1	**Tenaga Kerja**							
1.1	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	90,56%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.2	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.3	Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	76,00%	80,80%	84,80%	88,80%	92,80%	96,80%	100,00%
1.4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	0,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.5	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1.6	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**							
2.1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	53,47	53,47	55,47	55,48	55,5	55,52	55,52
2.3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	46,52	46,52	46,72	47,02	47,2	47,3	47,3
2.4	Rasio KDRT	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05	0,05	0,005
2.5	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0,02	0,02	0,01	0,01	0	0	0
2.6	Partisipasi angkatan kerja perempuan	45	45,5	46	47	49	50	50
2.7	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	50	50	45	45	43	35	35
2.8	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit	88,3	90	100	100	100	100	100

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
3	**Pangan**							
3.1	Ketersediaan pangan utama	27.517.438 kg	27.527. 450 kg	27.537.46 3 kg	27.547.47 3 kg	27.557.48 8 kg	27.567.4 98 kg	27.567.49 8 kg
3.2	Ketersediaan energi dan protein perkapita							
	Ketersediaan energi	13.114 kkal/kaphr	13.124 kkal/k ap/hr	13.134 kkal/kap /hr	13.144 kkal/kap/ hr	13.154 kkal/kap/ hr	13.164 kkal/kap /hr	13.164 kkal/kap/ hr
	Ketersediaan protein	795,27 gr/kap/hr	796,27 gr/kap /hr	797,27 gr/kap/h r	798,27 gr/kap/hr	799,27 gr/kap/hr	800,00 gr/kap/ hr	800,00 gr/kap/hr
4	**Pertanahan**							
4.1	Persentase asset tanah pemerintah yang bersertifikat	17,49%	0,12%	0,12%	0,11%	0,11%	0,11%	0,59%
4.2	Persentase Tanah milik pemerintah yang tidak memiliki konflik	100,00%	100,00 %	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
5	**Lingkungan Hidup**							
5.1	Persentase Pelayanan Persampahan	47% penganan dan	52% penang anan	57% penangan an	62% penangan an	67% penangan an	72% penanga nan	72% penangan an
		2% penguranga n	4% pengur angan	7% penguran gan	10% pengurang an	15% pengurang an	20% pengura ngan	20% pengurang an
5.1.1.	**Persentase sampah yang tertangani**	47%	52%	57%	62%	67%	72%	72%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
5.2	Persentase Luas RTH Publik	17.6%	17.6%	17.9%	18.2%	18.5%	18.8%	19%
6	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**							
6.1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	94,31%	94,58%	95,33%	96,16%	97,20%	98,44%	98,44%
6.2	Rasio bayi berakte kelahiran	92,97%	93,31%	97,95%	98,24%	98,92%	99,69%	99,69%
6.3	Rasio pasangan berakte nikah	16,82%	17,03%	17,44%	18,10%	18,96%	20,41%	20,41%
6.4	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6.5	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah	Sudah
6.6	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	94,31%	94,59%	95,33%	96,16%	97,20%	98,44%	98,44%
6.7	Cakupan penerbitan akta kelahiran	90,74%	91,26%	92,13%	93,19%	94,96%	99,48%	99,48%
7	**Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**							
7.1	Cakupan sarana prasarana kelurahan	34	36	39	41	43	46	50
8	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**							
8.1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	2,10%	2,09%	2,08%	2,07%	0,60%	2,06%	2,06%
8.2	Total Fertility Rate (TFR)	2,34%	2,31%	2,29%	2,28%	2,27%	2,25%	2,25%
8.3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	29,26%	40,00%	50,00%	70,00%	75,00%	80,00%	80,00%
8.4	Rata-rata jumlah anak per keluarga	3,2	3	2,8	2,5	2,3	2	2
8.5	Ratio Akseptor KB	10,15%	13%	15,50%	17,76%	20,50%	25,00%	25,00%

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
8.6	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	89,61%	90,00%	90,03%	90,80%	91,50%	92,00%	92,00%
8.7	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	50/1000	45/1000	45/1000	42/1000	40/1000	40/1000	40/1000
8.8	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	40%	40%	35%	30%	25%	20%	20%
8.9	Rata-rata usia kawin pertama wanita	22	22	22	22	22	22	22
9	**Perhubungan**							
9.1	Angka kecelakaan transportasi darat		10	8	7	6	5	5
9.2	Persentase indeks pengendalian dan pengamanan lalulintas	90%	95%	95%	95%	95%	95%	95%
9.3	Cakupan pelayanan angkutan umum yang layak	75%	80	85	90	90	95	95
9.4	Persentase indeks kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
9.5	Persentase peningkatan pelayanan angkutan	85%	90%	90%	95%	95%	100%	100%
10	**Komunikasi dan Informatika**							
10.1	Persentase pemanfaatan layanan publik berbasis TIK	10,34%	24,14%	34,48%	51,71%	68,97%	100%	100%
11	**Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah**							
11.1	Persentase koperasi aktif	60%	61%	62%	63%	64%	65%	65%
11.2	Persentase UKM non BPR/LKM aktif	0	0	0	0	0	0	0

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
11.3	Persentase BPR/LKM aktif	0	0	0	0	0	0	0
11.4	Persentase Usaha Mikro dan Kecil	11%	13%	15%	17,50%	20%	22,50%	22,50%
12	**Penanaman Modal**							
12.1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	738	753	768	783	799	815	738
12.2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rp 129.991.397.742	Rp 132.591.225.697	Rp 135.243.050.211	Rp 137.947.911.215	Rp 140.706.869.439	Rp 143.521.006.828	Rp 188.071.397.742
12.3	Rasio daya serap tenaga kerja	3,065	3,1263	3,1889	3,2526	3,3177	3,3841	2,262
13	**Kepemudaan dan Olah Raga**							
13.1	Persentase cabor yang meraih medali di tingkat propinsi dan nasional	25%	25%	25%	30%	30%	35%	35%
14	**Statistik**							
14.1	Tersedianya Data Statistik Sektoral	60%	65%	70%	75%	80%	90%	90%
15	**Persandian**							
15.1	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	0	9%	15%	21%	24%	29%	29%
16	**Kebudayaan**							
16.1	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	5	7	9	11	13	15	15

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
		Kegiatan/tahun						
16.2	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	75,73	80,58	85,44	88,35	93,2	97,09	97,09
16.3	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	25	27	29	31	33	35	35
17	**Perpustakaan**							
17.1	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	18024	12400	12400	12900	12900	13400	64.000
17.2	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	9846	1400	1400	1400	1400	1400	7.000
17.3	Rasio perpustakaan persatuan penduduk	-	-	-	-	-	-	-
18	**Kearsipan**							
18.1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	10%	10%	10%	13%	15%	15%	63%
18.2	Peningkatan SDM pengelola kearsipan	2%	2%	3%	5%	5%	10%	25%
Layanan Urusan Pilihan								
1	**Pariwisata**							
1.1	Jumlah kunjungan wisata domestik	36.465 orang	36.465 orang	39.364 orang	43.300 orang	47.630 orang	52.393 orang	52.393 orang
1.2	Rata-rata lama kunjungan Wisata	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari	2 hari
1.3	PAD sektor pariwisata	102.000.000	102.000.000	302.000.000	405.000.000	608.000.000	710.000.000	710.000.000

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
2	**Pertanian**							
2.1	Persentase Pertumbuhan Produksi Pertanian Tanaman Pangan	2%	2,58%	2.67%	2.80%	2.92%	3.04%	3.04%
2.2.1	Persentase Peningkatan Pendapatan Petani	60%	60%	65%	70%	75%	80%	80%
2.4.	Persentase Pertumbuhan Produksi Peternakan	0,87%	0,65%	0.75%	0.85%	0.95%	1.05%	1.05%
5	**Perdagangan**							
5.1	Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal	6.303	6.450	6.603	6.753	6.903	7.053	7.053
6	**Perindustrian**							
6.1	Cakupan bina kelompok pengrajin	1.197	1.200	1.217	1.227	1.239	1.249	1.249
7	**Kelautan dan Perikanan**							
8.1	Produksi perikanan	3123,85 Ton	2975,89 Ton	3018,00 Ton	3059,02 Ton	3100,61 Ton	3142,80 Ton	3142,80 Ton
8.1.1	Produksi Perikanan Tangkap	2115,06 Ton	2136,21 Ton	2168,25 Ton	2200,77 Ton	2233,78 Ton	2267,30 Ton	2267,30 Ton
8.1.2	Produksi Perikanan Budidaya	1008,79 Ton	839,68 Ton	849,75 Ton	858,25 Ton	866,83 Ton	875,5 Ton	875,5 Ton
8.2	Konsumsi ikan	43,31 Kg/kapita/thn	39,92 Kg/kapita/thn	40,99 Kg/kapita/thn	42,65 Kg/kapita/thn	45,20 Kg/kapita/thn	47,80 Kg/kapita/thn	47,80 Kg/kapita/thn
8.3	Jumlah produk Olahan yang dihasilkan	1008,79 Ton	843,00 Ton	859,86 Ton	877,06 Ton	894,60 Ton	47,80 Ton	47,80 Ton

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
Penunjang Urusan								
1	**Perencanaan Pembangunan**							
1.1	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.2	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA	ADA
1.3	Persentase Program RKPD yang Selaras dengan RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	**Keuangan**							
2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3	**Kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan**							
3.2	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	11,67%	80%	80%	80%	80%	80%	22%
3.3	Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural							
	Eselon II yang mengikuti Pim TK. II	62%	62%	63%	63%	64%	64%	64%
	Eselon III yang mengikuti Pim TK. III	51%	51%	52%	52%	53%	53%	53%
	Staf dan Eselon II yang mengikuti Pim TK. IV	20%	20%	21%	21%	22%	22%	22%
4	**Penelitian dan pengembangan**							
4.2	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan.	0	10	20	30	40	50	50
ASPEK DAYA SAING								

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah							
	Kontribusi PAD terhadap Pendapatan	5,56	5,7	5,72	5,02	5,12	5,22	5,22
	Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur							
9	**Perhubungan**							
9.1	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan	75%	80%	85%	90%	95%	100%	100%
9.2	Persentase Pengelolaan pelayanan jasa terminal	80%	85%	90%	90%	95%	100%	100%
	Penataan Ruang							
3.2.3	Persentase ketersediaan dokumen rencana tata ruang sesuai ketentuan	0	-	-	-	80%	80%	80%
3.2.4	Persentase Jumlah Standar Acuan Pemanfaatan ruang sesuai peruntukan	0	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	100%
3.2.5	Persentase kelayakan bangunan yang dapat diberikan rekomendasi IMB dan SLF	3,94%	4,46%	4,93%	5,36%	5,76%	6,13%	6,13%
4	**Fokus Iklim Berinvestasi**							
4.1.	Rata-tata lama pelayanan perijinan	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari	1-2 hari
5.	**Fokus Sumber Daya Manusia**							
5.1.	Tingkat pengangguran terbuka	2,39	4,5	4	3,85	3,7	3,55	3,55

Sumber: Hasil Analis

Tabel 8.3.
Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Kota Bima

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurunnya tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% (2015: 11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	Persentase penduduk diatas garis kemiskinan	Cakupan jenis pelayanan dasar SPM Sosial	sosial
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkatnya persentase penduduk yang menjadi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan menjadi minimal 95% pada tahun 2019	Meningkat menjadi 95%			kesehatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya Kepesertaan Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) Bidang Ketenagakerjaan pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta pekerja formal dan 3,5 juta pekerja informal (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		tenaga kerja
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Disesuaikan dengan SPM Sosial	Meningkat menjadi 17,12%	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	SOSIAL	sosial
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurunnya jumlah keluarga sangat miskin yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat menjadi 2,8 juta pada tahun 2019 (2015: 3 juta).	Menurun menjadi 2,8 juta	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial		sosial

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya cakupan persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 70%	Meningkat menjadi 70%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KESEHATAN	kesehatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkatnya cakupan imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12-23 bulan untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 63%.	Meningkat menjadi 63%.	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	KESEHATAN	kesehatan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	KESEHATAN	kesehatan, PPKB
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses air minum layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses sanitasi layak untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 100%.	Meningkat menjadi 100%	Persentase rumah tinggal bersanitasi	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkatnya jumlah rumah tangga berpendapatan rendah yang dapat mengakses hunian layak pada tahun 2019 menjadi 18,6 juta untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah.	Meningkat menjadi 18,6 juta	Persentase luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan		perumahan rakyat & kawasan permukiman
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SD/MI/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 94,78% (2015: 91,23%).	Meningkat menjadi 94,78%	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	PENDIDIKAN	pendidikan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Murni SMP/MTs/ Sederajat pada tahun 2019 menjadi 82,2% (2015: 79,97%).	Meningkat menjadi 82,2%	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	PENDIDIKAN	pendidikan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 77,4%.	Meningkat menjadi 77,4%.	Cakupan penerbitan akta kelahiran		administrasi kependudukan & catatan sipil
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkatnya akses penerangan untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 100% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 100%	Persentase rumah tangga pengguna listrik		energi & sumber daya mineral

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkatnya jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah pada tahun 2019 menjadi 39 daerah (2015: 35 daerah).	Meningkat menjadi 39 daerah		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 151 ribu (2015: 43 ribu).	Meningkat menjadi 151 ribu	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SOSIAL	sosial, trantiblinmas
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Terlaksananya pendampingan psikososial korban bencana sosial hingga tahun 2019 menjadi 81,5 ribu (2015: 21,5 ribu).	Meningkat menjadi 81,5 ribu	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	SOSIAL	sosial

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkatnya jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus pada tahun 2019 menjadi 450 (2015: 100).	Meningkat menjadi 450		PENDIDIKAN	pendidikan
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurunnya indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi dari 58 menjadi 118,6 di 133 Kabupaten/Kota (2014:169,4).	Menurun menjadi 118,6		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			sosial
1	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Persentase belanja pendidikan (20%); Persentase belanja kesehatan (10%)		sosial
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		pangan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurunnya prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita pada tahun 2019 menjadi 17% (2013: 19,6 %).	Menurun menjadi 17%	Prevalensi balita gizi kurang	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Penanganan daerah rawan pangan		pangan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurunnya proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari pada tahun 2019 menjadi 8,5 % (2015: 17,4%).	Menurun menjadi 8,5 %	Proporsi penduduk dengan asupan kalori di bawah tingkat konsumsi minimum (standar yang digunakan Indonesia 2.100 Kkal/kapita/hari)		pangan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurunnya prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 32,9%).	Menurun menjadi 28%		KESEHATAN	kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Persentase balita gizi buruk/kurang gizi	KESEHATAN	kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil pada tahun 2019 menjadi 28% (2013: 37,1%).	Menurun menjadi 28%		KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif menjadi 50% pada tahun (2013: 38%).	Meningkat menjadi 50%		KESEHATAN	kesehatan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkatnya kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 92,5 (2014: 81,8), dan tingkat konsumsi ikan menjadi 54,5 kg/kapita/tahun pada tahun 2019 (2015: 40,9 kg/kapita/tahun).	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	Konsumsi ikan		pangan
2	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurunnya angka kematian ibu per 100 ribu kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 306 (2010: 346).	Menurun menjadi 306	Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkatnya persentase persalinan oleh tenaga kesehatan terampil pada tahun 2019 menjadi 95 % (2015: 91,51%).	Meningkat menjadi 95%	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 85 % (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85 %	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurunnya angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2019 menjadi 24 (2012-2013: 32).	Menurun menjadi 24	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkatnya persentase kabupaten/ kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi pada tahun 2019 menjadi 95% (2015: 71,2%).	Meningkat menjadi 95%	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurunnya prevalensi HIV pada populasi dewasa tahun 2019 menjadi <0,5% (2014: 0,46%).	Menurun menjadi <0,5%	Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurunnya prevalensi Tuberculosis (TB) per 100.000 penduduk pada tahun 2019 menjadi 245 (2013: 297).	Menurun menjadi 245	Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Angka kejadian Malaria		kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi malaria pada tahun 2019 menjadi 300 (2013: 212).	Meningkat menjadi 300			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi dengan eliminasi Kusta.	Meningkatnya jumlah provinsi dengan eliminasi kusta sebanyak 34 provinsi pada tahun 2019 (2013:20).	Meningkat menjadi 34 provinsi			kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkatnya jumlah kabupaten/kota dengan eliminasi filariasis pada tahun 2019 menjadi 35.	Meningkat menjadi 35.			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurunnya persentase merokok pada penduduk usia ≤18 tahun pada tahun 2019 menjadi 5,4% (2013: 7,2%).	Menurun menjadi 5,4%			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurunnya prevalensi tekanan darah tinggi pada tahun 2019 menjadi 24,3% (2013: 25,8%).	Menurun menjadi 24,3%		KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Tidak meningkatnya prevalensi obesitas pada penduduk usia 18 tahun ke atas pada tahun 2019 menjadi 15,4% (2013: 15,4%).	Menurun			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.	Meningkatnya jumlah Kabupaten/Kota yang memiliki puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa pada tahun 2019 menjadi 280 (2015: 80).	Meningkat menjadi 280		KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Terkendalinya laju prevalensi penyalahgunaan narkoba pada akhir tahun 2019 menjadi angka 0,02% (2015: 0,05%).	Menurun menjadi angka 0,02%			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi suatu cara pada tahun 2019 menjadi 66% (2012-2013 :61,9%).	Meningkat menjadi 66%		KESEHATAN	kesehatan, PPKB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkatnya cakupan angka pemakaian kontrasepsi semua cara pada perempuan usia 15-49 tahun untuk 40% penduduk berpendapatan terbawah pada tahun 2019 menjadi 65%.	Meningkat menjadi 65%	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	KESEHATAN	kesehatan, PPKB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkatnya angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern pada tahun 2019 menjadi 23,5% (2012-2013:18,3%).	Meningkat menjadi 23,5%	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	KESEHATAN	kesehatan, PPKB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya angka kelahiran pada remaja usia 15-19 tahun (age specific fertility rate/ASFR) pada tahun 2019 menjadi 38 (2012-2013: 48).	Menurun menjadi 38	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	KESEHATAN	kesehatan, PPKB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurunnya Total Fertility Rate (TFR) pada tahun 2019 menjadi 2,28 (2012:2,6).	Menurun menjadi 2,28	Total Fertility Rate (TFR)		kesehatan, PPKB
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurunnya unmeet need pelayanan kesehatan pada tahun 2019 menjadi 9,91% (2012-2013:11,4%).	Menurun menjadi 9,91%			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkatnya cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada tahun 2019 minimal 95% (2015:60%).	Meningkat menjadi minimal 95%			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		KESEHATAN	kesehatan
3	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	KESEHATAN	kesehatan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SD/MI berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 84,2% (2015:68,7%).	Meningkat menjadi 84,2%			pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkatnya persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B pada tahun 2019 menjadi 81% (2015:62,5%).	Meningkat menjadi 81%			pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkatnya Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat pada tahun 2019 menjadi 114,09% (2015: 108%).	Meningkat menjadi 114,09%	Angka partisipasi kasar	PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkatnya APK SMP/MTs/sederajat pada tahun 2019 menjadi 106,94% (2015: 100,7%).	Meningkat menjadi 106,94%	Angka partisipasi kasar	PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 8,8 tahun (2015: 8,25 tahun).	Meningkat menjadi 8,8 tahun	Angka rata-rata lama sekolah	PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkatnya APK anak yang mengikuti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada tahun 2019 menjadi 77,2% (2015: 70,06%).	Meningkat menjadi 77,2%	Angka partisipasi kasar	PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi		tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	4.1. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di SD/MI/paket A yang setara gender pada tahun 2019. 4.2 Rasio APM perempuan/laki-laki di SMP/MTs/ Paket B yang setara gender pada tahun 2019. 4.3 Rasio APK perempuan/laki-laki di SMA/SMK/MA yang setara gender pada tahun 2019. 4.4 Rasio APK perempuan/laki-laki pada PT dan PTA yang setara gender pada tahun 2019.	Meningkat	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A; Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B; Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/ Paket C	PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkatnya rata-rata angka melek aksara penduduk usia di atas 15 tahun pada tahun 2019 menjadi 96,1% (2015: 95,2%).	Meningkat menjadi 96,1%	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkatnya persentase angka melek aksara penduduk usia dewasa usia 15-59 tahun pada tahun 2019.	Meningkat	Angka melek huruf penduduk usia 15-24 tahun, perempuan dan laki-laki	PENDIDIKAN	pendidikan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat		PENDIDIKAN	pendidikan
4	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Guru yang memenuhi kualifikasi SI/DIV	PENDIDIKAN	pendidikan
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	Meningkatnya jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan pada tahun 2019 bertambah sebanyak 16 (2015: 19).	bertambah sebanyak 16			pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Rasio KDRT		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kasus kekerasan terhadap anak perempuan pada tahun 2019 (2013: 20,48 %).	Menurun menjadi kurang dari 20,48%			pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkatnya persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif pada tahun 2019 menjadi 70% (2015: 50%).	Meningkat menjadi 70%	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkatnya median usia kawin pertama perempuan (pendewasaan usia kawin pertama) pada tahun 2019 menjadi 21 tahun (2012: 20,1 tahun).	Meningkat menjadi 21 tahun	Rata-rata usia kawin pertama wanita		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurunnya ASFR 15-19 tahun pada tahun 2019 menjadi 38 tahun (2012: 48 tahun).	Menurun menjadi 38 tahun	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)		PPKB
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR (Hasil Pemilu 2014: 16,6%).	Meningkat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat			pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			pemberdayaan perempuan & perlindungan anak, PPKB

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurunnya unmeet need kebutuhan ber-KB pada tahun 2019 menjadi 9,9% (2012-2013: 11,4 %).	Menurun menjadi 9,9%	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)		kesehatan, PPKB
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern minimal 4 jenis pada tahun 2019 menjadi 85% (2012: 79,8 %).	Meningkat menjadi 85%			kesehatan, PPKB
5	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Persentase penduduk yang menggunakan HP/telepon		komunikasi & informatika
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkatnya kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri pada tahun 2019 menjadi 118,6 m3/detik (2015: 51,44 m3/detik) dan penyediaan air baku untuk 60 pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik		PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkatnya akses terhadap layanan air minum layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 70%).	Meningkat menjadi 100%	Proporsi rumah tangga dengan akses berkelanjutan terhadap air minum layak, perkotaan dan perdesaan	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkatnya akses terhadap sanitasi yang layak pada tahun 2019 menjadi 100% (2014: 60,9%).	Meningkat menjadi 100%	Persentase rumah tinggal bersanitasi	PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkatnya jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) menjadi 45.000 pada tahun 2019 (2015: 25.000).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)			pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Terbangunnya infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan, komunal pada tahun 2019 di 438 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.		PEKERJAAN UMUM	pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Peningkatan kualitas pengelolaan air limbah sistem setempat melalui peningkatan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) di 409 kabupaten/kota.	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota			pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.2.(a)	Kualitas air danau.	Pengelolaan kualitas air, baik di sungai, waduk, danau, situ, muara sungai, pantai termasuk perbaikan sistem monitoring hidrologis dan kualitas air dengan indikator membaiknya kualitas air di 15 danau, 5 wilayah sungai.	Meningkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air		lingkungan hidup
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Peningkatan kualitas air sungai sebagai sumber air baku menuju baku mutu rata-rata air sungai kelas II.	Meningkat	Peningkatan Indeks Kualitas Air		lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	Pemberian insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri termasuk penerapan prinsip reduce, mengembangkan reuse dan recycle, ser-ta pengembangan konsep pemanfaatan air limbah yang aman untuk pertanian (safe use of astewater in agriculture).	ada			lingkungan hidup
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	Internalisasi 108 Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang sudah disusun ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada			kehutanan, tata ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	Pembentukan jaringan informasi sumber daya air di 8 Wilayah Sungai.	8 WS			pekerjaan umum & penataan ruang
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau di 10 Wilayah Sungai	10 WS (skala nasional)			kehutanan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
6	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	Melanjutkan penataan kelembagaan sumber daya air, antara lain dengan: Mensinergikan pengaturan kewenangan dan tanggung jawab di semua tingkat pemerintahan beserta seluruh pemang-ku kepentingan serta menjalankannya secara konsisten; Meningkatkan ke-mampuan komunikasi, kerjasama, dan koordinasi antarlembaga serta antar-wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air yang telah terbentuk; dan Meningkatkan kapasitas kelembagaan pengelolaan sumber daya air.	ada			lingkungan hidup
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.2.1*	Bauran energi terbarukan.	Bauran energi terbarukan mencapai 10-16% pada tahun 2019.	10-16%			energi & sumber daya mineral
7	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	7.3.1*	Intensitas energi primer.	Intensitas energi primer (penurunan 1% per tahun) menjadi 463,2 SBM pada tahun 2019.	Menurun menjadi 463,2 SBM (skala nasional)			energi & sumber daya mineral

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDB per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Pertumbuhan PDRB		statistik
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.1.1.(a)	PDB per kapita.	Meningkatnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita per tahun menjadi lebih dari Rp 50 juta pada tahun 2019 (2015: Rp 45,2 juta).	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	PDRB per Kapita		statistik
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Pertumbuhan PDB riil per orang yang bekerja meningkat hingga tahun 2019.	Meningkat	Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja		tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	Persentase tenaga kerja formal mencapai 51% pada tahun 2019 (2015: 42,2%).	51%			tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	Akses Layanan Keuangan formal Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) 25% pada tahun 2019 (2014: 17,8%).	25%			koperasi, usaha kecil, & menengah
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Tingkat pengangguran terbuka		tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.5.2.(a)	Tingkat setengah pengangguran.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkatnya keterampilan pekerja rentan agar dapat memasuki pasar tenaga kerja.	Meningkat			tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkatnya kontribusi pariwisata menjadi 8% terhadap PDB pada tahun 2019 (2014: 4,2%).	Meningkat menjadi 8%	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB		pariwisata

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara menjadi 20 juta pada tahun 2019 (2014: 9 juta).	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	Kunjungan wisata		pariwisata
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Kunjungan wisata		pariwisata
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	PAD sektor pariwisata		pariwisata

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			tenaga kerja
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			penanaman modal
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Menurun (mendekat)			penanaman modal

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
8	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkatnya perluasan akses permodalan dan layanan keuangan melalui penguatan layanan keuangan hingga tahun 2019.	Meningkat			koperasi, usaha kecil, & menengah
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.1.(b)	Panjang pembangunan jalan tol.	Terbangunnya jalan tol sepanjang 1.000 km pada tahun 2019 (2014: 820 km).	1000 Km (skala nasional)			perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.1.(c)	Panjang jalur kereta api.	Bertambahnya panjang jalur kereta api sepanjang 3.258 km pada tahun 2019 (2014: 237).	Bertambah 3.258 km			perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(b)	Jumlah dermaga penyeberangan.	Meningkatnya jumlah dermaga penyeberangan menjadi 275 pada tahun 2019 (2014: 954 km).	Meningkat	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		perhubungan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.1.2.(c)	Jumlah pelabuhan strategis.	Terbangunnya pelabuhan strategis untuk menunjang tol laut pada 24 pelabuhan pada tahun 2019.	24 pelabuhan (skala nasional)	Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis		perhubungan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		perindustrian
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Meningkatnya laju pertumbuhan PDB industri manufaktur sehingga lebih tinggi dari pertumbuhan PDB (2015: 4,3%).	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB		perindustrian
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			tenaga kerja

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			perindustrian
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			perindustrian
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDB.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			pendidikan
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Presentase penduduk yang menggunakan hp/telepon		komunikasi & informatika
9	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1*	Koefisien Gini.	Koefisien Gini pada tahun 2019 menjadi 0,36 (2014: 0,41).	Menurun menjadi 0,36	Indeks Gini		sosial
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Tingkat kemiskinan pada tahun 2019 menjadi 7-8% dari jumlah penduduk (2015:11,13%).	Menurun menjadi 7-8%	Presentase penduduk di atas garis kemiskinan		sosial
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			sosial
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkatnya Indeks Kebebasan Sipil menjadi 87 pada tahun 2019 (2015: 80,3).	Meningkat menjadi 87			

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada			ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
10	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkatnya kepesertaan Sistem Jaminan Sosial Nasional bidang ketenagakerjaan untuk tenaga kerja formal pada tahun 2019 menjadi 62,4 juta dan tenaga kerja informal pada tahun 2019 menjadi 3,5 juta (2014: Formal 29,5 juta; Informal 1,3 juta).	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek		tenaga kerja
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	Tersedianya akses bagi 3,7 juta rumah tangga terhadap hunian yang layak dan terjangkau hingga tahun 2019	3,7 juta rumah tangga	Rasio rumah layak huni	PERUMAHAN RAKYAT	perumahan rakyat & kawasan permukiman
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(b)	Jumlah kawasan perkotaan metropolitan yang terpenuhi standar pelayanan perkotaan (SPP).	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 12 Kawasan Perkotaan Metropolitan hingga tahun 2019.	12 kawasan perkotaan metropolitan (skala nasional)			pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.1.1.(c)	Jumlah kota sedang dan kota baru yang terpenuhi SPP.	Terwujudnya pemenuhan standar pelayanan perkotaan kota yang aman, nyaman dan layak huni pada aspek permukiman paling sedikit di 20 Kota Sedang dan 10 Kota Baru hingga tahun 2019.	Paling sedikit 20 kota sedang dan 10 kota baru (skala nasional)			pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkatnya pangsa pengguna moda transportasi umum di perkotaan menjadi 32% hingga tahun 2019 (2014: 23%).	Meningkat menjadi 32%	Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum		perhubungan
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.2.1.(b)	Jumlah sistem angkutan rel yang dikembangkan di kota besar.	Dikembangkannya sistem angkutan rel di 10 kota besar hingga tahun 2019.	ada			perhubungan
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.1.(a)	Jumlah kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama.	Optimalisasi sedikitnya 20 kota sedang di luar Jawa yang diarahkan sebagai pengendali (buffer) arus urbanisasi dan sebagai pusat pertumbuhan utama yang mendorong keterkaitan kota dan desa.	Minimal 20 kota sedang (skala nasional)			pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.1.(b)	Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN).	Terwujudnya pembangunan 5 Metropolitan baru di Luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) hingga tahun 2019 (2014: 2).	5 metropolitan (skala nasional)			pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkatnya peran swasta, organisasi masyarakat dan organisasi profesi secara aktif, dalam Forum Dialog Perencanaan dan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat			pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Tersedianya lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada			pekerjaan umum & penataan ruang

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	Terwujudnya kota dan kawasan per-kotaan layak huni melalui pengembangan kota pusaka berbasis karakter sosial budaya (heritage city) di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, sedang, dan kecil, hingga tahun 2019.	ada			pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan mengunakan sarana prasarana t	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurunnya Indeks Risiko Bencana (IRB) mencapai 30% hingga tahun 2019.	Menurun menjadi 30%		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkatnya kapasitas masyarakat dan kelembagaan dalam membangun ketahanan kota terhadap perubahan iklim dan bencana (urban resilience).	Meningkat		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	Tersedianya sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketentraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			ketentraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkatnya cakupan penanganan sampah perkotaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 46%).	Meningkat menjadi 80%	Tersedianya fasilitas pengurangan sampah di perkotaan		lingkungan hidup
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.6.1.(b)	Jumlah kota hijau yang mengembangkan dan menerapkan green waste di kawasan perkotaan metropolitan.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim dan bencana melalui pengembangan dan penerapan green water, green waste (pengelolaan sampah dan limbah melalui reduce-reuse-recycle), green transportation khususnya di 7 kawasan perkotaan metropolitan, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada			lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.7.1.(a)	Jumlah kota hijau yang menyediakan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan metropolitan dan kota sedang.	Terwujudnya kota hijau yang berketahanan iklim, melalui penyediaan ruang terbuka hijau, paling sedikit di 12 kawasan perkotaan metropolitan dan 20 kota sedang, hingga tahun 2019.	Meningkat/ada	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB		pekerjaan umum & penataan ruang
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat/ada		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketentraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
11	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketentraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkatnya pengelolaan limbah B3 menjadi 150 juta ton pada tahun 2019 (2015: 100 juta ton).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	Jumlah limbah B3 yang dikelola		lingkungan hidup
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu (reduce, reuse, and recycle/3R) melalui beroperasinya 115 unit recycle center skala kota dengan kapasitas 20 ton per hari hingga tahun 2019 (2015: 1 unit).	20 ton per hari (skala nasional)	Presentase jumlah sampah yang terkurangi melalui 3R		lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkatnya jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001 (Sistem Manajemen Lingkungan/SML) hingga tahun 2019.	Meningkat			lingkungan hidup
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Dikembangkannya produk ramah lingkungan berupa kategori/kriteria produk yang teregister dalam pengadaan publik (Green Public Procurement, GPP) hingga tahun 2019.	Meningkat			lingkungan hidup
12	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			lingkungan hidup
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	Menurunnya Indeks Risiko Bencana melalui strategi pengurangan risiko bencana tingkat nasional dan daerah hingga tahun 2019.	ada		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat
13	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun		KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	ketenteraman, ketertiban umum, & perlindungan masyarakat

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup melalui peningkatan tutupan lahan/hutan hingga tahun 2019	Meningkat	Rasio luas kawasan tertutup pepohonan berdasarkan hasil pemotretan citra satelit dan survei foto udara		kehutanan
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	Berkurangnya luasan lahan kritis melalui rehabilitasi seluas 5,5 juta hektar di dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) dan Daerah Aliran Sungai (DAS) Prioritas hingga tahun 2019 (2015: 1,25 juta hektar).	5,5 juta ha (skala nasional)	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis		lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada			lingkungan hidup
15	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkatnya pemanfaatan keanekaragaman hayati untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat hingga tahun 2019.	Meningkat			lingkungan hidup

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			ketentera man, ketertiban umum, & perlindun gan masyarak at
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			ketentera man, ketertiban umum, & perlindun gan masyarak at

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			ketentera man, ketertiban umum, & perlindun gan masyarak at
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkatnya upaya keberlanjutan pembangunan sosial yang ditandai dengan terkendalinya kekerasan terhadap anak, perkelahian, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), dan meningkatnya keamanan yang tercermin dalam rendahnya konflik horizontal dan rendahnya tingkat kriminalitas.	Meningkat			ketentera man, ketertiban umum, & perlindun gan masyarak at

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun	Rasio KDRT		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurunnya prevalensi kekerasan terhadap anak pada tahun 2019 (2013: 38,62% untuk anak laki-laki dan 20,48% untuk anak perempuan).	Menurun	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Menurun			pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (2015: 3,6).	Meningkat menjadi 4,0			statistik

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			Keuangan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) atas laporan keuangan pada tahun 2019 untuk Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65% (2015 untuk K/L: 74%, Provinsi: 52%, Kabupaten: 30%, Kota:41%).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	Opini BPK		Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Skor B atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) untuk Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50% pada tahun 2019 (2015: K/L: 60,24%, Provinsi: 30,30%, Kabupaten/Kota: 2,38%).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%			Keuangan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Meningkatnya penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan menjadi 80% pada tahun 2019 (2013: 30%).	Menjadi menjadi 80%			Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik untuk Kementerian/Lembaga menjadi 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45% pada tahun 2019 (2015: untuk K/L: 47%, Provinsi: NA, Kabupaten/Kota: NA).	Meningkatk menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%			Keuangan
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatnya persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik untuk Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%			Balitbang Daerah

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkatnya keterwakilan perempuan di DPR dan DPRD (Hasil Pemilu 2014 untuk DPR: 16,6%).	Meningkat	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPR		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkatnya keterwakilan perempuan sebagai pengambil keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II) (2014: Eselon I = 20,66% dan Eselon II = 16,39%).	Meningkat	Presentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah		pemberdayaan perempuan & perlindungan anak

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Rasio bayi berakte kelahiran		administrasi kependudukan & catatan sipil
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkatnya cakupan pelayanan dasar kepemilikan akte lahir untuk penduduk 40% berpendapatan terbawah menjadi 77,4% pada tahun 2019.	Meningkat menjadi 77,4%	Cakupan penerbitan akta kelahiran		administrasi kependudukan & catatan sipil

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkatnya persentase anak yang memiliki akte kelahiran menjadi 85% pada tahun 2019 (2015: 75%).	Meningkat menjadi 85%	Rasio bayi berakte kelahiran		administrasi kependudukan & catatan sipil
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.	Meningkatnya kualitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ditandai dengan adanya sertifikasi PPID.	Meningkat			komunikasi & informatika

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
16	Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada			ketentera man, ketertiban umum, & perlindun gan masyarak at
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Persentase PAD terhadap pendapatan		Keuangan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Tercapainya rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB di atas 12% per tahun (2015: 10,7%).	Di atas 12%			Keuangan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkatnya penetrasi akses tetap pita lebar (fixed broadband) pada tahun 2019 di: - Perkotaan (20 Mbps) menjangkau 71% rumah tangga (2015: 38%) dan 30% populasi (2015: 16%). - Perdesaan (10 Mbps) menjangkau 49% rumah tangga (2015: 26%) dan 6% populasi (2015: 3%).	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkatnya penetrasi akses bergerak pita lebar (mobile broadband) dengan kecepatan 1 Megabyte per second (Mbps) pada tahun 2019 di: - Perkotaan menjangkau 100% populasi. - Perdesaan menjangkau 52% populasi.	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat	Proporsi rumah tangga dengan akses internet		komunikasi & informatika
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alternatif pembiayaan untuk pembangunan melalui skema Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (KPBU).	ada			Keuangan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	Tersedianya alokasi dana APBN untuk penyiapan, transaksi dan dukungan Pemerintah bagi proyek KPS/KPBU.	ada			Keuangan
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			statistik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			statistik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			statistik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			Perencanaan

NO. TPB	TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	NO. INDIKATOR	INDIKATOR TPB	TARGET (PERPRES 59/2017)	TARGET (PERPRES 59/2017) - ringkasan	INDIKATOR KINERJA PEMDA (PERMENDAGRI 86/2017)	SPM	JENIS URUSAN
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	ada			statistik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			statistik
17	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	(tidak ada dalam lampiran Perpres 59/2017)	Meningkat			statistik

Tabel 8.4.

Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal per Urusan

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
I	**PENDIDIKAN**											
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)	**100%**	98,50%	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 – 18 Tahun yang belum menyelesaiakan pendidikan dasar dan atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan	**100%**	93,85%	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara 6 Tahun yang berpartisipasi alam pendidikan PAUD	**100%**	94,54%	**100%**		**100%**		**100%**		**100%**	
II	**KESEHATAN**											
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu\hamil yang mendapatkan layanan Kesehatan	95%	100,19%	95%		95%		96%		96%	

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan Kesehatan	90%	103,06%	92%		92%		93%		95%	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan Kesehatan	90%	106,52%	90%		92%		92%		93%	
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah Balita yang mendapatkan layanan Kesehatan	85%	92,24%	85%		85%		86%		86%	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan	85%	60%	90%		93%		95%		100%	
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif,	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan	25%	118,16%	90%		95%		95%		100%	
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;	Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan	70%	72,49%	80%		80%		80%		80%	

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan	20%	0,13%	23%		25%		30%		35%	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Jumlah Warga Negara penderita *diabetes mellitus* yang mendapatkan	20%	0,22%	23%		25%		30%		35%	
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan	50%	23%	60%		70%		80%		95%	
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	CDR	50%	38,23%	60%		70%		80%		90%	
		CURRE RATE (KESEMBUHAN)	85%	92,22%	86%		87%		88%		90%	
		SUCCES RATE (KEBERHASILAN PENGOBATAN)	85%	92,22%	86%		87%		88%		90%	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human *Immunodeficiency Virus*	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan layanan kesehatan	50%	30,39%	60%		70%		80%		85%	

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
III	SEKSI GIZI											
1	Perbaikan Gizi Masyarakat	cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan dapat ASI Ekslusif	80%	78,.37%	80%		82%		82%		85%	
		Presentasi balita underweight	15%	15.,90%	15%		15%		14%		13%	
		Presentase balita stunting	32%	34.,14%	32%		32%		32%		32%	
		presentase balita wasting	3%	9,68%	3%		6%		6%		6%	
		presentase Ibu Hamil anemia	8,81%	8.,71%	<10%		<10%		<10%		<10%	
		Presentasi BBLR	4%	4,80 %	3%		3%		3%		3%	
		Presentasi bayi usia < 6 bulan mendapat ASI Eksklusif	50%	78.,37%	50%		50%		50%		50%	
2	Pencegahan & penanggulangan Gizi Mikro (KVA, AGB, GAKY)	Presentase Ibu Hamil dapat tablet tambah darah minimal 90 tablet maksimal 270 tablet	98%	95.,13%	98%		98%		98%		98%	
		Presentase Ibu Hamil Kurang Energi Kronik (KEK) dan makanan tambahan	95%	78.,55%	95%		95%		95%		95%	
		Presentase balita kurus yang mendapatkan makanan tambahan	82%	77.,12%	85%		88%		90%		93%	

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Presentase Remaja Putri mendapat Tablet tambah Darah	30%	54%	30%		35%		38%		40%	
		Presentase Bayi Baru Lahir yang mendapat Inisiasi Menyusui Dini	50%	68.,20%	50%		58%		60%		65%	
		Presentase balita yang ditimbang berat badannya	80%	75,57%	82%		82%		85%		85%	
		Presentase Balita yang mempunyai buku KIA/KMS	100%	98.,26%	100%		100%		100%		100%	
		Presentase Balita ditimbang yang naik berat badannya	80%	52,58%	80%		80%		80%		80%	
		Presentase balita ditimbang yang tdk naik berat badannya 2 kali berturut-turut (2T)	5,1%	5.,45%	5.,1%		5.,0%		5.,0%		5.,0%	
		Presentase balita 6 - 59 bulan mendapat kapsul vitamin A	90%	96.,05%	90%		90%		90%		90%	
		Presentase Ibu Nifas mendapat kapsul vitamin A	98%	93.,84%	98%		98%		98%		98%	

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Presentase Rumah Tangga mengkonsumsi garam beryodium	80%	66%	80%		80%		80%		80%	
		Presentase kasus balita gizi buruk yg mendapat perawatan	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
IV	**PEKERJAAN UMUM**											
1	Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari	75,88%	73,65%	78,40%		81,05%		83,83%		86,75%	
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	74,67%	78,83%	77,19%		79,84%		82,62%		85,54%	
IV	**PERUMAHAN RAKYAT**											
1	Penyediaan & rehabilitasi rumah yg layak huni bagi korban bencana Kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah	Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang yang memperoleh fasilitasi peyedidiaan rumah yang layak huni	100%	64,22%	100%		100%		100%		100%	

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
	Kabupaten/Kota											
V	**TRANTIBUMLINMAS**											
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakanhukum Perda dan perkada	100%	61,54%	100%		100%		100%		100%	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100%	-	100%		100%		100%		100%	
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	2,88%	100%		100%		100%		100%	
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	-	100%		100%		100%		100%	
5	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasikorban kebakaran	100%	77,42%	100%		100%		100%		100%	
VI	**SOSIAL**											

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti	Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yangmemperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	12.10%	100%		100%		100%		100%	
2	Rehabilitasi Sosial dasar anak telantar di luar panti	Jumlah anak telantar yang Memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	12.10%	100%		100%		100%		100%	
3	Rehabilitasi sosial dasar Lanjut usia terlantar diluar panti	Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti	100%	12.10%	100%		100%		100%		100%	
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti	Jumlah Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	100%	12.10%	100%		100%		100%		100%	
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap & paska bencana bagikorban bencana kab/kota	Jumlah Warga Negara korban bencana kab/kota yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100%	100%	100%		100%		100%		100%	
VII	**SUB-URUSAN BENCANA**											
1	Pelayanan Ketentramana dan Ketertiban Umum	Jumlah warga Negara yang memperoleh Pelayanan akibat dari penegakkan Peraturan Daerah / Peraturan Walikota per Jumlah warga Negara yang dilakukan penegakkan Peraturan Daerah /Peraturan	100%		100%		100%		100%		100%	

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
		Walikota kali 100%										
2	pelayanan informasi rawan bencana	Jumlah Penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana per seluruh penduduk di kawasna rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana kali 100%	100%		100%		100%		100%		100%	
3	pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaanterh adap bencana	Jumlah aparatur dan warga negara yang ikut pelatihan tambah jumlah warga Negara yang mendapat layanan pusdalops tambah Jumlah Warga Negara dikawasan rawan bencana kali 100%	100%		100%		100%		100%		100%	

No	Urusan/ Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Target dan Capaian Kinerja									
			2019		2020		2021		2022		2023	
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
4	pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Jumlah Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan KLB tambah Jumlah kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap penetapan darurat bencana tambah Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana tambah Jumlah Korban yang berhasil dicari ,ditolong dan dievakuasi per Jumlah seluruh penetapan status KLB tambah Jumlah seluruh penetapan status darurat bencana tambah Jumlah keseluruhan petugas dalam penangnan darurat bencana tambah perkiraan jumlah korban keseluruhan dari bencana kali 100%	100%		100%		100%		100%		100%	

Sumber: Hasil Analisis

BAB IX
PENUTUP

Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima disusun sebagai penjabaran atas Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota ke dalam program-program pembangunan secara selaras dengan kebijakan dan program pembangunan nasional dan provinsi, sinergi antar program dan sumber daya, serta terukur ketercapaian target kinerjanya. Dengan konsep pemikiran semacam ini, diharapkan, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki oleh Kota Bima ke dalam pembangunan daerah akan lebih tepat sasaran dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum, peningkatan daya saing daerah, serta pada akhirnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Dokumen Perubahan RPJMD pada dasarnya adalah perwujudan janji politik yang disampaikan oleh Walikota dan Wakil Walikota kepada rakyat pada saat kampanye. Dalam prosesnya, sasaran, strategi, arah kebijakan dan juga program pembangunan daerah beserta indikatornya dibahas bersama dengan anggota DPRD yang juga representasi dari rakyat. Kesepakatan politik yang muncul dan tertuang ke dalam dokumen Perubahan RPJMD ini kemudian menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan tahunan oleh Perangkat Daerah.

Oleh karena itu, pada akhir periode jabatan, Walikota dan Wakil Walikota mempunyai kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban. Selain itu, sebagai bagian dari penyelenggaraan system pemerintahan Indonesia, Walikota dan Wakil juga mempunyai kewajiban untuk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Dengan memohon ridho dan hidayah dari Allah SWT, kita semua berharap agar penjabaran Visi dan Misi yang ada dalam dokumen Perubahan RPJMD ini dapat dilaksanakan dengan baik

sehingga akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bima pada masa yang akan datang.

WALIKOTA BIMA,

MUHAMMAD LUTFI